

Volume 10 / 2019

PROSIDING

VENNAS AIHII

KONVENSI NASIONAL

ASOSIASI
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
INDONESIA

Denpasar, 22 – 25 Oktober 2019

Eksistensi Budaya dalam
Arus Globalisasi:
Pergulatan Identitas dan
Kearifan Lokal



ISSN: 2549-6689



Susunan Redaksi

Penasehat:

- Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional (PP AIHII) Periode 2017 – 2020
- Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana,

Reviewer:

- Dr. Agus Haryanto (*Universitas Jenderal Soedirman*)
- Dr. Asep Kamaluddin Nashir (*UPNV Jakarta*)
- Baiq Wardhani, Ph.D (*Universitas Airlangga*)
- Irawan Jati, M.Si, M.S.S. (*Universitas Islam Indonesia*)
- Ishaq Rahman, M.Si, AMIPR (*Universitas Hasanuddin*)
- Paramitaningrum, Ph.D (*Universitas Bina Nusantara*)
- Dr. phil. Shiskha Prabawaningtyas (*Universitas Paramadina*)
- Shofwan Al Banna Choiruzzad, Ph.D (*Universitas Indonesia*)
- Dr. Sugeng Riyanto (*Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*)
- Sylvia Yazid, Ph.D (*Universitas Parahyangan*)
- Prof. Dr. Tirta N. Mursitama, Ph.D (*Universitas Bina Nusantara*)

Editor:

- Ishaq Rahman (*Universitas Hasanuddin, Makassar*)
- Adi Putra Suwecawangsa (*Universitas Udayana*)
- Putu Ratih Kumala Dewi (*Universitas Udayana*)

Desain dan Layout:

- Al Fitrah Arysuci
- Raisa Ahdiyah

Diterbitkan oleh:

Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (c) 2019

Alamat Sekretariat:

Prodi HI FISIP UPN Jakarta, Jl. R.S. Fatmawati No. 1,
Pondok Labu, Jakarta Selatan, 12450, Indonesia.

Website: <http://www.aihii.or.id> E-mail: info@aihii.or.id

Foto Sampul: Panitia Vennas X AIHII, Prodi HI Universitas Udayana (cc. Adi P. Suwecawangsa)

ISSN: 2549-6689

Disclaimer:

Hak cipta setiap paper berada pada penulis. Asosiasi, reviewer, dan editor tidak bertanggung jawab terhadap substansi isi paper.

Sambutan Pengurus Pusat AIHII

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas terlaksananya Konvensi Nasional ke-10 Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) pada tanggal 23 – 24 Oktober 2019 di Universitas Udayana, Denpasar Bali. Acara yang berlangsung dalam suasana akademik dan penuh sentuhan budaya, berlangsung lancar dan sukses.

Konvensi Nasional X yang mengambil tema sentral “Eksistensi Budaya Dalam Arus Globalisasi: Pergulatan Identitas dan Kearifan Lokal” memiliki makna tersendiri, baik bagi entitas penstudi hubungan internasional di Indonesia, maupun bagi eksistensi AIHII sebagai suatu lembaga. Bagi penstudi hubungan internasional Indonesia, pada kesempatan ini kami memberikan penghormatan kepada tokoh-tokoh kunci dalam perkembangan studi hubungan internasional Indonesia, mereka-mereka yang telah memiliki kontribusi luar biasa bagi dinamika kajian ilmu ini di tanah air.

Empat orang tokoh yang kita kenang dan akan selalu kita kenang adalah Prof. Dr. Bob Sugeng Hadiwinata, Prof. Dr. H. Mappa Nasrun, MA, Prof. Dr. Juwono Sudarsono, dan Prof. Dr. Mohtar Mas’oed.

Sementara bagi AIHII sebagai institusi akademik, Konvensi Nasional kali ini adalah momentum yang bersejarah. Tahun ini memasuki usia satu dekade, organisasi yang menghimpun para penstudi dan pengelola institusi penyelenggara program studi ilmu hubungan internasional ini melaksanakan mandat untuk menyatukan visi bersama menuju terbentuknya studi hubungan internasional yang mandiri, demokratis, terbuka dan ilmiah.

Dengan ini, atas nama pengurus AIHII, saya menyambut gembira terbitnya prosiding Konvensi Nasional edisi ke-10. Semoga prosiding ini dapat menjadi bahan referensi yang memperkaya khasanah kajian ilmu hubungan internasional di tanah air.

Jakarta, 1 Desember 2019

Ketua Umum Pengurus Pusat

Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII)

Dr. Yusran, S.Sos, M.Si

Kata Pengantar

Tahun 2019 ini, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Udayana, Denpasar, Bali, memperoleh kepercayaan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Konvensi Nasional X Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia. Sebagai panitia pelaksana, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian, bantuan dan dukungan berbagai pihak, sehingga amanah ini dapat kami laksanakan.

Konvensi Nasional X AIHII berlangsung pada tanggal 22 – 25 Oktober 2019, bertempat di Udayana International Convention Center, Kampus Universitas Udayana, Jimbaran, Bali. Sebanyak 179 peserta dari 56 perguruan tinggi menghadiri pertemuan tahunan komunitas hubungan internasional seluruh Indonesia ini.

Tema yang diangkat dalam Konvensi Nasional tahun ini adalah Eksistensi Budaya dalam Arus Globalisasi: Pergulatan Identitas dan Kearifan Lokal. Tema ini sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia dewasa ini, yang masih terus menghadapi kegamangan dalam pertemuan antara globalisasi dan identitas lokal. Para nara sumber yang hadir dalam sesi seminar menyampaikan gagasan-gagasan konstruktif terkait pertemuan antara nilai-nilai global dan kearifan lokal.

Sesi seminar diisi oleh tiga nara sumber, yaitu: Prof. Dr. Mohtar Mas'ood (Guru Besar Universitas Gadjah Mada), Drs. Made Jiwa Atmaja, S.U. (Budayawan dan Penulis), serta Dr. Dino Patti Djalal (founder Foreign Policy Community Indonesia). Seminar dipandu oleh Dr.phil. Shishka Prabawaningtyas dari Universitas Paramadina, Jakarta.

Sidang Akademik diisi oleh pemaparan paper dan hasil penelitian terbaru dari dosen-dosen hubungan internasional, sebagaimana tersaji pada prosiding ini. Panitia pelaksana membuka call for paper sejak bulan Juni 2019. Sebanyak 124 abstrak telah diterima oleh panitia pelaksana dan tim konvensi AIHII. Setelah melalui proses review, sebanyak 121 abstrak diterima. Dari jumlah tersebut, terdapat 83 presenter yang hadir mempresentasikan gagasannya.

Sidang Akademik terbagi dalam empat kluster utama, yaitu Pariwisata dan Soft Power (14 presenter), Agama, Identitas, dan Hubungan Internasional (12 presenter), Globalisasi, Interdependensi dan Konflik (10 presenter), dan Komunitas Epistemik (47 presenter). Dari seluruh presenter, sebanyak 33 paper kemudian melewati proses review dan tersaji pada prosiding, sebagian presenter memilih medium lain untuk mempublikasikan paper mereka.

Dengan selesainya prosiding Konvensi Nasional X ini, panitia pelaksana secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Tim Editor dan Reviewer yang telah meluangkan waktu dalam penyusunan prosiding. Kami berharap, karya ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca, terutama dalam mendokumentasikan perkembangan kajian ilmu hubungan internasional di Indonesia.

Akhir kata, kami dari panitia pelaksana dan Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana menyampaikan permohonan maaf jika terdapat hal-hal kurang berkenan selama pelaksanaan Konvensi Nasional X. Semoga pertemuan ini memberi manfaat dan kita dapat bertemu lagi pada kegiatan AIHII lainnya.

Denpasar, 1 Desember 2019
Program Studi Hubungan Internasional
FISIP Universitas Udayana

Adi Putra Suwecawangsa, S.IP, MA
Ketua Panitia

Daftar Paper dan Kluster

Hal	Penulis (<i>Universitas</i>)	Judul
Pariwisata dan Soft Power		
1 – 10	Halifa Haqqi <i>(Universitas Slamet Riyadi Surakarta)</i>	Festival Budaya Solo sebagai Counter Hegemony di Era Globalisasi
13 – 21	Syahrul Awal <i>(Universitas Budi Luhur)</i>	Melestarikan Kearifan Lokal Guna Memajukan Pariwisata di Era Globalisasi
23 – 39	Sintia Catur Sutantri <i>(International Women University)</i>	Pencak Malioboro Festival Sebagai Soft Power dalam Promosi Pariwisata di Yogyakarta
41 – 51	Surwandono, Dolli Harahap, Sidik Jatmika <i>(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)</i>	Wisata Halal dan Stimulasi Pembangunan Supra-Struktur dan Infra Struktur Pendukung Pariwisata di Riau
53 – 65	Putu Ratih Kumala Dewi <i>(Universitas Udayana)</i>	Soft Power with Flavor: Boba Tea as Taiwan's Soft Power Tool to Enhance Nation Branding
Agama, Identitas dan Hubungan Internasional		
67 – 75	Zulkifli Harza, Bima Jon Nanda, Rifki Dermawan <i>(Universitas Andalas)</i>	Indonesia di Jepang Menata Ulang Kebangsaan Indonesia Melalui Perspektif Pengalaman Diaspora
77 – 86	Harryanto Aryodiguno <i>(Presiden University)</i>	Republik Rakyat China dari Perspektif Identitas Ke-Tionghoa-an Indonesia
87 – 97	Sofia Trisni, Ferdian, Hidayat Syah <i>(Universitas Andalas)</i>	Aplikasi Kecintaan terhadap Budaya Populer Korea : Sebuah Tinjauan terhadap Fenomena Korean wave di kota Padang
Globalisasi, Interdependensi, dan Konflik		
99 – 111	Elistania, Yusran, Nabil Ahamad Fauzi, Afri Asnelly <i>(Universitas Budi Luhur)</i>	Peran Pemuda dalam Melestarikan Kearifan Lokal untuk Kelestarian Lingkungan Pada Era Globalisasi

Hal	Penulis (<i>Universitas</i>)	Judul
113 – 131	Yusnarida Eka Nizmi <i>(Universitas Riau)</i>	Globalisasi dan Kompleksitas Industrial Park bagi Batam
133 – 144	Umi Oktyari Retnaningsih <i>(Universitas Riau)</i>	Imperialisme Melalui Disinformasi Makanan Sehat di Amerika: Studi Kasus Columbus
145 – 161	Diah Ayu Permatasari <i>(Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)</i> Noam Lazuardy <i>(National University of Management, Cambodia)</i>	Kerjasama Multilateral dalam Dalam perwujudan Energi Berkelanjutan melalui Perilaku Masyarakat
Komunitas Epistemik Masyarakat Transnasional dan Isu Non Tradisional		
163 – 177	Yessi Olivia <i>(Universitas Riau)</i>	Hak Asasi Manusia Indonesia Setelah Reformasi: Kasus Gagalnya Ratifikasi Statuta Roma untuk Pengadilan Kriminal Internasional
179 – 196	Tatok Djoko Sudiarto, Asriana Issa Sofia <i>(Universitas Paramadina)</i>	Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Berbasis Pendekatan Identitas Lokal Masyarakat Terpapar Bencana.
197 – 209	Hizra Marisa, Andree <i>(Universitas Abdurrab)</i>	Analisa Implementasi Smart City Madani Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Upaya Sinergitas Program Asean Smart Cities Network (ASCN) 2030
211 – 227	Ibnu Zulian, Stivani Ismawira Sinambela <i>(Universitas Potensi Utama)</i>	Analisis Kontribusi dan Hambatan Kerjasama Sister City antara Pemerintah Kota Medan dan Rostov on Don (Rusia)
229 – 247	Asep Saipudin, Sri Muryantini, Herra Dwi Maghfiroh <i>(Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta)</i>	Internalisasi Rejim Pembangunan Berkelanjutan Melalui Kebijakan Green Industry Era Pemerintahan Joko Widodo
Komunitas Epistemik Kajian Eropa		
249 – 259	Ali Muhammad <i>(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)</i>	Status Rusia Sebagai Great Power: Politik Luar Negeri Rusia Era Presiden Vladirmir Putin
261 – 270	Mutia Hariati Hussin <i>(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)</i>	Eropanisasi di Uni Eropa

Hal	Penulis (<i>Universitas</i>)	Judul
Komunitas Epistemik Kajian Keamanan Internasional		
271 – 287	Andrea Abdul Rahman Azzqy (<i>Universitas Budi Luhur</i>)	Pembangunan Tarakan Sebagai Pangkalan Aju Militer di Wilayah Kalimantan Utara
289 – 300	Nadya Ayu Arminta, Irmawan Effendi (<i>Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta</i>)	Kepentingan Nasional Korea Utara di KTT Antar-Korea 2018
301 – 314	Anggun Puspitasari (<i>Universitas Budi Luhur</i>)	Penguatan Enmeshment Strategy Indonesia dalam IORA (<i>Indian Ocean Rim Association</i>) Menuju Integrasi Institusi Pengamanan Maritim Regional di Kawasan Samudra Hindia
315 - 323	Sugeng Riyanto (<i>Universitas Muhammadiyah Yogyakarta</i>)	Sistem Senjata Otonom dan Problem Legalitas
325 – 338	Sugito (<i>Universitas Muhammadiyah Yogyakarta</i>)	Kegagalan Pendekatan <i>Hybrid Peace</i> dalam Misi Reformasi Sektor Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Leste Tahun 1999-2006
Komunitas Epistemik Kajian Perbatasan		
339 – 351	Rendy Prayuda (<i>Universitas Islam Riau</i>)	Ancaman Keamanan Non Tradisional di Wilayah Perbatasan: Sebuah Tinjauan Terhadap Riau dan Malaka
353 – 373	Iva Rachmawati (<i>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta</i>)	Komunitas Epistemik dalam Isu Perbatasan Indonesia Malaysia: Camar Bulan dan Tanjung Datu
Komunitas Epistemik Kajian Timur Tengah		
375 – 394	Sidik Jatmika (<i>Universitas Muhammadiyah Yogyakarta</i>)	Saudi's Opening Policy for Women Rights: Considerations and Prospects
Komunitas Epistemik Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi Kontemporer		
395 – 404	Ishaq Rahman (<i>Universitas Hasanuddin</i>) Claudia Conchita Renyonet (<i>Universitas Cenderawasih</i>)	Peranan Pemerintah Kota sebagai Sub-state Actors Dalam Diplomasi

Hal	Penulis (<i>Universitas</i>)	Judul
405 – 415	Afrizal <i>(Universitas Riau)</i>	Politik Luar Negeri Indonesia Era Joko Widodo Dalam Isu Lingkungan Global
Komunitas Epistemik Asosiasi Studi Islam dan Hubungan Internasional		
417 – 427	Ali Musa Harahap, Fadhlan Nur Hakiem, Akbar Kurniadi <i>(Universitas Darussalam Gontor)</i>	The Vulnerability of Muslim States: First Acquaintance
429 – 440	Siti Muslikhati <i>(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)</i>	Pandangan Islam Terhadap Liberalisasi Budaya: Titik Tengah Diskursus Kemajemukan dan Persatuan
Komunitas Epistemik Kajian Asia Timur dan Pasifik		
441 – 451	Nuriyeni K. Bintarsari <i>(Universitas Jenderal Soedirman)</i>	Sovereignty and the Right of Citizenship: The Case Study of the Rohingya Ethnic in Myanmar
453 - 464	Uni Wahyuni Sagena <i>(Universitas Mulawarman)</i> Ishaq Rahman <i>(Universitas Hasanuddin)</i>	Continuity and Change dalam Politik Luar Negeri Jepang Terhadap Asia Tenggara Paska Doktrin Abe

Daftar Isi

Susunan Redaksi.....	ii
Sambutan Pengurus Pusat AIHII.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Paper dan Kluster.....	vi
Daftar Isi.....	x
Festival Budaya Solo sebagai <i>Counter Hegemony</i> di Era Globalisasi.....	1
Abstrak.....	1
Pendahuluan.....	1
Metode Penelitian.....	3
Tinjauan Pustaka: Konsep Globalisasi dan Counter Hegemony	3
Hasil dan Pembahasan.....	5
Penutup.....	10
Bibliografi.....	10
Melestarikan Kearifan Lokal Guna Memajukan Pariwisata di Era Globalisasi	13
Abstrak.....	13
Pendahuluan.....	14
Metode Penelitian.....	16
Hasil dan Pembahasan.....	18
Penutup.....	20
Bibliografi.....	21
Pencak Malioboro Festival Sebagai <i>Soft Power</i> Dalam Promosi Pariwisata di Yogyakarta.....	23
Abstrak.....	23
Pendahuluan.....	23
Metode Penelitian.....	25
Review Literatur/Tinjauan Pustaka	26
Hasil dan Pembahasan.....	28
Penutup.....	35
Referensi.....	36

Wisata Halal dan Stimulasi Pembangunan Supra-Struktur dan Infra Struktur Pendukung Pariwisata di Riau	41
Abstrak	41
Latar Belakang	41
Studi Pustaka	42
Metode penelitian	45
Pembahasan	45
Kesimpulan	49
Bibliografi	49
Soft Power With Flavour : Boba Tea As Taiwan’s Soft Power Tool To Enhance Nation Branding	53
Abstrak	53
Pendahuluan	53
Metode Penelitian	55
Review Literatur/Tinjauan Pustaka	55
Hasil dan Pembahasan	59
Penutup	63
Bibliografi	64
Indonesia di Jepang Menata Ulang Ke-Bangsa-an Indonesia Melalui Perspektif Pengalaman Diaspora	67
Abstrak	67
Pendahuluan	67
Metode Penelitian	68
Review Literatur/Tinjauan Pustaka	69
Pembahasan	70
Penutup	74
Bibliografi	74
Republik Rakyat China dari Perspektif Identitas ke-Tionghoa-an Indonesia	77
Abstrak	77
Pendahuluan	77
Ke-Tionghoa-an Indonesia Tidak Relevan Untuk Menjelaskan Hubungan Tionghoa dan China	79
Perspektif Tionghoa Indonesia terhadap China	82
Penutup	86
Bibliografi	86

Aplikasi Kecintaan terhadap Budaya Populer Korea: Sebuah Tinjauan terhadap Fenomena <i>Korean Wave</i> di Kota Padang	87
Abstrak.....	87
Pendahuluan.....	88
Metode Penelitian.....	89
Tinjauan Pustaka	91
Hasil dan Pembahasan	92
Diskusi	94
Penutup	96
Bibliografi.....	97
Peran Pemuda dalam Melestarikan Kearifan Lokal untuk Kelestarian Lingkungan Pada Era Globalisasi.....	99
Abstrak.....	99
Pendahuluan.....	100
Metode Penelitian.....	102
Hasil dan Pembahasan	104
Penutup	110
Bibliografi.....	111
Globalisasi dan Kompleksitas Industrial Park Bagi Batam.....	113
Abstrak.....	113
Pendahuluan.....	113
Metode Penelitian.....	115
Tinjauan Pustaka	116
Hasil dan Pembahasan	118
Penutup	127
Bibliografi.....	127
Imperialisme Melalui Disinformasi Makanan Sehat di Amerika: Studi Kasus Columbus	133
Abstrak.....	133
Pendahuluan.....	133
Metode Penelitian.....	135
Tinjauan Pustaka	136
Hasil dan Pembahasan	138
Penutup	143
Bibliografi.....	143

Kerja sama Multilateral dalam Dalam Perwujudan Energi Berkelanjutan melalui Perilaku Masyarakat.....	145
Abstrak.....	145
Pendahuluan	146
Metode Penelitian	149
Tinjauan Pustaka.....	150
Hasil dan Pembahasan	152
Kesimpulan.....	161
Bibliografi	161
Hak Asasi Manusia Indonesia setelah Reformasi: Kasus Gagalnya Ratifikasi Statuta Roma untuk Pengadilan Kriminal Internasional ...	163
Abstrak.....	163
Pendahuluan	163
Pembahasan.....	164
Penutup.....	174
Bibliografi	174
Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Berbasis Pendekatan Identitas Lokal Masyarakat Terpapar Bencana	179
Abstract	179
Pendahuluan	179
Komparasi Masyarakat Terpapar Bencana	181
Indonesia dan Bencana Likuifaksi Palu, Sigi dan Donggala	184
Jepang Merespon Bencana.....	186
Diskusi komparasi	191
Kesimpulan.....	193
Bibliografi	194
Analisa Implementasi Smart City Madani Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Upaya Sinergitas Program Asean Smart Cities Network (ASCN) 2030.....	197
Abstract	197
Pendahuluan	197
Metode Penelitian	199
Review Literatur/Tinjauan Pustaka	199
Konsep Implementasi.....	202
Hasil dan Pembahasan	204
Penutup.....	208
Bibliografi	208

Analisis Kontribusi dan Hambatan Kerjasama <i>Sister City</i> antara Pemerintah Kota Medan dan Rostov on Don (Rusia)	211
Abstrak.....	211
Pendahuluan.....	211
Metode Penelitian.....	213
Review Literatur/Tinjauan Pustaka	214
Hasil dan Pembahasan	216
Penutup	225
Penghargaan.....	225
Bibliografi.....	225
 Internalisasi Rejim Pembangunan Berkelanjutan Melalui Kebijakan Green Industry Era Pemerintahan Joko Widodo	229
Abstrak.....	229
Pendahuluan.....	229
Metode Penelitian.....	231
Review Literatur/Tinjauan Pustaka	231
Hasil dan Pembahasan	233
Koordinasi antar lembaga	244
Penutup	245
Bibliografi.....	246
 Status Sebagai Great Power: Politik Luar Negeri Rusia Era Presiden Vladimir Putin	249
Abstrak.....	249
Pendahuluan.....	249
Metode Penelitian.....	251
Review Literatur/Tinjauan Pustaka	251
Hasil dan Pembahasan	254
Penutup	258
Bibliografi.....	258
 Eropanisasi di Uni Eropa	261
Abstrak.....	261
Pendahuluan.....	262
Metode Penelitian.....	264
Konsep Eropanisasi	265
Analisis Eropanisasi di Uni Eropa	266
Penutup	268
Bibliografi.....	269

Pembangunan Tarakan Sebagai Pangkalan Aju Militer di Wilayah Kalimantan Utara.....	271
Abstract	271
Latar Belakang.....	271
Kebijakan Pembinaan dan Penggunaan Kekuatan TNI	279
Penggunaan Kekuatan dalam Pembangunan Pangkalan Aju	280
Pangkalan Aju Udara dan Pangkalan Aju Laut	282
Kesimpulan.....	284
Bibliografi	286
Kepentingan Nasional Korea Utara di KTT Antar-Korea 2018.....	289
Abstrak	289
Pendahuluan	289
Tinjauan Pustaka.....	290
Hasil dan Pembahasan	295
Penutup.....	298
Bibliografi	298
Penguatan Enmeshment Strategy Indonesia dalam IORA Menuju Integrasi Institusi Pengamanan Maritim Regional di Kawasan Samudra Hindia.....	301
Abstract	301
Pendahuluan	301
Tinjauan Pustaka.....	305
Hasil dan Pembahasan	309
Penutup.....	312
Bibliografi	313
Sistem Senjata Otonom dan Problem Legalitas.....	315
Abstract	315
Pendahuluan	315
Metode	316
Revolusi Teknologi Persenjataan	316
Teknologi Sistem Senjata Otonom	318
Sistem Senjata Otonom dan persoalan hukum	320
Kesimpulan.....	322
Bibliografi	322

Kegagalan Pendekatan <i>Hybrid Peace</i> dalam Misi Reformasi Sektor Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Leste Tahun 1999-2006.....	325
Abstrak.....	325
Pendahuluan.....	325
Metode Penelitian.....	329
Security Sector Reform dan Pergeseran Berpusat pada Negara ke Hibridasi	330
Faktor Penghambat Keterlibatan Pemilik Lokal dalam Reformasi Sektor Keamanan PBB di Timor Leste	333
Kesimpulan	336
Bibliografi.....	337
Ancaman Keamanan Non Tradisional di Wilayah Perbatasan: Sebuah Tinjauan Terhadap Riau dan Malaka.....	339
Abstrak.....	339
Pendahuluan.....	339
Review Literatur.....	341
Metode Penelitian.....	343
Hasil dan Temuan Penelitian	343
Kesimpulan	350
Bibliografi.....	350
Komunitas Epistemik dalam Isu Perbatasan Indonesia Malaysia: Camar Bulan dan Tanjung Datu	353
Abstrak.....	353
Pendahuluan.....	353
Metode Penelitian.....	355
Review Literatur/Tinjauan Pustaka	355
Hasil dan Pembahasan	358
Penutup	370
Bibliografi.....	371
Saudi's Opening Policy for Women Rights : Considerations and Prospects	375
Abstract.....	375
Introduction.....	375
Literature Review	376
Theoretical Approach.....	378
Methodology	379
Results	379

Discussion	391
Conclusion.....	392
References	393
Peranan Pemerintah Kota Makassar dan Jayapura sebagai <i>Sub-state</i>	
<i>Actors</i> Dalam Diplomasi.....	395
Abstrak.....	395
Pendahuluan	395
Metode Penelitian	397
Telaah literatur: konsep paradiplomasi dan diplomasi kota.....	397
Analisis Peran Kota Dalam Diplomasi	399
Penutup.....	402
Bibliografi	403
Politik Luar Negeri Indonesia Era Joko Widodo Dalam Isu Lingkungan	
Global.....	405
Abstrak.....	405
Pendahuluan	405
Metode Penelitian	407
Tinjauan Pustaka.....	407
Hasil dan Pembahasan	408
Penutup.....	414
Bibliografi	414
The Vulnerability of Muslim States: First Acquaintance.....	417
Abstract	417
Introduction	417
Results and Discussion	418
Conclusion: An Islamic Perspective	424
Bibliografi	426
Pandangan Islam Terhadap Liberalisasi Budaya: Titik Tengah Diskursus	
Kemajemukan dan Persatuan	429
Abstract	429
Pendahuluan	429
Diskursus Budaya Lokal dan Budaya Global	430
Paradoks Budaya di Balik Penjajahan Barat Atas Dunia Islam	431
Pandangan Islam Terhadap Kemajemukan Budaya dan Kebutuhan Persatuan	432

Metode Mengelola Kemajemukan Budaya dalam Bingkai Persatuan di Era Nabi dan Khalafaur Rasyidin.....	434
Membangun Kembali Peradaban Islam.....	435
Penutup	439
Bibliografi.....	439
Sovereignty and the Right of Citizenship: The Case Study of the Rohingya Ethnic in Myanmar	441
Abstract.....	441
Introduction.....	441
Research Method.....	443
Literature Review	443
Results	447
Conclusion	449
Bibliographies	450
Continuity and Change dalam Politik Luar Negeri Jepang terhadap Asia Tenggara Paska Doktrin Abe.....	453
Abstrak.....	453
Pendahuluan.....	453
Metode Penelitian.....	455
Tinjauan Pustaka	455
Hasil dan Pembahasan	457
Diskusi	459
Penutup	460
Bibliografi.....	460

Festival Budaya Solo sebagai *Counter Hegemony* di Era Globalisasi

Halifa Haqqi¹

¹Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Corresponding e-mail: halifahaqqi@gmail.com

Abstrak



Globalization is identical to the hegemony of superpower country. Superpower countries create culture of global consumerism and new socio-political scheme. Regional identity has the potential to become fragile. Culture as soft power becomes an important aspect in the counter hegemony. The success of cultural development shows the strength of culture that is able to bring up people's sense of belonging to the culture. Surakarta City, popularly known as Solo City, is a unique region with cultural activities. Solo City has various cultural festivals that seem to reverse the logic of foreign hegemony towards Solo, as an effort to 'bring the local into the global'. This study aims to find out how the Solo City Cultural Festival acts as a counter hegemony in the era of globalization. The purpose of this study was to determine the relationship of cultural identity in its role as a counter hegemony. The research method is a qualitative descriptive study conducted with a phenomenological and ethnographic approach. The main theory used is counter hegemony theory supported by Stephen M Magu's research (2015) related to the implementation of vice versa from global and local relations. The results of the study found that cultural festivals play a role as a forum for a variety of actor resources that are able to create solutions to the problems of foreign hegemony faced together. The involvement of various elements of the community in the cultural festival makes the community have a sense of belonging to local wisdom.

Keyword

Counter hegemony, Culture, Globalization, Local, Solo

Pendahuluan

Teknologi yang semakin berkembang mendorong semakin intensnya globalisasi. Imbasnya, kompleksitas dan interdependensi ekonomi, sosial hingga budaya juga semakin intens. Kondisi ini menempatkan entitas global pada situasi dan realitas yang sama, berupa interaksi konstan sebagai proses perubahan yang berlangsung simultan (Köchler, 2000 : 3-18). Interdependensi global ini berlangsung di seluruh negara, tanpa terkecuali. Negara besar atau kecil, lemah atau kuat, akan harus mengalami perubahan sebagai dampak dari perkembangan globalisasi multidimensi. Dinamika negara-negara dunia ini secara bersamaan turut merapuhkan identitas kedaerahannya.

Era globalisasi mempengaruhi kondisi nasionalitas, budaya dan identitas bangsa. Dalam penelitiannya, Tomlinson menemukan bahwa globalisasi dan budaya sesungguhnya dua hal yang akan selalu saling bersinggungan. Globalisasi terletak pada jantung budaya modern, sementara praktik budaya terletak pada jantung globalisasi (Tomlinson, 1999 : 1). Konsep ini berarti risiko budaya itu dapat terjadi akibat interaksi globalisasi yang berlangsung secara paralel. Budaya pada kelompok tertentu selalu mengalami interaksi dengan dinamika sosial, politik dan ekonomi. Hal ini yang menjadikan aspek-aspek ini saling berpengaruh.

Setiap negara memiliki pilihan untuk diam dan terbawa arus globalisasi atau melakukan perlawanan terhadapnya. Bagi yang ingin melawan, mereka membutuhkan alat untuk melakukan *counter hegemony*. Satu aspek penting yang dianggap berpotensi sebagai *counter hegemony* adalah budaya. Budaya dideskripsikan sebagai “*soft-power*” (Luce, 1941: 62). Hal ini berarti bahwa budaya punya kekuatan dalam menantang hegemoni asing dan menjaga eksistensi nilai-nilai lokal. Hanya saja, tingkat kekuatan budaya dalam merasionalkan hegemoni masih sangat relatif. Seberapa kuat budaya sebagai *soft power* bergantung pada kekuatan budaya itu sendiri (Nye, 2004).

Pendekatan budaya bertujuan menciptakan keunikan lokal. Pemahaman serta keterlibatan intens pada aktivitas budaya dan identitas budaya membutuhkan sinergi dari berbagai elemen masyarakat. Pada konteks inilah, pemerintah daerah dapat mengambil peran penting. Salah satu daerah yang menunjukkan gairah dalam menghadapi hegemoni era globalisasi adalah Kota Surakarta. Kota Surakarta yang juga populer dengan sebutan Kota Solo adalah wilayah dengan keunikan khas dari aktivitas kebudayaannya yang kental.

Lash dan Urry (1994) dalam penelitiannya menemukan bahwa peran industri budaya adalah aspek yang sangat penting untuk membangun citra daerah yang kuat. Di Kota Solo, citra kota budaya diusung sebagai ciri khas menuju identitas global melalui aneka produk budaya (Lash and Urry, 1994). Hal ini sekaligus mempertegas adanya hubungan lokalitas, budaya dan ekonomi yang saling terkait. Salah satu usaha membangun citra budaya di Kota Solo ini sangat tampak dari penyelenggaraan aneka festival budaya yang menjadi agenda rutin.

Festival Budaya Kota Solo menjadi komoditas untuk melancarkan geoekonomi dan geopolitik dalam menangkal hegemoni asing yang masuk seiring dengan semakin ramainya globalisasi. Dalam mendukung hal tersebut, Kota Solo telah memiliki *tagline* berupa “*Solo the Spirit of Java*”. *Tagline* ini secara tersirat membawa sebuah pesan budaya bahwa Solo ingin mewujudkan sebuah Kota masa depan yang berpijak pada Solo masa lalu. “Solo masa depan adalah Solo masa lampau” menjadi ikon turunan untuk mewujudkan visi misi dari “*Solo the Spirit of Java*”.

Untuk menjual Kota Solo sebagai kota dengan identitas budaya yang kental, diadakanlah serangkaian kegiatan berbalut festival budaya. Festival budaya dianggap sebagai kegiatan yang mampu merangkul berbagai aspek dan elemen masyarakat. Ikon ini sekaligus menjadi isyarat bahwa Solo ingin mewujudkan kembali kesejahteraan dan kejayaan masa lalu melalui pemikiran, aktifitas dan simbol nilai-nilai budaya yang dimiliki (Satriya, 2017 : 44). Hal inilah yang diulas dalam penelitian ini, yakni untuk mengetahui bagaimana peran festival budaya Solo sebagai *counter hegemony* di era globalisasi.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan didukung pendekatan fenomenologi. Metode ini menyajikan hasil penelitian dalam bentuk naratif deskriptif bersifat menyeluruh disertai interpretasi seluruh aspek kehidupan guna menggambarkan kompleksitas kehidupan tersebut. Fokus penelitian terletak pada aspek festival budaya yang diselenggarakan dalam rangka memperkuat modal sosial dan kearifan lokal masyarakat Kota Solo sebagai perwujudan upaya *counter hegemony*.

Tinjauan Pustaka: Konsep Globalisasi dan Counter Hegemony

Globalisasi didefinisikan sebagai perluasan, pendalaman serta percepatan dari interkoneksi dan interdependensi dunia yang terletak di berbagai aspek kehidupan, baik dari aspek budaya hingga kriminal, keuangan hingga spiritual (Archarya, 2013 : 937). Berbagai aspek kehidupan manusia hampir tak bisa lepas dari dampak proses pengglobalan ini. Globalisasi turut bertumbuh seiring dengan perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat.

Globalisasi ini pun sering dikaitkan dengan aspek yang mempengaruhi transisi hegemoni (Jessop, 2002:113). Globalisasi menjadi sebuah jalan internasionalisasi yang selama ini lebih banyak berbasis pada transformasi modal dalam skema ekonomi politik. Skema ini berlangsung sangat luas dan masif sehingga dampaknya pun juga cukup besar. Kondisi ini menyebabkan globalisasi banyak bersinggungan dengan struktur kekuasaan dan pada akhirnya berpengaruh pada negara.

Globalisasi menjadi konsep yang menyeluruh. Bagi suatu negara, kehadiran proses ini tidak bisa diabaikan. Globalisasi mendorong hadirnya meta narasi yang berkaitan dengan identitas nasional. Berbagai kekuatan dapat melebur dalam proses ini. Terutama, integrasi pasar yang berlangsung dalam globalisasi mengikis nilai-nilai bangsa dan nasional hingga menggantikannya dengan narasi global (Medovoi, 2005: 169).

Proses ini dapat dikategorikan dalam dua bentuk tren, yakni suatu pembangunan yang mengarah pada keseragaman budaya global, atau adanya tumpang tindih ideologi yang saling memperkuat. Pada interkoneksi global, pengaruh yang paling kuat akan

dipegang oleh budaya yang paling kuat pula. Nilai-nilai ekonomi, teknologi dan militer bergantung pada superioritas (Koechler, 2018). Hal inilah yang menjadi sorotan dinamika global dan menempatkan globalisasi sebagai bentuk lain dari hegemoni.

Hegemoni sendiri adalah sebuah diskursus yang oleh Jonathan Joseph diartikan sebagai sebuah proses berkesinambungan antara berbagai faktor yang menjadi penyebab terbentuknya *outcome* tertentu (Joseph, 2002: 162). Merujuk pada arti etimologi, hegemoni berarti “memimpin”. Roger Simon mengatakan bahwa hegemoni bukan merupakan hubungan dominasi menggunakan kekuasaan, akan tetapi suatu hubungan persetujuan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis.” (Simon, 1999: 19).

Secara ontologis, hegemoni adalah usaha-usaha yang muncul secara spesifik dan terarah demi menciptakan struktur tertentu yang dikehendaki. Pada poin ini, hegemoni memiliki dasar objektif berupa kondisi material tertentu. Pondasi hegemoni berpijak pada ide pokok untuk membangun struktur sosial yang dapat menciptakan kondisi sesuai dengan yang diinginkan (Joseph, 2002: 214-15).

Antonio Gramsci berpandangan bahwa hegemoni adalah proyek kekuasaan yang dilakukan dengan metode persuasif dan koersif. Bagi Gramsci, hegemoni tidak cuma dimaknai sebagai instrumen atau strategi revolusi dengan meletakkan negara sebagai titik akhirnya. Lebih dari itu, hegemoni dianggap sebagai sarana untuk memahami masyarakat yang bertujuan untuk mengubah masyarakat tersebut (Simon, 1999: 99).

Hegemoni tidak hanya memproduksi kekuasaan saja, melainkan juga membuat bangunan aliansi sosial-politik maupun ideologis, hingga tujuan akhirnya dapat diperoleh persetujuan secara sukarela, mandiri, rasional, dan partisipatif. Hegemoni bagi Gramsci tidak hanya dilakukan dengan modal kapital semata. Ada aspek lain seperti budaya yang diusung melalui ideologi yang dianggap cukup kuat untuk menancapkan *power* hegemoni. Hegemoni dianggap dapat lebih cepat menyebar ketika terdapat kebudayaan yang menyebar sebagai ideologi. Ideologi inilah yang menjadi hal umum dan mudah diterima oleh masyarakat (Ratna, 2010 : 181).

Kehadiran hegemoni dapat menimbulkan pertentangan tertentu. Adanya sistem nilai dari suatu daerah dapat menciptakan *counter pressure* terhadap hegemoni. Kelompok kelas yang menyadari akan adanya dominasi kelas lain dapat melakukan suatu penentangan, yang dikenal sebagai *counter hegemony*. Kesadaran ini mendorong anggota kelompok masyarakat mencapai taraf kesetaraan atau tingkat yang lebih maju dari hegemon. Gramsci berpendapat bahwa hegemoni tandingan dapat berjalan ketika ada dukungan dalam bentuk peran aktif dan akomodatif, serta adanya pemberdayaan *civil society* (Simon, 1999: 204). Upaya *counter hegemony* tidak bisa terlepas dari kondisi yang berlangsung pada akar rumput, sebagai wadah yang melegitimasi nilai-nilai hegemoni tersebut.

Menurut Taum, *counter hegemony* dapat dilakukan dalam tiga cara, yakni perlawanan keras, perlawanan pasif dan perlawanan humanistik. Perlawanan keras dilakukan dengan melakukan tindakan bertentangan terhadap hegemon, perlawanan pasif dilakukan dengan kediaman atau tidak melakukan kehendak hegemon mainstream, sementara perlawanan humanistik dilakukan dengan sikap dan tindakan tanpa kekerasan untuk menghadapi hal-hal *mainstream* dari hegemoni yang ditimbulkan (Taum, 2015 : 98 – 104).

Alat yang dapat digunakan untuk *counter hegemony* salah satunya adalah budaya. Aspek budaya selalu bersifat dinamis. Budaya tidak akan mengalami kondisi statis karena ia memiliki karakteristik untuk selalu berubah. Namun, perlu dipahami bahwa perubahan kebudayaan bukan karena ditinggalkannya nilai-nilai dasar yang ada, melainkan karena penyesuaian terhadap agen budaya ini, yakni manusia. Hal inilah yang menjadikan budaya mampu menjadi alat yang kuat dalam *counter hegemony*. Manusia bertindak sebagai agen budaya yang memiliki nilai dinamis sehingga turut membuat budaya memiliki identitas yang berarti (Zurich, 2018 : 1-4). Sifat kemanusiaan yang erat dengan kegiatan interaksi antar manusia lain berimbas pada perubahan kebudayaan yang dianutnya. Perubahan nilai budaya ini dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti ekonomi, sosial, politik, religi, komunikasi dan juga teknologi (Magu, 2015 : 632). Teknologi dan civilisasi global baru berpengaruh terhadap dinamika logika budaya. Budaya global berpotensi untuk membangun dominasinya terhadap identitas budaya nasional.

Marshall McLuhan menyebutnya sebagai “*global village*” (Koechler, 2018), yakni suatu kondisi identitas budaya yang berkembang sehingga semakin kompleks. Pada akhirnya, budaya ini akan teridentifikasi sebagai budaya baru karena karakteristiknya yang baru. Kondisi inilah yang disebut sebagai “*globality*” (Koecler, 2011 : 5). Lingkungan global secara simultan terus berpengaruh terhadap budaya sehingga mengikis identitas budaya nasional.

Banyak yang menyebut multikulturalisme sebagai ancaman. Sementara itu, individu maupun komunitas tidak bisa membangun tameng untuk menghindari adanya interaksi global. Pengaruh budaya global terhadap identitas nasional adalah hal yang tak terhindarkan. Pada kondisi interkoneksi global ini, budaya bisa berperan lebih banyak. Budaya tidak hanya bisa menjadi instrumen kemanusiaan, melainkan bisa menjadi alat yang membentuk identitas suatu bangsa (Köchler, 2018 : 1-4).

Hasil dan Pembahasan

Perdebatan muncul ketika dampak globalisasi terhadap kondisi di tiap-tiap daerah berlangsung variatif. Hal ini turut memunculkan anggapan bahwa globalisasi merupakan bentuk lain dari “hegemoni para superpower”. Sebab, para negara superpower inilah yang sesungguhnya membentuk pola global yang baru, sebagai bentuk dari globalisasi. Adapun pihak yang paling banyak dituding sebagai hegemon

adalah Amerika Serikat atau negara-negara Barat. Hegemoni yang memunculkan budaya konsumerisme global, serta skema sosial politik baru, mengacu pada ideologi para negara superpower. Pada akhirnya, budaya global yang baru adalah hasil adopsi dari kepentingan mereka (Tomlison, 1999 : 327).

Budaya global baru ini berlangsung secara luas, termasuk di Kota Solo. Solo menjadi satu daerah yang tak bisa lepas dari pengaruh hegemoni asing. Hal ini dilihat dari adanya interaksi yang berlangsung antara Kota Solo dengan masyarakat global. Salah satu faktor yang banyak mendorong perluasan hegemoni budaya barat adalah adanya interaksi ekonomi. Eksistensi budaya asli daerah berpotensi memudar akibat percepatan globalisasi. Adapun teknologi yang semakin maju menjadi faktor tambahan yang mendorong percepatan globalisasi ini.

Kondisi ini memungkinkan pembentukan budaya global baru yang terus menekan eksistensi budaya lokal. Inilah yang terjadi ketika informasi menyebar dengan begitu mudah dan cepat melalui berbagai sarana komunikasi modern. Teknologi-teknologi baru berdampak pada penguatan globalisasi di berbagai aspek hingga menghasilkan identitas budaya baru (Ali, 2005 :11). Inilah yang disebut sebagai hegemoni asing. Kota Solo adalah daerah dengan kemampuan adaptasi teknologi yang cukup baik. Sangat mudah diamati bagaimana masyarakat Kota Solo banyak memanfaatkan teknologi komunikasi dan media dalam kesehariannya. Ini menjadi celah bagi masuknya budaya konsumerisme global ke dalam masyarakat Kota Solo.

Di satu sisi, kehadiran teknologi dan budaya global dapat memberikan nilai positif bagi percepatan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, eksistensi budaya lokal ikut terancam. Dalam menghadapi hegemoni yang dibawa oleh arus globalisasi tersebut, Kota Solo memiliki alat khusus. Alat yang disebut sebagai “budaya” ini memiliki *soft power* guna menghadapi hegemoni asing. Kota Solo melakukan pembangunan yang merujuk pada *local wisdom* sebagai inisiatif untuk menghadapi laju globalisasi yang tak terbendung.

Kekuatan dalam program pembangunan berbasis budaya di Kota Solo terletak pada distribusi keterlibatan para aktornya. Tak hanya pemerintah, berbagai elemen masyarakat mampu melebur dan terlibat dalam aneka program pembangunan budaya ini, termasuk dalam festival budaya. Hal ini menjadi kekuatan tersendiri yang mampu menjadi tameng terhadap masuknya hegemoni asing yang berpotensi merapuhkan identitas budaya lokal.

Proses inklusi berbau dalam lokalitas guna menghidupkan kembali kebersamaan dalam dinamika pembangunan kota. Dalam program ini, strategi pemerintah Kota Solo dilakukan dengan mengembangkan citra kota budaya dengan jalan merangkul kekuatan sinergitas dari berbagai kelompok masyarakat. Visi pembangunan Kota Solo sebagai kota budaya ini pun dijalankan secara menyeluruh, mulai dari usaha penertiban kaki lima melalui relokasi dan pendampingan ribuan pedagang kaki lima (PKL),

revitalisasi hingga 35 pasar tradisional tanpa pungutan biaya dari para pedagang, juga aneka bantuan pengembangan usaha demi mendukung nuansa Kota Budaya sekaligus menarik wisatawan (Harsasto, 2015 : 61).

Pemerintah Kota Solo mensinergikan tema pembangunan dengan mengusung tema “Pengembangan Manifestasi Karakter Budaya Jawa Dalam Tata Pemerintahan, Ekonomi, Sosial dan Budaya Untuk Mendukung Tata Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera”. Dari tema pembangunan ini, kita bisa melihat adanya sinergi yang mengarah pada *counter hegemony* dan usaha menguatkan kearifan lokal dalam masyarakat secara utuh. Apalagi, pembangunan ini juga dimanifestasikan dalam tiga prioritas utama pemerintah, yakni dengan : (1) penguatan ekonomi kerakyatan; (2) pengembangan budaya Jawa untuk menguatkan citra Kota Surakarta sebagai kota budaya; dan (3) pengembangan Kota Surakarta sebagai Kota Budaya yang berbasis lingkungan (*eco-cultural city*) (Harsasto, 2015 : 63).

Penataan Kota dengan basis *Eco Cultural City* menunjukkan bahwa Kota Surakarta secara holistik menekankan pada kekuatan karakter budaya dan lingkungan. Cara ini menjadi perwujudan dari peleburan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat. Ketika nilai-nilai budaya ini mampu tertanam dengan kuat dalam kehidupan masyarakat, maka hegemoni asing akan sukar menggeser nilai-nilai ini. Jika merujuk pada penelitian Miles (2005), keberhasilan pembangunan budaya disebut sebagai wujud dari kekuatan budaya itu sendiri. Adapun keberhasilan pembangunan budaya dipengaruhi oleh keterhubungan perasaan (*sense of belonging*) masyarakat terhadap budaya tersebut.

Ketika masyarakat memiliki *sense of belonging* dari berbagai pembangunan budaya, artinya *soft power* dari budaya bekerja dengan lebih baik. Kota Solo sendiri melakukan pembanguana yang mengarah pada revitalisasi kekhasan budayanya secara utuh dengan melibatkan masyarakat. Keberhasilan dari meleburkan nilai budaya dalam masyarakat mampu membalik logika hegemoni asing terhadap Kota Solo, sebagai usaha ‘*to bring the local into the global*’.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan Stephen M Magu (2015), dikatakan bahwa konsep global berdampak pada lokal ini sesungguhnya berlaku *vice versa* (berlaku sebaliknya). Hal ini menegaskan bahwa identitas lokal dalam bentuk budaya tidak hanya bisa menjadi korban dalam globalisasi dari hegemoni, melainkan bisa juga menjadi pihak yang berpengaruh. Budaya dapat menjadi hal yang diadopsi dan terintegrasi dalam globalisasi melalui perangkat teknologi. Dampak positif globalisasi dalam hal ini adalah sifatnya yang dinamis sehingga dapat meningkatkan interaksi budaya. Pada akhirnya, ketika budaya cukup kuat diusung sebagai *soft power*, budaya ini akan berpengaruh terhadap struktur dan otoritas nasional hingga di level global. Artinya, budaya ini sukses menjadi *counter hegemony* terhadap asing.

Kota Solo berusaha menggiring kekuatan budaya ini dengan berbagai usaha, termasuk dalam aspek ekonomi melalui industri pariwisata. Aneka *event* promosi Kota Solo diusung dengan selalu mengedepankan kearifan lokal, seperti dengan slogan : “Solo Tempo Dulu”; “Solo Kotaku”, “Jawa Budayaku”; dan “*Solo, The Spirit Of Java.*” Aneka slogan ini didukung dengan penyelenggaraan berbagai *event* berupa festival budaya. Festival budaya menjadi wujud penguatan konsep *city branding* yang utuh dalam penguatan nilai-nilai budaya Kota Solo.

Strategi *city branding* menurut Madan (2006) merupakan upaya untuk membangun identitas sebuah kota. Identitas ini merujuk pada pemikiran yang dipercaya seseorang terhadap kota tersebut. Dalam rangka membangun *branding* Kota Solo sebagai Kota Budaya inilah, berbagai festival budaya diselenggarakan untuk promosi wisata dalam konsep budaya. Tiap tahunnya, digelar sekitar 50-an *event*. Penyelenggaraan aneka festival budaya ini secara rutin diumumkan melalui *Calendar Event Solo* oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surakarta melalui kerja sama dengan Konsultan Komunikasi dan Publik (Nugroho, 2014 : 2-3).

Beberapa contoh festival budaya yang rutin diselenggarakan di Solo dan menjadi ikon budaya Solo adalah *Solo International Performing Art (SIPA)*, *Solo International Ethnic Music (SIEM)*, *Solo Batik Carnival (SBC)*, *Solo Keroncong Festival*, *International Tea Festival*, *KREASSO (Kreatif Anak Sekolah Solo)*, *Gunungan Charity Boat Race*, *Solo Batik Fashion*, Festival Kethoprak, *Solo Carnival*, Pesona Balaikambang, Solo Menari, Kemah Budaya, *Solo Kampoeng Art*, Festival Dolanan Bocah, *Javanese Theatrical*, *Bakdan ing Balekambang*, Sekaten, Grebeg Maulud, Mahesa Lawung, *Mangkunegaran Performing Art*, *Keraton Art Festival*, Tingalan Jumenengan Dalem, Malem Selikuran, Grebeg Poso, Grebeg Pangan, Grebeg Kirab Malam 1 Sura dan Wiyosan Jumenengan Mangkoe Nagoro (Nugroho, 2014 : 2-3); (Harsasto, 2018 : 41). Berbagai festival budaya ini diselenggarakan dengan maksud memperkuat *city branding* Kota Solo sebagai Kota Budaya hingga ke tingkat internasional.

Penelitian yang dilakukan Harsasto (2018) menunjukkan bahwa sumber daya budaya dan festival masyarakat lokal mampu berkontribusi terhadap revitalisasi identitas komunitas lokal sekaligus mobilisasi masyarakat. Aneka agenda rutin festival budaya Kota Solo pun dapat menjadi modal sosial dalam rangka *counter hegemony*. Ini lantaran penyelenggaraan berbagai festival ini tak hanya melibatkan pemerintah, melainkan juga masyarakat lokal bahkan hingga masyarakat internasional (Harsasto, 2018 : 41).

Komunitas budaya dan aneka elemen masyarakat dilibatkan dalam usaha penyelenggaraan perhelatan aneka festival budaya. Mulai dari kalangan komunitas budaya, akademisi, hingga masyarakat umum dapat ikut terlibat untuk mendukung kegiatan ini. Salah satu contohnya adalah komunitas *Solo Batik Carnival* yang anggotanya merupakan gabungan dari para pecinta dan penikmat budaya. *SBC*

Community yang telah dibentuk sejak tahun 2008 ini secara rutin mendukung program festival budaya dari Pemerintah Kota. Tercatat telah lahir berbagai karya budaya hasil kolaborasi dari berbagai cabang kesenian mulai dari tari, musik, karawitan, teater sampai modeling (Harsasto, 2015 : 68).

Bahkan, perhelatan SBC telah menggaung sebagai karnaval tingkat dunia. Ada keunikan tersendiri yang diusung dalam festival budaya yang kental akan nuansa kearifan lokal, yakni kostum berbasis batik. Komunitas SBC bertugas menjadi panitia dalam kegiatan tahunan SBC dengan mengemban tugas dalam perencanaan hingga pelaksanaan karnaval. Mereka merangkul para peserta yang sebagaian besar adalah warga masyarakat. Berbagai elemen masyarakat yang terlibat diwajibkan mengikuti workshop untuk merancang kostum selama berbulan-bulan. Kostum karnaval masing-masing peserta dirancang dan digunakan peserta sendiri. Sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator (Harsasto, 2015 : 68). Konsep inilah yang lebih meningkatkan *sense of belonging* masyarakat terhadap kearifan lokalnya.

Ditambah lagi, slogan “*Solo, The Spirit of Java*” semakin dijiwai oleh masyarakat luas dengan aneka perhelatan ini. Penggunaan slogan ini sekaligus menekankan misi Kota Solo yang berupaya menciptakan kawasan dengan daya saing ekonomi yang kuat dengan basis kearifan lokal. Slogan ini sekaligus menjadi *positioning* Kota Solo yang menunjukkan ciri khusus sebagai identitas wilayah (Nugroho, 2014 : 14). Karenanya, upaya penyematan slogan ini pada masyarakat luas adalah hal penting. Kota Solo nampaknya telah mampu menempatkan budaya sebagai alat *counter hegemony* di era globalisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Wiyana, Maria Pia Adiati, Rachel Dyah Wiastuti pada 2018 menemukan adanya keterkaitan antara penyelenggaraan aneka festival budaya Kota Solo terhadap citra destinasi Kota Solo. Hasil penelitian mereka menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari *event* budaya yang diadakan di Kota Solo terhadap upaya pembentukan *branding* kota atau citra destinasi. Aspek atau variabel citra Kota Solo ini yang digunakan dalam penelitian adalah *planning*, *uniqueness* dan *culture* (Wiyana dkk, 2018 : 24-31). Persepsi ini menunjukkan bahwa aneka festival budaya yang diselenggarakan sukses berpengaruh terhadap penguatan kearifan lokal budaya Solo.

Persepsi masyarakat Kota Solo dibentuk oleh citra Kota Budaya yang dibangun melalui aneka festival budaya. Eksistensi lokalitas Solo di tengah gempuran hegemoni dan globalisasi masih tetap bertahan. Kota Solo masih dianggap sebagai kota yang besar karena budayanya. Potensi budaya yang membaur dengan perdagangan dan industri berbasis kearifan lokal bertumbuh dengan adanya keterlibatan, kerjasama, dan peningkatan komitmen yang muncul dari berbagai pihak. Pada akhirnya, slogan “*Solo, The Spirit of Java*” mampu menjadi kekuatan dalam rangka *counter hegemony*. Solo sebagai Kota Budaya telah menjadi *city branding* dan *trade mark* dalam setiap promosi dan usaha mengangkat popularitas Kota Solo ke dunia internasional.

Penutup

Dengan mengusung pembangunan berbasis *local wisdom*, pemerintah Kota Solo memiliki legitimasi dari masyarakat untuk mendukung program-programnya. Praktek inklusi secara empirik mampu dilaksanakan secara mudah dan melebur dalam berbagai elemen masyarakat. Kekuatan budaya ini mampu menjadi tameng bagi hegemoni asing yang masuk berbarengan dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. Hal ini didukung oleh adanya keterlibatan aktor dalam program pembangunan berbasis budaya di Kota Solo. Berbagai festival budaya Kota Solo telah diterima masyarakat secara luas. Hubungan yang terjalin antara masyarakat dan pemerintah bersinergi dalam setiap penyelenggaraan festival budaya, yang setidaknya diselenggarakan sekitar 50 festival per tahunnya. Festival budaya ini menjadi wadah bagi berbagai sumber daya aktor yang mampu menciptakan solusi atas masalah hegemoni asing yang dihadapi bersama.

Bibliografi

- Boggs, C. 1976. *Gramsci's Marxism*. London: Pluto Press.
- Carroll, William K. 2006. *Hegemony, Counter-hegemony, Anti-hegemony, University of Victoria, Keynote Address to the Annual Meeting of the Society for Socialist Studies*, York University, Toronto. June 2006.
- Fraser, N. 1995. *From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a Post-Socialist Age*. *New Left Review*, No. 212 (old series), pp. 68-93.
- Harsasto, Priyatno. 2015. *Citra Dalam Politik Kota: Kajian Kota Surakarta 2005-2013*. *Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 14 | No. 2 | November 2015 | Hal. 61-70.
- Harsasto, Priyatno. 2018. *Strategi Pembangunan Kota Berbasis Budaya: Revitalisasi Pasar Gede di Kota Surakarta*. *Politika, JURNAL ILMU POLITIK*, Volume 9 Nomor 1, April 2018.
- Holloway, John. 2005. *Change the World Without Taking Power*. Revised Edition. London: Pluto.
- Jessop, B. 2002. *The Future of the Capitalist State*. Cambridge: Polity.
- Joseph, J. 2002. *Hegemony: A Realist Analysis*. London: Routledge.
- Köchler, Hans. 2015. *Culture and Empire: The Imperial Claim to Cultural Supremacy versus the Dialectics of Cultural Identity*, in: Hans Köchler, *Force or Dialogue: Conflicting Paradigms of World Order*. Collected Papers Edited by David Armstrong. With a Foreword by Fred Dallmayr. *Studies in International Relations*, Vol. XXXIII. New Delhi: Manak, 2015, pp. 263-273.
- Köchler, Hans. 2018. *Cultural Diplomacy in a World of Conflict*, *Zurich*, No. 2, 22 January 2018, pp. 1-4.
- Lash, S and Urry, J. 1994. *Economics Of Signs And Space*. Routledge : London.

- Medovoi, L. 2005. *Nation, Globe, Hegemony: Post-Fordist Preconditions of the Transnational Turn in American Studies*. *Interventions*, Vol. 7, No. 2, pp. 162-79
- Miles, S. 2005. *The Rise And Rise Of Culture-Led Urban Regeneration*. *Urban Studies*, Vol. 42 No. 5/6, hlm. 833–839.
- Nugroho, Adhityo. 2014. *Slogan Solo The Spirit Of Java Sebagai Promosi Pemerintah Kota Solo Untuk Go International*. *Jurnal Kommas*. Diakses dari <http://www.jurnalkommas.com/docs/Jurnal%20Adhityo%20Nugroho%20ACC.pdf>
- Nye, Joseph S. Jr., 2004. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs.
- Palloix, C. 1975. *The Internationalization of Capital and the Circuit of Social Capital*. In *International Firms and Modern Imperialism*. Hugo Radice (ed.). Markham, Ontario: Penguin, pp. 63-88.
- Robinson, W. 2004. *A Theory of Global Capitalism*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Satriya, Chandra Yudha. 2017. *Kontribusi Event Marketing Terhadap Ekuitas Merek Kota Solo*. *Jurnal Makna* Vol. 5 No. 1. Unissula.
- Simon, Roger. 1999. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta : Insist Press.
- Teeple, G. 2000. *Globalization and the Decline of Social Reform*. Second Edition. Aurora, Ontario: Garamond Press.
- Wiyana, T., Adiati, M.A, & Wiastuti, R.D. 2018. *Korelasi Antara Event Budaya dengan Citra Destinasi Pada Solo International Performing Arts 2017*. *Jurnal Hospitality dan Pariwisata*. Vol 4. No 1. pp 24-31
- Yahuda, Michael. 2004. *The International Politics of The Asia-Pacific*. New York: Routledge Curzon.

Melestarikan Kearifan Lokal Guna Memajukan Pariwisata di Era Globalisasi

Syahrul Awal¹, Andrea Abdul Rachman², Puti Parameswari³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Budi Luhur, Jakarta.

Corresponding e-mail: syahrul.awal@budiluhur.ac.id

Abstrak



Pada program Pengabdian Kepada Masyarakat (abdimas) semester Gasal TA 2018-2019, Program Studi Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur mengambil tema terkait melestarikan kearifan lokal guna memajukan Pariwisata dalam era Globalisasi. Dalam perkembangannya, definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jika dulu definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Saat ini, istilah Literasi sudah mulai digunakan dalam arti yang lebih luas serta sudah merambah pada praktik kultural yang berkaitan dengan persoalan sosial dan politik. Definisi baru dari literasi menunjukkan paradigma baru dalam upaya memaknai literasi dan pembelajarannya. Pesatnya globalisasi dapat menjadi faktor penghambat dan pendukung literasi. Tingkat literasi yang rendah pada generasi muda menjadi salah satu ancaman kemunduran sebuah bangsa. Remaja khususnya, mereka yang masih bersekolah merupakan salah satu komponen masyarakat yang tergolong sebagai generasi muda penerus bangsa. Pariwisata merupakan suatu hal yang tidak asing dikalangan pemuda, dengan pelatihan terkait literasi yang berhubungan dengan pariwisata maka pemuda sebagai penerus bangsa akan terus menjaga dan meningkatkan perekonomian dibidang pariwisata. Peningkatan literasi bagi kaum muda atau generasi millennials tidak bisa dilakukan dengan cara konservatif. Untuk itu, tim PKM kami melakukan kegiatan pelatihan literasi bagi para siswa Sekolah Menengah, yaitu SMK Informatika Pondok Randji pada Senin, 19 November 2018 dan SMA Negeri 5 Tangerang Selatan pada Jumat, 14 Desember 2018. Dalam pelaksanaan mendapatkan hasil bahwa, pengetahuan literasi dikalangan pemuda telah ada, kendati demikian masih perlu peningkatan sesuai dengan perkembangan zaman yang didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ketertarikan peserta terhadap nilai-nilai kearifan lokal Indonesia semakin bertambah. Peserta memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menggunakan pendekatan kearifan lokal untuk meningkatkan Pariwisata Indonesia pada era Globalisasi dalam bentuk karya tulis.

Kata Kunci

Kearifan lokal, literasi, pemuda, pelatihan, pariwisata, globalisasi, teknik penulisan ilmiah

Pendahuluan

Literasi dapat diartikan sebagai kemampuan atau kebiasaan seseorang untuk melek huruf. Kemampuan memahami huruf atau aksara tersebut meliputi kemampuan membaca serta menulis. Selain itu, makna literasi juga mencakup pemahaman akan visual, atau dengan kata lain berarti kemampuan untuk mengenali dan memahami ide-ide yang disampaikan secara visual (adegan, video, gambar). Sedangkan menurut *National Institute for Literacy*, Literasi dipahami sebagai kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat.

Pengertian Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dalam perkembangannya, definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jika dulu definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Saat ini, istilah Literasi sudah mulai digunakan dalam arti yang lebih luas. Dan sudah merambah pada praktik kultural yang berkaitan dengan persoalan sosial dan politik. Definisi baru dari literasi menunjukkan paradigma baru dalam upaya memaknai literasi dan pembelajarannya. Kini ungkapan literasi memiliki banyak variasi, seperti Literasi media, literasi komputer, literasi sains, literasi sekolah, dan lain sebagainya. Hakikat ber-literasi secara kritis dalam masyarakat demokratis diringkas dalam lima verba: memahami, melibati, menggunakan, menganalisis, dan mentransformasi teks. Kesemuanya merujuk pada kompetensi atau kemampuan yang lebih dari sekedar kemampuan membaca dan menulis (dkampus, 2017).

Ada tujuh dimensi dalam mendefinisikan literasi. Ketujuh dimensi tersebut adalah Dimensi geografis meliputi daerah lokal, nasional, regional, dan internasional. Literasi ini bergantung pada tingkat pendidikan dan jejaring sosial; Dimensi bidang meliputi pendidikan, komunikasi, administrasi, hiburan, militer, dan lain sebagainya. Literasi ini mencirikan tingkat kualitas bangsa dibidang pendidikan, komunikasi, militer, dan lain sebagainya; Dimensi ketrampilan meliputi membaca, menulis, menghitung, dan berbicara. Literasi ini bersifat individu dilihat dari tampaknya kegiatan membaca, menulis, menghitung, dan berbicara. Dalam teradisi orang barat, ada tiga ketrampilan 3R yang lazim diutamakan seperti reading, writing, dan arithmetic; Dimensi fungsi, literasi untuk memecahkan persoalan, mendapatkan pekerjaan, mencapai tujuan, mengembangkan pengetahuan, dan mengembangkan potensi diri; Dimensi media, (teks, cetak, visual, digital) sesuai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, begitu juga teknologi dalam media literasi; Dimensi jumlah, kemampuan ini tumbuh karena proses pendidikan yang berkualitas tinggi. literasi seperti halnya kemampuan berkomunikasi bersifat relatif; Dimensi bahasa, (etnis, lokal, internasional) literasi singular dan plural, hal ini yang menjadikan monolingual, bilingual, dan multilingual.

Ketika seseorang menulis dan berliterasi dengan bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka ia disebut seseorang yang multilingual (www.dkampus.com).

Pesatnya globalisasi dapat menjadi faktor penghambat dan pendukung literasi. Era globalisasi jelas menjadi sebuah fenomena yang menantang terpeliharanya kearifan lokal di kalangan pemuda pemudi Indonesia. Perkembangan teknologi dan informasi yang juga merupakan dampak globalisasi, membuat sebagian masyarakat telah mengalami kelesuan literasi (Sari, 2017). Seperti yang kita lihat pada realita masyarakat, para generasi millennial sudah menjadikan medsos sebagai "soulmatenya" sebagai imbas dari perkembangan teknologi dan informasi. Mereka sering memposting status, gambar, dan video. Kondisi ini membuat mereka mengalami titik kelesuan dalam minat baca (Sari, 2017).

Peningkatan literasi bagi kaum muda atau generasi millennials tidak bisa dilakukan dengan cara konservatif. Diperlukan strategi dan inovasi dalam menanamkan dan mengembangkan potensi literasi kaum muda guna melestarikan kearifan lokal pada era globalisasi masa kini. Salah satu cara yang dapat dilakukan pihak sekolah adalah literasi pembelajaran berbasis kearifan lokal. Pihak manajemen sekolah dapat melakukan upaya penguatan pendidikan karakter melalui strategi literasi berbasis muatan lokal bagi para siswa. Hal ini dilakukan untuk membangun kepribadian, mentalitas, moralitas yang adiluhung (Joyo, 2018).

Maka dari itu, sinergi antara literasi dan nilai-nilai kearifan lokal dalam era globalisasi menjadi salah satu kunci kemajuan. Memang tidak salah dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi. Justru melalui medsos dapat membantu kita dalam menyebarkan informasi secara cepat dan dapat menjangkau masyarakat luas, tetapi alangkah sempurnanya jika itu dibarengi oleh literatur untuk membuka cakrawala kita untuk dijadikan sebagai data dukung untuk menyebarkan informasi (Sari, 2017).

Berdasarkan data Hasil penelitian *Programme for International Student Assessment* (PISA) menyebut, budaya literasi masyarakat Indonesia pada 2012 terburuk kedua dari 65 negara yang diteliti di dunia. Tingkat literasi yang rendah pada generasi muda menjadi salah satu ancaman kemunduran sebuah bangsa. Remaja khususnya mereka yang masih bersekolah merupakan salah satu komponen masyarakat yang tergolong sebagai generasi muda penerus bangsa. Oleh karena itu sebagai bentuk partisipasi dalam melestarikan kearifan lokal guna memajukan pariwisata di era globalisasi, maka program pengabdian pada masyarakat Prodi Hubungan Internasional kali ini kemudiannya mengajukan pertanyaan penelitian, *bagaimana signifikansi peran pemuda melalui Pelatihan Literasi dalam Melestarikan Kearifan Lokal Guna Memajukan Pariwisata pada Era Globalisasi di SMA Negeri 5 Tangerang Selatan dan SMK Informatika Pondok Ranji?*

Metode Penelitian

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode berupa pemaparan materi, pelatihan praktek penulisan dan permainan interaktif dengan peserta.

1. Pemaparan materi

Sesi 1 kegiatan berupa pemaparan interaktif dari tim penyaji untuk pelatihan penulisan ilmiah bertema Pelatihan Literasi bagi Pemuda: Melestarikan Kearifan Lokal untuk Memajukan Pariwisata dalam Era Globalisasi, di SMAN 5 Tangerang dan SMK Informatika Pondok Ranji. Pemaparan kedua adalah mengenai tips-tips dalam menggali potensi, menghadapi tantangan dan memaksimalkan peluang dalam penulisan ilmiah terkait tema. Pemaparan materi ini akan banyak mengulas perihal literasi dan disampaikan dengan menggunakan media power point dan penyaji akan menjelaskan.

2. Pelatihan/praktek penulisan

Sesi ke-2 akan diisi dengan pelatihan literasi bagi para peserta, yaitu berupa praktek menulis ilmiah. Praktek atau pelatihan tersebut juga melibatkan tim PKM yang terdiri dari mahasiswa sebagai kakak mentor atau fasilitator peserta dalam pelatihan penulisan. Setiap kakak mentor akan membimbing sekurangnya 1 peserta. Pelatihan penulisan ilmiah tersebut akan didasarkan pada pengalaman atau minat pribadi para siswa.

3. Kuis dan permainan interaktif

Bersamaan dengan pemaparan materi dan pelatihan literasi atau praktek penulisan ilmiah, tim penyaji juga akan mengadakan kuis dan permainan interaktif. Pemilihan metode ini diadakan dalam rangka ice breaking dan mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang telah disajikan. Dengan adanya interaksi dan komunikasi antar penyaji dan peserta, diharapkan materi yang disampaikan bisa diterima dengan lebih baik.

Instrumen Pelaksanaan

Berikut rincian instrumen pelaksanaan pada kegiatan pengabdian pada masyarakat:

- a. Modul : berisikan ringkasan materi & slide presentasi
- b. Materi presentasi : slide format power point
- c. Perlengkapan pendukung : laptop, proyektor, screen proyektor dan *pointer*
- d. Perlengkapan lain : kertas, alat tulis, dan alat peraga lainnya
- e. X-banner : memuat judul kegiatan dan logo institusi

Langkah-Langkah Kegiatan

Terdapat tiga (3) langkah yang akan dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini. Langkah yang pertama adalah langkah persiapan, dilanjutkan dengan pelaksanaan serta evaluasi dan tindak lanjut. Langkah yang ketiga penting mengingat agar program pengabdian yang dimaksudkan untuk mendukung pembangunan nasional dapat memiliki sifat keberlanjutan sehingga manfaatnya tepat guna dalam membentuk masyarakat yang mandiri secara meluas.

a. Langkah Persiapan

Langkah persiapan diawali dengan melakukan diskusi dengan pihak sekolah mitra. Diskusi membahas permasalahan mitra, teknis pelaksanaan, administrasi serta sharing informasi tambahan mengenai situasi dan kondisi peserta. Setelah dicapai kesepakatan, selanjutnya tim penyaji menyusun proposal yang akan diajukan ke pihak universitas.

b. Langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penerimaan oleh pihak sekolah, dalam hal ini berarti dua sekolah sasaran yaitu SMAN 5 Tangerang Selatan dan SMK Informatika Pondok Ranji.
2. Pembukaan oleh perwakilan tim dan mitra dalam mensosialisasikan kembali mengenai tujuan pelaksanaan kegiatan.
3. Penyampaian materi serta penyelenggaraan kuis dan permainan interaktif meliputi:
 - I. Jenis dan Konsep Penulisan Ilmiah
 - II. Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi
 - III. Potensi Pengembangan Kemajuan Pariwisata

c. Penutup

a. Langkah Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dilakukan sebagai tolak ukur sejauh mana keberhasilan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Evaluasi berasal dari notulensi kegiatan dan hasil diskusi dengan para peserta termasuk dengan para pihak sekolah, dalam hal ini berarti dua sekolah sasaran yaitu SMAN 5 Tangerang Selatan dan SMK Informatika Pondok Ranji, serta dengan sesama anggota tim pelaksana. Pengabdian kali ini akan menjadi dasar bagi pembentukan pengabdian pada Semester Gasal Tahun Ajaran 2018/2019 terkait Pelatihan Literasi bagi Pemuda: Melestarikan Kearifan Lokal untuk Memajukan Pariwisata dalam Era Globalisasi, di SMAN 5 Tangerang dan SMK Informatika Pondok Ranji.

Hasil dan Pembahasan

Pada bulan November & Desember 2018 prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur, melaksanakan program merealisasikan tri darma perguruan tinggi yaitu salah satunya pengabdian kepada masyarakat. Masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian ini kami fokuskan pada siswa/siswi menengah atas atau setara SMA/SMK. Program ini dilakukan dengan membawa tema literasi yang disertai juga praktik penulisan. Hal tersebut erat kaitannya dengan mata kuliah yang ada pada prodi HI sendiri yaitu mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah, dimana nantinya para siswa SMA/SMK diberikan sosialisasi terkait tema tersebut dan di sisi lain para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah dapat mengimplementasikan ilmu yang dipelajari langsung kepada masyarakat.

Sebelum pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat ini para dosen mempersiapkan rancangan kegiatan dalam sebuah tim, yang terdiri dari ketua dan 2 orang anggota. Kemudian dosen juga turut mengikutsertakan mahasiswa prodi Hubungan Internasional angkatan 2016 & 2017 dalam program ini. Para mahasiswa dikumpulkan terlebih dahulu beberapa hari sebelum hari H pelaksanaan kegiatan, kemudian para mahasiswa juga mendapatkan briefing dari tim dosen terkait kegiatan.

Mahasiswa dibagi menjadi 2 tim/kelompok. Hari pertama kegiatan pengabdian, ada sekitar 15 mahasiswa yang ikut serta. Kemudian pada hari ke-2 pengabdian, ada sekitar 21 mahasiswa yang turut serta menyukkseskan kegiatan. Pengabdian ini dilaksanakan di dua tempat & waktu yang berbeda, namun dengan tema yang sama. Pada saat briefing para mahasiswa dijelaskan terlebih dahulu perihal program pengabdian lalu diarahkan nantinya tugas daripada mahasiswa adalah menjadi kakak mentoring atau pembimbing adik-adik siswa/siswi SMA/SMK dalam mengkaji tema literasi, khususnya pada praktik penulisan karya tulis. Persiapan juga dilakukan dalam hal penyiapan peralatan dan kebutuhan PKM, seperti banner, souvenir untuk peserta, materi, transportasi hingga konsumsi.

Dengan berbagai persiapan tersebut di atas yang dimulai beberapa pekan sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, hari pertama pelaksanaan kegiatan dimulai pada Senin, 18 November 2018 di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Informatika Pondok Ranji, Ciputat. Kemudian hari ke-2 pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada Jumat, 13 Desember 2018, bertempat di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Tangerang Selatan.

Kegiatan PKM ini diawali dengan sambutan oleh dosen, dengan menyampaikan tujuan kedatangan dari tim Universitas Budi Luhur, dan pihak sekolah pun menyambut baik kegiatan tersebut. Kegiatan ini diisi oleh para dosen sebagai narasumber. Narasumber menyampaikan materi terkait tema yaitu literasi bagi pemuda dengan sub tema yaitu Melestarikan Kearifan Lokal Guna Menamajukan Pariwisata dalam Era Globalisasi.

Pada sesi pertama narasumber kami menjelaskan tentang Apa yang dimaksud dengan Literasi. Narasumber kami menyampaikan bahwasanya literasi itu sangatlah penting. Literasi adalah keterampilan kognitif (berpikir) bagaimana kita bisa berbicara, membaca & menghitung. Produk dari aktivitas literasi berupa tulisan, tulisan adalah sebuah warisan intelektual yang tidak akan kita temukan di zaman prasejarah. Dengan kata lain apabila tidak ada literasi/membaca dan menulis sama saja kita sedang berada di zaman pra sejarah. Tulisan merupakan bentuk rekaman sejarah yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi, bahkan hingga berabad-abad lamanya. Juga, sebagai wadah penyaluran ide, aspirasi dan mencari inspirasi.

Pada sesi kedua, narasumber melanjutkan materi dengan mengulas pentingnya literasi bagi para pemuda, khususnya generasi muda penerus bangsa di Indonesia. Kesadaran betapa pentingnya membaca, literasi adalah sebagai 'basic tools' (alat dasar belajar) yang melekat dalam pembelajaran. Kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas. Maka dari itu berbagai aktivitas seperti membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/ berbicara merupakan bagian dari literasi.

Membaca sangatlah penting, karena dapat melatih kemampuan menulis. Bagaimana seseorang mau menulis jika membaca saja tidak dilakukan. Produk sebuah literasi adalah tulisan, tulisan merupakan bentuk rekaman sejarah juga sebagai wadah penyalur ide, aspirasi, & mencari inspirasi. Kemampuan mengakses, memahami, menggunakan sesuatu secara cerdas melalui besar 90% dunia adalah membaca. Dalam hal ini, narasumber menekankan pentingnya kecerdasan literasi bagi para pemuda. Orang cerdas tahu dan pasti memahami betul tentang sebuah persoalan dan itu dibutuhkan dalam mengkaji literasi. Kecerdasan adalah salah satu hal mutlak dalam literasi.

Di sesi selanjutnya, narasumber membahas jenis-jenis literasi. Melihat generasi jaman now ada yang namanya komunitas baca/diskusi merupakan perkumpulan orang-orang yang gemar membaca, menulis maupun mengemukakan ide-ide. Pada sesi ini narasumber kami berinteraksi langsung dengan para siswa/siswi, menanyakan apakah para peserta disini suka membaca? Berapakah kira-kira dalam sehari buku yang telah dibaca? Dan rata-rata dari mereka para peserta suka membaca, namun kebanyakan peserta menyebutkan novel dan komik sebagai sumber bacaan favorit mereka. Meskipun demikian, novel/komik termasuk jenis literasi bahkan blog/artikel yang ada di *website*.

Namun yang sangat disayangkan pada generasi milenials yang penuh dengan kecanggihan teknologi, banyak yang memanfaatkan kesempatan dan menjadikannya penyalahgunaan. Maksudnya adalah karena sudah sangat mudah sekali bagi mereka untuk mengakses literasi apapun, ketika membuat suatu karya tulis banyak yang tidak menghargai karya tulis seolah-olah karya tulis tiada harganya dengan melakukan copy paste/plagiarisme, hal tersebut merupakan bentuk penghinaan intelektual. Untuk itu

narasumber kami mengakhiri nya dengan sebuah statement “Hargai karyamu dan karya orang lain”.

Setelah sesi penyampaian materi, lalu para peserta siswa/siswi lanjut pada sesi praktik lapangan. Sesi ini merupakan sesi bagaimana mengaplikasikan materi-materi yang sudah disampaikan dan dibimbing langsung oleh para kakak-kakak mentoring dari para mahasiswa. Dengan mengikuti instruksi dosen kami yaitu membuat karya tulis yang sederhana saja, seperti membuat cerita pendek keseharian.

Disinilah para mahasiswa dituntut untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah didapatkannya di bangku perkuliahan. Sedikit banyak dari para siswa/siswi SMA/SMK menanyakan seputar perkuliahan pada kakak mentornya. Sesuai intruksi karya tulis yang sudah diselesaikan dikirim melalui email masing-masing peserta ke email kakak mentor. Harapan daripada diaadakannya PKM ini bisa menambah tingkat minat membaca dan menulis, selain itu bagi para mentoring bisa lebih bersemangat dalam mengamalkan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan.

Penutup

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di dua sekolah menengah yaitu SMK Informatika Pondok Ranji dan SMA Negeri 5 Tangerang Selatan ini memiliki beberapa manfaat yang dapat diukur dari tiga sudut pandang berbeda, yaitu dari sisi masyarakat sasaran, sisi pelaksana kegiatan dan yang ketiga sisi institusi.

Indikator pertama bagi masyarakat sasaran. Masyarakat sasaran sebagai target utama yaitu para siswa/siswi SMK Informatika Pondok Ranji dan SMA Negeri 5 Tangerang Selatan. Tercapainya pemahaman mengenai pentingnya kemampuan literasi yang didalamnya termasuk keahlian membaca dan menulis, bagi para pemuda Indonesia, khususnya generasi milenials yang memiliki usia produktif dan merupakan generasi penerus masa depolan bangsa.

Indikator kedua dari sisi pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan mendapatkan manfaat guna meningkatkan aktualisasi dan aplikasi keilmuan Hubungan Internasional, khususnya yang terkait mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah. Peran Program Studi Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur adalah meningkatkan pemahaman, wawasan serta keahlian masyarakat sasaran yaitu para pemuda/pemudi terhadap pentingnya kemampuan literasi. Serta masyarakat sasaran lebih memahami bahwa peran aktif bersama sebagai warga negara sangat berpengaruh dalam upaya peningkatan pengetahuan literasi anak-anak muda Indonesia.

Indikator ketiga peran institusi (dalam hal ini pihak program studi, fakultas dan universitas). Institusi berperan untuk melakukan transformasi keilmuan dan memberikan manfaat langsung keberadaannya di tengah masyarakat. Institusi juga dapat mempertahankan citra positifnya di masyarakat. Selain itu, memahami realita di masyarakat secara langsung dapat memberikan pemahaman atas permasalahan terkait

dengan pengembangan keilmuan dan institusi. Bagi institusi berkesempatan untuk mempromosikan nilai-nilai kebudiluhuran, mengaplikasikan nilai-nilai kebudiluhuran dengan turun lapangan, dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak terkait.

Bibliografi

- Dkampus. (2017). Pengertian Literasi menurut Para Ahli. Diakses dari <https://www.dkampus.com/2017/05/pengertian-literasi-menurut-para-ahli/>
- National Institute for Literacy (NIFL). (n.d.) Diakses dari <http://www.nifl.gov>.
- Joyo, Aceng. (2018). “Gerakan Literasi dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis Kearifan Lokal menuju Siswa Berkarakter,” dalam *Jurnal Kajian Bahasa, Sastra dan Pengajaran (KIBASP) Volume 1, No 2, Juni 2018*.
- Red. (2015). Literasi Indonesia Sangat Rendah. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/koran/didaktika/14/12/15/ngm3g840-literasi-indonesia-sangat-rendah>.
- Sari, Dwi Rini Endra. (2017). “Literasi, Kunci Kecerdasan dan Budaya Suatu Bangsa,” dalam *Kompasiana beyond Blogging*. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/ririnbmg/59ba53a5a7249b2d9d5be092/literasi-kunci-kecerdasan-dan-budaya-suatu-bangsa?page=all>
- Sekolah Kita. (n.d). Profil SMK Informatika. Diakses dari <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/a5c2c5f2-6f27-482e-a4b9-110071f7b074>
- SMA Negeri 5 Tangerang Selatan. (n.d.). Profil SMA negeri 5 Tangerang Selatan. Diakses dari <http://sman5kotatangsel.sch.id/index.php>

Pencak Malioboro Festival Sebagai *Soft Power* Dalam Promosi Pariwisata di Yogyakarta

Sintia Catur Sutantri¹

¹Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Wanita Internasional, Bandung.

Corresponding e-mail: sintia@iwu.ac.id

Abstrak



Yogyakarta dikenal sebagai kota wisata yang menjadi destinasi wisatawan domestik maupun mancanegara. Pencak Malioboro Festival merupakan kegiatan rutin tahunan dengan agenda kompetisi koreografi Pencak Silat, Pawai Raya Pencak Silat, Pencak Wisata Budaya dan lomba foto Pencak Silat. Dalam Pencak Wisata Budaya, Pencak Silat tradisional dan budaya Indonesia dikenalkan kepada peserta dari negara lain melalui workshop Pencak Silat tradisional, pengenalan batik, pembuatan keris, jemparing, gamelan, serta tata cara memakai udheng. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana Pencak Malioboro Festival memberikan kontribusi terhadap promosi pariwisata di Yogyakarta. Wawancara dan studi kepustakaan dilakukan dalam pengumpulan data. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah peserta yang mengikuti Pencak Malioboro Festival di Yogyakarta dari tahun ke tahun. Peserta tersebut berasal berbagai daerah di tanah air serta mancanegara. Kegiatan tersebut termasuk ke dalam diplomasi budaya yang dilakukan oleh *non-state actor* yaitu Peseduluran Angkringan Silat, Tantungan Project, dan perguruan Pencak Silat di Indonesia. Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan Propinsi Yogyakarta telah menjadikan Pencak Malioboro Festival sebagai agenda tujuan wisata budaya tahunan. Pencak Malioboro Festival yang telah digelar sebanyak 6 kali mulai dari tahun 2012 – 2019 memiliki peran penting sebagai *soft power* Indonesia terutama dalam promosi pariwisata dan kebudayaan di Yogyakarta.

Kata Kunci

Diplomasi Budaya, Pariwisata, Pencak Silat, Pencak Malioboro Festival, Soft Power, Yogyakarta

Pendahuluan

Sektor pariwisata menjadi program prioritas dalam Nawacita yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Hal tersebut terdapat pada point ke tujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

yang salah satunya adalah melalui pariwisata (Asdiana, 2016). Pariwisata merupakan sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Sedangkan kepariwisataan diselenggarakan dengan tujuan: a) memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata; b) memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa; c) memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja; d) meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; d) mendorong pendayagunaan produksi nasional (Undang-Undang, 1990).

Pariwisata di Indonesia tumbuh pesat melebihi industri lainnya. Dalam rentang waktu 2013-2017, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat penanaman modal di bidang industri pariwisata tumbuh rata-rata sebesar 20% per tahun. Berdasarkan capaian tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia tahun 2009 - 2014, Marty Natalegawa mengungkapkan bahwa keuntungan yang diperoleh dari pertumbuhan pariwisata di Indonesia bukan hanya secara ekonomi namun juga secara diplomasi. Selain itu, *soft power* merupakan instrumen yang bisa mempengaruhi cara pandang negara lain dengan cara-cara budaya dan pariwisata adalah elemen penting dari *soft power* tersebut (Sunata, 2018). Pernyataan tersebut sejalan dengan kegiatan diplomasi budaya di Yogyakarta yang dilakukan oleh *non-state actor* seperti komunitas kebudayaan dan masyarakat Yogyakarta dalam meningkatkan pelayanan dan promosi pariwisata melalui berbagai sarana serta aktifitas budaya sehingga terjalin hubungan diplomasi dengan negara lain dan mendorong mereka untuk datang ke Yogyakarta.

Yogyakarta menjadi salah satu destinasi wisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara karena memiliki keunggulan berupa adat budaya, bangunan heritage, wisata sejarah, serta kekayaan alamnya. Sebagai kota wisata, Yogyakarta masih menjaga keaslian dan keindahan seni budaya seperti di lingkungan istana raja, bangunan candi, monument sejarah, serta seni tari. Arsitektur di Yogyakarta juga mencerminkan tingginya nilai budaya di Yogyakarta. Undang-undang Keistimewaan Daerah Yogyakarta No. 13 Tahun 2012 memantapkan posisi dan peran penting Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjaga, mempertahankan dan mengembangkan kekayaan budaya baik pada tingkat logal, regional maupun nasional. Kentalnya aspek kebudayaan telah mewarnai berbagai aspek kehidupan masyarakat Yogyakarta termasuk pembangunan serta sektor pariwisata (DIY, 2019).

Wakil Gubernur Sri Paduka Paku Alam X menyatakan bahwa Yogyakarta tidak didorong untuk menjadi kota wisata, melainkan kota budaya. Akar budaya tidak akan dilepaskan karena merupakan salah satu bentuk daya tarik dari Yogyakarta (Fauziah, 2017). Arief Yahya, Menteri Pariwisata, mengungkapkan tiga kunci sukses untuk mendatangkan wisatawan mancanegara ke Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu konsistensi pengembangan atraksi, akses dan amenities atau biasa disebut program 3A.

Keterbatasan wilayah yang ada di Yogyakarta menyebabkan belum adanya penambahan lokasi objek wisata. Alternatif yang ditempuh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta adalah dengan diselenggarakannya berbagai macam kegiatan dengan tujuan menarik minat wisatawan seperti Malioboro Night Carnival, Festival Gamelan, Ngopi Gratis di Malioboro, Famtrip, dan Wayang Night Carnival (Nalendra, 2018).

Yogyakarta memiliki komunitas pecinta Pencak Silat yang aktif dalam melakukan kegiatan pelestarian budaya. Pencak Silat bukan saja sebagai olah raga bela diri, melainkan warisan seni budaya luhur yang harus didukung, dilestarikan, dan dikembangkan. Event Pencak Malioboro Festival yang dilaksanakan sejak tahun 2012 hingga tahun 2019 oleh Paseduluran Angkringan Silat dan Tangtungan Project dengan dukungan Dinas Kebudayaan dan pariwisata Yogyakarta merupakan salah satu kegiatan yang telah menjadi sarana wisata budaya di Yogyakarta. Kegiatan yang diikuti para pesilat dari berbagai perguruan dan berbagai daerah baik di tanah air maupun mancanegara tersebut memiliki agenda yang secara garis besar meliputi kompetisi koreografi Pencak Silat, Pawai Raya Pencak Silat, Pencak Wisata Budaya dan lomba foto Pencak Silat.

Berdasarkan latar belakang diatas, kajian ini akan difokuskan pada bagaimana Pencak Malioboro Festival sebagai *soft power* memberikan kontribusi dalam promosi pariwisata di Yogyakarta, dikarenakan kegiatan tersebut melibatkan banyak elemen yang terdiri dari komunitas Pencak Silat di Yogyakarta, masyarakat Yogyakarta, perguruan Pencak Silat dari berbagai penjuru tanah air dan mancanegara, serta Dinas Pariwisata Yogyakarta.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Pengertian deskriptif analitis adalah permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan dengan fakta yang lainnya, untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan berupa gambaran dari situasi yang menjadi bagian permasalahan yang akan diteliti. Dalam pendekatan kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif dari berbagai masukan yang diperoleh dari partisipan (Creswell, 1994). Data diambil melalui wawancara dan studi pustaka dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan objek penelitian dan kemudian menganalisisnya. Sumber literatur utama berasal dari buku, arsip serta dokumen-dokumen, artikel, jurnal, makalah, majalah, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.

Review Literatur/Tinjauan Pustaka

Soft Power

Soft power mulai diperkenalkan dalam menganalisa perkembangan kebijakan luar negeri AS pasca perang dingin. Soft power dipergunakan setelah sebelumnya Amerika Serikat (AS) lebih banyak menggunakan pendekatan hard power dalam berinteraksi dengan negara lain. Pada saat itu AS lebih banyak menggunakan pendekatan militerisme dan ekonomi dalam menjalankan interaksinya dengan negara lain terutama dalam meningkatkan pengaruh kepada negara lain. Akibat yang muncul ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan AS berupa meningkatnya pengaruh serta aliansi. *Soft power* lebih bersifat coopt daripada coersive. *Soft power* tidak sama dengan pengaruh (*influence*), lebih dari sekedar bujukan (*persuasion*) namun *soft power* adalah kemampuan untuk menarik pihak lain melakukan sesuatu tanpa mereka menyadari bahwa mereka ditarik untuk mengikuti kehendak yang dimaksud. Sumber-sumber *soft power* adalah sesuatu yang bisa menimbulkan daya tarik (*attraction*) pihak lain (Nye, *Soft Power The Means to Succes in World Politics*, 2004). Dengan pendekatan-pendekatan *soft power* ini maka akan memudahkan negara dalam melaksanakan diplomasinya (Hennida, 2010)

Sumber *soft power* yang berasal dari budaya adalah salah satu sumber potensial yang sangat bermanfaat. Sumber budaya tersebut adalah serangkaian nilai dan aktifitas yang bermakna bagi masyarakat. Beberapa bentuknya yaitu sastra, seni dan pendidikan pada masyarakat yang fokusnya adalah mass entertainment. Cara-cara yang dilakukan secara komunikatif, perwujudannya akan berupa dialog, diplomasi, kerjasama, atau kerja bersama. Melalui pendekatan tersebut Indonesia dapat terangkat di mata dunia internasional lewat makanan/kuliner (nasi goreng, kopi luwak), pariwisata (Bali dan pulau-pulau lain), kerajinan tradisional (batik, handycraft dan lain-lain), kesenian (angklung) dan olahraga (bulu tangkis dan pencak silat) (Machya Astuti Dewi dan Sri Issundari, 2016).

Diplomasi Budaya

Diplomasi merupakan kajian ilmu Hubungan Internasional yang digunakan sebagai salah satu inisiatif dalam meningkatkan eksistensi, mempromosikan negara, atau menyebarkan pengaruh ke negara lain untuk meraih kepentingan nasional bagi masing-masing negara (Panikkar, 1995). Pola hubungan diplomasi kebudayaan bisa terjadi antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan swasta, swasta dengan swasta, individu dengan individu, pemerintah dengan individu dan lain sebagainya, dengan tujuan utama mempengaruhi pendapat umum pada level nasional maupun internasional (S.L.Roy, 1991)

Budaya, terutama yang menarik bagi masyarakat lain, adalah salah satu sumber penting dari *soft power* (Nye, *The Future of Power*, 2011). Melalui penjelasan tersebut maka diplomasi berusaha mencapai kepentingan nasional suatu bangsa dengan cara

yang damai dan mengedepankan *soft power*. Aktivitas diplomasi kebudayaan merupakan kegiatan yang berpotensi bagi suatu negara untuk dapat memaksimalkan *soft power* mereka dalam meyakinkan dan mempengaruhi negara lain baik pemerintah ataupun warga negara untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri mereka. Diplomasi kebudayaan ini dianggap efektif mencapai tujuan karena pelaksanaannya dapat berlangsung dalam situasi apapun, baik dalam keadaan konflik, krisis, perang ataupun damai (Clarke, 2014). Diplomasi kebudayaan juga menjadi salah satu sarana efektif untuk mencapai kepentingan bangsa agar bangsa lain dapat memahami, memberikan informasi, dan dapat mempengaruhi bangsa lain. Dengan dilakukannya diplomasi kebudayaan dapat meningkatkan apresiasi dan pemahaman untuk meningkatkan citra positif, membangun saling pengertian dalam memperbaiki citra bangsanya (Appel, 2008).

Terdapat beberapa kekuatan utama dari diplomasi budaya; a). Diplomasi budaya adalah koneksi 2 arah, bukan paksaan unilateral. Dengan demikian, diplomasi budaya memberikan ruang bagi dialog yang mengarah pada pembentukan rasa saling percaya; b). Diplomasi budaya dapat meningkatkan pemahaman di antara masyarakat dan budaya karena diplomasi budaya menyediakan apa yang menarik bagi penerimanya; dan c). Diplomasi budaya beroperasi dalam rentang waktu yang panjang sehingga dapat menghubungkan pihak-pihak dari kelompok yang berkonflik, bahkan pada keadaan hubungan diplomatik yang negatif. Oleh karena itu, diplomasi budaya dapat bertindak sebagai satu-satunya solusi yang efektif ketika muncul ketegangan dan konflik (Schneider, 2006). Dalam pelaksanaannya, diplomasi kebudayaan membutuhkan instrumen agar tujuannya tercapai. Terdapat 5 instrumen diplomasi kebudayaan yang dilakukan dengan cara damai diantaranya pameran, kompetisi, negosiasi, pertukaran ahli/studi, dan konferensi yaitu rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai masalah yang dihadapi bersama (Tulus Warsito dan Kartikasari, 2007).

Pariwisata

Pariwisata merupakan aktivitas perubahan tempat tinggal sementara seseorang ke luar tempat tinggalnya sehari-hari bersifat sementara dengan suatu alasan apapun kecuali melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan upah atau gaji. Menurut motivasi perjalanan, pariwisata terdiri dari: a. Pariwisata rekreasi (*recreational tourism*) adalah bentuk pariwisata untuk beristirahat guna memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohani dan menghilangkan kelelahan; b. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*pleasure tourism*) adalah bentuk pariwisata yang dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara segar, untuk memenuhi kehendak ingin tahunya, untuk menikmati hiburan dan lain-lain; c. Pariwisata budaya (*cultural tourism*) adalah bentuk pariwisata yang ditandai dengan rangkaian motivasi seperti keinginan untuk belajar adat istiadat dan cara hidup rakyat negara lain, studi-studi/riset pada pertemuan-pertemuan, mengunjungi tempat-tempat

peninggalan kuno/bersejarah dan lain-lain; d. Pariwisata olah raga (*sport tourism*) (A.J. Muljadi dan Warman Andri, 2014).

Undang-undang RI No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menyatakan bahwa atraksi wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan hal lain berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata. Atraksi dan data tarik wisata seringkali diklasifikasikan berdasarkan jenis dan temanya yang terdiri dari wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus. Kedudukan ketiganya sangat penting dalam menarik kunjungan wisatawan ke destinasi wisata (Ulfa, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Pencak Malioboro Festival Sebagai Soft Power dalam Diplomasi Budaya di Yogyakarta

Pencak Malioboro Festival merupakan kegiatan rutin tahunan dengan agenda kompetisi koreografi Pencak Silat, Pawai Raya Pencak Silat, Pencak Wisata Budaya dan lomba foto Pencak Silat. Tiga tempat yang digunakan dalam acara tersebut adalah kawasan Malioboro, eks Pasar Ngasem Kraton Yogyakarta dan Balai Kota Yogyakarta. Falsafah yang digunakan dalam Pencak Malioboro Festival adalah persatuan dan persaudaraan. Para pesilat berkumpul dan bertukar seni budaya dalam yang digelar di Jl. Malioboro. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh Paseduluran Angkringan Silat dan Tangtungan Project sejak tahun 2012 disusul dengan kegiatan yang sama pada tahun 2013, 2014, 2015 (diganti dengan nama Jambore Pencak Nusantara), 2017 dan 2019. Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan Propinsi Yogyakarta menyatakan bahwa Pencak Malioboro Festival merupakan agenda tujuan wisata budaya tahunan.

Tabel 1. Jumlah Peserta Pencak Malioboro Festival (2012 – 2019)

Kegiatan	Waktu	Jumlah Peserta	Peserta Mancanegara
PMF 1	25-27 Mei 2012	± 2500 / 30 perguruan	Spanyol, Italia, dan Thailand
PMF 2	31 Mei – 2 Juni 2013	± 5000 / 40 perguruan	Thailand, Malaysia, Italia dan AS
PMF 3	30 – 31 Mei 2014	± 5500 / 61 perguruan	AS, Thailand, dan Malaysia
PMF 4	28 – 31 Mei 2015	± 6000 / 60 perguruan	Italia, Spanyol, dan AS

PMF 5	18 – 20 Agustus 2017	± 6000 perguruan	/	65	Jepang, Jerman, Afrika Selatan, Inggris dan Australia
PMF 6	6 – 8 September 2019	± 6000 perguruan	/	65	Malaysia, Singapura, Hongaria, dan Jepang

Sumber: Dirangkum dari berbagai sumber

Dari tabel diatas diketahui bahwa kegiatan Pencak Malioboro Festival telah diadakan dari tahun 2012 hingga tahun 2019. Pada tahun 2018 event tersebut tidak dilaksanakan dikarenakan mendekati Pemilu yang dirasa akan sensitif dengan kegiatan politik. Panitia pelaksana tidak ingin kegiatan tersebut dijadikan sarana kampanye oleh beberapa pihak. Namun kegiatan pelestarian Pencak Silat tetap dilakukan dengan dilaksanakannya kegiatan workshop Pencak Silat yang juga mengundang para pecinta Pencak Silat dari berbagai daerah. Jumlah peserta pun mengalami kenaikan dimulai dari ±2500 peserta hingga akhirnya mencapai lebih dari 5000 peserta. Hal tersebut didukung oleh promosi yang semakin baik terutama melalui media sosial. Dukungan pemerintah pun semakin meningkat. Jika pada awal penyelenggarannya hanya didukung oleh Pemerintah Kota, maka sekarang dukungan datang dari Pemerintah Provinsi hingga Sri Sultan Hamengku Buwono X pun hadir dalam kegiatan Pencak Malioboro Festival (Priyanto, Pencak Malioboro Festival, 2019).

Paseduluran Angkringan Silat (PAS) dan Tangtungan Project adalah aktor utama dalam Pencak Malioboro Festival. Tangtungan Project didirikan pada tahun 2009 di Yogyakarta dengan misi pelestarian, promosi dan publikasi Pencak Silat. Dalam perjalannya Tangtungan Project telah mengadakan berbagai kegiatan diantaranya workshop, festival, lomba foto, dan pembuatan video Pencak Silat. Sedangkan Paseduluran Angkringan Silat (PAS), sebelum terbentuk dalam sebuah organisasi hanyalah sekumpulan penggiat Pencak Silat Yogyakarta yang berkumpul demi kecintaannya terhadap Pencak Silat. Pada 24 Desember 2011 PAS menjadi sebuah komunitas yang mampu mengumpulkan para pecinta Pencak Silat dari berbagai daerah baik dalam negeri maupun luar negeri. PAS bersama para pemerhati dan insan persilatan terus berupaya mengembalikan jati diri Pencak Silat menjadi salah satu warisan budaya nusantara yang tidak hanya dihargai oleh bangsa sendiri namun juga oleh bangsa lain. Pada awal berdirinya, PAS tidak lepas dari peran Padepokan PERPI Harimurti. Banyak kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelestarian dan promosi Pencak Silat antara lain: pameran foto sepanjang Jalan Malioboro, “ngamen silat” di pusat keramaian, sarasehan Pencak Silat, hingga mengadakan kerja sama dengan institusi pendidikan untuk memberikan pendidikan Pencak Silat seni dan budaya (Arief, 2013).

Kedua komunitas Pencak Silat tersebut bekerja sama untuk menciptakan sebuah kegiatan bertemunya pecinta Pencak Silat dari berbagai perguruan baik yang sudah besar sampai perguruan kecil (sebelumnya belum terkenal namanya). Antusiasme anggota perguruan tercermin dalam keikutsertannya pada rangkaian Pencak Malioboro Festival yang secara garis besar terdiri dari empat kegiatan.

a. Kompetisi Koreografi Pencak Silat

Dalam kompetisi koreografi, Pencak Silat dinilai dari keragaman gerak, harmonisasi musik, tata panggung, dan kostum. Ada tema yang harus diusung sehingga mendorong para pesilat untuk tampil terbaik, jadi tidak hanya jurus-jurus baku diiringi musik. Melalui kegiatan ini, semangatnya melestarikan, mencintai budaya bangsa, semangat sportivitas, dan menghargai keberagaman menjadi tujuannya. Hal ini juga bisa menjadi promosi wisata Yogyakarta karena banyak pesilat dari berbagai daerah yang datang (Pradito, 2019).

JG Davies (akademisi Amerika) yang mengkaji seni bela diri mengatakan bahwa seni bela diri berkembang di era global, hal itu dikarenakan usaha komersialisasi seni bela diri untuk bisnis, promosi media, dan penerapan diplomasi internasional. Hampir 100 juta orang di dunia tertarik terhadap seni bela diri dengan alasan pertahanan diri, kesehatan dan rekreasi, kepercayaan diri, disimplin serta dukungan lingkungan sosial. Diplomasi Pencak Silat pernah dilakukan Indonesia di Belanda yang lebih menekankan pada diplomasi budaya (Waluyo dan Kurnia, 2013). Oleh karena itu dengan adanya Pencak Malioboro Festival, peminat dari manca negara lebih tertarik untuk datang ke Indonesia untuk lebih mendalami seni bela diri Pencak Silat serta koreografi pertunjukan Pencak Silat.

Pada lomba kompetisi gerak/koreografi Pencak Silat, peserta yang ikut serta tidak mewakili perguruan masing-masing melainkan sesuai dengan kategori kelompok yang dibuat peserta. Tiap tim beranggotakan pesilat dari perguruan yang berbeda-beda dengan tujuan memperlerat persaudaraan antarpesilat. Jurus yang ditampilkan pun bukan jurus khas dari masing-masing perguruan. Selain itu akan digelar acara khaulan para pesilat untuk menampilkan koreografi pencak masing-masing perguruan (Rusqiyati, 2014). Pada kegiatan tersebut, keragaman gerak, harmonisasi musik, dan kostum yang digunakan pada kompetisi koreografi Pencak Silat dapat menarik minat para wisatawan untuk lebih mengenal kebudayaan bangsa Indonesia. Tanpa dipaksa kegiatan ini juga akan menjadi objek foto yang menarik bagi wisatawan. Tidak menutup kemungkinan para wisatawan asing ingin mempelajari gerak Pencak Silat sebagaimana yang ditampilkan oleh para pesilat.

b. Pawai Raya Pencak Silat

Puncak acara Pencak Malioboro Festival adalah pawai raya Pencak Silat yang dilaksanakan di sepanjang Jl. Malioboro hingga Titik Nol Kilometer. Peserta berkumpul di parkir Abu Bakar Ali dan UPT Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan

Pemprov DIY di Jalan Malioboro. Seremonial acara pembukaan dan pelepasan peserta pawai oleh Kepala Dinas Pariwisata DIY, dengan pemberangkatan peserta pawai diawali oleh pasukan keraton Dewandanu dan selanjutnya diikuti peserta dari berbagai perkumpulan Pencak Silat daerah di Indonesia dan juga diikuti peserta dari manca negara yang berjumlah lebih dari 5000 peserta. Danlanal Yogyakarta mengungkapkan bahwa kegiatan pawai Pencak Malioboro Festival yang digelar di jalan arteri pusat Kota Yogyakarta, tepatnya di kawasan Jalan Malioboro sampai dengan kawasan Titik Nol Km menjadi wahana hiburan kepada masyarakat Yogyakarta khususnya, dan juga memiliki nilai kesan tersendiri bagi para wisatawan yang sedang berkunjung di kota Yogyakarta sebagai kota tujuan wisata. Kegiatan pawai ini juga berasal dari negara-negara tetangga tentunya akan sangat memberikan kesan mendalam, khususnya bagi peserta mancanegara untuk lebih mengenal dengan baik kota Yogyakarta sebagai kota warisan budaya, tidak hanya diakui ditingkat nasional namun juga tingkat internasional (Poskotanews, 2019).

Peserta Pencak Malioboro Festival yang telah berlangsung sejak tahun 2012 ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terdapat salah satu perguruan yang pada tahun 2012 hanya mengirimkan 100 orang peserta, pada tahun 2019 menurunkan 1700 peserta. Antusiasme peserta dari berbagai perguruan Pencak Silat semakin besar dan hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi pariwisata di Yogyakarta khususnya di sekitar Malioboro yang selalu ramai didatangi wisatawan domestik maupun mancanegara. Atraksi yang dilakukan oleh setiap perguruan Pencak Silat di sepanjang Jl. Malioboro menarik perhatian para wisatawan sehingga menjadi objek foto. Bahkan para wisatawan mancanegara ingin mencoba senjata yang digunakan para pesilat seperti kipas, thoya dan pedang (Priyanto, Pencak Malioboro Festival, 2019)

c. Pencak Wisata Budaya

Pencak Wisata Budaya adalah program yang dikhususkan bagi warga negara asing berupa pengenalan pencak nusantara dan berbagai ragam sub budaya dan ruang lingkungannya. Warga negara asing yang mengikuti pencak wisata budaya berasal dari Malaysia, Singapura, Australia, Hungaria, Jepang, Perancis, Jerman, Italia, Singapore, USA, Spanyol, Mexico, Inggris, Rusia, Puerto Rico. Tempat pertama adalah guesthouse Omahkebon, Nitiprayan, Bantul, Yogyakarta dan yang kedua di Embung Kaliaji, desa Sangurejo. Selama empat hari berturut-turut para peserta ini mengikuti beberapa workshop pencak Nusantara diantaranya dari Perguruan Silat Gerak Gulung Budidaya, Perguruan Pencak Silat Patikaman. Selain itu peserta dari manca negara terlibat aktif dalam aktifitas kultural seperti kunjungan ke tempat pembuatan keris, pembuatan batik, pemakaian udheng (ikat kepala), belajar memanah dengan model Mataraman, serta terlibat langsung dalam pawai besar PMF di sepanjang Malioboro hingga titik 0 km. Acara ini melibatkan para tokoh Budayawan Yogyakarta, antara lain Widihasto Wasana Putra, yang melakukan salam *'thanks to'* kepada para peserta dengan tema "Silat dari Yogya untuk Dunia". Sebagai ajang kegiatan wisata

disuguhkan pertunjukan budaya, pembelajaran seni jemparingan (panah) gaya Mataram, kunjungan ke tempat pembuatan keris, cara menabuh gamelan serta lintas alam di daerah Gunung Merapi yang Asri (Tangtunganproject, 2014).

Bentuk Pencak Wisata Budaya lainnya dikemas dalam bentuk Jambore Pencak Silat Nusantara sesuai keinginan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Kegiatan jambore ini identik dengan berkemah (*camping*). Sesuai dengan kata etimologi jambore, Wisata Pencak Nusantara adalah ajang berkumpulnya para pesilat di satu tempat yang sama untuk menyatu dengan alam dan bersama sama belajar tentang Pencak Silat Nusantara. Berkemah bersama lebih dari 6000 pesilat di Yogyakarta cukup menyulitkan, oleh karena itu Tangtungan Project dan Paseduluran Angkringan Silat mengolah berbagai ide sesuai dengan keputusan Dinas Pariwisata yang menjadikann Pencak Malioboro Festival sebagai event Wisata Tahunan. Acara ini terlaksana berkat kerjasama dari beberapa pihak yaitu komunitas Paseduluran Angkringan Silat (PAS) Yogyakarta, Lembaga Dokumentasi Silat Nusantara Tangtungan Project dan Lembaga Pengembangan Pribadi dan Korporasi Whanidproject (Tangtunganproject, 2014).

Berdasarkan data diatas, Pencak Wisata Budaya merupakan sumber *soft power* yang berasal dari budaya karena terdiri dari serangkaian nilai dan aktifitas yang bermakna bagi masyarakat terutama dalam bidang seni Pencak Silat. Cara yang ditempuh dalam Pencak Wisata Budaya dilakukan secara komunikatif melalui dialog, diplomasi (terutama dengan peserta dari manca negara), serta kerjasama. Selain dikenalnya Pencak Silat sebagai budaya Indonesia, Kegiatan Pencak Wisata Budaya yang merupakan rangkaian kegiatan Pencak Malioboro Festival yang menjadi bagian promosi pariwisata di Yogyakarta dan menjadi agenda tahunan yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata DI Yogyakarta.

d. Lomba Foto Pencak Silat

Dalam diplomasi budaya pameran/eksibisi merupakan salah satu instrument diplomasi. Lomba foto Pencak Silat menjadi kegiatan yang penting karena fotografi merupakan salah satu cara pendokumentasian, pelestarian dan pengembangan Pencak Silat. Tema foto setiap tahun berbeda-beda namun pada intinya adalah mengangkat Pencak Silat sebagai warisan budaya nusantara yang harus dipelihara, dilestarikan dan diwariskan kepada anak cucu kita sebagai bentuk tanggung jawab sebagai bangsa dan penerus leluhur.

Foto merupakan salah satu alat diplomasi yang pernah digunakan oleh Duta Besar Bosnia di Indonesia dan Herzegovina untuk Indonesia, Mohammad Gengic. Gengic berharap fotografis dapat terus berkembang menjadi media untuk memperdalam diplomasi publik antar negara. Muhammad Anshor, Dirjen Amerika dan Eropa Kemlu RI menyebutkan bahwa foto merupakan media diplomasi yang bisa menghubungkan persahabatan rakyat satu negara dengan negara lain (CNN, 2018). Melalui foto yang dipamerkan dan dilombakan dalam Pencak Malioboro Festival. seluruh peserta lomba

akan berusaha untuk menangkap gambar terbaik sesuai tema dan pengunjung dapat menikmati bagaimana Pencak Silat digambarkan dalam berbagai situasi baik keindahan, kekompakan, ekspresi dan keunikannya sehingga menarik minat untuk mempelajarinya secara langsung. Latar belakang Malioboro dengan kekhasannya sebagai objek foto Pencak Silat dapat menjadikan sarana diplomasi budaya.

Pencak Malioboro Festival yang terdiri dari 4 rangkaian kegiatan diatas bukan arena pertarungan para pesilat, namun lebih menampilkan sisi seni budaya dan keindahan dari gerakan-gerakan Pencak Silat. Festival tersebut merupakan kegiatan sebagai sarana melestarikan seni bela diri Pencak Silat sebagai budaya asli Indonesia. Pencak Silat pun selama ini selalu digadag-gadang menjadi salah satu seni pemersatu bangsa, sekaligus upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sehingga tujuan membangkitkan, melestarikan, dan mempopulerkan kembali Pencak Silat sebagai warisan budaya bangsa Indonesia sangat tinggi nilainya pada event ini.

Berdasarkan data tersebut, Pencak Malioboro Festival telah menjadi sumber *soft power* Indonesia khususnya di Yogyakarta yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung. Pihak-pihak yang terlibat mengikuti kegiatan tersebut tanpa paksaan namun secara tidak disadari ditarik untuk mengikuti kehendak yang dimaksud yaitu membangkitkan, melestarikan, dan mempopulerkan kembali Pencak Silat. Sehingga event ini menjadi salah satu destinasi wisata di Yogyakarta.

Diplomasi budaya terjalin dalam event ini karena terdapat *people to people contact* antara para pesilat dengan para wisatawan mancanegara. Tangtungan Project dan Paseduluran Angkringan Silat juga telah menjadi *non-state actor* dalam pelaksanaan diplomasi budaya karena telah berupaya menyuguhkan atraksi wisata dengan Pencak Silat sebagai *soft power* nya sesuai dengan UU RI RI No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menekankan atraksi wisata sebagai sasaran atau tujuan kunjungan wisata.

Pencak Malioboro Festival sebagai Sarana Promosi Pariwisata Yogyakarta

Peringkat Daerah Istimewa Yogyakarta pada indeks pariwisata Indonesia versi Kementerian Pariwisata menempati posisi ke-4 setelah Denpasar, Surabaya dan Batam (HarianJogja, 2017). Yogyakarta masih menjadi destinasi wisata unggulan di Indonesia dengan kekhasan budaya dan bangunan-bangunan kuno yang masih terjaga.

Tabel 2. Jumlah Peserta Pencak Malioboro Festival (2012 – 2019)

Peringkat	Negara	Jumlah Wisatawan		Presentasi Kenaikan/Penurunan
		2017	2018	
1	Malaysia	37.934	54.262	43,04%
2	Singapura	21.241	40.925	92,67%

3	Jepang	49.892	40.686	18,45%
4	Belanda	50.996	29.331	42,48%
5	Amerika Serikat	17.429	24.655	41,46%
6	China	10.449	19.197	83%
7	Australia	17.815	18.962	6,44%
8	Jerman	16.789	18.847	12,19%
9	Perancis	25.816	16.787	34,97%
10	Korea Selatan	14.846	16.564	11,57%

Sumber: Statistik Kepariwisataaan 2018 Dinas Pariwisata DIY

Humas Tangtungan Project menyatakan bahwa kegiatan Pencak Malioboro Festival memiliki semangat melestarikan dan mencintai budaya bangsa serta semangat menghargai keberagaman dalam satu kesatuan keluarga Pencak Silat. Makna kegiatan tersebut adalah sebagai pertemuan besar para pesilat untuk membina persahabatan, kekeluargaan dan persatuan dalam situasi yang spektakuler. Pencak Silat sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Tidak sekedar sebagai olahraga, Pencak Silat lebih menitikberatkan pendidikan karakter bangsa (Kertasari, 2017). KGPAA Paku Alam X menyebutkan bahwa Pencak Silat memiliki arti filosofi tinggi, mampu menyatukan banyak perbedaan dalam satu kecintaan demi Indonesia Damai. Untuk itu, pencak silat harus tetap lestari di bumi pertiwi. Pencak silat juga bisa menjadi ajang promosi pariwisata daerah, termasuk Yogyakarta (BeritaDIY, 2019).

Sri Sultan Hamengku Buwono X (yang juga menjabat sebagai Gubernur DI Yogyakarta) menyatakan bahwa Pencak Silat adalah aktifitas fisik dan rohani, menjadi produk bangsa sendiri yang mengandung kearifan lokal yang wajib untuk dijaga dan dikembangkan sehingga kehadiran Pencak Silat untuk bangsanya sendiri di tanah air menjadi sesuatu yang sangat strategis. Sri Sultan juga menyambut positif Kegiatan Pencak Malioboro Festival (PMF) dan sempat mengusulkan agar diselenggarakan Jambore Pencak Silat Nusantara di Yogyakarta (terlaksana pada tahun 2015). Selain untuk tujuan mempromosikan budaya, kegiatan-kegiatan Pencak Silat yang diselenggarakan Paseduluran Angkringan Silat dan Tangtungan Project bisa mempromosikan pariwisata Yogyakarta. Ribuan pesilat dari berbagai penjuru Indonesia dan luar negeri akan menjadi turis di Yogyakarta selama kurun waktu tersebut dan menambah jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia (Swanti, 2014).

Pencak Malioboro Festival menjadi event yang menarik sehingga menjadi hiburan tersendiri bagi warga Yogyakarta maupun wisatawan serta menjadi alternatif kunjungan di Yogyakarta. Melalui agenda tahunan tersebut diharapkan dapat lebih mengenalkan Pencak ke masyarakat bukan hanya sebagai bela diri atau olah raga namun juga memiliki seni dan budaya yang tinggi. Selain itu kegiatan tersebut dapat mendukung perkembangan sektor pariwisata di Yogyakarta. Mengingat event ini akan digelar setiap tahun, diharapkan dapat menambah dan memperkaya seni budaya paket wisata di DIY yang pada akhirnya menambah jumlah kunjungan wisata di DIY (HumasDIY, 2013).

Wisatawan dari Serbia saat menikmati Pencak Malioboro Festival. Menurutnya Yogyakarta itu lebih unggul dalam hal budaya dan adat yang ada sehingga menjadi daya tarik yang sangat berbeda dengan Bali dan Lombok. Bali dan Lombok lebih mengunggulkan lokasi wisatanya, tapi di Yogyakarta kita bisa setiap saat menikmati budaya dan adat seperti yang ada di Keraton. Terkait dengan Pencak Malioboro Festival, wisatawan Serbia tersebut mengakui bahwa dirinya sangat menikmati segala pertunjukan yang ada. Walaupun sebenarnya tidak tahu apa yang dimaksud dalam pertunjukan, namun penampilan koreografi, kostum dan musik yang mengiringi menjadikan itu sangat menarik dan sangat bagus untuk menjadi objek foto (Desca, 2019).

Dari data yang telah diperoleh, jenis pariwisata yang terangkat melalui kegiatan Pencak Malioboro Festival adalah pariwisata budaya (*cultural tourism*) yang ditandai dengan rangkaian motivasi seperti keinginan untuk belajar adat istiadat dan cara hidup rakyat negara lain melalui pertemuan-pertemuan, mengunjungi tempat-tempat peninggalan kuno/bersejarah dan lain sebagainya. Hal tersebut terlihat dari antusiasme para peserta dari manca negara yang mengikuti Pencak Wisata Budaya yang di dalamnya terdapat kegiatan workshop Pencak Silat serta pengenalan kebudayaan Indonesia lainnya seperti batik, udheng, panahan model Mataraman, gamelan, dan lain sebagainya.

Penutup

Keunikan lain dari Pencak Malioboro Festival adalah kegiatan Pencak Witasas Budaya yang dilaksanakan bukan hanya dalam rangka Pengenalan Pencak Silat melainkan mengenalkan budaya Indonesia lainnya seperti pembuatan batik, pembuatan keris, pembuatan perhiasan dari perak, tata cara memainkan gamelan, memakai udheng, dan jemparing model Mataraman. Kegiatan yang dikhususkan bagi para peserta dari manca negara ini menjadi *soft power* dalam diplomasi budaya serta promosi pariwisata di Yogyakarta.

Pelaksanaannya di sepanjang Jl. Malioboro menjadikan event ini mudah diterima dan dinikmati masyarakat. Apalagi Malioboro merupakan salah satu destinasi wisata andalan di Yogyakarta. Promosi pariwisata khususnya pariwisata budaya pun dapat

ditingkatkan melalui Pawai Pencak Silat di sepanjang Jl. Malioboro. Setiap peserta yang berasal dari berbagai daerah dan perguruan menggunakan kostum tersendiri sesuai ciri khas perguruannya. Mekera pun mempraktikkan gerak Pencak Silat baik tangan kosong maupun menggunakan senjata sehingga menarik perhatian para wisatawan yang sedang berada di lokasi acara. Kedatangan ribuan peserta ke Yogyakarta secara langsung meningkatkan kunjungan wisata di Yogyakarta. Terjadi peningkatan peserta dari setiap waktu pelaksanaannya sejak tahun 2012. Dimulai dari 2500 peserta meningkat menjadi 6000 peserta di tahun 2019.

Telah terjadi aktifitas diplomasi budaya dalam Pencak Malioboro Festival melalui *people to people contact* antara para peserta dan pemateri yang berasal dari dalam dan luar negeri. Pencak Silat menjadi daya tarik yang mendorong wisatawan manca negara untuk mengenal lebih dalam apa itu Pencak Silat. Eksepsi melalui kompetisi koreografi dan lomba foto Pencak Silat adalah salah satu instrumen diplomasi budaya yang dapat meningkatkan pemahaman di antara masyarakat dan budaya karena diplomasi budaya menyediakan apa yang menarik bagi penerimanya. Pencak Malioboro Festival merupakan *soft power* dalam meningkatkan promosi wisata di Yogyakarta. Dukungan *non- state actor* yaitu Paseduluran Angkringan Silat, Tangtungan Project, Perguruan Pencak Silat, bahkan Pemerintah Daerah DI Yogyakarta menjadikan kegiatan tersebut sebagai event wisata tahunan dan menjadi destinasi wisata di Yogyakarta.

Referensi

- A.J. Muljadi dan Warman Andri. (2014). *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Appel, R. a. (2008). Cultural Diplomacy: An Important but Neglected tool In Promoting Israel's Public Image. *Argov Fellow Program in Leadership and Diplomacy*, -.
- Arief. (2013, Mei 2). Dipetik Oktober 3, 2019, dari <https://tangtungan.com/pencak-malioboro-festival-2013-2/>
- Asdiana, I. M. (2016, Mei 28). Dipetik Oktober 10, 2019, dari <http://travel.kompas.com/read/2026/05/28/201600127/Gebrakan.Presiden.Joko.wi.GairahkanSektor.Pariwisata>
- BeritaDIY. (2019, September 8). Dipetik Oktober 3, 2019, dari <https://jogjaprov.go.id/berita/detail/8086-wagub-diy-ikuti-ikrar-indonesia-damai>

- Clarke, D. (2014). Theorising the Role of Cultural Product in Cultural Diplomacy from A Cultural Studies Perspective. *International Journal of Cultural Policy*, Vol 22.
- CNN. (2018, Agustus 28). Dipetik Oktober 3, 2019, dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180828125451-106-325470/diplomasi-dubes-bosnia-untuk-indonesia-lewat-foto-papua>
- Creswell, J. W. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*.
- Desca, A. (2019, September 6). Dipetik Oktober 5, 2019, dari <https://jogja.tribunnews.com/2019/09/06/wisatawan-mancanegara-apresiasi-kegiatan-pencak-malioboro-festival?page=2>
- DIY, D. P. (2019). *Statistik Kepariwisata*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Fauziah, S. (2017, Juni 16). Dipetik Oktober 7, 2019, dari <https://www.brilio.net/jalan-jalan/yogyakarta-pertegas-citra-sebagai-tujuan-wisata-budaya-ini-alasannya-170616j.html>
- HarianJogja. (2017, Mei 3). Dipetik Oktober 3, 2019, dari <https://www.jogja.co/berita-jogja-inilah-peringkat-pariwisata-diy-di-indonesia>
- Hennida, C. (2010). Diplomasi Publik Dalam Politik Luar Negeri. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 17-23.
- HumasDIY. (2013, Mei 17). Dipetik Oktober 5, 2019, dari <https://jogjaprovo.go.id/berita/detail/wakil-gubernur-diy-terima-panitia-festival-malioboro-pencak-silat-pas-2013>
- Kertasari, S. (2017, Agustus 1). Dipetik Oktober 3, 2019, dari <https://tangtungan.com/lomba-foto-pencak-pmf-v-2017-uji-kemampuan-fotografi-dalam-ajang-internasional-ribuan-pesilat/>
- Machya Astuti Dewi dan Sri Issundari. (2016). Desa Wisata Sebagai Aset Soft Power Indonesia. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 29 (2), 64-74.
- Nalendra. (2018, September 7). Dipetik Oktober 3, 2019, dari <https://gudeg.net/read/11236/malioboro-masih-jadi-tujuan-wisata-favorit.html>

- Nye, J. S. (2004). *Soft Power The Means to Succes in World Politics*. USA: Public Affairs.
- Nye, J. S. (2011). *The Future of Power*. New York: Public Affairs.
- Panikkar, K. (1995). *The Principle and Practice Diplomacy*. Diterjemahan oleh Harwanto dan Miraswati. Jakarta: Rajawali Pers.
- Poskotanews. (2019, September 10). Dipetik Oktober 4, 2019, dari <https://poskotanews.com/2019/09/10/danlanal-yogyakarta-hadiri-pawai-pencak-malioboro-festival-2019/>
- Pradito. (2019, September 4). Dipetik Oktober 10, 2019, dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4693766/ribuan-pesilat-semarakkan-pencak-malioboro-festival-di-yogya>
- Priyanto, G. (2019, Oktober 19). Pencak Malioboro Festival. (S. Catur, Pewawancara)
- Priyanto, G. (2019, Oktober 19). Pencak Malioboro Festival. (S. Catur, Pewawancara)
- Rusqiyati, E. A. (2014, Mei 16). Dipetik Oktober 10, 2019, dari <https://www.antaranews.com/berita/434565/pencak-malioboro-festival-dimeriahkan-5-ribu-pesilat>
- S.L.Roy. (1991). *Diplomacy*. Diterjemahkan oleh Harwanto dan Miraswati. Jakarta: Rajawali Pers.
- Schneider, C. P. (2006). Cultural Diplomacy: Hard to Define, But You'd Know it if You Saw it. *The Brown Journal of World Affairs, Fall/Winter*.
- Sunata, R. (2018, Oktober 26). Dipetik Oktober 10, 2019, dari www.genpi.co: <https://www.genpi.co/berita/2886/marty-natalegawa-pariwisata-elemen-penting-dari-soft-power>
- Swanti, E. (2014, Maret 28). Dipetik Oktober 5, 2019, dari <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/2029224/ketika-para-pesilat-berkumpul-di-pencak-malioboro-festival>
- Tangtunganproject. (2014, November 1). Dipetik Oktober 3, 2019, dari Tangtungan Project. 2014. *Wisata Pencak* <https://tangtungan.com/wisata-pencak-nusantara-2015-sebagai-bagian-dari-jambore-pencaksilatpmf-4-2015>]

- Tangtunganproject. (2014, November 1). Dipetik Oktober 3, 2019, dari Tangtungan Project. 2014. Wisata Pencak <https://tangtungan.com/wisata-pencak-nusantara-2015-sebagai-bagian-dari-jambore-pencak-silat-pmf-4-2015>]
- Tulus Warsito dan Kartikasari. (2007). *Diplomasi Kebudayaan: Konsep dan Relevansi Bagi Negara Berkembang*. Yogyakarta: Ombak.
- Ulfa, S. (2019). Motivasi Wisatawan Berkunjung Pada Event Wisata Cian CUi di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. *JOM UNRI*.
- Undang-Undang. (1990). *UU No.9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan*. Jakarta: MENTERI / SEKRETARIS NEGARA.
- Waluyo dan Kurnia. (2013). Penggunaan Pencak Silat dalam Diplomasi Kebudayaan Indonesia Terhadap Belanda Tahun 2005-2015. <https://repository.unri.ac.id> .

Wisata Halal dan Stimulasi Pembangunan Supra-Struktur dan Infra Struktur Pendukung Pariwisata di Riau

Surwandono¹, Dolli Harahap², Sidik Jatmika³

^{1,2,3}*Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*

Corresponding e-mail:

Abstrak



Artikel ini menjelaskan tentang tata kelol wisata halal dalam pembangunan supra-struktur dan infra-struktur pendukung pariwisata di Riau. Wisata halal seringkali dikonotasikan sebagai wisata yang terkit dengan destinasi yang bersifat keagamaan semata, sehingga tidak memiliki relasional dengan infra-struktur wisata. Bagaimana logika ini dapat berjalan. Inilah pertanyaan pokoknya. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memahami gejala tersebut, dan tehnik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka melalui Mendeley Library, dan diperkaya dengan interview ke sejumlah stakeholders wisata halal di Riau. Studi ini menunjukkan bahwa gagasan wisata halal di Riau diinterpretasi sebagai wisata yang membangun kualitas dan kenyamanan yang kemudian mengilhami kebijakan pembangunan infra-struktur pendukung pariwisata berjalan dengan akseleratif.

Kata kunci

wisata halal, infra-struktur pariwisata, supra-struktur pariwisata, kualitas pelayanan

Latar Belakang

Pesatnya perkembangan pariwisata halal dalam sektor industri pariwisata tidak terlepas dari fenomena pertumbuhan segmen pasar wisatawan muslim di dunia. Banyak negara-negara yang mulai menawarkan perjalanan wisata bernuansa halal untuk menarik minat para wisatawan muslim. Pada tahun 2013, total transaksi dalam pariwisata halal berhasil mencapai US\$ 137 miliar (Thomas Reuters & Dinar Standard, 2013).

Pariwisata halal merujuk pada segala produk dan jasa pariwisata yang ditujukan untuk mempermudah wisatawan Muslim dalam melakukan perjalanan pariwisata. Bagi seorang Muslim yang memeluk agama Islam, diwajibkan untuk mematuhi segala ajaran agama Islam dalam setiap aspek kehidupannya, mulai dari perdagangan, pernikahan, urusan tata negara, hingga kepada hal-hal seperti tata cara berpakaian, makanan, dan berpergian. Dalam mengembangkan produk pariwisata Halal, tidak hanya berarti melarang produk alkohol atau makanan dari bahan dasar babi, dan menyediakan makanan halal semata, melainkan juga menyangkut aspek-aspek materil dan imateril, seperti pakaian, ketersediaan tempat beribadah, aturan untuk membatasi

prilaku seksual dan menunjukkan afeksi secara terbuka, serta staf pelayan pria/wanita yang berinteraksi dalam melakukan pelayanan (Battour & Ismail, 2011)

Pariwisata halal berbeda dari pariwisata religi, meskipun beberapa pendapat mengatakan bahwa pariwisata halal merupakan salah satu cabang dari pariwisata religi. Pariwisata halal dapat dilihat sebagai upaya untuk mempermudah para wisatawan muslim untuk melakukan kegiatan wisata tanpa melanggar hukum-hukum yang berlaku dalam Islam. Islam mengatur segala lingkup kehidupan sehari-hari, dan maka, dapat pula diartikan bahwa Islam juga mengatur segala tingkah laku pemeluknya sebagai wisatawan dalam kegiatan pariwisata secara signifikan (Carboni, Perelli, & Sistu, 2014). Dengan demikian, hal ini dapat bersinggungan dengan tingkah laku dari wisatawan non-Muslim yang kadang berlawanan dengan nilai-nilai dalam konteks Islam.

Menurut indeks peringkat yang dimuat dalam IMTI (*Indonesia Muslim Travel Index*), Indonesia memiliki 10 destinasi pariwisata unggulan, yakni Pulau Lombok, Aceh, Riau dan Kepulauan Riau, Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur (Malang), dan Sulawesi Selatan. Pulau Lombok meraih nilai tertinggi dengan skor 70, sedangkan skor terendah diraih oleh Sulawesi Selatan dengan skor 33. (IMTI, 2019) Dari 10 destinasi wisata yang ditunjuk pemerintah sebagai propinsi pariwisata halal, hanya dua propinsi yang sudah memiliki landasan hukum yakni Nusa Tenggara dan Riau.

Bersama dengan Lombok dan Aceh, Riau masuk kedalam kategori *Leading Regions*, kategori yang disematkan kepada daerah yang berhasil masuk 3 besar dalam indeks peringkat destinasi wisata halal IMTI. Hal tersebut dapat dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa mengingat bahwa jika dibandingkan dengan daerah lainnya, potensi wisata yang dimiliki oleh provinsi Riau sangatlah minim. Pada tahun 2018 lalu, wisatawan asing dan lokal yang datang ke provinsi Riau mencapai angka yang melebihi ekspektasi, dengan jumlah wisatawan asing mencapai 120 Ribu, dan wisatawan lokal mencapai 7 Ribu. Tingginya jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Riau tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah Riau dalam pengelolaan wisata halal. Tulisan ini hendak memotret bagaimana kontribusi kebijakan wisata halal dengan kenaikan jumlah wisatawan asing ke Riau.

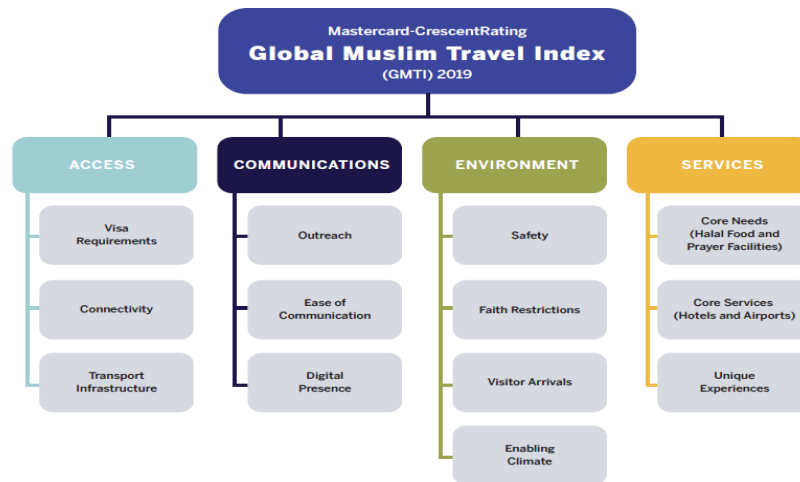
Studi Pustaka

Battour & Nazari Ismail mengatakan bahwa pariwisata halal adalah “segala objek atau tindakan dalam pariwisata yang diperbolehkan dalam ajaran agama Islam untuk digunakan atau dilakukan oleh umat Muslim dalam industri pariwisata”. Para wisatawan muslim dituntut untuk tetap patuh kepada hukum-hukum Syariah meski dalam perjalanan sekalipun (Battour & Nazari, 2016). Perlu dipahami bahwa pariwisata halal tidak sama halnya dengan pariwisata religi. Bon & Hussain (2010) berargumen bahwa pariwisata halal merupakan subtipe dari pariwisata religi.

Pariwisata halal merupakan jenis pariwisata yang dijalankan oleh para pemeluk agama Islam; orang-orang Islam yang hidup dibawah aturan-aturan hukum Syariah. Namun bukan berarti sebuah destinasi yang telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata halal menghalangi wisatawan non-Muslim untuk datang berkunjung.

FICCI dalam laporan yang berjudul “*Religious Tourism Report*” pada tahun 2012, mendefenisikan pariwisata religi, atau “*faith tourism*” sebagai: “sebuah perjalanan yang didasari oleh motif untuk dapat merasakan pengalaman religius dalam bentuk kesenian, budaya, tradisi, dan arsitektur” Lebih lanjut dijelaskan bahwa pariwisata religi dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori: 1.) Ziarah, 2.) Perjalanan dakwah, 3.) Liburan jamaat, 4.) Pelayaran dengan tujuan memperkaya keimanan, 5.) Kampanye dan konvensi agama 6.) Pengasingan 7.) Kunjungan ke situs religius 8.) Kamp pelatihan keimanan, dan 9.) Wisata atraksi religius (FICCI, 2012).

Global Muslim Tourism Index (GMTI) merupakan asosiasi yang melakukan penelitian secara sistematis terhadap pertumbuhan wisata halal di tingkat internasional. Setiap tahun GMTI melakukan survai terhadap pertumbuhan wisata dengan menggunakan instrumen wisata halal, yaitu Access, terkait dengan Kebutuhan Visa, konektivitas, dan infrastruktur transportasi, Communication, terkait dengan jangkauan, kemudahan berkomunikasi, dan kemudahan akses digital, Environment, terkait dengan keamanan, kemudahan peribadahan, kedatangan pengunjung, dan iklim yang stabil dan Service terkait dengan kebutuhan inti, pelayanan inti, dan pengalaman unik.



Studi Henderson menunjukkan afirmasi terhadap narasi yang dibangun dari GMTI, berupa bagaimana memasarkan wisata halal dengan menggunakan aspek dari traveler. Semakin kebutuhan traveler terpenuhi maka semakin besar pula tingkat kunjungan traveler ke suatu destinasi. Termasuk di dalamnya adalah mengunjungi sejumlah destinasi wisata yang bercorak keagamaan, atau yang dikenal dengan *religious tourism*.(Henderson, 2011)

Studi kritis dari Khan & Callanan tentang halal tourism cenderung menekankan pada aspek pemasaran dibandingkan dengan aspek pemenuhan terhadap sejumlah standar normative syariat islam dalam berwisata. Dominannya issue ini menyebabkan lahirnya sejumlah tuduhan bahwa halal tourism sebagai fenomena politisasi agama untuk kepentingan memperoleh benefit ekonomi (Khan & Callanan, 2017). Studi ini menunjukkan sejumlah bukti yang menarik bahwa sejumlah negara yang menawarkan pariwisata halal, dan diiringi dengan semakin banyaknya wisatawan asing untuk berkunjung, kemudian sejumlah wisatawan mengekspresikan bentuk ketidakpuasan atas kualitas layanan yang tidak menggunakan standar islam (Hariani, Rahmanita, & Ingkadijaya, 2017). Sejumlah wisatawan muslim yang melakukan wisata di Jepang dan Korea Selatan menunjukkan ekspresi kekecewaan karena sejumlah layanan dasar untuk muslim seperti makanan, dan tempat untuk shalat tidak tersedia secara memadai. Negara dengan penduduk yang bukan muslim cenderung mengelol wisata halal demi keuntungan ekonomi semata, bukan terhadap penghargaan dan apresiasi terhadap sebuah nilai (Han, Al-Ansi, Olya, & Kim, 2019).

Komodifikasi agama dalam sebuah issue sosial memang dapat memobilisasi pilihan dan perilaku seseorang, termasuk di antaranya pilihan untuk melakukan kunjungan wisata di tempat tertentu. Judgement keagamaan kemudian mendorong seorang individu untuk menerima sesuatu tanpa diimbangi dengan nalar kritis. Semua yang dibungkus dengan kemasan agama diasumsikan sebagai produk yang berkualitas (Awalia, 2017). Studi Awalia menunjukkan bahwa pemasaran wisata dengan menggunakan diksi wisata halal sangat dekat dengan proses membangun judgment namun tidak diikuti dengan pemenuhan sejumlah layanan dasar.

Studi yang lebih moderat menunjukkan bahwa wisata halal terkait erat dengan peningkatan pelayanan di atas standar terhadap para wisatawan. Halal dimaknai dengan bagaimana meningkatkan kualitas produk dan kualitas keamanan kepada wisatawan. Kualitas produk berarti bagaimana membangun destinasi wisata dengan mempertimbangkan segala aspek secara seksama, terukur, dan ilmiah sekaligus diberikan suatu garansi bahwa produk tersebut aman untuk dipakai dan dijalankan. Studi Sarif & Ismail menunjukkan bahwa peningkatan fasilitas infrastruktur yang berkualitas merupakan layanan dasar dalam membangun wisata halal. Wisatawan bersedia mengeluarkan sejumlah uang yang besar karena keterpenuhan sejumlah infrastruktur yang mendukung ketercapaian motivasi seseorang dalam berwisata (Mohamad Sarif & Ismail, 2011). Tulisan ini akan membaca dinamika kebijakan wisata halal dengan mempergunakan pendekatan ketiga bahwa pendekatan wisata halal akan mampu memobilisasi sejumlah penyesuaian kebijakan yang mengarah kepada tata kelola wisata yang lebih baik.

Metode penelitian

Artikel menggunakan metode penelitian kualitatif. Tahapan penelitian dilakukan dengan melakukan sejumlah studi data sekunder dengan melandaskan diri literatur terhadap praktik wisata halal, baik di sejumlah negara dengan penduduk mayoritas muslim maupun negara dengan penduduk minoritas muslim melalui *Mendeley Library* (Nagel, 2019). Penelusuran data primer dilakukan dengan melakukan observasi di sejumlah destinasi wisata, maupun infrastruktur pendukung wisata halal. Untuk mendapatkan interpretasi pembangunan kebijakan wisata halal dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap stakeholders wisata halal di Riau seperti Dinas Pariwisata, Bapeda, DPRD, MUI, dan sejumlah wisatawan yang berkunjung di Riau.

Pembahasan

Segmen pariwisata halal sangat populer sehingga trend kunjungan wisatawan ke destinasi wisata halal sangat tinggi. Riset terakhir yang dilakukan oleh Thomson Reuters & Dinar Standard (2013) menyatakan bahwa industri pariwisata Halal telah mencapai nilai US\$ 137 Miliar pada tahun 2013, atau 11,5 % dari nilai jual-beli global. Para wisatawan dari Timur Tengah menjadi salah satu target pasar pariwisata yang paling menjanjikan saat ini. Wisatawan dari Semenanjung Arab menghabiskan US\$ 20 Miliar setiap tahunnya, para wisatawan dari Arab Saudi menjadi penyumbang pengeluaran terbesar dengan total US\$ 8,5 Miliar setiap tahunnya (UNWTO 2020 Vision). Dengan demikian, para pelaku pariwisata semakin serius untuk dapat menarik para wisatawan dari negara-negara mayoritas muslim tersebut dengan mengembangkan destinasi pariwisata halal.

Didukung oleh faktor-faktor geopolitik dan pertumbuhan jumlah penduduk Muslim dunia yang saat ini mencapai 1,5 Miliar jiwa, dan diprediksi mencapai 2,2 Miliar pada tahun 2030 (Pew Forum, 2011), pasar wisatawan Muslim menjadi primadona dan banyak menarik minat negara-negara di seluruh dunia. Negara-negara non-Muslim yang sempat menerapkan kebijakan ketat terhadap pendatang Muslim pun mulai membuka diri untuk menerima wisatawan-wisatawan Muslim.

Pemerintah propinsi Riau melakukan *benchmarking* dalam tata kelola wisata halal dari pemerintah propinsi NTB, terdapat banyak kesamaan pembahasan pasal per pasal, meski dalam dasar hukum dalam nomenklatur mengingat memang tidak merujuk regulasi Perda wisata halal NTB. Dalam konteks tata negara ini sebagai hal yang mahfum karena hubungan antar propinsi adalah setara dan bukan hirarki. Pemerintah daerah Riau melakukan kunjungan untuk sejumlah tata kelola investasi dan penyusunan peraturan daerah. Dalam hal regulasi, pemerintah Riau memilih regulasi dari jalur eksekutif, daripada jalur legislative karena akan membutuhkan proses yang panjang. Sebagaimana pemerintah Sumatera Barat yang memiliki inisiatif untuk membuat perda wisata halal, sampai tahun 2019 belum disahkan.

Pilihan membuat peraturan gubernur justru focus regulasi lebih spesifik, yakni tentang tata kelola investasi untuk menyukseskan wisata halal, daripada persoalan teknis administrative sertifikasi yang rumit dan melibatkan banyak pihak. Seperti tata kelola investasi wisata halal dengan sejumlah insentif, tata kelola pemasaran, dan industry pariwisata. Pilihan tentang investasi menjadi menarik karena focus kepada issue operasional bagaimana membuat para wisatawan menjadi mudah berkunjung dan mendapatkan pemenuhan kebutuhan wisata secara kompetitif dan professional.

Selama ini sejumlah wisatawan Timur Tengah lebih memilih mengunjungi Malaysia dan Thailand terkait dengan persoalan akses dan komunikasi. Akses dalam arti bagaimana bisa memperoleh informasi yang lengkap dan akurat tentang suatu destinasi, termasuk di dalamnya mudahnya syarat administrative kunjungan, dan tersedianya jalur penerbangan langsung dari negara wisatawan. Malaysia memiliki bandara internasional dalam konteks bandara hub, yang dapat menghubungkan antar negara yang sangat banyak, baik dengan menggunakan bandara low cost maupun yang kompetitif di Kuala Lumpur. Thailand juga memiliki bandara Svarnabumi dan Don Muang yang berperan sebagai bandara hub yang dapat menghubungkan dengan sejumlah penerbangan langsung.

Indonesia sebagai negara kepulauan dan terletak di garis lintas yang sama memiliki iklim, topografis, dan geografis yang mirip dengan Malaysia dan Indonesia. Sejumlah obyek wisata yang favorit bagi wisatawan Timur Tengah adalah pemandangan alam, hijau, air, dan pantai, juga dimiliki Indonesia, bahkan dalam konteks potensi alam, jauh lebih variative dibandingkan dengan negara tetangga. Suasana Indonesia dengan memiliki sejumlah obyek yang bernarasikan surga, sebagaimana yang dinarasikan dalam kitab suci Al-quran, sedemikian rupa menarik bagi wisatawan Timur Tengah.

Akselerasi Pembangunan Supra-Struktur Pariwisata

Kebijakan wisata halal yang mulai diinisiasi oleh sejumlah pemerintah daerah di Indonesia telah menimbulkan sejumlah pro dan kontra. Kelompok yang pro membangun argument bahwa wisata halal produktif bagi pembangunan pariwisata dan juga produktif bagi pembangunan moral masyarakat. Sedangkan kelompok yang kontra, wisata halal merupakan kebijakan yang kontra-produktif bagi pariwisata dan menimbulkan sejumlah bias regulasi. Wisata halal justru akan mengurangi jumlah kunjungan wisatawan yang sangat plural, dan menimbulkan kontraksi social, ekonomi, dan politik yang tidak perlu.

Dalam 10 tahun terakhir, gagasan wisata halal yang kemudian diwujudkan menjadi kebijakan formal, hanya ada di dua propinsi yakni Nusa Tenggara Barat, dan Riau. Propinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta masih proses *wait and see*, sedangkan propinsi NTT, Bali, Sumatera Utara menunjukkan artikulasi gagasan untuk menolaknya. Pilihan Riau dalam konteks wisata halal sangatlah menarik.

Keberanian Riau untuk membangun kebijakan wisata halal termasuk progresif dibandingkan dengan sejumlah propinsi yang telah mendapatkan penghargaan sebagai propinsi dengan tata kelola wisata halal yang baik dalam parameter GMTI maupun IMTI.

Suprastruktur yang menstimuli gagasan wisata halal Riau adalah kebijakan bebas visa untuk 169 negara yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui peraturan presiden Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2016). Kebijakan ini sedemikian rupa strategis untuk memacu Riau sebagai salah satu destinasi favorit di sekitar selat Malaka, yang selama ini lebih didominasi wisata oleh Negara Malaysia, Singapura, dan Thailand. Secara geografis dan topografis, Riau memiliki kemiripan destinasi wisata dengan sejumlah Negara tetangga tersebut.

Kebijakan Wisata Halal yang dikeluarkan oleh pemerintah Riau melalui Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2019 membuat branding wisata halal mendapatkan momentum yang sangat berarti. Efektivitas branding wisata halal untuk mendatangkan jumlah wisatawan asing dan domestic dalam 2 tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2018, jumlah wisatawan asing mengalami kenaikan yang signifikan jumlah wisatawan asing mencapai 120.000, dan wisatawan lokal mencapai 7000. Besarnya jumlah wisatawan asing dalam periode proses kebijakan wisata halal dibuat tidak dapat dilepaskan dari pandangan positif dari para calon wisatawan asing. Terdapat sebuah pandangan besar, bahwa wisata halal menawarkan sejumlah kepastian layanan yang berada di atas rata-rata. Wisata halal pasti memberikan service yang lebih baik dibandingkan dengan wisata konvensional. Wisata halal diyakini oleh para wisatawan asing sebagai bentuk perbaikan layanan wisata yang lebih baik dan berkualitas.

Branding tentang wisata halal Riau dikembangkan dengan sistematis dengan menggunakan layanan digital. Digitalisasi akses telah membuat informasi dan layanan wisata Riau menjadi lebih mudah diakses. Sejumlah destinasi wisata Riau yang dikemas dalam video yang kemudian diupload ke dalam media social, seperti youtube, facebook telah memancing minat sejumlah wisatawan asing untuk menempatkan destinasi tambahan setelah mengunjungi Malaysia.

Akselerasi Pembangunan Infra-Struktur Pariwisata

Kompetisi wisata halal sedemikian rupa sangat kompetitif, baik di tingkat internasional dan nasional. Di tingkat internasional sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara, dan Asia Timur mengembangkan kebijakan wisata halal dengan melakukan promosi online secara besar-besaran. Sejumlah kebijakan yang menawarkan kenyamanan migrasi seperti bebas visa kepada sejumlah negara ditawarkan secara sistematis dan terstruktur ditawarkan oleh Malaysia, Thailand, Jepang, China, Korea Selatan, New Zealand. Sedangkan di tingkat nasional sejumlah propinsi telah mengembangkan

wisata halal seperti di NTB, Yogyakarta, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Di mata dunia, Indonesia telah berkontribusi secara signifikan di dalam sektor pariwisata Halal. Menduduki peringkat keempat dalam index GIEI dan peringkat pertama dalam GMTI merupakan pencapaian luar biasa bagi Indonesia, dan semakin memperkuat bukti bahwa pariwisata Halal memiliki potensi yang besar bagi negara ini. Pariwisata halal merupakan cabang dari produk industri yang lebih inklusif dengan beberapa tambahan fasilitas untuk mengakomodasi kebutuhan wisatawan Muslim. Fasilitas-fasilitas tambahan seperti tempat ibadah (mushola/mesjid), kamar mandi wudhu, restoran bersertifikasi halal, hotel berfasilitas syariah, destinasi religi, dan lain sebagainya harus menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia. Fasilitas-fasilitas tersebut tidak hanya dapat berguna bagi wisatawan Muslim, tetapi juga dapat berguna bagi wisatawan non-Muslim.

Indonesia mulai dikenal dunia sebagai destinasi ramah wisatawan Muslim pada tahun 2016. Dalam penghargaan *World Halal Tourism Award* yang diselenggarakan di Abu Dhabi, Indonesia berhasil membawa pulang 12 dari 16 kategori penghargaan. (Republika, 2016) ialah:

World's Best Airline for Halal Travellers: Garuda Indonesia, World's Best Airport for Halal Travellers: Sultan Iskandar Muda International Airport, World's Best Family Friendly Hotel: The Rhadana Kuta, Bali, World's Most Luxurious Family Friendly Hotel: The Trans Luxury Hotel Bandung, World's Best Halal Apartment Hotel: PNB Perdana Hotel & Suites, World's Best Halal Beach Resort: Novotel Lombok Resort & Villas, World's Best Halal Tour Operator: ERO Tour, West Sumatera, World's Best Halal Travel Website: www.wonderfullomboksumbawa.com, World's Best Hajj & Umrah Operator: ESQ Tours and Travel, World's Best Hajj & Umrah Hotel: Tabung Haji, World's Best Halal Culinary Destination: West Sumatera, World's Best Halal Cultural Destination: Aceh. Dalam konteks awards wisata halal tersebut, Riau belum mampu memenangkan penghargaan tersebut.

Pemerintah Riau kemudian melakukan assesmen pengambilan kebijakan wisata halal dengan menggunakan kerangka pembangunan wisata halal untuk menstimulasi pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata. Langkah pertama yang dibangun adalah penambahan rute *international direct flight* dari Brunei Darussalam dan Thailand. Sebelumnya, telah ada 16 rute domestik dan 6 rute internasional dari dan menuju Provinsi Riau. Penambahan direct flight ini akan mempermudah para wisatawan asing untuk menempatkan destinasi wisata halal Riau sebagai alternative wisata baru. Pengembangan Bandara Internasional SSK II menjadi bandara ramah muslim tertuang dalam Rencana Aksi Pengembangan Destinasi dengan Program utama menjadikan bandara sebagai etalase pariwisata Halal.

Kelengkapan fasilitas bandara merupakan salah satu hal yang pertama kali akan dijumpai oleh para wisatawan. Dari bandara pula persepsi pertama wisatawan tentang destinasi yang akan dikunjunginya akan terbentuk (Levine, 2016). Bandara yang memiliki tingkat kebersihan, kenyamanan, dan kelengkapan fasilitas ibadah akan membentuk kesan positif bahwa destinasi tersebut akan menawarkan pengalaman yang menyenangkan, begitu pula dengan bandara yang menghadirkan situasi tidak nyaman akan membentuk kesan negatif bahwa perjalanan mereka selanjutnya akan tidak menyenangkan.

Bandara Internasional SSK II telah memenuhi standar internasional keamanan dan kenyamanan bandara, dan telah menerima beberapa penghargaan dan pujian sebagai bandara dengan terminal penumpang yang bersih dan nyaman. Pada tahun 2016 Bandara SSK II menerima penghargaan bandara dengan VIP Lounge terbaik se-Indonesia, mengalahkan bandara-bandara besar lainnya di Indonesia.

Pemerintah Riau juga mulai mengembangkan tiga pelabuhan yang menyediakan rute pelayaran domestik dan internasional sebagai pintu masuk wisata asing. , namun ketiga pelabuhan tersebut belum benar-benar dikembangkan untuk dapat memenuhi kebutuhan kedatangan wisatawan Muslim. Provinsi Riau sampai saat ini belum memiliki akses jalur kereta api, namun dengan kebijakan wisata halal tersebut kebijakan untuk membangun jalur kereta api di Provinsi Riau direncanakan akan dibangun sebagai bagian dari proyek Kereta Trans Sumatera. Konektivitas darat di Provinsi Riau didukung dengan infrastruktur jalan yang memadai dan telah terkoneksi dengan semua atraksi wisata.

Kesimpulan

Kebijakan wisata halal merupakan kebijakan wisata yang visioner bagi negara dengan penduduk muslim mayoritas. Wisata halal memberikan tawaran gagasan yang menstimuli sejumlah perbaikan tata kelola wisata, baik dalam pembangunan supra-struktur dalam bentuk kebijakan yang proaktif dan bertanggung, juga dalam perbaikan sejumlah infrastruktur pendukung pariwisata. Wisata halal yang diinterpretasi oleh pemerintah Riau sebagai upaya membangun wisata yang berkualitas dan nyaman mampu mengakselerasi pembangunan ekonomi, social, dan keagamaan masyarakat Riau.

Bibliografi

- Awalia, H. (2017). Komodifikasi Pariwisata Halal NTB dalam Promosi Destinasi Wisata Islami di Indonesia. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*. <https://doi.org/10.25139/jsk.v1i1.64>
- Han, H., Al-Ansi, A., Olya, H. G. T., & Kim, W. (2019). Exploring halal-friendly destination attributes in South Korea: Perceptions and behaviors of Muslim travelers toward a non-Muslim destination. *Tourism Management*.

<https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.10.010>

- Hariani, D., Rahmanita, M., & Inggadijaya, R. (2017). The Influence of Availability of Muslim Friendly Facilities towards Indonesian Muslim Tourist Revisit Intention to Japan. *TRJ Tourism Research Journal*. <https://doi.org/10.30647/trj.v1i1.13>
- Henderson, J. C. (2011). Religious Tourism and Its Management :, 552(December 2010), 541–552.
- Khan, F., & Callanan, M. (2017). The “Halalification” of tourism. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2016-0001>
- Mohamad Sarif, S., & Ismail, Y. (2011). Spirituality in Business Ethics from Islamic Perspective. In *Spirituality in Management from Islamic Perspective* (p. 154).
- Nagel, J. (2019). Getting started. In *Lecture Notes in Energy*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-96355-6_5
- Battour, M., & Ismail, N. (2011). The impact of destination attributes on Muslim tourist's choice. *International Journal of Tourism Research*.
- Battour, M., & Nazari, I. (2016). Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future ... *Tourism Management Perspective*.
- Carboni, M., Perelli, C., & Sistu, G. (2014). Is Islamic tourism a viable option for Tunisian tourism? Insights from Djerba. *Tourism Management Perspective*, 1-9.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2016, Maret 22). 169 Negara Resmi Dibebaskan dari Visa untuk Kunjungan ke Indonesia. Retrieved September 15, 2019, from Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia: <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/996-169-negara-resmi-dibebaskan-dari-visa-untuk-kunjungan-ke-indonesia>
- Ety, Saraswati; I, Athia; Hariri;. (2018). Building Strategy to Promote Tourism Destination Attractiveness and Competitiveness in Developing Area: A Case of Bojonegoro Regency, East Java, Indonesia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(4), 77–88., 77–88.
- FICCI. (2012). FICCI Religious Tourism Report. FICCI.
- GMTI. (2019). Global Muslim Travel Index. Dubai: Mastercard - Crescent Rating.
- Hassan, R. (2005). On being religious: Religious commitment in Muslim societies. Retrieved Juli 15, 2019, from <http://www.rsis.edu.sg/publications/WorkingPapers/WP80.pdf>
- Henderson, J. (2009). Islamic tourism reviewed. *Tourism Recreation Research*.
- IMTI. (2019). Indonesia Muslim Travel Index. Jakarta: Kementerian Pariwisata Indonesia.

- Levine, A. (2016, January 3). First Impressions: When An Airport Gets It Right. Retrieved September 15, 2019, from Forbes: <https://www.forbes.com/sites/andrewlevine2/2016/01/03/first-impressions-when-an-airport-gets-it-right/#5f4535257788>
- Pew Forum. (2011). The future of the global Muslim population. Pew Research Centre.
- Republika. (2016, Desember 8). Ini Para Pemenang World Halal Tourism Awards 2016. Retrieved Juli 17, 2019, from Republika Online: <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/12/08/ohtyo2330-ini-para-pemenang-world-halal-tourism-awards-2016>
- Rusby, Z., Bakhri, B. S., & Yusuf, M. (2018). Analisis Pengetahuan Masyarakat Kota Pekanbaru tentang Wisata Syariah. *Jurnal Al-Hikmah* Vol. 15 No. 2.
- Setyorini, T. (2005, November). Kebijakan Pariwisata Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Semarang. Tesis. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Thomas Reuters & Dinar Standard. (2013). State of the global Islamic economy report. Dubai: Global Islamic Economic Summit.
- Wootton, G., & Stevens, T. (1995). Business Tourism: a study of the market for hotelbased meetings and its contribution to Wales' tourism. *Tourism Management* Vol 16 No 4.
- Yoeti, O. (1997). Perencanaan dan pengembangan pariwisata. Jakarta: Pradnya Paramita.

Soft Power With Flavour : Boba Tea As Taiwan's Soft Power Tool To Enhance Nation Branding

Putu Ratih Kumala Dewi¹

¹Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Udayana, Denpasar

Corresponding Email: ratihkumaladewi@unud.ac.id

Abstrak



Boba Tea atau yang lebih dikenal dengan sebutan bubble tea adalah minuman asal Taiwan yang kini sudah terkenal di berbagai negara. Namun banyak yang tidak mengetahui bahwa minuman boba tea ini sudah ada sejak tahun 1980an di kota Taichung, Taiwan. Popularitas boba tea tidak lepas dari peran pemerintah Taiwan. Melalui boba tea, Taiwan memanfaatkan minuman lokalnya ini untuk memikat masyarakat asing dan membentuk citra baik di tengah konfliknya dengan Tiongkok terkait One China Policy. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana Taiwan menggunakan boba tea untuk membentuk soft power-nya. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis eksplanasi dengan pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep gastrodipomasi dan soft power. Dari penelitian, penulis mengkaji kebijakan pemerintah Taiwan melalui diplomasi publik dalam mendukung penyebaran boba tea hingga dapat menjadi soft power. Penelitian ini penting untuk memahami pentingnya makanan sebagai salah satu sumber soft power Taiwan yang dapat dibentuk melalui gastrodipomasi. Dengan posisi Taiwan saat ini yang belum mendapat pengakuan sebagai entitas negara, kuliner dapat menjadi jembatan yang memudahkan hubungan Taiwan dengan negara lain dan dapat diterima dengan baik tanpa mempersoalkan status politik Taiwan saat ini.

Kata Kunci

Boba Tea, Gastrodipomasi, Soft Power

Pendahuluan

Kebijakan Satu China (*One China Policy*) yang diterapkan oleh Tiongkok telah membuat Taiwan terisolasi secara politik. Melalui kebijakan tersebut, setiap negara harus memilih untuk mengakui Tiongkok atau Taiwan secara politik. Ketika suatu negara memilih Tiongkok berarti negara tersebut harus memutus hubungannya dengan Taiwan, begitu pula sebaliknya. Hal ini menyudutkan posisi Taiwan di dunia internasional. Dalam tataran hubungan diplomatik dunia, Taiwan berada dalam posisi

yang terpinggirkan yakni hanya memiliki 22 hubungan diplomatik dengan negara kecil dan secara politis tidak diakui oleh negara-negara besar.

Pemerintah Taiwan menyadari posisinya yang tidak seimbang ketika berhadapan dengan kekuatan Tiongkok yang begitu besar baik dari segi politik, ekonomi dan militer. Kemajuan ekonomi dan perdagangan Tiongkok yang tidak dapat ditandingi membuat Taiwan harus kreatif mencari cara untuk menguatkan posisinya sehingga mampu berperan secara global dan bebas dari bayang-bayang Tiongkok

Begitu banyak usaha yang dilakukan Taiwan untuk menunjukkan identitasnya yang berbeda dengan Tiongkok, serta untuk menegaskan bahwa mereka adalah dua entitas berbeda. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menggunakan kuliner. Kuliner merupakan suatu hal yang bisa langsung menyentuh semua elemen masyarakat. Hal ini dikarenakan setiap manusia membutuhkan makanan setiap harinya. Sehingga kuliner dipandang sebagai salah satu instrumen yang efektif untuk menghasilkan *soft power*. *Soft power* sebenarnya adalah konsep yang diperkenalkan oleh Joseph Nye dari Universitas Harvard untuk mendeskripsikan kemampuan untuk menarik perhatian atau mempengaruhi pihak lain secara sosial dengan persuasif dan tanpa paksaan (Nye 2004). Taiwan sangat serius dalam mengembangkan konsep *soft power* kuliner ini melalui kampanye All in Good Taste: Savor the Flavors of Taiwan.

Salah satu kuliner yang terkenal dari Taiwan adalah Bubble Tea atau sering disebut sebagai Boba Tea. Boba tea adalah minuman perpaduan teh dan susu yang diberi *bubble*, *boba*, atau *pearl* yakni bola-bola yang terbuat dari tepung tapioka. Ciri khas boba atau mutiara hitam ini adalah manis, kenyal, berwarna coklat tua kehitaman dan ukurannya mungil. Boba pada bubble tea ini sudah ada sejak 1987. Hal ini terungkap dalam artikel "History of bubble tea: how boba, born of a staff competition in Taiwan, became a global phenomenon" di South China Morning Post. Konon Chen Shui Tang di Taichung, Taiwan menjadi teahouse pertama yang memperkenalkan bubble tea. Pendirinya, Liu Han-chien fokus menjual teh oolong berkualitas (Rahmawati 2019). Namun suatu hari, Liu ingin mengubah cara orang menikmati teh dengan mencampurkannya dengan susu dan menambahkan bola-bola tapioka pada minumannya. Hingga kini boba tea menjadi minuman yang sangat populer dan digemari di berbagai negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka timbul pertanyaan bagaimana Taiwan menggunakan *boba tea* untuk membentuk *soft power*nya. Penelitian ini penting untuk memahami pentingnya makanan sebagai salah satu sumber *soft power* Taiwan yang dapat dibentuk melalui gostrodiplomasi. Dengan posisi Taiwan saat ini yang belum mendapat pengakuan sebagai entitas negara, kuliner dapat menjadi jembatan yang memudahkan hubungan Taiwan dengan negara lain dan dapat diterima dengan baik tanpa mempersoalkan status politik Taiwan saat ini.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis eksplanasi yakni menganalisa cara dan upaya Taiwan menggunakan *boba tea* untuk membentuk *soft power*nya. Dari penelitian, penulis mengkaji kebijakan pemerintah Taiwan melalui diplomasi publik dalam mendukung penyebaran *boba tea* hingga dapat menjadi *soft power* dan meningkatkan merek negara/ bangsanya.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka yakni dengan menelaah sejumlah literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti buku-buku dan jurnal berkaitan dengan gastrodipomasi Taiwan, situs resmi pemerintah Taiwan dan situs media internasional. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Adapun dalam menganalisis permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat.

Review Literatur/Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai penggunaan kuliner sebagai instrumen untuk meningkatkan nation branding merupakan topic yang sudah pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya. Meskipun demikian belum ada yang membahas konteks masalah yang berhubungan dengan penggunaan *boba tea* oleh Taiwan dalam kaitannya dengan *soft power* dan *nation branding* negara/ bangsa. Berikut ini beberapa literatur yang membahas kuliner dan *nation branding*.

Tulisan pertama yakni tulisan Fatin Mahirah Solleh dengan judul *Gastrodiplomacy as a Soft Power Tool to Enhance Nation Brand*. Tulisan ini membahas tentang potensi Malaysia untuk menunjukkan diri di mata dunia dengan menggunakan makanan sebagai instrument soft power. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan atas tindakan pemerintah Malaysia dalam mengembangkan gastrodipomasi Malaysia, mencari dampak yang dimungkinkan dari gastrodipomasi dan menyusun guideline untuk rencana gastrodipomasi Malaysia. Dari penelitian ini ditemukan bahwa pemerintah Malaysia, lembaga pemerintah, dan non governmental organization secara aktif memainkan peran dalam kegiatan gastrodipomasi. Gastrodiplomasi juga merupakan kesempatan yang baik bagi Malaysia untuk menunjukkan Malaysia sebagai tujuan budaya yang berlimpah. Ini bisa dicapai melalui memperluas perdagangan Malaysia, mengekspos makanan lokal ke luar negeri dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Malaysia.

Tulisan kedua yakni tulisan Taiwan's *Gastrodiplomacy : Strategies of Culinary Nation- Branding and Outreach* oleh Camille Defrancq. Penelitian ini menunjukkan manfaat potensial yang dapat dimiliki gastrodiplomacy pada persepsi orang tentang bagaimana hal itu dapat membantu mengidentifikasi budaya negara melalui budaya

kulinernya. Melalui studi perbandingan, analisis persepsi dan analisis kebijakan, penelitian ini menyimpulkan bahwa gastrodiplomasi merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan menarik public asing serta dapat memperkuat hubungan dua negara.

Tulisan ketiga yakni tulisan oleh Eka Saputri berjudul *All In Good Taste : Savor The Flavours of Taiwan Gastrodiplomacy Campaign in Promoting Its Nation Branding in Canada (Case Study: The Annual Taiwanfest in Vancouver and Toronto 2010-2013)*. Tulisan ini membahas langkah-langkah yang diambil oleh Taiwan dalam mempromosikan negaranya melalui gastrodiplomasi. Dalam tulisan ini gastrodiplomasi Taiwan difokuskan di Kanada melalui Taiwanfest 2010-2013. Taiwan memanfaatkan kuliner khas negaranya untuk mengambil hati masyarakat asing dalam hal ini Canada agar Taiwan dapat diakui sebagai negara.

Sebagai kerangka dasar dari pemikiran dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan konsep gastrodiplomasi, *soft power*, dan *nation branding*. Ketiga konsep ini akan digunakan untuk menjelaskan gastrodiplomasi Taiwan dengan menggunakan boba tea sebagai sumber soft power dan meningkatkan nation brandingnya.

Gastrodiplomasi

Kata gastrodiplomasi ini sendiri berasal dari gabungan kata gastronomi dan diplomasi, yang dimana gastronomi disebut sebagai ilmu yang mempelajari tentang tata boga atau makanan. Istilah gastrodiplomasi ini pertama kali digunakan pada saat praktik diplomasi publik oleh Paul Rockower. Sepakat dengan Paul Rockower, Rachel Wilson dalam jurnalnya *Cocina Peruana Para El Mundo: Gastrodiplomacy, The Culinary Nation Brand, and The Context of National Cuisine in Peru*, juga memaparkan penggunaan makanan sebagai salah satu alat yang dapat digunakan pemerintah dalam memperluas diplomasi dengan negara lain.

Rockower memberikan beberapa pandangan mengenai karakteristik gastrodiplomasi sebagai berikut :

- a. Berdiplomasi publik yang mencoba berkomunikasi mengenai budaya kuliner dengan publik asing dengan cara yang lebih luas, dan memfokuskan diri pada publik yang lebih luas dari pada level elit saja.
- b. Praktek gastrodiplomasi ini berusaha untuk meningkatkan citra merek makanan bangsa melalui diplomasi budaya yang kemudian menyoroti dan mempromosikan kesadaran dan pemahaman budaya kuliner nasional kepada publik asing.
- c. Gastrodiplomasi berupa hubungan *state to public relations* (Rockower 2011)

Menurut Robbitt & Sullivan, Ronald, dan juga Theaker & Yaxely sebuah kampanye gastrodiplomasi memerlukan elemen dari dasar perencanaan strategi komunikasi yakni:

1. Pemasaran produk.

Dalam pemasaran produk dalam Gastro Diplomasi dapat dilakukan dengan cara menjual makanan khas negaranya hal ini agar wisatawan atau warga negara asing dapat membeli dan menikmati makanan secara langsung.

2. Pembangunan Event

Dalam membangun event dapat melakukan sebuah acara ataupun pameran makanan khas negara tersebut agar warga negara asing dapat mengunjungi dan menyaksikan makanan yang telah di sajikan, hal ini memicu daya tarik sendiri dengan melihat dan menyicipi masakan yang telah di sajikan.

3. Membangun Kerjasama dengan Organisasi di Luar Negeri.

Gastrodiplomasi dapat membangun kerjasama dengan organisasi di Luar Negeri, hal ini akan membantu jalannya proses serta dukungan organisasi tersebut dalam menjalankan gastrodiplomasi.

4. Menggunakan *Leader Opinion* dalam melaksanakan Gastrodiplomasi.

Menggunakan *leader opinion* di dalam Gastrodiplomasi dapat membantu juga dalam memperkenalkan makanan dengan cara menggunakan tokoh atau artis-artis terkenal dengan mempromosikan makanan khas daerah negara tersebut agar para penggemar dari artis tersebut memiliki rasa penasaran dan ingin menyicipi makanan tersebut.

5. Membangun Hubungan Melalui Media.

Menjalankan Gastrodiplomasi dapat melalui media dengan cara menyebarkan makanan tersebut melalui acara sebuah televisi atau *acara cooking show* yang dapat disaksikan di internet seperti youtube, instagram, facebook, Twitter, ataupun web side.

6. Melalui Pendidikan.

Menjalankan Gastrodiplomasi dapat melalui Pendidikan dengan cara mengadakan *cooking class*. Dengan begitu banyak orang yang tertarik untuk mencoba membuat makanan khas Jepang. (Rockower, 2011)

Sehingga gastrodiplomasi merupakan praktek komunikasi dengan makanan sebagai elemen utamanya. Gastrodiplomasi juga merupakan pendekatan yang lebih holistik untuk meningkatkan kesadaran internasional akan merek negara yang dapat dimakan melalui promosi warisan kuliner dan budayanya. Hal ini sangat berkaitan dengan penggunaan boba tea oleh Taiwan untuk meningkatkan merek bangsanya.

Soft Power

Konsep soft power pertama kali dicetuskan oleh Joseph S. Nye. Soft Power sendiri oleh Nye diartikan sebagai "*The Ability to get what you want through attraction rather*

than coercion or payment” (Nye 2004). Menurut Nye, *soft power* merupakan kekuatan atau kemampuan yang mempengaruhi pihak lain untuk mendapatkan hasil yang diinginkan tersebut melalui penggunaan daya tarik dari pada penggunaan kekerasan (*coercion*) atau suatu imbalan (*payment*).

Soft power bersumber dari aset-aset yang dapat digunakan untuk menarik perhatian. Nye menjabarkan bahwa *soft power* suatu negara utamanya didasarkan pada tiga sumber yaitu, budaya (*culture*, yang membuat negara tersebut menarik perhatian bagi negara lain), nilai politik (*political values*, yang dianut negara tersebut di dalam maupun luar negeri) dan kebijakan luar negeri (*foreign policies*, yang membuat negara memiliki legitimasi dan otoritas moral) (Nye, 2005). Inti dari *soft power* adalah eksplorasi kekuatan-kekuatan kebudayaan suatu bangsa yang bersifat non perang dan non pengikatan secara ekonomi, sebagai metode sekaligus alat untuk melakukan diplomasi dengan bangsa lainnya. Dari penjelasan tersebut, pada hakekatnya, Soft Power merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada instrument kebudayaan dan nilai yang digunakan untuk menarik hati dan perhatian masyarakat dan negara lain, demi mencapai kepentingan nasional suatu negara. Dalam penulisan ini akan membahas tentang *soft power* dimana salah satu instrumennya adalah kuliner melalui gastrodiplomasi karena, kecintaan terhadap suatu kuliner tidak dapat dilakukan dengan cara paksa.

Nation Branding

Konsep nation branding pertama kali dicetuskan oleh Simon Anholt pada tahun 1996 untuk membantu negara-negara di dunia membentuk strategi, kebijakan, inovasi, dan investasinya. Konsep nation branding merupakan konsep untuk menggambarkan image dan reputasi suatu bangsa yang dibangun atas dasar persepsi yang dibentuk dan didefinisikan oleh orang diluar negara tersebut. Anholt mendefinisikan nation branding sebagai policy-making approach, yang dibuat untuk menguatkan reputasi negara yang lebih baik secara internasional. Sebagai komponen dari suatu negara, nation branding menjadi bagian yang penting dari rencana diplomasi publik. Nation branding telah muncul sebagai asset negara untuk bersaing di tengah kekuatan geopolitik dan pertimbangan internasional (Anholt 2013).

Suatu nation brand haruslah merefleksikan keutuhan dalam suatu defnisi yang terdiri dari imej atau citra dari kumpulan manusia, budaya, tanah, pemerintahan dan karakteristik utama dari sebuah negara (Outhavong, 2007). Nation, dapat didefnisikan sebagai suatu kelompok manusia yang saling berhubungan atau terkait satu sama lain melalui aspek-aspek yang umum, yaitu budaya, etnisitas dan ideologi. Menurut Benedict Anderson sebuah nation dapat dideskripsikan sebagai “... an imagined community in which there exists a “deep, horizontal comradeship. This imagined community is also imagined as limited in that it has boundaries, and it is imagined as sovereign in that it prevails over any specific religion or

monarchy” (Anderson 1991). Sehingga istilah nation tidak hanya merujuk kepada negara yang mendapat pengakuan tetapi juga bangsa.

Negara/ bangsa menggunakan *nation's image* untuk mempromosikan produk dalam negeri dan meningkatkan ekspor. Maksudnya yaitu national branding bertujuan untuk mempromosikan citra bangsa yang positif bagi negara dan rakyat, untuk membangun identitas merek suatu negara, untuk menarik wisatawan, untuk meningkatkan ekspor produk, serta meningkatkan investasi asing langsung (Anholt, 2003; Dinnine 2008; Dzenovska, 2005, Florek dan Conejo, 2006, Ostapenko, 2010). Andri Hadi, Direktur Jenderal Informasi dan Kebijakan Publik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sepakat bahwa nation branding memiliki tujuan yang jelas yaitu berpengaruh pada perilaku audiens, yaitu membeli atau mengunjungi (Wawolangi 2010).

Nation branding atau citra produk nasional suatu negara menjadi hal yang sangat penting di era globalisasi saat ini. Ini dikarenakan nation brand memiliki dampak luas bagi pertumbuhan ekonomi dan pengaruh politik suatu negara di level internasional. Hal ini menyebabkan banyak negara-negara di dunia saat ini semakin interaktif untuk berlomba mendapatkan pengakuan dengan mengenalkan dan mempromosikan produk nasionalnya kepada publik internasional. Dengan memiliki reputasi yang baik, suatu negara akan mendapat kepercayaan dari negara lainnya untuk bekerjasama dan tidak lagi dipandang sebelah mata dalam partisipasinya di kompetisi global. Keputusan Taiwan untuk menjalankan gastrodipomasi melalui boba tea sangat erat kaitannya dalam upayanya untuk meningkatkan nation brand Taiwan.

Hasil dan Pembahasan

Gastrodipomasi Taiwan dilakukan melalui kampanye "All in Good Taste: Savor the Flavors of Taiwan". Kampanye ini diperkenalkan tahun 2010 dan disponsori oleh Ministry of Economic Affairs yang menginvestasikan \$ 34,2 juta selama empat tahun dalam upaya meningkatkan merek internasional Taiwan (USC Center on Public Diplomacy 2015). Melalui kampanye ini Taiwan mempromosikan semua kuliner khasnya, salah satunya adalah boba tea.

Boba Tea merupakan salah satu minuman yang termasuk dalam kuliner khas Taiwan yang menjadi instrument gastrodipomasinya. Boba Tea atau bubble tea pertama kali dibuat di Taichung Taiwan pada tahun 1980an. Awalnya boba tea yang dikenal di Taiwan secara tradisional adalah gabungan dari teh hitam panas, susu kental, bola tapioka ukuran besar, dan madu. Dalam perkembangannya boba Tea yang kita kenal saat ini adalah versi modern-nya. Selain lebih populer dalam kondisi dingin, boba pun dibuat menjadi lebih kecil sehingga dapat dihisap melalui sedotan.

Kepopuleran boba tea saat ini tidak lepas dari peran pemerintah Taiwan melaksanakan Gastrodipomasi dengan memasukkan Boba Tea dalam kampanye "All in Good Taste:

Savor the Flavors of Taiwan. Bila dianalisa menurut elemen dasar dari strategi sebuah kampanye gastrodiplomasi menurut Robbitt & Sullivan, Ronald, dan juga Theaker & Yaxely (Rockower, 2011) maka strategi yang dilakukan Taiwan yakni:

1. Pemasaran produk.

Pemerintah Taiwan telah mempromosikan Boba tea sebagai minuman nasional dan mendukung bisnis domestik terkait dengan boba tea dalam ekspansi mereka ke luar negeri. Di Taiwan pemerintahnya membentuk organisasi makanan Taiwan sebagai lembaga khusus menangani kuliner yang akan mendampingi kedai kopi dan rantai restoran yang mempromosikan makanan khas Taiwan di luar negeri (Ministry of Foreign Affairs of Republic of China 2012.) Penyebaran boba tea diawali dengan dengan pembukaan toko-toko boba tea yang dibuat di tempat-tempat terdekat yang memiliki komunitas ekspatriat Taiwan yang besar seperti Australia, Kanada, Hong Kong, Jepang, daratan Cina, Negara-negara Asia Tenggara, Korea Selatan dan Amerika Serikat. Baru pada tahun-tahun belakangan ini boba tea Taiwan disebarkan di daerah-daerah Eropa dan Timur Tengah.

Dalam pemasaran Boba Tea, Taiwan juga memperkuat industri boba tea dalam negerinya. Ada banyak merek boba tea dan toko minuman teh Taiwan yang merencanakan waralaba internasional. Beberapa merek terkenal Taiwan, termasuk Presotea dan Cha Ji Tang. Selain itu ada perusahaan-perusahaan boba tea asal Taiwan yang sudah hadir di dunia internasional. Seperti ChaTime yang memiliki lebih dari 1.000 toko di seluruh dunia dan terdaftar secara publik (melalui perusahaan induk La Kaffa) di bursa saham Taiwan dengan kapitalisasi pasar \$71,5 juta. ChaTime juga dengan cepat memiliki lebih dari 2.000 toko di empat benua. Perusahaan Gong Cha memiliki lebih dari 1.000 toko dan menambah lebih dari seratus setiap tahun. Perusahaan CoCo Fresh memperluas ke Afrika Selatan serta Asia dan Amerika Utara (Bachdar 2018). Perusahaan lainnya yakni Sharetea yang berdiri sejak 1992 dan sudah mengembangkan bisnis di 18 negara dengan 450 gerai di Australia, Macau, Filipina, Amerika Serikat, Dubai, Hong Kong, dan Indonesia. (Smart Money 2018).

Boba tea juga menjadi daya tarik wisata dimana wisatawan atau warga negara asing dapat membeli dan menikmati Boba Tea asli Taiwan secara langsung. Seperti di Indonesia, Direktur Asosiasi Pengunjung Taiwan, Fanny Low mengajak masyarakat Indonesia untuk berkunjung ke Taiwan dan mencoba langsung bubble tea di tempat kelahiran minuman itu (Cindyara 2019)

2. Pembangunan Event

Pameran makanan khas Taiwan juga diselenggarakan agar warga negara asing dapat mengunjungi dan menyaksikan makanan yang telah di sajikan, sehingga memicu daya tarik sendiri dengan melihat dan menyicipi makanan tersebut. Salah satu pameran yang menjadi bagian dari kampanye gastrodiplomasi Taiwan yakni

Taiwan Fest. Pada Taiwan Fest tidak hanya menyediakan makanan tetapi juga ada *cooking demo* termasuk pembuatan boba tea yang menarik pengunjung. Taiwan Fest dibuat agar orang lain memahami kekayaan budaya yang dimiliki oleh Taiwan utamanya untuk mempromosikan kuliner khas Taiwan yang memiliki rasa yang unik dan tradisi kuliner yang lezat.

Khusus untuk boba tea, Taiwan juga menyelenggarakan Boba Tea Festival atau bubble tea festival di berbagai negara. Seperti tahun 2019 ini di Singapura diselenggarakan Bubble Tea Festival 2019 yang menjadi Bubble Tea Festival pertama yang diadakan di Singapura. Tahun 2019 ini Taiwan juga menyelenggarakan festival Bubble Tea pertama di Times Square setelah New York Times menerbitkan artikel tentang Bubble Tea menyebutnya sebagai "gumpalan" dan menyebut teh sebagai "eksotis" meskipun minuman nasional Taiwan ini telah ada di New York selama hampir dua dekade (Hello Taiwan 2019). Sebelumnya pada tahun 2018, The Taipei Economic and Cultural Office di New York juga menyelenggarakan acara yang bernama Lab B: A Unique Taiwanese Bubble Tea Experience di SOHO New York (Taipei Economic and Cultural Office in New York 2018).

3. Menggunakan *Leader Opinion* dalam melaksanakan Gastrodiplomasi.

Dalam melakukan gastrodiplomasi, Taiwan juga menggunakan *leader opinion* yakni dengan cara menggunakan tokoh atau artis-artis terkenal untuk mempromosikan boba tea. Sehingga para penggemar dari artis tersebut memiliki rasa penasaran dan ingin menyicipi boba tea. Penyelenggaraan acara di luar negeri juga demikian, seperti acara Lab B: A Unique Taiwanese Bubble Tea Experience di SOHO New York. Acara ini diselenggarakan dengan berkerjasama dengan seniman Taiwan, penulis dan penata busana asal Taiwan yang tinggal di New York yang memiliki ketertarikan yang sama pada Boba Tea. Dalam acara ini sekelompok seniman Taiwan ini membuat instalasi seni yang dibuat untuk minuman Boba Tea yang dipandang sebagai kuliner paling populer yang diekspor Taiwan.

4. Melalui Pendidikan.

Taiwan dalam menjalankan gastrodiplomasi juga dilakukan melalui pelatihan dengan cara mengadakan *cooking class*. Seperti yang dilakukan Global Workers Organization (GWO) yakni sebuah lembaga swadaya masyarakat di yang mengadakan kursus membuat boba tea. Kursus ini diadakan untuk melatih tenaga kerja migran yang bekerja di Taiwan. Hal ini cukup beralasan karena saat ini Taiwan mempekerjakan sedikitnya 670.000 orang asal Asia Tenggara. Indonesia, dengan 260.000 tenaga kerja migran, saat ini merupakan salah satu kontributor terbesar, bersama Vietnam dan Filipina (Bisnis Indonesia 2018). Melalui kursus membuat boba tea ini, tenaga kerja migran disiapkan agar memiliki keahlian baru

untuk membuka usaha setelah tidak lagi bekerja di Taiwan, para buruh migran ini potensial menjadi mitra bisnis pengusaha Taiwan.

3. Membangun Kerjasama dengan Organisasi di Luar Negeri dan Hubungan Dengan Media

Gastrodiplomasi tidak hanya membutuhkan kebijakan strategis yang dibentuk oleh pemerintah, namun pemerintah juga perlu bekerjasama dengan aktor non-pemerintah. Aktor-aktor non-pemerintah yang berperan dalam gastrodiplomasi boba tea Taiwan yakni chef celebrity, artis dan seniman Taiwan, diaspora Taiwan di luar negeri, lembaga swadaya Masyarakat seperti Global Workers Organization, perusahaan boba Tea, praktisi diplomasi publik. Pelibatan media televisi dan media sosial juga tidak kalah pentingnya. Menjalankan Gastrodiplomasi dapat melalui media dengan cara menyebarkan makanan tersebut melalui acara sebuah televisi atau *acara cooking show* yang dapat disaksikan di internet seperti youtube, instagram, facebook, Twitter, ataupun website. Penggunaan media sosial saat ini dengan cepat menyebarkan informasi terkait dengan terus bertambahnya varian rasa dari boba tea. Kreativitas menu boba tea ini dan perbincangan di media sosial juga telah menarik konsumen, terutama terhadap merek Taiwan.

Kerjasama dengan organisasi di luar negeri juga diperlukan untuk memudahkan penyebaran boba tea diluar Taiwan. Sehingga diharapkan potensi yang ada pada gastrodiplomasi, yakni membuka akses kerjasama ekonomi dan politik dapat tercapai. Potensi ini bermula ketika makanan atau kuliner direkognisi sebagai identitas sebuah bangsa, wadah pemersatu bangsa, ataupun sebagai sebuah status yang merujuk pada konsep nasionalisme (Wilson, 2013).

Melalui boba tea, Taiwan dapat membangun sebuah kekuatan atas citra negaranya untuk membangun nilai tawar atau nation branding. Hal ini dibuktikan dengan terus meningkatnya permintaan akan boba tea. Secara global, pasar boba tea bernilai sejumlah \$1,94 miliar pada tahun 2017 dan diperkirakan akan tumbuh lebih lanjut pada tingkat 8,5% selama periode yang 2018-2025 (Estares 2019). Untuk di Asia popularitas minuman boba tea ini semakin meningkat. Pesanan untuk boba tea telah mengalami peningkatan yang konstan dan dramatis pada tahun 2018 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata regional 3.000% (Estares 2019). Berdasarkan data berikut, Indonesia berada di posisi pertama untuk tingkat penjualan boba tea tertinggi, kemudian diikuti dengan Filipina dan Thailand pada posisi tiga besar.

Tabel 1. Data peningkatan penjualan boba tea di Asia

Countries	Bubble tea growth by percentage in 2018*
Indonesia	>8500% growth from Jan 2018 to Dec 2018
Philippines	>3,500% growth from June 2018 to Dec 2018
Thailand	>3,000% growth from Jan 21018 to Dec 2018
Vietnam	>1,500% growth from May 2018 to Dec 2018
Singapore	>700% growth from May 2018 to Dec 2018
Malaysia	>250% growth from May 2018 to Dec 2018

*Time period: January 2018 to December 2018, or from the time GrabFood was launched.

Sumber: Grab website dalam Estares 2019.

Popularitas boba tea juga membawa dampak baik bagi nation brand Taiwan yang juga berimbas pada upaya promosi Taiwan lainnya baik kuliner Taiwan maupun pariwisata Taiwan. Sejak Taiwan mulai memberikan masuk bebas visa ke warga negara Thailand pada tahun 2016, jumlah orang Thailand yang berkunjung ke Taiwan telah meningkat dan mereka telah memperoleh rasa untuk teh asli.

Boba Tea yang disebut sebagai "satu-satunya minuman yang dapat dikunyah orang" memiliki potensi untuk membawa unsur-unsur lain dari budaya Taiwan ke panggung dunia. Popularitas minuman ini membuat orang tertarik pada Taiwan dan ingin belajar lebih banyak tentang kebiasaannya. Bubble tea adalah harta kuliner Taiwan. Faktanya, aspek yang menyenangkan dan beragam varian bubble tea menjadikannya simbol budaya Taiwan yang dinamis dan beragam. Ini sesuai dengan tujuan dari kampanye gastrodiplomasi Taiwan, kampanye ini berfokus pada membangun kesadaran akan budayanya sendiri dan nation brand serta untuk membedakan Taiwan dan Cina (Ministry of Foreign Affairs of Republic of China. 2009).

Fenomena boba tea ini masih relatif baru untuk dikatakan berhasil membangun citra Taiwan di dunia internasional. Namun pastinya gastrodiplomasi Taiwan melalui boba tea ini telah mampu mengangkat semangat nasionalisme dan identitas negara melalui minuman khasnya yang berawal dari minuman tradisional yang ada sejak tahun 1980an.

Penutup

Gastrodiplomasi adalah salah satu usaha pemerintah Taiwan untuk mempromosikan nation brandingnya dengan cara yang berbeda lebih mudah diterima oleh publik asing yakni melalui minuman boba tea. Kuliner diyakini bermanfaat menjadi lambang identitas nasional, yang mana representasi ini bertujuan untuk mencapai nilai-nilai ekonomi melalui pengakuan global. Gastrodiplomasi dilakukan untuk membentuk soft power melalui minuman boba tea dan menciptakan nation branding Dengan memperkenalkan boba tea sebagai minuman khas Taiwan ini dapat meningkatkan

reputasi yang positif. Kuliner menjadi hal yang dianggap sepele namun Taiwan memiliki perhatian khusus terhadap potensi kuliner yang dimilikinya.

Status Taiwan telah menjadi isu yang sangat rumit baik dalam hukum internasional maupun hubungan internasional selama beberapa decade ini dikarenakan One China Policy. Kebijakan ini telah membatasi kegiatan dan hubungan diplomatic Taiwan sehingga diperlukan diplomasi yang lebih fleksibel. Melalui gastrodipomasi boba tea ini tidak hanya efektif untuk meningkatkan kredibilitas Taiwan tetapi juga membentuk citra positif untuk bangsanya secara internasional. Ini juga mempunyai dampak baik untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara sahabat dan memperluas jangkauan Taiwan di dunia internasional, walaupun Taiwan belum sepenuhnya diakui sebagai sebuah negara. Taiwan sangat menaruh perhatian pada hubungan ekonomi dan pertukaran budaya tanpa ikatan hubungan diplomatik resmi. Tujuan utama Taiwan adalah untuk mendapatkan pengakuan bahwa Taiwan adalah suatu negara sendiri yang bukan merupakan bagian dari negara lain.

Bibliografi

- Anholt, Simon. 2013. "Beyond the Nation Brand: The Role of Image and Identity in International Relations". *The Journal of Public Diplomacy* 2 no1. USC Center on Public Diplomacy. 2015. "Eight Great Gastrodipomacy Nations" <https://www.uscpublicdiplomacy.org/story/eight-great-gastrodipomacynations>
- Bachdar, Saviq. 2018. "Ketika Bubble Tea Mencoba Saingi Popularitas Kopi". <https://marketeers.com/ketika-bubble-tea-mencoba-saingi-popularitas-kopi/>
- Bisnis Indonesia. 2018. "LAPSUS: Menimbang Langkah Taiwan Menoleh ke Selatan". <https://surabaya.bisnis.com/read/20180719/19/818318/lapsus-menimbang-langkah-taiwan-menoleh-ke-selatan/1>
- Cindyara, Aria. 2019. "Taiwan ajak masyarakat Indonesia coba "bubble tea" di tempat asalnya". <https://www.antaraneews.com/berita/965576/taiwan-ajak-masyarakat-indonesia-coba-bubble-tea-di-tempat-asalnya>
- Dinnine, K. 2008. "Nation Branding: Concepts, Issues, Practise". Oxford. UK: Butterworth-Heinemann.
- Dzenovska, D. 2005. "Remaking the Nation of Latvia: Anthropological Perspectives on Nation Branding". In *Place Branding*. 1:2, pp. 173-186.
- Estares, Ian. 2019. "Bubble Craze: From Taiwan To The World". <https://www.d8spring.com/eye-on-asia/bubble-craze-from-taiwan-to-the-world>
- Hello Taiwan. 2019. "Bubble Tea Festival NYC". <https://www.eventbrite.com/e/hello-taiwan-bubble-tea-festival-nyc-tickets-72430312013>

- Florek dan F. Conejo. 2006. "Export Flagships in Branding Small Developing Countries: The Cases of Costa Rica and Moldova. Place Branding and Public Diplomacy, 3 (1), 53-72". Future Priorities. Marketing Science. 25 (6), pp 740-59.
- Ministry of Foreign Affairs of Republic of China. 2012. "Taiwan-Canada Substantive Relations". Foreign Policy Report, Congress of Legislative Yuan
- Ministry of Foreign Affairs of Republic of China. 2009 " Foreign Policy Report, Congress of Legislative Yuan"
- Nye, Joseph S. 2004. "Soft Power: The Means to Success in World Politics". <https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/2004-05-01/soft-power-means-successworld-politics>.
- Rahmawati, Andi Annisa Dwi. 2019. "Bubble Tea Kekinian Jadi Topping Milk Tea yang Hits, Ini Sejarah Penemuan Boba". <https://food.detik.com/info-kuliner/d-4590409/jadi-topping-milk-tea-yang-hits-ini-sejarah-penemuan-boba/komentar>
- Rockower, Paul S. 2011. "Projecting Taiwan: Taiwan's Publik Diplomacy Outreach 47". Taiwan, Taipei, Institute of International Relations, National Chengchi University
- Smart Money. 2018. "Mengecap Manisnya Bisnis 'Bubble Tea' untuk Pasar Indonesia (1)". <https://smart-money.co/pejuang-usaha/mengecap-manisnya-bisnis-bubble-tea-untuk-pasar-indonesia-1>
- Snow, Nancy (editor).2009. "*Routledge Handbook of Diplomacy*", 270 Madison Avenue New York.
- Taipei Economic and Cultural Office in New York. 2018. "Lab B: A Unique Taiwanese Bubble Tea Experience" https://www.roc-taiwan.org/usnyc_en/post/2938.html
- Ostapenko, N. 2010. "Nation branding of Russia through the Sochi Olympic Games of 2014". Journal of Management Policy and Practice, 11(4), 60-63
- Outhavong, S. 2007. "Branding Nation Brand". Michigan: Proquest Dissertations and Theses.
- Wawolangi, F.X. 2020. "Politik Luar Negeri Republik Indonesia Melalui KTT Asia Afrika 2005" Universitas Indonesia Jakarta.

Indonesia di Jepang Menata Ulang Ke-Bangsa-an Indonesia Melalui Perspektif Pengalaman Diaspora

Zulkifli Harza¹, Bima Jon Nanda², Rifki Dermawan³

¹²³Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Andalas, Padang.

Corresponding e-mail: zharza@soc.unand.ac.id

Abstrak



Penelitian ini berawal dari pengalaman selama menempuh studi doctoral di Jepang dari tahun 2012 sampai 2017. Saya mengamati beberapa perubahan perilaku, sikap dan pandangan dari beberapa diaspora yang sudah bermukim disana. Pengamatan langsung tersebut mendapati bahwa kebanyakan diaspora seperti tidak peduli dengan karakter kebangsaan mereka. Seperti ketika kapanpun kita mendiskusikan para pekerja dan diaspora, diskusi itu sering hanya berada seputar karakter normatif. Dari sisi Negara, selalu diarahkan slogan untuk selalu memberikan dukungan kepada Negara. Sebaliknya para aktifis sosial justru menyuntikkan narasi bahwa mereka (diaspora) dieksploitasi oleh Negara. Sehingga makna nasionalisme menurut mereka justru bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Negara. Dengan demikian, menjadi penting mengamati bagaimana rasa kebangsaan tersebut pupus dari diri diaspora dan tidak tahu bagaimana praktek berkebangsaan itu sendiri. Persoalan yang muncul adalah bagaimana diaspora Indonesia memahami, menegosiasikan, dan mempraktekkan nasionalisme mereka. Sehingga pandangan mereka terhadap tanah asal mereka mengalami perubahan seiring dengan pengalaman keseharian mereka.

Kata Kunci

Jepang, Diaspora, Kebangsaan

Pendahuluan

Diaspora berdasarkan definisi dari Cambridge Dictionary (n.d.) adalah fenomena saat seseorang atau sekelompok orang menyebar dari negara asalnya ke negara lain. Belum ada pengertian universal yang diterima secara luas tentang diaspora. Istilah diaspora sering dipakai untuk menandakan fenomena yang berbeda-beda bergantung pada kepentingan dan fokus kajian. Dalam kajian migrasi, IOM dan MPI mengartikan diaspora sebagai “emigran dan keturunannya yang tinggal di luar negara tempat lahir atau nenek moyangnya, tetapi mereka tetap mempertahankan hubungan sentimental dan material dengan negara asalnya” (Romdiati 2015). Dapat diartikan Diaspora

sebagai fenomena migrasi manusia keluar dari negara asalnya ketempat baru yang tidak berada di negaranya.

Namun bagaimana pandangan diaspora terhadap Indonesia sendiri, saat pemerintah mempunyai rencana besar terhadap diaspora dengan landasan kebangsaan dalam menyatukan diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai belahan dunia. Pemerintah Indonesia beserta jajaran Kementerian mempunyai visi dalam memanfaatkan bahkan memulangkan diaspora Indonesia untuk memnbangun negara Indonesia. Kebangsaan dan cinta tanah air menjadi jargon utama pemerintah Indonesia memanggil diaspora Indonesia untuk berkontribusi dalam pembangunan. Pemerintah meyakini, diaspora Indonesia dapat menjadi kekuatan dalam mendorong ekspor. Dengan jumlah diaspora Indonesia yang cukup besar di seluruh dunia, ada beberapa bentuk kontribusi dan sinergisitas terhadap kemajuan perdagangan Indonesia (Warta Ekspor 2015). Kenyataannya, bagaimana pandangan dari diaspora itu sendiri terhadap Indonesia, bagaimana diaspora memaknai arti kebangsaan saat diaspora Indonesia adalah individu-individu yang telah tinggal puluhan tahun dan telah memiliki keluarga di negara ia berada sekarang, seperti Diaspora Indonesia di Jepang.

Diaspora adalah aset Bangsa. Namun kenyataan yang terjadi, banyak pelaku diaspora yang juga telah mempunyai keluarga di negara tempat ia berada, sudah puluhan tahun menetap di sana, yang kemudian mempunyai konsekuensi kepada bagaimana para pelaku Diaspora memaknai kebangsaan. Materi tidak bisa dilepaskan sebagai salah satu aspek utama mengapa pelaku diaspora bertahan, namun tentu ada rasa rindu untuk kembali ke kampung halaman di Indonesia. Para pelaku diaspora seolah kesulitan untuk menarasikan, menunjukkan, rasa kebangsaa mereka kepada Indonesia. Menghadapi dua sisi yang dilematis, di satu sisi visi dari Pemerintah Indonesia yang melihat pelaku diaspora sebagai aset dan diharapkan mendukung kemajuan bangsa Indonesia, disisi lain banyak dari pelaku diaspora yang telah merasakan nikmatnya menjadi diaspora dari segi materi. Jika pelaku diaspora kesulitan memaknai karakter kebangsaan seperti apa yang haru mereka narasikan dan tunjukkan agar sejalan dengan visi Pemerintah Indonesia terhadap Diaspora. Apakah Indonesia sudah tepat dalam memaknai jargon nasionalisme yang ditujukan kepada pelaku Diaspora. Karena pelaku Diaspora tidak hanya orang-orang yang sukses di negara lain, namun juga diaspora yang masih berjuang seperti para *kenshuusei* di Jepang.

Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu metode yang lebih bergantung pada data-data lingusitik dibanding data-data numerik, dan menggunakan basis meaning dalam analisa data (Eliot dan Timulak 2013). Disamping itu pendekatan yang peneliti pilih adalah pendekatan kualitatif deskriptif analisis, dimana tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang komprehensif

mengenai kejadian spesifik yang dialami oleh individu maupun suatu kelompok (Lambert dan Lambert 2014).

Penelitian deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan menginterpretasikan kondisi-kondisi kontemporer, penelitian ini fokus terhadap kondisi, praktek, stuktur dan perbedaan atau hubungan yang ada, opini serta proses yang sedang berlangsung atau menjadi trend pada waktu tertentu. Adapun penelitian deskriptif analisis tidak hanya berhenti pada deskripsi serta penjelasan tentang kondisi semata, namun juga melibatkan proses identifikasi dan interpretasi dari data-data yang telah dideskripsikan sebelumnya (Descriptive Research 2014).

Review Literatur/Tinjauan Pustaka

Salah satu sarjana yang memberikan pemikirannya terkait Diaspora adalah Paul Gilroy (1994). Konsep diaspora berperan penting dalam proses analisis kajian *inter-cultural* dan *trans-cultural*. Meskipun begitu, kemunculan istilah diaspora sebagai sesuatu yang baru menjadi bahan perdebatan di ranah studi politik. Diaspora dapat diidentifikasi melalui jaringan relasi yang secara karakteristik dipengaruhi proses perpindahan dan penyebaran yang bersifat memaksa. Faktor tekanan berperan penting dalam proses tersebut. Diaspora juga diwarnai oleh celah yang memisahkan daerah tujuan perpindahan dan daerah asal.

Proses perpindahan lintas budaya adalah hal yang lazim terjadi di dunia diaspora. Sebagai contoh, Edward Wilmot Blyden adalah salah seorang warga dari Afrika yang kembali ke negara asalnya setelah menetap di kawasan Danish West Indies. Blyden kembali ke Afrika dengan membawa ide baru dan terlibat aktif dalam proses pembebasan negara Liberia. Selain itu, diaspora erat kaitannya dengan lingkungan yang melibatkan identitas dan identifikasi budaya. Disisi yang lain, diaspora juga dikaitkan dengan isu gender. Stefan Helmreich mengidentifikasi bahwa proses reproduksi budaya dalam diaspora cenderung diwarnai ide maskulinitas. Gilroy dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa kehadiran diaspora telah membawa sudut pandang baru terhadap keberadaan dua kutub yang terpisah yaitu lokal dan global. Kehadiran diaspora memunculkan pemikiran mengenai konsep bangsa-negara (*nation-state*) dan jaringan supra nasional (*supra-national*) beserta pola kekuasaan, komunikasi, dan konflik.

Pemikiran dari Gilroy mengantarkan ide tentang pembentukan pemahaman pelaku diaspora terhadap negara-bangsa mengantarkan pada ide bagaimana bentuk pemahaman kebangsaan bagi pelaku diaspora terhadap negara tempat ia berasal. Berseberangan dengan Gilroy, Schiller lebih menekankan pada pendekatan *transnational* dalam melihat fenomena diaspora (Schiller 2010). Studi mengenai migrasi transnasional sangat populer di zaman sekarang ini yang mendominasi pembahasan mengenai kehidupan para migran dan keluarganya di kawasan baru. Diskursus yang tercipta dari diskusi ini cenderung menggambarkan migran sebagai

aktor yang mengancam stabilitas negara tujuan. Lebih lanjut para akademisi dalam studi migrasi ini kebanyakan abai terhadap teori sosial dari proses migrasi. Hasil pemikiran mereka berkontribusi dalam pemahaman mengenai tantangan dalam proses penyatuan migrant dan masyarakat lokal.

Schiller berharap bahwa akan ada sebuah kajian komprehensif mengenai migrasi yang didiskusikan dalam level transnasional. Hal ini bisa terwujud jika akademisi di bidang migrasi bersedia untuk mengenyampingkan metodologi nasionalisme-nya dan tidak berfokus pada baik buruknya proses migrasi. Schiller juga mengkritik penggunaan *nation-state* sebagai unit analisis dalam kajian migrasi dan dia menawarkan konsep berupa *transnational social fields* yang dapat dimaknai sebagai sebuah jaringan yang mengaitkan para individu dengan institusi yang bertempat lebih dari satu *nation-state*.

Analisis terhadap proses migrasi yang terjadi hari ini dan di masa lampau serta fokus kajian terhadap kekuatan terinstitusionalisasi diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam studi migrasi. Schiller merangkum ide pemikirannya dalam sebuah kerangka yang dia sebut sebagai “*global power analysis of migration*” yang diimplementasikan sebagai sebuah diskursus untuk menjembatani beragam argumen mengenai migrasi. Para akademisi juga bisa terlibat aktif dalam pembuatan kebijakan melalui sudut pandang baru tersebut dan tidak hanya mengikuti alur tradisi pemikiran lama.

Pembahasan

Istilah diaspora di Indonesia sebetulnya bukan hal yang baru. Sejak tahun 1960an istilah diaspora sudah dikenal di Indonesia, namun terkait dengan diaspora Tiongkok dan memiliki stigma negatif. Karena hal itu, dalam beberapa dekade gaung diaspora seolah tenggelam. Diaspora baru kembali menggeliat ketika Dino Patti Djalal, yang saat itu menjabat sebagai duta besar RI untuk Amerika Serikat (2010 – 2013) memprakarsai diadakannya Kongres Diaspora Pertama tahun 2012 di Los Angeles, Amerika Serikat. Kongres Diaspora Pertama yang diselenggarakan di Los Angeles Convention Center tersebut ternyata melalui proses yang cukup panjang. Sebagai duta besar kala itu, Dino sering melakukan kunjungan ke beberapa wilayah di Amerika Serikat dan selalui menjumpai komunitas orang Indonesia di daerah yang. Anehnya, komunitas-komunitas orang Indonesia di berbagai wilayah di Amerika saat itu tidak saling mengenal, tidak *connected*, dan di bawah radar. Pemerintah saat itu tidak punya kebijakan aktif untuk merangkul para diaspora tersebut (Lamijo 2019).

Berbeda dengan definisi hukum dan bersifat umum yang dipakai oleh Departemen Luar Negeri, Dino Patti Djalal mengatakan bahwa diaspora adalah orang yang berdarah dan atau berbudaya Indonesia, yang generasi satu atau seterusnya, yang tinggal di luar negeri kecuali diplomat dan wisatawan Indonesia. Lebih lanjut Dino juga mengatakan bahwa saat ini kita memang lebih fokus pada diaspora (yang masih WNI walaupun tetap juga merangkul WNA (WNI yang sudah menjadi WNA) untuk

ikut serta meningkatkan daya saing bangsa. Sehat Sutarja, misalnya, sudah lama berkewarganegaraan Amerika Serikat, tetapi potensinya sebagai pengusaha sukses, bahkan di Silicon Valley dia sudah seperti raja, sangat berguna bagi diaspora Indonesia lainnya. Untuk itu, kebijakan baru yang diambil untuk merangkul diaspora adalah dari pendekatan legalistik (hanya WNI) ke pendekatan kultural (WNA ataupun WNI yang sudah menjadi WNA tetapi secara kultural masih seperti dan sangat Indonesia) (Lamijo 2019).

Menurut Dino Patti Djalal, ada empat kelompok Diaspora Indonesia, *pertama* adalah WNI yang tinggal di luar negeri (pemegang paspor Indonesia) secara sah; *kedua* adalah warga Indonesia yang telah menjadi warga negara asing karena proses naturalisasi dan tidak lagi memiliki paspor Indonesia. Sementara bagi warga negara asing yang memiliki orang tua atau leluhur yang berasal dari Indonesia masuk dalam kategori *ketiga*. Dan *terakhir* adalah warga negara asing yang tidak memiliki pertalian leluhur dengan Indonesia sama sekali namun memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap Indonesia seperti Paul Wolfowitz (Mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia), yang fasih berbahasa Indonesia adalah sebagai salah satu contoh kelompok yang keempat (Jazuli 2017).

Diaspora Sebagai Aset Bangsa Indonesia

Sejak diaspora menjadi sangat populer di Indonesia pasca Kongres Diaspora Pertama, pemerintah berjanji untuk memberdayakan diaspora yang mau kembali ke Indonesia untuk membangun dan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh salah satu kementerian di Indonesia, yakni kementerian riset dan pendidikan tinggi (Ristekdikti). Kemenristekdikti memanggil 57 ilmuwan diaspora untuk pulang ke Indonesia. Mereka berasal dari 15 negara yang nantinya akan menularkan ilmunya dalam Simposium Cendekia Kelas Dunia (SCKD) 2019. Tahun ini, kegiatan dilaksanakan pada 18-25 Agustus 2019 di Jakarta. Penyelenggaraan SCKD 2019 turut melibatkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI. Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Ali Ghufron Mukti mengungkapkan, rangkaian kegiatan SCKD merupakan upaya pemerintah memberdayakan anak bangsa di manapun mereka berada untuk ikut bersumbangsih dalam pembangunan sumber daya manusia, khususnya di ranah pendidikan tinggi (JPNN 2019).

Pemaknaan Kebangsaan Melalui Pengalaman Diaspora Di Jepang

Pada tahun 2017 jumlah diaspora Indonesia di Jepang menempati peringkat 11 dari seluruh diaspora asing di Jepang (P2SDR 2017). Para *Kenshuusei* adalah kelompok diaspora yang sebagian besar mendominasi jumlah diaspora Indonesia di Jepang, setelah masa kerja mereka berakhir, banyak dari *Kenshuusei* ini memutuskan untuk memperpanjang masa tinggalnya di Jepang baik secara legal maupun ilegal. Diaspora Indonesia seolah segan pulang, perbedaan bayaran yang tinggi di tempat negara diaspora berada di dibandingkan dengan Indonesia sangat berbeda jauh. Seperti salah satu Diaspora Indonesia di Jepang yang berkarir akademik di universitas Tsukuba, Jepang. Ia bisa melakoni karier akademik di almahalnya, Tsukuba. Dia diajukan

sebagai asisten dosen dan berpeluang menjadi dosen tetap. Bayaran sebagai asisten pengajar itu mencapai bisa mencapai Rp30 juta per bulan jika dikonversi ke rupiah. Hitungannya, untuk level asisten, diberikan honor 2.000 yen per jam dan dalam sepekan bisa mengajar hingga 40 jam (Harian Jogja 2019). Realita kemudian dihadapi oleh Pemerintah Indonesia, bagaimanapun Pemerintah mempunyai agenda untuk memanfaatkan Diaspora untuk berkontribusi terhadap Indonesia, namun kenyataannya pelaku Diaspora sendiri menghadapi kenyataan jika tetap menjadi Diaspora mempunyai keuntungan tersendiri, tidak hanya berbicara persoalan materi saja, namun fakta diaspora yang telah memiliki keluarga.

Rasa kebangsaan kemudian di pahami sebatas identitas oleh pelaku diaspora. Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan selama berada di Jepang, pelaku Diaspora Indonesia, khususnya para *kenshuusei* memaknai “Indonesia” sebagai identitas saja. Identitas dalam artian, sebagai pemersatu dengan pelaku diaspora lainnya. Banyak dari pelaku Diaspora di Jepang justru adalah tenaga non-ahli atau bukan tenaga professional. Walaupun masuk secara legal ke Jepang, namun pendapatan yang jauh lebih tinggi di dibandingkan saat berada di Indonesia, membuat para pelaku diaspora tersebut betah untuk tinggal lama di Jepang. Sehingga dalam pandangan pelaku diaspora, kebangsaan di pahami sebagai pemersatu antara sesama diaspora Indonesia di Jepang. Membentuk identitas kolektif yang mendorong rasa tolong-menolong dan saling bantu antara sesama diaspora Indonesia di Jepang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku diaspora di Jepang juga dapat di pahami, selain rasa kebangsaan yang lebih melekat sebagai identitas solidaritas antara pelaku diaspora, dan bukan pendorong pelaku diaspora untuk kembali ke Indonesia. Pelaku Diaspora di Jepang enggan kembali ke Indonesia karena ikatan keluarga serta keuntungan yang tidak di dapatkan oleh pelaku diaspora di Indonesia, namun di dapatkan saat di Jepang. Pertama soal keluarga, tidak hanya menikah dengan pelaku diaspora lainnya, mereka kemudian mempunyai keturunan dan kemudian telah berasimilasi dengan budaya dan masyarakat Jepang. Ketakutan adanya semacam *culture shock* yang akan alami saat kembali di Indonesia juga menjadi alasan mengapa mereka enggan untuk kembali. Para pelaku diaspora cenderung telah terbiasa dengan kehidupan di Jepang, mereka telah beradaptasi begitu baik sehingga enggan untuk kembali beradaptasi saat kembali ke Indonesia.

Kedua soal keuntungan yang tidak di dapat oleh pelaku diaspora saat mereka di Indonesia namun mereka dapatkan saat berada di Jepang. Pelaku Diaspora Jepang bisa mendapatkan bayaran yang tinggi di dibandingkan pekerjaan yang sama di Indonesia. Misalnya seperti pekerjaan menanam padi di Jepang dapat menghasilkan uang puluhan juta setiap bulannya. Kemudian perlu di garisbawahi adalah dua hal, pertama bayaran yang tinggi yang di dapatkan oleh pelaku diaspora untuk pekerjaan yang sama di dibandingkan saat di Indonesia, serta banyak pelaku diaspora adalah pekerja kerah biru. Hal ini kemudian menjadi tantangan saat target diaspora dari pemerintah Indonesia

adalah pelaku diaspora dengan ber-*skill* yang telah banyak mendapatkan pengalaman di luar negara Indonesia, kemudian melupaka pelaku diaspora lain yang sebenarnya dapat di maksimalkan sebagai aset.

Sehingga pemaknaan rasa kebangsaan kemudian tidak harus dipahami sebagai bentuk pendorong agar pelaku diaspora di luar negeri untuk kembali di Indonesia, namun di dorong untuk menjadi rasa identitas yang kuat bahwa pelaku diaspora dapat berkontribusi di tempat mereka berada. Rasa kebangsaan tidak hanya menjadi identitas solidaritas antara sesama pelaku diaspora namu juga menjadi pendorong untuk ikut berkontribusi kepada negara Indonesia tanpa kembali ke tanah air. Hal ini dorong oleh beberapa hal, pertama, keinginan dari pelaku diaspora yang cenderung minim kembali ke Indonesia saat banyak keuntungan mereka dapatkan secara materi di Jepang, serta banyak pelaku diaspora Indonesia di Jepang yang merupakan pekerja kerah biru, yang saat kembali ke Indonesia tidak akan mendapatkan bayaran yang sama besarnya saat berada di Jepang. Kedua, seperti yang di jelaskan diatas, pelaku diaspora Indonesia yang telah tinggal puluhan tahun, sehingga enggan untuk kembali. Penataan rasa kebangsaan bagi para pelaku Diaspora Jepang dapat di landasakan pada pandangan Waterbury.

Waterbury menulis tentang bagaimana diaspora di pandang sebagai kekuatan atau aset dari sebuah negara (Waterbury 2010). Dua puluh tahun terakhir terjadi fenomena dimana banyak negara terlibat aktif berinteraksi dengan anggota komunitas negaranya yang menetap di luar negeri. Hal ini mengakibatkan tingginya minat akademisi dalam kajian *trans-state* dan *transnasional relationship*. Selain itu kondisi ini juga menunjukkan kemunculan kelompok masyarakat yang mampu menjembatani hubungan dari lebih satu negara berdaulat. Lebih lanjut Waterbury menawarkan sebuah kerangka studi komparatif mengenai tindak negara yang bertindak sebagai wakil dari penduduknya yang berada di luar negeri. Kerangka ini berfokus kepada tindakan terhadap masyarakat di luar negeri dan bukan kepada kondisi masyarakat di daerah asal. Waterbury menyimpulkan bahwa sebuah negara menjalin interaksi aktif dengan warga diaspora di luar negeri karena negara melihat komunitas diaspora sebagai kekuatan negara bukan sebagai kelemahan.

Pelaku Diaspora kemudian di pandang sebagi asset tidak hanya sat mereka kembali ke Indonesia, namun juga saat mereka berda di luar negeri. Pelaku Diaspora, melalui bantuan pemerintah dapat menjadi agen diplomasi publik. Untuk pelaku Diaspora Jepang di Indonesia sendiri, Indonesia dapat memanfaatkan pelaku diaspora untuk menjadi penyebar budaya Indonesia kepada masyarakat Jepang. Menimbulkan citra positif untuk negara Indonesia dan mempererat hubungan bilateral kedua negara. Sehingga rasa kebangsaan di pahami sebagai kebanggaan untuk memajukan dan mebantu bangsa tanpa harus kembali ke negara asal.

Penutup

Rasa Kebangsaan bagi Diaspora Jepang adalah identitas pemersatu untuk saling membantu dengan pelaku Diaspora Indonesia lainnya. Sehingga rasa kebangsaan jika di gunakan untuk membuat pelaku Diaspora Jepang kembali ke Indonesia akan mengalami kendala. Keuntungan materi dan rasa enggan untuk kembali karena telah lama tinggal di Jepang menjadi tantangan. Penataan ulang kebangsaan berdasarkan perspektif pelaku diaspora Jepang kemudian di pahami sebagai penanaman rasa jika untuk berkontribusi kepada bangsa tidak harus kembali ke Indonesia. Pelaku Diaspora dapat berkontribusi di negara tempat mereka berada dan menjadikan rasa kebangsaan sebagai pendorong mereka untuk berkontribusi.

Bibliografi

- Cambridge Dictionary. n.d. "Diaspora". <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/diaspora> (July 2, 2019).
- Descriptive Research. n. d. "Research Methodology". http://www.mu.ac.in/myweb_test/Research%20Methodology-Paper-3/Chapter-5.pdf (November 16, 2014)
- Elliot, Robert dan Ladislav Timulak. 2013. *Descriptive and Interpretive Approaches to Qualitative Research*. Oxford: Oxford University Press.
- Gilroy, Paul. 1994. "Diaspora". *Paragraph*. 17(3): 207-212.
- Harian Jogja. 2019. "Long-Form: Melongok kisah Diaspora yang Segan Kembali ke Indonesia". <https://news.harianjogja.com/read/2019/03/30/500/981701/long-form-melongok-kisah-diaspora-yang-segan-kembali-ke-indonesia> (July 9, 2019)
- Jazuli, Ahmad. 2017. "Diaspora Indonesia dan Dwi Kewarganegaraan dalam Perspektif Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia". *JIKH*. 11(1): 97-108.
- JPNN. 2019. "Kemenristekdikti Panggil 57 Ilmuwan Diaspora Pulang ke Indonesia". <https://www.jpnn.com/news/kemenristekdikti-panggil-57-ilmuwan-diaspora-pulang-indonesia> (July 23, 2019).
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2015. *Indonesian Diaspora Network*. Warta Ekspor. p. 3.
- Lambert, Vickie A. dan Clinton E. Lambert. 2014. "Qualitative Descriptive Research: An Acceptable Design". *Journal of Nursing Research* 16(4): 255-6.
- Lamijo. 2019. "Memahami Awal Kebangkitan Diaspora Indonesia: Wawancara Eksklusif dengan Dino Patti Djalal". <http://psdr.lipi.go.id/news-and->

- events/opinions/memahami-awal-kebangkitan-diaspora-indonesia-wawancara-eksklusif-dengan-dino-patti-djalal.html (July 22, 2019).
- P2SDR. 2017. "Diaspora Indonesia di Jepang: Potensi dan Tantangan". <http://psdr.lipi.go.id/news-and-events/news/diaspora-indonesia-di-jepang-potensi-dan-tantangan> (July 10, 2019).
- Romdiati, Haning. 2015. "Globalisasi Migrasi dan Peran Diaspora: Suatu Kajian Pustaka". *Jurnal Kependudukan Indonesia* 10(2): 90.
- Schiller, Nina Glick. 2010. "A Global Perspective on Transnational Migration: Theorising Migration Without Methodological Nationalism". Amsterdam: Amsterdam University Press, 109-130.
- Waterbury, Myra A. 2010. "Bridging the Divide: Towards a Comparative Framework for Understanding Kin State and Migrant-Sending State Diaspora Politics". Amsterdam: Amsterdam University Press, 131-148.

Republik Rakyat China dari Perspektif Identitas ke-Tionghoa-an Indonesia

Harryanto Aryodiguno¹

¹Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Presiden, Cikarang

Corresponding Email: harry_anto@president.ac.id

Abstrak



Konsep Post-Chineseness sering digunakan untuk mendeskripsi pandangan sinologis terhadap China. Pandangan-pandangan tersebut terdiri dari pandangan budaya, identitas maupun agama. Selain itu, Post-Chineseness juga digunakan ahli Sinologi untuk membedakan ke-Tionghoa-an mereka, ke-Tionghoa-an ini berbeda karena perbedaan antara negara yang pernah di jajah oleh bangsa barat maupun negara yang menganggap bahwa mereka sendiri lebih pantas mewakili apa yang disebut sebagai “Tionghoa.” Dengan demikian “ke-Tionghoa-an” bisa terdiri dari berbagai makna yang berbeda. Tionghoa Indonesia menggunakan konsep Post-Chineseness untuk memahami, mendefinisi, dan menentukan hubungan mereka dengan China. Tionghoa Indonesia secara identitas sering dianggap telah memudar dibandingkan dengan Tionghoa yang berada di Malaysia maupun Singapura, namun apabila didalami, dari sisi sejarah Tionghoa Indonesia secara identitas pernah menggunakan identitas Tionghoanya dalam membentuk ke-Indonesian-nya maupun tetap mempertahankan ke-Tionghoa-annya di luar China.

Kata Kunci

Chineseness, Post-Chineseness, Indonesia, Sinology, Identitas

Pendahuluan

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa tokoh masyarakat maupun ahli Tionghoa yang masih berdarah Tionghoa di Indonesia dan berdasarkan teori Post-Chineseness, tulisan ini berusaha menjelaskan perbedaan antara “China” dan “ke-Tionghoa-an” atau “Chineseness,” dan bagaimana Tionghoa Indonesia membedakan antar komunitas Tionghoa maupun China. Tulisan ini berpendapat bahwa dari sisi budaya dan kebiasaan orang-orang di daratan China, orang Tionghoa Indonesia mempunyai sisi atau perspektif yang berbeda dalam melihat diri mereka sendiri maupun China. Berbagai sifat ke-Tionghoa-an ini memungkinkan para Sinologis maupun para tokoh Tionghoa Indonesia untuk menjalin hubungan dengan China sesuai dengan maksud dan tujuan mereka. Disisi lain, mereka juga dapat menggunakan identitas ke-Tionghoa-an mereka untuk memutuskan ikatan dengan China, ini memungkinkan

karena dalam praktek, mereka berpendapat bahwa Tionghoa Indonesia berbeda dengan China. Jadi, dalam tulisan ini akan dijelaskan bagaimana mereka melihat China dari sisi budaya maupun dari sisi lingkungan mereka berkembang atau sumber daya yang mereka dapat. Selain itu juga, tulisan ini akan membahas para ahli Tionghoa maupun tokoh masyarakat ini melihat China dari identitas Tionghoa mereka atau non-Tionghoa mereka.

Dari aspek Bahasa dan budaya, bagi orang-orang non Tionghoa memang sangat susah untuk membedakan antara orang China daratan dan orang Tionghoa Indonesia. Akan tetapi dari aspek sejarah penelitian tentang China, Sinologi maupun penelitian tentang ahli Sinologi dan Ahli China kita bisa melihat perbedaan antara China, Tionghoa maupun Ahli Sinologi dan ahli masalah China. Sesuai dengan pendapat Ludwig Wittgenstein (Shih 2013: 31), kita masih bisa membedakan antara para keturunan Tionghoa meskipun para ahli keturunan Tionghoa dan asli Tiongkok sering mengidentifikasi diri mereka sebagai Chinese, tetapi mereka masih tidak bisa menemukan satu konsensus tentang ke-Tionghoa-an mereka. Sifat seperti ini membuat ke-Tionghoa-an dapat didefinisikan secara sosial dan mengubah ke-Tiongho-an menjadi sebuah identitas (Thies 2012).

Ketika China bangkit menjadi satu kekuatan ekonomi dunia, China sering dianggap sebagai ancaman dalam tatanan dunia yang sudah dalam zona aman versi negara barat, dan etnis Tionghoa di seluruh dunia juga menjadi perhatian sebagai efek dari bangkitnya China sebagai raksasa dunia, terutama etnis Tionghoa yang secara budaya masih kental dengan budaya China, contohnya Malaysia, Singapura maupun beberapa wilayah di Indonesia. Beberapa wilayah di Indonesia, terutama di pulau Jawa, sebagian besar etnis Tionghoa telah berbaur dalam kehidupan etnis pribumi Indonesia, baik secara kebiasaan, budaya maupun melalui perkawinan campur. Akan tetapi wilayah di luar Pulau Jawa, seperti di Kalimantan dan sebagian Sumatera, masyarakat Tionghoa sering menerima dan mempraktekkan budaya Tionghoa yang kental, dan ini mempengaruhi pandangan masyarakat non-Tionghoa maupun pemerintah terhadap orang Tionghoa, yang akhirnya juga berefek kepada hubungan antara Indonesia-China.

Sebelum membahas teori Post-Chineseness, tulisan ini akan menjelaskan kepada kita bahwa ke-Tionghoa-an Indonesia sebenarnya adalah sifat dari orang-orang Tionghoa Indonesia itu sendiri, bagaimana mereka membedakan diri mereka dengan komunitas etnis Tionghoa dari wilayah yang berbeda, maupun membedakan diri mereka dengan penduduk pribumi setempat. Akhirnya, kita menggunakan teori Post-Chineseness untuk menjelaskan gejala diatas, yaitu bagaimana Tionghoa saling membedakan dan kemudian tidak hanya dalam komunitas dan luar komunitas, tetapi juga saling membedakan dari kesamaan dan perbedaan pandangan politik, identitas maupun agama maupun diri mereka sendiri dengan negeri leluhur.

Ke-Tionghoa-an Indonesia Tidak Relevan Untuk Menjelaskan Hubungan Tionghoa dan China

Penelitian ini menggunakan konsep Chineseness dan Post-Chineseness untuk menjelaskan keberagaman Tionghoa di Indonesia. Tionghoa Indonesia adalah orang-orang Tionghoa yang lahir dan besar di Indonesia, orang-orang Tionghoa dari Tiongkok maupun Taiwan, Hong Kong dan negara lain yang bermigrasi ke Indonesia setelah era reformasi di tahun 1998. Jadi, berdasarkan asal tempat lahir sudah bisa dipastikan betapa beraneka-ragamnya etnis Tionghoa itu sendiri. Orang Tionghoa yang lahir dan besar di Pulau Jawa, sebagian besar telah berbaur dan mengasimilasikan dirinya dengan budaya setempat, mereka tidak lagi mempergunakan Bahasa atau dialek Tionghoa dalam kehidupan sehari-harinya. Orang Tionghoa yang lahir di luar pulau Jawa terutama di Kalimantan barat, Sumatera Utara dan Selatan, Bangka-Belitung masih mempergunakan Bahasa mandarin maupun dialek Tionghoa lainnya, akan tetapi mereka tetap mempertahankan identitas kebangsaan nasional mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Berbeda dengan Tionghoa yang baru menaturalisasikan dirinya setelah tahun 1998, karena bukan lahir dan besar di Indonesia, keterikatan hubungan dengan negara yang menjadi tanah air barunya tidaklah setajam dengan Tionghoa Peranakan yang lahir dan besar di Indonesia.

Demikian juga dengan perbedaan etnis Tionghoa di Indonesia maupun di Malaysia. Ketika kita melihat Tionghoa di Malaysia, kita akan menemukan orang-orang Tionghoa yang fasih berbahasa mandarin, yang masih kental dengan budaya Tionghoanya, yang sering dianggap lebih bisa menjaga budaya leluhur negeri Tiongkok. Berbeda dengan Singapura yang memiliki jumlah etnis Tionghoa yang besar. Secara geografis, Singapura terjepit diantara dua negara besar, dilihat secara geografis, Indonesia dan Malaysia termasuk negara yang besar di Asia tenggara, dilihat dari jumlah dan agama penduduk, Indonesia dan Malaysia memiliki etnis Melayu yang besar, dan agama Islam menjadi agama dominan di kedua negeri tersebut. Ini menyebabkan ketika terjadi perang dingin, Singapura terjepit diantara kedua negara besar ini. Singapura karena ingin menciptakan image bahwa dia bukan sebagai perwakilan dari negara China di Asia tenggara, Singapura berupaya keras menghilangkan ke-Tionghoa-an mereka sendiri, dengan cara menghilangkan pengajaran Bahasa mandarin dan memilih Bahasa Inggris sebagai Bahasa nasional dan Bahasa resmi negara mereka. Keanekaragaman Tionghoa di Indonesia merupakan bukti bahwa Tionghoa Indonesia tidak homogen dan ini juga adalah salah satu refleksi dari apa yang kita namakan sifat ke-Tionghoa-an. Sifat ke-Tionghoa-an ini terkadang membuat Tionghoa sebagai etnis merasa superior dan terkadang juga membuat Tionghoa sebagai etnis terpinggirkan, oleh karena itu kita menamakan sifat ke-Tionghoa-an ini tidak statis dan terus bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

Tentu saja, sifat ke-Tionghoa-an terus melekat dimana ketika para imigran Tionghoa yang baru atau para keturunan dari Peranakan Tionghoa itu sendiri secara sadar terus mempertahankan identitas Tionghoanya. Komunitas Tionghoa juga dalam keadaan sadar, sering memanfaatkan budaya Tionghoa maupun memanfaatkan sumber daya atau bantuan dari China untuk tetap membangun dan mempererat nilai-nilai Tionghoa. Sifat ke-Tionghoa-an seperti ini sering menimbulkan persepsi bahwa Tionghoa perantauan maupun Peranakan di Indonesia masih ingin mempertahankan hubungan dengan negeri leluhur, persepsi ini tidak hanya timbul di kalangan masyarakat dan pemerintah Indonesia, bahkan persepsi ini juga muncul di kalangan masyarakat dan pengambil kebijakan di China. Sifat ke-Tionghoa-an seperti ini telah menimbulkan perpecahan di komunitas Tionghoa itu sendiri. Komunitas Tionghoa Indonesia yang masih bisa berbahasa daerah China, seperti Bahasa Hokkien, Hakka, Tiao Ciu, dll sering menganggap dirinya adalah “Tang Ren” (orang Tang) yang berarti orang yang masih memiliki budaya maupun ikatan darah asli China, sedangkan mereka mendefinisikan orang-orang Tionghoa yang sudah tidak berbahasa Tionghoa dengan sebutan Qiao Sheng (orang Tionghoa yang lahir di perantauan atau di luar negeri China). Komunikasi antara dua komunitas Tionghoa yang berbeda ini juga berbeda tajam, dimana orang Tionghoa yang menganggap diri mereka lebih “pure” akan menganggap Tionghoa Peranakan sudah di Indonesianisasikan, tentunya juga berpengaruh dalam pandangan mereka tentang China dan penerimaan mereka tentang negeri China. Situasi semacam inilah yang sering kita namakan “sesudah sifat ke-Tionghoa-an” atau Post Chineseness.

Persamaan sifat ke-Tionghoa-an atau Chineseness di Indonesia adalah ketika mereka sama-sama menggunakan budaya China atau ketika mereka sedang menyanggah identitas Tionghoanya, mereka sering terlihat kuat dan bersatu, mereka lebih baik menghindari dari yang dinamakan bentrokan antar sesama Tionghoa di dalam satu komunitas atau kesatuan. Ketika Republik Indonesia belum terbentuk, sudah ada tiga jenis organisasi Tionghoa yang berbeda di Hindia Belanda. Ketiga organisasi yang berbeda ini bisa merepresentasikan pikiran dan pandangan politik maupun mereka pada saat itu. Ketiga organisasi tersebut diantaranya adalah: Tiong Hwa Hwee Koan, sebagai organisasi Tionghoa maupun organisasi non-Belanda yang pertama yang berdiri di Hindia Belanda, Tiong Hwa Hwee Koan secara politik dan budaya lebih condong ke negeri leluhur China, meskipun tidak dipungkiri bahwa lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman juga pertama kalinya dimuat dan disebarluaskan di koran Sin Po kepunyaan organisasi Tiong Hwa Hwee Koan. (Sudibyo, 2001) Yang kedua adalah organisasi Chung Hua Hui yang terdiri dari pemuda-pemuda Peranakan Tionghoa yang lebih banyak mengecap pendidikan di sekolah Hindia Belanda maupun Belanda, organisasi ini lebih pro pemerintah Hindia Belanda dan menganggap bahwa Tionghoa yang lahir dan menetap di Hindia Belanda adalah kawula Belanda. (Suryadinata 1994: 41-42) Organisasi kepemudaan Tionghoa yang ketiga adalah Partai Tionghoa Indonesia yang berada di bawah pimpinan Liem

Koen Hian, yang menganggap Indonesia adalah negara baru dan tanah tumpah darah buat semua orang Tionghoa yang menetap di Hindia Belanda dan oleh karena itu pendirian negara baru ini harus segera diperjuangkan. (Jahja 1995)

Perbedaan pandangan politik tetap terjadi setelah Indonesia merdeka, dimana pada zaman Sukarno, ada kelompok Tionghoa yang memilih tetap menjadi warga negara China dan ada yang memilih menjadi warga negara Indonesia. Demikian juga yang memilih menjadi warga negara Indonesia juga terbagi lagi dua bagian, dimana sebagian memilih berasimilasi total menjadi bagian dari bangsa Indonesia, dan sebagian lagi memilih berintegrasi sebagai bagian dari nasional bangsa Indonesia. Perdebatan format asimilasi dan integrasi belum menemukan titik terang, dimana pada tahun 1965 meletus peristiwa Gerakan 30 September yang mengakibatkan jatuhnya pemerintahan sukarno yang berefek juga terhadap pilihan politik kelompok pro-integrasi. Pada masa pemerintahan Soeharto, disatu sisi kebijakan asimilasi total menyebabkan sebagian besar orang-orang Tionghoa Indonesia kehilangan identitas dan jatidiri Tionghoa, dan ini adalah salah satu dampak positif dari program asimilasi bagi pemerintahan Soeharto. Efek lainnya adalah, kebijakan asimilasi Soeharto sekaligus juga menyatukan kelompok minoritas Tionghoa yang tadinya terpecah dalam pandangan politik. Kebijakan Soeharto membuat kelompok Tionghoa merasa di-Cina-kan dan sekali Cina tetap Cina, sehingga membuat sifat ke-Tionghoa-an semakin eksis dan bahkan sampai sekarang. (Coppel 1994)

Orang-orang Tionghoa meskipun punya pandangan politik yang berbeda dan bisa menerima perbedaan diantara mereka, akan tetapi karena pada masa Soeharto merasa memiliki nasib dan menerima perlakuan yang sama dari pemerintah maupun masyarakat non-Tionghoa. Meskipun demikian, mereka tetap masih bisa saling membedakan dari satu komunitas dengan komunitas lainnya, seperti contohnya komunitas Tionghoa Jakarta yang berbeda dengan komunitas Tionghoa Medan. Komunitas Tionghoa Jakarta dan di pulau Jawa berusaha keras menghilangkan ke-Tionghoa-annya sedangkan komunitas Tionghoa di Medan dan di Pontianak justru mempertahankan sifat ke-Tionghoa-annya. Akhirnya, orang-orang Tionghoa yang sukses mempertahankan ke-Tionghoa-annya inilah yang akhirnya tetap bisa dibedakan dari komunitas Tionghoa itu sendiri. Jadi, ke-Tionghoa-an atau Chineseness adalah membedakan diri sendiri dari segi identitas dengan orang lain dan bisa menerima identitas yang berbeda dari komunitas Tionghoa lainnya. Karena sifat ke-Tionghoa-an Indonesia yang cenderung berbeda dari satu komunitas dan komunitas lainnya, maka ke-Tionghoa-an Indonesia sering dianggap lebih “Chinese” dari orang-orang Tionghoa yang ada di Tiongkok. Ini tercermin dari budaya dan perayaan hari besar adat-istiadat Tionghoa seperti imlek dan capgomeh di Kalbar. Demikian juga ketika para peneliti menilai bahwa Tionghoa Indonesia adalah kelompok etnis yang paling berhasil berasimilasi ke dalam bagian bangsa Indonesia, para peneliti ini lebih banyak mengambil sample dari kehidupan orang-orang Tionghoa yang berada di pulau Jawa.

Jadi disatu sisi, benar adanya bahwa Tionghoa Indonesia masih mampu menjaga dan masih lebih cenderung berinteraksi dengan negeri leluhur dan disisi lain ada kelompok komunitas Tionghoa yang sudah sangat membaaur ke dalam kehidupan masyarakat etnis lain di Indonesia. Jadi sifat ke-Tionghoa-an di Indonesia sangat tidak relevan untuk menjelaskan hubungan antara Tionghoa Indonesia dan China, karena kelompok komunitas di satu pulau berbeda dengan pulau lainnya. Post Chineseness atau setelah sifat ke-Tionghoa-an menilai bahwa mendefinisikan apa yang disebut “Chineseness” atau ke-Tionghoa-an adalah sebuah pekerjaan yang sia-sia, karena Tionghoa itu beranekaragam, tidak homogen. Post Chineseness lebih menekankan proses saling membedakan antara komunitas Tionghoa yang satu dengan yang lainnya. Melalui proses panjang menjadi warga negara Indonesia, dan kecenderungan warga Tionghoa sendiri untuk menjadi etnis apa di Indonesia, adalah salah satu sifat yang ditekankan oleh Post-Chineseness. Chineseness meskipun bisa membedakan komunitas Tionghoa mana yang lebih Tionghoa dan Tionghoa mana yang sudah bukan Tionghoa lagi, tetapi Chineseness lebih mengedepankan budaya, identitas, dan perasaan dalam menetapkan identitas Tionghoa. Post Chineseness lebih tepat untuk menjawab identitas Tionghoa Indonesia dalam menentukan identitasnya sendiri. Karena dalam Post-Chineseness orang-orang Tionghoa bisa menentukan identitas Tionghoanya bukan hanya berdasarkan budaya Tionghoa atau kedekatan dengan negeri leluhur, orang Tionghoa juga bisa menentukan identitas Tionghoanya dari sumber daya yang dia dapat dari China. Sumber daya yang dimaksud disini adalah memanfaatkan budaya maupun non-budaya seperti barang-barang produksi China dalam melestarikan budaya Tionghoa dan menentukan identitas diri.

Perspektif Tionghoa Indonesia terhadap China

Seperti yang kita ketahui Indonesia adalah negara kepulauan yang besar, di setiap pulau terdiri dari suku bangsa yang berbeda, demikian juga sama dengan negeri China. China juga merupakan negara yang sangat besar di dunia, di setiap propinsi di negeri China juga terdiri dari suku bangsa dan sub etnis yang berbeda. Orang-orang Tionghoa yang bermigrasi ke Indonesia pada dasarnya sama, rata-rata dari China bagian selatan, terutama dari propinsi Guang Dong dan Fu Jian.

Seperti yang kita kemukakan pada bagian sebelumnya, pada masa Hindia Belanda, perkumpulan atau organisasi non-Belanda pertama yang berdiri di Hindia Belanda adalah Tionghwa Hwee Koan. Pada mulanya organisasi ini berdiri adalah untuk melestarikan budaya konfusianisme dan mendirikan rumah-rumah baca untuk anak-anak keturunan Tionghoa yang lahir di Hindia Belanda. Tentu saja pemikiran dan budaya dari Tionghoa pada masa ini condong ke daratan Tiongkok. Belanda mulai khawatir melihat perkembangan organisasi Tionghoa yang semakin pesat dan akhirnya mengizinkan orang-orang Tionghoa bersekolah di sekolah yang didirikan pemerintah Hindia Belanda. Ini adalah salah satu politik adu domba pemerintah colonial saat itu.

Tentu saja, banyak orang-orang Tionghoa yang terpengaruh dan akhirnya memilih menjadi kawula Belanda meskipun tanpa melepas status ke-Tionghoa-an mereka.

Pada masa-masa menjelang Indonesia merdeka, orang-orang Tionghoa juga ikut terlibat aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pemuda-pemuda Tionghoa di Surabaya melalui konsulat China di Surabaya pada saat itu mendesak pemerintah Chiang Kai Shek turut aktif mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia di Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebaliknya juga, Presien Chang kai Shek melalui radio Nanking menyerukan kepada pemuda-pemuda Tionghoa di Indonesia agar ikut aktif bersama para pejuang Indonesia mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan Sukarno. Pada masa-masa itu, orang-orang Tionghoa tidak berkewarganegaraan Indonesia, bahkan undang-undang tentang kewarganegaraan Indonesia pun belum ada, tetapi sebagian diantara mereka, dengan menggunakan identitas dan kewarganegaraan China nya untuk aktif berjuang bersama bangsa Indonesia, yang akhirnya ada sebagian yang memilih menjadi warga negara Indonesia dan ada sebagian yang memilih tetap menjadi warga negara China, bahkan ada yang memilih dua-duanya.

Ketika Indonesia sudah mendapat pengakuan kedaulatan dari PBB, pada tahun 1949 China pecah menjadi dua bagian. Pemerintah China Kuo Min Tang yang dipimpin oleh Chiang Kai Shek kalah dari kelompok kaum revolusioner yang dipimpin oleh pemimpin Partai Komunis China Mao Ze Dong. Chiang Kai Shek membawa pemerintahannya mengungsi ke pulau Taiwan dan berjanji akan menyerang dan merebut kembali pemerintah yang sah dari tangan Partai Komunis, tetapi sampai saat Chiang Kai Shek meninggal dan bahkan sampai saat ini pemerintah Kuomintang tetap bertahan di Taiwan dan tetap menggunakan Republik China sebagai nama resmi dari negara tersebut, sekalipun sudah tidak diakui lagi oleh Lembaga resmi dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara itu, Mao Ze Dong yang didukung oleh rakyat China, berhasil menggulingkan pemerintah Kuomintang mendirikan negara baru dengan nama Republik Rakyat China dengan ibukota di Beijing sampai saat ini.

Perang saudara di China juga mengakibatkan perpecahan di kalangan etnis Tionghoa di Indonesia. Dimana pendukung setia dari Kuomintang tetap mempertahankan identitas Chinese nasionalis dan menyebut mereka sendiri dengan kelompok nasionalis, sedangkan pendukung pemerintah komunis Mao menyebut diri mereka dengan China baru atau Xin Zhong Guo. Perpecahan di kalangan komunitas etnis Tionghoa tak terelakkan, setiap hari selalu terjadi perkelahian antar pemuda Tionghoa yang berbeda pandangan politik, propaganda politik, dan saling menyerang antar komunitas di media massa. Pada tahun 1950 Presiden Sukarno mengakui kedaulatan Republik Rakyat China di Beijing dengan pimpinan Mao Ze Dong membuat Presiden Chiang Kai Shek kecewa, kantor konsulat di Indonesia yang sedianya adalah milik pemerintah Kuomintang segera dialihkan ke pemerintah komunis, perpecahan semakin tak

terelakkan ketika aktivitas pemuda Tionghoa yang berafiliasi ke Kuomintang di batasi oleh pemerintah presiden Sukarno karena kedekatan Sukarno dengan RRC.

Pada tahun 1955, disela-sela Konferensi Asia Afrika di Bandung, presiden Sukarno dan perdana Menteri China Chou En Lai merumuskan perjanjian dwikewarganegaraan antara Indonesia dan China. Kompleksnya identitas orang Tionghoa di Indonesia pada saat itu, membuat pemimpin kedua negara merasa perlu merumuskan kewarganegaraan Tionghoa pada saat itu. Dari perspektif Indonesia, presiden Sukarno punya keputusan yang jelas untuk kewarganegaraan etnis Tionghoa. Tionghoa Peranakan yang lahir di Indonesia dan secara jelas mengakui Indonesia adalah tanah air Indonesia adalah warga negara Indonesia. Sedangkan untuk Tionghoa lain yang tidak mengakui Indonesia sebagai tanah air dan negaranya adalah orang asing, sama seperti orang asing lainnya. Dari perspektif Republik Rakyat China, orang-orang Tionghoa yang ada di seluruh dunia adalah warga negara China sesuai dengan asas yang dianut China waktu itu, yaitu *Ius Sanguinis*. Demikian juga pendapat Mao Ze Dong, bahwa Tionghoa Indonesia adalah bagian dari Republik Rakyat China dan kesetiaan kepada negeri leluhur harus tetap dipertahankan. Masalahnya adalah tidak sedikit Tionghoa Indonesia yang tidak bisa menerima legalitas pemerintah Mao Ze Dong, terutama Tionghoa yang masih pro kepada pemerintah Kuomintang yang berada di Taipei. Gesekan antara dua kelompok komunitas Tionghoa yang berbeda pandangan politik sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, dari perang propaganda lewat media massa maupun aktivitas di sekolah. Pemerintah Sukarno sering mengambil kebijakan yang berpihak kepada Tionghoa komunis, ini dibuktikan dengan dilarangnya aktivitas-aktivitas pemuda Tionghoa yang condong kepada pemerintah Kuomintang, seperti perayaan hari kemerdekaan Republik China yang jatuh pada tanggal 10 Oktober setiap tahunnya. (Chen Yi Ling 1999: 38). Puncak dari keterpihakan presiden Sukarno terhadap komunis China dan Tionghoa, terjadi setelah pemberontakan PRRI/Permesta, Sukarno menuding pemerintah Chiang Kai Shek terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta yang mengakibatkan ditutupnya sekolah-sekolah Tionghoa yang berafiliasi ke Taiwan.

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang mengakibatkan gugurnya jenderal-jenderal angkatan darat Republik Indonesia berakhir dengan jatuhnya kekuasaan presiden Sukarno. Pengganti presiden Sukarno, Jenderal Suharto mengambil kebijakan yang sangat esktrim terhadap Tionghoa di Indonesia. Tahun 1967, setelah pemutusan hubungan diplomatic dengan China, otomatis masalah-masalah yang berkaitan dengan warganegara Tionghoa di Indonesia menjadi kabur dan tidak jelas. Perjanjian dwikewarganegaraan gugur dengan sendirinya, Tionghoa Indonesia yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia maupun tidak mempunyai kewarganegaraan Indonesia tetap didata ulang dan disuruh memilih kembali kewarganegaraanya, dan pilihannya tetap satu, yaitu menjadi warganegara Indonesia atau tidak mempunyai kewarganegaraan.

Soeharto berkuasa selama 32 tahun di Indonesia, dan masalah Tionghoa menjadi isu yang sangat sensitive di Indonesia. Soeharto menerapkan kebijakan ganda terhadap Tionghoa Indonesia. Disatu sisi, Soeharto ingin orang-orang Tionghoa segera berasimilasi ke dalam masyarakat setempat dan menghilangkan segala adat-istiadat dan kebudayaan Tionghoa, tetapi disisi lain soeharto menerapkan kebijakan pribumi dan non-pribumi. Kebijakan ini jelas bertolak belakang dengan kebijakan asimilasi. Kebijakan ini juga tetap membuat Tionghoa di Indonesia menyadari akan ke-Tiongho-an mereka. Puncak dari diskriminasi rasial era Soeharto berakhir pada bulan Mei 1998, dimana terjadi kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa secara besar-besaran disebagian kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan Solo. Kerusuhan rasial tersebut berakhir dengan jatuhnya Soeharto dari puncak kekuasaan. Orang-orang Tionghoa Indonesia mulai menyadari pentingnya kedudukan mereka sebagai warga negara di Indonesia. Mereka mulai intropeksi dan berjuang untuk mendapatkan hak dan kedudukan yang setara dengan etnis lainnya di Indonesia.

Proses intropeksi diri etnis Tionghoa dinamakan Post-Chineseness, dimana Tionghoa Indonesia mulai menyadari sebab dan akar kerusuhan rasial yang sering terjadi di Indonesia. Dalam komunitas Tionghoa terjadi saling tuding, sifat ke-Tiongho-an yang superior dan tidak membaur dituding sebagai salah satu akar penyebab kerusuhan rasial di Indonesia. Disisi lain, Tionghoa juga merasa meskipun telah menghilangkan sifat ke-Tionghoa-an, ke-Tionghoa-an tetap dilekatkan secara erat oleh rezim Soeharto kepada mereka. Seperti pendapat Charless A. Coppel, sekali Tionghoa tetap Tionghoa, hal ini juga disadari dengan benar oleh etnis Tionghoa di Indonesia. Meskipun mereka telah melepas ke-Tionghoa-an mereka, akan tetapi begitu ada gesekan politik, mereka tetap merupakan bagian yang rentan untuk dijadikan kambing hitam. Ketika menyadari hal tersebut, timbul keinginan untuk tetap menjadi warga negara China atau menjadi warga negara dunia ketiga. Peristiwa kerusuhan Mei 1998 dan dinginnya reaksi China atas peristiwa tersebut, membuat Tionghoa Indonesia kecewa. Etnis Tionghoa Indonesia merasa telah ditinggalkan oleh China, dan China hanya memanfaatkan etnis Tionghoa dikala ada keperluan bisnis dan dagang. Kedekatan budaya yang dimiliki oleh etnis Tionghoa dan China sering dimanfaatkan oleh China untuk memperlakukan etnis Tionghoa sebagai jembatan penghubung kepentingan China di Indonesia. Etnis Tionghoa tidak ingin menjadi “perwakilan” dari China di Indonesia. Mereka ingin menjadi bagian yang utuh dari bangsa Indonesia, akhirnya etnis Tionghoa sepakat untuk memperjuangkan hak-hak politik dan kedudukan mereka di Indonesia. Etnis Tionghoa tidak ingin menjadi etnis “Cina” di Indonesia, mereka berjuang dan berhasil membuat presiden Indonesia saat itu untuk mengeluarkan keppres yang berisi tentang penggunaan istilah etnis Cina menjadi Tionghoa dan negara China menjadi Tiongkok.

Penutup

Kebijakan asimilasi dan efek positif-negatif dari kebijakan asimilasi sangat tepat untuk menggambarkan kehidupan Tionghoa di Indonesia. Kebijakan asimilasi telah membuat Tionghoa di Indonesia lebih menyukai nama non-Tionghoa dan mengubah nama pribadi mereka menjadi nama yang bersifat atau lebih dekat dengan ke-Indonesia-an. Ke-Tiongho-an Indonesia telah menjadi satu sub etnis baru yang membentuk ke-bhineka-an di Indonesia. Tionghoa Indonesia telah dengan sendirinya dan sukarela bergabung menjadi bagian dari nasional Indonesia. Perkembangan Tiongkok menjadi kekuatan ekonomi dunia juga tidak menggoyahkan semangat etnis Tionghoa di Indonesia untuk tetap menjadi bagian dari nasional bangsa Indonesia. Meskipun Tionghoa Indonesia masih menggunakan dialek China dan merayakan hari-hari besar budaya dan adat-istiadat Tiongkok, tetapi itu telah menjadi satu kebudayaan dan adat-istiadat yang baru, yaitu adat dan budaya Tionghoa Indonesia, dan ini sesuai dengan salah satu konsep Post-Chineseness, dimana komunitas Tionghoa saling membedakan diri sendiri dan melihat komunitasnya yang berbeda dengan komunitas lain di negara lain maupun di Tiongkok.

Bibliografi

- Coppel, A. Charles. 1994. *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Shih, C.-Y. *Sinicizing International Relations: Self, Civilization and Intellectual Politics of Subaltern East Asia*. London: Palgrave Macmillan, 2013.
- Sudibyo, Agus. 2001. "Pers Tionghoa, Sensibilitas Budaya, dan Pamali Politik". *Kompas*, 1 Juni.
- Suryadinata, Leo. 1994. *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Thies, C. G. "International Socialization Processes Vs. Israeli National Role Conceptions: Can Role Theory Integrate IR Theory and Foreign Policy Analysis?" *Foreign Policy Analysis* 8, no. 1 (2012): 25–46.

Aplikasi Kecintaan terhadap Budaya Populer Korea: Sebuah Tinjauan terhadap Fenomena *Korean Wave* di Kota Padang

Sofia Trisni¹, Hidayat Syah²

¹ Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Andalas, Padang.

² Program Studi Manajemen, Universitas Andalas, Padang.

Corresponding e-mail: sofi_hi01@yahoo.com

Abstrak



Demam *Korean wave* di Indonesia ditandai dengan terbentuknya berbagai klub Korea di negara ini. Padang, ibukota Sumatera Barat juga merupakan salah satu kota yang memiliki banyak klub Korea yang tersebar mulai dari universitas maupun pusat-pusat keramaian di kota ini. Artikel ini berupaya untuk mendeskripsikan bagaimana kecintaan terhadap produksi budaya populer dari negeri ginseng di aplikasikan oleh kawula muda di kota Padang melalui klub-klub *Korean wave* yang mereka gabungi. Artikel ini ditulis berdasarkan hasil observasi dan *in depth interview* yang dilakukan dengan pengurus dan anggota aktif klub *Korean wave*. Artikel ini menemukan bahwa kecintaan terhadap *Korean wave* diaplikasikan oleh anggota klub dengan cara aktif berkumpul, berlatih *dance* ala Korea dan mengikuti berbagai penampilan dan perlombaan yang berkaitan dengan budaya populer Korea Selatan.

Kata kunci

Korean wave, budaya populer, diplomasi publik

Abstract

Korean wave fever in Indonesia is applicated through the formations of Korean wave's club in this country. Padang, the capital city of West Sumatera province is one of the cities that possess Korean wave's clubs that spread from universities to the city crowd area. This article aims to describe the way the youth in Padang applicate their adorability to Korean wave through Korean wave club. This article is written based on observation and in-depth interview that conducted to the active member of the Korean wave club. This article finds that the adorability of the Korean wave is applicated with their activeness in a club meeting, exercising Korean dance and activeness in performing and attending Korean wave event.

Keywords

Korean wave, popular culture, public diplomacy

Pendahuluan

Korean wave merupakan istilah yang dialamatkan kepada boomingnya produk-produk budaya Korea Selatan keluar negara tersebut. Adapun yang tergolong sebagai produk budaya negara tersebut adalah drama, film, musik, *dance*, *fashion*, makanan, bahasa dan *game* (Jang & Paik, 2012). Fenomena *Korean wave* ini mulai muncul pada tahun 1990-an, dengan meledaknya drama Korea *What is Love* di Cina (Korean Culture and Information Service, 2011). *Korean wave* meneruskan suksesnya dengan pencapaian-pencapaian luar biasa yang dibukukan oleh produk – produk budaya negara tersebut, seperti meledaknya drama Korea *Dae Jang Geum* keberbagai negara (Korean Culture and Information Service, 2011), ditontonnya video PSY lebih dari 3.3 juta kali (Youtube, 2012) dan penghargaan-penghargaan di tingkat dunia yang didapatkan oleh aktor dan aktrisnya (Effendi, 2012).

Korean wave sendiri dikatakan oleh pemerintah Korea Selatan sebagai elemen dalam Diplomasi Publiknya. Dalam website kementerian Luar Negeri (South Korean Government, 2017), dikatakan bahwa *Korean wave* merupakan elemen yang penting dalam kebijakan luar negeri negara tersebut. Lebih lanjut, diplomatic white paper tahun 2016 menyatakan bahwa kedutaan besar Korea Selatan diberbagai negara berperan aktif dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan *Korean wave*, termasuk mengadakan berbagai perlombaan terkait dengan fenomena budaya tersebut (Affairs, 2016). Tidak hanya itu saja, pemerintah juga melakukan survei terhadap berbagai klub yang lahir terkait *Korean wave* untuk kemudian memberikan perhatian khusus terhadapnya.

Pengakuan *Korean wave* sebagai elemen diplomasi publik memberikan beberapa tuntutan tersendiri terhadap budaya populer ini. Diplomasi publik merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh aktor atau aktor-aktor untuk menjangkau publik asing dengan tujuan menarik hati mereka (Cull, 2009; Tuch, 1990). Tujuan pelaksanaannya adalah untuk membuat masyarakat negara target berpihak kepada kebijakan luar negeri negara pelaksana yang pada dasarnya akan menguntungkan bagi negara pelaksana karena dapat menghasilkan keberpihakan. Dengan dicanangkannya *Korean wave* sebagai elemen diplomasi publik, maka dapat diasumsikan bahwa budaya populer ini membawa fungsi diplomasi publik seperti yang telah dijelaskan diatas.

Masyarakat Padang merupakan contoh masyarakat yang menggandrungi produk budaya populer Korea Selatan, yang kemudian disalurkan dengan berkegiatan secara aktif di klub-klub *Korean wave* yang ada di kota ini. Artikel ini mencoba untuk mendeskripsikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota klub *Korean wave* sebagai bentuk kecintaan mereka terhadap *Korean wave*. Studi ini erat kaitannya dengan pelaksanaan Diplomasi Publik ; yang didefinisikan sebagai sebuah kegiatan untuk menjangkau publik asing. Dikatakan bahwa diplomasi publik dapat digunakan untuk membuat publik asing jatuh cinta dan mau mengikuti apa yang diinginkan oleh negara pelaksana. Sehingga menarik untuk mengetahui bagaimana aplikasi kecintaan

terhadap *Korean wave* ini diaplikasikan oleh para pencintanya pada klub-klub *Korean wave* yang ada di kota Padang, yang merupakan langkah awal sebelum publik asing kemudian mengikuti keinginan negara pelaksana.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan observasi dan *in-depth interview* kepada delapan klub *Korean wave* yang ada di kota Padang. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2018, dengan observasi dilaksanakan pada rentang waktu bulan Maret—Juni 2018 dan finalisasi penelitian pada akhir Oktober 2018. Penelitian kualitatif dipilih sebagai metode penelitian ini karena tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan jawaban yang mendalam mengenai aplikasi dari kecintaan terhadap budaya populer pada anggota klub *Korean wave* yang sejalan dengan tujuan dari penelitian kualitatif (Sugiyono, 2011).

Adapun tempat penelitian adalah tempat latihan dari 8 Klub *Korean wave* yaitu Glory days, Exo Padang, Army Padang, Elf_minangpadang, YP Entertainment, Shawol Padang, S2J dan K_Ido Squad. Sebenarnya tidak ada tempat latihan yang tetap yang dimiliki oleh klub-klub *Korean wave* ini, mereka melakukan latihan di berbagai pusat keramaian di kota Padang seperti taman budaya, Plaza Andalas, Gor H. Agus Salim dan terkadang diberbagai universitas dimana para anggota berkuliah seperti misalnya STKIP Darmalambaw. Tempat latihan lainnya adalah studio di Ampang dan KFC A.Yani. Biasanya kami menghubungi anggota klub terlebih dahulu untuk mengetahui lokasi latihan mereka.

Penelitian ini terdiri dari ketua peneliti yang merupakan dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Andalas dan 5 orang anggota. 2 orang anggota tim merupakan dosen pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas, 1 orang anggota merupakan alumni jurusan HI dan 2 orang merupakan mahasiswa di jurusan HI. Selain struktur dalam tim ini, dalam melakukan penelitian kami juga dibantu oleh sepuluh orang enumerator yang membantu kami dalam melakukan observasi awal penelitian.

Selanjutnya, kami melakukan dua tahapan dalam menentukan sampel yang diteliti. Pada tahap pertama, kami mendata seluruh klub *Korean wave* yang ada di kota Padang. Kami menemukan bahwa terdapat 12 klub dikota Padang. Pada awalnya penelitian ini menargetkan untuk meneliti ke 12 klub yang kami temukan. Tetapi dalam perjalanannya, 2 klub menolak untuk diteliti dengan alasan klub sedang *vacuum* karena anggotanya sedang sibuk kuliah dan yang lain menolak karena merasa bahwa penelitian ini akan ada hubungannya dengan pemilu, mengingat Indonesia sedang dalam persiapan untuk pemilu Presiden dan Legislatif pada tahun 2019. Untuk klub yang kedua, walaupun enumerator kami telah mencoba untuk meyakinkan bahwa penelitian ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemilu, akan tetapi penjelasan kami sepertinya kurang diyakini oleh klub tersebut, sedangkan 2 klub lainnya tidak

menjawab saat kami mengontak mereka, sehingga pada akhirnya tersisa 8 klub yang bersedia untuk menjadi objek penelitian kami. Pada tahap kedua, kami memilih sampel untuk wawancara ringan pada tahap observasi yang dipilih secara random. Artinya kami melakukan interview terhadap beberapa anggota klub karena memang ingin mendapatkan informasi-informasi awal mengenai klub tersebut.

Untuk teknik pengumpulan data, kami melakukannya dengan menggunakan 2 teknik yaitu teknik observasi dengan wawancara ringan dan wawancara mendalam. Pada tahap observasi awal, kami mencoba mencari tau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh klub ini dengan cara mendatangi tempat latihan mereka dan memperhatikan mereka saat melakukan kegiatan. Observasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa klub-klub yang kami teliti ini memang merupakan klub yang aktif dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan *Korean wave*. Untuk mengkonfirmasi hasil observasi tersebut, kami melakukan beberapa percakapan dengan anggota klub, percakapan ini dilakukan termasuk untuk mendapatkan beberapa informasi mendetail mengenai klub yang tidak bisa kami dapatkan informasinya di dunia maya. Pada tahapan ini, kami juga melakukan finalisasi terhadap draf interview yang telah kami siapkan sebelumnya. Setelah mendapatkan klub yang potensial untuk diwawancarai, kami kemudian menghasilkan sebuah draf wawancara yang berisikan 40 pertanyaan. Pertanyaan ini pun dapat berkembang pada saat pelaksanaan in-depth interview.

Untuk teknik analisis data, kami melakukan 3 tahapan dalam pelaksanaannya. Tahap pertama merupakan tahap deskripsi awal yang dilakukan setelah observasi dan wawancara awal. Hasil dari tahapan ini adalah deskripsi yang jelas mengenai masing-masing klub yang hendak diteliti. Tahap kedua merupakan tahap reduksi data yang dilakukan dengan menetapkan lima kriteria yaitu usia klub Korea, jumlah anggota klub, struktur organisasi, jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh klub dan yang kelima intensitas kegiatan yang dilaksanakan. Pada dasarnya reduksi data kami lakukan dengan mengambil klub yang paling ideal, yaitu yang paling lama usianya, yang banyak jumlah anggota klubnya, yang memiliki struktur organisasi yang baik, yang memiliki jenis kegiatan yang variatif dan yang memiliki intensitas kegiatan yang tinggi. Pada tahapan ini, kami menyisakan 3 klub untuk dilakukan interview mendalam yaitu YP Entertainment, S2J dan Glory Days. Adapun untuk menentukan responden yang menjadi sasaran wawancara mendalam, kami memilih orang-orang yang ada pada struktur organisasi klub seperti ketua, wakil ketua, sekretaris ataupun anggota klub yang aktif dalam mengikuti kegiatan klub. Pada tahapan kedua ini kami melakukan wawancara terhadap responden diatas dengan berbekalkan draf wawancara yang terdiri dari 40 pertanyaan tersebut.

Tinjauan Pustaka

Untuk mencapai tujuan dari penulisan ini, kami menggunakan konsep Diplomasi Publik. Diplomasi Publik dikatakan oleh Nye (Nye, 2008) merupakan media yang telah lama digunakan oleh negara untuk menghasilkan *soft power*, yang merupakan kemampuan untuk mempengaruhi publik asing sehingga publik asing itu kemudian rela untuk melakukan apa yang diinginkan oleh aktor pelaksana tanpa merasa terpaksa. Konsep Diplomasi Publik ini telah mengalami evolusi yang menyebabkan bervariasinya aktor yang melaksanakan diplomasi publik. Diawal kemunculannya diplomasi publik erat kaitannya dengan segala upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mendekati publik asing dengan tujuan utama untuk memudahkan pencapaian kepentingan nasional negara tersebut (Trisni, Isnarti, Afriani, & Ferdian, 2018). Disini terlihat bahwa aktor dari diplomasi publik tersebut adalah pemerintah. Selanjutnya, melalui definisi yang diberikan oleh Paul Sharp, dikatakan bahwa diplomasi publik merupakan *“the process by which direct relations are pursued with a country’s people to advance the interest and extend the values of those being represented,....”* (Sharp, 2005). Pada definisi ini, Sharp tidak menyebutkan secara jelas mengenai aktor yang melaksanakan diplomasi publik. Hal ini sepertinya berkaitan erat dengan evolusi diplomasi publik yang memberikan kesempatan kepada aktor swasta sebagai pelaksana diplomasi publik. Selanjutnya terdapat juga definisi yang diberikan oleh Nicholas J. Cull (Cull, 2009) yang menyatakan diplomasi publik sebagai *“an international actor’s attempt to manage the international environment through engagement with foreign public”*. Dapat digaris bawahi beberapa poin dari penjelasan diatas yaitu ; target dari diplomasi publik adalah masyarakat asing, pelaksana dapat saja negara atau non-negara, tujuannya adalah untuk memperkenalkan negara yang diwakili.

Diplomasi publik sendiri biasanya di eksekusi dengan menggunakan media-media yang disukai dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Media ini dapat berupa kebudayaan yang disukai, termasuk produk-produk budaya populer yang disukai oleh masyarakat asing. *Korean wave* tergolong kepada budaya populer yang digunakan oleh pemerintah Korea Selatan untuk memikat hati masyarakat asing. Elving-Hwang dalam risetnya menemukan bahwa Project K yang dilaksanakan di Frankfurt berhasil menarik perhatian masyarakat Jerman (Elving-Hwang, 2013). Project K bertujuan untuk meningkatkan komunikasi antar budaya antara Korea dan Jerman. Project K tidak menampilkan budaya tradisional Korea yang asli, melainkan mahasiswa dipersilahkan untuk membuat proyek berdasarkan kreatifitas mereka untuk masyarakat Frankfurt namun tetap menampilkan beberapa budaya Korea yang mereka sukai. Project K berhasil meraih sukses dengan menarik lebih dari 2.000 pengunjung selama satu akhir pekan saja. Kesuksesan Project K memperlihatkan bahwa budaya Korea termediasi dengan konsumen lokal dengan tanpa paksaan untuk menyuguhkan budaya otentik Korea, tetapi menampilkan budaya Korea yang sudah disesuaikan

dengan budaya lokal , namun hal ini berhasil menjadi salah satu bentuk *soft power* yang efektif.

Selanjutnya, Daniel II dan Musgrave menjelaskan bahwa budaya populer dapat menjadi sebuah alat yang efektif untuk mempengaruhi publik asing (Daniel & Musgrave, 2017). Melalui risetnya, mereka menemukan bahwa dengan mengkonsumsi budaya populer secara aktif, maka para audience akan memproses apa yang mereka tonton, sehingga seolah-olah mereka menyaksikan sendiri fenomena yang diceritakan dalam budaya populer yang mereka lihat. Hal ini lebih lanjut menurut kedua penulis tersebut dapat merubah kepercayaan, mempengaruhi pandangan mereka dan bahkan dapat merubah ide-ide yang sebelumnya mereka miliki. Disini, dikatakan bahwa budaya populer merupakan sebuah alat yang baik untuk mempengaruhi dan merubah pandangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan argumen yang diberikan oleh Nye (2008) bahwa “*A country may obtain the outcomes it wants in world politics because other countries want to follow it, admiring its values, emulating its example, and/or aspiring to its level of prosperity and openness*”. Artinya disini, pencapaian kepentingan negara terhadap negara lain akan lebih mudah dilaksanakan jika negara target telah dibentuk pemikirannya tanpa menggunakan paksaan, sehingga kemudian mereka akan mengikuti keinginan negara pelaksana diplomasi publik tanpa harus dipaksa.

Terkait dengan penjabaran diatas, maka penelitian ini tertarik untuk meneliti tahapan awal dari kecintaan terhadap budaya populer yang kemudian secara tidak sadar akan diperlihatkan melalui peniruan dari budaya populer yang pada tahap lanjut akan berpengaruh terhadap keberpihakan terhadap negara tersebut. Kami akan melihat bagaimana kecintaan terhadap *Korean wave* diaplikasikan oleh anggota klub *Korean wave* di kota Padang. Dengan mengetahui pengaplikasian kecintaan yang mereka perlihatkan, kami berharap akan dapat mengetahui keberpihakan seperti apa yang ditunjukkan oleh para penggemar ini. Dengan berpihaknya masyarakat terhadap negara tersebut, maka diharapkan bahwa masyarakat ini akan memberikan keberpihakan-keberpihakan pada saat negara mengeluarkan sebuah kebijakan tertentu.

Hasil dan Pembahasan

Setelah melakukan reduksi data dengan metode yang telah dijelaskan diatas, tersisa tiga klub yang memenuhi indikator untuk dijadikan target wawancara mendalam yaitu YP Entertainment, S2J dan Glory Days. Dari ketiga klub tersebut, kami mengambil masing-masing tiga orang responden sebagai narasumber dari interview yang kami. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana anggota klub ini mengaplikasikan kecintaan mereka terhadap *Korean wave* dengan melihat apa saja kegiatan yang berkaitan dengan Korea Selatan yang mereka lakukan dan seberapa intensif mereka melakukannya. Berikut merupakan hasil wawancara yang telah kami sarikan dari narasumber 1—9

Narasumber pertama berasal dari klub YP Entertainment. Kecintaan terhadap *Korean wave* diwujudkan dengan bergabung dengan klub yang mengakomodasi hobinya tersebut. Kebetulan YP Entertainment merupakan sebuah klub yang mewadahi anggota yang menyukai *Korean Dancing*. Klub ini sangat aktif melaksanakan kegiatan latihan dan narasumber pertama ini memperlihatkan kecintaannya terhadap produk tari Korea dengan cara aktif mengikuti setiap latihan yang dilaksanakan oleh klub. Selain itu, narasumber pertama ini juga terlibat aktif dalam berbagai maupun memberikan penampilan pada berbagai acara yang ada di kota Padang. Selain itu, narasumber pertama ini menunjukkan kecintaannya dengan gemar mengikuti model fashion dari Korea yang menurutnya sangat menarik. Selain itu, narasumber kami juga memperlihatkan ketertarikan yang sangat besar terhadap berbagai produk elektronik yang muncul pada drama Korea, walau pada kenyataannya baru handphone yang dibeli oleh narasumber ini.

Narasumber kedua dan ketiga masih berasal dari klub YP Entertainment. Narasumber kedua hanya menyukai produk musik dari Korea Selatan, sehingga dia mewujudkannya dengan ikut aktif dalam setiap latihan klub, perlombaan *dance* dan ikut serta dalam berbagai penampilan yang dilakukan oleh klub. Narasumber kedua ini tidak menyukai produk lainnya kecuali musik. Adapun narasumber ketiga mewujudkan kecintaannya terhadap *Korean wave* selain dengan terlibat aktif pada setiap kegiatan klub, narasumber ketiga juga mengungkapkan minatnya yang tinggi untuk membeli produk kosmetik dari negara ginseng.

Narasumber ke empat, kelima dan ke enam berasal dari klub S2J. Ketiga narasumber mengakui bahwa kecintaan terhadap *Korean wave* mereka aplikasikan dengan cara berlatih *dance* secara rutin. Ketiga anggota klub ini rutin mengikuti latihan *dance* sebanyak satu kali dalam seminggu dan dapat bertambah menjadi 3 kali dalam seminggu jika sedang ada perlombaan yang akan mereka ikuti. Narasumber ke 4 mengaku bahwa selain *dance*, dia juga menggemari produk *Korean wave* lainnya seperti drama dan bahasa. Kecintaannya terhadap fenomena budaya ini dia wujudkan dengan cara aktif mempelajari bahasa Korea melalui media on-line. selain itu, narasumber ini juga memperlihatkan keinginan yang kuat untuk membeli produk fashion dan kosmetik dari Korea Selatan. Narasumber kelima juga menunjukkan ketertarikannya terhadap produk fashion dan kosmetik dari Korea Selatan, tetapi selain hal tersebut, narasumber ini juga mengakui bahwa dia tertarik dengan iklan wisata Korea Selatan, narasumber ini sangat ingin untuk berwisata ke Korea Selatan. Narasumber ke enam mengaplikasikan kesukaannya terhadap *Korean wave* selain dengan rajin ikut latihan dan perlombaan, juga dengan mempelajari bahasa Korea. Saat ini, narasumber ke enam telah mampu memba tulisan Korea, walaupun belum mampu berbicara bahasa Korea dengan fasih.

Selanjutnya, narasumber ketujuh, kedelapan dan kesembilan berasal dari klub Glory Days. Klub ini merupakan klub yang berfokus pada *dance cover*. Ketiga narasumber

merupakan anggota klub yang rajin dalam mengikuti kegiatan latihan *dance* yang rutin dilaksanakan di klub. Ketiganya juga aktif dalam mengikuti berbagai perlombaan yang biasanya diadakan di kota Padang. Selain itu, jika ada kesempatan yang memungkinkan bagi mereka untuk melakukan *performace*, mereka akan melakukannya. Narasumber ketujuh mengaplikasikan kegemarannya terhadap *Korean wave* dengan mempelajari bahasa Korea. Selain itu, ia juga ingin sekali mengunjungi Korea Selatan, karena merasa bahwa budaya orang Korea ini sangat menawan. Dari narasumber kedelapan kami mengetahui bahwa narasumber ini mengaplikasikan kegemarannya terhadap produk-produk budaya Korea Selatan dengan cara membeli kosmetik dan barang elektronik dari Korea Selatan. Adapun untuk *fashion* nya, walaupun menyukai *fashion* dari negara ginseng, tetapi narasumber ke delapan ini merasa bahwa *fashion* ala Korea Selatan tidak cocok untuk digunakan di Padang, karena budaya sopan santun yang berbeda. Narasumber terakhir juga mempelajari bahasa Korea dan memiliki keinginan yang tinggi untuk dapat mengenyam pendidikan di Korea Selatan, karena menurutnya negara ini merupakan negara yang sangat menarik untuk dikunjungi. Narasumber yang terakhir ini mengaplikasikan kegemaran terhadap *Korean wave* dengan cara menonton drama, musik dan tarian dari Korea setiap hari melalui Youtube ataupun tv kabel.

Diskusi

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas, dapat ditemukan bahwa para penggemar *Korean wave* ini memperlihatkan aplikasi kecintaan yang cenderung mengikuti trend pada *Korean wave*. Ketiga klub ini merupakan klub yang dibentuk karena kecintaan pada *dance* dan musik Korea, maka aplikasi nyata yang dimiliki oleh semua anggota klub adalah ke intensifan mereka dalam menggeluti bidang *dancing* dan musik ini. Kesembilan narasumber mengikuti latihan di klub merea masing-masing dengan rajin, bahkan cenderung sangat rajin ketika mereka akan mengikuti perlombaan ataupun akan tampil pada sebuah kegiatan. Anggota klub terindikasi memiliki keinginan yang kuat untuk tetap berlatih dan mempersembahkan penampilan pada berbagai kegiatan. Selain itu, aplikasi lain dari kecintaan terhadap *dance* Korea ini adalah penggunaan *fashion* ala Korea pada saat mereka tampil. *Fashion* dirasa sebagai alat penunjang penampilan yang utama, karena dengan melihat kostum yang mereka gunakan, orang akan dapat dengan mudah mengenali bahwa mereka akan membawakan penampilan yang berhubungan dengan *Korean wave*. Pada poin pertama ini terlihat bahwa kehidupan para anggota klub memang berfokus kepada latihan-latihan untuk dapat meningkatkan eksistensi klubnya; bagi mereka latihan dan berlomba merupakan nafas dari kehidupan klub. Pada poin pertama ini, terlihat bahwa argumen Joseph Nye bahwa “*a country may obtain the outcomes it wants in world politics because other countries want to follow it, admiring its values, emulating its example, and/or aspiring to its level of prosperity and openness*” telah teraplikasi. Para

anggota klub ini telah melakukan latihan-latihan, meniru gaya pakaian dan bahkan gaya hidup artis favorit mereka yang berasal dari Korea.

Hal kedua yang menjadi jawaban mayoritas dari anggota klub adalah keinginan mereka untuk membeli produk-produk yang mereka lihat ditampilkan pada produk budaya populer Korea. Contoh dari produk yang ingin dibeli ini adalah barang-barang elektronik dari Korea, yang biasanya memang membanjiri setiap drama yang di release oleh negeri ginseng. Terlihat handphone, mobil, kulkas, *rice cooker* dan benda elektronik lainnya sering ditampilkan di drama Korea. Dampaknya kami temukan pada narasumber kami, kebanyakan dari mereka telah menggunakan telpon seluler dari Korea Selatan, walaupun kami belum menemukan narasumber yang menggunakan barang-barang elektronik lain. Pada kenyataannya, narasumber kami memperlihatkan keinginannya yang besar untuk membeli produk elektronik lainnya yang di produksi oleh Korea Selatan, akan tetapi sungguh disayangkan bahwa produk-produk tersebut masih sulit untuk didapatkan dipasaran, sehingga keinginan para narasumber ini masih belum bisa diwujudkan. Selain barang elektronik, narasumber juga memperlihatkan ketertarikan mereka yang tinggi terhadap produk kosmetik dari Korea Selatan. Artis, aktris, aktor yang muncul pada setiap produksi budaya Korea adalah mereka-mereka yang memiliki kulit sangat mulus dan menarik, sehingga hal ini membuat narasumber berpikir bahwa kosmetik yang dikeluarkan oleh negara tersebut adalah kosmetik yang dapat membuat kulit menjadi tampil lebih baik.

Selanjutnya, terdapat narasumber yang aktif mempelajari bahasa Korea. Keinginan ini pada awalnya tumbuh karena menonton drama Korea dan melantunkan lagu Korea. Lama kelamaan keinginan untuk menguasai bahasa Korea pun tumbuh dikalangan mereka. Artinya disini, produk drama dan musik telah berhasil menggaet penontonnya untuk tertarik mempelajari bahasa Korea. Bahasa Korea sendiri juga dimasukkan kedalam produk *Korean wave*. Drama dan musik yang dijual oleh house production telah berhasil dalam memancing anggota klub ini untuk mempelajari bahasa Korea. Bahkan banyak diantara mereka yang telah mampu untuk bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Korea. Selain itu, drama Korea yang terindikasi berhasil dalam mempromosikan keindahan alam, keindahan budaya, keragaman makanan dan keramahan orang Korea. Hal ini dapat disimpulkan dari keinginan para anggota klub untuk berkunjung ke Korea. Kebanyakan diantara mereka bahkan menginginkan skema pertukaran pelajar, agar dapat tinggal di Korea Selatan dalam kurun waktu yang panjang.

Dari penjabaran diatas dapat diambil pemahaman bahwa ternyata produk budaya populer yang sangat booming seperti *Korean wave* dapat menjadi alat untuk merubah kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat suatu daerah. Di kota Padang, kami menemukan indikasi bahwa para penggemar *Korean wave* ini mengaplikasikan kecintaan mereka terhadap fenomena ini dengan turut melakukan atau mencontoh apa-apa yang mereka lihat di televisi. Hal pertama yang mereka contoh adalah *dance* yang

sering mereka lihat pada penampilan artis-artis musik Korea. Selanjutnya mereka juga menjadikan latihan *dance* ini sebagai fokus kegiatannya, yang dibuktikan dengan rajinnya mereka menghadiri latihan yang dilakukan di klubnya. Disini kita bisa mengatakan bahwa tarian tradisional dan tarian Barat yang sempat merambah kehidupan manusia pada masanya telah mulai tergusur oleh aktivitas yang dilakukan oleh anggota klub Korea. Selanjutnya, terlihat juga aplikasi penggunaan barang elektronik dan fashion pada penggemar ini. Artinya, bagi mereka menggemari itu akan serangkaian dengan menggemari apa-apa yang mereka lihat pada tayangan budaya populer, sehingga mereka merasa ingin menggunakannya. Setidaknya aktivitas ini cukup membahayakan bagi produk impor yang telah lama ada di Indonesia dan mengincar pasar Indonesia. Hal lain yang menarik seiring dengan *Korean wave* ini adalah meningkatnya keinginan anggota klub untuk mempelajari bahasa Korea dan keinginan untuk mengunjungi Korea Selatan. Terlihat indikasi bahwa narasumber kami mengaplikasikan hal-hal yang mereka lihat dalam produk budaya populer dalam kehidupan nyatanya.

Penutup

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kegemaran terhadap sebuah produk budaya dapat dimanfaatkan oleh negara untuk meningkatkan pendapatan negara tersebut, karena anggota klub yang telah “jatuh cinta” kepada *Korean wave* cenderung memiliki keinginan untuk membeli barang-barang produksi Korea Selatan yang muncul pada drama, film atau pun musiknya. Fenomena ini memberikan indikasi bahwa budaya populer merupakan instrumen yang paling tepat untuk digunakan dalam merangkul publik asing. Tanpa disadari oleh publik asing, mereka telah dengan sukarela mengikuti apa saja yang mereka lihat pada budaya populer. Yang terjadi pada fenomena ini adalah apa yang dikatakan oleh Joseph Nye sebagai terciptanya *soft power*, dimana ketika publik asing telah dengan sukarela mengikuti keinginan dari aktor yang melaksanakan diplomasi publik (Nye, 2008)

Penulis melihat bahwa keinginan untuk mengikuti *Korean wave* yang dimiliki oleh para anggota klub merupakan step awal dari terciptanya *soft power* yang dibutuhkan negara. Saat ini, terlihat indikasi bahwa kegemaran terhadap *Korean wave* memberikan dampak positif terhadap bidang ekonomi, dimana terdapat keinginan untuk mengkonsumsi beberap produk negara ginseng. Akan tetapi dalam konteks negara, terdapat juga kepentingan politik yang berkaitan dengan tercapainya kebijakan luar negeri. Pada dasarnya pelaksanaan diplomasi publik dengan melibatkan *Korean wave* merupakan “senjata” ideal untuk meraih kebijaksanaan terhadap kebijakan luar negeri. Penulis menyarankan bahwa untuk mencapai hal ideal ini, diperlukan keterlibatan pemerintah terkait konten dari produk budaya yang akan diekspor. Jika kepentingan negara dapat disertakan dalam setiap produk yang dijual, maka kemungkinan besar anggota klub akan memiliki wawasan baru yang tidak hanya berhubungan dengan bidang ekonomi.

Bibliografi

- Affairs, M. of F. (2016). Diplomatic White Paper 2016.
- Cull, N. J. (2009). *Public Diplomacy : Lesson from the Past*. USC Center on Public Diplomacy, Annenberg School.
- Daniel, J. F., & Musgrave, P. (2017). Synthetic experiences: How popular culture matters for images of international relations. *International Studies Quarterly*, 61(3), 503–516. <https://doi.org/10.1093/ISQ/SQX053>
- Effendi, T. D. (2012). K-Pop and J-Pop Influences to University Students in Malang, East Java—Indonesia : A Comparative Public Diplomacy Studies. *Andalas Journal of International Studies*, 1(2), 182–198.
- Elving-Hwang, J. (2013). South Korean Cultural Diplomacy and Brokering ‘ K-Culture ’ outside Asia, (April).
- Jang, G., & Paik, W. K. (2012). Korean Wave as Tool for Korea ’ s New Cultural Diplomacy. *Advances in Applied Sociology*, 2(3), 196–202.
- Korean Culture and Information Service. (2011). *the Korean Wave : A newPop Culture Phenomenon*.
- Nye, J. S. (2008). Public diplomacy and soft power. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 94–109. <https://doi.org/10.1177/0002716207311699>
- Sharp, P. (2005). Revolutionary States, Outlaw Regimes and the Techniques of Public Diplomacy. In *The New Public Diplomacy, Soft Power in International Relations*, Jen Melissen. Palgrave MacMillan.
- South Korean Government. (2017). Website Kementerian Luar Negeri Korea Selatan.pdf. Retrieved July 21, 2017, from http://www.mofa.go.kr/eng/wpge/m_5664/contents.do
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Trisni, S., Isnarti, R., Afriani, A., & Ferdian. (2018). Pencapaian Kepentingan Korea Selatan melalui Diplomasi Publik Korean Wave, 12(2), 131–142.
- Tuch, H. (1990). *Communicating with the World. US Public Diplomacy Overseas*. New York.
- Youtube. (2012). Youtube.pdf.

Peran Pemuda dalam Melestarikan Kearifan Lokal untuk Kelestarian Lingkungan Pada Era Globalisasi

Elistania¹, Yusran², Nabil Ahamad Fauzi³, Afri Asnelly⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Budi Luhur, Jakarta.

Corresponding e-mail: elistania@budiluhur.ac.id

Abstrak



Pada program Pengabdian Kepada Masyarakat (abdimas) semester Gasal TA 2018-2019, Program Studi Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur mengambil tema terkait signifikansi peningkatan budaya literasi mengenai 'Kearifan Lokal dan Lingkungan' di kalangan remaja. Upaya Indonesia untuk menjaga eksistensi kearifan lokal menghadapi tantangan berupa arus deras globalisasi yang salah satunya masuk melalui penetrasi teknologi informasi yang membawa budaya serta nilai-nilai global. Hal ini memberikan dampak kepada perubahan cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kearifan lokalnya. Kelompok masyarakat yang terdampak secara massif oleh globalisasi adalah pemuda (generasi milenial). Dengan teknologi yang mumpuni, generasi milenial dibentuk menjadi pribadi yang serba instan, canggih dan modern. Hal ini diyakini dapat membawa dampak pembangunan yang tidak didasarkan atas kearifan lokal, sehingga berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Masalah tersebut mendorong tim PKM fokus pada bagaimana pemuda perlu berkontribusi terhadap kearifan lokal guna kelestarian lingkungan. Adapun PKM dilaksanakan pada tanggal 16 November 2018 di SMA Budi Luhur dan 13 Desember 2018 di SMAN 7 Tangsel. Pada PKM ini, metode utama yang dipilih adalah metode simulasi penulisan karya ilmiah, juga didukung dengan metode lain seperti ceramah, kuis, serta permainan interaktif. Dalam mendukung pelaksanaan program pelatihan ini, ketiga instruktur didukung oleh 35 (tiga puluh lima) fasilitator yang merupakan mahasiswa/i Hubungan Internasional dari kelas mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah. Hasil kajian dan pelaksanaan mendapati beberapa hal. Pertama, budaya literasi di antara peserta sasaran telah ada, namun tetap masih perlu ditingkatkan seiring dengan perkembangan zaman yang didukung oleh kemutakhiran teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, para peserta semakin memiliki antusiasme terhadap nilai-nilai kearifan lokal Indonesia. Ketiga, para peserta memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menggunakan pendekatan kearifan lokal untuk kelestarian lingkungan Indonesia dalam bentuk karya tulis.

Kata kunci

Kearifan lokal, kelestarian lingkungan, globalisasi, literasi, teknik penulisan ilmiah

Pendahuluan

Program pengabdian pada masyarakat (abdimas) merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Pendidikan Tinggi yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat. Karenanya program abdimas harus memiliki orietasi sebagai bagian dari solusi Perguruan Tinggi terhadap permasalahan bangsa. Salah satu permasalahan yang kita hadapi adalah perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang selama ini dipandang sebagai masalah praksis belaka. Padahal, kerusakan lingkungan merupakan persoalan moral dan etika. Dari pendekatan ilmu, perubahan iklim terbukti merupakan akibat dari aktivitas manusia modern yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Pembahasan ilmiah terus berlangsung seiring dengan peningkatan emisi gas rumah kaca dan kondisi yang terus memburuk secara cepat. Sementara pergeseran perilaku manusia dan kebijakan pembangunan hanya beringsut dan berdampak pada warisan budaya Indonesia (Kompas, 2018).

Warisan budaya Indonesia (teraga maupun tidak teraga) yang tergabung dengan alam dan kultur merefleksikan tata cara masyarakat dalam mengolah lahan dan sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini biasa disebut juga dengan ‘Saujana’. Saujana merupakan refleksi hubungan manusia dengan budayanya dan lingkungan alamnya dalam kesatuan ruang dan waktu yang luas. Alam antara lain dapat berupa gunung, pegunungan, hutan, gurun, dan sungai, sedangkan budaya adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya manusia, seperti tradisi, kepercayaan, cara hidup, dan sebagainya. Alam adalah mitra masyarakat, dan keduanya dalam kondisi dinamik membentuk saujana. Keselarasan tersebut, antara manusia, alam dan budaya membentuk sebuah budaya atau adat lokal yang arif dan bernilai yang perlu dilestarikan (Diambil dari <http://arsitekturdanlingkungan.wg.ugm.ac.id/2015/08/27/mengenal-saujana/>, diakses pada 30 Oktober 2018).

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup (*way of life*) yang mengakomodasi kebijakan (*wisdom*) dan kearifan hidup (Kemdikbud, 2016). Sedangkan menurut Akhmar dan Syarifudin (2007), kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Secara substansial, kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang berlaku dalam tatanan masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi pedoman dalam bertingkah-laku sehari-hari suatu masyarakat. Kearifan lokal merupakan “asset spiritual” atau kebijakan hidup yang mengajarkan masyarakat bagaimana harus bersikap.

Menurut Franz Magnis, budaya, ya budaya lokal. Merupakan udara, susu dan bensin bagi masyarakatnya dalam menjalankan kehidupannya. Dalam bahasa Habermas: Budaya adalah Lebenswelt orang-orangnya (Franz Magnis, 2012). Dari budayanya manusia mengambil orientasi kehidupannya, baik mikro maupun makro, di dalamnya ia menemukan sarana atau senjata untuk menghadapi tantangan terhadap

kemanusiaannya. Jadi budaya memberdayakan manusia. Sehingga apabila manusia meninggalkan nilai-nilai budaya lokalnya, ia tercabut dari akarnya. Hal ini kemudian akan menimbulkan ketidakselarasan antara manusia dengan alamnya (Lonergan, 1993).

Kebudayaan namun fokus melihat produk kebudayaan masa lalu hanya akan jatuh pada melankoli dan romatisisme. Sementara kini, kebudayaan manusia Indonesia yang tampil hanya bentuk yang *eye-catching* (menarik dipandang mata). Akhirnya, kebudayaan kita saat ini, sangat beku dan baku karena kebanyakan masyarakat hanya mempertahankan kulit luarnya yakni eksistensi dirinya masing-masing. Bahkan kini motif ekonomi menguasai praktik sejumlah pranata kearifan lokal terkait pemanfaatan sumber daya alam. Ini merupakan pergeseran jika dibandingkan dengan motif asal sebagian kearifan lokal untuk tujuan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Sebelum globalisasi masuk, sejumlah sanksi sosial yang relative lekat dengan pelanggaran kearifan lokal, kini tidak diterapkan lagi. Hal ini yang menyebabkan kecenderungan pengelolaan sumber daya alam relatif tidak bisa dilakukan dengan merujuk pada konsep-konsep besar pada hal-hal yang bersifat ekonomis menyusul tuntutan kehidupan saat ini yang relative menihilkan pranata kearifan lokal.

Upaya Indonesia untuk menjaga eksistensi kearifan lokal memang menghadapi tantangan berupa arus deras globalisasi yang kini menjadi keniscayaan yang dihadapi setiap negara di dunia. Globalisasi memberikan seperangkat peluang serta tantangan bagi setiap negara. Arus deras globalisasi salah satunya masuk melalui penetrasi teknologi informasi dan seringkali membawa budaya serta nilai-nilai global yang memberikan dampak kepada perubahan cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kearifan lokalnya.

Hal ini perlu disadari pemuda sebagai agen perubahan. Kelompok masyarakat yang terdampak secara massif oleh globalisasi adalah pemuda, generasi muda atau kini dikenal sebagai generasi milenial. Istilah tersebut berasal dari *millennials* yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Generasi milenial atau yang akrab disebut generasi Y yaitu kelompok anak muda yang berusia belasan tahun hingga awal tiga puluhan yang lahir pada awal 1980 hingga awal 2000 di Abad 21 (Kominfo, 2016).

Beberapa isu penting generasi milenial dengan upaya menjaga kearifan lokal di era globalisasi adalah fakta bahwa kini setiap informasi dapat dengan cepat tersebar dan diakses oleh siapa saja di manapun dia berada. Dengan teknologi yang mumpuni, generasi milenial dibentuk menjadi pribadi yang serba canggih dan modern. Namun demikian, hal ini dapat membawa dampak. Banyak contoh kasus misalnya, sistem subak, perwujudan konsep Tri Hita Karana (dalam ajaran Hindu) yang menghubungkan spirit, manusia, dan alam di Bali, kini terancam. Selain itu pusaka

kekayaan alam di kawasan konservasi yang saat ini sulit ditemukan spesies baru flora atau fauna yang bakal bermanfaat bagi kemanusiaan. Hal ini berdampak pada gangguan pasokan pangan, ketersediaan air, kesehatan, infrastruktur hingga cuaca yang menjadi ekstrem dan mengganggu aktivitas budaya seperti upacara adat, dan lain sebagainya.

Pembangunan yang tidak didasarkan atas kearifan lokal dapat memberikan dampak terhadap masyarakat dan bangsa. Dalam menghadapi globalisasi, pemuda sebagai agen perubahan perlu melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang kokoh untuk memastikan masyarakat dan bangsa Indonesia memiliki karakter yang kuat sehingga tidak hanyut dalam arus globalisasi. Generasi Y inilah yang akan menurunkan itu ke generasi berikut dalam kondisi baik atau lebih baik. Melalui pelestarian kearifan lokal pemuda akan paham kita ini siapa, kita di mana, kita kehilangan apa dan kita seharusnya ke mana.

Salah satu peran yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan literasi sehingga pemuda dapat memberikan pandangan-pandangannya mengenai kearifan lokal melalui berbagai karya tulis. Melalui kegiatan penulisan ilmiah, pemuda juga terdorong untuk membaca banyak referensi, ragam ilmu pengetahuan. Bentuk kegiatan literasi ini juga bagian dari untuk mendukung program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yakni Gerakan Literasi Nasional (GLN) sebagai bagian dari implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Oleh karena itu, sebagai bentuk partisipasi dalam meningkatkan budaya literasi berbasis kearifan lokal di era globalisasi, maka program pengabdian pada masyarakat Prodi Hubungan Internasional kali ini kemudiannya mengajukan pertanyaan penelitian, *bagaimana signifikansi peran pemuda melestarikan lingkungan pada era globalisasi melalui kegiatan Sosialisasi Peran Pemuda dalam Melestarikan Kearifan Lokal Untuk Kelestarian Lingkungan Pada Era Globalisasi di SMA Budi Luhur dan SMAN 7 Tangsel?*

Metode Penelitian

Kegiatan pengabdian masyarakat di SMA Budi Luhur dan SMAN 7 Kota Tangsel ini menggunakan metode berupa pemaparan materi, dan permainan interaktif dengan peserta.

1. Pemaparan materi

Kegiatan berupa pemaparan interaktif dari tim penyaji akan menyajikan tiga materi. Materi yang pertama adalah Globalisasi, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kearifan Lokal. Materi kedua terkait dengan Profil Ilmiah Hubungan Internasional. Adapun materi ketiga adalah terkait Teknik Penulisan Ilmiah. Materi Pemaparan juga mencakup tips dan trik dalam menghadapi tantangan serta memaksimalkan

peluang pada zaman teknologi canggih di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi.

2. Simulasi penulisan ilmiah

Sesi kedua dari kegiatan ini berupa simulasi penulisan artikel ilmiah pendek (esai singkat). Simulasi diadakan dalam rangka melatih langsung *hardskill* dan *softskill* para siswa.

3. Kuis dan permainan interaktif

Bersamaan dengan pemaparan materi, dan setelah simulasi, tim penyaji juga akan mengadakan kuis dan permainan interaktif. Pemilihan metode ini diadakan dalam rangka *ice breaking* dan mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang telah disajikan.

Instrumen Pelaksanaan

Berikut rincian instrumen pelaksanaan pada kegiatan pengabdian pada masyarakat:

- f. Modul : berisikan ringkasan materi & slide presentasi
- g. Materi presentasi : slide format power point
- h. Perlengkapan pendukung : laptop, proyektor, screen proyektor dan *pointer*
- i. Perlengkapan lain : kertas, alat tulis, dan alat peraga lainnya
- j. X-banner : memuat judul kegiatan dan logo institusi

Langkah-Langkah Kegiatan

Proses kegiatan pengabdian ini melalui tiga (3) langkah, yakni pertama adalah langkah persiapan, dilanjutkan dengan pelaksanaan, serta tahap evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Langkah yang ketiga penting mengingat agar program pengabdian yang dimaksudkan untuk mendukung pembangunan nasional dapat memiliki sifat keberlanjutan sehingga manfaatnya tepat guna dalam membentuk masyarakat yang mandiri secara meluas.

a. Langkah Persiapan

Langkah persiapan diawali dengan melakukan komunikasi, koordinasi dan diskusi dengan pihak Sekolah terkait permasalahan kemitraan, teknis pelaksanaan, administrasi serta informasi tambahan mengenai situasi dan kondisi peserta. Setelah ada kesepakatan, penyaji menyusun proposal yang akan diajukan ke pihak universitas. Meski demikian, langkah persiapan terus dilaksanakan paska pengajuan proposal kepada pihak universitas dalam rangka pematangan materi dan teknis bengkel.

b. Langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penerimaan oleh pihak manajemen Sekolah,
- 2) Pembukaan oleh perwakilan tim dan mitra dalam mensosialisasikan kembali mengenai tujuan pelaksanaan kegiatan.

- 3) Penyampaian materi serta penyelenggaraan kuis dan permainan interaktif meliputi:
 - i. Globalisasi, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kearifan Lokal
 - ii. Profil Ilmu Hubungan Internasional
 - iii. Teknik Penulisan Ilmiah,
 - 4) Simulasi penulisan esai dengan tema esai “Peran Pemuda dalam Melestarikan Kearifan Lokal Untuk Kelestarian Lingkungan Pada Era Globalisasi”
 - 5) Penutup
- c. Langkah Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Evaluasi mengacu pada notulensi kegiatan dan hasil diskusi dengan para siswa termasuk dengan para pihak manajemen Sekolah, serta dengan sesama anggota tim pelaksana. Pengabdian kali ini akan menjadi dasar bagi pembentukan pengabdian pada Semester Genap Tahun Ajaran 2018/2019, masih berkaitan erat dengan upaya peningkatan budaya literasi nasional dan nilai-nilai pelestaria lingkungan dan kearifan lokal.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini berlangsung selama kurang lebih 5 bulan. Proses persiapan telah dilakukan sejak bulan September 2019, dan proses evaluasi dan pelaporan berakhir pada bulan Januari 2019. Dalam prosesnya, kegiatan ini berlangsung dalam di dua sekolah dan dua waktu yang berbeda, yakni:

1. SMA Budi Luhur pada Jumat, 16 November 2018, pukul 08.00 – 16.00 WIB bertempat di Ruang Theater dan ruang kelas
2. SMAN 7 Kota Tangsel pada Kamis, 13 Desember 2018, pukul 08.00 – 16.00 WIB bertempat di Laboratorium Komputer dan ruang kelas

Selain itu, kegiatan pengabdian inikutur melibatkan lebih dari 90 orang termasuk tim pelaksana, pihak manajemen dan staf sekolah, serta para peserta pelatihan, yaitu siswa/i SMA Budi Luhur dan SMAN 7 Kota Tangsel.

1. Kegiatan pertama di SMA Budi Luhur

Tahapan persiapan mencakup proses koordinasi baik secara lisan, korespondensi, maupun observasi lapangan. Dari hasil koordinasi, tim mendapati bahwa SMA Budi Luhur merupakan sekolah yang menaruh perhatian besar dalam peningkatan kualitas siswa. Karena itu, tim menilai bahwa pemilihan SMA Budi Luhur sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan PKM HI FISIP UBL 2018. Hal ini juga di dukung dengan tema pelatihan yang tepat guna bagi para siswa SMA Budi Luhur. Oleh karena itu, diputuskan bahwa pengabdian dilaksanakan pada tanggal 16 November 2018.

Tim pelaksana juga melakukan koordinasi dengan tiga puluh (30) mahasiswa asisten yang berasal dari Program Studi Hubungan Internasional. Mahasiswa berasal dari

gabungan angkatan 2016 dan 2017 yang telah mendapatkan pembekalan mengenai teknik penulisan ilmiah selama 3 bulan, dan satu (1) orang mahasiswa angkatan 2018. Para mahasiswa dipilih berdasarkan kemampuan mereka menerapkan proses menulis dengan baik, jiwa pengabdian mereka yang tinggi, serta pengetahuan yang luas dan aplikatif mengenai diplomasi dan anak muda. Dalam koordinasi internal, tim pelaksana melakukan pembagian kelompok fasilitator dengan tugas utama membimbing proses pencarian data dan penyusunan tulisan para peserta pelatihan. Satu kelompok siswa akan difasilitasi oleh empat (4) orang mahasiswa. Tim dosen lalu berbagi informasi mengenai tema tulisan yaitu mengenai kearifan lokal dan pelestarian lingkungan. Maka, para fasilitator diberikan pekerjaan rumah mempersiapkan diri dalam rangka memfasilitasi para peserta pelatihan. Para fasilitator diwajibkan untuk kembali mempelajari kearifan lokal dan pelestarian lingkungan yang berasal dari kampung halaman atau berada di sekitar mereka.

Pada hari pelaksanaan, koordinasi dengan pihak SMA Budi Luhuru berjalan baik. Lokasi kegiatan ditempatkan di ruang theater room yang biasa diperuntukan untuk kegiatan sejenis dengan fasilitas yang cukup lengkap. Kegiatan dimulai pukul 08.30 WIB dengan semua anggota tim pelaksana memperkenalkan diri sebelum masuk kepada pemberian materi pelatihan oleh instruktur. Pemberian materi berjalan cukup lancar dengan dukungan fasilitas yang tersedia.

Materi pertama berisikan mengenai Globalisasi, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kearifan Lokal oleh Nabil Ahmad Fauzi dan Elistania. Pada materi ini disampaikan mengenai Kearifan lokal adalah budaya lokal yang merupakan bagian dari bahasa masyarakat. Kearifan lokal diwariskan secara turun temurun sebagai bagian dari kecerdasan yang dimiliki manusia untuk dijadikan *the way of life*. Selain itu, kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Karenanya nilai-nilai tersebut melekat melalui perjalanan yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut. Dalam materi ini juga disampaikan berbagai macam contoh kearifan lokal yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke.

Salah satu peran penting dari kearifan lokal adalah perannya bagi pelestarian lingkungan hidup. Sebuah masyarakat pada tempat (daerahnya) masing-masing membangun tata cara dalam mengolah lahan dan sumber daya alam berkelanjutan selama beratus-ratus tahun dan turun temurun. Bagian penting lainnya adalah mengenai ancaman globalisasi bagi pelestarian lingkungan dan kearifan lokal. Keterkaitan dan Keterikatan antara kehidupan lokal dengan perkembangan di seluruh dunia semakin erat. Seluruh dimensi kehidupan di tempat-tempat tertentu semakin dipengaruhi oleh proses yang berlangsung di seluruh dunia. Nilai-nilai yang mendukung kehidupan lokal akan terkena perubahan atau perkembangan zaman. Jadi ancaman globalisasi adalah pendangkalan orang, ia tercabut dari tenunan pandangan dasar, nilai-nilai dan norma-norma dasar daripadanya ia menjadi seorang pribadi yang dewasa, menangani

hidupnya menurut cita-citanya sendiri, bertanggungjawab. Motif ekonomi menguasai praktik sejumlah pranata kearifan lokal terkait pemanfaat sumber daya alam. Sejumlah sanksi sosial yang relatif lekat dengan pelanggaran kearifan lokal, kini tidak diterapkan lagi.

Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai penyusunan karya tulis ilmiah sebagai materi terakhir dan yang utama yang disampaikan oleh Dr. Yusran. Meskipun kemutakhiran teknologi telah melahirkan berbagai macam kemudahan akses kepada informasi, dokumentasi informasi masih didominasi dalam bentuk tulisan. Maka, kegiatan membaca sebagai hal yang imperatif merupakan hal yang ditekankan pada awal pemberian materi. Instruktur memulai dengan mengumpulkan informasi dari para peserta siapa di antara mereka yang suka membaca novel. Jumlahnya terhitung sedikit dibanding yang diperkirakan oleh instruktur. Meski menjadi hal yang menyedihkan, hal ini seperti mengamini bahwa perlu adanya kegiatan gerakan literasi.

Materi ini dimulai dengan pertanyaan kenapa harus "*menulis?*". Beberapa hal yang disampaikan hal ini karena kewajiban sebagai siswa, kebutuhan dalam dunia pendidikan, aktualisasi diri seorang pelajar dan menunjukkan kualitas diri. Disampaikan juga mengenai jeni karya tulis dan penjelasan mengenai karya tulis ilmiah. Kemudian instruktur mulai menyampaikan pelatihan menulis karya ilmiah secara lebih detail dan lengkap. Instruktur menjelaskan sistematika umum yang wajib ada dalam setiap karya tulis, baik ilmiah maupun populer. Sebuah tulisan yang baik wajib memiliki bagian pembuka, bagian pembahasan, dan bagian penutup. Dalam beberapa karya tulis populer maupun ilmiah, tidak jarang tulisan menyajikan satu bagian untuk penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penyusunan tulisan. Setiap bagian tentu memiliki fungsi-fungsi khusus. Maka sistematika pada dasarnya bergantung pada tujuan dari penulisan. Tujuan penulisan tersebutlah yang pada akhirnya menentukan adanya fungsi-fungsi yang dipegang oleh setiap bagian dari tulisan.

Setelah selesai pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan pembagian siswa kedalam kelompok-kelompok untuk melakukan simulasi penyusunan karya ilmiah yang didampingi oleh para asisten mahasiswa yang sudah di bagi sebelumnya. Pada tahap ini, para siswa didampingi penuh untuk dapat berlatih menerapkan materi yang telah disampaikan sebelumnya.

2. Kegiatan kedua di SMAN 7 Kota Tangerang Selatan

Tahapan persiapan mencakup proses koordinasi baik secara lisan, korespondensi, maupun observasi lapangan. Dari hasil koordinasi, tim mendapati bahwa SMAN 7 Kota Tangerang Selatan merupakan sekolah yang menaruh perhatian besar dalam peningkatan kualitas siswa. Karena itu, tim menilai bahwa pemilihan SMAN 7 Kota Tangerang Selatan sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan PKM HI FISIP UBL

2018. Hal ini juga didukung dengan tema pelatihan yang tepat guna bagi para siswa SMA Budi Luhur. Oleh karena itu, diputuskan bahwa pengabdian dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2018.

Secara umum, teknis pelaksanaan kegiatan kedua ini serupa dengan kegiatan pertama sebelumnya di SMA Budi Luhur. Tim pelaksana melakukan koordinasi dengan tiga puluh (30) mahasiswa asisten yang berasal dari Program Studi Hubungan Internasional. Mahasiswa berasal dari gabungan angkatan 2016 dan 2017 yang telah mendapatkan pembekalan mengenai teknik penulisan ilmiah selama 3 bulan, dan satu (1) orang mahasiswa angkatan 2018. Para mahasiswa dipilih berdasarkan kemampuan mereka menerapkan proses menulis dengan baik, jiwa pengabdian mereka yang tinggi, serta pengetahuan yang luas dan aplikatif mengenai diplomasi dan anak muda. Dalam koordinasi internal, tim pelaksana melakukan pembagian kelompok fasilitator dengan tugas utama membimbing proses pencarian data dan penyusunan tulisan para peserta pelatihan. Satu kelompok siswa akan difasilitasi oleh empat (4) orang mahasiswa. Tim dosen lalu berbagi informasi mengenai tema tulisan yaitu mengenai kearifan lokal dan pelestarian lingkungan. Maka, para fasilitator diberikan pekerjaan rumah mempersiapkan diri dalam rangka memfasilitasi para peserta pelatihan. Para fasilitator diwajibkan untuk kembali mempelajari kearifan lokal dan pelestarian lingkungan yang berasal dari kampung halaman atau berada di sekitar mereka.

Pada hari pelaksanaan, koordinasi dengan pihak SMAN 7 Kota Tangerang Selatan berjalan baik. Lokasi kegiatan ditempatkan di ruang Laboratorium Komputer yang biasa diperuntukkan untuk kegiatan sejenis dengan fasilitas yang cukup lengkap. Kegiatan dimulai pukul 08.30 WIB dengan semua anggota tim pelaksana memperkenalkan diri sebelum masuk kepada pemberian materi pelatihan oleh instruktur. Pemberian materi berjalan cukup lancar dengan dukungan fasilitas yang tersedia.

Materi pertama berisikan mengenai Globalisasi, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kearifan Lokal oleh Nabil Ahmad Fauzi dan Elistania. Pada materi ini disampaikan mengenai Kearifan lokal adalah budaya lokal yang merupakan bagian dari bahasa masyarakat. Kearifan lokal diwariskan secara turun temurun sebagai bagian dari kecerdasan yang dimiliki manusia untuk dijadikan *the way of life*. Selain itu, kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Karenanya nilai-nilai tersebut melekat melalui perjalanan yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut. Dalam materi ini juga disampaikan berbagai macam contoh kearifan lokal yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke.

Salah satu peran penting dari kearifan lokal adalah perannya bagi pelestarian lingkungan hidup. Sebuah masyarakat pada tempat (daerahnya) masing-masing membangun tata cara dalam mengolah lahan dan sumber daya alam berkelanjutan selama beratus-ratus tahun dan turun temurun. Bagian penting lainnya adalah mengenai

ancaman globalisasi bagi pelestarian lingkungan dan kearifan lokal. Keterkaitan dan Keterikatan antara kehidupan lokal dengan perkembangan di seluruh dunia semakin erat. Seluruh dimensi kehidupan di tempat-tempat tertentu semakin dipengaruhi oleh proses yang berlangsung di seluruh dunia. Nilai-nilai yang mendukung kehidupan lokal akan terkena perubahan atau perkembangan zaman. Jadi ancaman globalisasi adalah pendangkalan orang, ia tercabut dari tenunan pandangan dasar, nilai-nilai dan norma-norma dasar daripadanya ia menjadi seorang pribadi yang dewasa, menangani hidupnya menurut cita-citanya sendiri, bertanggungjawab. Motif ekonomi menguasai praktik sejumlah pranata kearifan lokal terkait pemanfaat sumber daya alam. Sejumlah sanksi sosial yang relatif lekat dengan pelanggaran kearifan lokal, kini tidak diterapkan lagi.

Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai penyusunan karya tulis ilmiah sebagai materi terakhir dan yang utama yang disampaikan oleh Dr. Yusran. Meskipun kemutakhiran teknologi telah melahirkan berbagai macam kemudahan akses kepada informasi, dokumentasi informasi masih didominasi dalam bentuk tulisan. Maka, kegiatan membaca sebagai hal yang imperatif merupakan hal yang ditekankan pada awal pemberian materi. Instruktur memulai dengan mengumpulkan informasi dari para peserta siapa di antara mereka yang suka membaca novel. Jumlahnya terhitung sedikit dibanding yang diperkirakan oleh instruktur. Meski menjadi hal yang menyedihkan, hal ini seperti mengamini bahwa perlu adanya kegiatan gerakan literasi.

Materi ini dimulai dengan pertanyaan kenapa harus menulis? Beberapa hal yang disampaikan adalah bahwa menulis merupakan kewajiban sebagai siswa, kebutuhan dalam dunia pendidikan, aktualisasi diri seorang pelajar dan menunjukkan kualitas diri. Di sampaikan juga mengenai jenis karya tulis dan penjelasan mengenai karya tulis ilmiah. Kemudian instruktur mulai menyampaikan pelatihan menulis karya ilmiah secara lebih detail dan lengkap. Instruktur menjelaskan sistematika umum yang wajib ada dalam setiap karya tulis, baik ilmiah maupun populer. Sebuah tulisan yang baik wajib memiliki bagian pembuka, bagian pembahasan, dan bagian penutup. Dalam beberapa karya tulis populer maupun ilmiah, tidak jarang tulisan menyajikan satu bagian untuk penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penyusunan tulisan. Setiap bagian tentu memiliki fungsi-fungsi khusus. Maka sistematika pada dasarnya bergantung pada tujuan dari penulisan. Tujuan penulisan tersebutlah yang pada akhirnya menentukan adanya fungsi-fungsi yang dipegang oleh setiap bagian dari tulisan.

Setelah selesai pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan pembagian siswa ke dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang siswa. Masing-masing kelompok didampingi oleh mahasiswa-mahasiswa yang menjadi asisten pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Setiap kelompok didampingi oleh sekurang-kurangnya dua orang mahasiswa.

Mahasiswa-mahasiswa yang mendampingi para siswa dalam praktek menulis karya tulis ilmiah tersebut sebelumnya sudah diberikan pembekalan-pembekalan khusus mengenai teknik penulisan ilmiah. Pembekalan tersebut dilakukan pada mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah. Disamping itu untuk menambah pemahaman secara teknik maupun praktis, mahasiswa yang mendampingi para siswa tersebut juga diberikan pembekalan khusus pada sesi persiapan sebelum kegiatan PKM dilaksanakan.

Tahap praktek membuat karya tulis ilmiah yang dilakukan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah tahap yang paling krusial, karena para siswa benar-benar dibimbing secara optimal. Para siswa diberikan pemahaman untuk mencari topic yang menarik untuk dikaji dalam karya tulis ilmiah, sesuai dengan tema besar yang telah diberikan pada saat pemaparan materi. Setelah menentukan topic yang menarik, para siswa diberikan pemahaman mengenai masalah-masalah yang ada di seputar topic yang dipilih. Setelah menentukan masalahnya, para siswa kemudian diberikan pemahaman mengenai latar belakang dan komponen penyusunnya pada karya tulis ilmiah dan selanjutnya langsung diberikan bimbingan secara praktis dalam menulis latar belakang yang baik. Praktek penulisan dilanjutkan hingga para siswa merampungkan bagian pendahuluan.

Untuk bagian pembahasan, para siswa diberikan pemahaman mengenai hal-hal apa saja yang harus dimuat sebagai isi (pembahasan) dalam karya tulis ilmiah. Sesuai dengan topic yang mereka pilih, dengan menggunakan kerangka pemikiran dan defenisi-defenisi sederhana, para siswa diajarkan dan diberikan pemahaman untuk menarasikan, mendeskripsikan, dan mengeksplanasikan temuan-temuan mereka berupa data menghasilkan secara tertulis. Para siswa juga diarahkan untuk belajar berpikir kritis dalam mencermati data yang ditemukan pada saat melakukan pembahasan. Selain berpikir kritis, para siswa juga diajarkan cara menganalisis data sehingga dapat memformulasi temuan pada karya tulis sederhana mereka.

Para siswa juga diberikan pemahaman dan kesadaran untuk menghargai hak cipta dan hakkekayaan intelektual dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah. Untuk tujuan ini, para siswa diajarkan tentang teknis yang benar dalam mengutip dan membuat paraphrase. Para siswa juga diajarkan cara mengutip yang benar dan cara menyertakan sumber baik di badan tulisan dalam bentuk footnote atau bodynote. Dimana, pembekalan ini bertema dengan pembelajaran mengenai penyusunan daftar pustaka.

Pada bagian akhir, para siswa diberikan pemahaman tentang bagian penutup pada karya tulis ilmiah. Dalam memberikan pemahaman pada bagianakhir ini, para siswa sekaligus diajarkan cara menarik kesimpulan karya tulis yang telah mereka susun. Tujuannya adalah agar siswa dapat menarik kesimpulan dengan benar sehingga ‘benang merah’ dari karya tulis mereka tidak terputus. Dalam hal ini kepada siswa diberikan penekanan bahwa membuat kesimpulan karya tulis ilmiah tidak sama dengan membuat ringkasan atau membuat rangkuman.

Proses ini memang memakan waktu yang cukup panjang, sehingga pada saat kegiatan PKM berlangsung, para siswa belum dapat menyelesaikan pekerjaannya. Namun kegiatan tidak berhenti sampai di situ saja, karena proses selanjutnya dilakukan melalui komunikasi langsung antara instruktur, mahasiswa pendamping, dan para siswa melalui *Whatsapp Group* dan *email*. Proses ini terus berlangsung sampai para siswa berhasil menyelesaikan karya tulis ilmiah mereka. Para siswa diberikan target tertentu untuk menyelesaikan karya tulis mereka (kurang lebih selama dua minggu).

Setelah jadwal yang ditargetkan tiba, para siswa melalui mahasiswa pendampingnya, mengirimkan email kepada instruktur. Instruktur selanjutnya akan memeriksa dan mengoreksi hasil karya tulis tersebut.

Untuk mengikat kohesifitas antara tempat penyelenggaraan kegiatan PKM dengan Universitas Budi Luhur sebagai penyelenggara, hasil karya tulis tersebut selanjutnya diberikan penilaian. Karya tulis terbaik yang menjadi *best paper* diberikan hadiah oleh instruktur penyelenggara kegiatan. Disamping itu, semua siswa yang membuat karya tulis diberikan penghargaan berupa sertifikat. Hal itu dilakukan agar para siswa merasa diapresiasi, dan apa yang mereka kerjakan tidaklah sia-sia.

Penutup

Secara umum, kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan mendukung gerakan literasi nasional, terutamanya di kalangan generasi muda. Adapun, pemuda yang menjadi sasaran program kegiatan adalah para pelajar dari SMA Budi Luhur dan SMAN 7 Kota Tangerang Selatan. Para generasi milenial tersebut memiliki kemampuan tinggi dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi canggih, serta karakter pribadi yang luwes dalam berinteraksi dengan masyarakat luas, serta perhatian pada isu-isu kekinian.

Hanya saja, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat perlu disikapi secara kritis dan rasional. Tema globalisasi, kearifan lokal dan pelestarian lingkungan perlu lebih disosialisasikan. Tema ini cenderung kurang mendapat perhatian dari generasi muda sehingga memerlukan upaya yang lebih untuk menjadikannya isu *mainstream* dan dipahami secara luas.

Sementara terkait kegiatan penulisan ilmiah, sebagaimana yang ditekankan oleh para instruktur dari Prodi HI Universitas Budi Luhur, penulis harus senantiasa memperhatikan kaidah penulisan yang baik dan memenuhi standar. Para instruktur juga mengingatkan peserta untuk menggunakan sumber berita yang terpercaya sebagai bahan rujukan dari tulisan. Hal ini dilakukan guna menjaga reliabilitas dan nilai tulisan ilmiah. Dalam konteks ini, tulisan mengenai kearifan lokal dan pelestarian lingkungan dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan menumbuhkan literasi nasional.

Pengabdian diberikan dalam bentuk pelatihan tulisan sebagai produk dari pengenalan para peserta kepada kearifan lokal Indonesia yang beragam macamnya. Dengan

mencari tahu dan membahas lalu menuliskan kearifan lokal yang beraneka ragam yang mungkin berbeda dari apa yang mereka selama ini ketahui dalam kehidupan keseharian, para peserta dapat melatih tingkat kepedulian dan kesadaran mereka. Hal ini akan menjadi modal utama dalam meningkatkan partisipasi pelestarian lingkungan hidup Indonesia.

Dari tulisan-tulisan yang dihasilkan dalam bengkel pelatihan ini, tim pelaksana mendapati bahwa para peserta selain telah mampu mencapai beberapa target capaian pelatihan. Meskipun juga masih perlu banyak hal yang memerlukan latihan lebih banyak lagi. Secara umum, kegiatan ini memberikan pembekalan yang sangat berguna bagi para peserta.

Selain hal di atas, dapat pula disimpulkan bahwa institusi penyelenggara juga mendapatkan berbagai manfaat. Instruktur selain dapat mengaplikasikan ilmunya bagi generasi muda penerus bangsa, juga mendapatkan ruang dan jam terbang dalam memahami generasi milenial. Kepada merekalah perlu dijalin jaringan keilmuan dan pengetahuan dengan para civitas akademika di perguruan tinggi dalam beberapa tahun mendatang. Bagi mahasiswa, kegiatan ini memberikan manfaat dari peningkatan jam terbang untuk mengaplikasikan dan berbagi keterampilan dalam menulis dengan baik dan benar. Selain itu, mahasiswa juga mendapatkan kesempatan berupa pengalaman langsung melihat bagaimana pemuda berpotensi besar dalam pembangunan. Ilmu hubungan internasional sering kali mendapatkan pandangan dari khalayak luas sebagai sebuah kajian yang eksklusif dan tidak aplikatif, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat secara umum dan dalam kehidupan keseharian. Namun, dengan program pengabdian ini, mahasiswa dapat mempraktikkan langsung berperan aktif dalam agenda mencerdaskan bangsa.

Oleh sebab itu, baik dari pihak Universitas maupun dari SMA Budi Luhur dan SMAN 7 Kota Tangerang Selatan perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan. Bagi Universitas, kegiatan di lingkungan kedua sekolah juga menjadi elemen dari *tri dharma* perguruan tinggi, yakni sebagai upaya pengabdian dan kontribusi segenap civitas akademika Budi Luhur dalam berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, para akademisi perlu memperhatikan manfaat yang dapat diberikan bagi lingkungan sekitarnya.

Bibliografi

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. "Panduan Gerakan Literasi Nasional."
- Literacy Foundation. 2018. "Consequences of Illiteracy." <https://www.fondationalphabetisation.org/en/causes-of-illiteracy/consequences-of-illiteracy/> diakses pada 30 Oktober 2018.

Globalisasi dan Kompleksitas Industrial Park Bagi Batam

Yusnarida Eka Nizmi¹

¹*Hubungan Internasional, Universitas Riau, Pekanbaru*

Corresponding email: eka_nizmi@yahoo.com

Abstrak



Globalisasi dan regionalisasi adalah tren-tren yang dominan dalam ekonomi dunia, menstimulasi integrasi ekonomi dan bentuk-bentuk baru dari kerjasama yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dalam berbagai sektor. Konsep growth triangle adalah satu respon yang muncul terhadap tren-tren gerakan ini, dan tulisan ini mengkaji dampak dari Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) melalui Industrial Park Bagi Batam yang mulai hadir sejak awal 1990an. Periode akhir 1980an menjadi saksi bagi sebuah kepentingan baru dalam regionalisme. Periode ini menjadi kebangkitan dalam regionalisme di seluruh dunia dalam membentuk regional baru. Konsep IMS-GT sebagai sebuah kerjasama ekonomi sub regional pertama kali diajukan pada 20 Desember 1989 sebagai sebuah kesepakatan antara Singapura, Johor, dan Indonesia (Batam) untuk mengeksploitasi kedekatan geografis dan komplementaritas sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing negara sebagai sebuah kawasan dengan kombinasi yang menarik. IMS-GT membuka ruang investasi dengan kehadiran Industrial Park di Batam. Kehadiran Industrial Park memiliki tantangan tersendiri bagi Batam, karena harus berhadapan dengan persoalan yang berkaitan dengan dua kondisi sekaligus yaitu keuntungan melalui investasi dan kerugian dengan munculnya beragam masalah sosial. Batam dihadapkan pada kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, sekaligus juga berhadapan dengan persoalan urbanisasi (kedatangan para pekerja migran dari berbagai wilayah di internal Indonesia), laju pertumbuhan penduduk yang menimbulkan persoalan sosial, dan aktivitas-aktivitas ilegal seperti perdagangan orang yang menimbulkan konflik dan membutuhkan penanganan yang serius.

Kata Kunci

Industrial Park, Investasi, Laju Pertumbuhan Penduduk, Urbanisasi, Perdagangan Orang.

Pendahuluan

Kehadiran Industrial Park di Batam melalui kerjasama IMS-GT harus dilihat dalam konteks keinginan Singapura akan pertumbuhan. Pertumbuhan tersebut berasal dari keinginan Perdana Menteri Singapura akan konsep triangle yang secara esensial membutuhkan pertumbuhan di luar kapasitas Singapura sebagai kepulauan kecil dengan aktivitas ekonomi yang tinggi. Kesuksesan kebijakan ekonomi Singapura

menekankan pada faktor-faktor produksi, khususnya tanah dan tenaga kerja. Singapura menjadi saksi atas pengurangan tenaga kerja dan tingginya biaya upah dalam pasar tenaga kerjanya (Cunningham dan Debrah, 1996). Ketatnya tenaga kerja membuat rekrutmen menjadi sesuatu yang sulit dan mahal (Debrah, 1993). Ditambah lagi, Multinational Corporations (MNCs) jika ingin lanjut beroperasi di Singapura, ada penurunan yang terjadi akan tersedianya tenaga kerja yang memiliki keterampilan. Selain itu, biaya untuk membangun pabrik dan pusat-pusat distribusi terus meningkat, karena keterbatasan tanah yang dimiliki oleh Singapura.

Pemerintah Singapura juga bertujuan untuk menguatkan sektor manufaktur domestik dan sektor-sektor jasa. Namun, Kumar (1994) mencatat bahwa ketersediaan sumber daya, seperti air, tanah dan tenaga kerja, seringkali mengalami keterbatasan untuk perluasan industri manufaktur, pariwisata dan jasa. Singapura menghadapi peningkatan kompetisi dalam produksi yang berorientasi ekspor dari Malaysia, Thailand dan Filipina sehingga produk-produk Singapura harus diakui jelas mendapatkan ancaman (Ng dan Wong, 1993; Straits Times, 1997).

Pemerintah Singapura secara aktif memperkuat perusahaan-perusahaan untuk merelokasi industri-industri mereka yang berbasis tenaga kerja ke Batam. pada waktu yang bersamaan, pemerintah Singapura juga berkeinginan kuat untuk berinvestasi di wilayah Asia Timur sebagai bagian dari upaya regionalisasi Singapura untuk melebarkan sayap demi pertumbuhan ekonominya (Debrah dan Slansky, 1993; Tan, 1995).

Membangun Industrial Park berarti memberi ruang pada Singapura untuk memperluas ekonominya secara geografik dengan memperluas industri ke negara tetangganya. Selanjutnya, konsep ini juga memberi ruang penyebarluasan sektoral dan pengurangan ketergantungan terhadap negara-negara tetangganya (Rodan, 1993). Dalam pandangan Chia dan Lee (1994) Investasi Singapura di berbagai negara harus dipandang dalam terminologi sebuah penyebaran dari metropolitan (Singapura) dalam pencarian lahan.

Kumar (1994) berpendapat bahwa *comparative advantage* muncul dari perbedaan yang dimiliki dalam beragam faktor sebagai komplementaritas dibanding kompetisi dalam tiga wilayah yang masuk dalam triangle. Misalnya, Singapura memiliki infrastruktur yang sudah mapan dan tenaga kerja yang mumpuni dalam hal keterampilan (namun mahal) biaya; Riau memiliki ketersediaan lahan dan tenaga kerja yang murah. Ini diasumsikan bahwa komplementaritas ekonomi dari wilayah ini membuat Industrial Park lebih menarik bagi para investor secara keseluruhan dibanding faktor-faktor lain yang memisahkannya (Yeoh, *et al.* 1992; Naidu, 1994). Hal ini memperlihatkan bahwa Batam memang menarik bagi sektor investasi dalam pembangunan Industrial Park dan pertumbuhan tenaga kerja. Sebagai konsekwensinya, Batam mendapatkan keuntungan dari percepatan dari pertumbuhan

industrial. Tabel dibawah ini menunjukkan massifnya kehadiran investor di Batam dalam sektor Industri.

Tabel 1: Daftar Kawasan Industri di Batam

<h2 style="text-align: center;">Daftar Kawasan Industri</h2> <h3 style="text-align: center;"><i>List of Industrial Estates</i></h3>					
<i>Industrial Estate</i>					
No	Industrial Estates	Company / Owner	Alamat / Address	Telepon / Phone (62-778)	Tenant
01	Batamindo Industrial Estate	PT. Batamindo Investment Co.	Wisma Batamindo Jl.Rasamala No.1	611222	66
02	Bintang Industrial Park II	PT. Bintang Propertindo	Jl. Brigjen Katamso, Tanjung Uncang	458088	57
03	Cammo Industrial Park	PT. Aman Sejati Propertindo	Cammo Industrial Park Jl. Letjen Soeprapto Batam	463111	29
04	Citra Buana Centre Park I	PT. Citra Buana Prakarsa	Jl. Budi Kemuliyaaan, Seraya, Pulau Batam	428500	41
05	Citra Buana Centre Park II	PT. Citra Buana Batam	Jl. Yos Sudarso Batu Ampar	428500	7
06	Citra Buana Centre Park III	PT. Citra Buana Perkasa	Jl. Engku Putri-Batam Centre	428500	23
07	Executive Industrial Park	PT. Bumi Abadi Tegar Sakti	Engku Putri Street	7482000	40
08	Hijrah Industrial Park	Wang Jong / Sani	Komp. Hijrah Industrial Estate - Batam Centre	462666	21
09	Indah Industrial Park	PT. Teluk Pantaian Indah	Jl. Imam Bonjol Blok A No.7 Komp. Sakura Ampan	469000	9
10	Kabil Integrated Industrial Park	PT. Kabil Indonusa Estate	Jl. Hang Kesturi KM. 4 Kabil-Batam 29435	711144	34
11	Kara Industrial Park	Chandra Lukito	Kara Industrial Park Blok C1 Batam Centre	461113	35
12	Lytech Industrial Park	Chandra Lukito	Komp. Orchid Business Centre Blok A No. 8-10 Batam	472081	78
13	Latrade Industrial Park	Latrade PTE LTD	Jl. Sei Binti Tanjung Uncang Batam 29422	396888	12
14	Malindo Cipta Perkasa Industrial Park	PT. Malindo Cipta Perkasa	Jl. Krapu Komp. MCP Batu Ampar	412737	37
15	Mega Cipta Industrial Park	PT. Mega Cipta Adi Persada	Jl. Krapu no.1, Batu Ampar	468777	59
16	Panbil Industrial Estate	PT. Nusatama Properta Panbil	Panbil Plaza, Panbil Commercial Area Blok D No. 1-6	371000	26
17	Puri Industrial Park 2000	PT. Teluk Pantaian Indah	Jl. Imam Bonjol Blok C No. 7 Komp. Sakura Anpan	469000	36
18	Sarana Industrial Point	PT. Pratama Sarana Unggulan	Komp. Sarana Industrial Point Blok A. No. 12	471018	34
19	Sekupang Makmur Abadi	Bennyman Saus	Jl. RE Martadinata No.1	322508	7
20	Taiwan International Industrial Estate	PT. Suar Batam In't Dev. Co	Jl. Hang Kesturi No. 1 KM.4, Kabil	711029	11
21	Tunas Industrial Estate	PT. Tritunas Bangun Perkasa	Jl. Engku Putri Blok 1 A No. 10 Batam - Centre	471818	230
22	Union Industrial Park	PT. Union Batam Abadi	Komp. Union Industrialpark B. Ampar, AA No. 7-8	413188	57

Ket/Notes : Data Perbaikan Kawasan Industri/
Correction Data of Industrial Estates

Metode Penelitian

Mengacu pada Creswell (2009: 266) bahwa langkah pengumpulan data merupakan usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara baik terstruktur maupun tidak, dokumentasi, serta merekam dan mencatat

informasi. Maka, langkah-langkah kongkrit dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara. *Pertama*, mengidentifikasi lokasi-lokasi dan individu-individu yang sengaja ditentukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. *Kedua*, melakukan observasi. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan turun kelapangan untuk merekam maupun mencatat segala informasi baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. *Ketiga*, peneliti melakukan wawancara terhadap individu-individu yang sudah ditentukan berdasar *purposeful sampling procedur* sesuai dengan informasi yang ingin didapatkan peneliti. Wawancara dilakukan baik secara langsung (berhadapan-hadapan) maupun melalui saluran telepon.

Keempat, peneliti melakukan pengumpulan dokumen. dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data melalui teknik kepastakaan (*library research*). teknik kepastakaan digunakan karena banyak informasi dan data tentang pembentukan dan perjalanan dari Industrial Park yang ada di Batam, dapat ditelusuri dalam buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, surat-surat kabar, majalah-majalah, dan sumber-sumber dari *website* yang dapat diakses melalui internet. Teknik ini ditujukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai Keterkaitan Industrial Park di Batam dengan segala resiko yang menyertainya..

Tinjauan Pustaka

Growth Triangles yang juga dikenal dengan zona ekonomi subregional (Chia dan Lee, 1992), *natural economic zones* (Scalapino, 1992) atau *extended metropolitan regions* (McGee dan Macleod, 1992) adalah zona ekonomi transnasional yang menyebar, secara geografi terdiri dari tiga negara atau lebih yang memiliki perbedaan demi pencapaian promosi perdagangan dan investasi. *Indonesia Malaysia Singapura – Growth Triangle* (IMS-GT) muncul untuk memperoleh kesuksesan dari kondisi kedekatan geografis, komplementaritas sumber daya dan infrastruktur. Secara keseluruhan, tujuan ekonomi bertemu dengan kondisi awal sukses sebagai lokasi industrialisasi dan intensifikasi angka pertumbuhan dalam sektor segitiga pertumbuhan Indonesia dan Malaysia, sementara Singapura melihat peluang untuk investasinya (Abdullah 1996; Kumar 1994; Naidu, 1994).

Konsepnya pertama kali dibunyikan oleh Deputy PM Goh Chok Tong Singapura pada akhir 1989, yang mengacu pada sebuah “triangle of Growth”. Triangle terdiri atas negara kota, Johor di Utara, dan Pulau Batam di Kepulauan Riau yang terletak di Selatan. Tahun berikutnya, konsep ini kemudian dipopulerkan oleh Presiden Indonesia Soeharto dan PM Malaysia Mahathir dan kemudian memperluasnya menjadi meliputi keseluruhan wilayah Propinsi Riau. Pada tahun 1994, sebuah MoU ditandatangani oleh pemerintah Singapura, Malaysia, dan Indonesia untuk bersama-sama mengembangkan dan memasarkan area tersebut (Phelps 2004, p. 348).

Komitmen ini digerakkan oleh adanya kebutuhan-kebutuhan investasi yang spesifik dari ketiga negara. Singapura berada dalam sebuah proses restrukturisasi, dan berhadapan dengan tingginya biaya lahan dan tenaga kerja. Keadaan ini membuat negara membutuhkan strategi industrialisasi regional. Pencarian untuk mengembangkan kemampuan konstruksi dan administrasi dari properti industrial di Asia; dan meningkatkan investor-investor lokal dan internasional untuk meng-upgrade operasi mereka di Singapura dan merelokasi operasi ke lokasi yang terdekat- menjadi bagian dari keinginan Singapura (Yeoh, Worthington dan Wong 2003, p. 45).

Malaysia, ketika itu berupaya mengembangkan sektor industrialnya dan memajukan kemampuan teknologinya. Ditambah lagi adanya penurunan harga-harga komoditi pada tahun 1980-an, negara bagian Johor berkeinginan untuk mengembangkan sektor manufaktur dan berkompetisi dengan pusat industri Kuala Lumpur dan Penang. Ketersediaan akses ke negara kota Singapura via jembatan sepanjang 1.2 kilometer, Johor bertujuan menarik minat Singapura dan modal internasional dalam bidang teknologi tinggi seperti elektronik (JSEPU 1989, PP. 124; eeau 1995, p. 43).

Indonesia, juga berupaya untuk menarik modal dan teknologi dari Singapura melalui Batam, dengan jarak tempuh yang hanya 20 kilometer. Berbagai upaya mulai dilakukan untuk mengembangkan pulau tersebut dari akhir tahun 1970an, dan memfokuskan pada investasi di sektor perminyakan termasuk juga manufaktur (Nur 2000, p. 147). Namun, ketatnya aturan kepemilikan asing menyebabkan sedikit sekali investasi yang datang ke pulau tersebut (Smith 1996, p. 167). Memahami kegagalan pendekatan ini, , terjadi perubahan aturan pada tahun 1989 terutama yang berkaitan dengan kepemilikan asing yang kemudian di liberalkan (Pangestu 1991, p. 78).

Konteks regional juga kondusif untuk ekspor. Plaza Accord pertengahan 1980an memacu percepatan nilai Yen dan mata uang Eropa melawan Dollar AS. Dalam rangka upaya untuk mendapatkan harga yang lebih murah pada operasional mereka, perusahaan-perusahaan yang ada dari berbagai negara mulai melakukan ekspansi ke Asia Tenggara (Toh, 2014, p. 256). Perusahaan-perusahaan Jepang, khususnya adalah investor yang penting di kawasan ini.

Faktor-faktor ini menjadi pemicu pesatnya investasi dan interaksi lintas batas pada awal dan akhir 1990an-an. Batam menerima arus investasi dimulai pada tahun 1980an yang menembus angka US\$ 230 juta per tahun di awal 1990an (Van Grunsven 1998, p. 189). Di Batam, investasi yang mendominasi adalah manufaktur, khususnya sektor-sektor seperti elektronik, dan plastik. Termasuk juga Operasional pharmaceuticals di Batam (EEAU 1995, pp. 34-36).

Indonesia khususnya Batam berkembang cepat selama periode ini melalui Industrial Park dengan beragam investasi. Pertumbuhan Batam bahkan lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan nasional sebesar 10 persen berada di atasnya (MIER 1997; BPS, beragam tahun). Struktur ekonomi juga berubah, berganti menuju manufaktur dari yang

sebelumnya agro industri, dan perikanan. Dalam kasus Batam, sejumlah sektor pekerjaan formal dengan cepat menyebabkan terjadi migrasi dari daerah lain, hingga populasi meningkat dari 79,000 pada tahun 1988 menjadi 250,000 di tahun 1997 (Wong dan Ng 2009, pp. 42-43).

Hasil dan Pembahasan

Industrial Park dan Investasi

Pembentukan Industrial Park memberi angin segar bagi pertumbuhan Batam. Sebuah pulau dengan luas wilayah 45km x 25km (sekitara dua pertiga dari luas Singapura) dan populasi yang mencapai hampir satu juta penduduk berlokasi hanya 20km dari Singapura dan 25km dari Johor Malaysia, Batam memang mirip dengan China's SEZ (Special Economic Zones)- sebuah tempat dimana para perencana ekonomi bangsa menguji kebijakan-kebijakan ekonomi baru sekaligus ide-ide baru. Daerah yang berlokasi di Samudra Indian dan Pasifik, Batam juga termasuk destinasi pariwisata internasional kedua yang populer di Indonesia. Karena statusnya yang Free Trade Zone sejak tahun 1971, lokasi yang strategis, biaya rendah, tenaga kerja yang tersedia, insentif pajak dan investasi, Batam mampu menarik 700 perusahaan asing dari 34 negara dan menghasilkan \$3 milyar dalam sektor investasi asing.¹

Investor-investor utama termasuk McDermott International, AT&T, PerkinElmer, Bechtel, Seagate Technology, Babcock & Wilcox, Holiday Inn, Matsushita, Kyocera, Hitachi, Sanyo, Nippon Steel, Hyundai, Siemens, Sony and Philips. Investor lainnya termasuk di bidang perawatan limbah air, rumah sakit, fasilitas kesehatan, pendidikan dan perluasan pelabuhan. Serangkaian dengan investasi-investasi ini, pulau Bintan, yang bersebalahan dengan Batam, juga mendapatkan kucuran modal dari Singapura di Industrial Parks dan fasilitas-fasilitas pariwisata berkelas tinggi (Chang, 2001).

Investasi Pemerintah Indonesia di Batam lebih dari \$US 2 milyar di sektor privat berjumlah sekitar \$7 milyar. Serangkaian aktivitas ekspor berorientasi manufaktur, pertumbuhan ekonomi mencapai 7.7 persen per tahun untuk tahun 2003 dan memberi peluang bagi tenaga kerja lebih dari 260.000 tenaga kerja. Pada tahun 2004, lebih dari 47 perusahaan asing baru menanamkan investasi mencapai US\$43 juta, mendirikan serangkaian produksi yang berbasis di Batam. Batam dilaporkan menyumbangkan 14 persen bagi pendapatan ekspor Indonesia selain minyak dan gas tentunya. Ada 40 industri perkapalan dan pabrik-pabrik baja berat. Namun yang paling mendominasi adalah bisnis elektronik dan komputer yang berhubungan dengan peralatan audio dan video termasuk juga perangkat lunak. Produk-produk lain termasuk bahan-bahan kulit, sepatu, garmen, mainan, produk-produk rumah tangga dan produk-produk

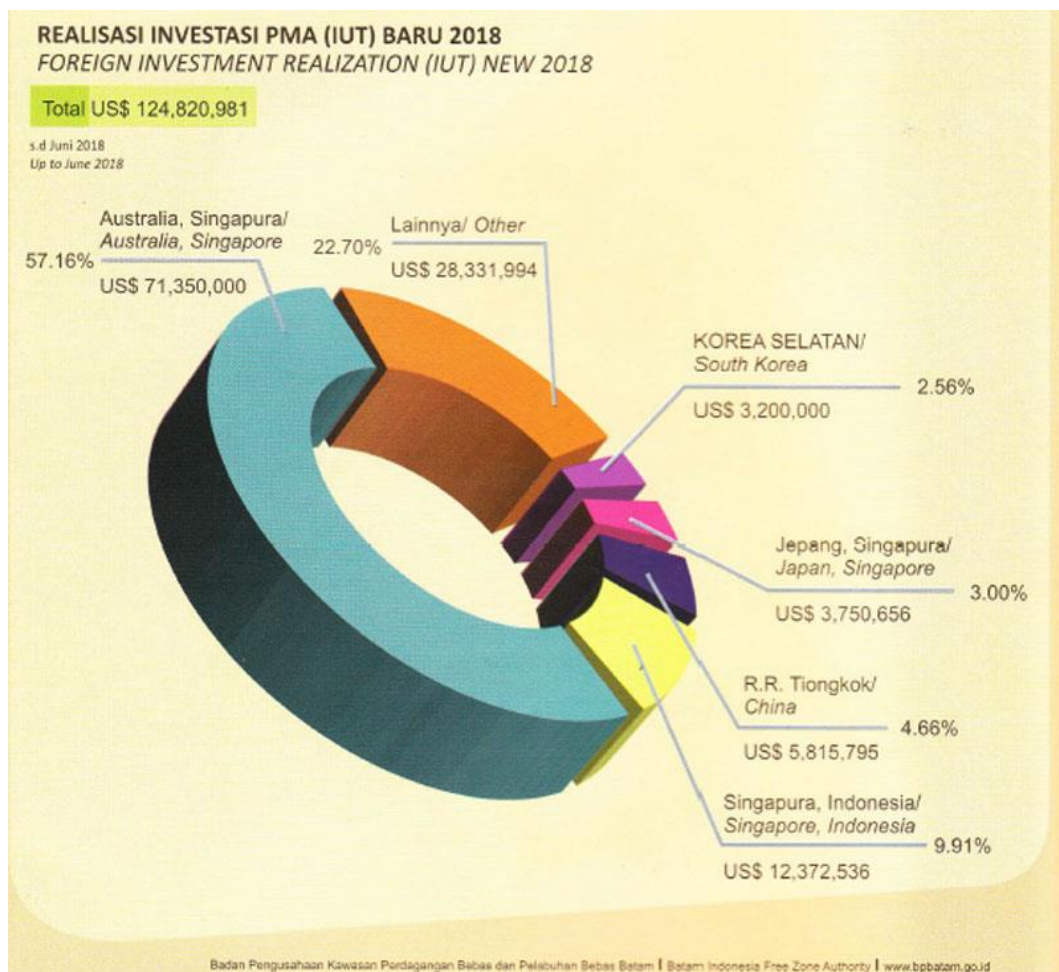
¹ Hasil wawancara dengan Den Yelta (Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Wilayah Tanjung Pinang (FTZ-Kepulauan Riau), 12 November 2017. Pkl 10.00-11.30 WIB

perawatan kesehatan. Pariwisata termasuk sebagai industri andalan dan membuat Batam sebagai tujuan yang populer kedua setelah Bali.

Para potensial investor juga difasilitasi dengan kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi, keringanan pajak, dan keuntungan-keuntungan lain jika berinvestasi di Batam. Hukum memberi keringanan bagi para warga asing yang ingin memiliki rumah dan properti komersial serta pusat-pusat bisnis tanpa banyak kesulitan- misalnya perusahaan tersebut dapat sepenuhnya dimiliki oleh pihak asing. Kepemilikan halan juga dapat dimiliki selama lebih 80 tahun dan dapat diperpanjang.

Daya tarik lain untuk berinvestasi di Batam seperti: bebas dari kewajiban-kewajiban yang biasanya melekat pada pelaku impor- membuat komponen-komponen alat kesehatan yang kemudian diterbangkan ke Amerika Serikat. Sebagai “perluasan” manufaktur Singapura yang berhubungan langsung dengan AS- Singapore Free Trade Agreements. Ini termasuk bagian dari keunggulan dinamika ekonomi Singapura sebagai sebuah asset, sekaligus menjadi masa depan Batam, yang sekarang menjadi kota modern sebagai pusat utama bisnis terbukti dengan hadirnya investasi dari berbagai Negara seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini:

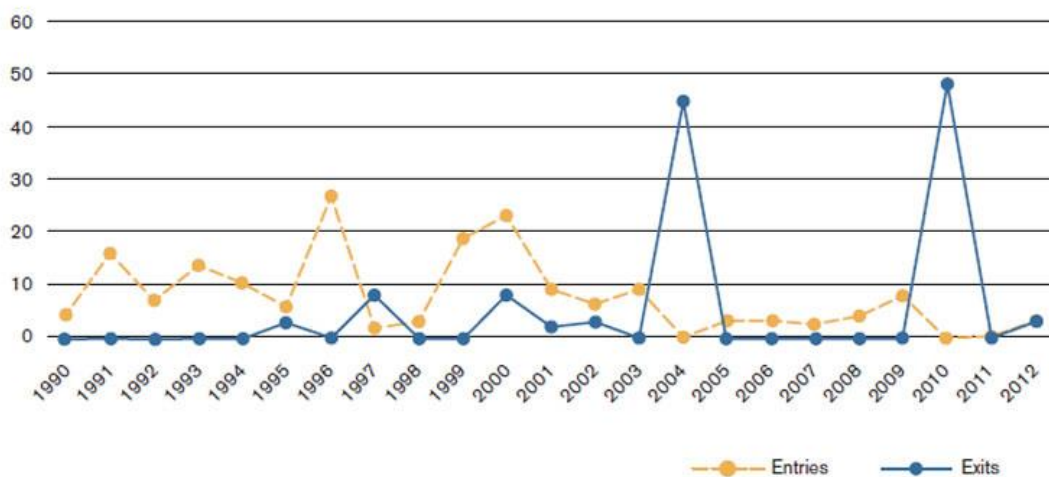
Gambar 1: Realisasi Investasi di Batam



Terkait investasi dari berbagai kebangsaan di Batam, dapat dikatakan bahwa Singapura dan Jepang adalah negara-negara utama dengan perusahaan-perusahaan terbesar. Investasi Jepang adalah pemain penting dari sektor elektronik di wilayah ini, dan karena itu dibutuhkan keunggulan geografis, sumber daya, dan dukungan pemerintah bagi perkembangan Batam. Singapura juga termasuk investor penting di wilayah kepulauan tersebut selain Jepang. Negara asal investasi lainnya adalah Amerika Serikat, Malaysia, , Indonesia dan Jerman. Sama halnya dengan Jepang, Amerika Serikat dan Jerman juga pemain penting dalam investasi di Batam. Kehadiran perusahaan-perusahaan ini mengindikasikan magnet Batam yang sangat potensial.

Batam, pada awalnya mencapai 175 total perusahaan pada periode 1990-2012. Pada tahun 2012, hanya 62 perusahaan yang beroperasi dan mengindikasikan survival rate mencapai 35 persen. Dari keseluruhan tren yang ada, pada periode 1990-2003 dicirikan sebagai periode masuknya perusahaan dan relatif sedikit sekali perusahaan yang keluar. Ada peningkatan masuknya perusahaan pada tahun 1996 dan 1999-2000, dan tepatnya keluar perusahaan pada tahun 1997 dan 2000. Ini adalah periode emas dari investasi Batam secara keseluruhan dan periode penurunan investasi karena adanya krisis keuangan Asia dan kemudian berlanjut dengan adanya tren perlambatan investas global pada tahun 2001. Sejumlah perusahaan yang keluar di tahun 2003 merupakan tahun yang mempengaruhi tren pertumbuhan industri di Batam. Setelah tahun 2003, terjadi perubahan dinamika, antara perusahaan yang keluar dan perusahaan yang masuk. Perusahaan yang keluar terkonsentrasi di dua tahun yang berbeda yakni- 2004 dan 2010, dimana ada 45 dan 48 perusahaan yang keluar (dapat di lihat pada gambar dibawah ini)

Gambar 2: Perusahaan Masuk dan Keluar di Batam (1990-2012)



Sumber: Grunsven dan Hutchinson (2014)

Kemunculan Urbanisasi dan Ledakan Penduduk

Industrialisasi dan urbanisasi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat mengancam karakter fisik lingkungan dan sosial budaya yang ada serta memunculkan tujuan-tujuan wisata dalam kawasan triangle. Degradasi lingkungan adalah bukti dari pembangunan IMS GT (Chia, 1996; Lo dan Yeung, 1996), karena tidak adanya perencanaan dan manajemen yang tepat. Tempat-tempat yang ada menjadi kurang menarik bagi para pengunjung, pariwisata juga mendapat banyak kritikan akibat konsekuensi negatif yang ditimbulkannya (Freitag, 1994). Urbanisasi juga mengganggu populasi kawasan rural/pinggiran dan dapat menyebabkan ledakan migran. Fenomena ini muncul di Batam dan Bintan dimana para pekerja dari seluruh Indonesia dengan latar belakang etnis yang berbeda merasa tertarik untuk mencoba peruntungan disana. Hampir semua pekerjaan yang dituju adalah pekerjaan dengan keterampilan rendah. Pospos (1994: 168) mencatat bahwa kepulauan Riau menghadapi “persoalan-persoalan sosial” seperti salah penempatan masyarakat lokal, angka kejahatan yang meningkat, tingginya biaya hidup dan maraknya area-area yang kumuh”. Di Batam juga muncul persoalan lain ketika masyarakat lokal meminta kompensasi atas penjualan lahan yang dilakukan oleh para developer dari Bintan Beach International Resort (The Straits Times, 2000b). Ada kerusakan yang muncul di luar kawasan resort dan ancaman untuk menghancurkan resort.

Batam memiliki pengalaman terkait dengan arus migrasi. PRI adalah wilayah dengan angka yang tertinggi untuk pertumbuhan populasi, terjadi karena masuknya penduduk yang datang ke PRI dan juga karena tingginya angka kelahiran. 7 persen selama 2005-2010, Special Economic Zone di PRI dan peningkatan hubungan antara PRI dan Singapura serta Johor membuat propinsi ini menjadi lebih menarik bagi orang-orang untuk datang (Ananta, 2016).

Ketegangan Sosial dan Tenaga Kerja

Serbuan para pekerja yang datang ke Batam dari berbagai latar belakang yang hadir di Batam kerap menjadi alasan pemicu terjadinya benturan-benturan sosial. Salah satu bentuk ketegangan sosial di Batam adalah adalah pertarungan antara kelompok-kelompok yang berbeda dan ini sering terjadi di Batam, diantaranya di tahun 2012, 1999, dan 1992 antara kelompok dimana anggotanya mayoritas etnis Batak dan Flores (Bahrum 2009). Sumber konflik dipicu dari perebutan lahan dan pembangunan hiburan-hiburan malam yang meliputi perjudian dan prostitusi (Tim Peneliti Hubungan Internasional 2001). Orang-orang dari beragam kelompok kepentingan seperti mereka yang tinggal di komunitas-komunitas tertentu yang melakukan perlawanan terhadap proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh BIDA, BIFZA ataupun pemerintah kota (Bahrum 2009). Mereka mengklaim bahwa proses yang pembangunan merugikan mereka sebagai penduduk lama.

Ketegangan buruh juga menjadi persoalan sosial lain di Batam. Hal ini dapat dipicu oleh sejumlah alasan. Demonstrasi yang paling umum terjadi yang dipimpin oleh serikat buruh adalah ditujukan kepada pihak Propinsi maupun kota dan tuntutan untuk kenaikan upah kerja dan jaminan sosial. Hal ini menjadi agenda insiden tahunan, biasanya sekitar September dan Oktober, sebelum upah minimum ditetapkan oleh pihak kota, maupun propinsi.

Kadang-kadang ketegangan para buruh juga muncul karena adanya kesalahpahaman antara pihak manajemen dan para pekerja dari perusahaan yang sama, yang menuntut kondisi kerja yang lebih baik. Longgarnya aturan regulasi tenaga kerja Indonesia, maka sekarang kecenderungan yang terjadi adalah para perusahaan bekerjasama dengan para subkontraktor, yang akan langsung berhadapan dengan para pekerja. Hal ini menciptakan ketegangan tersendiri antara dalam hubungan kerja antara para pekerja dan pihak yang mengatur para pekerja. Ketegangan-ketegangan ini secara umum terjadi di Batam, dimana aktivitas-aktivitas manufaktur mendominasi sektor tenaga kerja.

Gambar 3: Perkembangan Tenaga Kerja

Tenaga Kerja Menurut Sektor Lapangan Usaha <i>Work Force Based on Business Sectors</i>				
SEKTOR USAHA <i>BUSINESS SECTOR</i>	JUMLAH TENAGA KERJA <i>TOTAL WORK FORCE</i>			
	WNI <i>INDONESIAN</i>		WNA <i>FOREIGN</i>	
	L/M	P/F	L/M	P/F
Pertanian, Kehutanan, Perikanan <i>Agriculture, Forestry, Fisheries</i>	1,313	177	1,105	-
Pertambangan <i>Mining</i>	737	60	26	1
Industri <i>Industry</i>	101,739	87,469	2,591	192
Gas, Air, Listrik <i>Electricity, Gas, Water</i>	978	199	13	-
Bangunan <i>Construction</i>	32,289	7,583	593	10
Perdagangan, Perhotelan <i>Trading, Hotels</i>	32,905	15,032	1,003	68
Angkutan, Pergudangan, Komunikasi <i>Transport, Warehousing, Communication</i>	4,609	1,012	47	11
Keuangan, Asuransi <i>Finance, Insurance</i>	15,170	10,480	154	6
Jasa <i>Services</i>	32,746	26,241	323	118
Lain-lain <i>Others</i>	103	11	1	-
JUMLAH <i>TOTAL</i>	222,589	148,266	5,856	406
	370,855		6,262	
	377,117 ORANG/PERSON			
TOTAL	: LAKI-LAKI/MALE	228,445	ORANG/PERSON (60,58%)	
	: PEREMPUAN/FEMALE	148,672	ORANG/PERSON (39,42%)	
JUMLAH/TOTAL	377,117 ORANG/PERSON			

Sumber : Pemerintah Kota Batam
Source : Batam Municipality

Gambar 4 : Tenaga Kerja Menurut Sektor Lapangan Usaha

Pertanahan

Konstruksi yang tidak memiliki pegangan hukum yang kuat adalah persoalan serius di Batam karena keterbatasan-keterbatasan geologikal- seperti Bintan atau bahkan Singapura, Batam tidak memiliki perbukitan dan sumber air mineral. Batam sangat bergantung pada ketersediaan air yang berasal dari air hujan. Pada tahun 1979, BIDA telah membangun enam daerah penampungan air. Keenam penampungan air ini dapat menyimpan sampai 6 juta kubik meter air atau memenuhi sekitar 700,000 orang, termasuk untuk penggunaan industri (Nasution 2001).

Master Plan bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja di tahun 1979, berasumsi bahwa populasi Batam tidak akan melewati 700.000 orang (Tim Peneliti Hubungan Internasional 2001). Pada tahun 2004, Batam telah mencapai 591,000 dan jumlahnya terus naik secara tajam. Penggunaan lahan Batam untuk pabrik mencapai 60 persen dari luas 515 kilometer wilayahnya, sementara 40 persen sisanya dipakai untuk pembangunan (Nasution 2001). Pada tahun 2000, sekitar 20.57 kilometer dari wilayah

hutan yang dilindungi sudah rusak karena pembangunan tidak terencana (Tim Peneliti Hubungan Internasional 2001), dan oleh karena itu pemerintah mengalokasikan dana 3 Milyar di tahun 2001 untuk peremajaan hutan (Nasution 2001).

Batam berkembang secara horizontal dengan memaksimalkan sisi komersial untuk jangka waktu pendek dibanding untuk jangka waktu panjang. Untuk menarik investasi, BIDA mengizinkan para investor untuk membangun pulau tersebut secara masif (Tim Peneliti Hubungan Internasional 2001). Karena orientasi pembangunan tersebut, banyak dari lahan Batam yang saat ini tidak dapat dipergunakan.

Batam dan Aktivitas Illegal

Kenichi Ohmae (1995) menyatakan bahwa *growth triangle* adalah salah satu contoh “borderless world”. Ini membuktikan bahwa zona ekonomi transnasional tidak hanya memudahkan arus perpindahan manusia dan modal, namun juga meningkatkan regulasi pergerakan masyarakat Indonesia sendiri. Faktanya, sejak kemunculan *growth triangle*, ada banyak kasus yang muncul terkait perbatasan Indonesia dari Malaysia dan Singapura. Kasus-kasus perdagangan orang dari Indonesia yang melintasi perbatasan, khususnya ke Malaysia, naik secara drastis. Dengan kata lain, bentuk-bentuk pergerakan orang harus secara khusus ditangani, karena mobilitas manusia dapat mengancam keamanan secara luas.

Dengan pergerakan populasi yang massiv ke Batam dan ledakan prostitusi, menjadi suatu persoalan hebat yang meningkat pesat di Indonesia, Beragam kasus perdagangan orang jelas di depan mata, namun belum ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan program-program atau mengkomunikasikan masalah tersebut secara lintas batas. Perdagangan orang justru masih dianggap sebagai masalah “nasional” di ketiga negara tersebut (cf. Porter 1997), yang seharusnya sudah ada kerjasama dengan masyarakat global untuk menangani persoalan ini.

Sejumlah aktivitas illegal terjadi di Batam dan sekitarnya karena kondisi geografis berdekatan dengan perbatasan, khususnya antara Singapura dan Malaysia. Sejarahnya, penyelundupan, dan perompakan adalah aktivitas-aktivitas illegal yang ada di Batam, salah satu dari sekian banyak tempat persembunyian bagi operasi perompakan yang terjadi di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Hasil hutan, Pabrik dan produk-produk lain dari Sumatra juga biasanya melakukan transit di Batam sebelum dikemas keluar negeri tanpa prosedur ekspor yang benar (Djaenuderajat 2009).

Ditambah lagi, persoalan perdagangan manusia yang hadir di Batam. Para pekerja domestik, kontruksi, dan pabrik di perdagangkan dari Pulau Jawa ke Malaysia dan Singapura, terkadang bahkan sampai menembus Eropa ataupun Timur Tengah. Banyak dari mereka yang diperdagangkan adalah kaum perempuan yang umumnya berada di bawah umur. Batam juga berfungsi sebagai tempat transit bagi para migran. Misalnya, para immigran Afghanistan yang menuju Australia berhenti untuk transit di Batam (Tim Peneliti Hubungan Internasional 2001).

Perdagangan seks dan narkoba juga menjadi bagian dari aktivitas-aktivitas ilegal yang muncul di Batam. Banyak dari para pelaku penyedia jasa-jasa ini bukanlah pelaku lintas batas, demikian juga dengan konsumennya. Perdagangan seks menyebar dengan luas termasuk penyediaan jasa singkat dan prostitusi insidental, dimana mereka menawarkan jasa pada klien yang sama di akhir minggu maupun hari libur, dan banyak diantara mereka yang memberikan pelayanan jasa kepada klien selama bertahun-tahun. Biaya dari aktivitas ilegal ini lebih murah. Survey yang dilakukan terhadap para turis perempuan yang ada di Batam menunjukkan bahwa Batam masih menjadi sebuah destinasi yang menarik bagi para wisatawan laki-laki karena hadirnya penawaran-penawaran ilegal ini (Djaenuderajat 2009).

Banyak pengambil kebijakan masih memperdebatkan apa arti perdagangan orang yang sebenarnya. *Trafficking Victims Protection Act* (2000) PBB, mengartikan perdagangan orang secara umum sebagai berikut.

The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons by means of threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power, or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.

Kepulauan Riau menjadi salah satu tempat transit dan pintu masuk untuk perdagangan manusia ke luar negeri. Di Kepulauan Riau kasus perdagangan orang ini tergolong kasus yang sulit ditangani secara maksimal oleh pemerintah, sehingga pemerintah daerah pun menjadi terhambat dalam memberantas kasus ini. Penyebab terhambatnya penanganan kasus ini didominasi oleh ketidakterbukaan pihak terkait dalam mengungkap data pelaku dan korban perdagangan orang. Di daerah Kepulauan Riau yang rawan terjadinya tindakan *trafficking* terdapat di dua pulau yakni pulau Batam dan Bintan. Bisnis prostitusi di Kepulauan Riau, Tanjung Pinang bahkan semakin berkembang. Tanjung Pinang yang merupakan bagian dari Kepulauan Riau masih relatif longgar bagi tindak prostitusi, sehingga menjadi tujuan paling menarik bagi para lelaki asal Singapura dan Malaysia yang menginginkan jasa ini. Di Pulau Batam, selain lokalisasi dan *show room* menyediakan para pelayan seks, hampir di setiap sudut kota juga terdapat karaoke dan diskotik yang menyediakan wanita pemuas nafsu.²

Kepulauan Riau yang letaknya strategis yakni berdekatan dengan Singapura dan Malaysia menjadi salah satu faktor pendukung meluasnya praktik *trafficking* ini. Kasus perdagangan manusia atau *human trafficking* di Provinsi Kepulauan Riau

² Hasil wawancara dengan Hazirwan Rifat, Staf Dinas Pariwisata Propinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang, 20 November 2017. Pkl. 14.00 WIB.

(Kepri) semakin mengkhawatirkan dan jumlah korbannya sejak tahun 2006 hingga saat ini lebih dari 2.000 jiwa dan sebagian besar korban adalah perempuan dan anak. Ironisnya, belum ada satupun kasus tersebut masuk meja pengadilan hingga ditangani secara tuntas. Berikut dibawah ini disajikan tabel data mengenai korban perdagangan orang yang ditangani oleh kepulauan Riau:

Tabel 2. Data Kedatangan WNI-M KPO (Tahun 2005-2015)

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	2005	7.629	3.123	10.752
2	2006	17.667	6.178	23.845
3	2007	25.440	9.353	34.793
4	2008	25.036	10.078	35.144
5	2009	22.866	10.166	33.032
6	2010	15.085	7.086	22.171
7	2011	10.944	4.855	15.799
8	2012	5.372	2.471	7.843
9	2013	13.302	4.895	18.197
10	2014	16.343	6.320	22.663
11	2015	12.599	5.189	17.788
Jumlah		172.283	69.714	241.997

Sumber: Dinas Sosial Kepri

Tabel 3. Jumlah Kedatangan WNI - M KPO Tahun 2015

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Januari	1.152	409	1.561
2	Februari	825	287	1.112
3	Maret	1.470	678	2.148
4	April	1.500	572	2.072
5	Mei	823	369	1.192
6	Juni	1.351	641	1.992
7	Juli	1.459	534	1.993
8	Agustus	927	357	1.284
9	September	1.085	437	1.522
10	Oktober	1.197	559	1.756
11	November	394	167	561
12	Desember	367	112	489
Jumlah		11.550	5.132	17.682

Sumber: Dinas Sosial Kepri

Kasus perdagangan orang ini akan terus bertambah jika tidak ada regulasi yang jelas dari pemerintah soal penempatan TKI di negara lain. Selain itu, pemerintah juga sudah saatnya menindak tegas para pelaku kejahatan perdagangan orang dengan hukuman yang setimpal. Pasalnya hingga saat ini, belum pernah ada satupun kasus perdagangan orang yang masuk ke pengadilan sehingga para pelaku kejahatan tersebut masih leluasa mencari korbannya.

Penutup

Secara umum, konsekwensi dari tingginya pertumbuhan sebagaimana yang disebutkan diatas adalah sebuah fenomena alami yang akan dihadapi oleh kota manapun “yang berhadapan dengan arus investasi yang signifikan”. Kehadiran Industrial Park membawa keuntungan sekaligus kerugian bagi Batam. Keuntungan yang didapat berasal dari masuknya investasi asing yang berasal dari berbagai negara seperti Jepang, Singapura, Amerika Serikat, Malaysia, dan Jerman yang menanamkan investasinya di Batam dalam berbagai sektor antara lain, manufaktur, elektronik, tekstil dan pariwisata. Investasi ini membawa pengaruh positif dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Batam tumbuh menjadi kota metropolitan yang menawarkan banyak peluang bagi para pencari kerja, pemasukan penghasilan bagi penduduk dan daerahnya.

Kerugian yang didapat dari kehadiran Industrial Park melalui kerjasama ekonomi sub regional IMS-GT ini adalah munculnya ledakan penduduk, ketegangan sosial, isu pertanahan, dan aktivitas-aktivitas illegal seperti prostitusi dan perdagangan orang. Ledakan penduduk terjadi akibat kedatangan para migran yang sangat massif ke wilayah ini karena melihat adanya peluang-peluang pekerjaan yang ditawarkan dari masuknya investasi ke Kepulauan Riau. Arus migrasi dan mobilitas penduduk yang tinggi baik melalui perbatasan maupun tidak, dan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang mencari hiburan di Batam dan pulau sekitarnya, memberi peluang terhadap kemunculan berbagai persoalan domestik yang membutuhkan penanganan serius yaitu prostitusi dan perdagangan orang. Persoalan-persoalan sosial ini patut mendapatkan perhatian dari berbagai pihak guna menemukan penanganan yang tepat.

Bibliografi

Buku

Abdullah, F. (1996) IMS-GT: Johor’s experience. Dalam I. Lim (ed) Growth Triangles in Southeast Asia: Strategy for Development (pp. 191-204). Kuala Lumpur: ISIS Malaysia.

Ananta, Aris. 2016. *The Population of The SIJORI Cross-Border Regions* Dalam Hutchinson, Francis E & Terence Chong (eds), *The SIJORI Cross Border Region Transnational Politics, Economics, and Culture*. Singapura: ISEAS Publishing.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik dan United Nations

- Population Fund. *Indonesia Population Projection 2020-2035*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2013.
- Badan Pusat Statistik. *Population of Riau, Results of the 2000 Population Census*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2001.
- Badan Pusat Statistik. *Sensus Penduduk 2010 Pedoman Pencacah: Buku 6 (2010 Population census guide to enumeration: Book 6)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2009.
- Bahrum, Batam Bandar Dunia Madani: Mengusung Idealisme Pembangunan lokal di tengah-tengah paradoks global (Batam Port of Civil World: Carrying local development idealism amidst global paradox). Batam: Apple Print, 2009.
- Batam Indonesia Free Zone Authority (BIFZA). "Batam Indonesia Free Zone Authority CD 2013". Batam: BIFZA, 2013.
- Bhaskaran, Menu. 2016. *The Political Economy of Closer Relations A Perspective from Singapore* dalam Hutchinson, Francis E & Terence Chong, *The SIJORI Cross Border Region Transnational Politics, Economics, and Culture*. Singapura: ISEAS Publishing.
- Chia, S.Y. dan Lee, T. Y. (1993) Subregional economic zones: A new motive force in Asia Pacific development. Inc. F. Bergsten dan M. Nolands (eds) *Pacific Dynamism and International Economic System* (pp. 225-69). Washington: Institute for International Economics.
- Debrah, Y.A. (1993) 'Strategies for Coping with Employee Retention Problems in Small and Medium Enterprises (SMEs) in Singapore'. *Entrepreneurship, Innovation and Change*, 2 (3): 273-305.
- Djaenuderadjat, Endjat. *Sejarah wilayah perbatasan Batam-Singapura: 1824-2009* (The History of Border Region of Batam-Singapore: 1824-2009). Depok: Gramata Publishing, 2009.
- EAAU, Growth Triangle of South East Asia. Canberra: Department of Foreign Affairs and Trade, East Asia Analytical Unit, 1995.
- Hutchinson, Francis E & Terence Chong, 2016. *The Sijori Cross Border Regions More Than a Triangle* dalam Hutchinson, Francis E & Terence Chong, *The SIJORI Cross Border Region Transnational Politics, Economics, and Culture*. Singapura: ISEAS Publishing.
- JSEPU. *Pelan Ekonomi Negeri Johor, 1990-2005*. Johor Bahru: State Government of Johor Darul Ta'zim, Economic Planning Unit, 1989.
- Kumar, s.; Lee Tsao, Y.: A Singapore Perspective. Dalam Lee Tsao, Y (ed), *Growth Triangle: The Johor-Singapore-Riau Experience*. Institute of Southeast Asia Studies and Institute of Policy Studies, Singapore 1990.
- Lee Tsao Yuan, ed. *Growth Triangle: The Johor-Singapore-Riau Experience*. Singapore, Institute of Southeast Asian Studies, 1991.
- Macleod, S. Dan McGee, T. 1996. "The Singapore-Johor-Riau Growth Triangle: An Emerging Extended Metropolitan Region". Dalam F. Lo dan Y. Yeung (eds) *Emerging World Cities in the Asia Pacific*, New York: United Nations Press.

- Myo Thant, Min Thang dan Kakazu, H. (eds) *Growth Triangles in Asia: A New Approach in Regional Economic Cooperation*. Manila: ADB.
- Naidu, G. "Johor-Singapore-Riau Growth Triangle: Progress and Prospects". Dalam *Growth Triangles in Asia: A New Approach to Regional Economic Cooperation*, Myo Thant, Min Thang dan Hiroshi Kakazu. Hong Kong: Oxford University Press, 1994.
- Nasution, Surya Makmur. *Batam: Jangan sampai arang habis besi binasa (Batam: Lest Charcoal Depletes, Iron Perishes)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Nur, Yoslan. "L'île de Batam a l'ombre de Singapour: Investissement Singapourien et dépendance de Batam" (*Batam Island in the shadows of Singapore: Singaporean Investment and Batam's Dependence*). *Archipel* 59 (2000): 145-70
- Ohmae, K. 1995. *The End of The Nation State: the Rise of Regional Economies*. New York: Free Press.
- Pangestu, M: An Indonesian Perspective, pp. 77-115. Dalam Lee tsao, Y. (ed), *Growth Triangle: The Johor-Singapore-Riau Experience*. Institute of Southeast Asian Studies and Institute of Policy Studies, Singapore, 1990.
- Rodan, G. (1993). "Reconstructing Division of Labour: Singapore's New Regional Emphasis". Dalam Higgot, R., Leaver, R dan Ravenhill J. (eds) *Pacific Economic Relations in the 1990a: Conflicts or Co-operation?* Sydney: Allen & Unwin.
- Sum, N-L. (1996) 'The NICs and Competing Strategies of East Asian Regionalism', Gamble, A. Dan Payne, A. (eds) *Regionalism and World Order* (London: Macmillan) 207-46.
- Tan Khee Giap, Mulya Amri, Linda Low dan Kong Yam Tan: *Competitiveness Analysis and Development Strategies for 33 Indonesia Provinces*. New Jersey: World Scientific, 2013.
- Tang, M. And Thant, M. (1994) *Growth Triangles: conceptual and operational consideration*. dalam Thant dan H. Kakazu (eds) *Growth Triangles in Asia: A New Approach to Regional Economic Cooperation* (pp. 1-27). Oxford: Oxford University Press for the Asia Development Bank.
- Thant, M. (1996) Overview. Dalam M. Thant dan M. Tang (eds) (1996) *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: Theory to Practice* (pp.1-25). Manila: Asian Development Bank.
- Tim Peneliti Hubungan Internasional, ed. *Pembentukan Kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas Batam (The Formation of Batam Port and Free Trade Zone)*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayaran Informasi, Sekretariat Jendral DPR-RI, 2001.
- Toh, M.H. dan Low, L. (eds) (1993) *Regional Cooperation and Growth Triangles in ASEAN*. Singapore: Times Academic Press. US-AEP (1999) *Place –based public policy in Southeast Asia: Developing, managing and innovating for sustainability*. Washington: United States-Asia Environmental Partnerhip. <http://www.useap.org/policy/reportch4.htm>. accessed 2 January 2017.
- Toh, M.H. "Development of Singapore's Electronics Sector". Dalam *Architects of Growth? Su-national Governments and Industrialization in Asia*, (ed) Francis

E. Hutchinson. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2014.

Yeoh. C., Lau, G.T.Goh, M. Dan Richardson, J. (1992) *Strategic Business Opportunities in the Growth Triangle*. Singapore: Longman.

Yeoh, C.D. Worthington dan Wong S.Y. “ Singapore’s Pursuit of Location Advantages in Indonesia and Vietnam”. *Asia Pacific Journal of Economic and Business* 8, no. 1 (2003): 44-59.

Jurnal

Chang T.C. (2001) “Configuring new tourism space: exploring Singapore’s regional tourism forays”. *Environment and Planning A*, vol. 33, pp. 1597-619.

Cunningham, B. Dan Debrah, Y.A (1995) “ Skills for Managing Human Resources in a Complex Environmnet”, *International Journal of Human Resource Management*, 6 (1): 79-101.

Cunningham, B. Dan Debrah, Y.A (1995) “ Skills for Managing Human Resources in a Complex Environmnet”, *International Journal of Human Resource Management*, 6 (1): 79-101.

Debrah, A.Y., McGovern, I. Dan Budhwar, P. (2000) “ Complementarity or competition: the development of human resources in a Southeast Asia Growth Triangle: Indonesia, Malaysia and Singapore”. *The International Journal of Human Resource Management* 11 (2): 314-35.

Kumar, S., and Siddique, S (1994)’ Beyond economic reality: new thoughts on the growth triangle’, *Southeast Asian Affairs*, 47-56.

Phelps, N.A (2004) “ Triangular diplomay writ small: the political economy of the Indonesia_Malaysia_Singapore growth triangle”, *The Pacific Reviews* 3(17): p. 341-68.

Scalapino, R., "The United States and Asia: Future Prospects," *Foreign Affairs*, Winter, 1992, pp.19-40.

Smith, S.L.D. “ The Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle: A Political and Economic Equation”. *Australian Journal of International Affairs* 51, no. 3 (1997). 369-382.

Yeoh, C.D. Worthington dan Wong S.Y. “ Singapore’s Pursuit of Location Advantages in Indonesia and Vietnam”. *Asia Pacific Journal of Economic and Business* 8, no. 1 (2003): 44-59.

Working Papers

Grunsvan, Leo van and Francis E. Hutchinson. “20 Years On: The Evolution of the Electronics Industry in the SIJORI Cross-Border Region”. ISEAS Economics Working Paper. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2014.

Tsao Yuan, L. (1995) “ The Johor- Singapore-Riau growth triangle: effect economic integration”. 30 Nov-3 Des 1992. Bangkok Thailand, pp. 269-82.

Laporan

Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2016.

Yayasan Rumah Singgah Singgah Engku Puteri Provinsi Riau, 2009.

Surat Kabar

Straits Times. "Growth Triangle not like EC, says BG Lee", 5 June 1990.

_____." Johor Complains about Singapore Land Reclamation," 25 February 2002.

_____." Johor Gears up for Port Battle", 17 March 2002.

_____." Singapore, Jakarta to boost Economic Links". 14 March 2012

Imperialisme Melalui Disinformasi Makanan Sehat di Amerika: Studi Kasus Columbus

Umi Oktyari Retnaningsih¹

¹Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Riau, Pekanbaru

Corresponding E-mail: retnaningsih.1@buckeyemail.osu.edu

Abstrak



Food as a basic need for every human being is an effective way to imperialize developing countries like Indonesia by persuading that imperialist's life styles like food are much prestigious or superior. This study seeks to explore the influence of American diet styles through disinformation to Indonesians who live, visit, and communicate with the writer. Data were collected from participant observation, informal interview, and comments in emails, facebook and telephone conversations of Indonesians I met and interacted with during my doctoral study in Columbus and did gardening. To get detailed data of preferential, healthy and nutritious foods and knowledge of vegetables, the author conducted informal interviews and conversations, observations, and informal documents' analyses of facebook's comments. The observation, informal interviews, conversations in the field (garden), telephone conversations, and facebook comments showed that consuming imported and American foods are prestigious regardless the nutrition and health need. Cultural disinformation of "If you eat like us, you are going to be like us" is effective due to many Indonesians are disinterested in and disregarded of local Indonesian foods and vegetables. The research shows cultural imperialism by American corporations through life styles for food is practicable, effective, and long lasting.

Kata Kunci

Disinformation, cultural imperialism, nutritious and healthy foods, and Indonesian foods and vegetables.

Pendahuluan

Arti pentingnya makanan dalam tingkatan lokal maupun internasional sudah disampaikan oleh banyak ahli termasuk pemikir ilmu hubungan internasional, Morgenthau yang menyatakan "Nations self-sufficient in food are better placed than nations which import food," "the military preparedness of a nation is dependent upon adequate supplies of food" dan "Armies travel on their stomach." Bahkan kekuatan nasional suatu negara dipengaruhi oleh kesehatan penduduknya "A nation inhabited

by unhealthy, unemployed, lazy, unskilled, illiterate, and ignorant people is bound to be a weak and inactive power.” Kesehatan dipengaruhi oleh jenis makanan yang dikonsumsi sebagaimana dinyatakan oleh Hippocrates yang dikenal sebagai “father of medicine (bapak obat). Hippocrates mengajarkan bahwa segala macam penyakit penyebabnya alam, maka solusinya “Let food be thy medicine and medicine be thy food” alias “biarkan makanan menjadi obatmu dan mengobati melalui makananmu.” Negarawan Winston Churchill menyatakan "Healthy citizens are the greatest asset any country can have." President Amerika Harry S Truman mengatakan bahwa "We should resolve now that the health of this nation is a national concern; that financial barriers in the way of attaining health shall be removed; that the health of all its citizens deserves the help of all the nation." Anthropology terkenal Margareth Mead menegaskan “it is easier to change a man's religion than to change his diet.” Pejuang Perang Dingin, Henry Kissinger menyatakan secara terbuka akan menggunakan makanan sebagai senjata (Food as a weapon).

Imperialisme yang berusaha untuk menguasai bangsa lain mempraktekkan cara penguasaan dengan mendominasi ataupun mendikte gaya hidup mereka, salah satunya caranya mempengaruhi pola makannya. Disinformasi pola makan dilakukan oleh korporasi-korporasi dunia, terutama dari Amerika Serikat. Ironi akan disinformasi makan menyebabkan kondisi yang memprihatinkan seperti yang dinyatakan oleh Mark Bittman bahwa “1 billion people in the world are chronically hungry. 1 billion people are overweight.” Drew Carey menegaskan “Eating a crappy food isn’t a reward – It’s punishment.” Laporan terakhir mengindikasikan bahwa satu dari tiga atau sekitar 35,4 persen orang dewasa di Indonesia mengalami masalah berat badan sehingga Kementerian Kesehatan Indonesia mencanangkan peningkatan kesehatan dan nutrisi masyarakat melalui “the National Medium Term Development Plan” salah satunya dengan memperkenalkan program “People Lifestyle Movement” melalui “Germas (Gerakan makan sayur)” dan ternyata kesadaran masyarakat akan pentingnya “healthy diet (pola makan yang sehat masih minim) (The Jakarta Post, 2019). Reverend Sun Myung Moon menyerukan himbauan akan pentingnya keluarga “Save the family and you will save the world.” Keluarga Indonesia seharusnya memelihara kearifan lokal dalam hal nutrisi, mengingat hampir semua budaya selalu memasak dengan bumbu beraroma enak dan menyehatkan seperti cabe (chili), daun jeruk (kaffr lemon leaves), daun salam (bay leaves), kayu manis (cinnamon), asam (tamarind), jahe (ginger), kunyit (turmeric), dan daun serai (lemongrass) (Indonesia Expat, 2018). Salah menu Indonesia yang sehat tapi enak disukai para ekspatriat adalah “gado-gado” yang diterjemahkan sebagai Indonesian salad berisi campuran sayuran kacang panjang, kobis, toge, timun, dan tempe atau tahu dengan kuah sambal kacang. Makanan ini sangat cocok bagi vegetarian.

Amerika Serikat sebagai negara paling berpengaruh di dunia dan menjadi salah satu pemenang globalisme mengalami permasalahan disinformasi makanan yang sehat.

Pop culture makanan melalui film sangat mempengaruhi gaya hidup di negara-negara lain termasuk Indonesia. Padahal orang Amerika sangat kurang dalam mengonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, dan padi-padian yang prosesnya masih menyisakan vitamin, mineral, dan serat (whole-grain). Sekitar 90% orang American mengonsumsi sodium melebihi dari yang direkomendasikan diet yang sehat. Jill Filipovic dalam twitternya menyatakan bahwa gaya makan orang Amerika membunuh kita (The way America eats is killing us). Centers for Disease Control and Prevention data menunjukkan bahwa hanya 12.2% of orang dewasa America cukup konsumsi buah-buahan dan 9.3% untuk sayuran. McLeod (2001, 54) mengusulkan bahwa segala bentuk tata cara colonial harus dilawan dengan meninjau kembali asumsi yang telah diajarkan tentang apa yang disebut sebagai alami (nature) dan benar (true).

Mengacu pada pentingnya gaya hidup makan demi kesehatan dan kesejahteraan bangsa atau “You are what you eat,” saya mengajukan pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya:

1. Bagaimana pengaruh imperialism Amerika Serikat melalui gaya hidup makan terhadap masyarakat Indonesia?
2. Pengalaman apakah yang saya dapatkan ketika hidup di Amerika selama 8 tahun menjadi petani gurem organik di kebun kampus setelah berinteraksi dengan bangsa lain yang bisa dijadikan pelajaran akan kesadaran terhadap pemeliharaan budaya pola makan Indonesia yang sehat dan enak?

Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam tentang bagaimana gaya makan Amerika mempengaruhi masyarakat Indonesia dan pendapat beberapa bangsa lain yang penulis melakukan pendekatan riset kualitatif terhadap orang Indonesia yang berkunjung ke Amerika baik sebagai permanent resident, legal alien resident, visitor, dan juga komunikasi melalui telepon maupun facebook. Riset bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik (better understanding), menemukan pengetahuan (finding knowledge), ataupun informasi. Riset dengan pendekatan kualitatif memberikan kesempatan untuk mendokumentasikan pengalaman dunia nyata yang dialami untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu social yang terabaikan (Goetz & LeCompte, 1984). Melalui pendekatan ini praktek yang dilakukan orang secara detail bisa dilakukan melalui observasi, interview, dan menulis riset (Gobo, 2008; Roller dan Lavrakas, 2015). Kekuatan dari studi kualitatif memungkinkan pembaca untuk melihat bagaimana partisipan memandang dunia ini (McCracken, 1988). Observasi partisipatif di lapangan melibatkan “active looking, improving memory, informal interviewing, writing detailed field notes, and perhaps most importantly, patience” (DeWalt & DeWalt, 2002, p. vii). Riset ini sifatnya empiris dengan fakta empiris, yaitu cara pengumpulan pengetahuan melalui pengamatan dan pengalaman langsung maupun tidak langsung. Studi dilakukan

dengan pengumpulan dan analisa data berdasarkan pengamatan ataupun pengalaman di lapangan terhadap sikap dan perbuatan dalam konsumsi makanan, wawancara pribadi secara informal tentang preferensi konsumsi makanan, sayur-sayuran, pembicaraan telepon, dan respon di postingan facebook.

Studi ini akan memberikan kontribusi peningkatan kesadaran masyarakat terutama Indonesia tentang arti pentingnya kesehatan melalui gaya hidup makan, sehingga kekuatan nasional kita bisa meningkat. Culinary diplomacy melalui pengenalan makanan Indonesia yang enak dan sehat sebagai ciri khas bangsa bisa dikembangkan. Pengalaman penulis berinteraksi dengan beberapa bangsa selama tinggal di Amerika Serikat menunjukkan bahwa makanan bisa menjadi pengingat negara Indonesia dan menarik minat mereka untuk berkunjung ke Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Indonesia merupakan negara agraris dengan 2 musim yang memungkinkan untuk menghasilkan buah-buahan dan sayuran tropis dalam jumlah yang sangat berlimpah. Hampir semua buah-buahan tropis maupun sayuran bisa tumbuh di Indonesia sebagaimana digambarkan dalam syair lagu “tonggak kayu dan batu jadi tanaman.” Pedagogi keadilan sosial mengajarkan bahwa pengalaman merupakan sebuah penguatan yang membentuk perspektif kita, sehingga orang akan belajar sungguh-sungguh dari pengalaman orang lain yang berbeda dengan yang pernah dialaminya. Scott menyatakan bahwa pengalaman pasti ada perantaranya dan merupakan hasil interpretasi dari dunia sosial (Scott, 1992, p. 37). Gramsci menyatakan bahwa power dari kekuatan yang dominan dapat dintegrasikan dalam undang-undang, aturan, norma, kebiasaan, dan bahkan melalui sesuatu yang sifatnya umum melalui konsensus yang disebutnya sebagai “hegemony” (Gramsci, 1971). Globalisasi budaya melalui makanan oleh korporasi Amerika menjadi ikon kekuatan budaya Amerika seperti pesan yang disampaikan oleh McDonalds “If you eat like us, you are going to be like us.” Disinformasi pola makan ini yang mengarah pada gejala obesitas berhasil meyakinkan banyak orang di dunia bahwa makanan Amerika memang lebih hebat atau bergengsi. Banyak orang di dunia merasa bahwa budayanya jauh lebih rendah dari Amerika dan bisa menjadi hebat dengan mengubah pola makannya sesuai dengan yang menjadi idolanya. Banyak budaya di dunia perlahan-lahan lenyap karena pengaruh korporasi dan budaya Amerika yang dahsyat. Sebagian besar korporasi besar Amerika memfokuskan pada konsep bahwa budaya dapat digantikan tapi pesannya tetap sama. Topik globalisme akan berkaitan dengan imperialisme budaya yang ditandai dengan menduniannya barang-barang konsumsi seperti: makanan, pakaian, dan music yang dilakukan pemaksaan budaya yang dominan (biasanya budaya Amerika dan Barat) terhadap pihak-pihak yang budayanya lemah (Tomlinson, 1999, p. 80). Kolonialisme yang berujuan untuk mendapatkan keuntungan uang telah meningkat jadi yang imperialisme yang berusaha untuk menguasai pandangan hidup (way of life) (Chakrabarti, 2011). Imperialisme dilakukan melalui kuliner dengan mengubah gaya

hidup makan masyarakat ataupun bangsa yang menjadi sasarannya. Contoh kasus yang dilakukan Inggris di Kenya dilakukan melalui makanan selain politik divide et impera dan pendudukan militer. Makanan tradisional dan metode pemasakan serta penyajiannya dianggap rendah tak berkualitas kemudian digantikan dengan makanan pihak kolonial (Kobuthi, 2019). Imperialisme merupakan salah satu jenis dominasi dan hubungan kekuasaan bisa berupa hubungan ekonomi di bawah kapitalisme swasta yang bertujuan untuk memperluas pasar. Galtung (1971) menegaskan adanya imperialism yang sifatnya struktural (dominasi negara center terhadap negara periferi) dan ketergantungan budaya. Disinformasi berhasil mengalihkan hubungan yang harmonis antara elit korporasi di negara center (Amerika Serikat) dengan elit di negara periferi (Indonesia) untuk mempengaruhi life style non-elit (bukan pengusaha tapi consumer produk) agar mereka mendapatkan keuntungan besar melalui perluasan pasar makanan kurang sehat. Penyebaran data ataupun fakta yang ditelikung ataupun dibelokkan isinya secara sengaja seluas mungkin merupakan disinformasi “manipulative in nature, intention, public issues, and dissemination.”

Bangsa Aztec yang terkenal tinggi kebudayaannya berhasil dipengaruhi gaya hidup makanannya dari jagung dan segala turunannya dikombinasikan dengan sayur kacang-kacangan yang kaya protein dan gambas (squash) yang mudah ditanam bersama dengan buah apokat yang kaya lemak nabati, cabe, tomat, bawang bombay, bayam (amaranth), kacang mete, kacang tanah, ubi jalar, bengkoang (jicama), dan berbagai spesies kaktus. Kekuatan imperialis melalui para kapitalis berhasil meyakinkan bahwa masyarakat tradisional yang bisa hidup dari alamnya yang subur adalah terbelakang (backward) sehingga perlu dimoderenkan. Kritik yang dilakukan oleh Rostow (1955) mengatakan bahwa aliran (discourse) pembangunan dan modernisasi (development and modernization) menggantikan kearifan dan pengetahuan lokal. Cabral (1973) melalui bukunya *Return to the source* mendesak para pembacanya untuk berjuang agar kebudayaannya tetap eksis dari pengaruh colonial dan imperialis Barat. Sumber daya budaya dan nilai-nilai local merupakan modal utama untuk melawan kekuatan colonial dan imperium, sebagaimana Cabral (1973, 55) menyatakan:

It is understood that imperialist domination, by denying the historical development of the dominated people, necessarily also denies their culture development. It is also understood why imperialist domination, like all other foreign domination, for its own security, requires cultural oppression and the attempt at direct or indirect liquidation of the essential elements of the culture of the dominated people.

Kaitan antara produksi dan konsumsi di perekonomian global saat ini dilakukan melalui globalisasi budaya dengan homogenisasi instrumennya melalui hegemoni bahasa, gaya berpakaian, dan termasuk gaya makannya (Appadurai, 1990).

Kesadaran akan kekayaan plasma nutfah Indonesia terutama sayuran dan buah-buahan masih rendah. Peningkatan kesadaran akan ini bisa dilakukan sebagaimana riset yang

dimuat dalam jurnal *Environment and Behavior* oleh Nicole Sintov mengenai konsep keilmuan “spillover” di mana tindakan seseorang akan berpengaruh terhadap orang lain (one behavior prompts another (Crane, 2017). Tokoh-tokoh panutan bisa membantu dalam usaha penyadaran ini. Diakui bahwa produk buah-buahan dan sayuran memang cepat merosot mutunya sehingga beresiko menurunkan keuntungan atau diawetkan dengan pengalengan. Ada kecurigaan bahwa gaya hidup melalui makan yang kurang sehat sengaja diciptakan oleh perusahaan-perusahaan besar dan para dokter, karena bila masih ada orang sakit mereka masih bisa menghasilkan duit. Tak ada perusahaan yang memproduksi obat, rumah sakit, dan dokter yang bisa eksis kalau setiap orang sehat (No company, hospital or doctor can survive if every person is healthy) (Ketogenik, 2019). Amerika merupakan tempat yang besar dimana McDonald telah merasuk di hati dan jiwa budaya makanan (McDonald’s is hardly the heart of soul of our food culture). The value of indigenous crop, which are nutritious and resistant, is at last being recognized (Gernansky, 2015). Makanan ada di budaya manapun dan bahkan dikatakan bahwa makanan berkaitan dengan perasaan cinta dan kepuasan. Isu pangan berkaitan dengan fenomena dependendi.

Dalam sebuah artikel jurnal yang diterbitkan BMC 14 Februari 2017 menunjukkan bahwa berdasarkan statistik pemrosesan makanan yang dengan energy yang berlebihan menurunkan pola makan orang Amerika rata-rata kandungan protein, serat, vitamin A, C, D, dan E, seng, potassium, fospor, besi, dan kalsium merosot, sementara karbohidrad, gula tambahan, dan lemak jenuh meningkat. Menurut Council of Responsible Nutrition (CRN) 75% orang Amerika mengkonsumsi vitamin tambahan dan jumlahnya meningkat setiap tahun dan di tahun 2018 mengalami peningkatan 10%. Kebutuhan konsumsi sayuran dan buah-buahan yang normal adalah 210 kg/tahun (Biel, 2016).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama tinggal di Amerika hampir 9 tahun sejak September 2010 hingga akhir Juni 2019 penulis mendapatkan bahwa makanan-makanan Amerika yang punya franchise di Indonesia seperti McDonald, KFC, Pizza Hut, dan produk-produk lain yang terkenal termasuk minuman pakatnya berupa soft drink seperti coca cola sangat dikenal di Indonesia dan dianggap sebagai makanan yang bergensi. Hal ini sangat bertentangan dengan kenyataan di negara asalnya Amerika, dimana makanan tersebut dianggap sebagai makanan murahan dan cepat saji (junk food). Kandungan nutrisinya pun sangat miskin sayuran dan serat. Sebuah hamburger hanya akan berisi sepotong tomat tipis, selemba daun slada, dan pickle (acar/asinan timun yang jelas sudah kehilangan vitamin maupun kesegaran bonus pengawet), tentu saja tak lupa daging giling yang sudah dibentuk bulat dan selemba keju. Sandwich hampir mirip dalam kandungan sayurinya, dan hot dog yang cuma roti dibelah diisi sosis yang jelas tanpa sayur. Sedangkan produk KFC, Canes sebagai contoh merupakan ayam goreng tepung deep fryer yang minyaknya dipakai berkali-

kali tanpa sayuran sama sekali. Mengonsumsi makanan seperti ini tak menjadi masalah ketika waktu makan sangat terbatas sehingga butuh waktu cepat. Dalam berbagai kesempatan penulis mengamati bahwa mereka memang menyukai dan menikmati menu-menu junk food seperti itu, seperti dialog yang terjadi setelah acara wisuda selesai: “Selamat ya putrinya sudah lulus program master. Ayo kita makan siang, pasti sudah sangat lapar. Mau makan di mana? Mereka menjawab belum tahu, terserah anaknya yang wisuda. Mengingat mereka sudah 2 hari di Amerika pasti rindu masakan Indonesia atau Asia seperti masakan rumah (homemade), makanya kita tawarkan restoran-restoran Asia yang enak. Ternyata respon mereka “Kami mau makan KFC saja, karena suka sekali.” Pertanyaan lain yang diajukan adalah “selama 2 hari ini sudah makan di mana saja?” ternyata jawabnya cukup mengejutkan “Kami selalu pergi McDonald, Wendy’s, atau KFC.” Dari dialog ini jelas bahwa pertimbangan membeli makanan cepat saji (fast food) bukan karena waktunya terburu-buru tetapi kepuasan. Ketika ada acara-acara latihan menari, rapat, ataupun pertemuan untuk acara makan siang ataupun makan malam mereka lebih menyukai ayam Canes daripada membeli bumbu pecel kemasan impor dari Indonesia dengan sayuran yang murah di sana seperti brokoli, bunga kol, kobis, atau kale. Dalam peristiwa lain kawan-kawan suami yang menelepon sering menyatakan “Enak ya mas tinggal di Amerika, bisa beli KFC, McDonald, Wendy’s, dan lain-lain sepuasnya, asli kualitas impor lagi.” Ketika dijawab “Oh tidak, kami jarang sekali membeli dan makan makanan seperti itu” dan timbul pertanyaan “Kenapa dan apa yang dimakan?” jawab suami: “Kami selalu masak sendiri di rumah supaya sehat, enak, irit, dan sesuai dengan selera lidah Indonesia” dan ditanya apa saja masakannya. Suami menjelaskan:

Kami masak balado terong dan tempe, sayur lodeh kacang panjang, soto ayam pakai toge dan kol, gulai kale, urap, lotek, dan pas kita berkebun dari bulan Mei sampai Oktober ketika kita bisa menanam bayam, kacang panjang, buncis, kangkung, kemangi, tomatillo, kucai, ubi jalar, cabe rawit dan keriting, dan tanaman lain, kita selalu masak menu Indonesia terutama sayur bening bayam dan buncis, cah kangkung, dan lotek/pecel.

Dialog di atas sangatlah memprihatinkan mengingat bahwa kualitas impor dianggap jauh lebih bagus dibandingkan yang dimiliki lokal. Perasaan inferior terhadap budaya bangsa lain seperti milik Amerika, melemahkan keunggulan budaya Indonesia seperti makanan sehat bergizi. Dalam pemikiran banyak orang Indonesia, kami sekeluarga dianggap tidak mau dan tak mampu memanfaatkan kesempatan menikmati makanan-makanan kelas dunia yang terkenal. Ketika dijelaskan bahwa makanan hasil masakan rumah tangga bernilai tinggi apalagi kalau sayurannya organik dan segar. Fakta bahwa ternyata situasi yang berkebalikan: di Indonesia sayuran dan buah-buahan segar yang organik harganya cukup murah dan bisa dibeli dalam berbagai kesempatan; sedangkan di Columbus yang mengenal 4 musim cukup mahal. Apalagi anak-anak Indonesia yang sudah terbiasa mengonsumsi makanan cepat saji, banyak yang tidak mau makan

sayuran. Banyak anak Indonesia yang masih dalam usia pertumbuhan menyukai mie instan tanpa sayuran.

Pengalaman selama berkebun di tanah milik kampus yang disewakan kepada mahasiswa yang tinggal perumahan mahasiswa yang sudah berkeluarga memberikan bukti bahwa banyak orang Indonesia yang kurang menghargai sayuran organik yang sehat dan bergizi. Ada beberapa istri dari mahasiswa yang kuliah di sana penasaran sekali dengan kebon yang kami sewa. Rasa penasaran mereka tidak diimbangi dengan pencarian kesempatan untuk datang ke kebon yang dibuktikan dengan janji untuk datang, berkali-kali tidak ditepati. Ketika mereka datang ke kebon langsung, ekspresinya menunjukkan rasa penasaran terhadap tanaman yang ada. Ternyata ada yang tidak tahu karena belum pernah melihat tanaman kacang panjang seperti apa. Yang paling memprihatinkan adalah banyak yang tidak tahu tanaman ciplukan (ground cherry) yang seluruh bagian tanaman bisa dijadikan obat herbal dan bisa tumbuh di Indonesia dengan gampang, dan bahkan sempat dianggap sebagai tanaman yang tidak diinginkan alias gulma.

Sayuran organik yang ditanam di kebon milik kampus yang disewakan selama hampir 6 bulan dari awal bulan Mei sampai akhir Oktober sebagai masa yang paling memungkinkan untuk bercocok tanam di daerah 4 musim terkenal di kalangan petani lain yang berstatus mahasiswa dari Amerika maupun negara lain. Penjagaan mutu organik kami tempuh dengan membeli pupuk organik yang harganya hampir 4X lipat dari yang non-organik, memakai kompos sisa sayuran dan kulit buah-buahan di rumah tangga. Gulma rumput yang tumbuhan jauh lebih cepat dari tanaman yang diinginkan dibasmi secara natural dengan dicabuti dengan tangan dibantu alat-alat sederhana. Untuk pencegahan serangga di antara tanaman cabe, kacang panjang, dan tomat ditanami spesies tanaman yang menghasilkan aroma yang tidak disukai serangga terutama kemangi (sweet lemon basil). Penanaman kacang tanah disela-sela tanaman ditujukan untuk menghasilkan nitrogen secara alami. Salah satu petani gurem di kampus asli Amerika menyatakan: "Hey Umi! Do you know what garden plots you had last year? I'm going to try to request yours because I know they've been treated well." Banyak mahasiswa dari negara lain seperti dari China, Taiwan, Korea Selatan, Zimbabwe, Srilanka, India, Turki, dan lain-lain suka jalan melewati plot kami sambil melihat-lihat tanamannya. Pada saat ketemu, mereka selalu menyatakan "your garden is very good, probably the best" dan berikutnya menanyakan "how many plot do you have? Dengan jawaban 4 atau 6 mereka geleng-geleng kepala tanda kagum, karena mereka punya 1 plot saja tak terurus. Rasa penasaran lain adalah dengan jenis tanaman sayuran yang asing seperti bayam (amaranth), kangkung (water spinach), ciplukan (ground cherry), tomatillo, kacang panjang (long bean), dan cabe rawit (Thai chili). Pengalaman yang paling mengejutkan ketika bayam (amaranth) yang harganya sangat murah di Indonesia dan bahkan tak bernilai ternyata sangat disukai orang China bagian yang selatan, India, Srilanka, Bangladesh, dan Zimbabwe. Bukti yang ada, saya pernah

pernah menangkap sekitar 7X orang yang memasuki plot milik kami karena mencuri bayam dan bahkan sampai diadukan ke manajemen perumahan hingga sidang pelanggaran trespassing yang mengakibatkan penyewa plot dicabut haknya untuk berkebun. Dalam kasus lain seorang professor dari China yang mengajar di tempat saya kuliah tertangkap basah mengambil bayam dan sempat terjadi perdebatan sengit.

Pengetahuan dan keingintahuan akan tanaman sayuran yang sehat bergizi masih rendah. Banyak teman yang dibesarkan di kota kecil tidak bisa membedakan antara tanaman dengan tumbuhan. Mereka tidak bisa membedakan antara tanaman bayam (amaranth) dengan gulma, seperti dialog yang terjadi dengan kawan saya yang mau sayuran bayam dan disuruh panen sendiri ke ladang, karena waktu kunjungan tidak sinkron “Kenapa kemarin tak jadi ke ladang saya panen bayam sendiri, kan sudah kuajak ke plot milik kita supaya tak salah tempat sekaligus kukenalkan kepada pekebun lainnya bahwa dirimu temanku? Responnya: “Saya takut salah panen, masih tak yakin membedakan mana tanaman bayam mana yang bukan.” Keraguan ini masuk akal karena di antara tanaman bayam ada tanaman yang mirip bayam tapi bukan, dan kata kawan yang berasal dari Srilangka biasa dikonsumsi. Beberapa teman Indonesia ada yang tidak tahu tanaman kacang tanah, apalagi fungsinya ditanam di antara tanaman cabe rawit maupun cabe keriting. Bahkan peladang (gardener) orang Amerika tidak bisa membedakan antara tanaman tomat dan hemlock ketika masih muda. Perlu diketahui bahwa tanaman hemlock sangat beracun.

Budaya menentukan preferensi makanan termasuk sayuran. Di beberapa daerah daun ubi jalar yang banyak gizi dan seratnya serta mahal harganya di Columbus ternyata tak disukai dan boleh dikatakan sebagai makanan rendah, karena di daerahnya hanya untuk makanan ternak babi (pernyataan orang Indonesia yang bersuamikan orang Amerika). Sayuran semanggi (water clover) yang hidup liar di sekitar ladang yang ditanami belum pernah ada yang panen untuk dikonsumsi. Daun tanaman labu (pumpkin) yang sangat disukai orang Bangladesh, Nepal, dan negara-negara Asia di sekitarnya juga sangat kurang diminati orang Indonesia. Sayuran yang sangat diminati orang Indonesia adalah kangkung, kemangi, kacang panjang, daun bawang, cabe rawit, dan cabe keriting (cayenne). Buncis, tomatillo, tomat kecil-kecil (cherry tomato), bayam, dan ciplukan kurang diminati. Cukup mengejutkan bahwa harga bayam per pound kira-kira setengah kilogram mencapai \$2,99 dan bahkan daun ubi jalar jauh lebih mahal sekitar \$3,99 itupun tidak selalu ada dan tidak segar seperti di pasar tradisional Indonesia. Tanaman ubi jalar, termasuk umbinya yang bernilai gizi tinggi tidak dianggap sebagai makanan yang membanggakan. Sosialisasi akan sehat dan enaknyanya sayur bayam dilakukan dengan memasak sayur bening dan lotek/pecel untuk dimakan bersama-sama di bawah pohon rindang dekat ladang.

Ketidakpopuleran tanaman terutama sayuran berlaku umum terutama di generasi milenial dan Z. Selama 8 tahun berkebun secara berturut-turut orang Indonesia tertarik untuk berkunjung ke ladang kampus yang tempatnya di tengah kota, pinggir jalan

besar, tempatnya bersih, parkir tersedia luas langsung di dekat plot, baru setelah dibujuk dan dibawakan contoh makanannya yang siap disantap. Teman-teman anak saya hanya beberapa yang tertarik untuk berkunjung dengan alasan takut serangga terutama lebah dan ulat. Padahal isu ekologi berkaitan dengan berkurangnya jumlah ulat yang akan jadi kupu, lebah, dan serangga lain akibat pemakaian pestisida yang berlebihan perlu mendapatkan perhatian. Preferensi sayuran yang bebas dari ulat atau serangga lain menyebabkan orang memenuhi permintaan pasar dengan mengorbankan lingkungan. Pelajaran tentang pencegahan serangga secara alami memakai tanaman perangkap (crop trapping) seperti kemangi, bunga kenikir, dan tanaman lain yang serupa bisa dipelajari langsung (learning by doing). Istri presiden Amerika, Michelle Obama telah mempraktekkan usaha cinta sayuran dengan mempraktekkan penanaman di ladang belakang White House dan mengundang anak-anak untuk menanam dan memanen. Tanaman yang banyak mendapatkan perhatian anak jaman sekarang adalah pohon matahari yang bunganya beraneka macam dari kuning, oranye, ungu, dan bahkan coklat. Anak-anak tetangga yang tinggal di perumahan mahasiswa (student family housing) seringkali dibawa orang tuanya kegiatan berladang sekaligus diperkenalkan dengan jenis-jenis tanaman sayuran dan cara menanamnya. Anak-anak Indonesia jarang yang dibawa orang tuanya ke kebun untuk diajak berladang dan mengkonsumsi tomat, wortel mentah, dan lain-lainnya. Bertani dianggap sebagai kegiatan yang rendah alias tak bergengsi dan kotor.

Kegiatan berladang di kebun belakang rumah milik kampus berhasil memperkenalkan budaya Indonesia dalam hal sayuran Indonesia dan pertanian yang ramah lingkungan. Pelaporan atas pelanggaran memasuki plot yang bukan miliknya (trespassing) untuk mencuri sayur bayam (amaranth) membuat polisi kampus dan manajemen perumahan pusing penuh tanda tanya. Setelah dijelaskan jenis dan manfaatnya, tentu saja disertai foto yang lengkap mereka mulai mengenal sayuran yang tak pernah mereka ketahui. Mulai tahun ke-4 setiap ada mahasiswa yang pengen berkebun dan tidak tahu caranya karena tidak punya pengalaman, maka suami dan saya yang dirujuk untuk dimintai nasehatnya. Suami sering dikira professor di bidang pertanian, karena memberi contoh dan membantu cara mengolah tanah dan menanam yang benar. Kebijakan perumahan yang mengharuskan para penyewa kebun untuk membersihkan alat-alat pertanian maupun tanaman yang masih ada yang kebanyakan sudah jelek dan tidak diurus, seperti labu, buncis, tomat, dan tanaman perdu lainnya. Peraturan bahwa permukaan tanah harus kembali seperti pertama kali menyewa (bersih tak ada bekas tanamannya sama sekali) sangat ditentang suami, beberapa teman pekebun yang kuliah lingkungan, dan saya. Penjelasan ilmiah sudah diberikan bahwa mencabuti tanaman tomat, kale, cabe, labu, timun, semangka, dan lainnya akan menurunkan permukaan tanah. Tak ada yang mencabut tanaman sampai akar-akarnya yang tak terbawa tanah yang lengket di akarnya. Di samping itu tanaman yang ada kalau dibiarkan akan busuk ketika musim salju tiba dan bisa menjadi kompos yang menyuburkan tanah di musim tanam

berikutnya. Usulan pengambilan kebijakan baru disetujui 2 tahun sebelum penulis pulang ke Indonesia.

Penutup

Temuan riset melalui pengalaman pribadi setelah tinggal dan bergaul dengan berbagai bangsa di Columbus, Amerika selama hampir 9 tahun menunjukkan bahwa imperialisme Amerika melalui gaya hidup makan cukup efektif yang ditandai dengan sikap dan tindakan orang Indonesia. Semboyan "If you eat like us, you are going to be like us" dari McDonald dipercaya oleh banyak orang Indonesia yang berpikir bahwa untuk menjadi orang Amerika cukup punya gaya/pola makan seperti mereka. Pernyataan bahwa mereka sangat bangga dan menikmati makanan cepat saji (fast food) yang dikategorikan junk food dan "dianggap bahagia dan keren" yang tinggal di Amerika karena tiap hari mengkonsumsi makanan impor menjadi bukti penjajahan budaya melalui makanan efektif masih berlangsung sampai sekarang.

Penyadaran bahwa Indonesia mempunyai kekayaan plasma nutfah sayuran dan buah-buahan yang tidak ternilai harganya dan bahkan tanpa perlu rekayasa genetika, seperti bayam (amaranth), kemangi, kangkung, cimplukan (ground cherry) perlu dikembangkan. Peningkatan akan kecintaan terhadap kegiatan berladang secara alami dengan pemakaian kompos untuk pupuk organik, pembasmian gulma dan serangga tanpa herbisida dan pestisida, serta penanaman tumbuhan yang bisa mencegah serangga seperti kemangi ataupun menghasilkan nitrogen seperti kacang tanah dilakukan dengan "learning by doing" dan efek "spillover." Sayuran bayam (amaranth) dan kemangi (sweet lemon basil) ternyata digemari oleh banyak bangsa dan cukup bergengsi, karena harganya mahal dan tidak selalu tersedia di grocery store.

Mengingat arti pentingnya makanan sebagai kekuatan bangsa secara fisik, ekonomi, dan politik dari sisi imperialism, penelitian lanjutan dengan mengambil studi kasus di negara bagian lain di Amerika ataupun negara Barat lainnya perlu dilakukan. Kegiatan ibu negara Michelle Obama yang memperkenalkan anak-anak sekolah untuk berladang dan makan sayur perlu diadopsi di Indonesia.

Bibliografi

- Appadurai, Ajun. (1990). Disjuncture and differences in the global cultural economy. In Ajun Appadurai (Ed.), *Theory, culture & society*, 295-308. Newbury Park, London and New Delhi: Sage
- Biel, Robert. (2016). Food, imperialism and dependency. In *Sustainable food systems: The role of the city*. Robert Biel (eds), page. 74-89. California: UCL Press.
- Cabral, A. (1973). *Return to the source: Selected speeches Amilcar Cabral*. New York: Monthly Review Press.
- Chakrabarti, Saubhik. (2011). *ET Bureau*, August 14, 2011.
- Crane, Misti. (2017). Once they start composting, people find other ways to be green.

- Ohio State News, December 05, 2017, <https://news.osu.edu/>).
- DeWalt, Kathleen M. & DeWalt, Billie, R. (2002). *Participant observation, a guide for fieldworkers*. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.
- Dipa, Arya. (2019). Obesity continues to haunt Indonesia despite campaign. *The Jakarta Post*, February 3, 2019.
- Filipovic, Jill. (2013). The way America eats is killing us. Something has to change. *Twitter: JILLFilipovic*.
- Galtung, Johan. (1971). A structural theory of imperialism. <https://doi.org/10.1177/002234337100800201>.
- Gobo, Giampietro. (2008). *Doing ethnography*. London: Sage Publications.
- Goetz, J.P. & LeCompte, M.D. (1984). *Ethnography and qualitative design in educational research*. New York, NY: Academic Press, Inc.
- Gramsci, A. (1971). *Prison notebooks*. New York: International Publishers.
- History on the Net. *Aztec Empire: Everyday foods and feast*.
- Indonesia Expat. (2018). *How expats can maintain a healthy lifestyle whilst working in Indonesia*. Indonesia Expat, January 22, 2018.
- Ketogenic. (2019). *5 Problems With The American Diet That Are Killing You*. Health and Lifestyle. April 25, 2019.
- Kobuthi, Joe. (2019). *Culinary imperialism and the hierarchies of food*. Elephant, September 27, 2019.
- McCracken, G. (1988). *The long interview*. California: Sage Publication.
- McLeod, J. (2001). *Beginning postcolonialism*. Manchester, UK: Manchester University Press.
- Roller, Margareth R. & Lavrakas, Paul J. (2015). *Applied qualitative research design*. New York, NY: Guilford Press.
- Scott, Joan Wallach. (1992). Experience. In Judith Butler and Joan W. Scott (eds.), *Feminist theorize the political*, 22-40. New York: Routledge.
- Tomlinson, John. (1999). Global culture: Dream, nightmares, and skepticism. In John Tomlinson (Ed.), *Globalization and culture*, 71-96. Chicago: University of Chicago Press.

Kerjasama Multilateral dalam Perwujudan Energi Berkelanjutan melalui Perilaku Masyarakat

Diah Ayu Permatasari¹, Noam Lazuardy²

¹ Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

² Graduate School of Management, National University of Management Cambodia, Phnom Phen

Corresponding email: pepy@ubharajaya.ac.id

Abstrak



Tulisan ini bertujuan untuk: menganalisis solusi pembahasan Energi berkelanjutan dalam kerjasama multilateral yaitu G20; mengetahui pentingnya perilaku masyarakat dalam menunjang terwujudnya keberhasilan Energi Berkelanjutan; dan upaya mencapai energi berkelanjutan di Indonesia. Permasalahan energi merupakan salah satu isu krusial dunia, dikarenakan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan, khususnya energi fosil. Pemulihan ekonomi global yang dimotori pertumbuhan ekonomi tinggi di Asia seiring dengan peningkatan permintaan energi untuk industri dan konsumsi turut mendorong jumlah kebutuhan akan energi yang besar di dunia.

Ketersediaan energi sebagai salah satu faktor dalam menjawab tantangan energi berkelanjutan membutuhkan adanya usaha untuk memenuhinya melalui kerjasama energi Indonesia yang seharusnya dapat lebih tegas dan jeli melihat situasi untuk membantu negara mencari solusi menghindari kemungkinan terjadinya krisis energi dalam waktu tidak lama lagi. Kerjasama energi merupakan salah satu upaya yang utama bagi kepentingan nasional, terutama suatu sistem dalam pola konsumsi dan produksi termasuk diantaranya mengamankan suplai energi, mencari sumber-sumber baru energi, baik energi baru dan terbarukan, serta kerjasama dalam rangka efisiensi energi yang lebih konkrit pada forum multilateral termasuk diantaranya G20. G20 menjadi forum yang sangat strategis bagi Indonesia dalam mengatasi permasalahan terutama mengenai energi berkelanjutan. Dalam beberapa diskusi mengenai G20 ditemukan beberapa unsur dalam mendukung suksesnya energi berkelanjutan, salah satunya yaitu berhubungan dengan perubahan paradigma masyarakat dalam era penggunaan energi yang lebih efisien dan hijau. Perilaku masyarakat Indonesia dapat menjadikan inefisiensi yang membawa pada kekurangan energi di masa kini ataupun masa depan. Dukungan pemerintah menjadi sangat penting dalam menyiapkan sarana prasarana termasuk diantaranya sosialisasi dan promosi mengenai efisiensi energi.

Kata Kunci

Multilateral, Globalisasi, perilaku masyarakat, G20

Pendahuluan

Sejak berakhirnya perang dunia kedua, kerja sama multilateral menjadi bagian penting dalam upaya untuk tercapainya tujuan perdamaian dunia. Pada saat ini konsep globalisasi bermunculan dengan hadirnya isu-isu baru yang tidak hanya sekedar mengenai politik dan keamanan, namun juga membutuhkan perhatian ekstra dalam tatanan global, khususnya dalam bidang teknologi informasi, lingkungan dan kesenjangan. Menurut Wibisono (2009) Saat ini telah terjadi pergeseran pembahasan isu politik dan keamanan pada isu-isu baru seperti perubahan iklim, good governance, hak asasi manusia dan demokrasi. Berbagai tantangan terus berkembang ketika dominasi aktor pemerintah pada diplomasi multilateral dihadapkan pada aktor baru seiring dengan perkembangan teknologi seperti media sosial, media massa, lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan perusahaan multinasional.

Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif melakukan kerja sama multilateral dalam pelaksanaan kebijakan politik luar negerinya. Sesuai dengan surat keputusan Dirjen Multilateral Kemlu No. 00148/PL/II/2010/46/06, bahwasanya tujuan kebijakan luar negeri Indonesia dalam stabilisasi dan memperkuat kerja sama multilateral adalah untuk memperbaiki peran aktif Indonesia dalam implementasi keamanan dan perdamaian dunia, peningkatan perlindungan hak asasi manusia dan kerja sama kemanusiaan termasuk dalam memperkuat kerja sama dalam bidang sosial budaya, keuangan, lingkungan, perdagangan, industri, investasi, komoditas dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual melalui kerja sama multilateral.

Permasalahan energi merupakan salah satu isu krusial di dunia, dimana hal tersebut terjadi dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Kesenjangan ini semakin bertambah seiring dengan pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan industrialisasi dunia, sehingga mengakibatkan terkurasnya cadangan energi dalam jumlah besar, khususnya energi fosil yang merupakan sumber energi utama dunia. Pemulihan ekonomi global yang dimotori pertumbuhan ekonomi tinggi di Asia seiring dengan peningkatan permintaan energi untuk industri dan konsumsi turut mendorong jumlah kebutuhan akan energi yang besar di dunia.

Hal ini memaksa penyediaan sumber energi yang mencukupi dan terjangkau merupakan suatu keharusan untuk menyokong pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan, dimana penggunaan energi merupakan motor penggerak utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial di dalam suatu negara. Undang-Undang No 30 Tahun 2007 Tentang energi menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh energi dan merupakan kewajiban pemerintah untuk melakukan pengelolaan sehingga ketersediaan energi dapat terjamin. Konsep ini merupakan faktor penting bagi keberlangsungan hidup negara yang menjamin kestabilan dan ketersediaan energi dengan harga terjangkau. Ketidaktersediaan energi dapat mempengaruhi konsep keamanan negara dimana hal ini dapat memicu multi dimensi konflik di masyarakat.

Jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ketahun, diiringi dengan peningkatan kebutuhan energi menyebabkan total konsumsi pemakaian energi yang semakin meningkat terutama kebutuhan akan minyak bumi. Data dari Indonesia Energy Outlook 2014 menunjukkan pada jangka waktu 10 tahun dari tahun 2003-2013 terdapat kecenderungan peningkatan konsumsi energi rata rata sebesar 5,5 persen pertahun. Peningkatan tersebut kurang didukung pada ketersediaan infrastruktur dalam menunjang pengadaan energi, penurunan terus menerus pada cadangan energi tidak terbarukan sementara penemuan sumber energi baru masih sangat minim dan dianggap tidak produktif.

Apabila merujuk pada kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ekonomi Indonesia di era tahun 1970an, sektor migas merupakan sumber utama devisa negara, serta memungkinkan Indonesia mencanangkan Repelita dan membangun infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi. Selain sebagai penyumbang penerimaan negara, sektor hulu migas menjadi penyedia energi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kebijakan Energi Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan ketersediaan energi dalam negeri, meningkatkan penggunaan sumber daya energi untuk kebutuhan lokal untuk mendukung perekonomian nasional dan akses energi bagi masyarakat, meningkatkan produksi sumber daya energi lain terutama energi terbarukan serta meningkatkan efisiensi penggunaan/konsumsi energi. Ketahanan energi yang merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional dijelaskan dalam UU Energi No. 30 tahun 2007, PP No. 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional; Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2006-2025 dari Kementerian ESDM yang menetapkan tujuan pencapaian ketahanan energi adalah mengamankan pasokan energi nasional. Selain itu, energi merupakan salah satu elemen pokok dari proses pembahasan agenda pembangunan global pasca 2015 (Post 2015 Development Agenda), khususnya terkait akses energi bagi semua orang.

Pada kenyataannya program ini tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan dimana sumber pendapatan negara terbesar mengalami pergeseran pada tahun 2016 dimana sektor perpajakan menyumbang sebesar 74.6%, diikuti oleh penerimaan negara bukan pajak (termasuk sumber migas) sebesar 15%, dan kepabeanan dan cukai sebesar 10.2%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sektor energi (migas) yang pada awalnya merupakan sektor yang sangat strategis, perlahan mengalami penurunan yang sangat drastis.

Pola pergerakan energi dunia juga sangat mempengaruhi pasar internasional yang berimplikasi terhadap ketergantungan Indonesia pada energi sangat besar. Ketidaksiapan pemerintah dalam mengatasi permasalahan global dapat membawa Indonesia pada masalah ketahanan energi (Azmi dan Amir, 2014; Simbolon, 2015).

Energi terbarukan merupakan alternatif yang terbaik dalam pola pengelolaan migas khususnya di Indonesia dengan banyaknya sumber daya alam, namun teknologi energi terbarukan masih terlalu mahal dan masih sangat minim pengembangannya. Negara maju dengan teknologi canggih pada energi terbarukan masih tetap menggunakan energi fosil sebagai *primary resources*.

Isu saat ini bukan hanya mencakup mengenai ketahanan energi tetapi mulai mengarah pada energi berkelanjutan. Dalam hal ini ketahanan energi merupakan salah satu dimensi dari energi berkelanjutan. Pada pengertian menurut World Energy Council definisi energi berkelanjutan berdasarkan pada tiga dimensi inti yaitu ketahanan energi, keadilan sosial dan mitigasi dari dampak lingkungan. Energi berkelanjutan membutuhkan kestabilan, keterjangkauan dan sistem energi yang peka terhadap lingkungan. Semua dimensi ini membutuhkan keterkaitan antara aktor yang umum dan pribadi, pemerintah, sosial ekonomi, sumber daya nasional, perhatian terhadap lingkungan dan perilaku individu.

Kerja sama dengan luar negeri khususnya melalui multilateral diharapkan mampu menembus sejumlah negosiasi yang menguntungkan bagi Indonesia, khususnya dalam mewujudkan keberlanjutan energi Indonesia, baik dalam pemenuhan kebutuhan ataupun pengembangan teknologi melalui aktor negara ataupun non state actor. Ketergantungan terhadap impor negara lain menuntut adanya strategi energi dalam segala lini agar tetap terjamin ketersediaan energi. Pola keuntungan ini diharapkan mampu mewujudkan keuntungan sebesarnya termasuk diantaranya memperhitungkan keuntungan relatif yang mungkin timbul diantaranya (Grieco, 1988).

Salah satu strategi energi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan kerja sama dalam bidang energi dengan terlibat aktif di forum-forum internasional terutama forum Group of Twenty (G20), dimana forum tersebut memiliki posisi strategis karena secara kolektif G20 mewakili 65 persen penduduk dunia, 79 persen perdagangan global, dan 84 persen perekonomian dunia. G20 mengumpulkan para pemimpin negara dari ekonomi terbesar untuk mencari cara menghadapi berbagai tantangan utama ekonomi dunia. Dengan kekuatan sebesar ini, pada prinsipnya G20 mampu menyelesaikan persoalan ekonomi global dengan kuncinya terletak pada dialog dan keinginan politik para pemimpin G20. Dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh negara anggotanya, G20 memiliki modalitas yang kuat sebagai *main driver* kerja sama ekonomi dunia dan pengaruh yang besar bagi pengelolaan perekonomian dan keuangan dunia (Kirton, 1999), termasuk didalamnya isu energi.

G20 menjadi forum yang unik dibanding forum lain diantaranya adalah G20 merupakan produk masa kini dimana mekanisme dan kerja samanya mencapai pemerintahan global, G20 merupakan mesin yang sangat fleksibel dalam menghadapi isu global yang terkini dan spesifik sesuai kebutuhan, G20 mempunyai otoritas dan pengaruh dari kekuatan dominan dan dari segi variansi lokasi geography, income level,

politik dan ekonomi serta struktur demokrasi anggota G20 sangat beragam dan luas. (Xiaohui :2016).

Permasalahan energi semakin menjadi kritis ketika kecepatan pertumbuhan ekonomi dunia dan pesatnya laju pertumbuhan penduduk yang terjadi saat ini tidak diimbangi oleh pemenuhan sumber daya energi, hal ini mengakibatkan kekurangan sumber energi untuk memenuhi kebutuhan energi domestik. Dan tidak hanya itu, pemenuhan energi berkelanjutan untuk saat ini dan masa mendatang akan menjadi permasalahan yang harus di selesaikan. Keberlanjutan energi harus berjalan seiring dengan kemandirian energi, sehingga ketergantungan terhadap negara luar dapat diminimalisasi. Agar Indonesia dapat memenuhi kebutuhan energi tanpa terpengaruh oleh situasi politik luar negeri, peningkatan keberlanjutan dan kemandirian energi harus menjadi prioritas nasional. Prioritas ini sangat diperlukan mengingat energi menjadi kebutuhan mendasar, di samping kebutuhan akan pangan dan air. Baik secara politik, ekonomi, dan sosial, hal tersebut selalu dibahas dalam forum G20, dimana keputusan yang diambil oleh para pemimpin G20 berdampak sangat luas terhadap kebijakan energi global. Selain itu keputusan terhadap kesepakatan multilateral ini sangat berdampak pada arah dan pelaksanaan kebijakan energi di dalam negeri.

Metode Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai perilaku masyarakat dalam menunjang ketersediaan energi yang mengedepankan kajian kerja sama multilateral yaitu G20. Penelitian ini akan melakukan pengembangan teoretik secara deduktif dalam pengumpulan data yang akan mulai terbentuk pada konsep dan pola yang berkaitan dengan tema penelitian. Hal ini akan membawa fleksibilitas dalam proses pengumpulan data dan teori yang akan berinteraksi selama proses penelitian berlangsung (Neuman, 1997).

Penelitian akan menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus yang merupakan kajian tentang kejadian atau fenomena sejarah yang sengaja secara khusus dipilih untuk kepentingan analisis (Beneth, 2004). Pemilihan ini berdasarkan keunikan forum G20 pada kerja sama multilateral yang juga menyoroti mengenai perilaku masyarakat dalam hubungannya dengan ketersediaan energi.

Sebagian besar data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara yang dalam dan dilakukan dengan penggunaan daftar pertanyaan yang menjadi acuan dalam mendapatkan data, fakta dan informasi yang diinginkan. Pengambilan sumber data dilakukan secara purposive dan snowball untuk mendapatkan substansi yang diharapkan termasuk kemungkinan menemukan informan yang relevan dan kompeten. Pemilihan informan ini berdasarkan kriteria seseorang yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terhadap tema penelitian. Pendalaman informasi berasal dari para informan yakni pejabat-pejabat yang relevan maupun ahli-ahli yang menguasai fenomena tata kelola migas khususnya pada kerja sama energi. Wawancara

dilakukan dengan pertemuan tatap muka langsung terhadap informan serta memanfaatkan sarana email dan whatsapp untuk melakukan dialog.

Lokasi penelitian adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Perekonomian, Bappenas. Data yang terkumpul dianalisis dengan strategi (Yin, 2013) yaitu pertama, peneliti meng-compile data yang diperoleh dan menyusunnya sesuai dengan urutan waktunya, sehingga dapat dipahami skenarionya. Analisis ini dilakukan dengan melengkapi data, fakta dan informasi serta melakukan pengecekan dari berbagai sumber data yang pada akhirnya peneliti akan melakukan penilaian terhadap triangulasi sumber data dan informasi sebagai analisa akhir.

Tinjauan Pustaka

Kerja Sama Multilateral

Kerja sama multilateral merupakan bentuk dari pengaturan koordinasi yang generik diantara tiga atau lebih negara dengan aturan dasar yang harus dipatuhi secara universal (Ruggie, 1993). Koordinasi dan kerja sama ini seharusnya memandang semua negara memiliki konstruksi yang sama dalam menerima hasil kesepakatan yang setara, dimana tidak ada pembedaan negara prioritas atau negara yang lebih penting. Pada dasarnya kerja sama multilateral merupakan kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. Kerja sama multilateral ini berhasil menjadi cara yang paling bermanfaat untuk meningkatkan negosiasi antara banyak pihak, selain sebagai pendorong diplomasi bilateral (Djelantik, 2008).

Dalam kerja sama dengan negara lain terdapat strategi yang merefleksikan kepentingan domestik, dalam hal ini semua negara berhak untuk mempertahankan kekuasaannya dalam mencapai tujuan. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku suatu negara di dunia internasional (Perwita & Yani, 2005). Menurut Bandoro (1991) ada dua elemen dasar yang menyebabkan negara-negara melakukan diplomasi yakni adanya kepentingan bersama (common interest) dan adanya isu yang dipersengketakan (issues of conflict). Kebijakan luar negeri mempengaruhi kegiatan diplomasi dalam hal ini melakukan kerja sama bagi negara-negara, maka diplomasi yang dilakukan negara-negara harus selalu sejalan dengan kebijakan luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional sebuah negara.

Kerja sama multilateral saat ini pun menjadi perdebatan dalam teorinya (Lindbeck, 1978; Caporaso, 1992; Touval and Zartman 2010) dimana masih melihat multilateral sebagai bentuk kerja sama yang berasal dari kepentingan nasional yang di panjangkan dalam pembahasan bersama. Keohane (1990) memandang bahwasanya ini masih merupakan suatu label yang masih harus digali lebih dalam kembali. Perkembangan teori multilateral menjadi tidak seagresif perkembangan dunia, hal ini dikarenakan semakin sedikit kerja sama multilateral yang dianggap sukses (Talbot, 2008; Ikenberry, 2006; Leffer and Legro, 2006; Kagan, 2002), salah satu asumsinya dimana

negara besar dunia melihat suatu masalah sebagai masalah bilateral yang tidak membutuhkan kerja sama multilateral (Masfield, 1988).

Selain itu sebuah kerja sama multilateral membutuhkan pengaturan yang disepakati bersama dalam menghadapi permasalahan dan kasus tertentu. Pengaturan yang umum ini merupakan masukan dari berbagai partisan yang didiskusikan bersama dan pengaturan ini yang menjadikan komitmen bersama yang seharusnya ditaati oleh semua pihak. Keuntungan yang didapat pun harus bersifat jangka panjang (*diffuse reciprocity*), dimana pengorbanan dari setiap negara akan membawa pada keuntungan jangka panjang. Hal ini terutama berlaku pada substansi yang berkaitan dengan keamanan bersama (*collective security*), yang seolah-olah adalah harga mati dalam mencapai perdamaian. Pada forum G20, isu ini merupakan suatu keuntungan yang merupakan komitmen dari negara maju dalam mensukseskan energi berkelanjutan yang menjadi suatu komitmen dari segenap anggotanya. Bagi Indonesia ini menjadi usaha yang timbul pada perwujudan energi berkelanjutan mengingat Indonesia belum memprioritaskan pencapaian sektor ini dan multilateral tetap merupakan salah satu usaha untuk mencari solusi dari permasalahan energi berkelanjutan ini..

Energi Berkelanjutan

Energi menjadi hal yang sangat penting pada isu kebijakan luar negeri suatu negara, dimana pada era saat ini terdapat kecenderungan dari banyak negara untuk meningkatkan komitmen pada energi berkelanjutan dan mengurangi pemakaian energi fosil. Komitmen ini mengubah kebijakan energi suatu negara terhadap politik luar negerinya. Beberapa negara di Eropa termasuk Belanda menyadari bahwa kebijakan multilateral menjadi bagian penting dalam tujuan jangka panjang dari kepentingan nasional mereka dalam bidang energi (Liu and Ybema, 2016).

Menurut World Energy Council, definisi energi berkelanjutan berdasarkan pada tiga dimensi inti, yaitu ketahanan energi, keadilan sosial dan mitigasi dari dampak lingkungan. Energi berkelanjutan membutuhkan kestabilan, keterjangkauan dan sistem energi yang peka terhadap lingkungan. Semua dimensi ini membutuhkan keterkaitan antara aktor yang umum dan pribadi, pemerintah, sosial ekonomi, sumber daya nasional, perhatian terhadap lingkungan dan perilaku individu.

Penekanan keamanan energi yang merupakan bagian dari energi berkelanjutan diterangkan pada tulisan Bradshaw, 2010; Westphal, 2012; Brake, 2016. Dalam kajian ini diterangkan bahwasanya dunia dihadapkan pada dilema keamanan energi dan perubahan iklim yang membawa energi konvensional menuju energi yang berkelanjutan. Westphal (2012) juga menekankan bahwa pola produksi dan konsumsi merupakan hal yang harus dibenahi bersama dengan kebijakan dari seluruh negara. Dalam kajian ini diterangkan bahwasanya dunia dihadapkan pada dilema keamanan energi dan perubahan iklim yang membawa energi konvensional menuju energi yang

berkelanjutan. Westphal juga menekankan bahwa pola produksi dan konsumsi merupakan hal yang harus dibenahi bersama dengan kebijakan dari seluruh negara.

Energi berkelanjutan juga sering dikaitkan dengan energi yang dapat diperbarui, yang pada sesungguhnya energi berkelanjutan tidak sesederhana energi terbarukan karena menyangkut suatu sistem (Prandecki, 2014). Terdapat pilar yang harus diperhatikan dalam energi berkelanjutan, dimana menurut G.P Hammond dan C.I Jones (2011) pilar tersebut adalah lingkungan, ekonomi dan sosial. Pilar ini menjadikan suatu sistem pada energi berkelanjutan sebagai suatu isu dimana pola konsumsi dan produksi adalah hal yang sama pentingnya. Pola ini memikirkan penggunaan energi tidak hanya bisa digunakan saat ini tetapi kapasitasnya bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang.

Hasil dan Pembahasan

Dalam upaya meningkatkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, energi berperan penting dan menjadi salah satu pendukung utama dalam pertumbuhan ekonomi. Sistem internasional dewasa ini ditandai dengan dimensi baru yang berbeda dengan abad sebelumnya, yaitu globalisasi ketergantungan ekonomi. Sistem internasional ini memunculkan pula aktifitas perekonomian yang beragam dalam interaksi antar negara. Beragamnya hubungan antar negara dengan kepentingan masing-masing menjadikan adanya keterkaitan antara politik dan ekonomi. Sehingga dalam struktur serta operasi sistem ekonomi internasional lebih banyak ditentukan oleh struktur dan pelaksanaan sistem politik internasional, dimana produksi, distribusi dan konsumsi sepanjang sejarah modern lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor strategi.

Permasalahan di bidang energi yaitu konsumsi energi di Indonesia meliputi sektor industri, rumah tangga, transportasi, komersial dan sektor lainnya yang dapat menimbulkan pemborosan energi. Pemborosan energi atau inefisiensi energi di Indonesia terus terjadi yang mengakibatkan semakin berkurangnya cadangan bahan bakar yang bersumber dari fosil. Adapun salah satu penyebab utama inefisiensi dalam pemanfaatan energi yaitu merupakan kebijakan harga energi murah berupa subsidi yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Menurut Tambunan (2006) kebijakan harga energi murah dengan memberikan subsidi yang besar membawa dampak negatif, yaitu:

- a. Tingginya ketergantungan pada sumber energi minyak mentah, dimana sinyal harga yang rendah menjadi disinsentif bagi usaha diversifikasi maupun konservasi (penghematan) energi;
- b. Subsidi BBM di APBN mengancam keberlangsungan fiskal pemerintah;
- c. Tidak optimalnya pemanfaatan sumber energi lain, seperti gas alam dan batubara yang cadangannya jauh lebih besar dari minyak mentah maupun energi baru dan terbarukan;
- d. Maraknya penyelundupan BBM ke luar negeri sehingga tingkat

- e. permintaan lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan nyata;
- f. Maraknya kegiatan pengoplosan BBM yang merugikan negara dan konsumen umum; dan,
- g. Sinyal harga mendistorsi kelayakan investasi di sektor hilir migas. Pada tahun 2016, BBM sebagian besar dikonsumsi sektor transportasi (80,7%), diikuti sektor industri (8,1%), pembangkit listrik (5,5%), lainnya (3,9%), rumah tangga (1,0%), dan komersial (0,8%).

Diperkirakan, kebutuhan energi final nasional akan mencapai 238,8 MTOE pada tahun 2025 berdasarkan asumsi pertumbuhan PDB moderat 5,6% pertahun selama periode 2015 – 2025 dan pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,8% pertahun. Untuk itu diprediksi rata-rata pertumbuhan kebutuhan energi selama periode 2015 – 2025 adalah sekitar 4,9% pertahun. Dimana Pemanfaatan konsumsi energi Indonesia diantaranya :

a. Sektor Industri

Sektor industri hingga saat ini merupakan sektor yang mendominasi konsumsi energi di Indonesia dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,1% per tahun. Sektor industri merupakan sektor produktif yang terus didorong perkembangannya agar dapat meningkatkan perekonomian nasional. Pangsa kebutuhan energi final sektor industri pada tahun 2016 yaitu sebesar 35,5%. Dalam sektor industri itu sendiri, terdapat beberapa industri yang dinilai paling padat menggunakan energi, baik yang digunakan sebagai bahan bakar ataupun yang digunakan sebagai bahan baku. Diantaranya adalah industri baja, industri semen, industri pupuk, industri keramik, industri pulp dan kertas, industri tekstil dan industri pengolahan kelapa sawit.

b. Sektor Rumah Tangga

Berdasarkan Outlook Energi Indonesia 2018, kebutuhan energi sektor rumah tangga telah mengalami peningkatan yaitu sebesar 116 juta SBM pada tahun 2016, dimana dengan pangsa terbesar adalah penggunaan listrik dan LPG. Kebutuhan LPG pada 2016 yaitu sebesar 54,3 juta SBM (6,37 juta ton) yang sebagian besar berasal dari impor karena terbatasnya produksi LPG dalam negeri. Untuk listrik di sektor rumah tangga digunakan untuk keperluan penerangan, memasak, AC, kulkas, pompa, dan peralatan listrik lainnya.

c. Sektor Transportasi

Sektor transportasi merupakan sektor yang mendukung aktivitas semua sektor pengguna energi. Untuk itu, kebutuhan energi sektor transportasi bukan hanya dipengaruhi oleh penambahan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan sektor pertanian, konstruksi, komersial, dan sektor industri. Kebutuhan energi di sektor transportasi diproyeksikan mengalami pertumbuhan sedikit lebih rendah dari sektor industri, yaitu 4,6% per

tahun dan akan membutuhkan energi 4,6 kali lipat pada tahun 2050 dibanding dengan tahun dasar 2016.

d. Sektor Komersial

Sektor komersial terdiri atas perdagangan, hotel, restoran, keuangan, badan pemerintah, sekolah, rumah sakit, komunikasi dan lainnya. Pertumbuhan kebutuhan energi komersial yang didominasi oleh listrik diperkirakan akan terus meningkat menjadi 11 juta TOE pada tahun 2025, dan dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 7% pertahun, diperkirakan kebutuhan energi sektor komersial pada 2050 akan mencapai sebesar 63 juta TOE. Besarnya penyediaan dan infrastruktur kelistrikan telah mendorong sektor komersial untuk mengalihkan kebutuhan energinya ke jenis listrik.

Permasalahan energi menjadikan negara harus mampu memenuhi kebutuhannya dimana Setiap negara membutuhkan adanya kerja sama dan ketergantungan dari pihak lain dalam hampir segala bidang untuk mengatasi masalah yang timbul didalamnya (Assar, 1978), termasuk diantaranya Indonesia melalui kerja sama bilateral maupun multilateral. Dalam memenuhi kebutuhan, diperlukan kerja sama dengan negara lain terutama dalam era keterbukaan saat ini. Kerja sama ini merupakan pelaksanaan fungsi kebijakan luar negeri Indonesia dalam melakukan pendekatan bilateral maupun multilateral. Meski dalam hubungan internasional tidak banyak yang membahas mengenai multilateral dalam organisasi Internasional (Stephen: 1984), namun kajian mengenai multilateral ini penting dalam menemukan strategi Indonesia dalam membawa dan mendapatkan kepentingnya di tatanan dunia.

Kerja sama multilateral merupakan bentuk dari pengaturan koordinasi yang generik diantara tiga atau lebih negara dengan aturan dasar yang harus dipatuhi secara universal (Ruggie, 1993). Koordinasi dan kerja sama ini seharusnya memandang semua negara memiliki konstruksi yang sama dalam menerima hasil kesepakatan yang setara, dimana tidak ada perbedaan negara prioritas atau negara yang lebih penting. Semua negara yang menerima kesepakatan multilateral ini menderita kerugian sementara, maka diyakini dalam jangka panjang akan membawa keuntungan karena negara lain juga menerima hal yang sama dengan batasan dan kerja sama dengan jangka waktu yang lebih panjang (Keohane, 1986). Pada dasarnya kerja sama multilateral merupakan kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. Diplomasi multilateral ini berhasil menjadi cara yang paling bermanfaat untuk meningkatkan negosiasi antara banyak pihak, selain sebagai pendorong diplomasi bilateral (Djelantik, 2008). Poin ini mengandung dua aspek, pertama kerja sama multilateral memberi kesempatan untuk membahas masalah-masalah di luar agenda formal dan yang menjadi perhatian bersama. Kedua, mediator yang memiliki kekuasaan penuh dapat menyelenggarakan multilateral sebagai upaya memulai negosiasi bilateral untuk membahas masalah mendasar yang sebelumnya diselenggarakan di tempat lain.

Dalam kerja sama dengan negara lain terdapat strategi yang merefleksikan kepentingan domestik, dalam hal ini semua negara berhak untuk mempertahankan kekuasaannya dalam mencapai tujuan. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku suatu negara di dunia internasional (Perwita & Yani, 2005). Menurut Bandoro (1991) ada dua elemen dasar yang menyebabkan negara-negara melakukan diplomasi yakni adanya kepentingan bersama (*common interest*) dan adanya isu yang dipersengketakan (*issues of conflict*). Kebijakan luar negeri mempengaruhi kegiatan diplomasi dalam hal ini melakukan kerja sama bagi negara-negara, maka diplomasi yang dilakukan negara-negara harus selalu sejalan dengan kebijakan luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional sebuah negara.

Kerja sama multilateral diharapkan dapat merefleksikan keberagaman dan juga mampu untuk mereflesikan kesepakatan bersama, terutama dalam permasalahan yang terkait pada energi berkelanjutan. Koordinasi multilateral merupakan dasar dari terbentuknya lingkungan yang stabil dalam mendorong investasi dalam bidang ekonomi, lingkungan, transfer teknologi dan juga kebijakan global (Kottari, 2016). Sejalan dengan analisa Kottari (2016), bahwasanya suatu organisasi energi harus mampu beradaptasi pada perubahan ekonomi dan politik dalam menjawab tantangan khususnya transisi energi dalam mengurangi karbon untuk agenda energi bersama.

Sebagai salah satu forum multilateral dengan anggota yang menguasai 77 persen energi di dunia, segala komitmen yang disertai realisasi bersama mempunyai peran yang signifikan dalam pembuatan kebijakan internasional, hal ini yang menjadikan G20 adalah forum yang ideal untuk mengarahkan transisi menuju perubahan energi berkelanjutan secara global dan signifikan (Huang, 2009; Leasgeet al, 2010).

Pada cetak biru peran Indonesia pada G20 tahun 2015-2019 dijelaskan mengenai titik berat peran peningkatan Indonesia pada G20 adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi dan berkualitas, dengan tetap memperhatikan kestabilan ekonomi dan keuangan yang dipandang sebagai fondasi efektif bagi implementasi strategi pertumbuhan tersebut (RPJMN 20152019, 2015).

Dalam hal ini, Kerja sama energi merupakan salah satu bentuk kerja sama yang digunakan pada abad ke-21 yang lahir karena isu kelangkaan energi yang banyak mengancam negara-negara di dunia. Kerja sama negara dikhususkan pada hubungan bilateral ataupun multilateral menyangkut proses jual beli energi di antara beberapa pihak atau negara yang berkaitan. Kerja sama energi dalam pembahasan merupakan upaya pada forum multilateral yaitu melalui G20 dengan melakukan diskusi dan negosiasi dengan negara lain dalam menghasilkan framework di bidang energi yang seharusnya bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dalam kurun waktu tertentu. G20 menjadi forum yang sangat strategis bagi Indonesia dalam mengatasi permasalahan terutama mengenai energi berkelanjutan. Dalam mengatasi masalah energi ini, posisi Indonesia sudah tidak bergabung lagi dalam OPEC dan organisasi khusus yang membahas mengenai keberlanjutan energi. Diharapkan forum G20

menjadi salah satu upaya dalam menyelesaikan permasalahan keberlanjutan energi dilihat dari segi keuntungan yang didapat bagi negara.

Energi menjadi hal yang sangat penting pada isu kebijakan luar negeri suatu negara, dimana pada era saat ini terdapat kecenderungan dari banyak negara untuk meningkatkan komitmen pada energi berkelanjutan dan mengurangi pemakaian energi fosil. Komitmen ini mengubah kebijakan energi suatu negara terhadap politik luar negerinya. Beberapa negara di Eropa termasuk Belanda menyadari bahwa kebijakan multilateral menjadi bagian penting dalam tujuan jangka panjang dari kepentingan nasional mereka dalam bidang energi (Liu and Ybema, 2016).

Pada era saat ini, energi merupakan faktor penting dari penggerak ekonomi dan pembangunan, dalam tulisan (Prandecki, 2014) mengenai aspek dari energi berkelanjutan diterangkan mengenai energi berkelanjutan merupakan turunan dari usaha untuk mengimplementasikan pembangunan yang berkelanjutan.

Energi berkelanjutan juga sering dikaitkan dengan energi yang dapat diperbarui, yang sesungguhnya tidak sesederhana energi terbarukan karena menyangkut suatu sistem (Prandecki, 2014). Terdapat pilar yang harus diperhatikan dalam energi berkelanjutan, dimana menurut G.P Hammond dan C.I Jones (2011) pilar tersebut adalah lingkungan, ekonomi dan sosial. Pilar ini menjadikan suatu sistem pada energi berkelanjutan sebagai suatu isu dimana pola konsumsi dan produksi adalah hal yang sama pentingnya. Pola ini memikirkan penggunaan energi tidak hanya bisa digunakan saat ini tetapi kapasitasnya bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang.

Sumber energi menjadi bahasan penting ketika dunia saat ini masih menggunakan energi fosil, dimana kapasitas cadangannya semakin mengecil. Energi berkelanjutan membutuhkan alternatif penggunaan sumber energi salah satunya adalah energi terbarukan yang juga harus diimbangi oleh pola yang efisien dari konsumsi. Seberapa besar sumber energi yang dimiliki apabila konsumsi ini tidak efisien maka sangat sulit untuk mencapai energi yang berkelanjutan. Efisiensi energi ini harus berdasarkan kebijakan energi dari seluruh negara (WCED & Brutland, 1991), karena ini menyangkut sumber energi yang harus tersedia dan energi yang ramah terhadap lingkungan bersama. Dalam hal ini teknologi mempunyai hal yang penting dalam menciptakan sarana prasarana yang menggunakan energi secara efisien. Teknologi juga mempunyai peran penting dalam mengembangkan energi yang terbarukan dan ramah lingkungan. Energi sebagai salah satu faktor penting dari pembangunan, membawa kebijakan ekonomi dan politik dalam penerapan dan pengembangannya. Selain itu isu sosial menjadi pilar dalam energi berkelanjutan mengenai bagaimana pola konsumsi dan efisiensi ini dapat diterapkan pada masyarakat. Apabila masyarakat sadar pada perilaku penggunaan energi mereka maka sangat mudah untuk bersama mencapai energi yang berkelanjutan. Prandecki (2014) mengartikan energi berkelanjutan merupakan suatu sistem dari proses, transportasi, distribusi dan konsumsi dari energi yang berkarakter konstan, penurunan drastis dari penggunaan

energi yang tidak terbarukan dan kerusakan lingkungan, harga yang diterima oleh masyarakat dan akses energi yang berlaku universal. Definisi ini menjelaskan kembali bahwasanya energi berkelanjutan merupakan suatu sistem yang tidak dapat berdiri sendiri dan berlaku diseluruh dunia yang menekankan bahwa ini adalah isu bersama dari seluruh negara.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwasanya perilaku masyarakat mempunyai signifikansi penting dalam terwujudnya ketersediaan energi dimana Indonesia mau tidak mau harus mulai mengaplikasi kebutuhan akan terwujudnya energi berkelanjutan untuk masa sekarang dan masa mendatang. Usaha pemerintah saat ini dianggap tidak mampu membawa Indonesia dalam keberhasilan dari energi berkelanjutan. Hal ini terlihat dari hasil energy sustainability index rankings oleh WEC mengenai ketahanan energi, dimana Indonesia menempati urutan ke-60 pada tahun 2012, atau turun dari urutan ke-47 pada tahun 2011. Menurut World Energy Trilemma Index pada 2017, yang pengukurannya memperhatikan tiga faktor yaitu energy security, environment sustainability dan energy equity, Indonesia menempati peringkat ke-75 dari 125 negara. Kondisi ini jauh tertinggal dari Singapura (ke-22) dan Malaysia (ke-41).

Reformasi pemanfaatan energi harus dilakukan seiring dengan cetak biru peran Indonesia di G20 tahun 2015-2019 yang menerangkan target yang ingin dicapai yaitu dengan menjalankan reformasi institusi-institusi energi global yang sudah ada supaya menjadi lebih inklusif bagi kepentingan dan peran negara-negara berkembang dalam upaya memperbaiki tata kelola energi global. Pola tata kelola energi dapat dijadikan komitmen bagi bangsa untuk mulai mewujudkan suksesnya energi berkelanjutan.

Tantangan ini yang harus membutuhkan strategi dan kebijakan energi bagi setiap negara untuk dapat mencapai energi berkelanjutan (Lesage, 2009), dalam hal ini bilateral yang biasanya dilakukan dapat diakselerasi melalui kerja sama multilateral. Upaya kerja sama energi saat ini tidak hanya berfokus kepada ketersediaan energi tetapi sudah mengarah kepada energi berkelanjutan.

Hal yang menarik bahwasanya perilaku masyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu kategori dalam komitmen Indonesia mewujudkan ketersediaan energi pada dunia internasional melalui G20. Termasuk dalam mengakselerasi pencapaiannya yaitu:

a. Konsistensi

Indonesia harus terus mampu mempertahankan tujuan dalam komitmen bersama baik dalam G20 maupun pada Paris agreement. Kesadaran bahwasanya komitmen ini dapat menjadikan motivasi pada level of expected dan target harapan yang makin dipenuhi dan ditingkatkan untuk memenuhi komitmen global. Kebijakan dalam negeri juga harus terus konsisten dalam meneruskan komitmen bersama dalam rangka pencapaian keuntungan yang akan dinikmati di dalam negeri, begitupun demi terciptanya lingkungan global yang lebih hijau mengharuskan

masuk dalam diskusi multilateral dalam bidang energi searah dengan road map yang sudah dirancang.

b. Koordinasi

Permasalahan terbesar dalam diskusi kerja sama multilateral termasuk G20 adalah koordinasi antar Kementerian, yaitu Kemenko Perekonomian, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan sebagai garda terdepan dalam diskusi forum G20 mengalami beberapa kendala. Kementerian Luar Negeri mempunyai permasalahan mengenai putaran sumber daya manusia yang sangat cepat dalam mengurus bahan masukan dan distribusi dalam diskusi G20, bagi Kemenko Perekonomian sendiri permasalahan dokumentasi dan penyimpanan data sebagai bahan masukan dan evaluasi tahun berikutnya menjadi hal yang tidak mudah mengingat banyak Kementerian yang belum menyadari mengenai arti pentingnya kerja sama multilateral yang bukan hanya sekedar suatu perjalanan dinas. Sementara itu, Kementerian Keuangan memerlukan koordinasi yang erat dengan kementerian terkait untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal dan moneter. Pengumpulan data dan evaluasi menjadi hal yang relatif sulit terutama bagi Kementerian yang baru didapuk dalam substansi baru di Working Group G20, pendekatan personal menjadi senjata untuk melakukan sosialisasi koordinasi masukan dan kebijakan dalam diskusi forum G20 setiap tahunnya.

c. Kredibilitas

Kredibilitas merupakan salah satu faktor kunci yang merefleksikan harapan dari suatu negara dimana kredibilitas dapat membawa pada tingkatan leverage dan citra negara di dunia internasional. Kredibilitas berupa nilai yang diharapkan bukan merupakan proses yang instan terjadi, tetapi sebuah proses yang secara terus menerus dianggap mampu melaksanakan rencana dan komitmen bersama. Kredibilitas menjadi penting dalam dasar untuk mendapatkan posisi atau peran penting dalam forum Internasional, termasuk diantaranya dalam penghitungan pembiayaan atau investasi pada sektor yang berkembang terutama dibidang infrastruktur dan produksi energi.

d. Perilaku masyarakat

Hal ini berhubungan dengan perubahan paradigma masyarakat bahwasanya era penggunaan energi yang lebih efisien dan hijau. Perilaku masyarakat Indonesia yang kerap melakukan pemborosan terutama sektor transportasi menjadikan inefisiensi yang membawa pada kekurangan energi di masa kini ataupun masa depan. Dukungan pemerintah menjadi sangat penting dalam menyiapkan sarana prasarana termasuk diantaranya sosialisasi dan promosi mengenai efisiensi energi. Hal ini menjadikan Pemerintah harus menghitung biaya yang digunakan, ketersediaan kapasitas dan kemampuan, teknologi dan anggaran keuangan dalam mensukseskan implementasi keuangan.

e. State Character

Karakter Pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam akselerasi komitmen kebijakan energi, penciptaan sistem dalam kebijakan dan rencana energi menjadikan tujuan bersama dapat tercapai sesuai arah yang ditetapkan. Hal ini juga menunjuk kepada kepemimpinan dalam bidang kebijakan energi maupun kebijakan ekonomi. Perubahan pemerintahan sekalipun, seharusnya program dan komitmen bersama yang telah ditetapkan tetap dijalankan sesuai rencana, sistem ini yang menjadikan tujuan dalam mewujudkan energi berkelanjutan dapat tercapai.

Dalam mencapai isu tersebut maka diambil langkah-langkah terkait, diantaranya yaitu strategi dalam isu energi berkelanjutan yang menjadi salah satu strategi utama melalui kerja sama peningkatan kapasitas dan penguasaan teknologi dalam peningkatan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur energi terbarukan, serta mengupayakan dukungan internasional dalam pengurangan pengalihan dana subsidi BBM secara bertahap.

Komitmen G20 dalam mengendalikan pola konsumsi masyarakat adalah melakukan pengurangan subsidi pada energi fosil juga membawa dampak pada reformasi subsidi yang mengakibatkan adanya tekanan politik dan ekonomi. Hal tersebut menjadikan kebijakan tersebut sebagai dilemma bagi pembuat kebijakan dengan adanya kebutuhan domestik dengan komitmen bersama. Subsidi energi merupakan permasalahan yang sangat sensitif terutama dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Hal tersebut kerap menjadi salah satu pemicu terhadap berbagai kejadian dan peristiwa kerusuhan akibat kenaikan harga BBM. Untuk itu, G20 dapat memberikan kesempatan untuk memberikan pengaruh terhadap diskusi kebijakan domestik dan upaya untuk melemahkan oposisi domestik dalam reformasi subsidi. G20 secara garis besar dapat mempengaruhi kebijakan pencabutan subsidi melalui Menteri Keuangan dan perjanjian internasional terhadap bahan bakar fosil (Gourevitch, 1978). Menurut Mayer (2010), G20 dapat secara efektif menjadi hal yang positif dalam bagian mengimplementasikan komitmen bersama, terutama mengenai reformasi subsidi energi fosil untuk bahan bakar dan listrik.

Permasalahan subsidi energi fosil ini merupakan bagian dari kompetisi ekonomi, dimana dengan subsidi, penggunaan energi dapat menguntungkan terutama dalam hal penggunaannya pada sektor industri yang menyebabkan harga produksi dapat lebih bersaing dengan negara lain. Dalam hal ini, kesepakatan bersama dalam pengurangan subsidi harus dilakukan secara bersama, mengingat setiap negara memiliki strategi yang berbeda dalam pendekatan ekonomi politik untuk menarik minat produsen. Hal ini juga berlaku pada kebijakan tarif perdagangan, dimana pemerintah dapat menurunkan tarif apabila pengurangan tarif dilakukan bersama diantara mitra perdagangan. Dalam perjanjian multilateral G20 yang menyangkut subsidi energi fosil, terdapat beberapa potensial yang dapat digunakan dalam perencanaan dan implementasi pada energi berkelanjutan.

Penggunaan energi fosil memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan iklim global, beberapa negara memberikan kebijakan energi berupa subsidi bahan bakar fosil kepada rakyatnya yang menjadikannya sebagai kontributor karbon yang sangat tinggi dan diminati oleh masyarakat, dimana sekitar tiga perlima masyarakat dunia mendapatkan subsidi bahan bakar dan listrik dalam konsumsi pemakaiannya (IEA 2013). Penggunaan bahan bakar fosil dapat membawa dampak pada perubahan iklim global, perubahan ini merupakan akibat dari peningkatan jumlah emisi karbon dioksida yang menjadikan pengaruh pada gangguan kesehatan. Beberapa cara telah digunakan untuk mengurangi pemakaian bahan bakar fosil dan memberikan solusi penggunaan energi alternatif, salah satu fokus penyelesaian masalah pada penyesuaian harga bahan bakar fosil (Aldy et al 2000).

Subsidi didefinisikan sebagai “Tindakan pemerintah yang menurunkan biaya produksi, meningkatkan pendapatan produsen, atau menurunkan harga yang dibayarkan oleh konsumen” (IEA, OECD & World Bank, 2010). Adapun tujuan dari pemberlakuan subsidi yaitu untuk membantu konsumsi masyarakat yang berkemampuan finansial lemah untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Subsidi BBM di Indonesia diberlakukan sejak tahun anggaran 1967 (Dillon et al., 2008). Menurut Suparmoko (2003), subsidi (transfer) adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Subsidi dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu subsidi dalam bentuk uang (cash transfer) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi in natura (in kind subsidy).

Pada pertemuan G20 di Pittsburgh tahun 2009, seluruh pemimpin G20 sepakat untuk menarik dan merasionalisasi masa penggunaan subsidi bahan bakar fosil yang sebagian akan dialokasikan bagi negara miskin. Pemimpin dunia sepakat untuk mengikutsertakan seluruh negara dalam mengeliminasi subsidi bahan bakar fosil mereka. Selanjutnya, pemimpin G20 dan APEC secara bersama-sama melakukan komitmen dalam mengatur penggunaan subsidi bahan bakar fosil. Pada tahun 2009 tersebut, gabungan dari negara-negara G20 dan APEC mewakili 96% konsumsi batubara global, 83% konsumsi global minyak, 61 % konsumsi gas termasuk didalamnya terdiri atas 87% produsen batubara, 62% produsen gas, dan 57% produksi minyak global. Penggunaan subsidi bahan bakar yang tidak efisien tetap mengacu pada pengecualian-pengecualian, terutama target yang diperuntukkan bagi subsidi rumah tangga dengan penghasilan yang rendah.

Pada tahun 2009, Indonesia belum mampu melakukan pengurangan subsidi dimana sektor energi merupakan sektor yang tidak hanya sekedar pembahasan isu ekonomi tetapi juga menyangkut faktor keamanan dalam negeri. Economic securitisation (Nyman, 2014) telah membahas konsep bahwa energi bukan semata-mata sebagai

modal dasar pembangunan tetapi juga menciptakan keamanan yang menunjang sektor-sektor ekonomi lainnya. Perbedaan konsep dari pengurangan subsidi bahan bakar fosil, masih sebatas melakukan rasionalisasi dan pemahaman mengenai pentingnya pengurangan subsidi. Komitmen G20 pada tahun tersebut berupa rasionalisasi dan melewati tahap penarikan atau keluar dari subsidi bahan bakar fosil yang dianggap mendorong konsumsi yang tidak tepat.

Kerja sama multilateral khususnya forum G20 mempunyai kontribusi yang signifikan tidak hanya dalam pemenuhan kebutuhan melalui G20 tetapi terdapat banyak keuntungan lain yang dapat mendukung penyelesaian masalah-masalah lainnya.

Kesimpulan

Dalam pemenuhan kebutuhan energi berkelanjutan, forum G20 bagi Indonesia sangat penting yaitu bekerja sama dengan negara-negara G20 dalam rangka memenuhi kebutuhan energi nasional yang saat ini masih menimbulkan berbagai permasalahan terutama dalam perilaku masyarakat yang boros pada penggunaan energi khususnya energi fosil. Forum G20 telah menjadikan kerja sama multilateral sebagai alat dari upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhannya energi. Saat ini, pemenuhan energi berkelanjutan bagi Indonesia menjadi salah satu prioritas dengan mengacu pada road map di G20 untuk berkomitmen mengimplementasikan mewujudkan energi berkelanjutan dengan mengurangi fuel subsidi dan mencoba membaurkan sumber energi. Strategi berbagai implementasi komitmen untuk mendorong kerja sama energi berkelanjutan dapat mendorong Indonesia untuk melakukan perencanaan dalam yang efektif terutama penggunaan energi domestic dimana Indonesia harus senantiasa melakukan komitmen untuk mencapai usaha dalam mencapai energi berkelanjutan baik komitmen di dalam negeri maupun bernegosiasi di forum kerja sama multilateral

Bibliografi

- Lynch, Daniel. 2010. "Democracy, Security, and Regionalism in Asia." *Asia Policy* 10(1): 189–95.
http://muse.jhu.edu/content/crossref/journals/asia_policy/v010/10.lynch.html.
- Muller, Anders Riel, Kinezuka, Ayumi, and Tanya Kerssen. 2013. "The Trans-Pacific Partnership: A Threat to Democracy and Food Sovereignty." *FoodFirst Backgrounder* 19(2): 1–4.
- Roper, Brian S. 2013. *The History of Democracy: A Marxist Interpretation*. PlutoPress.

Hak Asasi Manusia Indonesia setelah Reformasi: Kasus Gagalnya Ratifikasi Statuta Roma untuk Pengadilan Kriminal Internasional

Yessi Olivia¹

¹*Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau*

Corresponding Email: yolivia28@gmail.com

Abstrak



Argumen utama tulisan ini adalah konstelasi politik yang tercipta pasca Reformasi sangat berpengaruh terhadap praktik hak asasi manusia di Indonesia. Faktor-faktor yang menjadi penentu di sini antara lain kompromi yang dicapai antara elit politik lama dan baru, kelompok masyarakat sipil yang tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk menggiring perubahan, dan kelompok militer yang lebih dahulu melakukan konsolidasi daripada elit sipil. Dengan menganalisis dasar (rationale) dari transisi demokrasi Indonesia tampak bahwa kompromi antar elit lebih menitikberatkan pada perubahan sistem politik dari kediktatoran ke demokrasi. Pengakuan terhadap HAM dalam konteks Reformasi Indonesia dianggap sebagai prasyarat bagi Indonesia mendapat status sebagai negara demokratis. Akibatnya di satu sisi pemerintah Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru sibuk memperbaiki sistem HAM dengan segala aturan hukum dan organisasi tetapi di sisi lain pemerintah tidak merasa punya urgensi untuk melakukan perbaikan terhadap perlindungan HAM di Indonesia. Studi kasus tentang gagalnya ratifikasi Statuta Roma menunjukkan masalah HAM (dan kebijakan HAM) di Indonesia sebagai akibat dari kondisi politik yang tercipta pasca Reformasi.

Kata Kunci

hak asasi manusia, kebijakan HAM, demokratisasi

Pendahuluan

Tulisan ini akan mengevaluasi kebijakan hak asasi manusia (HAM) yang diterakan di dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Melalui studi kasus rencana untuk mengadopsi Statuta Roma Pengadilan Kriminal Internasional (*International Criminal Court*) tulisan ini menunjukkan dua hal. Pertama, adanya perubahan sikap pemerintah tentang hak asasi manusia bahwa hak asasi manusia adalah universal dan bagian penting dari demokrasi. Kedua, bahwa implementasi dari kebijakan hak asasi manusia sangat dipengaruhi oleh proses demokratisasi di mana terjadi kompromi politik antara elemen-elemen rezim Orde Baru dengan elit-elit moderat yang muncul setelah Suharto turun dari kekuasaan tahun 1998.

Statuta Roma adalah perjanjian internasional yang mendasari dibentuknya Pengadilan Kriminal Internasional—ICC. ICC yang beroperasi tahun 2002 memiliki yurisdiksi untuk mengadili kasus kejahatan luar biasa seperti genosida, kejahatan atas kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. ICC adalah pengadilan yang permanen, bukan ad-hoc seperti pengadilan kriminal internasional serupa yang mengadili penjahat perang di Nuremberg, Tokyo, atau untuk kasus Rwanda dan bekas negara Yugoslavia.

Rencana untuk meratifikasi Statuta Roma ini awalnya diagendakan melalui RANHAM 2004-2009 di masa kepemimpinan Presiden Megawati Sukarno Putri. Karena Presiden Megawati kalah di dalam pemilu tahun 2004, RANHAM 2004-2009 kemudian diteruskan ke pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam dua periode kepemimpinan Presiden SBY target untuk mengadopsi Statuta Roma ini tidak dipenuhi walaupun pejabat yang terkait dengan implementasi RANHAM berulang kali menyampaikan keinginan pemerintah untuk meratifikasi Statuta Roma ini (Parliamentarians for Global Action, 2007).

Patut digarisbawahi di sini bahwa permasalahan HAM di Indonesia sangat kompleks, terutama untuk negara seperti Indonesia yang melewati periode di mana pemerintah yang otoriter melakukan dan juga membiarkan pelanggaran hak asasi manusia terjadi. Beberapa peneliti sebelumnya telah membahas bagaimana kemandekan perlindungan hak asasi manusia terkait dengan lambatnya reformasi hukum di Indonesia (McRae, 2017; Rosser, 2017) atau budaya korupsi yang mengakar dan sulit dihapuskan (Hadiprayitno, 2010; Suryadarma, 2012). Studi kasus tentang rencana ratifikasi Statuta Roma menunjukkan bahwa stagnasi kebijakan HAM di Indonesia disebabkan oleh akumulasi dari proses transformasi politik yang kompromistis, sehingga menghilangkan urgensi dari penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lampau, politik birokrasi (*bureaucratic politics*), dan keterbatasan masyarakat sipil untuk mendorong pemerintah menjalankan kebijakan hak asasi manusianya.

Tulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Di bagian pertama penulis akan menjabarkan keterhubungan antara HAM dengan demokratisasi, lalu akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai hak asasi manusia di dalam konteks Reformasi. Di bagian selanjutnya penulis akan menganalisis kasus pengadopsian Statuta Roma yang batal diwujudkan.

Pembahasan

Hak Asasi Manusia dan Demokratisasi

Sejumlah perjanjian internasional dan norma HAM internasional dan dibentuknya organisasi-organisasi internasional untuk mengatur hal-hal tersebut, yang muncul setelah Perang Dunia II usai menandakan lahirnya institusi HAM modern (Donnelly,

2013).¹ Terbentuknya rezim internasional mengenai HAM adalah sesuatu yang istimewa karena proses negosiasi untuk aturan-aturan tentang bagaimana negara berkewajiban untuk melindungi hak warga negaranya disepakati di luar negeri. Pemerintah kemudian bertanggung jawab untuk menjalankan isi kesepakatan tersebut di dalam negeri (domestik) dan senantiasa akan diminta pertanggungjawabannya oleh masyarakat sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) atas produk hukum internasional tersebut (Simmons, 2009). Kondisi ini sangat berbeda dengan perjanjian internasional lainnya yang hanya berdampak pada penyesuaian kebijakan sebuah negara atas negara lain.

Penelitian yang membahas perilaku negara dalam kerja sama internasional mengenai hak asasi manusia telah banyak dilakukan. Oona Hathaway, misalnya, mencari penjelasan mengapa negara mau ikut dalam institusi internasional hak asasi manusia (Hathaway, 2007). Ada juga yang mengkaji apakah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia akan membawa perbaikan atas praktik hak asasi manusia atau bagaimana norma hak asasi manusia mengalami proses internalisasi dan diterima di sebuah negara (Goodman & Jinks, 2003; Neumayer, 2005). Hal lain yang menjadi perhatian khusus dari para peneliti studi hak asasi manusia adalah pengaruh dari institusi hak asasi manusia terhadap politik domestik. Beth A. Simmons berpendapat bahwa sikap positif yang ditunjukkan pemerintah atas suatu perjanjian hak asasi manusia berkorelasi dengan agenda legislasi pemerintah. Perjanjian tersebut dalam hal ini akan berfungsi sebagai “proposal yang jelas” yang akan digunakan untuk menantang status quo (Simmons, 2009, p. 128). Penelitian yang dilakukan oleh Andrew Moravcsik juga menunjukkan adanya peran dari kelompok domestik mendukung diadopsinya institusi hak asasi manusia. Dalam studi kasus dibentuknya *European Convention for the Protection of Human Rights*, dukungan elit-elit pro-demokrasi didasarkan dari keinginan untuk melakukan konsolidasi demokrasi dan menghambat pergerakan rival mereka yang tidak pro-demokrasi (Moravcsik, 2000). Keberadaan institusi hak asasi manusia tidak hanya mempengaruhi elit-elit politik tetapi juga massa yang menginginkan perubahan. Mereka lalu menjadi agen yang mempromosikan nilai-nilai hak asasi manusia tersebut dan menuntut pemerintah untuk melakukan perubahan (Simmons, 2009).

Penelitian-penelitian di atas secara gamblang memberikan penjelasan mengapa negara-negara mengambil keputusan tertentu terkait dengan hak asasi manusia. Untuk kasus Indonesia penjelasan tentang perilaku pemerintah terkait dengan instrumen hak asasi manusia menjadi rumit karena ada elemen demokratisasi yang berpengaruh terhadap arah politik Indonesia terutama tentang bagaimana pendekatan yang akan

¹ Rezim internasional yang mengatur tentang hak asasi manusia mulai dibentuk seiring dengan berdirinya PBB pada tahun 1945. Usaha-usaha awal adalah melakukan mengkodefikasi norma-norma hak asasi manusia ke dalam konvensi dan kovenan internasional, di mulai dari Deklarasi Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) tahun 1948.

diambil pemerintah mengenai isu hak asasi manusia. Arti dari demokratisasi di sini adalah “proses yang kompleks, tidak singkat, dinamis dan terbuka... terkait dengan politik partisipatif yang berdasarkan aturan dan konsensual” (Whitehead, 2002, p. 27). Samuel Huntington merumuskan tiga klasifikasi mengenai hubungan antara aktor dalam konteks demokratisasi: *transformation*, *transplacement* dan *replacement* (Huntington, 1993). Transformasi menggambarkan proses di mana elit mendominasi perubahan, sebaliknya *replacement* menekankan pada besarnya pengaruh kelompok oposisi dalam menyetir perubahan. Kondisi ketiga, *transplacement*, terjadi ketika kedua kelompok, pemerintah dan oposisi, bekerja sama untuk membawa perubahan yang demokratis. Huntington mengingatkan bahwa dalam praktiknya tidak ada perubahan rezim yang benar-benar pas dengan tiga klasifikasi tersebut karena perubahan akan berganti-ganti bentuk dari satu tipe ke tipe yang lain.

Satu hal yang mendapat perhatian khusus di dalam transformasi menuju demokrasi adalah hubungan antara demokrasi dan hak asasi manusia. Manuel Antonio Garreton berpendapat bahwa isu penting yang dikemukakan saat kediktatoran berakhir adalah bagaimana cara menangani “warisan dari rezim terdahulu” atau yang ia sebut sebagai “*the authoritarian enclaves*” (Garreton, 1994, p. 223). Peninggalan rezim terdahulu ini, mencakup institusi, aktor (misalnya kelompok militer) dan nilai-nilai, menurut Garreton berpotensi untuk menghalangi praktik-praktik demokrasi ke depannya. Hak asasi manusia adalah hal ini digunakan sebagai cara untuk menjatuhkan elemen-elemen rezim terdahulu dengan harapan pemerintah baru mendapat pengakuan (legitimasi) yang kuat. Penegakan hak asasi manusia dalam periode demokratisasi ini pada praktiknya akan menghasilkan dua logika. Pertama adalah ‘*ethical-symbolic logic*’ (Garreton, 1994) yang menekankan pada penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau. Ini termasuk “penyebaran informasi dan pencarian kebenaran tentang kejahatan dan pengakuan bahwa kejahatan di masa lampau itu terjadi, proses pengadilan dan penghukuman, dan reparasi (ganti rugi) untuk korban kejahatan di masa lalu” (Garreton, 1994, p. 223). Menurut Garreton, demokrasi keliru diartikan sebagai hak asasi manusia. Logika kedua adalah ‘*political-state logic*’ yang menempatkan demokrasi di atas hak asasi manusia. Di bawah logika ini fokus utama adalah bagaimana bertransformasi dari bentuk negara yang otoriter menjadi demokratis; hak asasi manusia di sini dianggap sebagai bagian dari isu-isu demokrasi yang ada.

Dua logika ini, yang mewakili kepentingan masyarakat dan kepentingan negara, menurut Garreton akan saling bersaing satu sama lain karena khawatir akan terjadi kemunduran apabila tujuan tidak tercapai.

If the spectre haunting the ethical logic consists of forgetting and impunity, the spectre haunting the political-state logic is authoritarian regression. Taking the metaphor to its extreme, one can say that there is a hidden reciprocal blackmail between the two competing logics. Some will claim that the radical

solution to the human rights problem will invite authoritarian regression. Others will say that if the human rights issue is not resolved, democracy will lack legitimacy (Garreton, 1994, p. 224)

Garreton berpendapat bahwa tingkat perbedaan di antara kedua logika ini tidak sama di setiap negara dan tidak ada solusi sederhana untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam transisi demokrasi. Namun, ia menambahkan bahwa bagaimana proses demokratisasi menangani masalah pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau dan “bagaimana mengkombinasikan kedua logika tersebut” akan sangat membantu memahami “pertanyaan tentang hak asasi manusia paska periode kediktatoran” (Garreton, 1994, p. 225).

Hak Asasi Manusia dalam Konteks Reformasi 1998

Salah satu perkembangan yang menarik untuk dikaji dari mundurnya Suharto tahun 1998 adalah perubahan sikap pemerintah tentang hak asasi manusia. Di masa Orde Baru pemerintah menganggap konsep ‘hak asasi manusia’ sebagai produk Barat yang tidak sesuai untuk diterapkan di Indonesia yang menganut kebudayaan Timur—kepentingan bersama atau kelompok di atas kepentingan individu (lihat Barr, 2000; Bell, 1996; Langlois, 2001; Mauzy, 1997). Kondisi di mana pemerintah mengabaikan nilai universalitas hak asasi manusia ini kemudian diperparah dengan dibatasinya hak-hak sipil seperti hak untuk berserikat, bergabung dalam partai politik, dan hak untuk mendapat perlakuan yang sama (tidak diskriminatif) (Lubis & Abdullah, 1981; YLBHI, 1990). Patut digarisbawahi di sini bahwa ketidakperdulian pemerintah Orde Baru tentang hak asasi manusia bukan berarti pemerintah saat itu mengasingkan diri dari forum-forum internasional yang membahas isu hak asasi manusia. Pemerintah Orde Baru tercatat mengadopsi beberapa instrumen hak asasi manusia—Konvensi Hak-hak Anak diratifikasi tahun 1990 dan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita diratifikasi tahun 1984. Indonesia pun terlibat dalam *World Conference on Human Rights*, pertemuan internasional yang diorganisir oleh Persatuan Bangsa-Bangsa pada tahun 1993 di Wina, Austria, yang salah satu agendanya adalah merumuskan kebijakan promosi dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, bisa dianggap bahwa keterlibatan Indonesia saat itu adalah bagian dari upaya *window dressing*—partisipasi semu—tanpa ada keseriusan untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusia di dalam negara (Prasetyo, 2009).

Reformasi 1998—yang secara dramatis mengubah perpolitikan di Indonesia—membawa pengaruh yang signifikan terhadap konsep hak asasi manusia di Indonesia. Presiden B.J. Habibie yang didesak baik dari dalam maupun luar negeri untuk segera melakukan perubahan kemudian mengambil sejumlah keputusan yang di antaranya menegakkan kembali hak-hak sipil masyarakat. Kebijakan-kebijakan ini termasuk pembebasan media, menghilangkan aturan pembatasan partai politik, dan merancang pemilu yang bebas dan terbuka. Pemerintahan Habibie juga bertanggung jawab atas penguatan Komisi Hak Asasi Manusia sebagai lembaga yang independen dan

rancangan kebijakan hak asasi manusia dalam skim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), program lima tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan promosi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia (lihat Herbert, 2008; Hosen, 2003; Kartasasmita, 2013).

Walaupun Reformasi menandai berakhirnya otoritarianisme, proses demokratisasi Indonesia tidaklah berjalan mulus. Hal yang paling menonjol dalam transformasi menuju demokrasi di Indonesia adalah tidak hilangnya pengaruh elemen-elemen Orde Baru seiring dengan turunnya Presiden Suharto dari puncak kekuasaan. Golongan Karya (Golkar) yang merupakan ‘partai pemerintah’ di masa Orde Baru masih mendominasi parlemen, begitu pula dengan faksi TNI/Polri Kelompok-kelompok bisnis yang dekat dengan Suharto dan memiliki pengaruh besar di Indonesia pun tidak serta merta hilang dominasinya dalam perpolitikan Indonesia. Vedi Hadiz menjelaskan mengapa elemen-elemen Orde Baru ini bisa selamat dari perubahan drastis di tahun 1998:

The legacy of authoritarianism is one aspect of the problem that certainly requires a significant degree of emphasis in the case of Indonesia. Immediately following the fall of Soeharto, the social forces that were not directly nurtured by the New Order and, therefore, would possibly have an interest in challenging the system of predatory capitalism that it forged (for example, sections of the liberal intelligentsia and professional groups in society, or the politically marginalised working class or peasantry) were not able to organise and develop into a coherent social force. This is in turn allowed for the continued ascendance of the many elements of the ancient regime—who were always more organised, coherent and endowed with material resources in the first place—in the context of an illiberal form of democracy that was mainly to be run by the logic of money politics. In a nutshell, these elements were better positioned than others in taking advantage of the opening up of Indonesian politics after 1998 (Hadiz, 2010, p. 46).

Besarnya pengaruh kelompok-kelompok dari Orde Baru inilah yang kemudian menyebabkan konsolidasi demokrasi di Indonesia diwarnai dengan kompromi antara elit-elit politik dari rezim terdahulu dengan elit-elit yang muncul di masa Reformasi. Contohnya bisa terlihat dari peran Golkar dalam memenangkan Abdurrahman Wahid dalam pemilihan presiden tahun 1999.

Masalah berikutnya yang timbul dari Reformasi 1998 adalah kalah cepatnya pemerintah sipil dalam mengawal reformasi militer. Kebijakan untuk mereformasi peran dan fungsi militer—termasuk mundurnya militer dari politik—datang dari kalangan militer sendiri bukan dari pemerintah sipil. Tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah padahal hal ini penting untuk menegakkan supremasi sipil atas militer. Kelemahan pemerintah sipil dalam hal ini bisa dijelaskan dari dinamika hubungan antara Presiden Habibie dengan kelompok militer saat itu. Sebagai presiden

Habibie adalah pemimpin yang legitimasinya diragukan karena ia adalah bagian dari rezim terdahulu. Dukungan dari kelompok militer dalam hal ini adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan oleh Habibie (Mietzner, 2006). Implikasi dari lebih dahulunya kalangan militer terkonsolidasi dibandingkan elit-elit sipil adalah susahnya untuk mengontrol sejauh mana reformasi militer sudah dilaksanakan. Padahal banyak permasalahan yang belum terselesaikan di dalam tubuh militer, seperti keterlibatan tentara dalam dunia bisnis (Baker, 2015) atau mengenai reformasi peradilan militer (Anggoro, 2007; Qotimah, 2009) untuk memutus impunitas yang selama ini melekat di tubuh tentara.

Sementara itu, walaupun gerakan Reformasi 1998 dimotori oleh kelompok masyarakat sipil, terutama dari kalangan mahasiswa, secara umum kekuatan masyarakat sipil di Indonesia tidak begitu signifikan untuk mendorong pemerintah melakukan perubahan. Masyarakat sipil muncul sebagai kekuatan yang terpecah-pecah dalam unit-unit kecil yang masing-masingnya memiliki perspektif yang berbeda tentang arah yang hendaknya diambil untuk memajukan demokrasi di Indonesia. Perbedaan-perbedaan dalam memandang isu ini tampak dalam kasus penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Sebagian kelompok masyarakat sipil menginginkan proses peradilan dan reparasi bagi korban dan keluarga korban. Sementara kelompok masyarakat sipil yang lain lebih mengutamakan proses rekonsiliasi yang tidak disertai dengan proses hukum (lihat Sulistiyanto, 2007; Wahyuningroem, 2013). Kurang terorganisirnya kelompok masyarakat sipil di Indonesia ini memiliki sejarah panjang terkait dengan kebijakan rezim Orde Baru yang membatasi hak-hak untuk berserikat. Isu-isu mengenai demokrasi dan hak asasi manusia kemudian hanya dibahas oleh sebagian kecil kelompok masyarakat sipil terutama di kalangan masyarakat perkotaan (lihat Aspinall, 2005; Boudreau, 1999; Heryanto & Hadiz, 2005).

Apabila kita kembali kepada dua logika yang dijelaskan oleh Garretton, maka untuk kasus demokratisasi di Indonesia logika yang mendominasi adalah *political-state logic*. Menyegerakan transformasi demokrasi adalah prioritas bagi pemerintah baru dan persoalan-persoalan yang menyangkut pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau tidak dianggap mendesak untuk diselesaikan. Dalam skenario ini, hak asasi manusia yang diejawantahkan ke dalam undang-undang dan aturan-aturan hanya dianggap sebagai prasyarat untuk menuju demokrasi. Walaupun jika dibandingkan dengan kondisi Orde Baru hak asasi manusia kini diakui, negara belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal karena disibukkan dengan demokratisasi.

Studi Kasus Gagalnya Rencana Pengadopsian Statuta Roma ICC

Statuta Roma ICC bukanlah instrumen hak asasi manusia utama seperti halnya *International Covenant on Civil Political Rights (ICCPR)* dan *International Covenant*

*on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR).*² Keistimewaan nilai yang diusung Statuta Roma untuk ICC adalah penekanan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab atas semua perbuatannya termasuk perbuatan kriminal. Seperti yang disebut di awal tulisan, ada empat kejahatan luar biasa yang diatur di dalam Statuta Roma: genosida, kejahatan atas kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Melalui prinsip tanggung jawab individu, semua orang, termasuk pimpinan tertinggi kesatuan militer pun bisa dituntut ke pengadilan apabila terdapat indikasi keterlibatan mereka dalam pelanggaran berat HAM. Antara ICC dengan pengadilan negara yang meratifikasi Statuta Roma yang berlaku adalah hubungan komplementer; ICC hanya akan beroperasi apabila negara tidak dapat atau tidak siap untuk menjalankan proses pengadilan (ICC, 1998).

Bagi Indonesia yang memiliki budaya impunitas atau kebal sekelompok orang dari jangkauan hukum karena jabatan dan kekuasaan yang dimilikinya (lihat Meijer, 2006), pengadopsian Statuta Roma ini sangat penting karena terkait dengan upaya untuk memutus rantai impunitas. Statuta Roma juga punya signifikansi terkait dengan kelanjutan reformasi hukum di Indonesia yang hingga saat ini hanya memiliki Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 untuk mengatur dua pelanggaran HAM berat yaitu: genosida dan kejahatan atas kemanusiaan.

Terkait dengan UU tersebut di atas, Statuta Roma dan Indonesia sebenarnya memiliki hubungan yang unik. Rumusan Statuta Roma disahkan dalam Pertemuan Diplomatik di Roma pada tahun 1998. Indonesia adalah bagian dari negara-negara yang terlibat dalam negosiasi perumusan draf. Ketika Statuta Roma tersebut diadopsi, Indonesia memilih posisi abstain dengan alasan proses ratifikasi memerlukan persetujuan DPR dan kondisi Indonesia saat itu (periode transisi demokrasi) tidak memungkinkan untuk menyegerakan ratifikasi. Di dalam negeri keberhasilan komunitas internasional dalam mengesahkan Statuta Roma mendorong kelompok masyarakat sipil yang terlibat dalam isu *transitional justice*—keadilan pada masa transisi—untuk mengangkat agenda ratifikasi Statuta Roma (Soeprapto, 2002). Statuta Roma dalam hal ini dianggap penting karena mendukung upaya penghapusan budaya impunitas di Indonesia. Namun karena banyaknya agenda yang ditangani kelompok masyarakat sipil saat itu, kampanye ratifikasi Statuta Roma kemudian ditunda.

Ketika Indonesia dihadapkan pada krisis pasca jajak pendapat di Timor Timur 1999, Statuta Roma untuk ICC kembali menjadi bagian dari sejarah politik Indonesia. Dalam upaya menangkal tuntutan agar pelaku pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur diadili di pengadilan/tribunal internasional, Indonesia menggesakan diterbitkannya undang-undang yang mengatur kejahatan hak asasi manusia. Dengan menjadikan Statuta Roma ICC sebagai model, UU No. 26 Tahun 2000 kemudian lahir. Namun

² Indonesia telah mengadopsi kedua perjanjian internasional ini pada tahun 2005; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 untuk ICESCR dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 untuk ICCPR.

hanya dua kejahatan saja yang diatur di dalam UU ini, yaitu genosida dan kejahatan atas kemanusiaan.

UU No. 26 Tahun 2000 ini sebenarnya memiliki beberapa masalah (lihat Abidin, 2010; Soeprapto, 2006). Pertama terkait dengan nomenklatur yang tidak tepat. UU ini diberi nama UU tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sementara kejahatan yang diatur di dalamnya adalah kejahatan luar biasa yang hanya meliputi dua tipe saja (genosida dan kejahatan atas kemanusiaan). Sementara Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak menjelaskan mengenai masalah pelanggaran hak asasi manusia yang biasa. Kejanggalan lainnya yang ditemukan di dalam UU No. 26 Tahun 2000 adalah penggunaan kata-kata yang merubah makna asli dari isi Statuta Roma sebagaimana yang ditulis di bawah ini:

*A military commander or person effectively acting as a military commander **shall be** criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by forces under his or her effective command and control, or effective authority and control as the case may be, as a result of his or her failure to exercise control properly over such forces (Pasal 28 Statuta Roma).*

*Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer **dapat** dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut” (Pasal 42 UU No. 26/2000).*

Pasal 28 Statuta Roma menunjukkan bahwa seseorang dengan pangkat tertinggi bisa diajukan ke pengadilan atas kejahatan hak asasi manusia. Prinsip tanggung jawab individu dalam hal ini berlaku. Perubahan kata ‘*shall*’ atau bisa menjadi ‘dapat’ di Pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000 adalah bentuk dari melanggengkan budaya impunitas karena pimpinan kesatuan tentara bisa tidak dimintai pertanggungjawabannya.

Kejanggalan-kejanggalan yang terdapat di UU No. 26 Tahun 2000 ditambah lagi dengan buruknya proses pengadilan pelanggar hak asasi manusia di Timor Timur (Cohen, 2003) menunjukkan beberapa hal. Pertama, perumusan UU No. 26 Tahun 2000 dipengaruhi oleh orang-orang yang berkepentingan untuk melanggengkan budaya impunitas. Kedua, penolakan kelompok militer terhadap upaya untuk menindaklanjuti pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur menunjukkan masih belum tercapainya supremasi sipil atas militer. Hingga kini UU No. 26 Tahun 2000 hanya dipakai untuk mengadili tiga kasus pelanggaran hak asasi manusia: kasus Timor-Timur di tahun 2002, Tanjung Periok 2003, dan Abepura 2004. Tidak ada

upaya perbaikan terhadap UU tersebut walaupun banyak terdapat kesalahan di dalamnya.

Abainya pemerintah dalam memperbaiki UU No. 26 Tahun 2000 menggambarkan betapa dominannya logika *political state* dari pada logika etika dalam transformasi demokrasi Indonesia. Hal ini kemudian menjadi preseden buruk terhadap rencana untuk mengadopsi Statuta Roma ICC. Pemerintahan SBY yang semula menargetkan diratifikasinya Statuta Roma pada tahun 2008 kemudian mengganti jadwal ratifikasi menjadi tahun 2013. Namun hingga masa kepemimpinan SBY berakhir, Statuta Roma tidak diratifikasi oleh pemerintah.

Ada beberapa hal yang terkait dengan tidak diperhatikannya logika etika oleh pemerintah. Sejak Reformasi dimulai pemerintah telah dihadapkan dengan tuntutan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa Orde Baru. Mulai dari kasus pembantaian anggota dan orang-orang yang dituduh mendukung partai Komunis, kasus Tanjung Priok, kasus Talang Sari, kasus DOM di Aceh dan Papua, hingga kasus kerusuhan tahun 1998. Presiden Habibie sempat merencanakan akan dibentuknya tim rekonsiliasi. Namun rencana ini tidak berhasil diwujudkan oleh presiden Habibie dan oleh presiden-presiden setelahnya. Bahkan Undang Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dianulir oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2006 (Mahkamah Konstitusi, 2006).³ Tidak ada upaya yang kemudian dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki UU No. 27 Tahun 2004 tersebut.

Terdapat beberapa kelompok masyarakat sipil yang terlibat aktif dalam kampanye ratifikasi Statuta Roma ini. Mereka tergabung ke dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional. Selain terlibat dalam diseminasi informasi tentang Statuta Roma dan ICC, mereka juga aktif melobi parlemen dan pemerintah untuk menyuarakan pentingnya Statuta Roma bagi kelanjutan reformasi hukum Indonesia. Koalisi juga melibatkan beberapa tokoh nasional yang dianggap mumpuni bidang ilmu hukumnya untuk mendukung kampanye Statuta Roma (Mugiyanto, 2009). Namun seperti halnya pergerakan masyarakat sipil di Indonesia, Koalisi tidak cukup kuat untuk mempengaruhi pemerintah untuk mengesahkan Statuta Roma.

Satu hal yang penting digarisbawahi di sini terkait dengan ketidakseriusan pemerintah dalam menjalankan RANHAM sebagai program yang dirancang untuk promosi hak asasi manusia di Indonesia. Walaupun di beberapa kesempatan pejabat pemerintah mengungkapkan keinginan untuk meratifikasi Statuta Roma (Hermawan, 2009; Hukum Online, 2012; Parliamentarians for Global Action, 2007), yang menjadi bagian dari program RANHAM, namun yang terjadi di balik itu adalah terjadi perbedaan

³ Beberapa LSM mengusulkan dilakukannya *judicial review* atas UU No. 27 Tahun 2004 terkait dengan tidak diperkuatnya otoritas komisi kebenaran dan tidak diperhatikannya hak-hak korban. Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan UU NO. 27 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan kemudian menganulirnya.

pendapat di antara kementerian mengenai Statuta Roma. Kementerian-kementerian yang terkait dengan ratifikasi perjanjian ini, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Pertahanan (Hukum Online, 2011, 2012). Resistensi terhadap rencana pengadopsian Statuta Roma ditunjukkan oleh Kementerian Pertahanan di mana pada tahun 2013 Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyebutkan bahwa Statuta Roma belum terlalu penting untuk diratifikasi karena Indonesia telah memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Aritonang, 2013).

Resistensi Kementerian Pertahanan terhadap Statuta Roma sebenarnya sangat terkait dengan isu pelanggaran HAM pasca jejak pendapat di Timor Timur di bulan Agustus 1999. Akibat dari diberitakannya keterlibatan tentara Indonesia dalam kasus pelanggaran HAM, komunitas internasional mengecam Indonesia dan mendesak dibentuknya tribunal internasional untuk mengadili pelaku kejahatan HAM di Timor Timur (lihat Amnesty International, 1999; The Jakarta Post, 1999). Indonesia bersikeras untuk melakukan proses penyelidikan dan pengadilan di dalam negeri; dalam waktu yang singkat Indonesia kemudian membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Timor Timur pada bulan September 1999, tim investigasi khusus di bawah Komnas HAM, dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 26 tentang Pengadilan HAM pada bulan November 2000. Sejak dibentuknya KPP HAM Timor Timur hingga dilangsungkannya proses pengadilan untuk mengadili sekelompok orang yang dianggap bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM, kelompok tentara adalah kelompok yang paling menunjukkan ketidaksukaannya atas proses hukum tersebut. Jenderal Wiranto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan misalnya, menolak keras tuduhan yang dialamatkan kepadanya yaitu sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap tragedi kemanusiaan di Timor Timur. Ia juga mengkritisi KPP HAM Timor Timur yang dianggap bias terhadap tentara sehingga mengeluarkan hasil penyelidikan yang tidak netral (The Straits Times, 2000). Kelompok tentara juga mendapat dukungan dari sebagian masyarakat sipil yang melihat keberadaan KPP HAM sebagai bagian dari konspirasi bangsa asing untuk menyudutkan Indonesia melalui isu HAM (Chrisnandi, 2000; Forum Peduli Persatuan dan Kesatuan Bangsa, 2000).

Kasus pelanggaran HAM di Timor Timur adalah kasus pertama yang dibawa ke pengadilan HAM. Proses pengadilan *ad-hoc* tersebut mendapat banyak kritikan baik dari dalam dan luar negeri. Pemerintah Indonesia dikritik tidak serius (Cohen, 2003) menjalankan tugas dan fungsinya dan dianggap hanya melakukan proses pengadilan untuk sebagai formalitas semata (Casey, 2002). Besar kemungkinan bahwa resistensi terhadap keberadaan pengadilan HAM yang dapat menjangkau semua kalangan termasuk kelompok militer menjadi dasar keragu-raguan pemerintah dalam meratifikasi Statuta Roma terutama apabila pihak Kementerian Pertahanan

menganggap ICC sebagai instrumen asing yang berpotensi untuk mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Walaupun peran dan fungsi ICC sudah dipaparkan jelas di dalam Statuta Roma dan masuknya jaksa ICC ke dalam sebuah negara harus melalui prosedur yang tidak sederhana, pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan SBY tidak memberikan sinyal yang jelas tentang akhir rencana ratifikasi Statuta Roma. Bukan hanya rencana ratifikasi Statuta Roma ini yang diabaikan, pemerintahan SBY juga gagal menunaikan janjinya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Kasus rencana Statutu Roma ini membawa kita untuk melihat posisi HAM setelah Indonesia melakukan proses Reformasi lebih dari dua dekade yang lalu. Pengakuan pemerintah terhadap HAM sebagai bagian penting dari pengalaman demokrasi Indonesia adalah sebuah perubahan yang positif. Hanya saja pengakuan yang tidak dilanjutkan dengan kesungguhan pemerintah untuk menjalankan program-program HAM yang sudah disusun mengindikasikan bahwa pemerintah hanya menganggap HAM sebagai pelengkap dari demokrasi bukan tanggung jawab untuk memperbaiki kualitas perlindungan HAM untuk masyarakat.

Penutup

Tulisan ini telah membahas mengenai posisi hak asasi manusia dalam konteks Reformasi 1998 di mana hak asasi manusia dianggap hanya sebagai bagian dari proses demokratisasi Indonesia. Implikasi dari hal ini adalah pengabaian masalah-masalah hak asasi manusia yang butuh untuk diselesaikan segera. Adalah menjadi sesuatu yang ironis ketika Reformasi berakibat pada diakuinya hak asasi manusia oleh pemerintah, sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, namun pengakuan ini tidak ditindaklanjuti dengan peningkatan kualitas perlindungan hak asasi manusia.

Studi kasus Statuta Roma adalah kasus yang unik karena pemerintah Indonesia ikut terlibat dalam merancang perjanjian internasional tersebut. Dengan memasukkannya ke dalam program RANHAM Indonesia memberikan komitmen untuk ratifikasinya. Namun pemerintah Indonesia tidak berhasil mewujudkan program ratifikasi ini hingga batas akhir rencana ratifikasi. Kegagalan meratifikasi Statuta Roma ini sebenarnya adalah bagian kecil dari pengabaian masalah-masalah yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Dan semua ini terkait dengan jalan yang diambil oleh Indonesia pada masa transisi demokrasinya di tahun 1998.

Bibliografi

- Abidin, Z. (2010, 27 October 2010). *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Regulasi, Penerapan dan Perkembangannya*. Jakarta.
- Amnesty International. (1999). Open Leter to all members of the Commission on Human Right from Amnesty International's Secretary General, Pierre Sané [Press release]

- Anggoro, K. (2007). Departemen Pertahanan Republik Indonesia Supremasi Sipil tanpa Kendali Efektif. In B. Sukadis (Ed.), *Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2007*. Jakarta: LESPERSI & DCAF.
- Aritonang, M. S. (2013, 21 May). Govt Officially Rejects Rome Statute. *The Jakarta Post*. Diakses dari <http://www.thejakartapost.com/news/2013/05/21/govt-officially-rejects-rome-statute.html> Tanggal akses 01/11/2019.
- Aspinall, E. (2005). *Opposing Suharto Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*. Stanford: Stanford University Press.
- Baker, J. (2015). Professionalism without reform: the security sector under Yudhoyono. In E. Aspinall, M. Mietzner, & D. Tomsa (Eds.), *The Yudhoyono Presidency: Indonesia's Decade of Stability and Stagnation*. Singapore: ISEAS.
- Barr, M. D. (2000). Lee Kuan Yew and the "Asian values" debate. *Asian Studies Review*, 24(3), 309-334.
- Bell, D. (1996). The East Asian challenge to human rights: Reflections on an East West dialogue. *Human Rights Quarterly*, 18(3), 641-667.
- Boudreau, V. (1999). Diffusing democracy? People power in Indonesia and the Philippines. *Bulletin of Concerned Asian Scholars*, 31(4), 3-18.
- Casey, M. (2002, 12 August). Verdicts in East Timor trial expected, but will justice be done? *Associated Press*.
- Chrisnandi, Y. (2000). *KPP HAM bukan pengadilan HAM Catatan kritis atas kinerja KPP HAM (KPP HAM is not a criminal court Critical notes on the performance of KPP HAM)*. Jakarta: Yayasan Kebangsaan Bersatu.
- Cohen, D. (2003). *Intended to Fail: The Trials Before the Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta*. Diakses dari <https://www.ictj.org/publication/intended-fail-trials-ad-hoc-human-rights-court-jakarta> Tanggal akses 01/11/2019.
- Donnelly, J. (2013). *Universal human rights in theory and practice*. New York: Cornell University Press.
- Forum Peduli Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Ed.) (2000). *Mereka bicara soal KPP-HAM Tim-Tim: Konspirasi Jatuhkan TNI & Disintegrasi?* Jakarta: Forum Peduli Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
- Garreton, M. A. (1994). Human Rights in Processes of Democratisation. *Journal of Latin American Studies*, 221-234.
- Goodman, R., & Jinks, D. (2003). Measuring the effects of human rights treaties. *European Journal of International Law*, 14(1), 171-183.
- Hadiprayitno, I. I. (2010). Defensive enforcement: Human rights in Indonesia. *Human rights review*, 11(3), 373-399.
- Hadiz, V. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective*. Stanford: Stanford University Press.
- Hathaway, O. A. (2007). Why do countries commit to human rights treaties? *Journal of conflict resolution*, 51(4), 588-621.

- Herbert, J. (2008). The legal framework of human rights in Indonesia. In T. Lindsey (Ed.), *Indonesian Law and Society* (2nd ed.). Annandale: The Federation Press.
- Hermawan, A. (2009, 5 May). RI Committed to Ratifying ICC, but Doubt Remains. *The Jakarta Post*. Retrieved from <http://www.thejakartapost.com/news/2009/05/05/ri-committed-ratifying-icc-doubt-remains.html>
- Heryanto, A., & Hadiz, V. R. (2005). Post-authoritarian Indonesia. *Critical Asian Studies*, 37(2), 251-275. doi:10.1080/14672710500106341
- Hosen, N. (2003). Indonesian Political Laws in Habibie Era: Between Political Struggle and Law Reform. *Nordic Journal of International Law*, 72, 483-518.
- Hukum Online. (2011, 13 December). Silang Pendapat Ratifikasi Statuta Roma. Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ee6a8cbd2155/silang-pendapat-ratifikasi-statuta-roma-> Tanggal akses 01/11/2019.
- Hukum Online. (2012, 18 July). Dua Kementerian Setuju Ratifikasi Statuta Roma. *HukumOnline.com*. Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt500635c0983f6/dua-kementerian-setuju-ratifikasi-statuta-roma> Tanggal akses 01/11/2019.
- Huntington, S. P. (1993). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* (Vol. 4). Norman: University of Oklahoma press.
- ICC. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court*. Diakses dari http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/legal_texts_and_tools/official_journal/Pages/rome_statute.aspx Tanggal 01/11/2019.
- Kartasmita, G. (2013). *Managing Indonesia's transformation : an oral history*. Singapore: World Scientific.
- Langlois, A. J. (2001). *The Politics of Justice and Human Rights*. New York: Cambridge University Press.
- Lubis, T. M., & Abdullah, F. (1981). *Langit Masih Mendung: Laporan Keadaan Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia 1980*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, 020/PUU-IV/2006 C.F.R. (2006).
- Mauzy, D. K. (1997). The human rights and 'Asian values' debate in Southeast Asia: Trying to clarify the key issues. *The Pacific Review*, 10(2), 210-236.
- McRae, D. (2017). Indonesian Capital Punishment in Comparative Perspective. *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 173(1), 1-22.
- Meijer, M. (2006). *The scope of impunity in Indonesia*. Utrecht: Netherlands Humanist Committee on Human Rights.
- Mietzner, M. (2006). The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance. *Policy Studies*, 23.

- Moravcsik, A. (2000). The origins of human rights regimes: Democratic delegation in postwar Europe. *International Organization*, 54(02), 217-252.
- Mugiyanto (Ed.) (2009). *Jalan Panjang Menuju Ratifikasi ICC di Indonesia*. Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional.
- Neumayer, E. (2005). Do international human rights treaties improve respect for human rights? *Journal of conflict resolution*, 49(6), 925-953.
- Parliamentarians for Global Action. (2007). Senior Legislators and the Government of Indonesia Agree to Accede to the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC). Diakses dari: http://www.pgaction.org/pdf/pre/Indonesia_Press_Release.pdf Tanggal akses 01/11/2019.
- Prasetyo, H. (2009). *The Power(less) of Ratification: Holding the State Responsible for Human Rights Respect in Indonesia*. McGill University, Montreal.
- Qotimah, Y. (2009). Presiden dan Reformasi Sektor Keamanan. In B. Sukadis (Ed.), *Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2009*. Jakarta: LESPERSI & DCAF.
- Rosser, A. (2017). *Litigating the right to health: courts, politics, and justice in Indonesia*. Honolulu, HI: East-West Center.
- Simmons, B. A. (2009). *Mobilizing for human rights: international law in domestic politics*. Cambridge University Press.
- Soeprapto, E. (2002). *Taking Stock of Endeavours to Apply Transitional Justice in Indonesia*.
- Soeprapto, E. (2006). *Pengadilan HAM di Indonesia dan Beberapa Perbedaan antara Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Statuta (Roma) Mahkamah Pidana Internasional*. Jakarta.
- Sulistiyanto, P. (2007). Politics of justice and reconciliation in post-Suharto Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 37(1), 73-94.
- Suryadarma, D. (2012). How corruption diminishes the effectiveness of public spending on education in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 48(1), 85-100.
- The Jakarta Post. (1999, 14 September). Robinson zeros in on alleged rights abuses.
- The Straits Times. (2000, 11 February). Words of Wiranto.
- Wahyuningroem, S. L. (2013). Seducing for truth and justice: civil society initiatives for the 1965 mass violence in Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 32(3), 115-142.
- Whitehead, L. (2002). *Democratization: Theory and Experience*. New York: Oxford University Press.
- YLBHI. (1990). *Laporan Keadaan Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia 1990*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Berbasis Pendekatan Identitas Lokal Masyarakat Terpapar Bencana

Studi Kasus : Komparasi Pendekatan Kearifan Lokal (*local wisdom*) Masyarakat Jepang dan Indonesia dalam Mendukung Ketangguhan (*resilience*) Menghadapi Bencana

Tatok Djoko Sudiarto¹, Asriana Issa Sofia²

^{1,2} Prodi Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Jakarta

Corresponding e-mail: tatok.sudiarto@paramadina.ac.id

Abstract



In the post-natural disaster period, two important things that must be considered are the impact of the disaster and post-disaster recovery. First, the severity of the impact of the disaster experienced is influenced, among others, by the level of community preparedness and the response system in dealing with disasters. Second, the issue of speed of post-disaster recovery. An approach that is not 'doing-to' but rather 'doing-with' citizens, with an emphasis on supporting local resilience of the local community. Recognition of elements of the identity of disaster victims, and their use in helping post-disaster recovery, are indicated to be factors of speed and effectiveness.

This research is a comparative study of post-disaster recovery cases that has been quite successful with this localism approach. The cases studied were cases of the Aceh tsunami disaster, the Merapi volcano Yogyakarta, the Palu tsunami with several disaster cases in Japan. The method used in this research is descriptive qualitative. Theories and concepts of human security, identity politics, and local terminology in society are compared to scientific glasses. The results of the study indicate that disaster management policies must be based on the identity of the local community (local value, local wisdom, local terminology). Local identity based policies will result in maximum disaster risk reduction with the assets and internal capital of the people exposed to the disaster.

Keywords

Disaster Risk Reduction , local identity, resilience, local wisdom

Pendahuluan

Pengurangan risiko bencana (PRB) perlu melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai disiplin ilmu, baik ilmu eksakta maupun ilmu sosial terutama untuk kajian

kebencanaan. Sedangkan kemutakhiran teknologi diperlukan untuk meminimalisir dampak bencana berupa kerugian jiwa dan harta benda.

Penanganan program PRB berasal internal maupun eksternal masyarakat berpotensi bencana. Eksternal dengan mengandalkan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, penggunaan teknologi tepat guna dari kalangan akademisi maupun korporasi, serta pembelajaran dari pengalaman masyarakat terpapar bencana di daerah lain. Sedangkan internal masyarakat yaitu dengan menelusik sejarah panjang kebencanaan di daerah tersebut (memori kebencanaan), biasanya tutur sejarah dalam bentuk prasasti, kitab kuno, tembang/lagu tradisional, tari daerah, juga lakon drama yang disisipi pesan-pesan kebencanaan masa lalu.

Dari catatan masa lalu dan nilai lokalitas yang berkembang bisa diketahui potensi kerentanan (*vulnerability*) dan juga ketangguhan (*resilience*) dari masyarakat lokal. Ancaman (*hazard*) bencana dapat dihadapi dengan menekan kerentanan dan meningkatkan kapasitas di wilayah terkait. Kondisi ideal ketangguhan dicapai dengan upaya meningkatkan kapasitas masyarakat sendiri. Sejumlah prakarsa yang mutakhir dan berkelanjutan dalam program PRB telah terdeklarasikan melalui *Hyogo Framework for Action* dan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*. Saat ini adanya aksi PRB Berbasis Komunitas menunjukkan partisipasi masyarakat dalam keputusan-keputusan pemerintah yang berkenaan dengan hidup mereka. Masyarakat memahami keinginannya berdasarkan pengalaman historis mereka dalam menghadapi setiap ancaman.

Rumus umum dalam pengurangan risiko bencana di suatu wilayah berdasarkan pada penilaian bahaya, kerentanan dan kapasitas di wilayah tersebut. Menghitung risiko bencana menggunakan persamaan (http://p2mb.geografi.upi.edu/Mitigasi_Bencana.html):

$$\text{Risk (R)} = \text{H (hazard)} \times \text{V (vulnerability)} / \text{C (capacity)}$$

R : Resiko Bencana, H : Bahaya, V : Kerentanan, C : Kapasitas

PRB dilakukan dengan cara menekan kerentanan yang ada pada sistem pemerintahan maupun pada kondisi budaya dalam masyarakat. Bahaya bencana hanya bisa diketahui melalui sejarah masa lalu pada daerah terpapar. Bahaya bukan merupakan variabel bebas, namun merupakan *given* yang manusia hanya bisa menerima, tidak bisa dilakukan antisipasi waktu dan besaran peristiwa yang akan terjadi. Tindakan terstruktur bisa dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dari pemangku kepentingan dan juga masyarakat di daerah potensi bencana.

Masyarakat secara alamiah bertransformasi sesuai dengan dinamika (pengalaman, ancaman, pergeseran) nilai, pengaruh interaksi, perubahan teknologi dan juga pergantian generasi yang dialaminya. Penyikapan terhadap apapun yang menimpa masyarakat merupakan stimulus yang melahirkan ketangguhan alami secara internal. Bantuan eksternal bukanlah energi utama ketangguhan masyarakat.

Potensi adalah suatu kemampuan, kesanggupan, kekuatan ataupun daya yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi sesuatu yang lebih besar (Majdi:2007). Kekuatan yang dimiliki masyarakat yang belum dipergunakan secara optimal adalah potensi, yang berbeda-beda pada setiap masyarakat.

Komparasi Masyarakat Terpapar Bencana

Dalam penentuan kasus yang akan dibandingkan, dipertimbangkan berdasarkan faktor kesamaan pada level nasional, jenis kebencanaan dan memori masyarakat pada daerah terpapar. Tiga kriteria untuk menetapkan kesamaan level masyarakat terpapar bencana yaitu (1) memori masyarakat terhadap kekuatan dan frekuensi berulangnya bencana pada daerah tersebut, dan jenis dahsyatnya bencana yang bisa diprediksi, dalam hal ini adalah bencana Gunung Merapi. (2) memori masyarakat bahwa tidak akan ada bencana atau terjadi bencana di luar pemahaman dan prediksi masyarakat, dalam hal ini adalah bencana Sinabung. (3) memori masyarakat kuat akan bencana yang berulang namun jenis dan dahsyatnya diluar perkiraan, dalam hal ini bencana gempa-likuififikasi tahun 2018 di Palu, Sigi dan Donggala; dan bencana gempa-tsunami di Jepang. Maka kasus pada kriteria ketiga yang akan menjadi studi komparasi kasus dalam penelitian ini.

Local Wisdom dalam Studi Kebencanaan

Dalam bahasa Indonesia, istilah “kultur” sinonim dengan “budaya”. Dalam bahasa Eropa istilah “coultuur” (Belanda), “couylture” (Inggris, Perancis), kultur (Jerman), berakar dari “colere” (Latin) yang berarti mengolah tanah. Antropolog memaknainya sebagai sistim nilai dan ide vital yang dihayati manusia (individual atau kelompok). Maka istilah kultur menunjuk pada sesuatu yang tumbuh dan tidak spontan, namun juga merupakan hasil kemauan/pikiran/rekayasa manusia (Joesoef, 2014). Dengan demikian *local culture* atau *local wisdom* dalam studi kebencanaan dapat diartikan sebagai seperangkat pengetahuan yang ada dan diyakini masyarakat lokal untuk satu jangka waktu tertentu, melalui akumulasi pengalaman relasi masyarakat dengan alam, yang praktik dan institusionalnya diteruskan dari generasi ke generasi.

Budaya Sadar Bencana

Budaya sadar bencana bukanlah budaya untuk menimbulkan kesadaran akan bencana. Leluhur kita sudah terbiasa melawan ancaman yang ada, baik ancaman alam maupun ancaman dari kelompok manusia – dengan memanfaatkan dua kekuatan yakni

agama/kepercayaan dan kekuasaan (militer). Keduanya digunakan di wilayah-wilayah Indonesia yang begitu sering terpapar bencana alam.

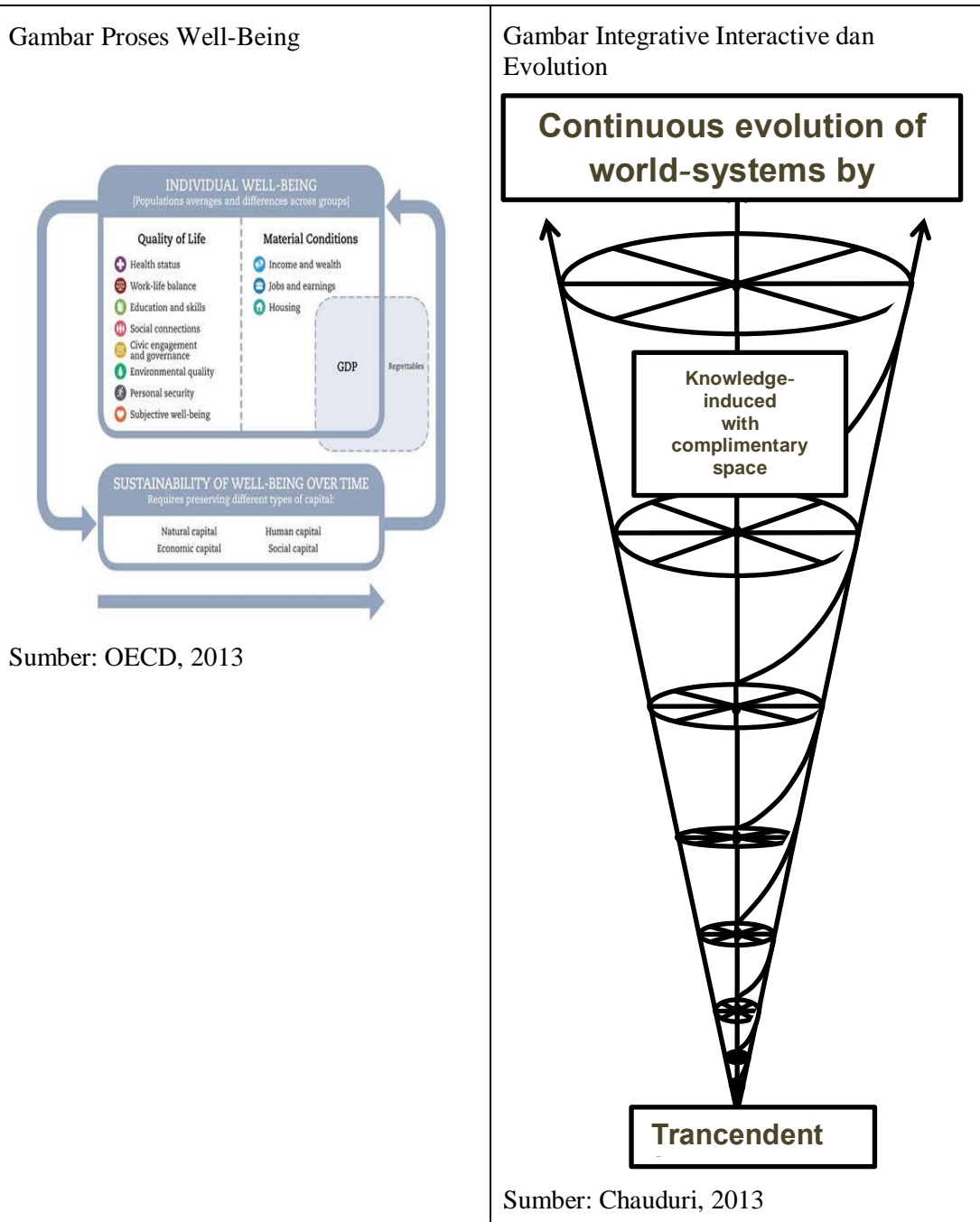
Pengalaman kebencanaan kemudian melahirkan budaya mekanisme *survival* masyarakat setempat untuk menghadapi ancaman tersebut. Maka merupakan tugas bersama untuk menemukan dan mewujudkan cara-cara yang lebih arif dalam budaya tradisional dalam menjaga keseimbangan alam, sehingga upaya PRB dapat berjalan efektif. Persoalan berikutnya adalah bagaimana membangkitkan budaya sadar bencana, melalui pengembangan konten seni budaya. Bagaimana mentransformasikan informasi sehingga masyarakat memahami mengenai karakteristik serta fungsi lingkungan alam dan ekosistem (misalnya : topografi, kemiringan dan karakteristik tanah, volume drainase, irigasi, area tangkapan air, aliran sungai, trumbu karang, hutan bakau, dll), juga potensi risiko yang terkait dengan fitur alam dan intervensi manusia yang mempengaruhi.

Well-being sebagai indikator kemajuan masyarakat

Sejak Rio Earth Summit (1992) terjadi pergeseran berarti dalam konsep pembangunan. Mengkritisi pembangunan yang menitikberatkan pertumbuhan ekonomi, maka pembangunan menjadi lebih memfokuskan secara serius pada peningkatan kualitas kehidupan (*well-being*) manusia.

Paradigma kebencanaan (*disaster paradigm*) yang menitikberatkan pada pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*) dengan hasil akhir masyarakat tangguh bencana (*disaster resilience society*) merupakan pengalihan paradigma *welfare* menuju paradigma *well-being*. *End to end disaster is human* bukan sekedar jargon belaka akan tetapi menjadi dasar penyusunan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan kebencanaan yang terintegrasi dari pusat ke daerah. Penggabungan *quality of life* dan *material condition* yang menuju pada tujuan *sustainability of well-being* merupakan rangkaian proses yang *cyclical* mencerminkan proses pembelajaran terus menerus dari masyarakat (Maarif, Wardhono dan Sudiarto, 2017).

Ketangguhan masyarakat yang berbasis pengetahuan dan budaya lokal merupakan identitas masyarakat dinamis. Kedua aset tersebut diharapkan menjadi kekuatan pemulih dan kekuatan pembangkit masyarakat dalam menghadapi bencana. Fenomenologi yang tergambar dari proses integrasi, interaksi dan evolusi (*Integrative, Interactive and Evolutionary*) merupakan diskursus elemen masyarakat yang terus menerus. (Chauduri, 2013) Dalam wadah tertentu berdasarkan lokalitas dan kekuatan transenden akan menghasilkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana secara berkesinambungan.



Menurut gambar diatas, semua elemen dalam masyarakat berinteraksi satu sama lain melalui proses yang bersifat menyeluruh (*integrative*). Hasil yang didapat dari proses tersebut adalah pembelajaran korektif terhadap peristiwa yang dialami oleh masyarakat tersebut dan pembelajaran prediktif dengan menjadikan peristiwa masa lalu sebagai landasan ditambah dengan elemen perkembangan yang diprediksi akan terjadi. Dinamika diatas diharapkan merupakan nilai natural dari internal masyarakat

dan berlangsung terus-menerus sebagai pembelajaran yang berlangsung lama (*evolution*). Sedangkan *trancendent factors* dipercaya sebagai landasan bergerak masyarakat yang berasal dari nilai asli (*local wisdom*), kepercayaan, atau agama sehingga menghasilkan keseluruhan gerak dinamis yang berkesinambungan (*sustainable*).

Indonesia dan Bencana Likuifaksi Palu, Sigi dan Donggala

Pemerintah bersama TNI, Polri dan lembaga terkait melakukan penanganan gempa dan tsunami Palu-Donggala dengan mengutamakan enam penanganan prioritas. Pertama, melanjutkan evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban. Kedua, pemakaman jenazah. Ketiga, percepatan pemulihan jaringan listrik karena saat ini jaringan listrik di Kota Palu belum semua menyala. Keempat, percepatan pengadaan bahan bakar minyak terutama genset rumah sakit dan operator seluler. Kelima, distribusi logistik dan makanan untuk pengungsi. Keenam, percepatan jaringan komunikasi (Kompas, 2018).

Penanganan pasca bencana merupakan tahapan penting bagi para penyintas karena akan menentukan apakah mereka dapat kembali ke kehidupan normal (*build back*), menjadi lebih baik (*build back better*), atau justru menjadi lebih terpuruk (*collapse*). Paradigma terbaru menambahkan penambahan keamanan sehingga menjadi *build back better and saver*.

Hal ini disebabkan karena risiko terhadap bencana lebih dominan dipengaruhi oleh aspek kerentanan yang merupakan representasi dari adanya ketimpangan pembangunan, marginalisasi, dampak negatif dari urbanisasi dan kurangnya akses terhadap fasilitas yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat. (*Laporan Kaji Cepat Penanganan Pasca Bencana Di Palu, Sigi dan Donggala: Pemulihan Tempat Tinggal dan Penghidupan*, 2019)

Respon struktur (Pemerintah Pusat dan Daerah)

Berdasarkan data BPBD di Palu, pada saat terjadinya bencana, rentang komando birokrasi dan jajaran pemerintahan benar-benar lumpuh akibat listrik padam sehingga situasi tanpa kendali. Sebagian masyarakat mendapatkan akses terhadap bantuan dari para relawan. Pihak BPBD baru bisa benar-benar berkoordinasi pada hari kelima dan mulai melakukan tindakan tanggap darurat. Situasi keamanan juga semakin tidak kondusif karena penjarahan terjadi di berbagai tempat (BPBD Sulteng, 2017). Disebutkan salah satu pemicunya adalah anjuran dari Pemerintah Pusat untuk mengambil barang kebutuhan pokok di supermarket terdekat. Namun, kenyataannya bermunculan penjarah-penjarah yang mengambil semua barang, bahkan terorganisir dengan mengangkut barang jarahan dengan truk besar. Penjarahan juga ditandai dengan banyaknya pengambilan bahan-bahan bangunan di rumah-rumah yang ditinggal mengungsi. Pihak keamanan tidak mampu mengendalikan situasi, sampai

pemerintah kota Palu mulai memberikan arahan untuk mengatasi masa tanggap darurat. Cukup banyak penduduk memilih melakukan eksodus dengan bus yang didatangkan oleh kerabat mereka dari daerah asalnya, termasuk banyak pejabat pemerintah yang meninggalkan kota untuk menyelamatkan diri.

Berbeda dengan situasi di Palu, Bupati Sigi tiba dari Jakarta pada hari kedua setelah bencana. Demikian pula Gubernur Sulawesi Tengah setiba dari Jakarta segera menginstruksikan perbaikan jalan-jalan utama yang rusak parah akibat gempa, diantaranya jalan trans yang menghubungkan Palu dengan kota dan kabupaten di sekitarnya. Kerusakan jalur transportasi menyulitkan distribusi bantuan dan akses ke lokasi-lokasi terkena bencana untuk proses evakuasi.

Kondisi di Kabupaten Donggala juga ditandai dengan minimnya keberadaan pimpinan lokal pada saat terjadi bencana karena dapat dipahami mereka menyelamatkan keluarga terlebih dahulu sebelum kembali bertugas. Sistem koordinasi menjadi lebih efektif karena langsung berada di tengah-tengah tenda pengungsian dan dapat berkoordinasi secara langsung dalam menerima dan mendistribusikan bantuan kepada warga.

Respon Masyarakat (kultur)

Bencana di Palu, Donggala, dan Sigi mengakibatkan dampak fisik, sosial, dan ekonomi yang sangat beragam. Tidak hanya kerusakan bangunan, ribuan bangunan dan rumah rusak bahkan hilang akibat likuifaksi. Lahan-lahan pertanian yang terdampak langsung likuifaksi tidak dapat lagi ditemukan di lokasi semula.

Berbagai jenis respon masyarakat dan kondisi pada masa tanggap darurat menunjukkan adanya persoalan dengan kualitas pengetahuan terkait dengan kebencanaan. Hasil analisis diskursus menunjukkan bahwa kejadian bencana di Palu tidak dipahami dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat. Bahkan disebutkan juga adanya ketidakpedulian terhadap kerawanan bencana, serta persoalan dalam mencermati hasil kajian diantara pengambil kebijakan. Terlihat dari munculnya isu kesalahan dalam penataan ruang kota dan kabupaten meskipun sudah disadari adanya risiko dari sesar palu Koro yang menjadi kondisi topografis di Palu, Sigi dan Donggala.

Kelompok rentan bencana di Palu, Sigi dan Donggala antara lain petani, nelayan, dan penduduk yang bekerja di sektor informal - karena dampak bencana langsung pada sumber penghidupan dan minimnya perlindungan sosial kepada mereka sehingga memerlukan intervensi dari pemerintah dan pihak eksternal untuk mempercepat proses pemulihan. Saat terjadi bencana, mereka lari ke tempat yang dianggap aman. Penduduk yang tinggal di pantai berusaha mencapai ke daerah yang lebih tinggi. Sebaliknya, penduduk di wilayah yang tinggi berusaha turun ke dataran yang lebih rendah. Respon masyarakat melakukan penyelamatan diri darurat berdasarkan insting saja, bahkan panah (tanda) jalur evakuasi tidak diikuti karena mereka tidak mengetahui dengan pasti makna dari tanda panah tersebut.

Respons yang dilakukan masyarakat didominasi oleh spontanitas dan tindakan selanjutnya banyak dipengaruhi oleh berbagai informasi yang beredar dari sosial media dan informasi lisan dari sesama penyintas. Salah satunya informasi yang meyakinkan bahwa gempa dan tsunami tidak akan terjadi lagi, sehingga sebagian orang kembali ke rumah.

Jepang Merespon Bencana

Profil Bencana Jepang

Dikenal sebagai negara rawan bencana, tak terhitung bencana alam yang menimpa kepulauan Jepang sepanjang sejarahnya. Rekam jejak bencana sejak tahun 416 M menunjukkan setiap tahun selalu terjadi bencana di kawasan ini. Faktor-faktor penyebabnya yaitu (MOFA, 2016) : (1) Variasi iklim yang ekstrim, seperti hujan badai musiman, angin topan dan salju lebat (*hardsnow*) di pinggiran Laut Jepang; (2) topografi yang tidak datar, banyaknya lereng curam; (3) Jepang berlokasi di *Pacific earthquake belt*, sehingga sering dihantam gempa bumi dan rentan diterjang tsunami; (4) Jepang berlokasi di *circum-Pacific zone* dimana hampir semua gunung berapi di dunia terkonsentrasi (Ring of Fire), juga terdapat 83% gunung berapi aktif dari total yang ada di dunia. Posisi ini menyebabkan Jepang sering mengalami tipe bencana gempa bumi dan letusan gunung berapi, dimana 90% gempa di dunia dengan 81 % gempa bumi terbesar terjadi disepanjang Cincin Api ini.

Jepang cenderung mengalami bencana alam kombinasi (*a mixture of hypothetical natural disaster*) dari gempa bumi (*earthquake*), erupsi gunung berapi (*volcano eruption*), tsunami, angin topan (*typhoon*), badai (*storm*), banjir (*flood*). Karakter demikian berdampak pada tingginya kematian, luka, orang hilang, kerusakan infrastruktur, yang mempengaruhi perekonomian, pembangunan dan kehidupan sosial. Pada periode 1990-2014, 51 % bencana yang terjadi di Jepang adalah badai (*storm*), namun yang menjadi penyebab lebih dari 90% kematian dan persoalan ekonomi terbesar adalah gempa bumi. (<https://www.preventionweb.net/countries/jpn/data/>).

Berdasarkan tipe bencana dalam penelitian ini, maka Jepang memenuhi kategori ketiga yaitu peristiwa bencana di Jepang ada dalam memori kebencanaan oleh masyarakat namun terjadi bencana diluar perkiraan masyarakat. Bencana alam berskala kecil atau sedang sering terjadi secara kontinyu sehingga masyarakat terbiasa dan bersiap untuk menghadapinya. Kontinuitas terjadinya bencana alam skala kecil yang didukung oleh teknologi dan manajemen kebencanaan yang terus dikembangkan, telah meningkatkan penerimaan dan penyesuaian masyarakat Jepang terhadap bencana. Namun demikian faktanya ketika terjadi beberapa bencana besar yang tak terduga dan menimbulkan korban dan kerusakan diluar perhitungan, tetap saja menimbulkan *shock* berat dan trauma berkepanjangan.

Beberapa bencana dahsyat di era modern Jepang : (Today Earthquake History, 2019)

1. *The Great Kanto earthquake* (1 September 1923). Kekuatan gempa 7.9 SR meluluhlantakkan wilayah Tokyo, Yokohama, Chiba, Kanagawa, dan Shizuoka. Sekitar 142,800 tewas termasuk 40,000an hilang akibat bencana ganda gempa bumi dan kebakaran.
2. *The Great Hanshin earthquake* (17 Januari 1995). Kekuatan gempa 6.9 SR menghancurkan kota Kobe dengan 6000an orang tewas.
3. *The Tohoku earthquake and tsunami* (11 Maret 2011). Gempa bumi 9.1 SR, gempa bumi terkuat dalam sejarah Jepang. Gempa memicu tsunami setinggi 40.5 meter di Miyako dan Sendai dan menewaskan lebih dari 19.000 penduduk Sendai, menyapu lebih dari 10 ribu orang dan menewaskan 15,897 orang di 20 provinsi, 6,157 terluka, 2,532 hilang melintasi provinsi. Gempa dan tsunami mengakibatkan kecelakaan reaktor nuklir Fukushima Daiichi yang melahirkan krisis berkepanjangan karena kontaminasi zat radioaktif pada air dan tanah sangat mengganggu ketersediaan air bersih dan pangan.

Kesiapan, Respon, dan Mitigasi Bencana Jepang

Universitas Ruhr Bochum dan Development Helps Alliance Jerman meneliti risiko bencana alam di negara-negara dan juga menakar kapasitas masing-masing negara dalam menangani bencana. Hasilnya, Jepang sebagai salah satu negara rentan mengalami bencana alam, namun tidak termasuk dalam kelompok negara paling beresiko terhadap bencana alam. (Kompas.com, 2018) Ini terjelaskan jika melihat bagaimana Jepang membangun ekosistem penanggulangan bencananya selama puluhan tahun, yang menghasilkan ketangguhan.

Sejak tragedi bencana 2011, Jepang makin mengerahkan sumberdayanya untuk mengembangkan manajemen bencana yang lebih integratif. Manajemen bencana Jepang secara luas meliputi : (1) riset pencegahan bencana secara saintifik dan teknis, (2) penguatan sistem pencegahan bencana, (3) proyek-proyek konstruksi yang didesain untuk meningkatkan kemampuan negara menghadapi bencana, (4) tindakan-tindakan darurat dan operasi pemulihan, serta (5) memajukan sistem informasi dan komunikasi. (MOFA, 2016)

Berdasarkan pembagian ranah struktur dan kultur dalam kesiapan menghadapi bencana, maka untuk kasus Jepang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Kesiapan Struktur

1. Struktur organisasi dan lingkup kerja pemerintah

Pertama, Jepang mengembangkan penguatan peran pemerintah di tiga lapisan yaitu nasional, prefectural, municipal. Di kabinet ada posisi Menteri Manajemen Bencana, menunjukkan adanya prioritas tinggi masalah kebencanaan. Menteri bersama Biro Manajemen Bencana yang merancang kebijakan dasar manajemen bencana - melakukan koordinasi menyeluruh

dalam merespon bencana-bencana skala besar. Dalam kondisi normal sekalipun, ada Dewan Manajemen Bencana yang terdiri dari para Menteri, wakil-wakil organisasi dan para pakar yang terus mendiskusikan hal-hal penting terkait manajemen kebencanaan. Cara kerja serupa dilakukan juga oleh pemerintahan nasional–prefectural-municipal terkait wilayah masing-masing. Dalam keadaan terjadi bencana, maka semua kementerian terkait dengan segera harus saling berkoordinasi dalam merespon perkembangan tingkat dampak kehancuran bencana, dengan menggunakan kode-kode tertentu untuk setiap tingkat bencana.(Ogata, 2016) Kedua, penekanan bahwa perencanaan tindakan darurat (*Emergency Action Plans*) dilaksanakan tanpa menunggu permintaan bantuan, menunjukkan efisiensi birokrasi dalam keadaan genting. Dalam keadaan darurat pun sangat mungkin dibentuk Onsite Disaster Management Headquarter oleh pemerintah pusat maupun pemerintah lokal.

2. Merespon bencana dengan keilmuan

Jepang gencar memperdalam keilmuan bencana untuk meningkatkan manajemen kebencanaan yang lebih *action-oriented*. Pendirian lembaga-lembaga penelitian kebencanaan dilakukan seiring memperbanyak ahli- ahli bidang kebencanaan (Inamura, 2018). The International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS) misalnya, telah menciptakan program analisis kerusakan akibat bencana alam skala besar akibat berkombinasi dengan faktor-faktor lain seperti arus tsunami yang berbalik atau kendaraan yang terombang-ambing, medis kebencanaan.

3. Teknologi Mitigasi Bencana, antara lain

Monitoring of Waves on Land and Seafloor (MOWLAS), jaringan observasi yang memonitor dan menghimpun data aktifitas gunung berapi, guncangan gempa dan tsunami di seluruh daratan dan perairan Jepang, untuk diinformasikan kepada publik pada saat yang sama, guna mengurangi tingkat kerusakan. Saat ini sudah terdapat 1900an stasiun MOWLAS diseantero negeri. Teknologi ini diciptakan oleh National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (NIED). (Sasaki, 2018) “Real-time Risk Maps”, teknologi yang mampu menunjukkan tingkat resiko genangan, banjir dan longsor di seluruh penjuru Jepang, diciptakan oleh Japan Meteorological Agency (Sasaki, 2018)

4. Infrastruktur

- *Quick-build temporary houses*, teknologi membuat rumah-rumah darurat bermaterial ringan tanpa teknik rakit khusus, cukup dikerjakan oleh 4 orang dalam waktu hanya 6 jam. Ini untuk memenuhi kebutuhan rumah sementara secara cepat dan banyak pasca bencana besar. Dikembangkan

oleh Daiwa Lease Co.,Ltd, perusahaan konstruksi bangunan dan penyedia rumah darurat.

- *Subway safety* berupa konstruksi tahan gempa dan sistem sinyal untuk perhentian darurat kereta pada saat gempa yang mampu memprediksi guncangan keras untuk mendukung Earthquake Early Warnings dari Badan Meteorologi Jepang. Teknologi ini diupayakan oleh Tokyo Metro, perusahaan subway terbesar di Tokyo, bekerjasama dengan operator transport umum lainnya, pemerintah lokal, police stations, unit-unit pemadam kebakaran, dan masyarakat (Sakurai,2018).

Gambaran diatas menunjukkan sinergi *tripartit* pemerintah, dunia akademis dan perusahaan swasta di Jepang. Pemerintah memimpin strategi dan sistem manajemen bencana menyeluruh, akademisi memperdalam ilmu kebencanaan dan riset-riset yang menghasilkan berbagai teknologi berorientasi aksi anti-bencana, perusahaan swasta turut mengembangkan teknologi sebagai bentuk *company social responsibility*.

Kesiapan Kultur

1. Kearifan Lokal

- **Shinto**

Agama asli Jepang, Shinto, merekatkan konsep *unity with nature* ke dalam nilai dan cara pandang bangsa Jepang. Dewa-dewa Shinto merupakan bagian dari alam, seperti matahari, gunung dan lainnya, sehingga berinteraksi dan memperlakukan alam dengan baik adalah suatu keniscayaan. Shinto memandang bahwasanya gempa, letusan gunung dan yang lainnya adalah wajar, sebagai kerjanya para dewa. (Ivakhiv,2011); sedangkan bencana merupakan pertanda dosa/kotor (BBC,2019) Pandangan ini kembali muncul ketika gempa besar Kanto 1923 yang dianggap sebagai hukuman tuhan terhadap kehidupan modern masyarakat Jepang yang terlalu ego dan materialistis. Relijiusitaspun kembali menguat setiap kali pasca bencana, ditandai penuhnya kuil-kuil Shinto dengan orang yang memanjatkan doa. Kuil-kuil Shinto yang bertahan karena jauh dari jangkauan tsunami, diyakini sebagai pertanda bahwa para leluhur Shinto berada di tempat yang aman. (Washington Post, 2012). Pada saat bencana, kuil-kuil Shinto yang selamat biasanya menjadi tempat perlindungan maupun pusat pengumpulan donasi untuk korban.

Shinto juga berkontribusi dalam pemulihan pasca bencana, dimana pertunjukan kesenian dan festival (*matsuri*) lokal Shintoisme digiatkan lagi. Selain untuk mengenang korban bencana, ritual-ritual tersebut berfungsi untuk membangkitkan kembali rutinitas masyarakat, serta untuk integrasi sosial. (Takakura,2019). Di Jepang modern, *matsuri* tetap menjadi perekat sosial di setiap wilayah lokal. Asosiasi Kuil Shinto juga menginisiasi kegiatan-kegiatan

ritual untuk memperingati bencana dan mendoakan korban bencana, baik di Jepang maupun di luar negeri. (Washington Post,2012)

- **Nihonjinron.** Istilah *Nihonjinron* menjelaskan kualitas manusia Jepang, dibangun dari nilai-nilai, *way of thinking* dan perilaku orang Jepang. Keterbatasan geografi membentuk *community-based culture, group-oriented society* dimana kepentingan kelompok diatas individu, dan tumbuh sebagai *group-ethics nation* yang tidak akan memburukkan bangsanya sendiri. Praktiknya dipertahankan bahkan dalam merespon bencana terbesar tahun 2011, dimana masyarakat Jepang dalam kekacauan situasi berusaha tetap tenang, disiplin, teratur, mengikuti instruksi pemerintah. *Rising from the ashes*, untuk menyebut kemajuan dramatis yang terjadi berkat semangat kolektif. (Voigt,2011)
- **Rumah tradisional** Jepang didesain untuk menghadapi ancaman gempa. Kerangka-kerangka kayu dipersatukan dengan saling mengait, bukan menggunakan paku. Dinding dalam rumah berbahan kertas, pilar-pilar utama tidak ditanam di dalam tanah melainkan disandarkan pada bebatuan. Koneksi yang longgar ini memungkinkan rumah tetap stabil dalam guncangan gempa. (Meshcheryakov,2016)

2. Edukasi kebencanaan (bousai kyoiku)

Edukasi kebencanaan di Jepang diselenggarakan secara formal maupun informal, dan menjadi tanggungjawab pemerintah regional, prefektur hingga municipal. (Kitagawa, 2014) Selain berdasarkan panduan umum, pengetahuan dan ketrampilan diberikan menyesuaikan dengan resiko khusus yang sering dihadapi oleh komunitas lokal tertentu. Edukasi kebencanaan juga masuk dalam kurikulum sekolah di seluruh Jepang. Kini berkembang *everyday life model* yang menggabungkan “*the science of disasters*” dengan ‘*life skills for disasters*’ dalam kerangka School Safety, (Kitagawa, 2015). Di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat melahirkan banyaknya edukasi kebencanaan yang diadakan oleh organisasi-organisasi relawan di tingkat lokal. Di sebagian besar distrik di kota-kota, ada *volunteer disaster prevention organization* sejalan dengan *neighborhood association* (chonaikai), yang bekerjasama dengan pemerintah lokal untuk mengadakan aktifitas-aktifitas peningkatan kesadaran dan pelatihan-pelatihan kebencanaan bagi masyarakat. (Kitagawa, 2014). Perkembangan ini menggarisbawahi bahwa sesungguhnya aktor utama pencegahan bencana adalah masyarakat sendiri.

3. National Disaster Prevention Day

Setiap 1 September merupakan National Disaster Prevention Day (NPDP). Awalnya merupakan momen memorial kebencanaan, namun signifikansinya berkembang menjadi momen nasional menggalang kesiapan menghadapi bencana

besar yang diprediksi akan terjadi di tahun-tahun mendatang. Bagi penduduk wilayah yang diperkirakan akan terkena bencana, diberikan berbagai pelatihan mulai mengoperasikan alat pemadam kebakaran sampai cara memperbaiki perabot rusak. Pelatihan manajemen krisis, pelatihan di sekolah-sekolah cara berlindung dan mencegah kepala terluka selama guncangan gempa. Pelatihan melewati rute jalur ke titik-titik evakuasi terdekat, juga melakukan prosedur menandai rumah-rumah yang penghuninya terluka didalamnya. (The Diplomat, 2018).

4. Peran media di saat peristiwa bencana

Dua bukti pentingnya peran media selama bencana besar di Jepang sebagai berikut.

- a. Kekuatan media sosial terutama Twitter dan Facebook untuk menyebarkan informasi *update* di dalam maupun luar negeri. Media sosial bahkan berperan dalam tahap penyelamatan dengan membantu identifikasi keamanan, lokasi orang-orang yang hilang, informasi kerusakan, dukungan bagi orang-orang cacat, organisasi relawan, penggalangan dana, dan dukungan moral. (Peary, 2012).
- b. Selama bencana, media apapun cenderung tidak mengekspose liputan-liputan yang akan memperdalam penderitaan masyarakat atau meningkatkan kecemasan. Kultur media demikian berperan besar dalam proses kebangkitan kembali masyarakat pasca bencana.

Diskusi komparasi

Kedua kelompok daerah terpapar bencana dalam penelitian ini memiliki perspektif berbeda dalam menyikapi pengurangan risiko bencana. Perbedaan gambaran demografis Palu, Sigi dan Donggala dengan Sendai dan Miyako mempengaruhi perbedaan pendekatan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat. Walaupun memori kebencanaannya kuat namun pemerintah dan penduduk Sulawesi Tengah menyikapi peristiwa bencana selama ini rendah akan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan (sebut sebagai kapasitas/C) dibuktikan dengan masih ditempatinya daerah-daerah merah dalam peta kebencanaan yang dibuat oleh para ahli. Pengabaian ini merupakan indikasi tidak pekanya pengetahuan masyarakat terhadap sinyal-sinyal kebencanaan. Pengawasan dan kebijakan pemerintah yang mengabaikan peta daerah merah kebencanaan di Palu dan sekitarnya memberikan andil besar bagi sistem kebencanaan yang seharusnya dibangun untuk mengurangi risiko. Walaupun tingkat bencana yang terjadi jauh diluar perkiraan namun dengan antisipasi dan mengadopsi penelitian tentang daerah merah/bahaya merupakan kepatuhan dalam program pengurangan risiko bencana.

Sedangkan pada masyarakat Sendai dan Miyako di Jepang terdapat persiapan-persiapan alami tentang pendidikan kebencanaan dan budaya spiritual serta teknologi untuk mengantisipasi kerugian jiwa dan harta benda. Pengetahuan tentang

kebencanaan merupakan *internal value* bagi masyarakat karena dilakukan secara massif dan dikenalkan sedini mungkin.

Elemen-elemen yang dipunyai masyarakat secara alami ditambah dengan pemutahiran pengetahuan terhadap bencana sangatlah berguna sebagai aset berharga masyarakat yang terpapar bencana. Pada masyarakat Sulawesi Tengah belum terlihat identitas lokal masyarakat (*local wisdom*) dalam menghadapi bencana terlihat dari respon yang beragam tanpa pola tertentu baik pada saat peristiwa bencana maupun pasca bencana.

Sedangkan pada masyarakat Sendai dan Miyako tidak terlalu banyak berbeda saat peristiwa bencananya walaupun antisipasi secara teknologi sudah dilakukan. Saat pasca bencanalah yang menjadi pembeda dikarenakan budaya yang melekat tidak membuat mereka melakukan penjarahan dan masih pada pola antri yang rapi di supermarket.

Pemanfaatan elemen *Integrative*, *Interactive* dan *Evolutionary* untuk analisa kebencanaan di kedua negara ini bertujuan agar masyarakat mempunyai kesadaran melakukan diskursus secara pribadi, kelompok maupun ruang yang lebih besar lagi untuk menemukan pola terbaik menyikapi peristiwa bencana yang terjadi. Secara alamiah masyarakat dan pemerintah dituntut bersatu dan mempunyai program bertahap memperkuat ketangguhan masyarakat menghadapi bencana. Jika respon masyarakat Sulawesi tengah didominasi oleh tindakan respon sporadis tanpa pola maka dipastikan nilai lokal yang berkembang adalah *top down* mengharapakan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab akan hidup sesudah mengalami bencana. Respon kemandirian individu dan kelompok yang diharapkan susah untuk bisa direfleksika. Yang bisa dianggap sebagai penguat adalah kebersamaan sebagai sesama korban dan juga nilai agama.

Sedangkan pada masyarakat Jepang IIE diaplikasikan untuk melihat seberapa dalam usaha mereka menginternalisasikan nilai lokal dan teknologi sebagai aset menghadapi peristiwa bencana terutama pada masa pasca bencana. Budaya dan rasa sebagai sesama korban merupakan aset berharga bagi mereka untuk bisa bertahan. Sehingga respon yang terpola saat pasca bencana dapat dikatakan sebagai hasil dari diskusus IIE yang panjang dan konsisten dijadikan program penguatan kapasitas masyarakat.

Matrik Struktur dan Kultur Perbandingan

	Palu, Donggala dan Sigi (Indonesia)	Sendai dan Miyako (Jepang)	Keterangan
Struktur:			
Struktur Organisasi dan lingkup kerja Pemerintah	Dikoordinasikan oleh BNPB (badan setingkat kementerian) penanganan pasca bencana dilakukan beserta komponen lainnya seperti BPBD, SKPD, serta kementerian lainnya	Menteri Manajemen Kebencanaan secara bertahan akan membentuk team adhoc berdasar tingkatan nasional, prefecture dan municipal Perdana Menteri sebagai ketua tetap penanggulangan bencana.	

	Palu, Donggala dan Sigi (Indonesia)	Sendai dan Miyako (Jepang)	Keterangan
Penanggulangan dengan keilmuan	Pendirian pusat pendidikan kebencanaan sudah ada dan juga beberapa penemuan hard maupun soft science yang belum teraplikasikan dengan baik	Pemutahiran keilmuan kebencanaan yang bersifat action-oriented dan juga penemuan-penemuan teknologi kebencanaan lain	
Infrastruktur	Tidak diarahkan untuk kebijakan yang mengharuskan pembuatan infrastruktur tangguh bencana, hanya pada bantuan perumahan teknologi rumah simple dan tahan gempa ditawarkan.	CSR perusahaan diarahkan untuk pengembangan teknologi terapan ramah bencana. Bangunan rumah dan fasilitas umum dibangun dengan konstruksi tahan gempa	
Teknologi	Pengembangan teknologi deteksi gempa sudah ada pada daerah rawan bencana, masih diperlukan banyak perbaikan sistem dan sikap masyarakat terhadap hasil teknologi.	Teknologi antisipasi gempa dikembangkan dan diperluas seluruh negeri	
Kultur:			
Kearifan Lokal	Belum ditemukan budaya lokal yang spesifik dalam menghadapi bencana.	Shinto, Nihonjiron dan rumah-rumah tradisional disiapkan untuk menghadapi bencana.	
Edukasi Bencana	Dilakukan melalui kelompok-kelompok masyarakat oleh BNPB/BPBD/relawan Pendidikan kebencanaan formal belum diwajibkan di seluruh wilayah Indonesia.	Pendidikan kebencanaan merupakan pelajaran wajib dari tingkat dini sampai perguruan tinggi serta kelompok-kelompok masyarakat tertentu.	
Peran Media	Digunakan sebagai media penyebaran peristiwa bencana akan tetapi tidak ada saringan konten laik tayang atau tidak dan juga sering terjadi hoax. Belum ada kebijakan pemerintah untuk menyatukan siaran dibawah otoritas yang berhak memberitakan peristiwa bencana yang sedang terjadi. Sering terjadi simpang siur data karena menasar pada ahli dan otorita yang berbeda.	Untuk update tentang bencana dengan kesadaran penuh tidak menyiarkan konten yang menambah penderitaan masyarakat terpapar bencana Saat terjadi peristiwa bencana media televise dipakai pemerintah secara sukarela untuk menyiarkan dan memperingatkan masyarakat tentang bencana yang terjadi, atau keharusan menyiarkan televise nasional saat pengumuman peristiwa bencana.	

Sumber: diolah peneliti dari berbagai sumber

Kesimpulan

Pembelajaran dari studi komparasi ini adalah :

- Program pengurangan risiko bencana yang dicanangkan oleh HFA (*Hyogo Framework for Action*) dan SFDRR (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*) menjadi keniscayaan bagi daerah yang berpotensi bencana dan yang mengalami peristiwa bencana berulang.

- Dibutuhkan *hard approach* (struktur) dan *soft approach* (kultur) yang terintegrasi dalam memperkuat ketangguhan masyarakat menghadapi bencana.
- Ketangguhan masyarakat terhadap bencana adalah proses terstruktur dan sistematis dan terus menerus antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas (*capacity*) masyarakat.
- Hal pertama yang digali dari kapasitas masyarakat adalah memori masyarakat dalam menghadapi peristiwa bencana yang terekam secara baik dalam segi-segi budaya lokal.
- Identifikasi budaya lokal bisa meliputi terminologi/penyebutan tertentu masyarakat terhadap jenis bencana tertentu, pemahanan terhadap tanda-tanda alam, perilaku/sikap hidup terhadap alam, pranata sosial, jabatan informal pemangku adat, dan berbagai kesenian yang memberi pesan kebencanaan.

Proses diskursus *Integrative, Interactive and Evolutionary* antar elemen masyarakat yang terus-menerus dalam wadah tertentu berdasarkan lokalitas dan juga kekuatan *transenden* (nilai spiritual) akan menghasilkan ketangguhan terhadap peristiwa bencana secara berkesinambungan.

Bibliografi

- BBC News Indonesia, Inilah 15 Negara Paling Rentan Bencana Alam, dalam <https://sains.kompas.com/read/2018/12/04/170000023/inilah-15-negara-paling-rentan-bencana-alam?page=all>
- BBC News UK, Purity in Shinto, 2019, <https://www.bbc.co.uk/religion/religions/shinto/beliefs/purity.shtml>
- D.M.Peary, Brett, Shaw, Rajib, Takeuchi, Yukiko, Utilization of Social Media in the East Japan Earthquake and Tsunami and its Effectiveness, 2012, https://www.jstage.jst.go.jp/article/jnds/34/1/34_3/article/-char/en
- Dekens, J. (2007): *Local Knowledge for Disaster Preparedness: A Literature Review*. International Centre for Integrated Mountain Development, Kathmandu.
- Imamura, Fumihiko, The Deepening of Disaster Science, , dalam Highlighting Japan, Vol. 118. March 2018, <https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/20180301.html>
- Ivakhiv, Adrian J, Religion and Japanese Tragedy, 2011, <https://blog.uvm.edu/aivakhiv/2011/03/16/religion-the-japanese-tragedy/>
- Joesoef, Daud. (2014), *Studi Strategi : Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional*. Jakarta. Penerbit Buku Kompas
- Kitagawa, Kaori, Preparing for the Worst : Disaster Education in Japan, 2016 <https://www.eastasiaforum.org/2016/07/01/preparing-for-the-worst-disaster-education-in-japan/>

- Kitagawa, Kaori, Continuity and Change in Disaster Education in Japan, *Journal History of Education, Society*, Vol 44, 2015
- Maarif, Wardhono, Sudiarto (2017), Membangun Budaya Sadar Bencana Berbasis Potensi dan Kearifan Lokal pada *Jurnal Riset Kebencanaan Indonesia V. 3 No. 1 Mei 2017 hal 1-8*
- Majdi, Udo Yamin Efendi. (2007). *Quranic Quotient*. Jakarta: Qultum Media.
- Meshcheryakov, Alexander N, Disaster and the Japanese Spirit, <https://www.nippon.com/en/column/g00353/disaster-and-the-japanese-spirit.html>
- MOFA (Ministry of Foreign Affairs of Japan, Disaster and Disaster Prevention in Japan, 2016, <https://www.mofa.go.jp/policy/disaster/21st/2.html>, diakses Oktober 2019
- Ogata, Toshinori, Disaster Management in Japan, lecture in JMA-PhRMIA Joint Symposium, 2015, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5059167/>
- Peary, Shaw, Takeuchi, (2012) Utilization of Social Media in the East Japan Earthquake and Tsunami and its Effectiveness, *Journal of Natural Disaster Science V. 34/1, 2012 Hal 3-18*
- Pusat Pendidikan Mitigasi Bencana, Universitas Pendidikan Indonesia, http://p2mb.geografi.upi.edu/Mitigasi_Bencana.html
- Sakurai, Hiroshi, Prefabs for Immediate Disaster Relief, dalam Highlighting Japan, Vol. 118. March 2018, <https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/20180301.html>
- Sasaki, Takashi, New Network Speeds Up Disaster Detection, , dalam Highlighting Japan, Vol. 118. March 2018, <https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/20180301.html>
- Sasaki, takashi, Real-time Risk Maps for Disaster Prevention, , dalam Highlighting Japan, Vol. 118. March 2018, <https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/20180301.html>
- Takakura, Hiroki, The Role of Intangible Cultural heritage in the Disaster Recovery in Fukushima, 2019, https://www.irci.jp/wp_files/wp-content/uploads/2019/03/18_Takakura_Proceedings_ICH_Disaster-Workshop.pdf
- The Diplomat, Japan's Latest Deadly Earthquake Buries Scores Alive, 2018, <https://thediplomat.com/2018/09/japans-latest-deadly-earthquake-buries-scores-alive/>
- Today Earthquake History, <https://earthquake.usgs.gov/learn/today/index.php?month=9&day=1&submit=View+Date>, diakses Oktober 2019
- Voight, Kevin, Are the Japanese Different?, 2011, <http://www.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/03/25/Japan.quake.culture/index.html>

Washington Post, Shinto priests prepare to mark Japan's quake anniversary, 2012
https://www.washingtonpost.com/national/on-faith/shinto-priests-prepare-to-mark-japans-quake-anniversary/2012/03/01/gIQAs5WskR_story.html

6 Prioritas penanganan gempa dan tsunami Palu Sigi Donggala
<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/01/17093251/ini-6-prioritas-penanganan-gempa-dan-tsunami-palu-donggala>

Laporan Kaji Cepat Penanganan Pasca Bencana Di Palu, Sigi dan Donggala: Pemulihan Tempat Tinggal dan Penghidupan,
<https://www.researchgate.net/publication/333745346> *Laporan Kaji Cepat Penanganan Pasca Bencana Di Palu Sigi dan Donggala Pemulihan Tempat Tinggal dan Penghidupan* [diakses pada 8 Okt 2019].

Analisa Implementasi Smart City Madani Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Upaya Sinergitas Program Asean Smart Cities Network (ASCN) 2030

Hizra Marisa¹, Andree²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Abdurrah, Pekanbaru.

Corresponding e-mail: hizra.marisa@univrab.ac.id

Abstract



In this research will focus on the Analysis of the Smart City Madani Implementation in Pekanbaru City as an effort to synergize the ASEAN Smart Cities Network 2030 Program. The development of Smart City has expanded in various parts of the world. It is contained in The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) has also begun to discuss with Singapore, based on the establishment of the ASEAN Smart City Network (ASCN) 2030. This agreement is related to Indonesian government currently doing with the Movement Towards 100 Smart Cities that encourage the use of technology for advance some cities in order to realize more effective, transparent and reliable governance. As one of the largest cities in Indonesia, of course, rapid development is needed to advance the city, one of them is Pekanbaru. The development of Pekanbaru is achieved with the following 5 points, eg Improving Basic Infrastructure, where to advance Pekanbaru, there are 3 basic infrastructures that must be addressed and developed, eg transportation, electricity and telecommunications; Smart city approach, Pekanbaru approaches to encourage city to become smart cities with the green city approach; Developing the area; Community development; and the formation of quality communities.

Kata Kunci

Smart City; ASEAN Smart Cities Network; Synergy; Pekanbaru City; Implementation, Globalization.

Pendahuluan

Pembangunan dan pengembangan Kota Cerdas (Smart City) telah meluas di berbagai belahan dunia. Perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) juga telah mulai membahas dengan usulan Singapura terkait pembentukan ASEAN Smart City Network (ASCN). Menarik ketika negara Singapura yang juga hanya sebuah kota dengan penduduk sekitar 6 juta menginisiasi suatu pembangunan Kota Cerdas di

antara ratusan (ribuan) kota dan kabupaten di ASEAN yang bervariasi mulai dengan kota maju hingga kabupaten yang masih berjuang untuk keberlanjutannya.

Program ASCN disambut baik oleh Indonesia yang sedang mengembangkan Gerakan Menuju 100 Smart Cities, dimana didalamnya mendorong penggunaan teknologi untuk memajukan kota guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan terpercaya. Hal ini merupakan wujud dari implementasi ASCN. Meskipun ada tiga Kota yang telah dijadikan contoh dalam pengembangan ASCN di Indonesia yakni DKI Jakarta, Banyuwangi dan Makasar, namun sinergitas atau kerjasama unsur atau bagian dari berbagai daerah di Indonesia sangat diperlukan. Terlebih ketika Indonesia tengah mengembangkan Gerakan Menuju 100 Smart Cities, setiap Kota atau Daerah digesa untuk melakukan percepatan dan pergerakan menuju Kota Cerdas.

Smart City sendiri merupakan salah satu strategi pembangunan dan manajemen kota yang masih baru. Konsep ini muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Smart city adalah konsep Kota Cerdas yang dirancang guna membantu berbagai kegiatan masyarakat serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat. Konsep ini menekankan pada tiga konsep, pertama, sebuah konsep yang diterapkan oleh sistem pemerintahan daerah dalam mengelola masyarakat perkotaan, kedua mensyaratkan pengelolaan daerah terhadap segala sumber daya dengan efektif dan efisien dan ketiga, Smart City diharapkan mampu menjalankan fungsi penyedia informasi secara tepat kepada masyarakat dan mampu mengantisipasi kejadian yang tak terduga. Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada didalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.

Pemerintah Kota Pekanbaru sejak 2015 telah mencanangkan Kota Pekanbaru sebagai Smart City Madani, dimana ada enam pilar yang menjadi penguatnya, yaitu Smart Governance (Tata Kelola Pemerintah yang Pintar, Smart People (Penduduk yang Pintar). Selain itu, Smart Economy (ekonomi yang pintar), Smart Environment (lingkungan yang pintar) Smart Living (kehidupan yang pintar), dan Smart Mobility (mobilitas yang pintar).

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisa Implementasi Smart City Madani Pemerintah Kota Pekanbaru dalam upaya sinergitas Program ASEAN Smart Cities Network 2030. Adapun pertanyaan penelitian ini sebagai berikut: Analisa strategi konsep Smart City Madani Kota Pekanbaru? Bagaimana hambatan dalam mensinergitaskan Program ASEAN Smart Cities Network 2030 melalui Konsep Smart City Madani Kota Pekanbaru?

Metode Penelitian

Berdasarkan problem penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini lebih tepatnya menggunakan metode atau pendekatan deskriptif analitik. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di kota Pekanbaru dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan mempelajari berbagai buku literatur dan dokumen-dokumen terkait dengan *Smart City*.

Teknik Analisa Data Dalam penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersama dengan pengumpulan data. Pada teknik analisis data analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang secara bersamaan, yaitu : Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. Reduksi data dilakukan sejak pengumpulan data. Penyajian data, adalah proses penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagian hubungan antar kategori flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini berarti data yang diperoleh pada saat reduksi data disajikan berdasarkan pikiran, intuisi pendapat atau kriteria tertentu untuk selanjutnya ditempatkan pada kategori masing-masing. Menurut miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan merupakan kegiatan diakhir penelitian kualitatif. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan dan kekokohnya.

Review Literatur/Tinjauan Pustaka

Banyak definisi terkait *Smart City* yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga maupun industri. Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas, perkumpulan penggiat Kota Cerdas di Indonesia telah mengeluarkan definisi yaitu suatu Kota yang bisa mengelola berbagai sumber daya kota secara inovatif dan terintegrasi sehingga warganya bisa hidup aman, nyaman, sejahtera dan bahagia yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi tujuan dari pengelolaan kota (Suhono Harso Supangkat: 2018).

Makna inovatif adalah bagaimana kota bisa mencari solusi tepat guna sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi memang diperlukan, tetapi tidak cukup, karena kapasitas pengelola, warga hingga sarana dan prasarana lain diperlukan agar orkestra pengelolaan kota bisa terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik.

Perjalanan pembangunan *Smart City* bisa dibagi dalam 3 atau 4 generasi. Kota Cerdas Generasi 1 adalah kota yang seperti biasanya membangun kota (*as usual*). Kota cerdas Generasi ke 2, adalah kota yang memandang Teknologi sebagai arus utama dalam

pembangunan kota cerdas. Banyak yang masih melihat *Smart City* adalah Kota ditambah aplikasi berbasis Teknologi termasuk adanya "*Command Center*". Namun demikian masih belum terasa adanya perubahan yang berarti dalam perubahan kota yang diidamkan. Kota Cerdas generasi ke 3 adalah Kota yang dikelola dengan teknologi sebagai bagian dari pemungkin (*enabler*) dan pemerintah kota telah mencoba untuk memulai inisiatif pembangunan kota cerdas. Dalam level ini masih beranggapan bahwa pembangun Kota cerdas itu hanyalah dilakukan Pemerintah Kota saja. Kota Cerdas generasi ke 4 (*City 4.0*), telah melibatkan warga dan komunitas lain dengan cara kolaborasi (*Co Creation*) ataupun gotong royong dalam membangun kota. Ini menjadi tantangan baru karena melibatkan sektor swasta dan masyarakat umum, bagaimana model kemitraan, bisnis dan tata kelolanya.

Smart City Madani

Smart city adalah sebuah impian dari semua kota-kota besar di seluruh dunia. Perencanaan *Smart City* adalah agenda global sebagai respon konseptual dan praktis terhadap berbagai krisis perkotaan di dunia yang semakin mengkhawatirkan, untuk mengembalikan hubungan antara manusia, ruang binaan dan ruang alami yang lebih harmonis, sehingga tidak saling menyakiti. *Smart city* adalah sebuah konsep Kota Cerdas yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Spesifikasi Konsep *Smart City* sebagai berikut:

- a. *Smart Government* (pemerintahan pintar): kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah Good Governance. Yaitu paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum.
- b. *Smart Economy* (Ekonomi pintar): maksudnya ini adalah semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/modal.
- c. *Smart Mobility* (mobilitas pintar): pengelolaan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa depan merupakan sebuah sistem pengelolaan terpadu untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik.
- d. *Smart People* (orang/masyarakat pintar): pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi, modal manusia maupun modal sosial.
- e. *Smart Living* (Lingkungan pintar): lingkungan pintar itu berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik.
- f. *Smart Live* (Hidup pintar): berbudaya, berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur (budaya).

Smart City merupakan salah satu strategi pembangunan dan manajemen kota yang masih baru. Konsep ini muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. *Smart City* dirancang guna membantu berbagai kegiatan masyarakat serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat. Konsep ini menekankan pada tiga konsep, pertama, sebuah konsep yang diterapkan oleh sistem pemerintahan daerah dalam mengelola masyarakat perkotaan, kedua mensyaratkan pengelolaan daerah terhadap segala sumber daya dengan efektif dan efisien dan ketiga *smart city* diharapkan mampu menjalankan fungsi penyedia informasi secara tepat kepada masyarakat dan mampu mengantisipasi kejadian yang tak terduga. *Smart City* adalah sebuah konsep kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. *Smart City* didefinisikan juga sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. *Smart City* telah menjadi landmark dalam perencanaan kota. *Smart City* merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi, ekologi, daya kompetitif kota.

Pemerintah Daerah melalui inovasi dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Bab XXI bertajuk Inovasi Daerah. Dari Pasal 386 hingga Pasal 390 UU 23/2014, menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi sebagaimana dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip: peningkatan efisiensi; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak ada konflik kepentingan; berorientasi kepada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. *Smart City* atau kota cerdas didefinisikan sebagai sebuah konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada didalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. (Prof. Suhono Harso Supangkat dkk).

ASEAN Smart City Network (ACSN)

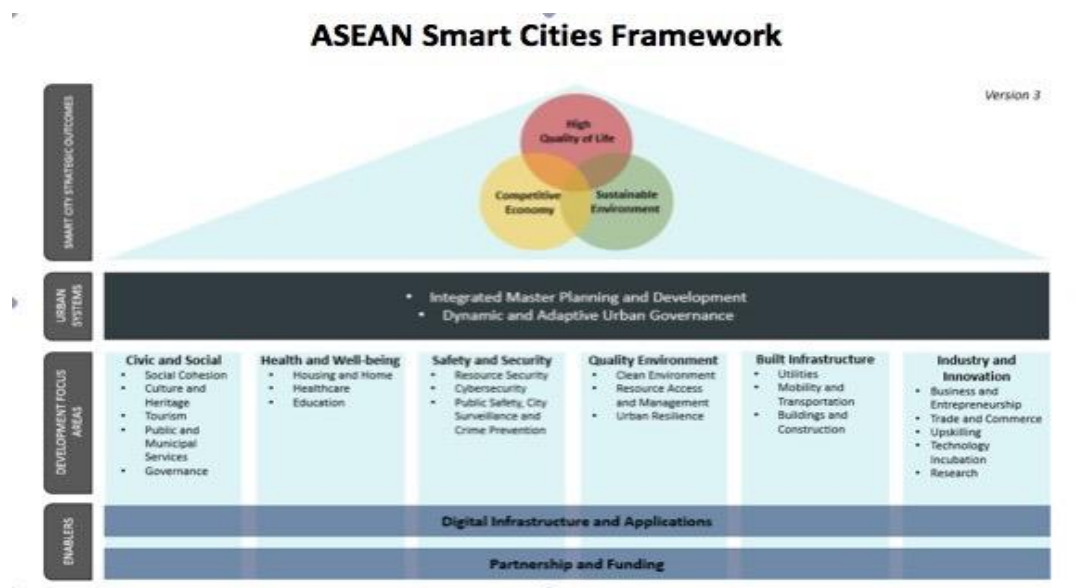
ACSN merupakan salah satu program ASEAN dimana perkumpulan negara ASEAN telah merencanakan suatu jejaring antar kota di ASEAN dengan masing masing Negara mengirim 3 kota pada awalnya. Setiap negara mengirim satu Kota Ibu Kota

Negara dan 2 kota lainnya. Singapura dan Brunei mungkin hanya kirim satu karena Negara adalah Kota. Sementara Singapura menjadi negara inisiator tentu bisa mengusulkan berbagai kegiatan untuk suatu tujuan tertentu.

ASCN sebuah wadah kolaboratif yang ditujukan untuk mensinergikan upaya pembangunan kota pintar di sepanjang Asia Tenggara dengan memfasilitasi kerjasama pada pembangunan kota cerdas, mengkatalisasikan proyek-proyek perbankan dengan sektor swasta, dan mengamankan pendanaan dan dukungan dari mitra-mitra luar Asia Tenggara.

ASEAN Smart Cities Network memiliki beberapa kinerja yang harus dicapai oleh tiap negara anggota ASEAN, dimana ada 6 (enam) sector yang harus ditingkatkan untuk mencapai ASCN tersebut yaitu *Civil and Social, Health and Well-being, Safety and Security, Quality Environment, Built Infrastructure* dan *Industry and Innovation*. Keenam sector itu dapat dijelaskan didalam grafik tabel dibawah:

Tabel 1. ASEAN Smart Cities Framework



Konsep Implementasi

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

Bardach yang dikutip oleh Agustino (2006:138) dalam buku “Dasar-Dasar Kebijakan Publik” sebagai berikut :

“implementasi adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya

dengan kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.”

Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Pengertian implementasi kebijakan menurut Mufizz yang dikutip oleh Kahya dan Zenu (1996:45) dalam buku “Pengantar Ilmu Administrasi Negara (Suatu Pokok Bahasan)” sebagai berikut :

“Implementasi kebijakan ialah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif.”

Edward III dikenal dengan “direct and indirect impact on implementation” terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan public yaitu :

1. Komunikasi, merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan public. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan public. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III dalam Agustino mengemukakan 3 variabel tersebut yaitu :
 - a. Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seiring terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adalah salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
 - b. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street/level bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu / mendua.
 - c. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksana suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan di lapangan.

2. Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (resources). Seorang ahli dalam bidang sumberdaya, Schermerhorn, Jr (1994:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: “Information, Material, Equipment, Facilities, Money, People”. Edwards III (1980:11) mengategorikan sumber daya

organisasi terdiri dari : “Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies”. Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan.

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan.

3. Disposisi

Menurut Edward III dalam Winarno (2005: 142-143) mengemukakan :

”Kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”.

Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi.

Hasil dan Pembahasan

Dikaitkan dengan sebuah teori yang ditegaskan oleh Edward III terdapat beberapa aspek yang harus mendapat perhatian, berikut implementasi kebijakan dari aspek-aspek tersebut:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Komunikasi yang baik sangat diperlukan untuk implementasi kebijakan, khususnya komunikasi yang terjalin antar para pelaksana kebijakan baik itu pelaksana dalam satu unit Dinas maupun pelaksana antar Dinas terkait. Disamping itu, komunikasi harus terjalin dengan baik antara para pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran dalam hal ini adalah seluruh masyarakat Kota Pekanbaru. Implementasi kebijakan yang berjalan baik tidak terlepas dari faktor komunikasi yang baik pula. Komunikasi yang terjalin itu harus mampu menjembatani segala macam bentuk kepentingan, baik antar pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan dan masyarakat. Komunikasi sangat berpengaruh pada terhadap pelaksanaan kebijakan yang akan berdampak pula kepada hasil kebijakan yang akan dicapai.

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dapat dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana dan tim dan juga antar badan instansi yang terkait sangat penting bagi

kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing anggota internal dan antar badan instansi sehingga tidak adanya saling lempar tugas, harus saling seimbang dan jangan mau seenaknya.

Peneliti menemukan bahwa kendala yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru terdapat di dalam Roadmap Walikota Pekanbaru, terdapat Roadmap jangka panjang dan jangka pendek. Kendalanya yaitu dalam mensosialisasikan Roadmap tersebut sehingga beberapa pegawai belum memahami.

Berikut merupakan Roadmap Kota Pekanbaru 2015 - 2045 yang dalam hal ini dipublikasikan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru:



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, 2015

Informan mengatakan bahwa: Bentuk sosialisasi mengenai Smart City kepada masyarakat Kota Bandung berupa menyampaikan informasi melalui Media Cetak, Radio, Televisi dan media Sosial Media.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, menemukan masih banyak masyarakat Kota Pekanbaru yang kurang mengetahui mengenai Smart City tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, mengenai sosialisasi Pemerintah Kota Pekanbaru masih terus berusaha untuk mensosialisasikan Smart City salah satunya yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan website, sosial media dan lain sebagainya.

2. Implementasi Kebijakan Berbasis Teknologi

Hal lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk mewujudkan Smart City adalah dengan diluncurkannya dua aplikasi. Bertepatan dengan momen ulang tahun ke 232 Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru meluncurkan dua aplikasi pendukung program *smart city* yaitu perpustakaan *online* berbasis aplikasi *moco* dan radio *online*.

Selain dua aplikasi yang telah diluncurkan, pemkot akan mengembangkan aplikasi lainnya yang dapat mendukung realisasi program kota pintar untuk meningkatkan pelayanan, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat setempat. Meskipun hingga sekarang hal tersebut belum diketahui secara pasti.

Dalam pemanfaatan Big Data, Pemerintah Kota Pekanbaru bersiap untuk *The Urban Nexus Project* yang masuk kedalam *roadmap* Kota Pekanbaru. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bappeda Pekanbaru Drs H Syofian dalam rapat Pertemuan & koordinasi tentang *The Urban Nexus Project* dengan BAPPENAS RI dan GIZ *Germany* selaku pihak yang mempromosikan proyek tersebut, beberapa waktu lalu. Menurut Syofian, pihaknya akan menjadi *leading Sector*.

The Urban Nexus Project adalah model Proyek Pembangunan Perkotaan yang melibatkan beberapa sektor (*Multy Sector Approach*) yang fokus pada Sanitasi, Penyediaan air bersih, Energi, Ketahanan Pangan, dan Penggunaan lahan (*Sanitation, Water, Energy, Food Security and Land use*).

Informan menjelaskan bahwa Model Proyek Pembangunan ini dipromosikan oleh lembaga donor Jerman (yaitu GIZ) yang membantu negara negara berkembang dalam hal sanitasi, penyediaan air bersih, energi, ketahanan pangan, dan penggunaan lahan. Adapun keterlibatan GIZ dalam pelaksanaan proyek ini nantinya adalah membantu dalam hal bantuan teknis (*technical assistance*). Bantuan teknis yang diberikan tergantung dari proposal dan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Di Indonesia ada tiga kota yang diberi kesempatan untuk membuat proposal proyek pembangunan dengan menggunakan model ini untuk mendapatkan bantuan teknis dari GIZ. Kota-kota tersebut adalah, Kota Pekanbaru, Solo dan Tanjung Pinang. Ketiga

kota tersebut akan saling berkompetisi, karena GIZ hanya memilih satu Kota untuk diberikan Bantuan Teknis dan hal tersebut tergantung dari Proposal yang diusulkan.

Di awal tahun 2018, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, Firmansyah Eka Putra dalam uji coba aplikasi bank data di ruang Pekanbaru Command Center (PCC). Bank data ini merupakan inovasi hasil inovasi dari Diskominfo statistik dan persandian Kota Pekanbaru dalam mendukung Pekanbaru Smart City.

Aplikasi bank data ini merupakan inovasi di bidang teknologi yang berfungsi untuk memudahkan menyimpan dan mentransfer data, sehingga dapat diakses kapan dan dimana saja. Aplikasi bank data ini diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat diakses langsung oleh pimpinan dan dapat memantau kinerja setiap ASN.

Untuk sementara bank data ini diterapkan di lingkungan Diskominfo. Namun ke depan, semua OPD akan menerapkan inovasi serupa. Sehingga saat wali kota Pekanbaru membutuhkan data dari masing-masing OPD bisa langsung didapatkan, tanpa harus menunggu laporan dari kepala OPD-nya.

3. Hambatan Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Pekanbaru

Hambatan yang terjadi pada kebijakan smart city di Kota Pekanbaru bisa dilihat dari beberapa aspek:

Komunikasi

- a. Masih kurangnya penggunaan atau pemanfaatan sistem dan aplikasi yang ada karena pemahaman masyarakat yang kurang.
- b. Berkaitan dengan sosialisasi yang belum merata mengakibatkan terhambatnya pengimplementasian kebijakan smart city kepada masyarakat serta pihak-pihak yang terkait. Kurangnya publikasi sistem dan aplikasi yang telah dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat, sehingga masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan sistem maupun aplikasi tersebut.

Sumber daya

- a. Terkait Staff, permasalahan sumber daya terkait sataff berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informasi selaku implementor dari smart city di Kota Pekanbaru masih adanya kendala ataupun permasalahan mengenai staff dimana di Pemkot dan Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintahan Kota Pekanbaru masih kekurangan staff di bidang Ilmu Teknologi sedangkan staff yang ahli di bidang ilmu teknologi ini sangat penting demi menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan Smart City yang merupakan sumberdaya yang utama dalam implementasi kebijakan, namun penambahan staff saja tidak cukup dalam menangani permasalahan ini dibutuhkannya staff yang ahli dan mempunyai kemampuan di bidang ilmu

teknologi agar tugas dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan pengimplementasian smart city.

- b. Terkait Informasi, permasalahan sumber daya dalam indikator informasi terdapat beberapa kendala seperti masih kurangnya pemahaman petugas terhadap tugas dan fungsi dalam menjalankan program Smart City. Ini menjadi salah penghambat keefektifan program smart city dikarenakan kordinasi Pemkot dan Dinas Komunikasi dan Informasi ini tidak semua aparatur paham akan teknologi sedangkan di dinas komunikasi dan informasi sendiri aparatur dituntut untuk paham akan arahan yang diberikan kepala daerah dan paham akan ilmu teknologi mengenai smart city sebagai penunjang dari arahan yang diberikan oleh kepala daerah dalam pelaksanaan program smart city, karena tidak bisa disepelekan lagi aparatur pelaksana smart city harus paham akan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan paham mengenai ilmu teknologi khususnya mengenai program aplikasi-aplikasi penunjang smart city.

Penutup

Berdasarkan analisa, data dan temuan dilapangan, implementasi kebijakan Smart City di Kota Pekanbaru masih tengah berlangsung baik dari segi peningkatan infrastruktur maupun aplikasi, khususnya dalam pemanfaatan teknologi yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Hal tersebut dapat berjalan dengan lebih cepat dan lancar jika saja kordinasi kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Walikota Pekanbaru dengan beberapa Dinas terkait lebih intens dan berkesinambungan. Ditambah dengan kurangnya sosialisasi ke masyarakat belum massif dan maksimal membuat implementasi Smart City Madani dirasa tidak tersosialisasi dengan sempurna di tataran masyarakat umum. Padahal, Smart City Madani merupakan salah satu bagian dari roadmap pemerintah dalam meningkatkan perkembangan kota-kota besar di Indonesia, agar dapat bersaing dengan kota-kota besar lainnya di dunia Internasional, setidaknya untuk kawasan Asia dan ASEAN yang tengah gencar mensinergikan Program *Asean Smart Cities Network (ASCN) 2030*.

Bibliografi

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta.
- Malik, Dedy Djamaluddin., Jalaluddin Rakhmat dan Mohammad Shoelhi, 1993, *Komunikasi Internasional, Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pelatihan Komunikasi (LP3K) bekerjasama dengan PT. Remaja Rosdakarya* : Bandung
- Herdiansyah, Harish. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Perbandingan Administrasi Publik*. Bandung: Gava Media.
- Ismail, Nawawi. 2009. *Public Policy*. Surabaya: PMN.

- Kahya, Zenju. 1996. Pengantar Ilmu Administrasi Negara.
- Kusumanegara, Solahudin. 2010. Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Bandung: Gava Media.
- Lexy J. Moleong. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mahayana, Dimitri, 2010, Menjemput Masa Depan, Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global, Rosda : Bandung
- Plano, Jack C. & Roy Olton, 1999, Kamus Hubungan Internasional, CV. Putra A Bardin : Bandung
- Rahardjo, Budi, 2002, Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet (file dalam format PDF), PT. Insan Infonesia : Bandung & PT. INDOCISC : Jakarta
- Schermerchorn, Jr. 1994. Management. International Studies Version.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Undang-Undang: Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.
- Pasal 386-390 Tentang inovasi Pemerintah Daerah.
- Zaleski, Jeff, 1999, Bagaimana Teknologi Komputer Mempengaruhi Kehidupan Keberagamaan Manusia, Mizan : Bandung

Analisis Kontribusi dan Hambatan Kerjasama *Sister City* antara Pemerintah Kota Medan dan Rostov on Don (Rusia)

Ibnu Zulian¹, Stivani Ismawira Sinambela²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Potensi Utama, Medan.

Corresponding e-mail: ibnuzulian45@gmail.com

Abstrak



Kerjasama *Sister City* yang produktif menjadi komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Medan saat ini terbukti dengan semakin terbuka dan banyaknya kerjasama terjalin yang berlandaskan sifat dasar kerjasama *sister city* yaitu memberikan manfaat dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bekerja sama, namun kerjasama Pemko Medan & Rostov on Don ini masih dalam proses mencari kesepakatan pada elemen-elemen yang memungkinkan terjalin kerja sama, kemudian didiskusikan & dirumuskan dalam draf untuk memenuhi kebutuhan kelanjutan, melalui prosedur internal masing-masing agar bisa meningkatkan *Memorandum of Understanding*. Penulis berusaha menyikapi akan kerjasama Internasional ini dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yang bertujuan menggambarkan fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sebagian besar data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, penelusuran data online, dokumentasi, wawancara, observasi, serta dianalisis dengan pendekatan teori Ilmu Hubungan Internasional. Secara teoritis Penulis menemukan bahwa dalam kerja sama ini berpotensi memiliki kontribusi dan hambatan, baik secara *paradiplomacy* yaitu ketidakefektifan manajemen baik pusat & daerah, atau pun *rational choice* yakni keterlibatan pimpinan kota Medan sebagai bentuk dorongan kontribusi kesuksesan kerjasama *sister city* ini. Oleh sebab itu, penulis menawarkan potensi-potensi kota medan sebagai instrumen kerjasama ini. Sehingga kesuksesan komunikasi dan kerjasama bisa berlanjut dan saling menguntungkan.

Kata Kunci

Sister City, Pemko Medan, Kontribusi & Hambatan.

Pendahuluan

Hubungan Indonesia-Rusia juga pernah mengalami masa yang hangat di era Orde Lama (1950-1965), di mana Indonesia dan Rusia berangkul dalam kepentingan ideologi, yang antara lain dimanifestasikan dalam bentuk kerjasama pertahanan dan pendidikan. Sayangnya, hubungan kedua negara ini menjadi renggang karena perang dingin, dan sempat menjauh selama Orde Baru yang menggemborkan sentimen anti

komunis. Seiring dengan proses reformasi dan perestroika, hubungan kedua negara kembali membaik. Kerjasama Indonesia-Rusia di masa sekarang ini semakin kental dan dimanifestasikan dalam banyak bidang, seperti di PBB, G-20, APEC dan organisasi-organisasi internasional lainnya. Dalam hal ini, Indonesia juga mengajak Rusia untuk dapat aktif dalam forum ASEM, dan sebaliknya Rusia juga akan membantu Indonesia, khususnya di bidang tanggap darurat.

Menurut Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia dan Republik Belarusia M. Wahid Supriyadi, hubungan mesra Indonesia-Rusia tersebut juga direalisasikan dengan semakin banyaknya turis Rusia yakni Sebanyak 125.700 orang wisatawan Rusia telah berkunjung ke Indonesia di tahun 2018, meningkat dari 117.500 orang di tahun 2017 (TribunnewsTravel 2019). Jumlah tersebut dapat meningkat lagi apabila ada upaya bersama dari berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku bisnis industri pariwisata maupun masyarakat Indonesia pada umumnya dalam memajukan sektor pariwisata Indonesia. Kerjasama di bidang pendidikan yang semakin meningkat dengan semakin banyaknya mahasiswa-mahasiswi Rusia yang kembali tertarik mempelajari bahasa dan budaya Indonesia.

Uniknya kedua bangsa menghadapi permasalahan yang sama dalam hal pembangunan modern civilization yaitu harus berhadapan dengan pluraslime suku, bangsa, agama dan bahasa. Tanpa penanganan yang tepat, aneka-ragam perbedaan tersebut dapat menimbulkan hambatan yang serius dalam pembangunan masing-masing. Oleh sebab itu, perlunya mempelajari asal muasal permasalahan (*root causes*) dan keintenan dialog budaya dan agama untuk menurunkan tingkat ketegangan, dan itu bisa dilakukan melalui pemberdayaan kaum moderat, pendidikan, toleransi dan kesadaran globalisasi. Kedua bangsa seharusnya juga sudah mulai melakukan kegiatan secara kongkrit dalam banyak bidang, dan tidak lagi hanya bicara wacana. Menghindari penandatanganan MoU bila tidak dapat dilaksanakan, dan bahkan perlu melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang pernah diupayakan agar hasilnya menjadi terukur. Tidak pelak lagi, kedua belah pihak kini harus aktif mengisi kesempatan yang ada tanpa harus menunggu dan menunda (Admin 2017). Hubungan Indonesia-Rusia diibaratkan sebagai ritme kehidupan, maka hubungan itu sedang dalam posisi yang menanjak.

Kerjasama *Sister City* Pemerintah Kota (Pemko) Medan merupakan perpanjangan tangan dari daerah untuk Indonesia dalam menerapkan berbagai misi dan visi nasional dan ini bukanlah pengalaman baru. Pemko Medan telah menjalin kerjasama *sister city* dengan 4 Kota. Banyak program yang dikembangkan dan membawa dampak positif bagi masyarakat Kota Medan, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti bidang kerjasama pendidikan, pertukaran pelajar dan staf, bidang ekonomi dalam bentuk investasi asing di bidang properti dan bentuk kerjasama ekonomi lainnya.

Medan dan Roston on Don telah menyatakan keinginannya untuk menjajaki kemungkinan pembentukan kerja sama *sister city*. Guna mewujudkan hal itu, Dubes

Indonesia untuk Rusia dan Balarus Bapak M. Wahid Supriyadi mengundnag Walikota Medan beserta penggiat UMKM ke Moskow. Walikota Medan bertemu Walikota Rostov On Don Dimitry Chernyshov pada tahun 2017 keduanya mengidentifikasi sector kerjasama. Kemudian Walikota menyerahkan draft Letter of Intent (LoI) untuk pertemuan lebih lanjut dari kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pertemuan dengan Wakil Walikota Roston on Don, Kedua belah pihak telah mengidentifikasi sektor kerja sama yang memungkinkan dapat mendukung membangun hubungan baik dengan berdasarkan prinsip kesetaraan dan keuntungan bersama untuk pengembangan kedua kota. Dengan beberapa uraian penjelasan di atas dapat dirumuskan masalahnya bahwa; Bagaimana peran Pemko Medan dalam menjalin kerjasama dengan Kota Rostov on Don? & Apa kontribusi dan hambatan dari kerjasama *Sister City* tersebut?

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di kota Medan yaitu Pemerintah Kota Medan, Konsulat Rusia, & Asosiasi Pengusaha Perempuan Indonesia Sumatera Utara (APPINSU). Penelitian dilakukan pada bulan Februari, 2019.

Penyusunan penelitian ini menggunakan data-data yang mendukung pelaksanaan dari proses penelitian yang dilakukan. Adapun hal-hal yang menyangkut data-data tersebut adalah sebagai berikut: LoI dan MoU antara Pemko Medan Restov on Don.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Menteri Luar Negeri Indonesia, Pemko Medan, Konsulat Rusia, dan APPINSU.

Pada penelitian ini digunakan jenis data primer dan sekunder yaitu data diperoleh melalui melalui studi kepustakaan, penelusuran data online, dokumentasi, wawancara dan observasi.

Metode yang digunakan dalam rangka pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi literatur dari sumber-sumber kepustakaan sebagai landasan dalam menganalisa permasalahan yang disusun dalam penelitian ini.
2. Pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber data primer yaitu wawancara dan observasi
3. Data sekunder yang dikumpulkan dan dianalisa sesuai dengan kajian utama dalam bidang Ilmu Politik dan Ilmu Hubungan Internasional

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Penelitian kualitatif tidak menetapkan penelitian hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat, aktor, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Akan

tetapi fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan grand tour observation dan grand tour question.

Review Literatur/Tinjauan Pustaka

Pengertian Sister City

Definisi mengenai hal ini kebanyakan di dasarkan pada hubungan antar pemerintah. Menurut Kementerian dalam negeri Indonesia, *Sister City* adalah sebuah konsep di mana dua daerah atau kota yang secara geografis, administratif, dan politik berbeda, berpasangan untuk menjalin hubungan sosial antar masyarakat dan budaya (Agni 2014). *The United Nation Development programme* (UNDP) mendefinisikan *sister city* sebagai sebuah kemitraan jangka panjang antara masyarakat di berbagai kota secara terbuka. Sementara menurut Villers, *sister city* yaitu kerja sama strategis antara masyarakat di berbagai kota atau kota-kota, di mana mereka menjadi pemeran utama.

Sementara dari *Sister City International* (SCI) menjelaskan cukup lengkap, yaitu *sister city* adalah hubungan kerja sama jangka panjang, antara dua kota dalam dua negara yang berbeda melalui budaya, pendidikan, bisnis, dan teknis. Hal ini diformalkan ketika dua wali kota menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk membangun hubungan. Aktifitas ini biasanya di organisir dan diimplementasikan oleh sukarelawan (*volunteers*), dan institusi lokal (Faizal 2018). Bisa dipahami bahwa hubungan kerja sama *sister city* dilatar belakangi oleh keinginan untuk bekerja sama yaitu saling mengenal, saling membantu, dan saling menguntungkan antara kota-kota yang bekerja sama tersebut. Di mana kerja sama tersebut tanpa membedakan latar belakang ekonomi, dan sistem sosial dari masing-masing pihak serta melibatkan masyarakat lokal. Kebijakan desentralisasi & globalisasi menjadi alasan dan faktor utama bagi berbagai negara-negara di dunia untuk saling bekerjasama. Hal ini didasarkan pada saling bergantung dan saling membutuhkannya tiap-tiap negara terhadap negara lain, baik itu sumber daya alam, energi, informasi, teknologi, maupun perdagangan. Hubungan internasional merupakan suatu sistem hubungan antar negara yang berdaulat dalam pergaulan internasional menjadikan kegiatan diplomasi sebagai suatu elemen utama bagi suatu negara sebagai faktor penentu eksistensi sebuah negara dalam hubungan internasional.

Diplomasi merupakan proses politik untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah negara lain (Sumaryo 2004). Diplomasi kekinian juga tidak hanya menyangkut kegiatan politik saja tapi juga suatu senjata multi-dimensional yang digunakan dalam situasi dan lingkungan apapun dalam hubungan antar bangsa (*Ibid.* Hal. 3). Sehingga dapat dikatakan hubungan internasional saat ini ditandai oleh aktivitas-aktivitas diplomasi yang sangat kompleks. Hubungan Internasional yang biasanya dilakukan antara pemerintah pusat saja (G to G), kini tidak lagi mendominasi. Untuk menjawab tantangan globalisasi tersebut, pemerintah daerah telah membuka komunikasi dan

menjalin hubungan kerjasama internasional dengan kota/pemerintah daerah di luar negeri yang dikenal dengan istilah *sister city*. Kehadiran pemerintah lokal bukan lagi aktor baru dalam arena internasional di tengah globalisasi saat ini. Ditandai dengan banyaknya perjanjian.

Perjanjian internasional yang dilakukan antar pemerintah-pemerintah lokal/daerah diberbagai negara didunia, dimana satu sama lain saling berhubungan. Berawal dari hal tersebut maka muncullah berbagai jaringan-jaringan *sister city* diberbagai belahan dunia yang terus meningkat mulai dari kota-kota, provinsi, diberbagai negara-negara maju, negara-negara berkembang, bahkan negara-negara kecil. Salah satunya adalah kerjasama *sister city* yang dilakukan oleh pemerintah kota Medan. Kerjasama *Sister City* dijalin untuk meningkatkan pengertian bersama melalui diskusi dan konsultasi reguler mengenai program pertukaran dan kerja sama tertentu serta melakukan upaya untuk mengembangkan hubungan persaudaraan (Yoseph 2017). Dikarenakan Indonesia menerapkan sistem *One door Policy*. Kebijakan *one door policy*, yang merupakan sebuah realitas nasional yang harus disikapi dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Dimana realitas tersebut merupakan peluang dan tantangan yang menjanjikan dengan memberi kesempatan kepada setiap Pemerintah Daerah untuk lebih kreatif dalam mengambil langkah dan kebijakan yang konstruktif, efektif, efisien, dan partisipasi aktif dalam memaksimalkan pengembangan potensi daerah yang dimilikinya (Laode 2012).

Teori Paradiplomasi

Paradiplomasi merupakan desentralisasi kekuasaan politik dan kewenangan administratif dalam sebuah proses yang terjadi pada aktor-aktor sub-nasional, Institusi politik dan kebijakan publik suatu Pemerintahan pusat dalam kewenangan menjalankan hubungan luar negeri, karena pemerintah daerah merupakan bentuk yang nyata dari implementasi kebijakan publik. Peran kepentingan aktto lebih untuk menunjukkan pada masalah yang lebih khusus tanpa menyalahi aturan pada suatu kedaulatan Negara, dan berada pada pengawasan Negara, akan tetapi untuk mengembangkan daerahnya para aktor tersebut mempunyai kebebasan dalam menentukan isu dan tujuan yang ingin dicapai, dalam menjalankan mekanismenya, para aktor diplomasi regional berada di bawah kedaulatan Negara dan mengikuti sistem internasional yang berlaku yang menjadikan aktor Negara sebagai penghubung untuk terciptanya hubungan tersebut, hal ini disebut Paradiplomasi (Aldecoa & Keating 1999). Sedangkan kerjasama antara Pemerintah Kota Medan dan Rostov on Don merupakan bentuk *global Paradiplomasi* yaitu paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah sub-nasional di suatu negara dengan pemerintah sub nasional di negara lain, baik kedua wilayah sub nasional maupun kedua wilayah negara tersebut tidak berbatasan.

Berdasarkan typologi Robert Kaiser, *Global Paradiplomacy*, Menurut Kaiser, adalah hubungan politik-fungsional dengan pemerintah pusat asing, organisasi internasional,

industri sektor swasta, kelompok-kelompok kepentingan. Singkatnya, tipe ini merupakan hubungan diplomasi antar aktor sub nasional yang berasal dari kawasan yang berbeda (Fathun 2018). Paradiplomasi adalah fenomena yang sedang melanda dunia dalam hubungan transnasional masyarakat dunia. Keterlibatan aktor sub negara yang turut serta dalam mencaapai kepentingan spesifik mereka yang sejalan dengan kepentingan negaranya. Paradiplomasi menunjukkan aktifnya aktor daerah otonom untuk melakukan hubungan kerjasama luar negeri dengan aktor lain di luar negeri baik dalam bentuk MoU maupun perjanjian internasional lainnya. Teori paradiplomasi sebagai instrumen penulis untuk melihat potensi hambatan dalam kerja sama Sister ini.

Teori Pilihan Rasional (Rational Choice)

Menurut Coleman, teori pilihan rasional memiliki dua unsur pokok, yaitu aktor dan sumber daya. Definisi sumber daya adalah suatu objek yang dapat menarik atensi aktor dan dapat dipengaruhi oleh aktor tersebut. Dasar untuk melakukan suatu tindakan sosial adalah adanya dua aktor. Sumber daya potensial yang bisa memikat atensi pihak lain dikontrol oleh aktor. Adanya rasa saling membutuhkan satu-sama lain sebagai akibat dari perhatian satu aktor terhadap sumberdaya yang dikendalikan aktor lain - terlibat dalam sistem tindakan-. Sebagai aktor yang memiliki tujuan, setiap aktor memiliki target untuk memaksimalkan pengaktualan kepentingannya yang akan menghasilkan ciri saling ketergantungan atau ciri tindakan yang tersistem (Coleman 1990). Dapat ditarik benang merah bahwa aktor dan sumber daya sangat berperan dalam implementasi teori tersebut dalam kehidupan sosial. Medan dan Rostov on Don merupakan dua aktor yang memiliki tindakan mengendalikan sumberdaya yang dimiliki masing-masing berupa kebudayaan, pariwisata, teknologi dan pengelolaan tata kota supaya saling berkepentingan. Sumber daya yang dikendalikan dua mitra kerjasama tersebut yang akan menyebabkan kedua kota saling ketergantungan satu sama lain.

Adanya kerjasama sister city antara Pemerintah Kota Medan dan Rostov on Don adalah salah satu upaya kolaborasi Pemerintah kota Medan untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki kota Rostov on Don sebagai suatu bentuk perwujudan kepentingan. Hal tersebut yang mendasari terjalinnya hubungan Pemerintah Kota Medan dalam kerjasama kota kembar dengan kota Rostov on Don. Dengan teori ini penulis mampu menganalisis kontribusi yang akan dibuat oleh para aktor baik Pemko Medan maupun Rostov on Don.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Kota Medan & Rostov on Don

Secara historis, perkembangan Kota Medan sejak awal memosisikan diri menjadi jalur lalu lintas perdagangan. Posisinya yang terletak di dekat pertemuan Sungai Deli dan Babura, serta adanya kebijakan Sultan Deli yang mengembangkan perkebunan

tembakau dalam awal perkembangannya, telah mendorong berkembangnya Kota Medan sebagai Pusat Perdagangan (ekspor-impor) sejak masa lalu. Sejak Medan diresmikan sebagai ibukota Deli telah mendorong kota Medan berkembang menjadi pusat pemerintahan. Sampai saat ini, di samping merupakan salah satu daerah kota, juga sekaligus ibukota Provinsi Sumatera Utara.

Sebagai salah satu daerah otonom berstatus kota di Provinsi Sumatera Utara, kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan cukup penting dan strategis secara regional. Bahkan sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan sering digunakan sebagai barometer dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Medan adalah kota multietnis yang mana penduduknya terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Mayoritas penduduk Medan bekerja di sektor perdagangan, sehingga banyak ditemukan ruko di berbagai sudut kota. Di samping kantor-kantor pemerintah provinsi, di Medan juga terdapat kantor-kantor konsulat dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, dan Jerman.

Secara geografis, Kota Medan memiliki kedudukan strategis sebab berbatasan langsung dengan Selat Malaka di bagian Utara, sehingga relatif dekat dengan kota-kota/negara yang lebih maju seperti Malaysia, Singapura dan lainlain. Demikian juga secara demografis Kota Medan diperkirakan memiliki pangsa pasar barang/jasa yang relatif besar. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduknya yang relatif besar dimana tahun 2013 diperkirakan telah mencapai 2.083.156 jiwa.³² Demikian juga secara ekonomis dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor tertier dan sekunder, Kota Medan sangat potensial berkembang menjadi pusat perdagangan dan keuangan regional/nasional (Stivani 2014).

Secara Hubungan Luar Negeri, Pemko Medan telah melakukan berbagai kegiatan di berbagai bidang melalui Kerjasama *Sister City* dengan 4 (empat) Kota Bersaudaranya sebagai berikut : a. Kota Pulau Pinang, Malaysia, (sejak Tahun 1984), b. Kota Ichikawa, Jepang, (sejak Tahun 1989), c. Kota Gwangju, Korea, (sejak Tahun 1997), d. Kota Chengdu, RRC, (sejak Tahun 2002) (Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Medan. LKPJ Tahun 2006). Antar kota menerapkan perjanjian dalam bentuk riil, yakni membantu dari sektor pembangunan dan budaya daerah masing-masing. Tak hanya itu, dari sektor pendidikan pun mulai digiatkan dengan seringnya pertukaran pelajar serta guru antar kedua daerah (Renata & Yosephine 2014).

Sedangkan Kota Rostov on Don adalah wilayah Rostov dan pusat administrasi Rusia Selatan; itu adalah pelabuhan lima laut, pusat industri & budaya Rusia selatan dan transportasi sebagai citra penting. Kota ini didirikan pada 1749 di tepi kanan Sungai Don, 46 km dari pertemuan Don dengan Laut Azov. Pada awalnya, hanya ada zona pabean di situs ini, kemudian pada tahun 1760 memulai pembangunan benteng untuk perlindungan asrama Rusia selatan, dinamai setelah Rostrop dan Yaroslavl metropolitan. Permukiman yang muncul di sekitar benteng dinamai kota Rostov-on-

Don pada 17 Agustus 1807 di Kaisar Alexander Keputusan Pertama. Wilayah kota adalah 354 km², populasi lebih dari 1.058 juta orang. (*Ministry of Economic Development of Rostov region*, 2008).

Kota ini terletak 1.226 km dari Moskow, di pusat jalan raya transportasi, memberikan akses ke tiga laut - Hitam, Azov, Kaspia; dan koneksi ke bagian CIS Eropa, Transcaucasia, Timur Tengah dan Mediterania. Kota ini memiliki bandara internasional dengan lalu lintas penumpang 4.5 miliar penumpang-kilometer. Dari segi perdagangan maupun kebudayaan muara Sungai Don memainkan peranan yang sangat penting sejak zaman dahulu. Ini adalah lokasi koloni Yunani Tanais, benteng Genoa Tana, dan benteng Azov milik Turki. Rostov na Donu pada hakikatnya didirikan pada 1749, ketika sebuah kantor pajak dibangun di tepi Sungai Don, yang segera diikuti dengan sebuah benteng besar. Kota ini dinamai sesuai dengan nama Santo Dimitrius dari Rostov, seorang uskup yang baru dan dihormati dari kota lama di utara Rostov Agung.

Potensi & Kontribusi Sister City

Potensi Kerjasama Perdagangan dan Ekonomi Kreatif

Dari hasil wawancara dengan Drs. Rivai Nasution, MM. SAAT. Kabag Hubungan kerjasama Setda Kota Medan (Kantor Wali Kota Medan, 24 Juli 2019, 10:47 AM). Peneliti menemukan lembaga di bawah wewenang Pemko juga pernah melakukan aktivitas hubungan secara langsung dengan Rusia seperti aktivitas ekspor Batik Medan. Ini dibuktikan produktifnya Dinas Kerajinan nasional daerah mau pun kota. Kami juga sempat mewawancarai pihak-pihak terkait. Selain itu, APPINSU berupaya menjembatani sekaligus memfasilitasi kerjasama antara Pemko Medan dengan Konsulat Rusia salah satunya dengan menggelar malam kesenian bertajuk “Semalam Di Rusia” yang digelar di Grand Aston City Hall Medan (Adminmh 2017). Membangun Kota Medan tidak hanya bisa mengandalkan APBD, tentunya harus mendapat dukungan penuh para investor. Dengan investasi yang dilakukan investor, pembangunan di Kota Medan dapat berjalan dengan cepat.

Dekranasda Kota Medan sebagai lembaga di bawah Pemko Medan selalu aktif mengikuti Pameran Produk Kerajinan Internasional atau Internasional salah satunya yaitu Handicraft Trade Fair (INACRAFT) tahun 2019 di Jakarta Convention Center (JCC). Event Skala Internasional ini dibuka langsung Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo. (Admin Dinas Kominfo Kota Medan, 2019). Pameran INACRAFT merupakan bentuk penghargaan produk kerajinan terbaik dari Daerah yang menonjolkan karakteristik budaya. Batik Medan dan Songket Deli menjadi produk unggulan, juga memamerkan hasil kerajinan berupa Lukisan dari Bubuk Kopi dan Teh.

Dekranasda Kota Medan terus mempromosikan Batik Medan dan Songket Deli di seluruh Indonesia bahkan sampai ke luar Negeri. Dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan para pengrajin. Sebelumnya Pemkot Medan telah menjajaki kerjasama

dengan salah satu Kota di Rusia yakni Roston on Don. (Juraidi 2017). Tujuan kerjasama yang akan dilakukan dalam upaya untuk mengembangkan sekaligus memajukan kedua kota. Cendera mata berupa Batik dan Songket Medan merupakan hasil kerajinan batik para pelaku UMKM di Kota Medan, terkait UMKM Medan juga mempunyai Produksi usaha kecil menengah yaitu jamu untuk kesehatan wanita Sumatera Utara "Sari Manjakani" produk ini sudah memasuki pasar luar negeri, khususnya Malaysia dan Singapura meski dengan cara ekspor tidak langsung. Potensi perdagangan memang sudah cukup besar, manajemen dewasa ini sedang menjajaki ekspor langsung termasuk ke India, Malaysia dan Singapura (Redaksi WE Online. 2015).

Potensi Kejasama Pendidikan

Dari hasil wawancara dengan Drs. Rivai Nasution, MM. SAAT. Kabag Hubungan kerjasama Setda Kota Medan (*ibid*). Pemko Medan cukup berpengalaman karena sebelumnya pernah melakukan pertukaran pelajar antara Korea, Amerika, Jepang, dan ini menjadi program prioritas kerjasama *Sister City* ini. Pada tahun 2018 Pemko Medan mengirim sebanyak 15 pelajar ke Kota Guwangju, Korea Selatan. Program ini bertujuan memperkenalkan Medan sebagai kota yang multikultural, yang ragam akan suku, agama, ras, dan adat istiadat. Dan ini menjadi citra positif bagi Indonesia (Dinas Kominfo Medan. 2018). Kemudian pada bulan Agustus 2019, sebanyak 8 pelajar dari Kota Ichikawa, Jepang mengunjungi Balai Kota Medan. Kunjungan dilakukan dalam rangka program pertukaran pelajar guna mempererat hubungan *sister city* antara Kota Medan dengan Kota Ichikawa yang telah dijalin sejak tahun 1989. (KR 2019). Para pelajar dapat menjadi duta budaya dan persahabatan bagi masyarakat Kota Medan. Perkenalkanlah Kota Ichikawa kepada masyarakat Kota Medan.

Kota Rostov dari Ketersediaan layanan kesehatan dengan level yang sama seperti Moskow dan Saint Petersburg. Dalam beberapa tahun terakhir, struktur sistem pendidikan kota berulang kali diinovasi oleh penciptaan jenis baru lembaga pendidikan, memberikan pendidikan yang diperbarui dengan tuntutan kehidupan modern. Secara total, Rostov memiliki 288 lembaga pendidikan kota. Mereka adalah: 12 lyceum, 4 gymnasium, 13 lembaga pendidikan tipe baru swasta, 19 kompleks "taman kanak-kanak dan sekolah", 5 pusat anak-anak, 10 taman kanak-kanak khusus bahasa, 11 taman kanak-kanak seni khusus, 8 taman kanak-kanak ekologi kemanusiaan, 14 taman kanak-kanak komplementer. 17 sekolah menengah menyediakan studi mendalam tentang mata pelajaran tertentu, 5 di antaranya memiliki kelas pendidikan komplementer, 58 di antaranya memiliki program berorientasi lembaga pendidikan tinggi (*ibid*, Par. 4-6).

Potensi Kerjasama Budaya & Pariwisata

Dari hasil wawancara dengan Drs. Rivai Nasution, MM. SAAT. Kabag Hubungan kerjasama Setda Kota Medan (*ibid*). Pemko Medan cukup aktif mengikuti pameran &

perlombaan seperti pergelaran Budaya Melayu Serumpun di kota-kota Asia Tenggara. Medan juga punya potensi menggelar Pariwisata Kuliner sebagai instrumen gastro diplomasi. Tahun ini, 2019 bulan September Gema Melayu Serumpun (Gemes) akan diikuti peserta dari negara serumpun seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Singapura dan negara yang bukan etnis Melayu juga diundang untuk memeriahkan acara Gema Melayu Serumpun demi mempererat hubungan kerja sama Sister City yang sudah lama terjalin.

Rostov on Don jika dikaji secara kebudayaan dan potensi pariwisata merupakan pintu gerbang ke wilayah Kaukasus Utara, tempat bersejarah bagi budaya Cossack dan pemberontakan petani. Saat ini, ini adalah kota Rusia selatan terbesar dan paling kosmopolitan. Mengalir melalui kota adalah Sungai Don, tengara geografis dan budaya. Yang paling terkenal, sungai ini dirayakan dalam novel-novel Perang Sipil Rusia karya Mikhail Sholokhov, Dan Aliran Tenang Sang Don dan Aliran Donat Rumah ke Laut. kota yang menyenangkan dengan taman hijau dan alun-alun yang monumental. Membuat perjalanan ke pantai Laut Hitam dan beberapa perjalanan yang menarik di daerah tersebut. (Planet 2019).

Potensi Industri, Teknologi & Investasi

Dari hasil wawancara dengan Drs. Rivai Nasution, MM. SAAT. Kabag Hubungan Kerja Sama Setda Kota Medan, Kota Medan mempunyai Komplek Industri tersendiri Areal Kawasan Industri Medan (Tahap I), dengan luas + 200 Ha, terletak disebelah barat jalan tol, dan areal di sebelah timur jalan tol disebut dnegan Kawasan Industri Medan (Tahap II) dengan luas + 325 H (Sekretariat 2019) begitu juga dengan Rostov on Don. Di masa akan datang Pemko Medan mempunyai program kereta api di dalam kota dan ini peluang studi banding akan informasi penerapan teknologi. Rostov on Don memang berperan penting dalam proyek investasi Transportasi Publik di Rusia, yang mana diusulkan oleh Bank Internasional Rekonstruksi dan Pembangunan. Rostov adalah di antara 15 Kota Rusia yang diberikan oleh kredit investasi untuk realisasi program stabilisasi transportasi umum Kota. Transportasi kota bersama dengan perusahaan transportasi swasta membantu menyelesaikan masalah transportasi kota.

Kota Medan dan Sumatera Utara sebagai gudang herbal harapannya dengan kerjasam sister ini para investor dari Rusia juga bisa berinvestasi industri herbal di Medan. Rostov On Don adalah pusat politik, ekonomi, dan budaya Rusia selatan, yang memiliki potensi industri, perbankan, komersial, dan ilmiah yang signifikan. Menurut data 2007, kota ini mencapai peningkatan produksi industri terbesar - 45,8% di antara kota-kota regional lainnya. Kemitraan ekonomi kemitraan bilateral antara pemerintah kota dan perusahaan kota terbukti efektif. Saat ini, proyek kolaborasi percontohan sedang dalam proses dalam kelompok perusahaan, termasuk "Horizont", PC, Pabrik Anggur Champaign, PC "RostovBumaga", Pabrik Bir, pabrik garmen, Pabrik Produk Susu, dan lain-lain. Duma Kotamadya memberikan manfaat pajak untuk pengenalan inovasi teknis pada PC "Don Tobacco" untuk mempertahankan perusahaan domestik

yang hampir tunggal di industri tembakau Rusia. Merek dagang kota adalah perusahaan berikut: "PC Rostcelmash", "PC Rostvertol", "Baltika-Don", PC, "Don Tobacco", "Yug Rusi" (*ibid*, Par. 4-6).

Kontribusi Pemko Medan terhadap kerjasama Siter City dengan Rostov on Don

Kesempatan untuk tukar menukar pengetahuan dan pengalaman pengelolaan pembangunan bidang-bidang yang dikerjasamakan. Mendorong tumbuhnya prakarsa dan peran aktif pemerintah kota, masyarakat dan swasta. Mempererat persahabatan pemerintah dan masyarakat kedua belah pihak. Serta Kesempatan untuk tukar menukar kebudayaan dalam rangka memperkaya kebudayaan daerah (Oetom 2017).

Harus disadari bahwa prinsip kerjasama antar daerah kota harus didasarkan pada beberapa prinsip seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah tersebut ialah kerjasama daerah dilakukan dengan prinsip: a. efisiensi; b. efektivitas; c. sinergi; d. saling menguntungkan; e. kesepakatan bersama; f. itikad baik; g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; h. persamaan kedudukan; i. transparansi; j. keadilan; dan k. kepastian hukum.

Kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah merupakan sebuah penanda perubahan, yakni dari pola pengolahan pemda yang inward looking menjadi berorientasi pada outward looking. Hubungan internasional yang dewasa ini terjadi di fora internasional, memungkinkan setiap aktor untuk memaksimalkan hasil (*outcome*) dalam berhubungan dengan pihak asing, baik yang berupa keuntungan non ekonomi (*benefit*), maupun yang bersifat ekonomi (*profit*). Sebagai penyelenggara pemerintahan, pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan tidakbisa lepas dari prinsip evaluasi kinerja yakni '*input*', '*output*' dan '*outcome*' serta prinsip '*money follows function*'. Kerjasama dapat diidentifikasi produktif memiliki 2 karakteristik (*Ibid*), yakni:

1. Kerjasama dengan propinsi-propinsi asing yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi (kaya).
2. Kerjasama dengan Foundation atau dengan institusi asing non profit yang punya banyak proyek sosial terhadap negara ke tiga.
3. Perlu penataan kelembagaan dan penyiapan SDM secara serius agar para pejabat yang menangani ini memiliki kemampuan operasional dan konseptual profesional sehingga mempunyai kesetaraan kecakapan birokrat dengan pihak asing

Secara pilihan rasional keuntungan secara ekonomi menjadi prioritas Pemko Medan dengan berkaca banyaknya kerjasama sister city yang telah dilakukan. Pemko Medan menginginkan pihak yang diajak kerjasama bisa berinvestasi di Kota Medan dengan *Money follow function* dapat diterapkan, secara umum provinsi sumatera utara dan

khusus Kota Medan merupakan gudang herbal, harapannya pemerintah kota Rostov on Don bisa memahami akan pentingnya kerja sama dalam bidang investasi ekonomi & teknologi.

“The Rostov Region has significant potential to attract investment due to a set of competitive advantages of the region such as favorable climatic conditions, a good geo-economic and geopolitical location, transportation infrastructure, a diversified economy and the availability of high-tech industries, considerable scientific potential, and Resources.” (Vasily Golubev; Governor of Rostov region).

Ini juga sejalan dengan pernyataan Gubernur Rostov tentang keterbukaan mereka dalam memahami iklim investasi di wilayah industri baik secara geo ekonomi mau pun geo politik. Daya tarik investasi yang tinggi adalah kunci untuk memberikan citra positif Wilayah Kota Medan & Rostov on Don, yang penggunaannya dapat secara signifikan meningkatkan aliran sumber daya keuangan eksternal ke dua wilayah tersebut.

Tantangan & Hambatan Pemko Medan

Untuk memulai sebuah kerja sama, pemerintah daerah haruslah melakukan langkah-langkah persiapan terlebih dahulu, yang antara lain meliputi; 1. Inventarisasi potensi daerah. 2. Penyusunan Country Profile. Berisi gambaran umum suatu daerah dan memuat beberapa sektor unggulan daerah yang siap dikerjasamakan. 3. Publikasi via Web, KJRI, & KEDUBES. 4. Identifikasi partners asing. Untuk menganalisis dan memilih partner Pemda dapat menggunakan tenaga ahli dari perguruan tinggi atau professional yang bisa obyektif pertimbangannya. 5. Memulai kontak-kontak via KJRI / KEDUBES RI atau Pihak Lain. 6. Meeting pejabat berwenang / negosiasi letter of intent (LoI). Berisi keinginan untuk melakukan kerja sama secara formal. 6. Perencanaan pemuatan MoU antara calon partner dengan Pemda. 7. Pembahasan dengan DPRD. Pembahasan Rencana Kerja Sama dan Draft MoU oleh DPRD sangat relatif prosesnya. 8. Penandatanganan MoU. 9. Tindak lanjut Tim Teknis atau *join Committee* membicarakan detail program kerjasama dan agenda pelaksanaannya. 10. Pelaksanaan program kerja sama. 11. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama (Mukti 2013).

Dari hasil wawancara peneliti Pemko Medan bisa menjalin komunikasi dengan pihak Rostov on Don diinisiasikan oleh KJRI Rusia. Secara teknis langkah-langkah yang dilakukan Pemko Medan sudah tepat. Secara Paradiplomasi, aktor di daerah yang menjadi eksekutor dalam melakukan diplomasi untuk menarik masuknya investasi asing di daerah sekaligus menjadi daerah kunjungan wisata. Hal ini bisa dilakukan dalam dua pola integrasi yakni paradiplomasi yang menggunakan *e diplomacy*. Pengelolaan modern ini akan sangat penting karena para pengunjung dari wisatawan internasional tentunya membutuhkan informasi awal terkait dengan lokasi wisata yang akan dikunjungi. Dengan demikian paradiplomasi atau Pemerintah Daerah bias

memanfaatkan moment ini untuk menjadikan media virtual atau e diplomasi dalam menjadikan pariwisata sebagai konsep ekonomi digital 4.0 (*Ibid* Hal. 8). Penggunaan Paradiplomasi di suatu negara dapat menimbulkan dua efek, mendukung atau melemahkan. Paradiplomasi terkadang bisa semakin menguatkan dan melengkapi diplomasi yang dilakukan oleh negara pusat namun bisa juga menimbulkan konflik apabila bertentangan dengan diplomasi yang dilakukan oleh negara pusat.

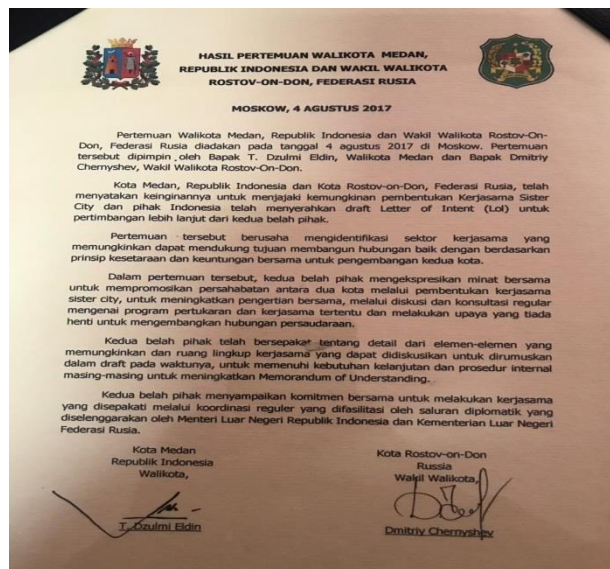
Kerjasama *Sister City* ini juga menimbulkan beberapa faktor negatif, diantaranya, sering menjadi beban keuangan negara atau daerah, sering menunggu fasilitasi dari pemerintah, muncul ketidaksetaraan, kerjasama kurang seimbang dari aspek modal dasar sehingga menguntungkan salah satu pihak. Harus disadari bahwa prinsip kerjasama antar daerah kota, adalah harus didasarkan pada beberapa prinsip yang telah dicantumkan dalam PP No. 50 Tahun 2007, pasal 2, yaitu: Efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.

Sementara itu, jika prinsip-prinsip kerjasama khusus yang dilakukan dengan pihak luar negeri, maka ditambahkan dan diatur dengan Peraturan Dalam Negeri No. 3 /2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri (pasal 2), sehingga prinsip tersebut tertuang dalam persamaan kedudukan, memberikan manfaat dan saling menguntungkan, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian, menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan keberlanjutan lingkungan, mendukung pengutamaan gender, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada umumnya, masalah yang dihadapi dalam pengembangan kerjasama Antar Kota maupun kegiatan Hubungan Luar Negeri antara lain: a. Kegiatan bersifat High Cost (biaya tinggi) karena kegiatan yang dilakukan senantiasa mengacu kepada Standart dan Protokol Internasional. b. Kecermatan mensikronkan/menselaraskan masing-masing kebijakan dari 2 (dua) atau lebih kebijakan Pemerintah Kota yang mempunyai kekhasan sesuai dengan nilai yang dianut dan budaya yang berkembang di Negara dan atau Kota masing-masing, belum sepenuhnya optimal. c. Kesulitan memprediksi teknis dan biaya kegiatan atau program yang akan dilakukan pada waktu tertentu (1 tahun ke depan), karena sangat tergantung dengan kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kota (kondisi aktual, faktual dan monumental). d. Hambatan komunikasi yang dilakukan yang bersifat komunikasi jarak jauh/antar negara (antar bahasa) melalui teknologi tinggi (Internet, E-Mail dan SLI), sehingga sangat mempengaruhi waktu kegiatan, perubahan jadwal, personal yang terlibat, acara protokoler dan termasuk yang sangat krusial adalah masalah biaya yang dibutuhkan dimana sering menjelang waktu atau menit-menit terakhir, item dan point kegiatan dapat berubah dan berkembang sedemikian rupa yang berkonsekwensi sangat luas (*Ibid*). Selain itu juga telah dilakukan penjajakan kerjasama dengan kota-kota lainnya di Luar Negeri,

termasuk peninjauan bantuan Luar Negeri dari Lembaga-lembaga Internasional, baik yang berkaitan secara langsung dengan Kota Bersaudara maupun di luar Kota Bersaudara.

Gambar 1: Draf hasil pertemuan Pemko Medan & Wali Kota Rostov on Don Di Rusia



Lemahnya keberhasilan kerjasama *sister city* di Indonesia disebabkan karena dua hal, yakni tidak lengkapnya materi MoU kerjasama dan tidak efektifnya pelaksanaan kerjasama *sister city*. Dalam kerjasama yang bersifat teknis seperti riset maupun proyek, kesepakatan kerjasama ditulis dalam bentuk MoU yang lebih teknis, kesepakatan kerjasama ditulis dalam bentuk MoU yang lebih teknis, berisi pembagian tugas dan tanggung jawab, pembagian dana, masa berlangsungnya kegiatan, dan hal-hal lain yang ditujukan agar pengerjaan kegiatan menjadi jelas (Rochman & Hudalah, 2014: 08). Yang dirugikan dari lamanya pelaksanaan program dari kerjasama *sister city* juga berdampak pada lamanya daerah tersebut untuk berkembang dan menambahnya beban keuangan daerah atau negara. Tidak dihasilkannya satu pelaksanaan dari program kerjasama hanya menghabiskan anggaran keuangan daerah. Anggaran keuangan daerah yang dialokasikan untuk pelaksanaan kerjasama *sister city* akhirnya habis hanya untuk akomodasi ke luar negeri pihak-pihak yang didelegasikan dalam kerjasama tersebut (*Ibid*). Kemungkinan di pusat mau pun kota Medan secara manajemen paradiplomasi juga cukup ruwet apalagi hasil temuan peneliti asosiasi yang biasa menangani masalah *sister city* Kota Medan belum aktif sehingga ini juga berpengaruh.

Selain itu secara geografis kota Medan & Rostov on Don cukup jauh, ini sudah tentu menjadi kendala. Oleh sebab itu, penggunaan Paradiplomasi di suatu negara dapat menimbulkan dua efek, mendukung atau melemahkan. Paradiplomasi terkadang bisa semakin menguatkan dan melengkapi diplomasi yang dilakukan oleh negara pusat

namun bisa juga menimbulkan konflik apabila bertentangan dengan diplomasi yang dilakukan oleh negara pusat (Fathun, *Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus*, 2016) (Mukti, 2008). Untuk melanjutkan ke jenjang MoU Pemko Medan harus melengkapi segala bentuk materi MoU dan memahami teknis pelaksanaan program yang telah disepakati.

Penutup

Kerjasama Sister City dijalin untuk meningkatkan pengertian bersama melalui diskusi dan konsultasi reguler mengenai program pertukaran dan kerjasama tertentu serta melakukan upaya untuk mengembangkan hubungan persaudaraan. Dari hasil penelusuran peneliti, Pergerakan Pemko Medan secara teoritis sudah cukup baik sesuai dengan regulasi yang ada. Tapi butuh penegasan dan pemahaman bahwa dalam kerjasama ini berpotensi memiliki kontribusi dan hambatan, baik secara *paradiplomacy* yaitu ketidakefektifan manajemen baik pusat & daerah, atau pun *rational choice* yakni keterlibatan pimpinan kota Medan sebagai bentuk dorongan kontribusi kesuksesan kerjasama *sister city* ini. Oleh sebab itu, potensi-potensi kersasama budaya, ekonomi kreatif, investasi, perdagangan, dan pendidikan merupakan instrumen penting dalam kerjasama ini. Hal terpenting adalah dalam dua pola intergrasi yakni paradiplomasi yang menggunakan *e diplomacy*. Pengelolaan modern ini akan sangat penting karena ini merupakan konsep era digital 4.0. Sehingga kesuksesan komunikasi dan kerjasama bisa berlanjut dan saling menguntungkan.

Penghargaan

- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang mendanai penelitian ini.
- Universitas Potensi Utama yang memberi dukungan.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Potensi Utama yang membimbing dan memberikan arahan.

Bibliografi

Buku

Ali Mukti, Takdir. 2013. *Paradiplomacy Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemda di Indonesia*. Yogyakarta: The Phinisi Press. 66-92.

Suryokusumo, Sumaryo. 2004. *Praktik Diplomasi*, STIH IBLAM : Jakarta

Aldecoa, Francisco dan Keating, Michael. 1999. *Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of Subnational Governments*.

Jurnal /Dokumen

Arsyaddan, Armin & Masrie, Aspiannor. 2010. *Jurnal, Hubungan Luar Negeri Dalam Kerangka Otonomi Daerah (Studi Kasus: Provinsi Sulawesi Selatan)*,

- Makassar: Jurusan Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanudin,
- BPS Kota Meda dari tulisan thesis: Stivani Ismawira Sinambela. 2014. *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerjasama Internasional* (Studi Kasus: Kerjasama Sister City Pemerintah Kota Medan dengan Penang). 33.
- Edzgar, Renata & Manullang, Yosephine. 2014. *Urgensi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Sister City Di Indonesia*. 03.
- Muhammad, Fathun Laode. 2012. “*Peluang dan Tantangan Ediplomacy dalam menarik investasi asing di Kota Makassar*”, Universitas Hasanuddin, Makassar. 1-4.
- Fathun, 2018. “*Pariwisata Di Era Ekonomi Digital*” Sebuah Implementasi Pilar Kebijakan Poros Maritim Di Era Jokowi Dalam Konteks Paradiplomacy. JDEP Vol. 1 No. 2. 58.
- Ali Mukti, Takdir. 2019. *Paradiplomacy Management and Local Political Movement in Aceh, Indonesia, and Catalonia, Spain*. European Journal of East Asian Studies 18. 227-230.
- Oetom, Andi. *Pengelolaan Perkotaan Lewat Skema Sister City. (Kelompok Keahlian Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Kebijakan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung)*. 2.
- Ismawira Sinambela, Stivani. 2014. *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerjasama Internasional* (Studi Kasus: Kerjasama Sister City Pemerintah Kota Medan dengan Penang).
- Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Medan. LKPJ Tahun 2006.
- Artikel/Internet*
- Admin, 2017. *Enam Puluh Tahun Tahun RI – Rusia Hubungan Indonesia-Rusia Terus Menanjak*. Par. 2-3.
<http://www.tabloiddiplomasi.org/index.php/2017/03/26/60-tahun-ri-rusia-hubungan-indonesia-rusia-terus-menanjak/>
- Golubev, Vasily. *Governor of Rostov region*. investinregions.ru/en/regions/rostov/.
- Pencawan, Yoseph. 2017. *Medan Akan Jalin Kerjasama Kota Kembar Dengan Rusia*. Par. 5-7. <http://sumatra.bisnis.com/read/20170820/51/67396/medan-akan-jalin-kerja-sama-kota-kembar-dengan-rusia>
- Prameswara, Agni. 2014. *Sister City Peluang Emas Bagi Pembangunan Di Daerah*. Par. 1-6.
http://www.bangda.kemendagri.go.id/bangda/berita/baca_kontent/38/sister_city_peluang_emas_bagi_pembangunan_di_daerah.
- Faizal, 2018. *Apa Itu Sister City Baca Penejelasannya*. Par. 4-7.
<http://www.sharingid.com/apa-itu-sister-city-baca-penejelasannya/> &
<http://sistercities.org/>

- Muhammad Fathun, Laode. 2012, "Peluang dan Tantangan Ediplomacy dalam menarik investasi asing di Kota Makassar", Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Adminmh, 2017. *Malam Kesenian "semalam di Rusia" jembatani Pemko Medan & Konsulat Rusia*. Par. 1-2. <http://medanheadlines.com/2017/05/14/malam-kesenian-semalam-di-rusia-jembatani-pemko-medan-dan-konsulat-rusia/>
- Dinas Kominfo Kota Medan, 2019. Par 1-4. <https://pemkomedan.go.id/artikel-18778-dekranasda-kota-medan-kembali-ikuti-dan-meriakan-inacraft-2019.html>
- Juraidi, 2017. *Batik Medan Sudah Sampai Rusia*. Par. 4-5. <https://sumut.antaranews.com/berita/167922/batik-medan-sudah-sampai-rusia#>.
- Dinas Kominfo Kota Medan. 2018. *Wali Kota Lepas Peserta Program Pertukaran Pelajar Ke Ichikawa*. Par. 03. <https://pemkomedan.go.id/artikel-17818-wali-kota-lepas-peserta-program-pertukaran-pelajar-ke-ichikawa.html>.
- KR. 2019. *Pelajar Kota Ichikawa Magang di Sejumlah Sekolah Kota Medan*. Par. 1-3. <https://medan.tribunnews.com/2019/08/15/pelajar-kota-ichikawa-magang-di-sejumlah-sekolah-kota-medan>
- Ministry of Economic Development of Rostov region, 2008. *City Administration*. 346007, city of Rostov-On-Don, Bolshaya Sadovaya st., 4. Par. 4-6. https://dontourism.ru/en/city_view.aspx?id=91
- Planet, lonely, 2019. Par. 1-2. *Welcome to Rostov-on-Don* <https://www.lonelyplanet.com/russia/russian-caucasus/rostov-on-don>
- Ant. 2015. *Jamu Produk Tembus Malaysia-Singapura*. <https://www.wartaekonomi.co.id/read48087/jamu-produk-sumut-tembus-malaysiasingapura.html>
- Luar Biasa Jumlah Turis Rusia Ke Indonesia Kalahkan Negara Eropa Lain, 2019. Par1-5. <https://www.tribunnews.com/travel/2019/02/04/luar-biasa-jumlah-turis-rusia-ke-indonesia-kalahkan-negara-eropa-lain>
- Sejarah Singkat, 2019. Par 1-4. <http://www.kim.co.id/new/tentang-kami/sejarah-singkat/>

Internalisasi Regim Pembangunan Berkelanjutan Melalui Kebijakan Green Industry Era Pemerintahan Joko Widodo

Asep Saepudin¹, Sri Muryantini², Herra Dwi Magfiroh³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.

Corresponding email: sri.muryantini@upnyk.ac.id

Abstrak



One of the global issues that is the focus of discussion both in discussing international relations theory and in the praxis of international relations is environmental issues. The development of this issue as a result of the birth of the international regime on sustainable development, whose core value contains three main aspects of development, namely economic growth, environmental protection, and protection of humans. One of the pillars in supporting the development of a nation is the industrial sector. This sector when associated with environmental problems becomes one of the sources that contribute to environmental problems. Because of the development of industries that are oriented to environmental protection or in its development known as the green industry. Become a choice for all countries in developing their industrial sector.

This paper describes how the Indonesian government responded in internalizing green industry values in its industrial development as well as various problems and obstacles encountered in applying the meaning and principles of green industry.

Kata Kunci

Green industry, sustainable development regime, internalization, Indonesia, Jokowi

Pendahuluan

Pertemuan antar negara telah dimulai sejak tahun 2014 membicarakan mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs). Di tahun 2014, Kelompok Kerja Terbuka/*Open Working Group* (OWG) dari Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mulai memformulasikan tujuan indikatif dari SDGs. Forum ini menjadi ajang diskusi dan negosiasi perwakilan negara anggota dalam menentukan tujuan dan target pembangunan paska 2015 dengan mempertimbangkan *Millennium Development Goals* (MDG) sebagai pijakan. Tujuh belas (17) Tujuan indikatif dan 169 Target indikatif dihasilkan dari forum ini untuk mendapatkan persetujuan dari negara anggota pada Sidang Umum PBB pada bulan

September 2015.¹ SDGs merupakan bentuk komitmen bagi seluruh Negara di dunia untuk bersama-sama melakukan pembangunan yang merata dan berkelanjutan bagi kemaslahatan bumi. Indonesia juga melakukan ratifikasi dan mengimplementasikan SDGs dengan pembentukan lembaga dan penerapan pada kebijakan jangka panjang dan pendek oleh pemerintah (UNDP Report, “*Report Indicators and Data Mapping to Measure Sustainable Development Goals (SDGs) Target*”).

Salah satu yang menjadi sorotan bagi negara – negara di dunia dan juga tengah menjadi fokus Indonesia yaitu implementasi mengenai *Green Industry*. *Green Industry* merupakan salah satu bagian dari implementasi SDGs. Ada pun poin – poin yang berhubungan mengenai implementasi *Green Industry* ini adalah SDGs nomor 7, menjamin akses energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan dan modern untuk semua. Dan nomor 9, membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.

Menurut *United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO) konsep *green industry* ialah meletakkan pembangunan industri yang berkelanjutan dalam konteks tantangan global yang menuntut pembangunan berkelanjutan. Sehingga tidak dapat dipungkiri, konsep *green industry* sangat dekat dengan rejim SDGs (UNIDO, 2011).

Pembahasan mengenai lingkungan global, perubahan iklim, gas emisi terus menjadi pembahasan utama dalam forum internasional. Sebut saja *Protocol Kyoto*, *Paris Agreement*, *KTT Rio De Jenairo*, dan lain sebagainya. Dimana perlindungan lingkungan global merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dunia. Indonesia sebagai negara berkembang yang mulai merintis pembangunan industrinya juga mendapat dorongan untuk segera bertransformasi. Dengan penggunaan teknologi dan inovasi yang mampu meminimalisir kerusakan dan menjaga lingkungan. Terlebih lagi Indonesia merupakan negara tropis dan memiliki wilayah hutan yang luas (di Kalimantan dan Papua) sebagai paru – paru dunia, menjadi sebuah kewajiban bagi Indonesia dalam menjaga lingkungan.

Di sisi lain, peran negara dan kemampuan negara dalam berkontribusi mewujudkan penyelamatan lingkungan global juga berbeda – beda. Hal ini menjadi ironi dikarenakan kesiapan dari faktor dalam negeri yang belum mumpuni, seperti teknologi dan inovasi, serta ketersediaan sumber daya manusia, hingga dukungan kebijakan dan finansial. Adanya ketimpangan hal ini, menyebabkan Indonesia dituntut untuk melakukan kerjasama internasional yang lebih masif, baik dalam bentuk finansial seperti *foreign direct investment*, alih teknologi, peningkatan riset dan pendidikan, dan sebagainya.

¹ Tujuh belas (17) Tujuan indikatif dan 169 Target indikatif, adalah: poin – poin yang dibentuk dalam siding PBB yang menjadi indicator pencapaian Tujuan Berkelanjutan PBB yang dapat digunakan sebagai tolak ukur bagi negara – negara di dunia.

Selain itu, negara berkembang mengalami dilemma yang lebih sulit, dikarenakan tuntutan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang masif untuk menyokong kesejahteraan secara merata. Sehingga menyebabkan negara berkembang mengalami dilema antara *green growth* dan *economic growth*, menjadi tidak mudah dalam melakukan internalisasi prinsip – prinsip *green industry*.² Berdasarkan hal tersebut tulisan ini akan mendeskripsikan internalisasi prinsip – prinsip atau nilai – nilai *green industry* dilihat dari aspek potensi dan masalahnya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi. Data-data tersebut terlebih dahulu diolah dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran tentang green industry di Indonesia. Studi kepustakaan (*library research*) digunakan sebagai teknik pengumpulan data sebagai bahan penulisan dengan mencari melalui buku–buku terkait, jurnal, atau internet (Lexy J. Moleong, 2005).

Review Literatur/Tinjauan Pustaka

Rejim Pembangunan Berkelanjutan

Berakhirnya MDGs pada 2015 masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada periode Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang akan dilaksanakan sampai dengan 2030. Tujuan MDGs yang telah dilaksanakan selama periode 2000-2015 memang telah membawa berbagai kemajuan. Sekitar 70 persen dari total indikator yang mengukur target MDGs telah berhasil dicapai oleh Indonesia. Akan tetapi, beberapa indikator yang mengukur target di bidang kesehatan masih cukup jauh dari capaian dan harus mendapatkan perhatian khusus. Target yang belum tercapai di antaranya adalah tingkat kemiskinan nasional, angka kematian bayi, angka kematian ibu, prevalensi gizi buruk, prevalensi HIV dan AIDS serta beberapa indikator terkait lingkungan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menyepakati penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan SDGs melalui berbagai kegiatan dan telah mengambil langkah-langkah strategis.

² Yang dimaksud dengan *green growth* adalah pembangunan ditandai dengan perkembangan secara kualitatif dan berkelanjutan dengan didukung oleh banyak input namun diharapkan akan menghasilkan output yang lebih beragam, pertumbuhan yang tidak hanya mengenai nilai ekonomisnya namun nilai berkelanjutan lainnya seperti sektor lingkungan, dapat dilihat pada Buku *Green Economy: Concept, Agendas and Challenges*, tulisan Alin Halimatussadiyah tahun 2014. Dan *economic growth* adalah sebuah instrumen untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup di negara berkembang, berdasarkan penelitian dan studi kasus menunjukkan bahwa kecepatan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi mempercepat Millennium Development Goals, dengan mengukur proporsitas tingkat standar hidup global kurang dari 1 dolar per hari, lihat pada www.oecd.org.

Sejumlah langkah yang telah ditempuh Indonesia sampai dengan akhir 2016 antara lain (Katalog BPS, 2019):

- (i) melakukan pemetaan antara tujuan dan target SDGs dengan prioritas pembangunan nasional,
- (ii) melakukan pemetaan ketersediaan data dan indikator SDGs pada setiap target dan tujuan termasuk indikator proksi,
- (iii) melakukan penyusunan definisi operasional untuk setiap indikator SDGs,
- (iv) menyusun peraturan presiden terkait dengan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan
- (v) mempersiapkan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah terkait dengan implementasi SDGs di Indonesia.

Untuk menjamin implementasi SDGs berjalan dengan baik, pemerintah telah membentuk Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sekretariat Nasional SDGs bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan terkait pelaksanaan SDGs di Indonesia. Sejumlah pemangku kepentingan yang mencakup kementerian/lembaga, BPS, akademisi, pakar, dan organisasi masyarakat sipil dan filantropi & bisnis telah dilibatkan dalam berbagai proses persiapan pelaksanaan SDGs di Indonesia.

Dalam implementasinya, ada beberapa prinsip yang telah disepakati juga diadopsi oleh Indonesia (*Ibid*). Prinsip pertama adalah *universality*. Prinsip ini mendorong penerapan SDGs di semua negara baik negara maju maupun negara berkembang. Dalam konteks nasional, implementasi SDGs diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Prinsip kedua adalah *integration*. Prinsip ini mengandung makna bahwa SDGs dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Prinsip kedua ini telah dipegang teguh dalam penyusunan rencana aksi khususnya terkait dengan penyusunan program dan kegiatan serta penganggarannya. Prinsip terakhir adalah “*No One Left Behind*” yang menjamin bahwa pelaksanaan SDGs harus memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan dan pelaksanaannya melibatkan semua pemangku kepentingan. Prinsip ini juga telah diterapkan dalam setiap tahapan/proses pelaksanaan SDGs di Indonesia.

Green Industry

Green industry berarti pencapaian peningkatan ekonomi dengan cara – cara yang lebih berkelanjutan. Cara – cara yang dapat diimplementasikan antara lain melalui investasi publik yang hijau, dan mengimplementasikan kebijakan publik yang mendorong investasi privat lebih ramah terhadap lingkungan. Sedangkan dalam *green industry* dikenal pula sebuah konsep yaitu menghijaukan industri, yaitu metode dalam mencapai peningkatan ekonomi berkelanjutan dan mempromosikan perekonomian

yang berkelanjutan pula. Adapun indikator yang dapat dilakukan dalam implementasi *green industry* ini antara lain:

- *Resources Efficient and Cleaner Production (RECP)*, yaitu mengelola material, energi, air, limbah dan emisi gas dengan asas bisnis yang baik. Yaitu dengan management strategis dengan meningkatkan produksi yang ramah lingkungan, dan meminimalisir pembuangan limbah dan emisi.
- *Cleaner Production (CP)*, yaitu mengakselerasi strategi dalam proses, produk, dan servis untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan resiko kepada manusia dan lingkungan. Adapun yang didorong dalam pendekatan ini adalah a) Produksi yang efisien: mengoptimalkan produksi yang ramah lingkungan. b) Manajemen lingkungan: yaitu meminimalisasi dampak buruk terhadap lingkungan dengan mengurangi limbah dan emisi. c) Perkembangan manusia: yaitu meminimalisasi resiko dan mendukung perkembangan manusia dan komunitas.

Green industry ini dibahas secara lebih mendalam dalam berbagai konvensi internasional salah satunya tertuang dalam *The Stockholm Convention and Persistent Organic Pollutants (POPs)* dan *the Montreal Protocol (MP)*. Di dalam kedua rezim ini dibahas mengenai pengaturan dalam penggunaan manajemen kimia, air, dan energi. Serta pentingnya CSR (*corporate social responsibility*) dalam mendukung implementasi *green industry*. *Green industry* merupakan konsep nyata dalam implementasi SDGs yang berhubungan dengan berbagai poin penting yang terkandung dalam SDGs seperti pada SDGs nomor 7 dan 9.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Green Industry Indonesia

Era sebelum Presiden Joko Widodo

Dasar-dasar kebijakan Green Industri Indonesia telah ada sebelum era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini ditandai dengan terbitnya Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Undang-undang ini memberikan gambaran dan arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan Industri Hijau (*Green Industry*) (JDIH Kemenperin, “UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian).

Beberapa dasar-dasar kebijakan penting yang terkait dengan Industri Hijau, khususnya dalam mewujudkan industri hijau yang merujuk pada Undang-Undang tersebut adalah: Perumusan Kebijakan; Penguatan Kapasitas Kelembagaan; Standardisasi; dan Pemberian Fasilitas.

Penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan dengan peningkatan kemampuan dalam hal penelitian dan pengembangan, pengujian, sertifikasi, dan promosi. Penguatan kapasitas kelembagaan dilaksanakan oleh Menteri Perindustrian yang berkoordinasi dengan menteri terkait, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan

Pemerintah Daerah, serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.

Dalam melakukan Standardisasi Menteri menyusun dan menetapkan standar Industri Hijau. Standar Industri Hijau paling sedikit memuat: bahan baku, bahan penolong, dan energi; proses produksi; produk; manajemen perusahaan; dan pengelolaan limbah.

Dalam penyusunan Standar Industri Hijau, dilakukan dengan cara: memperhatikan sistem Standardisasi nasional dan/atau sistem standar lain yang berlaku; dan berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, bidang riset dan teknologi, bidang standardisasi, serta berkoordinasi dengan asosiasi Industri, perusahaan industri, dan lembaga terkait.

Standar Industri Hijau yang telah ditetapkan oleh Menteri tersebut menjadi pedoman bagi Perusahaan Industri. Dalam penerapan standar Industri Hijau pemberlakuan wajib bagi Industri dilakukan secara bertahap. Pemberlakuan tersebut ditetapkan oleh Menteri. Oleh karenanya semua perusahaan wajib memenuhi standar Industri hijau tersebut. Apabila ada perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan standar Industri Hijau dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; denda administratif; penutupan sementara; pembekuan izin usaha Industri; dan/atau pencabutan izin usaha Industri.

Sedangkan bagi Perusahaan Industri yang telah memenuhi Standar Industri Hijau diberikan Sertifikat Industri Hijau. Sertifikasi Industri Hijau dilakukan oleh lembaga sertifikasi Industri Hijau yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri. Namun apabila belum terdapat lembaga sertifikasi Industri Hijau yang terakreditasi, Menteri dapat membentuk lembaga sertifikasi Industri Hijau. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh sertifikat Industri Hijau diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian. Untuk mewujudkan Industri Hijau, Perusahaan Industri secara bertahap perlu melakukan beberapa hal, yaitu: membangun komitmen bersama dan menyusun kebijakan perusahaan untuk pembangunan Industri Hijau; menerapkan kebijakan pembangunan Industri Hijau; menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan; dan mengembangkan jaringan bisnis dalam rangka memperoleh bahan baku, bahan penolong, dan teknologi ramah lingkungan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Hijau dan tata cara pengenaan sanksi administratif serta besaran denda administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015 – 2035 (JDIH Kemenperin, “*Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035*”). PP ini selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan

perindustrian, yaitu: mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri; mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau; mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

RIPIN 2015-2035 disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki karakteristik dan relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri nasional. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah: Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan, pembangunan industri hijau (*green industry*) perlu lebih diprioritaskan, antara lain melalui regulasi *eco product*, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta bahan-bahan yang tidak berbahaya.

Kerangka Pikir Bangun Industri Nasional tahun 2035 mencakup: Modal Dasar, yaitu faktor sumber daya yang digunakan dalam kegiatan industri untuk menghasilkan barang dan jasa serta dalam penciptaan nilai tambah atau manfaat yang tinggi. Modal dasar yang diperlukan dan digunakan dalam kegiatan industri adalah: sumber daya alam yang diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sebagai bahan baku maupun sumber energi bagi kegiatan industri; sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kerja (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang sesuai di bidang industri; dan pengembangan, penguasaan, dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas serta inovasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian sektor industri nasional.

Era Presiden Joko Widodo

Di era pemerintahan Jokowi, telah diterbitkan berbagai peraturan perundangan yang mendukung perwujudan Industri Hijau, diantaranya adalah PP RI Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015 – 2019 (JDIH Kemenperin, “*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015 – 2019*”); Peraturan Menteri Perindustrian RI (Permenperin) Nomor 39 tahun 2018 tentang tata cara sertifikasi industri hijau.

Dalam PP RI Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri, telah menggambarkan Industri Hijau. Beberapa hal penting dalam kebijakan ini adalah: Standardisasi Industri Hijau, fasilitasi industri hijau, dan Penggunaan Produk Industri Hijau. Standardisasi Industri Hijau terdiri dari Standardisasi Industri Hijau dan Sertifikasi Industri Hijau. Standar Industri Hijau paling sedikit memuat ketentuan

mengenai: bahan baku, bahan penolong, dan energi; proses produksi; produk; manajemen perusahaan; pengelolaan limbah.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada Perusahaan Industri yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan Industri Hijau. Fasilitas berupa fasilitas fiskal dan fasilitas non fiskal. Fasilitas fiskal diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk fasilitas non-fiskal dapat berupa: Pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia industri dalam penerapan industri hijau; pelimpahan hak produksi atas suatu teknologi yang lisensi patennya telah dipegang oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; Pembinaan keamanan dan/atau pengamanan kegiatan operasional sektor industri guna keberlangsungan atau kelancaran kegiatan logistik dan/atau produksi bagi perusahaan industri guna keberlangsungan atau kelancaran kegiatan logistik dan/atau produksi bagi perusahaan industri yang merupakan obyek vital nasional dan memiliki Sertifikat Industri Hijau dan/atau; Penyediaan bantuan promosi hasil produksi. Terkait dengan penggunaan Produk Industri Hijau, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memprioritaskan penggunaan produk yang memiliki Sertifikasi Industri Hijau.

Kebijakan lainnya di era Jokowi adalah terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015 – 2019. Pada peraturan ini telah ditetapkan Fokus Pengembangan Industri. Kebijakan pengembangan industri nasional merupakan bagian kebijakan perindustrian yang diamanatkan dalam RIPIN 2015 – 2035 dan RPJMN 2015-2019. Prinsip kebijakan pengembangan industri harus mendorong pertumbuhan industri serta peningkatan daya saing industri nasional. Kebijakan pembangunan industri nasional difokuskan pada:

1. Peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral, serta migas dan batubara dalam rangka pendalaman struktur industri melalui penguatan rantai nilai industri dan pembangunan industri hulu yang diintegrasikan dengan industri antara dan industri hilirnya.
2. Peningkatan kapabilitas industri melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan penguasaan teknologi.
3. Pembangunan industri di seluruh wilayah Indonesia melalui pembangunan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI), kawasan peruntukan industri (KPI), kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah (sentra IKM).

Dalam peraturan ini juga telah ditetapkan tahapan capaian pembangunan industri, yaitu:

Pengembangan Sumber Daya Industri

Sumber daya industri mencakup sumber daya manusia (SDM) industri, sumber daya alam (SDA), teknologi, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan.

- a. Pembangunan sumber daya manusia industri. Pembangunan SDM Industri dilakukan melalui pembangunan infrastruktur ketenagakerjaan berbasis kompetensi, peningkatan kompetensi SDM industri, peningkatan produktivitas SDM Industri.
- b. Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran SDA. Pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran SDA dilakukan melalui pemetaan potensi dan kebutuhan SDA, penyusunan ketentuan peraturan perundang – undangan yang menjamin kepastian pasokan bahan baku untuk industri dalam negeri secara berkelanjutan, pengembangan kemitraan antara industri dengan produsen bahan baku dan pemabangunan industri berbasis SDA.
- c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dilakukan melalui penguatan infrastruktur penelitian dan pengembangan, penigkatan adopsi dan alih teknologi, serta pemanfaatan teknoologi industri dalam negeri.
- d. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dilakukan melalui penyediaan ruang, wilayah, dan infrastruktur bagi pengembangan kreativitas dan inovasi, pengembangan sentra industri kreatif, pelatihan teknologi dan desain, fasilitas perlindungan hak ekakayaan intelektual, dan promosi atau pemasaran produk industri kreatif.
- e. Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri. Penyediaan sumber pembiayaan yang kompetitif bagi industri dilakukan antara lain melalui pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan industri.

Pemberdayaan Industri mencakup pengembangan industri hijau, pembangunan industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), kerjasama internasional serta pengamanan dan penyelamatan industri.

Program yang dilakukan oleh Joko Widodo dalam berbagai kebijakan green industry adalah:

Industri Hijau

Pengembangan industri hijau dilakukan melalui penetapan standar industri hijau, pembangunan dan pengembangan lembaga sertifikasi industri hijau, peningkatan kompetensi auditor industri hijau, dan pemerian insentif untuk industri hijau. Pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran SDA mencakup pemetaan potensi dan kebutuhan SDA, serta penyusunan peraturan perundang-undangan dengan tujuan menjamin penyediaan dan penyaluran SDA untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi, dan air baku bagi industri nasional.

Mendorong kemajuan industri nasional dan mendukung peningkatan teknologi industri periode 2017-2019 difokuskan pada pemenuhan kebutuhan teknologi bagi pengembangan 10 industri prioritas sebagai berikut: Industri pangan; Industri farmasi, obat tradisional, kosmetik, dan alat kesehatan; Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan

aneka; Industri alat transportasi; Industri elektronika dan telematika; Industri pembangkit energi; Industri barang modal, komponen, dan bahan penolong; Industri hulu agro; Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; Industri kimia dasar.

Standarisasi Industri

Pengembangan standarisasi industri ditujukan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan atas penggunaan produk industri, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan industri hijau, dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

Diversifikasi dan penghematan penggunaan energi oleh sektor industri, meliputi:

- a. Penyediaan insentif bagi restrukturisasi mesin industri yang mendukung penghematan penggunaan energi.
- b. Fasilitas dan insentif bagi pengolahan limbah menjadi sumber energi.
- c. Fasilitas kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penggunaan energi baru dan terbarukan serta penghematan penggunaan energi di sektor industri.

Pemberdayaan Industri

Industri Hijau

Pengembangan industri hijau ditujukan untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pengembangan industri hijau dilakukan melalui penerapan standar industri hijau yang secara bertahap diterapkan secara wajib.

Pengembangan industri hijau diarahkan pada penyediaan infrastruktur kelembagaan sertifikasi industri hijau dan mendorong penerapan prinsip – prinsip industri hijau dalam produksi industri dengan sasaran pengembangan selama periode 2017 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan aturan, pedoman umum dan pedoman teknis berupa peraturan terkait konvensi Minamata; peraturan mengenai pengurangan penggunaan *persistent organic pollutants* (POPs); peraturan perundangan mengenai penghapusan bahan perusak ozon (BPO); peraturan pengendalian pencemaran, satu peraturan mengenai penyediaan kebutuhan air industri; dan pedoman teknis konservasi energi;
2. Penyediaan infrastruktur industri berupa penyusunan standar industri hijau; pengembangan dan penetapan lembaga sertifikasi industri hijau; dan pembentukan komite pengelola lembaga sertifikasi industri hijau;
3. Penyediaan SDM terkait industri hijau terdiri dari SDM kompeten di bidang system informasi dan monitoring gerakan rumah kaca, auditor industri hijau, dan manajer energi;

4. Mendorong penerapan prinsip industri hijau oleh industri melalui penyediaan informasi mengenai manfaat industri hijau; pemberian penghargaan dan penyelenggaraan pameran industri hijau.

Kebijakan dan Program Operasional

Kebijakan dan program operasional pengembangan industri hijau selama periode 2017-2019 adalah sebagai berikut:

1. Benchmarking standar industri hijau di negara lain.
2. Penetapan panduan umum penyusunan standar industri hijau.
3. Penyusunan, penetapan dan pemberlakuan standar industri hijau untuk kelompok – kelompok industri (mengacu kepada klasifikasi baku lapangan usaha).
4. Penetapan peraturan mengenai pengawasan atas pelaksanaan standar industri hijau yang bersifat wajib.
5. Kesepakatan pengakuan bersama mengenai standar industri hijau dengan negara lain.
6. Penyusunan pedoman umum pembentukan lembaga sertifikasi, standard operating procedure (SOP) sertifikasi, modul pelatihan dan standar kompetensi auditor industri hijau.
7. Penunjukan lembaga sertifikasi serta penetapan pedoman akreditasi dan pengawasan lembaga sertifikasi industri hijau.
8. Pelatihan auditor industri hijau.
9. Penyediaan insentif bagi industri hijau.

Kebijakan lain di era Jokowi adalah Peraturan Menteri Perindustrian RI (Permenperin) Nomor 39 tahun 2018 tentang tata cara sertifikasi industri hijau. Dalam peraturan ini mengatur mengenai sertifikat industri hijau, yaitu pengakuan yang diberikan oleh lembaga sertifikasi industri hijau untuk menyatakan bahwa perusahaan industri telah memenuhi SIH. Lembaga sertifikasi industri hijau yang selanjutnya disingkat LSIH adalah lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan sertifikasi industri hijau.

Perusahaan Industri yang telah memiliki Sertifikasi Industri Hijau dapat mencantumkan Logo Industri Hijau. Logo Industri Hijau dapat dicantumkan pada: Kemasan produk, Label produk, Kop surat perusahaan, Kartu nama perusahaan, dan Media promosi perusahaan.

Pedoman Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman LSIH dalam melaksanakan sertifikasi industri hijau berdasarkan persyaratan

teknis atau standar industri hijau dan SNI ISO 17065 tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa.

Green Industry Era sebelum Jokowi

Pada Bulan September 2009 bersama 20 negara Asia lainnya, Indonesia juga menandatangani *Manila Declaration on Green Industry* di Filipina. Dalam deklarasi ini, Indonesia menyatakan tekad untuk menetapkan kebijakan, kerangka peraturan dan kelembagaan yang mendorong pergeseran ke arah industri yang efisien dan rendah karbon atau dikenal dengan istilah industri hijau (Greenlisting Indonesia, “Kebijakan Pengembangan Industri Hijau (Green Industry) Kementerian Perindustrian”).

Meskipun penandatanganan telah dilakukan dan komitmen ini dideklarasikan langsung, namun implementasi Green Industry di era sebelum pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, belum mendapatkan perhatian yang besar, dimana kementerian perindustrian masih memfokuskan perannya pada pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dan tidak ditemukannya laporan mengenai implementasi industri hijau di era pemerintahan ini. Ada pun UU Industri yang memuat industri hijau ini termuat dalam UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menggantikan UU No. 5 Tahun 1984 yang disahkan oleh DPR – RI pada sidang paripurna 19/12/2014. Dalam UU perindustrian ini memuat beberapa poin penting yang diantaranya adalah industri hijau. Dalam UU No. 3 Tahun 2014 ini dibahas mengenai industri hijau dari pasal 77 – 83.

Dalam pasal UU ini dibahas mengenai Perumusan kebijakan, Penguatan kapasitas kelembagaan, Standardisasi, dan Pemberian fasilitas. Dalam UU di sebutkan pula mengenai sanksi dan denda administrasi jika tidak menjalankan atau mengimplementasikan industry hijau yang disebutkan dalam pasal 80. Dalam pasal 82 dalam 4 poin bahwasanya pasal ini mennghimbau langkah – langkah yang perlu dilakukan industry untuk mengimplementasikan industry hijau. Meskipun telah di sebutkan beberapa poin penting mengenai industri hijau. Namun UU ini belum diikuti dengan petunjuk teknis.

Industri hijau ditempatkan sebagai sebagai 5 fokus pemberdayaan kementerian industri, namun laporan mengenai implementasi dan capaian industri hijau belum dipublikasikan secara besar. Namun menurut penelusuran dan penelitian yang ada dalam beberapa laporan kementerian industri periode masa jabatan 2009 – 2014, di indikasikan beberapa kendala dan potensi dari impelementasi kebijakan ini.

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah

Kekuatan Industri Hulu

Paradigma pengolahan sumber daya alam oleh pihak asing diperbaiki oleh UU Perindustrian melalui pengaturan industri strategis, dimana Pemerintah mendapat peran yang lebih besar untuk mengatur pengolahan sumber daya alam strategis. Adalah

satu langkah awal yang tepat bagi Kementerian Perindustrian yang berkoordinasi dengan kementerian/lembaga serta industri nasional untuk secara aktif mempelajari berbagai faktor yang memiliki potensi dan resiko dalam rencana pembangunan industri hulu penghasil bahan baku dari sumber daya alam strategis (Kemenperin, “Industrialisasi Menuju Kehidupan Yang Lebih Baik”, *Media Industri*, 2014:53). Namun wacana ini belum sepenuhnya terlaksana, di era SBY belum banyak di produksi bentuk kebijakan berupa PP, Perpu yang menjadi kelanjutan dari poin industry hijau yang telah ditambahkan di UU nomor 3 tahun 2014 mengenai perindustrian. Keterbatasan teknologi informasi yang dimiliki oleh Indonesia. Sehingga masih banyak industri hulu yang mayoritas sahamnya masih dimiliki oleh pihak asing. Sesungguhnya penguasaan industri hulu ini menjadi faktor yang sangat menentukan dalam implementasi industri hijau, dikarenakan pemerintah haruslah memberikan proteksi dan pengawasan lebih mengenai penguasaan bahan baku dari alam.

Terkait dengan industri hulu penghasil bahan baku, masih lemahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mulai terjadinya kelangkaan beberapa sumber bahan baku yang secara konvensional telah digunakan dalam proses di industri terutama yang bersifat tidak terbarukan (*non-renewable*). Pengembangan perlu terus dilakukan untuk mencari sumber bahan baku terbarukan (*renewable material*) termasuk melakukan konversi dari satu jenis bahan baku yang telah mulai langka ke bahan baku lain yang masih cukup tersedia. Upaya ini ditujukan agar manfaat industri dapat diperoleh lebih lama atau berkelanjutan (*sustainability*). Keberlanjutan ini diarahkan agar fungsi-fungsi lingkungan hidup dapat dipertahankan serta memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat (*Ibid*:54).

Potensi dalam pengembangan Industri Hijau

Sedangkan potensi yang ada dalam pemerintahan ini antara lain adanya standarisasi yang semakin meningkat di setiap produk maupun aspek industri. Dan juga capaian pemerintah dalam peningkatan produksi yang berkelanjutan mengenai industri kayu nasional serta MEA.

Green Industry Era Jokowi

Berkesinambungan dengan pemerintahan sebelumnya, beberapa hal dimanfaatkan bagi pemerintahan ini dalam implementasi industri hijau. Dimana di era sebelumnya implementasi belum masif dan masih sekedar komitmen dari pemerintah melalui forum internasional. Di era ini mulai menunjukkan perkembangan. Namun belum signifikan. Berikut ini potensi dan beberapa kendala implementasi industri hijau.

Potensi

Implementasi industri hijau mulai menunjukkan komitmennya melalui pemberian penghargaan dan juga melalui 2 strategi program. Program ini dikembangkan dengan

dua strategi meliputi: pengembangan industri yang sudah ada menjadi industri hijau dan membangun industri baru dengan prinsip industri hijau. Program industri hijau bersifat sukarela dikarenakan masih terbatasnya sumber teknologi, pendanaan untuk melakukan alih teknologi, sedangkan pemerintah belum mampu untuk menyediakan hal tersebut. Selain itu implementasi di bidang hukum, dimana hukum sumber objektifnya adalah manusia itu sendiri yang pada kondisi di lingkungan belum sepenuhnya mendukung mengenai implementasi green industry. Sejauh ini implementasi penghargaan bagi industri yang telah mencapai tingkat *beyond compliance* dalam proses produksinya. Dari program ini mendorong perusahaan – perusahaan swasta untuk meningkatkan fungsinya, tidak hanya berorientasi pada profit, melainkan mulai memikirkan keberlanjutan. Serta pendirian industri hijau baru dapat sebagai contoh dan pemantik untuk munculnya industri hijau lainnya. Ketika pemerintah memberikan penghargaan terhadap implementasi green industry, untuk menjaga check and balances, diberlakukan pula system hukuman atau sanksi. Seperti yang disebutkan dalam pasal 80, ada 4 sanksi yang diberlakukan antara lain; Peringatan tertulis, Denda administrative, Penutupan sementara, Pembekuan izin usaha industry, dan Pencabutan izin usaha industry.

Pada tahun 2010-2015, tercatat sebanyak 458 perusahaan industri yang secara sukarela mengikuti penghargaan industri hijau dan 358 yang memperoleh penghargaan industri hijau. Penghargaan ini merupakan salah satu bentuk insentif yang diharapkan dapat mendorong pelaku industri dalam mewujudkan industri hijau (“Kemenperin Berikan Penghargaan yang Terapkan Industri Hijau”, *Tribun News*, 14 Desember 2015). Keaktifan pemerintah dan industri dalam penghargaan industri hijau ini perlu ditingkatkan dalam implementasinya. Tidak hanya sekedar penghargaan, melainkan perlu ditingkatkan dengan implementasi dan penurunan kebijakan industri hijau. Perlunya disusun secara detail mengenai kebijakan. Agar kebijakan ini dapat di implementasi perlunya kerjasama privat dan publik dalam melakukan input, sehingga perumusan dan pengimplementasian kebijakan dapat terukur dengan efektif sesuai dengan keadaan industri dan fokus capaian pemerintah. Data tahun 2013- 2015 dalam penerapan industri hijau dari 34 perusahaan dari 7 sektor (semen, pupuk, besi baja, keramik, pulp kertas, gula dan tekstil) terjadi penghematan energi 2,8 T dan penghematan air 9,6 M. Sedangkan penurunan emisi GRKnya pada Emisi 5,25 MtCO₂e dan IPPU 3,01, sedangkan target 2030 adalah emisi 29,83, IPPU 12,55 dan limbah 15,89 sehingga telah terjadi penurunan meskipun baru hanya 17,59 % untuk emisi dan 25,98 % untuk IPPU dibanding dengan target tersebut di atas (Yusriyadi Aminah, 2018:77). Selain implementasi penghargaan, inovasi dan komitmen Indonesia dalam penurunan emisi gas, perlu dihargai. Dengan capaian yang telah disebutkan di atas, menunjukkan inovasi dalam penggunaan sarana dan prasarana, serta sistem pengolahan limbah sangat penting untuk diperhatikan dan dapat menjadi potensi Indonesia untuk terus mengembangkan standar industri hijau yang ada.

Beberapa Kendala, diantaranya:

Jumlah emisi yang perlu diturunkan

Indonesia menduduki urutan ke-6 dengan emisi karbondioksida yang dihasilkan sebesar 1,98 miliar ton emisi CO₂ per tahun. Kontribusi GRK terdiri dari: 1. Kehutanan dan lahan gambut 58%; 2. Energi 24%; 3. Limbah 11%; 4. Industri 2%; 5. Pertanian 5%.³ Meskipun sektor Industri menempati posisi yang ke 4 yaitu hanya sebesar 2 % namun jika ditambah dari energi dan limbah (yang sebagian besar berasal digunakan dan dihasilkan dari industri) maka menjadi jumlah yang cukup besar kontribusinya untuk menjadi perhatian, maka pelaksanaan program industri hijau sangat significant dapat mempengaruhi penurunan gas rumah kaca. Oleh karena itu, menjadi tantangan bagi industri untuk menyiapkan faktor teknologi dan sarana prasarana dalam faktor produksi untuk mengurangi emisi karbon yang menjadi beban cukup besar bagi industri.

Hukum

Kebijakan program industri hijau sebagai konsekuensi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan di sektor industri telah dilaksanakan sejak tahun 2010 kendati baru diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perindustrian. Kebijakan perlu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Pembangunan berkelanjutan yang berupa konsep, prinsip-prinsip dan strategi tidak dapat langsung mengikat secara hukum (*legal binding*) dan secara otomatis dapat diimplementasikan di Indonesia, melainkan harus ada upaya pengintegrasian prinsip pembangunan berkelanjutan dalam konstitusi maupun dalam legislasi nasional yang bisa mengikat secara hukum (Aminah, 2014). Hal ini yang menjadi faktor utama mengapa implementasi industri hijau saat ini belum terlalu besar dampaknya. Yaitu terkendala oleh hukum yang tidak begitu saja diimplementasi kepada perindustrian nasional. Dimana industri ini berhubungan langsung dengan sektor swasta. Ada pun faktor – faktor hukum ini sangat besar. Orang – orang yang mengimplementasikan sebagai subjek hukum, dan faktor lain menjadi faktor penghambat dalam sisi hukum, diantaranya ialah:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang- Undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak - pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor Sarana maupun Fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

³ Ilmu Pengetahuan Umum, “10 Negara Penghasil Emisi Karbon Terbesar di Dunia”, <https://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-penghasil-emisi-karbon-terbesar-di-dunia/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.

5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dan penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum (Soerjono Soekanto, 1983).

Kaidah hukum sebagai dasar berlakunya program industri bersih adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Pada Undang-Undang Perindustrian ada salah satu ketentuan yang bisa menjadi faktor penghambat penerapan industri hijau sebagai upaya pemenuhan komitmen penurunan GRK, yakni di dalam pasal 80 dinyatakan “Penerapan standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (2) secara bertahap dapat diberlakukan secara wajib.” Berarti program industri bersih bersifat sukarela, sehingga untuk mengikuti Industri hijau tergantung dari kemauan dan kesadaran perusahaan dan masih banyak perusahaan yang belum mengetahui dan mengikuti program industri hijau, dapat menyebabkan kurang maksimal tercapainya target penurunan GRK di Sektor Industri.

Program industri hijau yang bersifat sukarela, menyebabkan tidak adanya sanksi yang diterapkan secara tegas oleh petugas dalam melaksanakan program industri hijau, terlebih lagi belum semua pemberian fasilitas yang berupa *fiscal* dan *non fiscal* diberikan kepada pengusaha industri yang telah mendapatkan penghargaan industri hijau bisa membuat kurangnya minat perusahaan untuk mengikuti program industri hijau.

Koordinasi antar lembaga

Kurangnya kebijakan dan dasar hukum yang kuat ini menyebabkan tidak ada koordinasi antara lembaga pusat dan daerah dalam pelaksanaan industri hijau dan juga kurang adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah dalam upaya penurunan GRK.

Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarannya program industri hijau ini memerlukan sarana dan prasarana yang tidak sedikit, baik yang dibutuhkan oleh pemerintah maupun yang dibutuhkan oleh pengusaha. Di satu sisi pemerintah harus selalu melakukan penelitian dan pengembangan secara terus menerus untuk menunjang keberhasilan program Industri hijau, di sisi lain alokasi dana dari APBN untuk kegiatan tersebut sangat terbatas sekali karena saat ini dana pemerintah lebih dikonsentrasikan kepada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum.

Pada pihak perusahaan untuk memenuhi komitmen kegiatan industri hijau dibutuhkan modifikasi peralatan dan penggantian teknologi yang menghabiskan dana yang tidak sedikit, hal ini yang membuat pengusaha enggan untuk mengikuti program industri

hijau. Serta tidak ada sanksinya kalau tidak mengikuti program tersebut dan tidak adanya kesadaran lingkungan dari pengusaha tersebut juga disebabkan oleh pola pikir yang berorientasi kepada keuntungan pada sebagian besar pengusaha.

Penutup

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan rejim yang dibentuk melalui mekanisme Majelis Umum PBB yang merupakan komitmen bagi seluruh negara untuk melakukan yang inklusif dan mengedepankan berbagai aspek sosial. Implementasinya juga diwujudkan dalam beberapa indikator yang menjadi tolak ukur. *Green Industry* yang merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu bentuk pengejawantahan nyata rejim ini. Dan menjadi fokus berbagai negara yang didorong oleh beberapa kondisi yang ada di dunia. Seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan beberapa masalah lainnya. Namun implementasi *green industry* menjadi sebuah tantangan bagi negara berkembang yang masih memiliki keterbatasan berbagai akses seperti teknologi, sumber daya manusia, dan sebagainya.

Indonesia sebagai bagian dari rejim lingkungan internasional, telah menetapkan arah pengembangan industri hijau. Dasar kebijakan Industri Hijau telah ditetapkan di era Presiden Susilo Bambang Yudoyono, dengan ditetapkannya UU Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015 – 2035. Dua produk peraturan perundangan ini menjadi pijakan bagi pemerintahan Joko Widodo dalam membangun Industri Hijau.

Era presiden Jokowi, pembangunan Industri Hijau tetap dilanjutkan dan dikuatkan. Setidaknya 3 hal penting yang ditindaklanjuti adalah Standardisasi Industri Hijau, Fasilitasi Industri Hijau, dan Penggunaan Produk Industri Hijau. Yang perlu mendapat perhatian di masa yang akan datang adalah tentang konsistensi dalam penegakan berbagai peraturan perundangan yang telah dibuat dan dukungan pemerintah dalam memberikan fasilitas kepada perusahaan dan juga komitmen perusahaan untuk membangun industri hijau.

Industri hijau ini juga bisa menjadi momen dan kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangkan kerjasama. Dengan keterbatasan dan potensi yang dimiliki oleh Indonesia, bisa dimanfaatkan sebagai momentum yang baik untuk menarik investasi luar negeri serta berbagai kerjasama bilateral maupun Internasional. Dari sekian banyak kerjasama internasional yang dilakukan oleh Indonesia, ada beberapa kerjasama yang mengembangkan point industri hijau seperti kerjasama Kejasama Indonesia – UNIDO, serta Indonesia – AS. Menurut laman artikel yang dipublikasikan oleh Kemenperin, disoroti beberapa bentuk kerjasama dengan negara dan organisasi internasional menuju green industry yang mengedepankan banyak aspek keberlanjutan yang salah satunya adalah lingkungan. Dengan berkembangnya kebijakan industri hijau yang lebih baik lagi dalam pemerintahan Jokowi saat ini, diharapkan kondisi

lingkungan di Indonesia semakin baik dan juga kerjasama internasional akan semakin banyak sehingga kesejahteraan akan dapat dicapai.

Bibliografi

- “Kemenperin Berikan Penghargaan yang Terapkan Industri Hijau”, *Tribun News*, 14 Desember 2015, <http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/12/14/kemenperin-berikan-penghargaan-untuk-perusahaan-yang-terapkan-industri-hijau>.
- Aminah. 2014. *Implementasi Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Kebijakan Hukum Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas*. Semarang: Undip Law Press.
- Aminah, Yusriyadi. 2018. “Implementasi Program Industri Hijau Dalam Rangka Kebijakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.” *Bina Hukum Lingkungan* 3(1): 77.
- Atmawinata, A., dkk. 2012. *Pendalaman Struktur Industri yang Mempunyai Daya Saing di Pasar Global: Telaahan Pendalaman Struktur Industri melalui Efisiensi dan Efektivitas dalam Implementasi Industri Hijau*, Jakarta: Kemenperin.
- Charter, M. 1992. *Greener Marketing: A Responsible Approach to Business*. Greenleaf: Sheffield.
- Greenlisting Indonesia. 2013. “Kebijakan Pengembangan Industri Hijau (Green Industry) Kementerian Perindustrian.” <http://greenlistingindonesia.com/berita-147-kebijakan-pengembangan-industri-hijau-green-industry-kementerian-perindustrian.html>.
- Halimatussadiyah, Alin. 2014. “Green Economy: Concept, Agendas and Challenges” dalam Green Development Seminar “Green Mindset toward Sustainable Development”, pada Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia, Wisma Makara Universitas Indonesia, Depok, 15 Februari 2014, <http://miti.or.id/wp-content/uploads/2014/02/Dr.-Alin-H-Green-Economy.pdf>.
- Ilmu Pengetahuan Umum. 2019. “10 Negara Penghasil Emisi Karbon Terbesar di Dunia”, <https://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-penghasil-emisi-karbon-terbesar-di-dunia/>.
- JDIH Kemenperin. 2019. “Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035.” <http://jdih.kemenperin.go.id/>.
- JDIH Kemenperin. 2019. “Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.” <http://jdih.kemenperin.go.id/>.
- JDIH Kemenperin. 2019. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015 – 2019”, <http://jdih.kemenperin.go.id/>, diakses pada tanggal 11 Juli 2019.
- JDIH Kemenperin, “UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian”, <http://jdih.kemenperin.go.id/>, diakses pada tanggal 11 Juli 2019.

- JDIH Kemeperin. 2019. “Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.” <http://jdih.kemenperin.go.id/>.
- Katalog BPS. 2019. “Kajian Indikator Lintas Sektor: Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia.” Jakarta: BPS. www.bps.go.id.
- Kemenperin. 2014. “Industrialisasi Menuju Kehidupan Yang Lebih Baik.” *Media Industri* 3: 53.
- Kemenperin. 2019. “Kemenperin dan UNIDO Pastikan 13 Proyek Kerjasama Industri Terus Berjalan”, <https://kemenperin.go.id/artikel/17691/Kemenperin-dan-UNIDO-Pastikan-13-Proyek-Kerja-Sama-Industri-Terus-Berjalan>.
- Kemenperin. 2019. “RI – AS Tingkatkan Kerjasama Industri Lewat Perjanjian Bilateral”. <https://kemenperin.go.id/artikel/17011/RI-AS-Tingkatkan-Kerja-Sama-Industri-Lewat-Perjanjian-Bilateral>.
- Kementerian Luar Negeri. 2019. “Krisis Energi.” <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Krisis-Energi.aspx>.
- Kementerian Perindustrian. 2019. “Kebijakan Pengembangan Industri Hijau (Green Industri).” <http://greenlistingindonesia.com/berita-147-kebijakan-pengembangan-industri-hijau-green-industri-kementerian-perindustrian.html>.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 1994. “Tinjauan Sosiologis Hukum Lingkungan di Indonesia”. *Jurnal Hukum Lingkungan ICEL* 1(1).
- Septian Deny. Liputan 6, 23 November 2013. “5 Tantangan Menuju Industri Hijau” <https://www.liputan6.com/bisnis/read/756919/5-tantangan-menuju-industri-hijau>.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- UNDP Report. 2019. “Report Indicators and Data Mapping to Measure Sustainable Development Goals (SDGs) Target”, <https://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2016/doc>.
- UNIDO. 2011. “UNIDO Green Industri: Policies for Supporting Green Industri”, <https://www.unido.org/our-focus/cross-cutting-services/green-industri/green-industri-initiative>.

Status Sebagai Great Power: Politik Luar Negeri Rusia Era Presiden Vladimir Putin

Ali Muhammad¹

¹Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Corresponding e-mail: alimuhammad@umy.ac.id

Abstrak



Tulisan ini mendiskusikan perilaku kebijakan luar negeri [polugri] Rusia di bawah presiden Vladimir Putin. Paper ini menunjukkan bahwa perilaku polugri Rusia era presiden Vladimir terlihat semakin asertif di panggung politik internasional. Terdapat bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa perilaku Rusia merupakan negara *great power* yang sedang bangkit kembali. Sikap kritisnya terhadap Barat, perilakunya terhadap negara-negara tetangga, intervensi militer dalam konflik di Suriah, aliansinya dengan Iran, serta aneksasi Rusia atas Semenanjung Krimea merupakan indikasi fenomena tersebut. Walaupun demikian, terdapat problem domestik untuk menopang perilaku sebagai *great power* yang makin asertif tersebut, yakni, kemampuan ekonominya yang tidak menonjol.

Kata Kunci

Polugri Rusia, Vladimir Putin, Kebangkitan Kembali, *Great Power*

Pendahuluan

Bagi pemerhati masalah politik internasional, politik luar negeri (polugri) Rusia dewasa ini menarik untuk didiskusikan. Terdapat tiga alasan, pertama, Rusia adalah pewaris negara superpower, yang memiliki wilayah terluas di dunia. Negara ini juga mewarisi posisi kunci dalam politik keamanan internasional sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB serta mewarisi arsenal senjata nuklir terbesar di dunia. Posisi geografisnya di benua Eurasia menjadikannya sebagai kekuatan sentral di Benua Eropa dan Benua Asia.

Kedua, sejak lahir dari runtuhnya Uni Soviet tahun 1991, Rusia awalnya dipandang hanya dengan sebelah mata oleh pihak Barat. Pada akhir 1990-an, kemunduran Rusia adalah potret realita yang bertahan lama sehingga para pengamat dan pemimpin negara Barat mewacanakan gambaran nyinyir tentang 'dunia tanpa Rusia'. Di balik ungkapan nyinyir ini, terdapat fakta tak terbantahkan bahwa Rusia memang kenyatannya begitu lemah sehingga "Rusia makin menyusut sebagai aktor penting politik dunia."

Ketiga, Rusia kemudian terlihat perlahan mulai merangkak bangkit. Di bawah Vladimir Putin yang menjabat sebagai presiden dua periode (2000 – 2008) dan kemudian setelah jeda Demitri Medvedev, Putin menjabat lagi untuk dua periode berturut-turut (2012 – 2024), Rusia telah terlihat semakin kokoh dan asertif dalam perilaku polugri. Fakta tentang kebangkitan Rusia secara perlahan ini diakui di Barat. Kebangkitan Rusia di kancah politik internasional tersebut menjadi isu strategis untuk di respons secara serius karena Rusia menggemakan penegasannya kembali sebagai negara great power yang menantang hegemoni Barat.

Aspirasi Rusia di bawah Presiden Putin yang membangkitkan kenangan kejayaan masa lalu telah menimbulkan kekawatiran baru tentang masa kini dan masa depan politik global. Kekawatiran Barat semakin nyata ketika polugri Rusia yang semakin asertif, seperti terlihat saat Rusia memberi peringatan Eropa agar tidak bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam instalasi komponen pertahanan rudal Amerika di wilayah Eropa Timur; penangguhan partisipasinya dalam Perjanjian Pasukan Konvensional di Eropa (CFE); serta insiden pada bulan Mei 2007 di mana Estonia menjadi sasaran serangan verbal maupun tertulis. Tindakan Rusia tersebut muncul sebagai balasan atas keputusan pemerintah Estonia yang memindahkan lokasi makam tentara Soviet dari pusat kota Tallinn ke posisi yang kurang menonjol.

Peristiwa yang cukup menghebohkan adalah pembunuhan mantan agen Rusia Alexander Litvinenko di London pada bulan November 2006. Sebagai seorang mantan agen Rusia, telah menimbulkan pertanyaan tentang keterlibatan Kremlin. Pembunuhan atas mantan agen Rusia dengan menggunakan zat radioaktif dan penolakan tegas Rusia untuk mengekstradisi terhadap orang yang terlibat menurut otoritas Inggris jelas memicu ketegangan. Dalam pidatonya di Konferensi Keamanan di Munich pada Februari 2007, Presiden Vladimir Putin menyatakan bahwa “Perang Dingin baru tidak bisa dielakkan jika AS dan sekutu NATO-nya terus mencampuri urusan internal Rusia dan membuat berbagai keputusan besar tentang masalah keamanan internasional tanpa berkonsultasi terlebih dulu dengan Moskow.” Presiden Rusia juga mengkritik Amerika Serikat karena berusaha menciptakan “dunia satu bos, satu penguasa” dan karena mencampuri politik dalam negeri Rusia dengan, misalnya, mengajari Rusia bagaimana menjadi negara yang demokratis.

Peristiwa lain yang mencengangkan adalah tindakan aneksasi sepihak Rusia atas Krimea pada tahun 2014. Aneksasi Krimea oleh Rusia terjadi pasca tumbangannya Presiden Ukraina yang pro Rusia –Viktor Yanukovych – oleh kelompok oposisi pro-Barat. Referendum sepihak yang dilakukan Rusia di Krimea pasca aneksasi dianggap tidak sah oleh Kiev dan dikecam keras oleh negara-negara Barat. Namun secara de facto, Krimea kini berada di bawah penguasaan Kremlin. Peristiwa tersebut telah memicu ketegangan dan “Perang Dingin” antara Rusia dan Barat.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dengan pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3). Data yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan dikelola dan dianalisis dengan suatu metode tertentu. Dalam artikel ini, data yang digunakan adalah sebagian besar adalah data sekunder dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi berupa buku, jurnal maupun sumber lain dari internet.

Review Literatur/Tinjauan Pustaka

Bagaimana kajian tentang perilaku polugri Rusia yang semakin asertif tersebut dewasa ini? Sebenarnya terdapat teori yang cukup populer, yakni, *Teori Transisi Kekuasaan (TTK)* bisa membantu menjelaskan perilaku polugri Rusia. Teori ini sebenarnya awalnya merupakan turunan dari perpektif realis / neo-realis. Dikembangkan oleh A.F.K. Organski (1958) dan para pengikutnya (Wittkopf 1997, Tammen 2000), perpektif ini cukup meyakinkan untuk meneropong dinamika dan perilaku polugri Rusia dewasa ini. Terdapat beberapa catatan penting terkait dengan *TTK* ini.

Pertama, *TTK* sebenarnya adalah suatu perpektif HI yang bertujuan untuk menjelaskan penyebab konflik dan perang internasional akibat lahirnya kekuatan yang muncul yang tidak puas dengan aturan internasional yang dibangun oleh kekuatan dominan. Menurut Teori ini, negara-negara di dunia dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori: negara status quo atau negara revisionis. Negara-negara kuat dan berpengaruh—seperti Amerika Serikat yang mendapat manfaat dari tatanan dunia yang sebelumnya—dikategorikan sebagai negara *status quo*; sementara negara-negara tidak puas dengan posisi mereka di spektrum internasional dianggap sebagai negara *revisionis*. *TTK* didasarkan pada asumsi bahwa negara revisionis bertujuan untuk perubahan radikal dari aturan lama atau memaksakan aturan baru bagi aktor internasional lainnya.

Kedua, menurut *TTK* ini, Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin merupakan negara *revisionis*. Dalam hubungannya dengan Amerika Serikat maupun aktor internasional lainnya, Rusia memiliki empat permasalahan utama. (a) Rezim Presiden Putin menantang nilai-nilai inti demokrasi dengan kurangnya menghormati kebebasan politik, sipil, dan hak ekonomi dan ekonomi yang disfungsi. (b) Rusia menghadirkan serangkaian tantangan strategis dan diplomatik di seluruh dunia, termasuk penumpukan persenjataan nuklir dan militernya. (c) Rusia menjadi ancaman bagi sekutu-sekutu Amerika Serikat dan negara-negara sahabat AS di seluruh dunia, seperti negara-negara Baltik, Polandia, Finlandia, Swedia, Georgia, maupun Ukraina.

(d) Kerjasama Rusia dengan negara-negara "nakal" (Iran, Suriah, Korea Utara) dan kecenderungannya untuk memainkan peran *spoiler* menimbulkan serangkaian ancaman lain (Carafano 2015: 1).

Ketiga, para pendukung aliran "revisionis" ini percaya bahwa dalam urusan keamanan, Rusia mempertahankan pandangan polugri yang *a zero-sum-game*. Keamanan absolut adalah tujuannya yang jika berhasil berarti ketidakamanan mutlak bagi negara-negara lain. Rusia terlihat keyakinan pada instrumen militer dan fokus membangun kembali kemampuan militernya dalam dekade terakhir. Penggunaan kekerasan terhadap tetangga yang lebih kecil dan aneksasi ilegal merupakan bagian dari kebijakan polugri ini (Granholm et al. 2014: 10, 25).

Keempat, dalam menjelaskan sumber-sumber perilaku POLUGRI Rusia ini, aliran "revisionis" cenderung percaya bahwa tidak ada kesalahan apa pun yang dilakukan oleh pihak Barat. Perkembangan seperti kampanye NATO di Kosovo pada tahun 1999 (dan kemudian pemisahan diri Kosovo dari Serbia), program pertahanan rudal AS di Eropa Timur, upaya yang didukung AS dan Uni Eropa untuk "mempromosikan demokrasi dan pemerintahan yang baik" di negara-negara pasca-Soviet (yang disebut oleh Kremlin serangkaian "Revolusi Warna") dan di atas semua itu ekspansi NATO ke Eropa timur tidak perlu dianggap mengancam keamanan Rusia dan alasan sah untuk reaksi balasan Moskow. Aliran aliran "revisionis" ini tegas menuduh Rusia memiliki aspirasi neo-imperialis atas tetangga-tetangganya dan Rusia percaya bahwa tetangga-tetangga itu tidak memiliki hak yang sesuai untuk menentukan nasib mereka sendiri. Apa yang tidak bisa ditoleransi oleh Rusia adalah *any independent sources of power on its borders or inside them that could resist the regime's will* (Carafano, 2015: 3).

Perlu dicatat bahwa TTK memiliki beberapa versi. Versi moderat mencoba menjelaskan perubahan radikal dalam paradigma perilaku polugri Moskow oleh kegagalan dari reformasi demokrasi di Rusia pasca-Soviet. Reformasi politik Rusia ini tergelincir dari cara yang "tepat" dan mengalami degenerasi menjadi model kapitalisme negara / oligarkis yang didasarkan pada ekspor sumber daya alam, sentralisme, dan dominasi birokrasi kleptokratis. Rezim semacam itu enggan diintegrasikan dengan syarat-syarat global dan hanya bisa bertahan dengan mempertahankan kontrol domestik yang ketat dan menghasilkan citra "pengepungan permusuhan" Rusia—terutama untuk konsumsi politik domestik (Granholm et al. 2014, 26-29).

Pada saat yang Sama, pendapatan tinggi Rusia dari ekspor minyak pada tahun 2000-an membuat rejim Putin dan Medvedev memiliki sumber ekonomi yang banyak yang bisa meningkatkan standar hidup rakyat Rusia maupun untuk meluncurkan program modernisasi militer. Namun pada gilirannya, pendapatan tinggi dari ekspor minyak ini menciptakan ilusi di antara para pemimpin Rusia bahwa Moskow dapat membiarkan dirinya melakukan arah internasional yang lebih asertif dan bahkan aspirasinya sebagai status *great power*.

Sedangkan, versi ekstrim dari TTK cenderung melihat Rusia sebagai *trouble maker* yang tidak dapat diperbaiki atau bahkan "bajingan" yang pada prinsipnya tidak dapat mengasimilasi / menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dan bermain dalam aturan internasional yang sudah mapan. Bagi para pendukung aliran ekstrim ini, seluruh arah neo-liberal Barat tentang keterlibatan Rusia pasca-Soviet dalam transformasi demokratis dan kerja sama internasional akan menemui kegagalan. Seperti yang diamati oleh seorang analis neo-konservatif, "Sejak abad ke-17, Rusia telah terpecah dan terombang-ambing antara yang memandang dirinya sendiri sebagai bangsa Barat versus yang memandang dirinya sebagai kekuatan besar yang memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan Barat dan memiliki sejarah untuk mengendalikan negara-negara tetangganya atas nama kekuatannya dan memajukan konsep peradabannya" (Carafano 2015: 3). Untuk aliran ini, kebangkitan rezim Presiden Putin adalah hanya momen lain dalam sejarah Rusia ketika pendulum telah berayun dari pihak Barat.

Para pendukung interpretasi "revisionis" berbeda pandangan tentang seberapa serius ancaman Rusia terhadap keamanan internasional dan apakah ambisi revisionis Rusia bersifat jangka pendek ataukah jangka panjang. Beberapa analis Barat percaya bahwa Rusia serius dalam memainkan peran lebih tegas dalam politik dunia, mengembalikan status *Great Power* dan menjadi salah satu kutub kekuatan dalam politik internasional dewasa ini (Granholm et al. 2014: 15). Mereka menunjuk pada faktor-faktor seperti ukuran Rusia dan sentralitas geopolitik wilayah, sumber daya energi, persenjataan nuklir, bagian modern dari angkatan bersenjata konvensional, dan terutama kesediaan untuk menyerang, menumbangkan, dan memainkan peran sebagai *trouble maker*. Aliran ini menggarisbawahi bahwa Moskow secara aktif membentuk kembali yang lama (CIS, Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO), SCO, dll.). Dan membangun aliansi baru (Uni Ekonomi Eurasia (EEU), BRICS) mencoba untuk menantang hegemoni Barat baik pada regional dan tingkat global.

Pengelompokan ini menunjukkan bahwa bahwa Rusia telah membuktikannya sebagai suatu kekuatan yang harus diperhitungkan dalam politik internasional. Aliran ini melihat bahwa krisis Ukraina telah bertindak sebagai katalis dan mempercepat proses transformasi tatanan internasional. Sistem internasional saat ini kemungkinan besar hanya pada awal proses panjang dari perubahan struktural yang akan berdampak pada tingkat lokal, regional dan bahkan global. Antara lain, kebijakan Rusia menantang kerjasama regional di seluruh dunia, desain arsitektur keamanan Eropa, tingkat pengeluaran pertahanan, ketahanan kebijakan energi, dan hubungan *Great Powers* di Eropa, Asia dan Amerika. Aliran ini juga mencatat bahwa krisis Ukraina telah memicu pencarian identitas yang intens tentang apa artinya menjadi Rusia, Ukraina, Eropa dan apa pula arti dunia global. Seperti yang ditekankan oleh seorang pakar secara dramatis, "Dunia mungkin mungkin sedang tumbuh persaingan ideologi baru, di mana tatanan dunia liberal global menentang model otoriter, state-capitalistik" (Granholm et al. 2014: 15).

Namun aliran yang dominan di dalam "aliran revisionis" adalah pandangan yang percaya bahwa Rusia sebenarnya adalah "kekuatan yang merangkak turun" (Carafano 2015, 4). Analisis dari pandangan ini menunjukkan bahwa Rusia secara ekonomi masih relatif lemah dan bergantung pada ekspor minyak yang sekarang tidak menguntungkan seperti sebelum krisis harga minyak 2014. Rusia saat ini tidak memiliki daya tarik ideologis yang luas yang sebanding dengan ideologi Komunis masa lalunya. Adapun mitra internasional Rusia, negara-negara seperti Republik Rakyat Cina, juga mungkin membenci tatanan internasional Barat. Tetapi mereka dapat dianggap sebagai sekutu yang ambivalen bagi Rusia. Mereka menentang tatanan itu bukan untuk keuntungan bagi Rusia, tetapi untuk kepentingan mereka sendiri. Rusia tidak mengarahkan atau mengendalikan Tiongkok, apalagi menginspirasi mereka secara ideologis.

Pandangan bahwa Rusia merupakan "kekuatan yang merangkak turun" ini mencatat bahwa perbandingan antara Uni Soviet dan Rusia kontemporer menyesatkan, tidak peduli seberapa besar rezim Putin mempromosikan mereka untuk membenarkan aturannya sendiri atau untuk memproyeksikan citra kesetaraan dengan Amerika Serikat dan kutub kekuasaan lainnya. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa Rusia jauh lebih lemah daripada Uni Soviet, itu bukan berarti bahwa Barat harus mengabaikan ambisi geopolitik Rusia. Para pendukung aliran ini mengakui bahwa Rusia bisa menjadi masalah yang akan terjadi dengan pihak Barat untuk waktu yang sangat lama walau urgensinya akan berkurang.

Hasil dan Pembahasan

Polugri Rusia sebagai Great Power yang Bangkit Kembali

Sejak terpilihnya kembali Vladimir Putin untuk menjabat Presiden pada 2012, Rusia semakin terlihat memiliki polugrinya yang tegas dan berusaha mendapatkan posisi *great power* terkemuka dalam diplomasi global. Upaya Rusia tersebut membuahkan hasil. Berkat intervensi militernya di Suriah, Rusia menjadi *powerbroker* terkemuka di Timur Tengah. Diplomasinya di panggung politik internasional juga semakin aktif ketika Rusia menjadi tuan rumah bagi presiden Turki dan presiden Iran untuk mengoordinasikan tanggapan bersama terhadap keputusan Presiden AS Donald Trump untuk menarik pasukan AS keluar dari timur laut Suriah. KTT tersebut menandai peringatan dua tahun dari apa yang disebut sebagai Proses Perdamaian Astana yang tujuan adalah untuk mengakhiri konflik di negara Timur Tengah (Bechev, 2019).

Proses Astana tersebut sangat menarik karena AS tidak dilibatkan dalam forum tersebut. Karena itu, proses Astana mungkin menjadi pertanda tatanan global baru yang akan datang: kemunculan kekuatan-kekuatan non-Barat, seperti Rusia, Cina, dan India. Selama beberapa tahun terakhir, Putin tidak menghindar dalam menghadapi Barat. Pada hari-hari pertamanya sebagai pemimpin, Putin awalnya dengan sepenuh hati berpihak pada AS setelah peristiwa 9/11 dan bahkan menyatakan prospek Rusia bergabung dengan NATO. Tetapi pada saat Putin menyampaikan pidatonya yang

sering dikutip di Konferensi Keamanan Munich pada 2007, Putin menjadi skeptik bahwa AS dan sekutunya berusaha untuk melucuti Rusia dengan mengobarkan "revolusi warna"¹ di seluruh negara-negara tetangga bekas Soviet (Bechev, 2019).

Fenomena Arab Spring pada 2010-2011 hanya mengkonfirmasi ketakutan Rusia dan sebagai perdana menteri, Vladimir Putin waktu itu secara terbuka mengecam keputusan Presiden Dmitry Medvedev yang saat itu untuk tidak memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengesahkan zona larangan terbang di atas Libya yang mempercepat Inggris dan Prancis melakukan serangan udara atas Libya dan kejatuhan pemimpin Libya Muammar Gaddafi.

Keretakan hubungan dengan Barat menjadi permanen ketika Rusia memnganeksasi semenanjung Krimea milik tetangganya Ukraina pada musim semi 2014. Sejak itu, Rusia menentang AS dan sekutunya Eropa yang telah menjatuhkan sanksi sebagai tanggapan atas aneksasi dan juga invasi Moskow ke wilayah Timur Ukraina. Hingga 2014, AS dan UE menganggap Rusia sebagai mitra yang sulit dikendalikan.

Untuk mewujudkan ambisi *great power* ini, Rusia menghabiskan lebih dari era sebelumnya sebelumnya untuk kebutuhan militer. Vladimir Putin memberikan niat awal untuk membalikkan kemerosotan militer dan membangun kembali Rusia sebagai kekuatan militer modern. Serangkaian dorongan modernisasi telah melihat pengeluaran sebagai persentase dari PDB hampir dua kali lipat. Waktu Presiden Putin di kantor telah melihat Rusia melenturkan kekuatannya di Chechnya, Georgia, Ukraina bagian timur dan yang terbaru Suriah (BBC, 2018).

Sebagai respons, Pentagon menjadikan Rusia sebagai ancaman militer setara dengan meningkatnya kekuatan Cina. NATO telah mengerahkan pasukan di Eropa Timur untuk mencegah Rusia melakukan tindakan-tindakan agresif di luar perbatasannya. Terlebih lagi, ada kekhawatiran yang semakin besar bahwa Rusia menggunakan berbagai strategi mulai dari pemerasan ekonomi hingga serangan siber dan dari disinformasi ke dukungan terhadap sayap kanan populis dan partai-partai kiri radikal yang merongrong pesaing Baratnya dari dalam (Bechev 2019).

Kontroversi yang sedang berlangsung mengenai campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden AS 2016 bersama dengan retorika pro-politisi anti-imigrasi di Eropa seperti Presiden Hongaria Viktor Orban dan Menteri Dalam Negeri Italia Matteo Salvini. Uni Eropa telah mulai berbicara tentang "ketahanan" terhadap kampanye pengaruh eksternal dengan tetangga, Rusia (Bechev, 2019).

¹ Istilah yang banyak digunakan oleh media untuk menggambarkan berbagai gerakan yang berkembang di beberapa negara di bekas Uni Soviet dan Balkan pada awal 2000-an. Peserta dalam revolusi warna menggunakan perlawanan non-atau perlawanan sipil. Metode-metode seperti demonstrasi, pemogokan dan intervensi dimaksudkan sebagai protes terhadap pemerintah yang dianggap korup dan otoriter dan untuk mengadvokasi demokrasi dan mereka juga telah menciptakan tekanan kuat untuk perubahan.

Memang gudang senjata nuklir strategis Rusia warisan Uni Soviet berada pada tingkat yang sama dengan AS. Namun, terlepas dari reformasi militer yang ambisius selama dekade terakhir, pasukan konvensional Rusia sebenarnya masih jauh tertinggal dibanding dengan pasukan AS dalam hal kemampuan maupun kecanggihan teknologinya. Anggaran pertahanan Rusia \$ 63 milyar juga masih jauh tertinggal dibanding dengan AS yang mencapai \$ 643 milyar dan Cina yang telah mencapai \$ 168 milyar (Bechev, 2019).

Rusia terlihat lebih baik dalam keterlibatannya pada perang terbatas di konflik Ukraina maupun konflik di Suriah tetapi Rusia tidak dalam posisi untuk memproyeksikan kekuatan militernya secara global. Meskipun memiliki hubungan yang relatif dekat dengan Cina dan India, Rusia tidak dapat mengandalkan jaringan aliansi yang stabil seperti yang dinikmati oleh AS di Eropa, Asia Timur dan sekitarnya. Rusia belum dapat menggantikan AS sebagai kekuatan utama atau hegemon di Timur Tengah atau bagian dunia lainnya.

Bahkan dominasinya di Eurasia pasca-Soviet adalah masih banyak menghadapi hambatan. Negara-negara di Eropa Timur, seperti Ukraina, Georgia dan Moldova lebih berorientasi secara ekonomi maupun politik ke Barat. Di Asia Tengah, Cina justru menjadi pusat gravitasi yang semakin dominan. Di dunia pasca-Amerika, Rusia juga kemungkinan akan menjadi sebagai mitra junior terhadap China daripada pemangku kepentingan yang setara.

Inti strategi Rusia adalah, mengutip pernyataan Yevgeny Primakov, untuk "bermain lemah dengan baik". Dalam beberapa kasus, strategi ini melibatkan mengeksploitasi kerentanan lawan. Politik domestik yang terpolarisasi di Barat telah memperkuat tangan Rusia. Ini memungkinkan Putin untuk bermain lebih efektif dengan permainan "memecah belah dan menaklukkan" (Bechev, 2019).

Dalam kasus lain, Rusia mendapat banyak keuntungan dan manfaat karena bermain fleksibel. Di Timur Tengah, misalnya, Rusia telah berhasil membangun kerjasama dengan semua kekuatan yang saling bermusuhan: Iran, Israel, Teluk, Turki dll. Meskipun demikian, prestasi kebijakan luar negeri Putin tetap beragam. Terkadang pertaruhannya membuahkan hasil, terkadang juga tidak. Jet tempur Rusia, bersama dengan pasukan darat Iran, menyelamatkan rezim Assad di Suriah. Krimea juga kudeta. Prestasi ini membuat popularitas presiden Rusia di dalam negeri meroket hingga 80 persen atau lebih (Bechev, 2019).

Di benua Eropa, sumber daya minyak dan gas memberkati Moskow dengan pengaruh geopolitik; Jerman, misalnya, telah berusaha keras untuk mendorong pipa gas Nordstream 2, yang membuat AS kecewa. Negara-negara Balkan, juga berkeinginan untuk menjadi tuan rumah perpanjangan pipa Turk Stream. Tapi sekali lagi, ada batas kekuatan Moskow. NATO semakin besar, meskipun ada pushback dari Rusia. Tahun

ini Makedonia Utara akan bergabung dengan aliansi, mengikuti jejak Montenegro (De Haas, 2011).

Pada saat yang sama, Rusia tidak membuat banyak kemajuan di Ukraina. Konflik di Donbas telah lama mengalami kebuntuan sementara Kiev menolak proposal Rusia untuk konstitusi pembagian kekuasaan yang secara efektif akan memberi Rusia hak veto atas kebijakan luar negerinya (De Haas, 2011).

Kesuksesan internasional harus dibayar. Sanksi yang dijatuhkan oleh UE dan AS masih berlaku sampai saat ini. Meskipun tawaran ramah Donald Trump terhadap Kremlin, Kongres AS telah meningkatkan langkah-langkah hukuman terhadap Rusia. Investigasi Mueller dan dugaan kolusi antara kampanye Trump dan Kremlin telah membuat pemulihan hubungan menjadi semakin sulit (Bechev, 2019).

Selama dasawarsa terakhir, upaya pengejaran kejayaan di luar negeri Rusia sebagai *great power* ini terlihat membuahkan hasil di dalam negeri, yakni, memberi legitimasi Presiden Presiden Putin dan memperkuat cengkeraman politik di dalam negeri. Namun, tampaknya semakin sedikit masalahnya. Eksploitasi asing tidak lagi dapat meningkatkan peringkatnya. Keuntungan yang didapat di Suriah, Republik Afrika Tengah atau Venezuela tidak membeli popularitas rezim. Masyarakat Rusia semakin fokus pada tantangan yang dihadapi di dalam negeri, seperti pertumbuhan anemia, proyeksi kenaikan usia pensiun, dan korupsi yang melemahkan. Kepercayaan pada institusi rendah, dengan hanya Presiden Putin yang mempertahankan popularitas sebagai individu. Ketidakpuasan sosial meningkat dan sanksi Barat, dalam hubungannya dengan harga minyak yang rentan, telah membuat beban berat bagi Rusia (Bechev, 2019).

Tentu saja, tekanan domestik ini tidak akan memaksa Kremlin untuk melakukan putar balik arah polugrinya. Tetapi tekanan domestik sebagai pengingat bahwa gagasan bahwa Rusia adalah kekuatan revisionis yang mampu menjungkirbalikkan tatanan dunia (De Haas, 2011).

Hambatan Ekonomi

Perilaku polugri Rusia yang asertif dalam polugrinya, menunjukkan bahwa negarai ini ingin diakui sebagai *Kekuatan Besar*. Walaupun demikian, sebagai *great power* yang bangkit, kekuatan ekonomi Rusia ternyata belum begitu kuat. GDP-nya Rusia hanya \$ 1,57 triliun bernilai sekitar 8 persen dari GDP Amerika Serikat dan hanya sebanding dengan negara Eropa menengah, seperti Spanyol. Uni Ekonomi Eurasia (EEU) yang akhirnya berhasil dibentuk oleh Presiden Putin tahun 2014 setelah upaya bertahun-tahun sebenarnya masih belum sebanding dengan raksasa ekonomi Uni Eropa. Di bawah kepemimpinannya saat ini, Presiden Putin mengakui bahwa ada batasan ekonomi untuk perilaku polugrinya (Bloomberg, 2017).

Oleh karena itu, terdapat Rusia berkomitmen untuk disiplin anggaran dan alokasi sumber daya yang terukur di antara penuntut utama - sektor sosial dan pembangunan, serta pertahanan dan keamanan. Disiplin anggaran membatasi alokasi sumber daya untuk proyeksi kekuatan, terutama varietas keras, bahkan jika alokasi tersebut pada tingkat yang cukup tinggi untuk menyebabkan ketidaknyamanan bagi Pihak Barat.

Ekonomi Rusia juga menghadapi berbagai tekanan: pertumbuhan ekonomi yang stagnan bahkan sebelum penurunan harga minyak 2014 dan tantangan anggaran dan investasi dari harga minyak yang lebih rendah dan sanksi ekonomi pasca aneksasi Krimea. Komitmen terhadap disiplin anggaran dan alokasi sumber daya yang terukur telah dipertahankan. Namun, ada juga pergeseran retorika dan kebijakan utama menuju ekonomi yang lebih 'aman' termasuk kebijakan industri yang dimotori oleh sektor impor (Bloomberg, 2017).

Ada fitur-fitur utama dari lingkungan Rusia yang mengancam keberhasilan perubahan kebijakan semacam itu, tetapi sangat menghambat kebijakan. Hambatan tersebut termasuk banyak kelemahan kelembagaan, masalah isolasi, iklim, ukuran pasar, dan lokasi industri yang menyulitkan bagi sector industri Rusia untuk menjadi kompetitif di tingkat global. Kompetitor Barat tidak memiliki pengaruh menentukan terhadap ekonomi Rusia. Tetapi kompetitornya dapat meningkatkan biaya bagi perilaku Rusia sebagai Great Power, melalui pengurangan akses investasi dan teknologi kepada Rusia (Bloomberg, 2017).

Penutup

Tulisan ini telah membahas perilaku kebijakan luar negeri [polugri] Rusia di bawah presiden Vladimir Putin. Paper ini menunjukkan bahwa perilaku polugri Rusia era presiden Vladimir terlihat semakin asertif di panggung politik internasional. Terdapat bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa perilaku Rusia merupakan *great power* yang sedang bangkit.

Sikapnya kritis Rusia terhadap Barat, perilakunya terhadap negara-negara tetangga, intervensi militer dalam konflik di Suriah, aliansinya dengan Iran, serta aneksasi Rusia atas Semenanjung Krimea merupakan indikasi fenomena tersebut. Walaupun demikian, terdapat problem domestik untuk menopang perilaku sebagai *great power* yang asertif tersebut, yakni, Rusia terhambat dengan kemampuan ekonominya.

Bibliografi

- Alston, James Matthew (2019), *Inomic* "Russia's Economic Crisis" available at <https://inomics.com/insight/russias-economic-crisis-1377533>
- Bechev, Dimitar (2019), "Resurgent Russia: Myth and reality Is a new global order in the making under Putin's watch?" available at <https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/resurgent-russia-myth-reality-190217060009723.html>

- Carafano (2015). Carafano, James Jay (ed). (2015). *U.S. Comprehensive Strategy toward Russia*. Washington, DC: The Heritage Foundation. <http://thf-reports.s3.amazonaws.com2015/SR173.pdf>
- De Haas, M (2011) *Russia's Foreign Security Policy in the 21st Century: Putin, Medvedev and Beyond*. Abingdon: Routledge.
- Granholm, Niklas, et al. (2014). *A Rude Awakening. Ramifications of Russian Aggression towards Ukraine*. Stockholm: FOI
- Lo, Bobo, (2015). *Russia and the New World Disorder*. Brookings Inst. Press/Chatham House.
- Majumdar, Dave (2018), *The National Interest*, "The Rise of Russia's Military" available at <https://nationalinterest.org/feature/the-rise-russias-military-26339>
- McFaul, Michael (2007), "New Russia, New Threat: Working with the West is no Longer the Goal as the Kremlin Flexes its Muscle and Rethinks its Role in the World." Available at <https://www.globalpolicy.org/component/content/article/152/25812.html>
- Oliker, Olga (2009), *Russian Foreign Policy: Sources and Implication*, California: RAND.
- Tammen, Ronald L. et al. (2000). *Power Transitions: Strategies for the 21st Century*. New York: Seven Bridges Press.
- Tsygankov A.P. (2012) *Russia and the West from Alexander to Putin: Honor in International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bloomberg*. (2017). "Russian Economy Crawled to Growth With Recession in Rearview". 31 March

Eropanisasi di Uni Eropa

Mutia Hariati Hussin¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

Corresponding e-mail: mutiasuryo@yahoo.com

Abstrak



Uni Eropa sering digambarkan sebagai entitas yang sui generis. Sebagai sebuah entitas politik, Uni Eropa adalah gabungan karakter dari dua institusi yang sangat berbeda, jika bukan bertolak belakang, yakni institusi supranasional dan organisasi internasional. Label sui generis muncul karena ketidakmungkinan untuk mengidentikkannya sebagai sebuah entitas supranasional ataupun sebagai sebuah organisasi internasional. Tetapi, karakter sui generis cenderung tidak muncul dalam diskusi tentang Uni Eropa. Politik Uni Eropa cenderung dipahami melalui dua cara yang berbeda. Mereka yang sangat optimis memahami Uni Eropa melalui kerangka supranasionalisme, dimana Uni Eropa digambarkan sebagai sebuah entitas independen yang memiliki kepentingan yang bisa sangat berbeda dari kepentingan negara-negara anggotanya. Pada saat yang sama, supranasionalisme menjadi acuan teleologis Uni Eropa. Keberhasilan maupun kegagalan Uni Eropa dilihat sepenuhnya dari sejauh mana Uni Eropa bergerak ke arah supranasionalisme ini. Sebaliknya, bagi mereka yang pesimis, Uni Eropa berkembang sebagai konsekuensi dari interaksi kepentingan di antara negara-negara anggotanya. Uni Eropa tidak akan pernah menjadi entitas supranasional yang mandiri dari kepentingan nation-state pembentuknya. Kemajuan ataupun kegagalan Uni Eropa sangat ditentukan oleh kesediaan negara-negara anggotanya untuk bekerjasama. Pandangan yang kedua ini dikenal sebagai intergovernmentalisme.

Berkembangnya konsep Eropanisasi (*Europeanization*) pada tahun 1990-an memberikan alternatif yang lebih proporsional untuk menjelaskan Uni Eropa sebagai entitas sui generis. Konsep ini menghubungkan dua realitas, yakni Uni Eropa dan para nation-state anggotanya, sebagai realitas saling mempengaruhi. Konsep Eropanisasi berangkat dari asumsi bahwa integrasi regional yang berkembang menjadikan proses politik ke dalam regionalisme Uni Eropa berbeda. Eropanisasi tidak menempatkan Uni Eropa sebagai kekuatan supranasional yang menentukan, melainkan sebuah kekuatan transformatif yang mempengaruhi negara-negara anggotanya. Sebaliknya, negara-negara anggota juga dimungkinkan untuk mempengaruhi kebijakan di Uni Eropa.

Kata Kunci

Eropanisasi, Uni Eropa, Supranasionalisme, Regionalisme, Nation State

Pendahuluan

Perkembangan studi tentang Uni Eropa terus mengalami kemajuan selama beberapa dekade terakhir, hal ini tidak terlepas dari proses integrasi yang terjadi diantara negara-negara anggotanya. Menurut Haas, integrasi politik merupakan proses dimana aktor-aktor politik yang ada pada lingkup nasional/domestik mulai memberikan kepercayaan dan harapan politiknya pada lembaga yang memiliki yurisdiksi atas negara-negara anggotanya. (Paolo R. Graziano and Maarten P. Vink , 2013, hal. 32).

Integrasi Uni Eropa sebagai sebuah organisasi internasional tidak terlepas dari sejarah panjang pembentukannya. Proses ini dimulai sejak Negara-negara Eropa melakukan kolonisasi ke berbagai belahan dunia dengan tujuan kepentingan ekonomi. Sebagian besar negara koloni merupakan wilayah yang memiliki bahan mentah guna mencukupi kebutuhan industri yang berkembang, salah satunya adalah di Inggris sebagai awal revolusi industri. Pada saat itu istilah kolonialisme identik dengan usaha penaklukan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu wilayah baik secara paksa maupun dengan cara damai. Perkembangan kolonialisme dapat dibagi ke dalam 3 tahap. Pertama dari abad 15 hingga Revolusi industri (1763) yang memperlihatkan ekspansi dua Negara Eropa yaitu Spanyol dan Portugis. Kedua, setelah Revolusi Industri hingga tahun 1870-an. Ketiga, dari tahun 1870-an hingga tahun 1914 ketika meletusnya Perang Dunia I dan merupakan puncak pertikaian negara-negara di kawasan Eropa (Ferro, 1997, hal. 8-22).

Sejarah perkembangan kolonialisme dimulai ketika Vasco da Gama seorang berkebangsaan Portugis berlayar ke India pada tahun 1498 dalam rangka mencari sumber rempah-rempah yang kemudian diikuti oleh Inggris (Commonwealth) dan Belanda (Vereenigde Oostindische Compagnie-VOC). Seiring waktu tujuan kolonialisme yang pada awalnya adalah penguasaan wilayah untuk kepentingan ekonomi kemudian bertransformasi menjadi penjajahan. Hal ini menunjukkan bahwa kolonialisme merupakan salah satu bentuk proses integrasi yang lebih menitikberatkan pada aspek penaklukan oleh Negara-negara Eropa terhadap negara bangsa di luar kawasan Eropa. Aspek ini sangat penting karena kolonialisme membawa kebiasaan dan budaya Eropa berpengaruh terhadap budaya (bahasa) maupun kebiasaan di negara koloninya.

Pasca Perang Dunia I dan II, integrasi Negara-negara Eropa berlanjut dengan tercetusnya Deklarasi Schuman tahun 1950. Proses integrasi ini dimanifestasikan dalam bentuk Perjanjian Paris khususnya kerjasama batu bara dan baja (European Coal and Steel Community—1951). Perjanjian tersebut disetujui oleh enam Negara yaitu Jerman, Prancis, Italia, Belgia, Belanda dan Luxemburg yang menjadi cikal bakal penghapusan rivalitas lama antara Jerman dan Perancis, dan memberi dasar bagi pembentukan ‘Federasi Eropa’ yaitu kerjasama antara negara-negara yang semula berkonflik namun secara perlahan menjadi mitra dagang khususnya dalam komoditas batu bara dan baja. Perjanjian kedua yang menandai proses integrasi Negara-negara

anggota Uni Eropa adalah Perjanjian Roma. Perjanjian ini berhasil merumuskan kerjasama ekonomi yang lebih luas dalam kerangka Masyarakat Ekonomi Eropa (European Economic Community—EEC) dan regulasi yang mengatur energi atom (Euroatom) pada tahun 1958. Tujuan utama EEC Treaty yakni membentuk pasar bersama diantara negara-negara anggota melalui Custom Unions yang menghapus customs duties, import quotas dan berbagai hambatan perdagangan lain. EEC juga memberlakukan suatu Common Customs Tariff (CCT) vis-à-vis dengan negara ketiga (non-anggota) dan memberlakukan freedom of movement bagi persebaran barang, jasa, pekerja maupun modal. Hal ini secara bertahap mulai terealisasi dalam Perjanjian Schengen, khususnya untuk menjamin pergerakan bebas manusia baik warga negara anggota maupun warga negara lain. Keseluruhan isi Perjanjian Roma menjadi awal mula terbentuknya Komunitas Eropa (European Communities—EC). Setelah itu, tahun 1973 dibuka perluasan keanggotaan (enlargement) dengan masuknya Denmark, Irlandia dan Inggris, serta disusul Yunani yang bergabung pada tahun 1981 (Nello, 2005, hal. 30).

Perjanjian berikutnya yang menandai proses integrasi Negara-negara anggota Uni Eropa adalah pembentukan Pasar Tunggal Eropa tahun 1984 melalui kerangka kerjasama Single European Act. Kerjasama ini berasal dari Komisi Eropa yang didasarkan pada White Paper di bawah kepemimpinan Jacques Delors. Perjanjian ini adalah keberlanjutan dari perjanjian EEC yang diperluas kajiannya terutama menyangkut kerjasama politik yaitu European Political Cooperation sebagai forum koordinasi dan konsultasi antar pemerintah (Ian Bache; Stephen George, 2006, hal. 160). Dua tahun setelah Single European Act, kembali dilakukan proses perluasan keanggotaan, dimana tahun 1986 Spanyol dan Portugal menjadi bagian dari komunitas (Nello, 2005, hal. 30).

Proses integrasi dilanjutkan dengan melaksanakan Perjanjian Maastricht pada tahun 1992 dan berhasil merumuskan tiga pilar yaitu Treaties establishing European Community yang mencakup traktat terdahulu seperti ECSC, Euratom dan EEC sebagai bentuk upaya integrasi dan kerjasama ekonomi yang sangat kuat, Common Foreign and Security Policy (CFSP) dalam aspek pengambilan kebijakan luar negeri dan Justice and Home Affairs (JHA) dalam aspek peradilan dan hukum. Ketiga pilar tersebut secara langsung menandai terbentuknya Uni Eropa sebagai organisasi internasional (Ian Bache; Stephen George, 2006, hal. 169). Pada tahun 1995 proses perluasan anggota kembali dilakukan yaitu bergabungnya Austria, Finlandia dan Swedia. Tahun 1997 dibuka negosiasi pertama dengan beberapa Negara aplikasi seperti Polandia, Hungaria, Rep. Ceko, Estonia, Slovenia, dan Cyprus, sekaligus pelaksanaan The Treaty of Amsterdam. Negosiasi kedua dilanjutkan tahun 1999 dengan Negara aplikasi yaitu Bulgaria, Latvia, Lithuania, Rumania, Slovakia, Malta (Nello, 2005, hal. 30). Proses integrasi berlanjut dengan adanya perjanjian The Treaty of Nice pada tahun 2000 dan bergabungnya Kroasia pada tahun 2013.

Uni Eropa dalam proses integrasinya sering kali digambarkan sebagai entitas yang Sui Generis atau satu-satunya. Artinya Uni Eropa sebagai sebuah entitas politik yang merupakan gabungan karakter dari dua institusi yang sangat berbeda yaitu institusi supranasional dan organisasi internasional. Penamaan Sui Generis muncul karena sulitnya mengidentifikasi Uni Eropa sebagai sebuah entitas supranasional atau sebagai sebuah organisasi internasional. Sui Generis dalam Uni Eropa dapat dilihat pada aspek bahwa Uni Eropa bukanlah sebuah negara yang merujuk pada 3 aspek yaitu wilayah, masyarakat dan kedaulatan. Pertama, wilayah menyangkut batas-batas teritori dari seluruh negara anggota. Kedua, masyarakat menyangkut seluruh individu di negara anggota. Ketiga, kedaulatan yaitu transfer kepercayaan kepada institusi dalam menentukan kebijakan. Dari ketiga aspek tersebut, aspek kedaulatan yang belum dapat diwujudkan karena kedaulatan otoritasnya masih dilimpahkan pada masing-masing negara anggota.

Namun, Uni Eropa juga bukan organisasi internasional yang merujuk pada ciri organisasi internasional yang tidak memiliki kapasitas hukum sedangkan Uni Eropa memiliki sumber hukum yang independen. Selain itu, Lembaga-lembaga di dalam Uni Eropa adalah contoh terbaik dari perbedaan antara Institusi Uni Eropa dengan organisasi Internasional, yaitu pembagian fungsi-fungsi setiap lembaga dalam proses pengambilan kebijakan seperti Dewan, Komisi dan Parlemen.

Metode Penelitian

Proses integrasi yang panjang dan kompleksitas kerjasama di Uni Eropa membagi menjadi dua kerangka didalamnya yang disebut Supranasional dan Intergovernmental. Supranasional mengacu pada tujuan yang independen atau terpisah dari kepentingan negara-negara anggota, dimana sepenuhnya tujuan dari kebijakan tersebut guna kebaikan dan kemajuan bersama. Sedangkan Intergovernmental mengacu pada konsekuensi maupun interaksi antara negara anggota dalam rangka pemenuhan kepentingan nasional. Dalam hal ini, kemajuan ataupun kegagalan Uni Eropa terkait kebijakan yang diambil akan sangat ditentukan oleh kesediaan ataupun keengganan negara anggota untuk bekerjasama satu sama lain. Intergovernmental dapat dilihat dari berbagai kebijakan dalam proses integrasi seperti yang cenderung diabaikan misalnya penyelesaian krisis (1965) yang sebut 'empty chair crisis' dalam perjanjian EEC, penciptaan sistem moneter Eropa melalui mata uang Euro (1979), dan single european act (1986) (Palmowski, 2011, hal. 633) serta permasalahan pengungsi yang terjadi sejak tahun 2011 hingga 2017.

Sebagai upaya untuk mengkaji lebih dalam Supranasionalisme dan Intergovernmentalism maka digunakan sebuah pendekatan yang disebut Eropanisasi (Europeanization). Tidak seperti istilah eropanisasi pada periode kolonialisme, Eropanisasi saat ini dianggap sebagai pendekatan yang dapat menjelaskan tentang konstruksi dan tahapan-tahapan perkembangan Uni Eropa sejak awal pembentukannya hingga saat ini. Secara

tradisional, Eropanisasi dipahami secara luas sebagai interaksi dialektis antara Uni Eropa dan negara-negara anggota. Penelitian-penelitian sebelumnya tentang Eropanisasi cenderung mengadopsi kerangka kerjasama institusional, terutama bagaimana proses pembangunan institusi Uni Eropa berdampak pada kebijakan politik domestik di negara anggota. Tulisan ini mencoba menjelaskan tentang proses Eropanisasi yang lebih luas yaitu bagaimana Uni Eropa mempengaruhi kebijakan atau perilaku aktor domestik sebagai supranasional dan bagaimana kebijakan nasional nantinya dapat mempengaruhi keputusan Uni Eropa sebagai intergovernmental melalui indikator integrasi ekonomi maupun politik. Dengan kata lain eropanisasi menjadi sebuah kekuatan transformatif yang bisa mempengaruhi negara-negara anggotanya.

Konsep Eropanisasi

Eropanisasi telah berkembang selama beberapa dekade terakhir khususnya dalam studi Uni Eropa. Studi ini berkembang dari dinamika proses integrasi pasar tunggal antara Negara-negara Uni Eropa yang dilanjutkan dengan adanya pembangunan ekonomi dan terbentuknya mata uang bersama yaitu Euro (Bulmer, 2008, hal. 46). Radaelli juga menjelaskan bahwa Eropanisasi yang berkembang adalah kunci dalam studi Uni Eropa dan menjadi komponen utama untuk memahami kajian tentang integrasi Eropa pada studi ilmu politik maupun studi kebijakan publik (Radelli, 2004, hal. 1). Dalam mendefinisikan konsep Eropanisasi muncul perdebatan dari para peneliti studi Eropa, dua hal yang menjadi pertanyaan, pertama proses apa yang dipahami sebagai Eropanisasi? Kedua, apa hubungan sebab akibat yang ingin dijelaskan oleh konsep Eropanisasi?

Olsen (2002) membagi lima makna dari penggunaan istilah Europeanisasi yaitu: Pertama, Eropanisasi digunakan untuk melihat perubahan batas eksternal, seperti perpanjangan kebijakan, aturan, persyaratan institusional dan nilai-nilai di negara anggota-anggota baru pada tahun 2004. Kedua, Eropanisasi digunakan untuk mengidentifikasi pengembangan institusi di tingkat Eropa, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas tata kelola pusat di Uni Eropa dan implikasinya dalam membatasi peluang bagi para aktor politik di tingkat domestik. Ketiga, Eropanisasi digunakan sebagai istilah yang mencakup penetrasi sentral dalam sistem pemerintahan nasional. Hal ini mencakup proses penyesuaian antara struktur kelembagaan, kebijakan, pola perilaku politik pada tingkat yang lebih rendah dari sistem politik multi-level di Eropa. Keempat, Eropanisasi sebagai istilah digunakan untuk melihat proses Uni Eropa yang berupaya untuk mengeksport nilai-nilainya melalui kebijakan luar negeri ke negara-negara atau wilayah yang berada di luar wilayah Eropa itu sendiri. Proses ini dapat berlangsung dari satu negara anggota Uni Eropa ke negara lain melalui mediasi yang dilakukan oleh Uni Eropa. Kelima, Eropanisasi digunakan sebagai proyek penyatuan politik terutama dalam pengembangan kapasitas di tingkat Uni Eropa yang bertujuan mewujudkan Eropa yang lebih kuat secara politis (Bulmer, 2008, hal. 47).

Secara sederhana Olsen menjelaskan bahwa perbedaan utama pemahaman tentang Eropa berkaitan dengan transfer kebijakan, pengaturan kelembagaan, maupun nilai-nilai dari Uni Eropa dan pengembangan kapasitas Eropa untuk menuju integrasi yang lebih kuat. Penjelasan lain untuk mendefinisikan Eropanisasi datang dari Radaelli yang mengambil sudut pandang atau pendekatan budaya. Definisi Eropanisasi yang dipaparkan oleh Radaelli menekankan pada aspek munculnya sistem tata kelola yang dikonsolidasikan dalam kelembagaan atau supranasional dan nantinya akan memiliki dampak pada institusi nasional negara-negara anggota Uni Eropa, yaitu:

Europeanisation are processes of construction, diffusion, institutionalisation of formal and informal rules, procedures, policy paradigms, styles, ‘ways of doing things’ and shared beliefs and norms which are first defined and consolidated in the making of EU decisions and then incorporated in the logic of domestic discourse, identities, political structures and public policies. (GRÜNHUT, 2017, hal. 166).

Bélanger menjelaskan hubungan keduanya menggunakan tiga aspek berbeda namun saling terkait secara epistemologi. Pertama, menempatkan Eropanisasi sebagai reaksi domestik terhadap penguatan (strengthening) dan pelebaran (widening) Uni Eropa atau dikenal sebagai top-down proses. Proses ini menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan Uni Eropa berdampak pada pengembangan kebijakan nasional negara anggota, terutama pada bidang kelembagaan yang mana Uni Eropa dianggap sebagai penentu dari perubahan tersebut. Kedua, proses bottom-up yaitu dampak integrasi Uni Eropa pada proses politik dan sosial di tingkat domestik negara-negara anggota. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa aspek integrasi yang progresif ada pada tingkat organisasi (Uni Eropa) dalam praktik domestik. Ketiga, cross-loading yaitu bentuk Eropanisasi yang lebih horizontal melalui transfer ide dan praktik di seluruh negara anggota (dimungkinkan untuk tidak melibatkan Uni Eropa secara langsung). Karakteristik Eropanisasi bergantung pada asumsi bahwa transfer politik terjadi diantara Uni Eropa dan negara anggotanya. Oleh karena itu, Eropanisasi menyangkut dua entitas politik yang terpisah, dimana Uni Eropa dipandang sebagai supranasional sedangkan nasional sebagai lingkup domestik. (Bélanger, 2014, hal. 1-3).

Oleh karenanya konsep Eropanisasi berangkat dari asumsi bahwa integrasi regional yang berkembang menjadikan proses politik ke dalam regionalisme Uni Eropa berbeda, dimana Eropanisasi tidak menempatkan Uni Eropa sebagai kekuatan supranasional yang menentukan, melainkan sebuah kekuatan transformatif yang bisa mempengaruhi negara-negara anggotanya. Sebaliknya, negara-negara anggota juga dimungkinkan untuk ambil bagian dalam mempengaruhi kebijakan di Uni Eropa.

Analisis Eropanisasi di Uni Eropa

Awal mula dibentuknya komunitas Eropa ditandai dengan kemunculan Schuman Declaration pada 9 Mei 1950 yang mengubah pola hubungan antar negara di kawasan Eropa. Perubahan tersebut adalah transformasi bagi perkembangan komunitas Eropa

yang mulai mengaburkan definisi dari teritorial dan administratif dari masing-masing negara. Deklarasi dibuka dengan adanya pengakuan dari komunitas Eropa terkait bahaya ataupun ancaman untuk mencapai perdamaian, khususnya untuk menghindarkan komunitas dari potensi konflik dan perang antar negara. Penekanan yang ada dalam deklarasi ini bergeser dari yang semula ditetapkan sebelum Perang Dunia II menjadi bentuk unifikasi politik, dimana menunjukkan adanya keinginan untuk melindungi rakyat Eropa agar tidak kembali berkonflik satu sama lain. Peran komunitas menjadi positif dan mampu menjalankan proses Eropanisasi terutama sebagai pencegahan untuk melawan konflik dan kekerasan. Komunitas dibentuk dalam rangka menciptakan tatanan baru yang secara diskursif menolak opsi kekerasan dalam proses interaksinya dengan masyarakat Eropa. Hal ini secara langsung mewujudkan dan memelihara hubungan damai antar negara dan menjadi basis Eropanisasi. Makna komunitas dalam hal ini adalah bagaimana negara menyerahkan kedaulatannya secara damai kepada otoritas Eropa, dimana komunitas tersebut akan bersatu dan bertindak sebagai kekuatan struktural (Bélanger, 2014, hal. 8).

Deklarasi berlanjut dengan menjadi sebuah komunitas baru melalui pembentukan komunitas batu bara dan baja Eropa. Komunitas ini secara sederhana telah menggabungkan kepentingan ekonomi dari beberapa negara yang sebelumnya saling bertentangan satu sama lain. Artinya, deklarasi ini menjadi proses penyelesaian konflik dan konsiliasi antar aktor untuk mencapai perdamaian dan rekonsiliasi antara Jerman dan Prancis. Hal ini tertuang dalam Deklarasi Schuman ayat 3 yaitu: *The coming together of the nations of Europe requires the elimination of the age-old opposition of France and Germany. Any action taken must in the first place concern these two countries* (Bélanger, 2014, hal. 9).

Secara tidak langsung wacana Schuman telah membentuk politik Eropa yang dilegitimasi bersama-sama untuk mewujudkan perdamaian dengan membentuk instrumen legislatif Eropa yang sah. Inilah yang menunjukkan bagaimana Eropanisasi menjadi cara yang legitimate dan unik untuk memperluas kerjasama di Eropa. Rekonsiliasi antara Prancis dan Jerman adalah inti dari fondasi Komunitas Eropa. Gerakan politis ini dengan cepat menjadi pembuka perbatasan antara kedua negara, dilanjutkan dengan semua negara anggota. Tujuan dari konstruksi ini adalah menjaga perdamaian, dan menumbuhkan kedalaman dan perluasan interkoneksi politik di Eropa. Ini mengarah pada penciptaan komunitas politik yang ditandai adanya keinginan untuk memutus siklus kekerasan, dan menjaga perdamaian melalui penciptaan komunitas politik yang melintasi batas negara.

Interkoneksi politik di Eropa telah menciptakan perluasan keanggotaan terhadap komunitas Eropa yang juga berperan dalam proses integrasi. Perluasan keanggotaan bertujuan untuk memperluas wilayah komunitas yang kekhasannya adalah tidak memiliki perbatasan. Proses perluasan keanggotaan menggambarkan sifat spesifik dari tatanan Uni Eropa yang dimulai pada tahun 1973 (Inggris, Denmark, Irlandia),

gelombang kedua ke berbagai negara di selatan (Yunani, Spanyol, Portugal antara tahun 1981 dan 1986), ekspansi ke negara-negara netral (Austria, Finlandia dan Swedia tahun 1995) dan negara-negara Timur (12 Negara Anggota baru antara tahun 2004 dan 2007). Periode negosiasi keanggotaan Uni Eropa diantaranya (Bélanger, 2014, hal. 12)

Tabel 1. Periode Aksesinya Negara-negara anggota Uni Eropa

Country	Signature	Ratification
UK, Ireland, Denmark	January 22, 1972	January 1 st , 1973
Greece	May 28, 1979	January 1 st , 1981
Spain, Portugal	June 12, 1985	January 1 st , 1986
Austria, Finland, Suede	June 24, 1994	January 1 st , 1995
Cyprus, Estonia, Hungary, Poland, Czech Republic, Slovenia, Latvia, Lithuania, Malta, Slovakia	April 16, 2003	May 1 st , 2004
Bulgaria, Romania	April 25, 2005	January 1 st , 2007

Sumber: M. E. Bélanger, *Europeanization as a foundation of the European construction*, 2014.

Penutup

Proses perluasan politik dan teritorial sebagai implementasi proses Eropanisasi tidak hanya terkait dengan konteks cara politik Eropa dibangun, dimana Uni Eropa juga berakar pada sesuatu yang lebih luas terutama visi untuk menyatukan orang Eropa agar mentransfer nilai-nilai yang sama, sehingga menjadi bagian dari Eropa. Maknanya lainnya adalah menjaga perdamaian dengan menghilangkan batas-batas antar negara. Wacana Eropanisasi ini yang kemudian mendorong pembangunan di Eropa dan memungkinkan terjadinya ekspansi maupun pendalaman kerjasama politik yang lebih luas.

Konsep Eropanisasi diinterpretasi ke dalam beberapa variabel yaitu wilayah/teritorial, perubahan pola pemerintahan, dan konstelasi kekuasaan (Julian Clark and Alun Jones , 2008, hal. 305). Variabel pertama yaitu wilayah, dimana menggambarkan Eropanisasi sebagai transmisi pengetahuan yang terkodifikasi antar Negara-negara Eropa dan menyiratkan bahwa kedekatan wilayah, pertukaran/transaksi baik sosial maupun ekonomi serta afiliasi historis dan sosial seluruhnya berkontribusi terhadap terbentuknya Eropa (Pilar Supranasional—European Community).

Variable kedua adalah pemerintah yang menggambarkan Eropanisasi sebagai skala pemerintahan supranasional melalui kegiatan lembaga-lembaga di Uni Eropa. Interpretasi Eropanisasi dalam kerangka supranasional dapat dilihat melalui beberapa kategori. Pertama, adanya lembaga-lembaga Uni Eropa yang menentang peran negara

bangsa sebagai aktor yang memiliki otoritas politik secara penuh (Intergovernmental Pillar—Common Foreign and Security Policy dan Justice and Home Affairs). Kedua, eropanisasi sebagai rekonfigurasi dari otoritas teritorial yang menggambarkan supranasional sebagai skala otoritas yang lebih dominan atas kebijakan domestik/nasional. Misalnya, transaksi politik dimana terdapat lembaga yang bertugas untuk memediasi maupun adanya mekanisme pengambilan kebijakan/mandat pemerintah (Council of Minister). Hal ini sebagai hasil dari difusi lembaga-lembaga Uni Eropa (formal/non-formal) dari tingkat supranasional ke tingkat nasional. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari integrasi Eropa yang telah dimodifikasi sebagai bentuk tawar-menawar elit dan pembentukan wacana hegemonik (teknokratis) oleh elit politik nasional maupun supranasional (Julian Clark and Alun Jones , 2008, hal. 307).

Variabel ketiga yaitu konstelasi kekuasaan yang menggambarkan Eropanisasi sebagai perubahan *multidirectional* yang sedang berlangsung dalam pemerintahan dan terdiri dari (1) proyeksi kepentingan nasional dan identitas untuk membentuk kebijakan supranasional, (2) asimilasi oleh aktor negara dari kebijakan Uni Eropa dan preferensi politik, dan (3) difusi pengetahuan/prosedural antar negara. Oleh karena itu Europeanisasi menjadi upaya untuk menangkap hubungan dialektis antara aktor dan sistem, negara bangsa dan Uni Eropa sebagai entitas institusional. Eropanisasi merepresentasikan transformasi kenegaraan, dengan perubahan proses yang menggerakkan aktivitas para aktor politik dan kebijakan sedemikian rupa, sehingga seiring waktu menjadi semakin sulit untuk mendefinisikan aktor 'lokal', 'nasional' atau 'supranasional' (Julian Clark and Alun Jones , 2008, hal. 307).

Bibliografi

- Julian Clark and Alun Jones . (2008). *The Spatialities of Europeanisation: Territory, Government and Power in 'EUrope'* . *Transactions of the Institute of British Geographers, New Series, Vol. 33, No. 3* , pp. 300-318 .
- Paolo R. Graziano and Maarten P. Vink . (2013). *Europeanization: Concept, Theory, and Methods* . Dalam C. L. Simon Bulmer, *The Member States of the European Union, Edition: Second Edition* (hal. 31-54). United Kingdom: Oxford University Press.
- Bélanger, M.-È. (2014). *Europeanization as a foundation of the European construction* . Dalam T. K. Ramona Coman, *Europeanization and European Integration: From Incremental to Structural Change* (hal. Chapter 6, Page 1). London: Palgrave Macmillan.
- Bulmer, S. (2008). *Theorizing Europeanization*. Dalam S. Bulmer, *Europeanization* (hal. 46). London: Palgrave Macmillan.
- Ferro, M. (1997). *Colonialization: A Global History*. London: Routledge.
- GRÜNHUT, Z. (2017). *Concepts, approaches and methods on europeanisation – a meta-analysis* . *EASTERN JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES* Volume 8, Issue 1, June , 157-176.

- Ian Bache; Stephen George. (2006). Politics in the European Union Second Edition. New York: Oxford University Press.*
- Nello, S. S. (2005). The European Union: Economics, Policies, and History. United Kingdom: McGraw-Hill Education.*
- Palmowski, J. (2011). The Europeanization of the Nation-State. Journal of Contemporary History, 631-657.*
- Radelli, C. (2004). Europeanization: Solution or Problem? the ESRC/UACES Conference on the Europeanization of British Politics (hal. 1). Sheffield Town Hall: the ESRC/UACES Conference on the Europeanization of British Politics.*
- Risse, T., M.G. Cowles, and J.A. Caporaso (2001) Europeanization and Domestic Change: Introduction. In M.G. Cowles, J.A. Caporaso and T. Risse (eds), Transforming Europe: Europeanization and Domestic Change. Ithaca, NY: Cornell University Press, pp. 1–20.*
- Conway, M., & Patel, K. (2010). Europeanization in the twentieth century : Historical approaches(The palgrave macmillan transnational history series). Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.*
- Conway, M., & Patel, K. (2010). Europeanization in the twentieth century : Historical approaches(The palgrave macmillan transnational history series). Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.*
- Hix, S., & Høyland, B. K. (2011). The political system of the European Union. Palgrave Macmillan.*
- Jan, P. (2011). The europeanization of the nation-state. Journal of Contemporary History, 46(3), 631-657.*

Pembangunan Tarakan Sebagai Pangkalan Aju Militer di Wilayah Kalimantan Utara

Andrea Abdul Rahman Azzqy¹⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Budi Luhur, Jakarta
Corresponding email: andrea.abdulrachman@budiluhur.ac.id

Abstract



One point of securing the border is from the regionalism perspective. Analysis of the role and whereabouts of TNI Military Forces, Battleships and Combat Aircraft in the outer border regions of Indonesia, can be correlated with the conditions of the area, as well as various national interests that must be secured. Region is defined as a group of countries that have geographical proximity because it is in one particular region. The main difference between realist and institutionalist (idealist) perspectives is about the most important aspects in determining attitudes towards regional security. The realists consider that the Military is the most important factor of Security, this can be analogous to the Corbett concept. Meanwhile, institutionalists say it is not only the military which is the most important aspect of regional security, but also the political and social fields. This can be analogous to the concept of Mahan. Therefore, collaboration from both perspectives is expected to be able to answer the problems that develop in the North Kalimantan border region. In line with national interests, border security activities are efforts to protect the existence of the state, which is marked by the protection of sovereignty, population, and territory from various types of threats. This conception is part of an understanding of national security, which is essential "the ability of the state to protect what is determined as core values, where its achievement is a continuous process, using all elements of force and available resources, and covers all aspects of life". In the strategic security scheme, especially in border areas, the state does not hesitate to prioritize methods of military reinforcement, one of which is the construction of forward military bases.

Kata Kunci

Military Base, Tarakan, State Border, National Security

Latar Belakang

Masalah pengelolaan dan pertahanan di wilayah perbatasan sangat terkait erat dengan konsepsi dasar tentang negara sebagai entitas yang memiliki kedaulatan, penduduk, dan wilayah serta tafsir atau persepsi atas ancaman yang dihadapi. Dengan demikian, pengelolaan dan pertahanan wilayah perbatasan dapat disimpulkan sebagai segala

upaya untuk mewujudkan eksistensi suatu negara, yang ditandai dengan terlindunginya kedaulatan, penduduk dan wilayah dari pelbagai jenis ancaman. Pengelolaan dan pertahanan wilayah perbatasan NKRI juga harus dipahami sebagai fungsi-fungsi yang bersifat permanen, selama eksistensi negara ada. Yang selalu akan berubah dan mengalami penyesuaian adalah, “Analisis ancaman (*threat assessment*) yang mempengaruhi besaran sumber daya dan kekuatan yang diperlukan dan bagaimana sumber daya dan kekuatan itu diorganisir untuk keperluan pengelolaan dan pertahanan wilayah perbatasan.” Analisis ancaman yang menentukan apakah ancaman tersebut bersifat internal atau eksternal, serta apakah penanganannya bersifat bertahan (*defensif*) atau menyerang (*offensif*). Termasuk apakah penanganan pengelolaan dan pertahanan wilayah perbatasan akan lebih dititikberatkan pada kawasan tertentu dengan memperhatikan derajat ancaman atau optensi ancaman berdasarkan kondisi geografis sebuah negara.

Berhubungan dengan masalah pengembangan wilayah perbatasan (antar-negara) khususnya di bagian utara Kalimantan, yakni Provinsi Kalimantan Utara, menjadi semakin krusial dan perlu mendapatkan perhatian serius, baik pemerintah pusat maupun daerah. Selama ini harus dipahami bahwa pembangunan sosio-ekonomi di wilayah perbatasan cenderung terabaikan, sehingga disadari secara realistis, jika kabupaten perbatasan semisal Kabupaten Malinau maupun Kabupaten Kutai Barat tergolong sebagai kabupaten tertinggal di Indonesia. Kondisi ketertinggalan wilayah tadi sering memunculkan sindiran bahwa wilayah perbatasan merupakan halaman belakang “*backyards*” dari negara Indonesia. Seiring dengan mencuatnya konflik antara Indonesia dan Malaysia tentang blok laut Ambalat dan potensi konflik serta keamanan dengan Filipina, terutama dalam masalah maritim dan terorisme, muncul pula kesadaran dan komitmen yang lebih baik dari jajaran pemerintah (baik Pusat maupun Daerah) untuk mengubah wajah perbatasan sebagai “halaman depan”. Perubahan paradigma ini jelas menuntut perubahan kebijakan, baik menyangkut prioritas penetapan program pembangunan, alokasi anggaran pembangunan daerah, terutama menyangkut aspek pertahanan dan keamanan di wilayah tersebut.

Fokus bahasan adalah Kota Tarakan, yang terdiri dari 4 kecamatan dan 18 kelurahan. Keempat kecamatan tersebut adalah Tarakan Timur, Tarakan Tengah, Tarakan Barat dan Tarakan Utara. Luas wilayah Kota Tarakan adalah $\pm 657,33$ km² yang terdiri dari daratan seluas $\pm 250,8$ km² dan lautan seluas $\pm 406,53$ km². Kota Tarakan terletak di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang merupakan kota pulau, Tarakan menjadi salah satu kota terbesar kedua setelah ibukota provinsi Kaltara yaitu Tanjung Selor. Posisi strategis yang dimiliki oleh Tarakan adalah sebagai pintu gerbang dan halaman depan Indonesia yang menghadap ke Malaysia dan Ambang Batas Laut (Ambalat) antara Indonesia, Malaysia serta Filipina.

Implementasi kebijakan pembangunan kekuatan yang berupa pangkalan militer di pulau Tarakan tersebut telah terwujud melalui Peraturan Daerah Kota Tarakan tahun

2012, mengenai “Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012 – 2032”¹. Indikasi terukur dari penggalian fakta menunjukkan bahwa, pemerintah pusat dan daerah berupaya secara konseptual dan rencana pelaksanaan teknisnya dapat menghadirkan sinergitas antara rencana tata ruang daerah dengan tata ruang pertahanan, sehingga perkuatan pertahanan nasional dapat terakomodir, utamanya adalah pada sisi pencapaian tujuan, berupa menciptakan perkuatan pertahanan dan keamanan dalam bentuk pangkalan militer, menaikkan status pangkalan militer eksisting, berujung pada jawaban dari keinginan pemerintah sendiri dalam konteks daya tangkal atau *deterrence*.

Berdasarkan dokumen “Perkembangan Lingkungan Strategis dan Prediksi Ancaman Tahun 2008” yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Republik Indonesia pada Januari 2008, dalam bab Lingkungan Strategis Regional, saat ini yang perlu diperhatikan Indonesia adalah situasi di kawasan Asia Tenggara, yaitu isu stabilitas keamanan regional yang mewarnai kawasan ini, seperti konflik yang bersumber pada klaim teritorial, keamanan jalur pelayaran dan perdagangan, terorisme, perompakan, bajak laut dan penyelundupan. Potensi ancaman yang juga dijabarkan dalam dokumen tersebut, salah satunya adalah keamanan perbatasan. Permasalahan perbatasan dengan negara tetangga masih banyak yang tersisa, dan diantaranya rawan menjadi potensi konflik terbatas dengan Indonesia. Permasalahan perbatasan di Malaysia, perairan Ambalat, dan penerbangan ilegal yang melewati wilayah udara Indonesia.

Penulisan kajian ini membahas wilayah udara di dalam wilayah tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Tiga negara dianggap mewakili wilayah-wilayah yang dicakup dalam bahasan ini, adapun peristiwa terakhir yang terjadi terkait pelanggaran udara nasional, yaitu mengenai masuknya sebuah pesawat asing yang masuk kedalam wilayah udara Republik Indonesia tanpa izin, pesawat tersebut diawaki oleh pilot yang berkewarganegaraan Amerika Serikat dan menjalankan sebuah penerbangan khusus dari arah Filipina. Selain kejadian tersebut, juga terdapat kontestasi atau perebutan kendali mengenai wilayah Ambalat (ambang batas laut) di area selat sulawesi yang diperebutkan antara Indonesia dan Malaysia. Hal ini juga selaras dengan pernyataan Menko Polhukam Wiranto mengenai pengamanan perbatasan di wilayah Indonesia, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara 2019. Wiranto menyebutkan ada sekitar 1.400 rute yang tak resmi di perbatasan Indonesia dengan Malaysia di wilayah Kalimantan Utara. Adanya jalur ilegal tersebut menyebabkan berbagai permasalahan, dari penyelundupan narkoba hingga illegal logging².

¹ Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan tahun 2012-2032. Pemerintah Daerah Kota Tarakan 2012.

² Wiranto: Membangun dari Perbatasan Bukan Omong Kosong. Republika. <https://nasional.republika.co.id/berita/pom/luq428/wiranto-membangun-dari-perbatasan-bukan-omong-kosong>. Diakses 28 September 2019. 20.14 WIB.

Kondisi dunia internasional pasca dekade 1990-an atau secara konseptual dalam kajian hubungan internasional dikenal dengan era pasca perang dingin, telah menciptakan transformasi baru secara dinamis pada struktur tatanan global. Tatanan yang bersifat unipolaritas pada dekade 1990-an telah berganti menuju struktur multipolaritas atau bahkan banyak pengamat yang menyebutnya sebagai era non-polaritas seiring dengan mulai tumbuh dan terlibatnya berbagai aktor hubungan internasional dengan berbagai tingkat kekuatannya³.

Namun, di tengah kompleksitas keterlibatan berbagai aktor global tersebut, sketsa struktur tatanan global tetap menjadi suatu wilayah yang dapat digambarkan secara gamblang, termasuk didalam dimensi aktor global yang terlibat. Indonesia menjadi salah satu kekuatan aktor Regional-Global yang pada waktu tersebut geliat dan pengaruhnya dapat diperhitungkan tidak saja dalam skala regional, namun juga secara global. Begitu juga eksistensi ini masih terjaga hingga saat ini, di tengah kompleksitas hubungan internasional abad 21. Barry Buzan, dkk (1998) dalam buku *Security: A New Framework for Analysis* melihat konsep keamanan dari cara pandang yang berbeda, 'narrow' vs 'wide' conceptions. Buzan membedakan cara pandang tradisional yang mengidentifikasi keamanan secara militer pada level negara menjadi fokus dalam isu-isu keamanan. Sedangkan dalam cara pandang non-tradisional, batasan isu keamanan dalam level yang bervariasi menjadi fokus dalam isu-isu keamanan modern. Konsep yang luas ini melihat isu-isu lingkungan, manajemen sumber daya alam, penyebaran penyakit, kejahatan transnasional dan krisis ekonomi sebagai isu-isu keamanan⁴.

Dalam pendekatan tradisional, keamanan secara sederhana diartikan sebagai keamanan sebuah negara yang dapat diancam oleh kekuatan militer negara lain dan harus dipertahankan melalui kekuatan militer sendiri⁵. Dalam pendekatan ini, negara (*state*) menjadi subyek dan obyek dari upaya mengejar kepentingan keamanan. Pandangan kelompok ini menilai bahwa semua fenomena politik dan hubungan internasional adalah fenomena tentang negara. Dalam alam pemikiran tradisional ini negara menjadi inti dalam upaya menjaga keamanan negara⁶. Menurut kelompok ini pula, keamanan didefinisikan secara terbatas pada hubungan antara negara-bangsa meliputi berbagai persoalan seperti keseimbangan kekuatan (*balance of power*) dan strategi militer. Di masa lalu, sebagian besar peneliti dan pejabat pemerintah sering menempatkan ancaman terhadap keamanan nasional sebagai prioritas utama di antara

³ Muna, Adriana Elisabeth, Wuryandari, & Sriyanto, 2011, hal. 139

⁴ Maley, Tom. 2010. *The Concept of Security in the Modern World*. Modul Kuliah Universitas Pertahanan Indonesia, Jakarta 2011.

⁵ David Mutimer, *Beyond Strategy: Critical Thinking and the New Security Studies*, dalam *Contemporary Security and Strategy*, Craig A Snyder (ed), (London: Macmillan Press Ltd, 1999), halaman 77.

⁶ Edy Prasetyono, *Konsep-Konsep Keamanan*, 2006. dalam *Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia*, Indra J Piliang, Edy Prasetyono, Hadi Soesastro (eds), halaman 267-269.

semua masalah keamanan, misalnya, konflik militer, terorisme, separatisme, ekstrimisme agama, penyelundupan narkoba atau keamanan laut.⁷

Dalam Buku Putih Pertahanan⁸, ancaman tradisional ini digolongkan ke dalam ancaman militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi dan dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat pula terjadi dalam bentuk pemberontakan bersenjata. Pemberontakan tersebut pada dasarnya merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri, tetapi pemberontakan bersenjata tidak jarang disokong oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun secara tertutup atau tersamar.

Selanjutnya, seiring dengan berakhirnya perang dingin, diskursus mengenai keamanan pun bergeser tidak lagi hanya terfokus pada aktor negara. Berbeda dengan pendekatan tradisional, konsepsi keamanan dengan pendekatan non-tradisional ditekankan kepada kepentingan keamanan pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actors*). Perkembangan isu-isu strategis seperti globalisasi, demokratisasi, penegakan HAM dan fenomena terorisme telah memperluas cara pandang dalam melihat kompleksitas ancaman yang ada dan mempengaruhi perkembangan konsepsi keamanan. Ancaman tidak lagi hanya berupa ancaman militer tetapi juga meliputi ancaman ideologi, ancaman politik, ancaman sosial budaya dan ancaman ekonomi.

Konsepsi ini berkembang seiring dengan menurunnya intensitas ancaman militer yang menjadikan kedaulatan negara sebagai target, akan tetapi di sisi lain menunjukkan adanya peningkatan ancaman terhadap keamanan manusia pada aspek lain seperti kemiskinan, penyakit menular, bencana alam, kerusakan lingkungan hidup dan lainnya⁹. Pada akhirnya Indonesia sebagai negara berdaulat merasa perlu untuk merespon isu-isu keamanan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Terlebih lagi banyak faktor yang menghadapkan negara dalam posisi siaga dalam situasi ketidakpastian dari luar negeri yang berupa ancaman tradisional maupun ancaman non-tradisional.¹⁰ Maka wilayah yang berbatasan langsung dengan hal-hal tersebut diatas seperti pulau Tarakan, dirasa perlu untuk membuat instalasi aju sebagai langkah defensif aktif negara dalam mengatasi ancaman yang hadir.

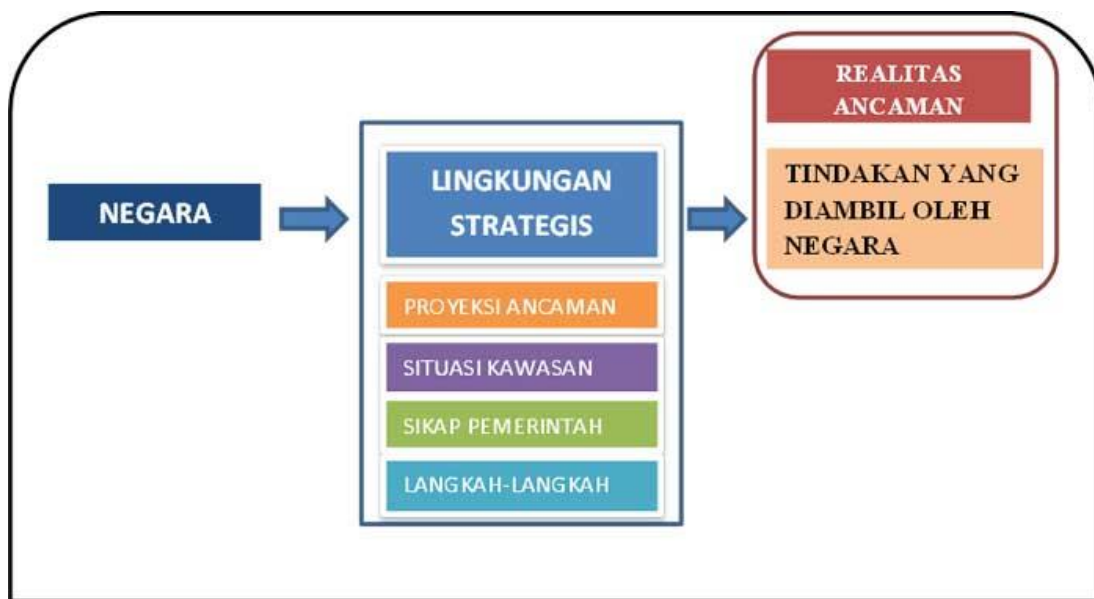
⁷ Jaleswari Pramowardhani. *Cara Pandang Baru Terhadap 'Keamanan Nasional' Indonesia*. Dalam Gagasan 12 Analisis Indonesia Tentang Indonesia Sejahtera. <http://www.metrotvnews.com/read/analisdetail/2010/08/31/69/Cara-Pandang-Baru-Terhadap-Keamanan-Nasional-Indonesia>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2017.

⁸ Buku Putih Pertahanan Indonesia, Departemen Pertahanan Republik Indonesia 2008.

⁹ Lihat Bob Sugeng Hadiwinata, 2007, *Transformasi Isu dan Aktor di dalam Studi Hubungan Internasional: Dari Realisme hingga Konstruktivisme*, dalam transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi, Yulius Perawan (ed), hal. 13.

¹⁰ Dr. Kusnanto Anggoro. 2003. *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara dan Ketertiban Umum*. Centre for Strategic and International Studies, Jakarta.

Gambar1: Alur Pikir Mengenai Lingkungan Strategis (Diolah Oleh Peneliti)



Kebijakan pembangunan kekuatan yang berupa pangkalan militer di pulau Tarakan diwujudkan melalui Peraturan Daerah Kota Tarakan tahun 2012, mengenai “Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012 – 2032”¹¹. Didalamnya dijelaskan bahwa pada Paragraf 9 Kawasan Peruntukan Lainnya Pasal 43 ayat 1 (d) Kawasan Pertahanan Keamanan 12, akan diadakan pembangunan dan perkuatan sebagai berikut;

- 1) Pengembangan Kawasan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) di Kelurahan Mamburungan dan Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur;
- 2) Pengembangan Kawasan Satuan Radar (Satradar) AURI di Kelurahan Mamburungan timur, Kecamatan Tarakan Timur;
- 3) Pengembangan Polisi Air (POLAIR) di Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara;
- 4) Pengembangan Batalion Infantri (Yonif) 613 di Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara;
- 5) Pengembangan Komando Distrik Militer (Kodim) di Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah;

¹¹ Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan tahun 2012-2032. Pemerintah Daerah Kota Tarakan 2012.

¹² Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan tahun 2012-2032. Pemerintah Daerah Kota Tarakan 2012. Hal.31

- 6) Pengembangan Pangkalan Angkatan Udara di Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat; dan
- 7) Kawasan Mako Lanal di Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah.

Kemudian pemerintah Kota Tarakan merasa perlu untuk menjelaskan secara terperinci mengenai pembangunan aspek lingkungan strategis dengan menitikberatkan kepada pembangunan Kawasan Strategis, seperti yang tertera pada Bab IV, Penetapan Kawasan Strategis Kota Pasal 46 ayat 1 huruf (a) yang berbunyi “ Kawasan Strategis Kota dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan”¹³, serta Pasal 47 yang berisi penjelasan sebagai berikut;

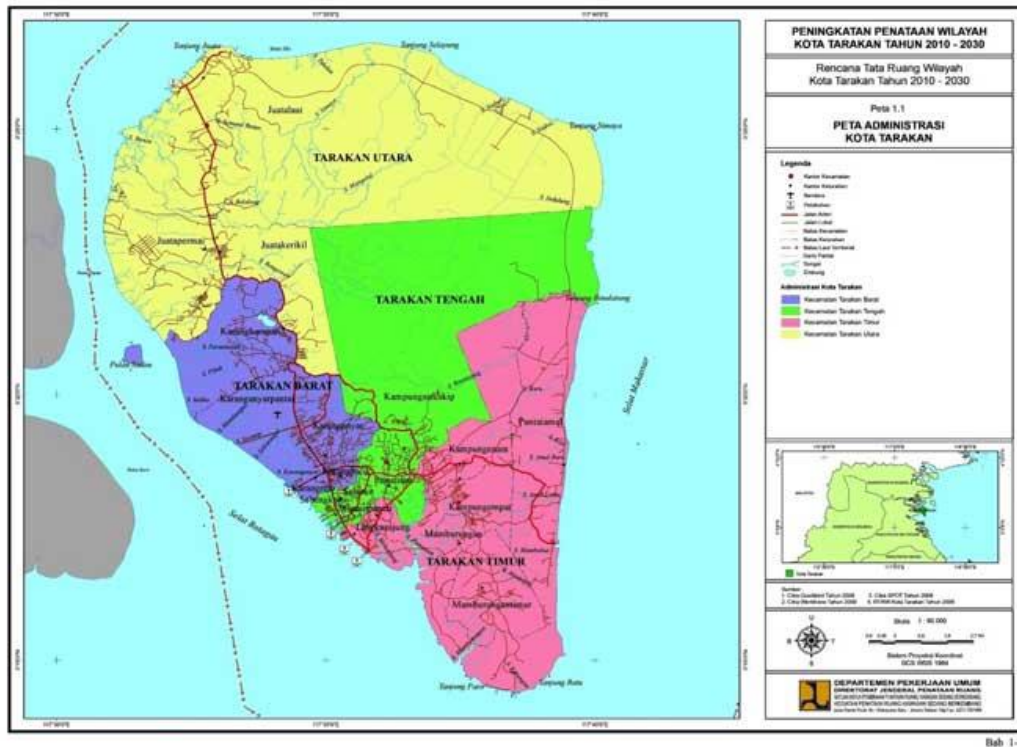
Kawasan strategis kota dari aspek pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a¹⁴, terdiri atas:

- a) Kawasan yang diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan geostrategis nasional;
- b) Kawasan yang diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah ujicoba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan;
- c) Kawasan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) di Kelurahan Mamburungan dan Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur;
- d) Kawasan Satuan Radar (Satradar) Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) di Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur.
- e) Kawasan pengembangan Polisi Air (POLAIR) di Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara;
- f) Kawasan Batalion Infanteri (Yonif) 613 di Kelurahan Juata Kerikil Kecamatan Tarakan Utara;
- g) Kawasan pengembangan Komando Distrik Militer (Kodim) di Kelurahan Kampung Satu / Skip Kecamatan Tarakan Tengah;
- h) Kawasan pangkalan Angkatan Udara di Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat; dan Kawasan Mako Lanal di Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah.

Gambar Peta Rencana Tata Ruang & Tata Wilayah Kota Tarakan

¹³ Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan tahun 2012-2032. Pemerintah Daerah Kota Tarakan 2012. Hal. 34

¹⁴ Ibid.



Kompleksitas (*complexity*) ancaman yang semakin meningkat, perlombaan senjata antara negara-negara regional Asia Tenggara, situasi yang memanas akibat kasus pembajakan, penyelundupan, serta terorisme (termasuk dalamnya isu-isu perbatasan) menuntut peran aktif rezim politik demokratis yang memerintah dengan memperhatikan pandangan dan pembacaan aktor-aktor keamanan serta konsistensinya pada kepentingan penjagaan kedaulatan, penduduk dan wilayah. Seiring dengan pergeseran paradigma tersebut terjadi pula pergeseran dan perubahan paradigma keamanan global, keamanan regional serta keamanan nasional, yang sebelumnya merupakan keamanan wilayah (*teritorial security*) telah bergeser menjadi keamanan manusia (*human security*). Sehingga pola penanganannya juga berubah dari kerjasama keamanan (*security cooperative*) dan keamanan bersama (*collective security*) menjadi keamanan komprehensif (*security comprehensive*). Aktor-aktor yang menangani juga berubah, yang sebelumnya hanya aktor tertentu bergeser ke aktor-aktor yang memiliki otoritas politik dan operasional termasuk *civil society*.¹⁵ Sebaran konsep dan teknik dalam ranah Pertahanan Negara akhirnya melahirkan apa yang disebut *Force Projection* (Whitaker, 2002, dan Sandler, 2005, dalam Usmita, 2012, 26). Pendekatan ini dapat dilihat pada Tabel *Force Projection*

Tabel *Force Projection* in National Defense

¹⁵ Maley, Tom. 2010. *The Strategic Environment for Defence, including Terrorism and Political Violence*. Modul Kuliah Universitas Pertahanan Indonesia, Jakarta 2011.

	<i>Defense</i>	<i>Offense</i>
Konsep	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun kerjasama antara negara-negara kawasan • Aktif dalam melakukan latihan militer dengan negara-negara kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamatan (intelijen) Kekuatan Regional dan penanganan Wilayah Strategis yang berbatasan dengan Negara-Negara Tetangga
Teknik	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan kekuatan Industri militer - Peremajaan alutsista berjangka - Aktif dalam melakukan sosialisasi kesadaran nasional akan Hankam (Bela Negara) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Instalasi dan Pangkalan - Penambahan Instalasi teknologi - Peningkatan kualitas personil Pertahanan & Keamanan - Peningkatan Kehadiran di Wilayah Lawan (Perbatasan) - Peningkatan Kemampuan Alutsista

Sumber: Sandler dan Whitaker (2002), dikutip oleh Usmita (2012)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa aktivitas *defense* cenderung mengarah kedalam negeri walaupun tetap mengikutsertakan aspek-aspek kerjasama antar negara. Sedangkan aktivitas *offense* cenderung reaktif dan selalu siaga terhadap situasi yang dinamis, dengan harapan upaya tersebut dapat menekan terjadinya serangan dari lawan (negara-negara luar maupun aktor non-negara).

Kebijakan Pembinaan dan Penggunaan Kekuatan TNI

Pembinaan kekuatan pada dasarnya diarahkan untuk mencapai sasaran tertatanya struktur organisasi TNI sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI dengan mempertimbangkan *right sizing* dan terisnya struktur Satuan Operasional TNI di daerah perbatasan, daerah rawan konflik serta pulau-pulau terluar; meningkatnya kesiapan Alutsista dan material khusus TNI yang terpadu antar matra dengan memberdayakan industri pertahanan nasional; terpenuhinya kebutuhan personel yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi serta terjamin kesejahteraannya; terpenuhinya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dukungan; terpenuhinya piranti lunak peraturan perundangan tentang perbantuan, pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI.¹⁶

Dalam melaksanakan pembinaan kemampuan, langkah-langkah yang ditempuh antara lain: meningkatkan kemampuan deteksi dini dan koordinasi satuan kewilayahan; meningkatkan kualitas dan kuantitas Latihan Gabungan TNI; meningkatkan kemampuan prajurit TNI untuk melaksanakan tugas-tugas OMSP; melaksanakan kegiatan latihan pra-tugas bagi prajurit TNI yang akan melaksanakan penugasan baik OMP maupun OMSP; meningkatkan kemampuan manajemen logistik dan

¹⁶ Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E. , “Perkembangan Lingkungan Strategis dan Potensi Ancaman”, <https://tni.mil.id/view-22301-oleh-laksamana-tni-agus-suhartono-se.>, diakses 12 September 2019, 16.21 WIB

perbekalannya sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung operasi; meningkatkan kemampuan Komando dan Pengendalian Satuan Operasional; meningkatkan kualitas Satuan PPRC dan PRCPB TNI melalui pendidikan dan latihan serta melengkapi peralatannya. Untuk penggelaran kekuatan, diarahkan guna terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok TNI dengan langkah-langkah memantapkan gelar kekuatan terpusat TNI, mengevaluasi gelar satuan kewilayahan untuk mendukung operasi-operasi di daerah perbatasan dengan negara tetangga dan pulau-pulau terluar dihadapkan pada perkembangan dinamika ancaman.¹⁷

Penggunaan Kekuatan dalam Pembangunan Pangkalan Aju

Kebijakan penggunaan kekuatan TNI dengan mengedepankan keterpaduan tri matra dalam rangka melaksanakan operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP), dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai peraturan perundang-undangan. Penggunaan kekuatan TNI pada OMP dilakukan setelah ada pernyataan perang yang dikeluarkan oleh Presiden melalui mekanisme pengambilan keputusan politik negara dengan pertimbangan bahwa tujuan penggunaan kekuatan TNI pada OMP merupakan jalan terakhir yang terpaksa harus dipilih setelah berbagai upaya damai dalam penyelesaian konflik antar negara tidak tercapai. Sasaran penggunaan kekuatan diarahkan pada penangkalan dan pencegahan berbagai bentuk ancaman dari kekuatan militer asing yang akan melakukan agresi terhadap Indonesia; tersedianya data intelijen yang akurat, akuntabel dan tepat waktu; terlaksananya pengerahan kekuatan TNI di wilayah perbatasan, daerah rawan konflik dan dua belas pulau-pulau terluar dengan berpedoman pada Prosedur Tetap Operasi dan Aturan Pelibatan; terlaksananya penegakan hukum dan penjagaan keamanan di wilayah laut dan udara; tertanggulangnya pelanggaran wilayah dan hukum; terlaksananya pemberdayaan wilayah pertahanan untuk terciptanya Ruang, Alat Dan Kondisi (RAK) juang; terlaksananya pengerahan kekuatan TNI dalam melaksanakan OMSP.

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dimana dalam pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan, strategi yang digunakan dalam menyelenggarakan OMP dirumuskan dalam bentuk Strategi Pertahanan Nusantara (SPN). Aktualisasi dari konsep pertahanan tersebut dikembangkan dengan strategi pertahanan nusantara yang membagi wilayah pertahanan menjadi tiga mandala untuk menghadapi musuh, yaitu mandala pertahanan luar, mandala pertahanan utama, dan mandala pertahanan dalam.

Untuk itu penggunaan kekuatan dalam OMP yang menjadi prioritas adalah melaksanakan operasi intelijen dan pemberdayaan satuan kewilayahan untuk

¹⁷ Wawancara Komandan Lantamal XIII Tarakan, 15 September 2019, 09.00 WIT.

memantau situasi wilayah; melengkapi material khusus pos-pos pengamat di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar; menggelar kekuatan TNI untuk menjaga kedaulatan di perbatasan darat, laut dan udara; menyiagakan kekuatan terpusat untuk sewaktu-waktu dapat dikerahkan ke daerah konflik; melaksanakan pengamatan wilayah NKRI khususnya wilayah perbatasan darat, laut dan udara; menggelar satuan PPRC.

Penggunaan kekuatan dalam OMSP dilaksanakan sesuai kebijakan dan keputusan politik negara dengan prioritas menggelar kekuatan TNI untuk melaksanakan pengamanan perbatasan dengan negara tetangga dalam bentuk patroli terkoordinasi (Patkor); menggelar kekuatan TNI di daerah rawan konflik dan rawan pelanggaran hukum di laut dan udara; menggelar pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; menyiagakan kekuatan TNI untuk melaksanakan operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia, memberdayakan wilayah pertahanan, membantu tugas Pemerintah di daerah, membantu Kepolisian Negara RI, membantu mengamankan tamu negara, membantu menanggulangi akibat bencana, SAR, membantu Pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan; membangun kerja sama militer dengan negara lain, dengan berpedoman pada tiga substansi kerangka kerja sama militer yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan, guna membangun saling kepercayaan, mencegah konflik, dan bersama-sama mencari solusi terbaik, dalam bentuk patroli terkoordinasi, latihan bersama, pertukaran prajurit, kunjungan/ muhibah dan forum kerja sama militer lainnya; optimalisasi peran TNI dalam bentuk Bakti TNI dalam rangka mendukung Pembangunan Nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya daerah terpencil dan tertinggal.

Di samping hal-hal tersebut di atas, ke depan dalam pembangunan kekuatan TNI akan dikembangkan manajemen dan strategi perencanaan TNI yang terpadu di antara ketiga Angkatan. Keterpaduan tersebut meliputi lima aspek, yaitu: perencanaan, operasi, pendidikan dan latihan, penyelenggaraan dukungan, dan pengadaan alutsista. Keterpaduan dalam aspek perencanaan, diwujudkan melalui sistem perencanaan *top-down* dan *bottom-up* yang diolahyudha-kan pada tingkat Mabes TNI untuk mensinergikan kepentingan masing-masing Angkatan dan kepentingan TNI menjadi satu rumusan tri matra terpadu sehingga dapat merumuskan program secara terpadu sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Keterpaduan dalam aspek operasi, diwujudkan melalui sinergitas antar Angkatan yang dimulai dari proses perencanaan, penyiapan dan gelar kekuatan, sehingga matra saling bekerja sama dan melengkapi sesuai kapasitas masing-masing, demikian pula keterpaduan di bidang Komando Pengendalian, komunikasi maupun organisasi bantuan tembakan, sehingga operasi akan lebih efektif dan efisien. Keterpaduan

tersebut sampai dengan harmonisasi dan komposisi Alutsista yang akan operasi¹⁸. Keterpaduan dalam aspek pendidikan dan latihan, untuk mewujudkan sumber daya manusia TNI yang berkualitas dan memiliki pemahaman yang sama tentang kedudukannya sebagai prajurit TNI, maka perlu diwujudkan suatu pendidikan yang terintegratif dalam aspek strata pendidikannya maupun kelembagaannya. Pada aspek latihan, menformulasikan keterpaduan tiap-tiap matra guna mewujudkan kesiapsiagaan TNI dalam merespons ancaman, dilakukan melalui keterpaduan siklus latihan TNI yang telah ditetapkan dan mengacu pada pengembangan satu konsep Tri Matra Terpadu. Keterpaduan dalam aspek dukungan diwujudkan dalam bentuk optimalisasi fasilitas yang dimiliki matra dalam pembangunan infrastruktur serta instalasi militer berupa pangkalan aju (FOB), sehingga diperoleh efisiensi. Dalam rangka perawatan Alutsista dapat menggunakan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan matra lain yang telah memadai. Keterpaduan dalam aspek pengadaan Alutsista. Untuk mendapatkan efisiensi dalam pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI guna mewujudkan kemampuan dan daya tangkal yang tinggi dalam merespon ancaman, TNI dalam merencanakan pengadaan Alutsista harus mencerminkan kepentingan Tri Matra Terpadu dan berorientasi pada keleluasaan, kepentingan serta kemampuan matra dengan mempertimbangkan faktor karakteristik geografi¹⁹.

Pangkalan Aju Udara dan Pangkalan Aju Laut

Kawasan Pembangunan Pangkalan Angkatan Udara terletak di Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat. Pangkalan militer ini dibangun pada Kawasan bandara Juwata dengan lahan seluas 39 hektar dari total luas bandara yakni 238 hektar, sehingga pembangunan pangkalan militer ini tidak mengganggu aktifitas penerbangan domestik. Proses pembangunan Lanud Tarakan sudah dilaksanakan sejak tahun 2005, yang meliputi pematangan lahan, pembangunan markas Lanud, perkantoran, fasilitas pangkalan, pemukiman, sarana penerbangan, shelter, apron, taxiway serta fasilitas umum lainnya.²⁰

Letak Kalimantan Utara (Kaltara) yang berada di perbatasan mendapat perhatian Panglima Komando Operasi TNI AU (Pangkoopsau) II, Marsekal Muda TNI Umar Sugeng Hariyono. Umar melihat perkembangan Lanud Tarakan sejauh ini sudah sangat pesat, hal ini terlihat sudah adanya pembangunan shelter pesawat yang ditargetkan tahun 2019 akan selesai. “Dengan adanya shelter pesawat ini, maka kedepan satu flight pesawat tempur mulai dari F16, Sukhoi, Hawk, T50, Super Tucano

¹⁸ Wawancara dengan Deputi IV Hanneg Kemenko Polhukam, 25 September 2019, 19.20 WIB.

¹⁹ Wawancara dengan Komandan Lanud Anang Busra Tarakan, 15 September 2017, 13.15 WIT.

²⁰ <https://setkab.go.id/mendarat-di-kaltara-presiden-jokowi-langsung-resmikan-bandara-juwata-tarakan/> diakses pada 22 Juni 2019

dan lain-lainnya akan di-standby-kan di Lanud Tarakan. Jumlahnya juga bervariasi mulai 8 hingga 10 pesawat, namun sifatnya hanya sementara,” ucapnya.

Kedepan Lanud Tarakan akan diperluas, dengan adanya lahan seluas 15 hektare pemberian Pemkot Tarakan. “Pak Wali Kota Sofian Raga rencananya akan memberikan lahan di sebelah barat dari Lanud Tarakan, luasnya mencapai 15 hektare. Ini akan digunakan untuk pembangunan Lanud Tarakan,” ungkapnya. Dirinya juga meminta Komandan Lanud Tarakan untuk melakukan koordinasi dengan Wali Kota Tarakan Sofian Raga, terkait rencana memperpanjang landasan menjadi 2.500 meter. “Dengan panjang landasan menjadi 2.500meter dapat mendaratkan segala jenis pesawat TNI AU dalam rangka operasi, khususnya pengamanan perbatasan,” pungkasnya.²¹

Posisi Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah perbatasan, membuat potensi pelanggaran wilayah kerab terjadi. Terutama dengan negara tetangga Malaysia. Untuk itu, sebagai salah satu penjaga keamanan perbatasan, Pangkalan Udara (Lanud) Tipe B Tarakan akan memasang alat pemantau sejenis radar Automatic Identification System (AIS) untuk memantau keberadaan kapal asing. Komandan Pangkalan Udara (Lanud) Anang Busra Tarakan, Kolonel Pnb Didik Kristyanto mengatakan, sudah seharusnya wilayah Kaltara dipasang radar khusus untuk pemantauan. “Kedepanya kita akan bangun radar tapi fungsi radar itu akan fokus pada maritim. Kalau radar udara kita sudah punya, yaitu Satuan Radar 225 Tarakan,” ungkap Didik, Sabtu pekan lalu (29/4). Apabila radar AIS sudah terpasang, maka pelanggaran kapal asing akan terpantau dan segera mengirim data. “Jika ada kapal negara luar yang melakukan pelanggaran, data secara real time akan dikirim ke Lanud, selanjutnya data tersebut kita kirim ke mabes,” jelasnya. Diungkapkan, untuk pembangunan alat ini masih dalam peninjauan areal yang akan dipasang. Sebelum dibangun harus ada pengerasan lahan terlebih dahulu agar tidak mengganggu proses kerja radar.

Selain membangun alat pantau jenis radar pemantau Maritim, Lanud Tarakan juga terus berbenah dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) hingga penambahan infrastruktur. Bahkan menurut Didik, Panglima TNI AU melalui Kepala Staf Angkatan Udara memberikan perhatian terhadap Lanud yang ada di daerah perbatasan. Rencananya di 2030, akan ditempatkan pesawat tempur jenis Sukhoi di Lanud Tarakan.²² Selain AIS, TNI AU juga menempatkan pesawat tanpa awak (drone) di wilayah perbatasan untuk memperkuat pengawasan. Dua drone ditempatkan di Pulau Natuna perbatasan Indonesia dengan Laut China Selatan dan Kota Tarakan, Kalimantan Utara perbatasan RI-Malaysia. Selain itu Panglima TNI Jenderal Gatot

²¹ <https://lancercell.com/2016/12/15/lanud-tarakan-akan-diperluas-15-hektare-ke-arah-barat/> di akses pada 19 Juni 2019

²² <https://gardanasional.id/post/1997/berkarya.id> di akses pada 20 Juni 2019

Nurmantyo pada Juni 2017 meresmikan Perluasan Pangkalan Utama Angkatan Laut XII Tarakan beserta Maritime Command Center (MCC) atau Pusat Komando Militer milik Indonesia di Tarakan, Kalimantan Utara. Lokasi MCC di Tarakan ini berdekatan dengan MCC milik Malaysia di Tawau dan MCC Filipina di Bongao. Pembukaan MCC dilakukan di Markas Komando Lantamal XIII Tarakan. Selain Gatot, hadir Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu, Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jenderal Tan Sri Dato' Sri Raja Mohamed Affandi bin Raja Mohamed Noor, dan Chief of Staff Armed Forces of the Philippines General Eduardo M Ano.

Lebih lanjut, Gatot menyampaikan peresmian MCC bukan semata-mata untuk mewujudkan keamanan di Laut Sulu. Lebih dari itu, MCC merupakan bentuk solidaritas ketiga negara dalam menjaga perairan ASEAN. Selain itu, MCC adalah salah satu bentuk usaha TNI mewujudkan program Presiden RI Joko Widodo, yang ingin Indonesia sebagai poros maritim dunia. "Komunikasi di 3 MCC merupakan sharing informasi dan intelijen dalam mendukung hubungan bilateral. Diharapkan, dengan kerja sama ini mampu meredam dan meminimalisir (perompakan dan penculikan) di perairan yang menjadi perhatian bersama. TNI siap dalam menjaga keamanan negara dan wilayah sekitarnya, sebagai garda terdepan kerja sama dengan 2 negara lain," ucap Gatot.²³ Terakhir, Gatot menekankan beberapa hal penting yang harus dilakukan ketiga MCC di 3 negara dalam rangka meningkatkan kerja sama. Pertama, ketiga MCC harus meningkatkan berbagai aspek, seperti komunikasi, surveillance, dan komputerasi, untuk menghasilkan analisis yang akurat dan cepat untuk mengambil keputusan komando dan pengendalian. "Kedua, wajib meningkatkan profesionalisme agar output bisa maksimal pada tiap operasi," ujar Gatot. "Ketiga, semua MCC perlu mengembangkan mekanisme kerja sama dalam sharing informasi dengan satuan terkait guna mendapat data yang update dalam mendukung operasi," tuturnya.²⁴

Kesimpulan

Dihadapkan dengan beratnya medan di sekitar wilayah perbatasan, ditambah lagi dengan adanya potensi konflik di Laut Natuna Utara dan Selat Makassar, maka sangat bijak jikalau sistem pertahanan NKRI terkait perbatasan di sesuaikan kembali. Tetapi sebaiknya dibuat tidak secara instan serta tidak terkait dengan "gelar pasukan TNI" yang sudah ada (eksisting), serta dalam rencana akhirnya dibuatlah pemantapan dan pelaksanaan pembangunan Pangkalan Aju. Ada dua contoh Kemhan melakukan pembangunan sarana pertahannya di perbatasan akan tetapi kemudian seolah "**muspro**" (tidak bermanfaat).

²³ <https://news.detik.com/berita/d-3534971/panglima-tni-resmikan-pusat-komando-militer-di-tarakan> di akses pada 22 September 2019

²⁴ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/06/20/ortjy3-tni-dirikan-pusat-komando-militer-di-tarakan> di akses pada 22 September 2019

Hal itu bisa dilihat di daerah Seluas di Kalimantan Barat dan pulau Nipah di Batam. Di wilayah Seluas, Kemhan membangun Gedung pertahanan ditahun 90'an, sampai sekarang sama sekali tidak difungsikan. Begitu juga di Pulau Nipah di Batam, perbatasan dengan Singapura. Pulau yang tadinya nyaris tenggelam itu direklamasi dan dibangun untuk menempatkan Kompi Marinir di sana. Setelah sarana-prasarana tersebut berdiri serta sempat dijadikan sebagai pangkalan, hingga kemudian ditinggalkan dan kini "**muspro**". Dana yang Milyaran rupiah sama sekali tidak bermanfaat sebagaimana mestinya.

Idealnya Armada, Koops dan Kodam diperkuat sesuai dengan perspektif realitas ancaman yang ada. Di Kodam, Korem, Kodim, Koramil yang dekat dengn perbatasan misalnya, kita melihat mereka belum ditunjang oleh Mobilitas Udara (Mobud) dan Lintas Logistik Laut yang sewajarnya. Mereka (TNI tiga Matra) hingga kini berusaha agar dapat melakukan patroli udara yang berkesinambungan di sepanjang perbatasan dan juga terbatas kemampuannya dalam memproyeksikan kekuatannya ke berbagai *trouble spots* di wilayah perbatasan meski itu setingkat Regu/unit tempur. Demikian juga untuk perimbangan kekuatan relatif dengan negara tetangga, semestinya perlu juga di "gelar" kekuatan pertahanan, khususnya untuk daerah daerah sekitar kota-kota perbatasan yang saling berdekatan dengan Kota-kota negara tetangga (P.Batam, Kalimantan, Papua & NTT). Khususnya di wilayah-wilayah strategis perbatasan seperti Pulau Natuna, Wilayah Tanjung Datu atau Pulau Tarakan seperti yang digagas oleh Bappenas dan Kemhan.

Untuk kepentingan pertahanan wilayah baik laut, udara serta territorial darat, sekaligus dalam rangka menjaga perimbangan kekuatan pertahanan dengan negara tetangga serta untuk menggerakkan perekonomian wilayah perbatasan perlu adanya penambahan dan pergeseran kekuatan di lokasi-lokasi tersebut; khususnya gelar *Artillery* pertahanan darat dan Pantai; penambahan daya dukung bandara di perbatasan seperti di Tarakan, Nunukan-Malinau-Sanggoledo dan Putu Sibau hingga punya Landasan Pacu sepanjang 2650 meter agar dapat memfasilitasi kepentingan pesawat tempur dan pesawat angkut. Pembangunan satu Brigade Inf di Kalimantan Utara dan Marinir di Natuna atau Tanjung Pinang dengan perkuatan Lanal serta Lanudnya. Kekuatan TNI AL juga perlu diperkuat di Pangkalan Utama Kalimantan Utara hingga Patroli Lintas Laut Militer untuk mengimbangi pihak tetangga yang menjadikan Sabah sebagai Armada Timur negaranya.

Pada akhirnya situasi yang kita perhatikan adalah perlunya gelar kekuatan yang berfungsi dengan baik di perbatasan sesuai dengan persepsi ancaman nyata. Pemerintah akhirnya mempercepat implementasi pembangunan kekuatan secara realistis, sehingga gelar pasukan yang dibuat menjadi efektif, dengan harapan wilayah perbatasan dan wilayah strategis disekitarnya dapat terjaga serta termonitor dengan baik, sehingga penyusupan entitas asing dapat dilakukan pencegahan.

Bibliografi

- Buku Putih Pertahanan Indonesia, Departemen Pertahanan Republik Indonesia 2008.
- Bob Sugeng Hadiwinata, *Transformasi Isu dan Aktor di dalam Studi Hubungan Internasional: Dari Realisme hingga Konstruktivisme*, dalam *ransformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*, Yulius Permawan (ed), Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Barry Buzan, *People, States and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War*. (Boulder: Lynne Rienner Publisher, 1991).
- David Mutimer, *Beyond Strategy: Critical Thinking and the New Security Studies*
- Dr. Kusnanto Anggoro. *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara dan Ketertiban Umum*. Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 2003.
- Dugis, Vinsensio, *Indonesian Foreign Policy After Soeharto: Domestic Politics and Public Influence on Indonesian Foreign Policy Making, 1998-2004*, Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy, Flinders Asia Centre, School of Political and International Studies, Flinders University, Adelaide-Australia, 2006.
- Edy Prasetyono, "Konsep-Konsep Keamanan", dalam *Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia*, Indra J Piliang, Edy Prasetyono, Hadi Soesastro (eds), (Jakarta: CSIS, 2006), halaman 267-269.
- Djoko Sumaryono, "Jangan Terlambat Tangani Selat Malaka", *Kompas*, 27 Mei 2005.
- Dikutip dari Aditya Batara G., "Manajemen Garis Perbatasan Indonesia: Sebuah Usaha Menjamin Keamanan Warganegara" di dalam Aditya Batara G & Beni Sukadis (ed.) *Reformasi Manajemen Perbatasan di Negara-Negara Transisi Demokrasi*, DCAF & Lesperssi, 2007.
- Maley, Tom. (2010). *The Strategic Environment for Defence, including Terrorism and Political Violence*. Modul Kuliah Universitas Pertahanan Indonesia, Jakarta 2011.
- Mufti Makaarim A., *Strategi Pengelolaan Dan Pertahanan Wilayah Perbatasan Udara Republik Indonesia: Tantangan Aspek Politik, Yuridis dan Operasional*, Makalah Seminar Penyusunan Perumusan Kebijakan Pengelolaan Terpadu Wilayah Perbatasan, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Hotel Century Park, Jakarta Selasa 5 Agustus 2008.
- "Malaysia Pelanggar Perbatasan Terbanyak", *Kodam Jaya Online*, 3 Maret 2009, <http://www.kodam-jaya.mil.id/semua-section/36-press-release/597-malaysia-pelanggar-perbatasanindonesia-terbanyak> , akses tanggal 19 April 2017.
- "TNI Operasi Perbatasan Sepekan Sekali", *Kompas.Com*, 14 April 2008, <http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/04/14/13313814/tni.au.operasi.perbatasan.sepekan.sekali> , akses tanggal 19 April 2017.
- "Pasukan TNI di Perbatasan Sudah Cukup", *Kompas Cyber Media*, 27 Februari 2007, <http://64.203.71.11/ver1/Nusantara/0702/27/132559.htm>, akses tanggal 19 April 2017.

- “Patroli Perikanan Bersama Bersejarah RI-Australia”, Kedutaan Besar Australia, 2 November 2007, http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM07_074.html, akses tanggal 19 April 2017.
- “Polisi Awasi Perbatasan Kalimantan”, Tempointeraktif, 3 November 2008, <http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2008/11/03/brk,20081103-143520,id.html>, diakses tanggal 19 April 2017.
- Poltak Partogi Nainggolan “Masalah-Masalah Keamanan di Perbatasan Indonesia dengan Negara-Negara Lain: Perspektif Tradisional dan Non-Tradisional” di dalam Poltak Partogi Nainggolan, *Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia: Ancaman terhadap Integritas Teritorial*, Jakarta: Tiga Putra Utama, 2004.
- Rapat Koordinasi Pengamanan Wilayah Perbatasan NKRI tanggal 11 Februari 2009 di Mabes Polri (Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigadir Jenderal (Pol) Halba Rubis Nugroho). Lihat “Perbatasan Tak Terurus”, Kompas.Com, 12 April 2007.
- Rizal Sukma, *Keamanan Nasional: Ancaman dan Eskalasi*, FGD Pro Patria, 23 September 2003.
- “Segitiga Maut Indonesia-Malaysia-Thailand”, Kompas, 1 April 2006.
- W.E. Baker and R.B. Faulkner. “The social organization of conspiracy: Illegal networks in the heavy electrical equipment industry”. *American Sociological Review*, 58:837-860, December 1993.
- J. Corbin. *Al-Qaeda: In Search of the Terror Network that Threatens the World*. Thunder's Mouth Press, 2002.
- G.H. Golub and C.F. van Loan. *Matrix Computations*. Johns Hopkins University Press, 3rd edition, 1996.
- V.E. Krebs. *Mapping networks of terrorist cells*. *Connections*, 24(3):43-52, 2002.
- International Crisis Group. Update Briefing, *Indonesia: Noordin Top's Support Base*, 27 Augustus 2009.

Kepentingan Nasional Korea Utara di KTT Antar-Korea 2018

Nadya Ayu Arminta¹, Irmawan Effendi²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, IISIP, Jakarta.

Corresponding e-mail: irmawan@iisip.ac.id

Abstrak



Artikel ini membahas mengenai fase baru dalam hubungan dua Korea. Pergantian kepemimpinan di Korea Utara dan Selatan membawa kondisi positif yaitu dengan terjadinya pertemuan KTT Antar-Korea pada April 2018. Pertemuan ini tentunya memberikan harapan baru tentang dinamika konflik Semenanjung Korea. Perubahan sikap Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Jong Un memberikan tanda tanya mengenai faktor yang mendorong terjadinya pertemuan tersebut. Setidaknya ada tiga kepentingan nasional yang menjadi faktor pendorong bagi Korea Utara, yaitu kepentingan ekonomi, politik dan keamanan. Kepentingan ekonomi didasari oleh dampak embargo yang diterima Korea Utara pasca uji coba senjata nuklir dan misil selama ini. Kepentingan politik lebih fokus pada kelangsungan rezim politik dinasti Kim demi menjaga kekuasaan domestiknya. Sementara untuk kepentingan keamanan lebih mengarah pada stabilitas keamanan Korea Utara pasca runtuhnya situs uji coba nuklir.

Kata Kunci

Kepentingan Nasional, Korea Utara, Korea Selatan

Pendahuluan

Catatan historis mengenai hubungan antara kawasan Utara dan Selatan Korea selalu didominasi oleh konflik. Kondisi ini didasari oleh kenyataan bahwa, kedua negara belum menandatangani perjanjian damai. Eskalasi konflik yang terjadi diawali dengan konflik militer hingga dimensi nuklir. Rivalitas nuklir kedua negara tersebut tidak hanya tertutup pada interaksi keduanya. Namun, konflik ini memberikan dampak terhadap intervensi negara lain, contohnya Amerika Serikat. Strategi aliansi antara Korea Selatan dengan AS tidak hanya pada pemberian jaminan keamanan militer, tapi juga penerapan kebijakan *extended deterrence* sebagai bentuk *nuclear umbrella* AS terhadap Korea Selatan dan Jepang sekutunya di Asia Timur dalam menghadapi Korea Utara (Effendi, 2012).

Pasca peralihan kekuasaan di Korea Utara pada akhir 2011, banyak kajian yang mengarahkan pada sosok pribadi Kim Jong Un sebagai pemimpin baru Korea Utara.

Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah pergantian pemimpin di Korea Utara akan merubah arah dinamika konflik di semenanjung Korea. Sosok kepemimpinan Kim Jong Un dalam militer mendapat sorotan khusus, karena masih memiliki pola yang sama dengan apa yang dilakukan kakek dan ayahnya yaitu meliputi kebijakan yang mendemostrasikan kekuatan militer dan nuklir serta retorika perlawanan dengan AS dan Korea Selatan (Bechtol, 2013).

Meski dinilai menjalankan kebijakan dasar yang memang sudah tertuliskan, sisi kepribadian Kim Jong Un menjadi perbincangan menarik. Kim Jong Un, bagi beberapa pengamat memiliki karakter pribadi yang berbeda dengan pendahulunya. Kim Jong Un dinilai memiliki sifat *congenial-cooperative*. Sifat ini menjelaskan kepribadian Jong Un yang terbuka, senang bergaul secara sosial, akomodatif dan bertanggung jawab sehingga mampu membawa Korea Utara lebih terbuka di arena internasional (Immelman, 2018).

Keterbukaan ini membawa Korea Utara pada kondisi baru dalam melakukan interaksi dengan Korea Selatan sebagai upaya mengakhiri konflik selama ini. Perubahan yang terjadi di Korea Utara peluang bagi terciptanya kondisi damai. Tentunya, tidak hanya damai bagi kedua negara, tapi juga menjadi contoh bagi negara lain yang masih diliputi konflik. Tulisan ini akan mengkaji perubahan sikap Korea Utara dari sudut pandang historis dan kepentingan nasional. Termasuk, penjelasan mengenai ekspektasi dan harapan Korea Utara untuk menjamin kelangsungan negaranya dalam sistem internasional.

Tinjauan Pustaka

Kepentingan Nasional dan Politik Luar Negeri

Kepentingan nasional merupakan konsep mendasar yang terdapat dalam hubungan internasional. Kepentingan nasional sangat berperan dalam menentukan perilaku suatu negara. Kepentingan nasional ini juga seringkali menjadi pembenaran dari setiap kebijakan yang dipilih oleh negara. Menurut Rudy (2002) kepentingan nasional (*national interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai atau dicita-citakan negara. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara adalah keamanan, mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah, serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini, yaitu keamanan (*security*) dari kesejahteraan (*prosperity*), pasti terdapat serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara.

Morgenthau (2010) membagi tipologi kepentingan nasional menjadi beberapa bagian. Pertama, *core/basic/vital interest*. Ini merupakan kepentingan yang tertinggi dari suatu negara. Maknanya, demi mempertahankan kepentingan ini, negara siap untuk memilih opsi perang sekalipun. Contoh dari kepentingan ini adalah mempertahankan kedaulatan negara. Kedua, *secondary interest*. Meskipun terlihat hanya sebagai pilihan

kedua, tipe ini memberikan karakteristik khusus yaitu negara memandang pencapaian atas kepentingan ini tidak harus melalui perang atau konflik. Perundingan dan kerja sama dijadikan pilihan untuk memaksimalkan pencapaiannya.

Pencapaian dari kepentingan nasional tidak akan terlepas dari perumusan politik luar negeri suatu negara. Bahgat Korony membagi pola perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dalam tiga peringkat. Pertama, tujuan umum atau pola dasar yang disebut sebagai “*General Objectives*”. Kedua, pola pelaksanaan atau strategi. Ketiga, tindakan-tindakan atau langkah nyata dalam pelaksanaannya yang dibagi ke dalam dua macam tindakan, yaitu “*routine actions*” dan “*decisions*”. Politik luar negeri merupakan sekumpulan kebijakan yang berperan dan berpengaruh, dalam hubungan suatu negara (pemerintah) dengan negara (pemerintah) lainnya, dengan mempertimbangkan dan juga sebagai tanggapan (*respons*) terhadap kejadian dan masalah di lingkungan dunia (internasional). Dengan kata lain, politik luar negeri merupakan sintesa penjawantahan tujuan dan kapabilitas nasional (Rudy, 1993, h.15).

Hugh Gibson (1944) mendefinisikan kebijakan luar negeri, yakni sebagai berikut:

“A well rounded, comprehensive plan, based on knowledge and experience, for conducting the business of government with the rest of the world. It is aimed at promoting and protecting the interests of the nation. This calls for a clear understanding of what, whose interests are and how far we can help to go with the means at our disposal. Anything less than this falls short of being a national foreign policy”.

Dari pengertian Hugh di atas maka politik luar negeri dapat diartikan sebagai rencana komprehensif yang menyeluruh, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, untuk melakukan urusan pemerintah dengan negara di seluruh dunia. Hal tersebut bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi kepentingan negara. Ini membutuhkan pemahaman yang jelas tentang apa, kepentingan siapa dan seberapa jauh negara dapat membantu dengan sarana yang dimilikinya.

Politik luar negeri dapat dibagi ke dalam tiga macam kebijakan, sebagai berikut: 1) Kebijakan Politik dan Keamanan: hubungan diplomatik, peranan dalam PBB dan organisasi-organisasi internasional, faktor keamanan dan kapabilitas militer. 2) Kebijakan Ekonomi dan Perdagangan: Investasi dan bantuan luar negeri (baik sebagai donor maupun sebagai resipien), tarif (bea cukai) dan pengendalian perdagangan. 3) Kebijakan Sosial dan Budaya: hubungan persahabatan berlandaskan aspek sosial-budaya, komunikasi, dan kegiatan yang menyangkut ideologi. Dalam hal ini, sistem politik luar negeri dapat dilihat sebagai bagian dari sistem politik nasional dan memaknainya sebagai keseluruhan sikap dan aktifitas di mana suatu masyarakat nasional yang terorganisir mencoba menanggulangi masalah serta menarik keuntungan dari lingkungan internasional. Dengan memperoleh masukan dari lingkungan eksternal maupun internal, baik yang berupa dukungan maupun tuntutan

yang selanjutnya akan menjadi output politik luar negeri setelah melalui konversi (Rudy, 1993, h.16).

Dinamika Reunifikasi Korea Utara dengan Korea Selatan

Armstrong (2005, h.2-4) mengklasifikasikan hubungan Seoul – Pyongyang dalam 4 tahap: Tahap pertama, memiliki ciri hubungan *zero sum game* dari saling bertentangan satu sama lain. Tahap ini berakhir pada saat penandatanganan *Joint Communiqué* 1972, yaitu pertama kalinya kedua Korea melakukan hubungan dan komunikasi resmi. Gebrakan tahun 1972 hubungan antar Korea tersebut merupakan hasil dari perubahan konfigurasi dinamika Perang Dingin di Asia Timur. Tahap Kedua, periode pembicaraan timbal balik secara bertahap yang kemudian memuncak pada saat ditandatanganinya *The Agreement on Reconciliation, Nonaggression, Exchanges and Cooperation (Basic Agreement)* pada Desember 1991 dan *The Agreement on Denuclearization of the Korean Peninsula* pada Februari 1992, serta masuknya Korea Utara dan Korea Selatan secara bersamaan ke PBB pada September 1992. Tahap ini merupakan perubahan kontestasi politik Perang Dingin, termasuk pertumbuhan ekonomi dan hubungan diplomatik Korea Selatan dengan negara-negara komunis di Eropa Timur maupun Asia, runtuhnya Uni Soviet, dan berakhirnya Perang Dingin.

Tahap ketiga, ditandai dengan terbukanya Korea Utara terhadap ekonomi eksternal dan kekuatan politik. Puncaknya yaitu pada pertemuan *Inter-Korean Summit* tahun 2000 saat Presiden Korea Utara Kim Jong Il dan Presiden Korea Selatan Kim Dae-Jung bertemu. Terakhir, tahap hubungan antar-Korea saat ini mengarah ke fase keempat. Periode dengan insensitas hubungan ekonomi di Semenanjung Korea yang melewati batas dan meliputi dialog antar-Korea, Rusia, Tiongkok, Jepang dan Amerika Serikat yang kesemuanya merupakan anggota *Six Party Talks*.

Berdasarkan tahapan unifikasi Korea Utara dengan Korea Selatan dapat terlihat bahwa Korea Utara merupakan negara penganut paham realis yang masih sangat kuat. Hal tersebut terlihat dari sikap Korea Utara yang tidak pernah menunjukkan ketertarikannya untuk mereunifikasi Korea terlebih dahulu. Korea Utara berpandangan bahwa asumsi realis yang menunjukkan negara merupakan aktor rasional yang memprioritaskan kebijakan negaranya untuk memastikan keamanan negara tersebut yang kemudian menghasilkan kebijakan yang cenderung ekspansionis dalam bentuk penggunaan militer. Penggunaan militer tersebut menjadikan Korea Utara merasa perlu untuk memegang kekuasaan di wilayah Asia Timur untuk membantu melindungi dirinya sendiri dari ancaman dunia internasional yang anarki.

Upaya perdamaian di Semenanjung Korea seakan menemukan titik terang ketika pada 27 April 2018, Presiden Korea Selatan Moo Jae In dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un melakukan pertemuan di Panmunjom, yang kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan bilateral di antara mereka. Pertemuan bilateral ini menjadi bersejarah karena untuk pertama kalinya pemimpin Korea Utara melintas masuk ke wilayah

Korea Selatan setelah Perang Korea berakhir dengan gencatan senjata (bukan dengan perjanjian perdamaian) pada tahun 1953.

Pembicaraan bilateral bersejarah ini menghasilkan sejumlah kesepakatan, yaitu: Korea Selatan akan meningkatkan hubungan demi kesejahteraan bersama dan bersatu kembali secara mandiri; Korea Selatan dan Korea Utara akan bekerja sama mengurangi ketegangan militer; dan Korea Selatan dan Korea Utara akan bekerja sama mewujudkan perdamaian abadi Semenanjung Korea (Simela, 2018, h.8-9).

Kesepakatan tersebut bermula dari pendekatan yang dilakukan oleh Presiden Korea Selatan Moon Jae In. Pada 24 Juni 2017, Presiden Moon Jae In mendesak Korea Utara untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Dingin PyeongChang 2018 dalam pidatonya di *the 2017 Muju WTF World Taekwondo Championships*. Bermula dari pidato tersebut hingga seterusnya Presiden Moon terus menyampaikan pesan aspirasi Selatan untuk melakukan perdamaian permanen di Semenanjung Korea melalui pidatonya, termasuk pidatonya yang dilakukan di Berlin pada tanggal 6 Juli 2017 atas undangan Körber Foundation Jerman, pidato peringatannya untuk Hari Pembebasan Nasional ke-72 pada 15 Agustus 2017, dan pidato pada Sidang Umum PBB ke-72 pada 21 September 2017.

Pada akhirnya tanggal 1 Januari 2018, Korea Utara menanggapi desakan Presiden Moon. Dalam pidato tahun barunya, Kim Jong Un menyatakan kesediaannya untuk mengirim delegasi ke Olimpiade Musim Dingin PyeongChang 2018 dan bersedia untuk meningkatkan hubungan antar-Korea. Pertemuan tingkat tinggi antara negara Korea diadakan untuk pertama kalinya selama 2 tahun, pada tanggal 9 Januari, diikuti dengan pertemuan tingkat kerja. Kedua Korea setuju untuk membentuk tim hoki es perempuan bersama. Dari situ kemudian Perwakilan Korea Utara mengirim utusan untuk memberikan undangan kepada Presiden Moon untuk mengunjungi Pyeongyang. Presiden Moon mengirim utusan khusus ke Pyeongyang dalam kunjungan timbal-balik, dan kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi inter-Korea pada bulan April 2018 (Inter-Korean Summit Preparation Committee, 2018, h.2).

Kedua pemimpin bertemu di “*Peace house*” Panmunjom pada tanggal 27 April 2018 dan menyatakan tidak akan ada lagi perang dan era baru perdamaian telah dimulai di Semenanjung Korea. Mereka berbagi komitmen tegas untuk mengakhiri peninggalan Perang Dingin dari perpecahan dan konfrontasi yang sudah berlangsung lama. *Panmunjom Declaration on Peace, Prosperity and Reunification of the Korean Peninsula* menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya: Pertama, kedua belah pihak akan menghubungkan kembali hubungan darah bangsa dan mengedepankan masa depan kemakmuran bersama dan reunifikasi independen yang dipimpin oleh Korea dengan mencapai peningkatan dan perkembangan yang komprehensif dan penting dalam hubungan antar-Korea; Kedua belah pihak menegaskan prinsip kemerdekaan nasional yang menetapkan bahwa nasib bangsa Korea ditentukan atas kemauan mereka sendiri dan sepakat untuk membuka momen penting bagi

peningkatan dan pengembangan hubungan Korea dengan sepenuhnya menerapkan semua deklarasi antar Korea dan perjanjian yang telah diadopsi sejauh ini; Kedua pihak sepakat untuk mengadakan dialog dan negosiasi di berbagai bidang termasuk pembicaraan tingkat tinggi dan mengambil langkah-langkah aktif untuk pelaksanaan kesepakatan yang dicapai pada KTT; Kedua pihak sepakat untuk membentuk kantor penghubung gabungan dengan perwakilan dari kedua belah pihak di wilayah Kaesong untuk memastikan konsultasi yang erat antara pihak berwenang dan untuk memfasilitasi pertukaran sipil dan kerjasama yang memuaskan; Kedua pihak sepakat untuk memperkuat kerjasama, pertukaran, kunjungan, dan kontak diberbagai pihak dari berbagai lapisan masyarakat untuk memberikan momentum lebih lanjut bagi suasana rekonsiliasi nasional dan persatuan antara utara dan selatan, kedua pihak akan meningkatkan suasana rekonsiliasi dan kerjasama dengan secara aktif menggelar berbagai acara bersama pada tanggal yang memiliki arti khusus untuk Korea Selatan dan Korea Utara, seperti 15 Juni, dimana orang-orang dari semua tingkatan masyarakat termasuk pihak berwenang, parlemen, partai politik, pemerintah lokal dan organisasi sipil akan dilibatkan.

Di arena internasional, kedua belah pihak sepakat untuk menunjukkan kebijaksanaan, talenta dan persatuan bangsa dengan berpartisipasi bersama dalam acara olahraga internasional seperti Asian Games 2018 - Kedua belah pihak sepakat untuk berusaha secepatnya menyelesaikan masalah kemanusiaan yang dihasilkan dari pembagian bangsa, dan untuk mengadakan Pertemuan Palang Merah Antar Korea untuk membahas dan menyelesaikan berbagai masalah termasuk reuni keluarga dan kerabat yang terpisah. Untuk saat ini, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan reuni keluarga dan kerabat yang terpisah (Ministry of Unification, 2018).

Hasil kesepakatan kedua yaitu, kedua belah pihak akan melakukan upaya akan melakukan upaya bersama untuk meredakan ketegangan militer akut dan secara substansial menghapuskan bahaya perang di Semenanjung Korea. Mengurangi ketegangan militer dan menghilangkan bahaya perang adalah masalah yang sangat penting terkait dengan nasib bangsa dan masalah yang sangat penting untuk menjamin kehidupan yang damai dan stabil dari Kedua Korea; Kedua pihak sepakat untuk sepenuhnya menghentikan semua tindakan bermusuhan satu sama lain di setiap domain termasuk darat, laut dan udara yang merupakan akar penyebab ketegangan dan konflik militer. Untuk saat ini, merka setuju untuk menghentikan semua tindakan bermusuhan termasuk penyiaran pengeras suara dan penyebaran selebaran di daerah sepanjang Garis Demarkasi Militer (MDL) mulai 1 Mei, untuk membongkar sarana mereka dan selanjutnya untuk mengubah DMZ menjadi zona damai dalam arti yang sebenarnya; Kedua pihak sepakat untuk merancang skema praktis untuk mengubah daerah Garis Batas Utara di Laut Barat menjadi zona damai maritim untuk mencegah bentrokan militer yang tidak disengaja dan memastikan kegiatan penangkapan ikan yang aman (Ministry of Unification, 2018).

Hasil dan Pembahasan

1. Kepentingan Ekonomi

Sejak pertengahan 1990-an Korea Utara mengalami kekurangan pangan kronis. Bantuan internasional secara besar-besaran telah menyelamatkan rezim dari kelaparan dengan skala besar, tetapi populasi tetap rentan terhadap malnutrisi yang berkepanjangan dan kondisi kehidupan yang memburuk. Kondisi wilayah geografis Korea Utara sebagian besar berbukit dan terdiri dari gunung-gunung. Tanah suburnya pun terbatas, hanya sekitar 14 % dari total lahan (Soo Bin, 2003, h. 4-5). Kondisi tersebut mengakibatkan Korea Utara masuk ke dalam daftar kategori negara miskin. Kemiskinan itu ditopang oleh beberapa faktor seperti, semakin menurunnya perekonomian negara dengan hilangnya strategi perdagangan. Selain itu, faktor yang mendorong Korea Utara menjadi negara miskin adalah ketidakmampuan Korea Utara dalam mengimpor barang-barang yang diperlukan untuk menampung industri negaranya, sehingga menyebabkan kemerosotan ekonomi. Keterpurukan tersebut disusul dengan adanya pendidikan dan kesehatan yang rendah serta kurang memadai, juga munculnya bencana banjir yang kemudian diikuti kemarau dahsyat selama beberapa tahun (Purwono dan Zuhri, 2010, h. 8)

Ekonomi Korea Utara terkontraksi tajam dalam dua dekade terakhir pada 2017. Bank Sentral Korea Selatan menyebut penurunan ini jelas sebagai pertanda dampak diterapkannya sanksi internasional kepada Pyongyang agar menghentikan program senjata nuklir dan rudalnya. Produk domestik bruto Korea Utara pada tahun 2017 turun hingga minus 3,5 persen dari 2016 sehingga membuat kontraksi ini terbesar sejak Korea Utara mengalami musibah kelaparan 1997. Produksi industri Korea Utara pun anjlok 8,5 persen yang merupakan penurunan paling curam sejak 1997 karena produksi pabrik lumpuh akibat larangan menjual minyak dan sumber-sumber energi lainnya ke Korea Utara. Hasil produksi dari sektor pertanian dan industri konstruksi pun bernasib serupa, yang terkontraksi 1,3 persen dan 4,4 persen (Sekarwati, 2018).

Tabel 1. Pertumbuhan PDB Korea Utara (Dalam Satuan Persen)

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0,8	1,3	1,1	1,0	-1,1	3,9	-3,5

Sumber: Bank of Korea

Kondisi perekonomian Korea Utara pasca pemutusan perdagangan dengan Korea Selatan semakin diperparah dengan embargo yang dilakukan oleh Tiongkok. Hal tersebut dikarenakan, Tiongkok sebagai sekutu terdekat Korea Utara dinilai memiliki peran penting dalam menghentikan proliferasi nuklir Korea Utara dan menjamin keamanan regional Asia Timur. Akan tetapi kedekatan kedua negara dapat menjamin ancaman bagi kawasan, apabila Tiongkok membiarkan Korea Utara melakukan

proliferasi nuklir dan melindungi Korea Utara dari sanksi PBB melalui hak veto yang dimiliki oleh Tiongkok. Di sisi lain, Tiongkok tidak dapat mengabaikan nilai strategis Korea Utara, namun juga tidak dapat mengabaikan tanggapan dunia internasional. Dengan demikian, Tiongkok menanggapi pengembangan nuklir Korea Utara dengan menyetujui resolusi dari DK PBB untuk memberikan sanksi terhadap Korea Utara.

Keikutsertaan Korea Utara dalam KTT 2018 akan menghasilkan kerjasama ekonomi dan interaksi dengan Korea Selatan yang lebih harmonis. Serta mendorong transformasi ekonomi dan politik luar negeri Korea Utara secara bertahap, dengan manfaat langsung akan membantu memajukan proses integrasi ekonomi antar Korea dan juga bagi perdamaian internasional. Terintegrasinya Korea Utara dengan Korea Selatan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Korea Utara yang lama terisolasi dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi perdamaian di kawasan Asia Timur. Dengan mendorong Korea Utara dalam proses pertumbuhan ekonomi dengan cara yang substansial akan menguntungkan rakyatnya secara keseluruhan. Namun keterlibatan dua negara Korea tidak akan menjamin terwujudnya reformasi dan pembukaan berkelanjutan serta hubungan luar negeri yang kurang bermusuhan. Meskipun demikian proses tersebut akan membantu memajukan proses integrasi ekonomi.

2. *Kepentingan Politik*

Dilema mendasar yang dihadapi Kim Jong Un adalah bagaimana mendapatkan sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk mempertahankan rezim sambil mempertahankan isolasi politik yang penting bagi kelangsungan hidup rezim. Mengutip catatan dari Victor Cha dalam Washington Post (2009): *“The North Korean needs to open up to survive, but the process of opening can lead the regime’s demise.”* Kepemimpinan Korea Utara membutuhkan sumber daya ekonomi eksternal. Namun disisi lain, Korea Utara harus mengurangi efek negatif dari ketergantungan ekonomi dengan menuntut warga Korea Utara untuk memiliki kesetiaan politik yang tinggi terhadap rezim. Pada saat ini Korea Utara telah menemukan solusi dalam bernegosiasi dengan Tiongkok untuk menoleransi provokasi rezim Kim sambil mempertahankan hubungannya dengan Tiongkok, meskipun terdapat sanksi-sanksi baru yang dilayangkan Tiongkok kepada Korea Utara. Untuk saat ini, Korea Utara tidak melihat perlunya membuat pembukaan yang drastis terhadap ekonomi global (The National Institute for Defense Studies, 2017, h. 191).

Kim Jong Un hingga saat ini masih memiliki ikatan yang kuat dengan pendahulunya, hal ini berarti garis besar haluan negara ini masih sama dengan besar haluan negara pada saat Korea Utara di bawah kepemimpinan ayahnya Kim Jong Il. Seperti yang dialami oleh ayahnya ketika Korea Utara mengalami krisis pangan dan ekonomi tahun 1990 yang mengakibatkan jutaan penduduk Korea Utara meninggal akibat kelaparan. Korea Utara mendefinisikan krisis ekonomi dan kekurangan pangan yang parah itu sebagai ‘parade kesulitan’, dengan tujuan untuk mengatasi masalah itu dengan mengutip kasus dramatis dalam sejarah komunisme. Hal itu menunjukkan bahwa

rezim Korea Utara memandang krisis ekonomi itu akan dapat juga menjadi ancaman serius bagi rezim mereka.

Salah satu upaya yang dilakukan Kim Il Sung untuk keluar dari krisis ekonomi tersebut yaitu melakukan dialog dengan Korea Selatan melalui KTT Korea 2000. Pada KTT tersebut Korea Utara berhasil mendapatkan bantuan-bantuan berupa beras, pupuk kimia, obat-obatan dan lain-lain untuk dapat melunakan pemerintahan Pyongyang. *Sunshine Policy* yang dicanangkan oleh Kim Dae Jung Presiden Korea Selatan lebih mengedepankan kerjasama dan pertukaran perdagangan sehingga Korea Utara juga akan mendapatkan keuntungan finansial dari kerjasama tersebut.

Sama halnya dengan apa yang dialami oleh Kim Jong Un saat ini. Kemerosotan ekonomi Korea Utara dan berkurangnya dukungan dari Tiongkok tentu dapat mengancam keberlangsungan rezim politiknya. Kim Jong Un kemudian mengambil jalan yang sama dengan ayahnya yaitu melakukan dialog dengan Korea Selatan untuk mempertahankan rezim Korea Utara. Dialog KTT 2018 ini berbeda dengan dialog KTT 2000, karena pada tahun 2018 Korea Utara tidak hanya melakukannya dengan Korea Selatan namun juga melakukan pertemuan dengan Presiden Trump. Hal ini untuk membuktikan bahwa Korea Utara serius untuk melakukan tahapan denuklirisasi, dan mengurangi ketegangan dengan negara lawannya. Dengan begitu rezim Kim mendapatkan kepercayaan kembali dalam memimpin negaranya dan rezim Kim tetap dapat mempertahankan kekuasaannya.

3. Kepentingan Keamanan

Dalam jurnal *Geophysical Research Letters* (Dongdong, dkk, 2018, h. 3982) mengungkapkan bahwa uji coba nuklir 3 September 2017 telah mengakibatkan keruntuhan di lokasi pusat uji coba nuklir. Insiden ini dapat dipastikan karena tidak adanya laporan gempa bumi di wilayah tersebut. Situs uji coba nuklir Punggye-ri terkubur di bawah reruntuhan Gunung Mantap setelah Korea Utara melaksanakan uji coba bom nuklir pada 3 September 2017. Para peneliti mendapati bahwa empat gempa bumi pada bulan September berkumpul pada satu titik, yakni Gunung Mantap. Menurut para peneliti, aktivitas uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara telah melebihi kapasitas area di sekitarnya hingga mencapai tahap “kegagalan kritis”.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa upaya mempertahankan keamanan dan kedaulatan yang menjadi prioritas utama Korea Utara melalui program nuklirnya telah mengalami kemerosotan. Ideologi kemandirian *Juche* yang dicetuskan oleh pemimpin Korea Utara telah menjadi permodelan ideologi kebijakan keamanan dan politik luar negeri telah mengalami pergeseran. Kini pemerintah Korea Utara memusatkan politik luar negeri nya pada bidang ekonomi, tidak lagi pada keamanan melalui bidang militernya. Runtuhnya pusat penelitian nuklir Korea Utara membuat Korea Utara mengalami kerugian. Dalam dunia internasional juga akan mempengaruhi *power* yang dimiliki Korea Utara.

Military defense yang awalnya menjadi politik luar negeri Korea Utara didasarkan pada konsep *deterrence* yang dianut Korea Utara. Hal tersebut dikarenakan Korea Utara percaya bahwa usahanya untuk memaksa negara lain mempercayai bahwa dengan kepemilikan senjata nuklirnya tidak akan sebanding dengan apa yang akan dikeluarkan oleh musuh untuk menaklukkan Korea Utara. Konsep ini menjadi gagal dan memaksa Korea Utara memutar posisi politik luar negerinya ketika Korea Utara sudah tidak bisa lagi berkomitmen serta memiliki kapabilitas dan kredibilitas untuk menunjukkan kemampuannya nuklirnya yang dikarenakan runtuhnya setengah situs Punggye-ri.

Penutup

Terwujudnya KTT Antar Korea dan KTT AS-Korea Utara disebabkan karena banyaknya faktor pendorong yang menyebabkan Korea Utara berada diposisi yang tidak dapat menguntungkan negaranya sendiri. Faktor tersebut berasal dari faktor ekonomi, politik, maupun keamanan serta kondisi hancurnya pusat penelitian nuklir Korea Utara. Banyaknya tekanan dunia internasional juga mendorong Korea Utara terpaksa untuk setuju mengikuti KTT. Berdasarkan faktor ekonomi penurunan yang signifikan dari perekonomian Korea Utara mendorong Korea Utara untuk memulihkan hubungan dengan Korea Selatan melalui KTT Antar Korea 2018.

Keikutsertaan Korea Utara dalam KTT 2018 akan menghasilkan kerjasama ekonomi dan interaksi dengan Korea Selatan yang lebih harmonis. Namun dari faktor politik, keterlibatan antar Korea tidak akan menjamin terwujudnya reformasi dan pembukaan berkelanjutan serta hubungan luar negeri yang kurang bermusuhan. Meskipun demikian proses tersebut akan membantu memajukan proses integrasi ekonomi, mengejar pemulihan ekonomi dengan mengurangi ketegangan melalui rekonsiliasi dengan Korea Selatan, termasuk Amerika Serikat.

Keputusan ini merupakan bagian dari keputusan politik Kim Jong Un yang tidak hanya akan menyelamatkan negaranya tapi juga kelangsungan rezim kekuasaannya. Pelunakan sikap yang ditunjukkan Kim Jong Un memberikan kepercayaan lebih dunia internasional terhadap masa depan perdamaian di semenanjung Korea. Setidaknya, inilah yang memang harus dipilih oleh pemimpin. Bagaimanapun, kepentingan nasional merupakan tujuan akhir dari tiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara. Baik dicapai melalui perang ataupun menegosiasikannya dalam kerangka kerjasama.

Bibliografi

Armstrong, Charles K. 2005. *Inter-Korean Relations in Historical Perspective. International Journal of Korean Unification Studies*. Vol. 14, No 2, 1-20.

- Bechtol Jr, Bruce E. (2013, Fall). The North Korean Military Under Kim Jong-un Evolved or Still Following a Kim Jong-il Script? *International Journal of Korean Studies*. Vol. XVII, No. 2, 93-115
- Cha, Victor. (2009, Juni 14). *What North Korea really Wants*. Washingtonpost.com. Diakses dari <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/06/12/AR2009061202685.html>
- Effendi, Irmawan. (2012). Kebijakan Extended Deterrence Amerika Serikat dalam Konflik Dua Korea. *Jurnal ISIP*. Vol.XI, No. 1, 47-58.
- Gibson, Hugh. (1944). *The Road of Foreign Policy*. New York : Doubleday
- Immelman, Aubrey. (2018, April). *The Personality Profile of North Korea Supreme Leader Kim Jong-Un*. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/325202638_The_Personality_Profile_of_North_Korean_Supreme_Leader_Kim_Jong-un
- Inter-Korean Summit Preparation Committee. (2018). *Peace, A New Start*. Diakses pada 27 September 2019 dari http://www.korea.net/FILE/pdfdata/2018/04/2018_inter-korean_summit_EN.pdf
- Ministry of Unification. *Inter-Korean Dialogue*. Diakses pada 21 November 2018 dari https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/relations/statistics/dialogue/
- Morgenthau, Hans J. (2010). *Politik Antarbangsa*. (S. Maimoen, A.M. Fatwan, Cecep Sudrajat, Terjemahan). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muhammad, Simela Victor. 2018. Perdamaian di Semenanjung Korea Pasca-Pertemuan Moon Jae-In dan Kim Jong Un. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*. Vol. X, No.9, 7-12.
- Park, Soo-Bin. (2004). *The North Korean Economy: Current Issues and Prospects*. Canada, Carleton University. Diakses pada 12 Desember 2018 dari <https://carleton.ca/economics/wp-content/uploads/cep04-05.pdf>
- Purwono, Andi dan Zuhri, S. Ahmad. (2010, Juni). Peran Nuklir Korea Utara Sebagai Instrumen Diplomasi Politik Internasional. *SPEKTRUM Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*. Vol.7, No.2, 1-18.
- Rudy, T. May. (2002). *Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Refika: Bandung.
- Rudy, T. May. (1993). *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*. Bandung: Angkasa.
- Sekarwati, Suci. (2018, Juli 20). *Diembargo Dunia, Ini Nasib Ekonomi Korea Utara*. Tempo.co. Diakses dari <https://dunia.tempo.co/read/1108895/diembargo-dunia-ini-nasib-ekonomi-korea-utara>.
- Silberstein, Benjamin K. (2019). *North Korea's Economic Contraction in 2018: What The BoK Numbers Tell Us*. Diakses pada 27 September 2019 dari <http://www.nkeconwatch.com/category/statistics/gdp-statistics/>

- The National Institute for Defence Studies. (2017). *The Kim Jong Un Regime and the Future Security Environment Surrounding the Korean Peninsula*. Tokyo: NIDS International Symposium on Security Affairs.
- Tian, Dongdong., Yao, Jiayuan., Wen, Lianxing. (2018, April 27). Collapse and Earthquake Swarm After North Korea's 3 September 2017 Nuclear Test. *Geophysical Research Letters*. <https://doi.org/10.1029/2018GL077649>. Diakses 27 September 2019, dari <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2018GL077649>

Penguatan Enmeshment Strategy Indonesia dalam IORA Menuju Integrasi Institusi Pengamanan Maritim Regional di Kawasan Samudra Hindia

Anggun Puspitasari¹

¹Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Budi Luhur, Jakarta

Corresponding email: anggun.puspitasari@budiluhur.ac.id

Abstract



This paper aims to explain the diplomatic strategies that Indonesia may adopt by leveraging the existing IORA (The Indian Ocean Rim Association) forum on regional integration of maritime security institutions in the Indian Ocean region. Indonesia, which has a very large maritime territory, must take advantage of this in order to achieve national interest in various sectors, especially maritime security. IORA is the only regional organization in the Indian Ocean region that has adopted maritime security as one of the main focus of cooperation among its members. Indonesia leverages the region's maritime connectivity forums in order to prioritize infrastructure development, and maritime security. Indonesia can utilize the Enmeshment (External) strategy to externalize IORA's agenda of joint maritime security in the Indian Ocean. The fact that IORA is a relatively newly established regional organization, with member states that has different strategic interests as well as longstanding member states, will be a unique challenge for Indonesia to influence the whole region.

Kata kunci

IORA, Maritime, Institution, Enmeshment Strategy

Pendahuluan

Dewasa ini, kepentingan nasional sebagian besar bangsa-bangsa di dunia sangat dipengaruhi oleh fenomena kemaritiman dunia. Fenomena tersebut berkaitan dengan fakta umum bahwa dua pertiga bagian dari permukaan bumi adalah lautan. Kepentingan tersebut secara spesifik dijabarkan oleh masing-masing negara ke dalam tujuan politik, ekonomi dan militer. Hal ini berdampak luas kepada upaya bangsa-bangsa di dunia dalam meningkatkan kekuatan dan keamanan teritorialnya. Konsekuensinya, strategi apapun yang dilakukan untuk melakukan upaya pertahanan dan keamanan negara, harus bertumpu kepada kekuatan maritime (Till 2018). Indonesia merupakan negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.000 pulau besar dan kecil. Sekitar 70% wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Sebagai negara kepulauan yang memiliki perairan laut yang sangat luas, sektor maritim dan kelautan

tentu menjadi sangat strategis bagi Indonesia ditinjau dari aspek ekonomi, lingkungan, sosial-budaya serta hukum dan keamanan. Indonesia berada di jalur persilangan perdagangan dunia dimana paling tidak 70% angkutan barang melalui laut dari Eropa, Timur Tengah dan Asia Selatan ke wilayah Pasifik, dan sebaliknya, harus melalui perairan Indonesia. (Rochwulaningsih Sulistiyono Masruroh 2019)

Pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla pada tahun 2014 membuat sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. (CSIS 2014) Visi Poros Maritim Dunia termasuk dalam Cita Pertama, Cita Keenam dan Cita Ketujuh dari Nawa Cita yang dimana Ketiga Cita tersebut saling berhubungan dengan Visi yang sedang difokuskan oleh pemerintah (KPU 2014). Poin pertama di dalam Nawa Cita adalah Jokowi-JK ingin menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Indonesia. (KPU 2014) Perlindungan yang dimaksud ialah melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara melalui landasan kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Pengembangan sektor kelautan menjadi fokus Indonesia pada abad ke-21 dan menekankan 5 (lima) pilar utama dalam Poros Maritim Dunia (CSIS 2014), yaitu *Pertama*, Budaya Maritim yang bertujuan membangun kembali budaya maritim Indonesia melalui redefinisi identitas nasional Indonesia sebagai sebuah negara maritim. *Kedua*, Ekonomi Maritim yang bertujuan untuk mengelola dan sekaligus melestarikan sumber daya maritim bangsa. *Ketiga*, Konektivitas Maritim bertujuan untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur maritim, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan pariwisata laut. *Keempat*, Diplomasi Maritim yang bertujuan untuk optimalisasi *soft power* dalam menangani ancaman regional dan peningkatan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang maritim. *Kelima*, Keamanan Maritim bertujuan mempersiapkan *hard power* untuk memperkuat kekuatan pertahanan maritim Indonesia dalam usaha pengamanan wilayah Indonesia.

Dalam hal ini, visi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia ditinjau berdasarkan sejarah, letak geostrategis dan keinginan agar eksistensi bangsa diperhitungkan di tingkat regional maupun global. Visi ini merupakan langkah panjang, untuk tercapainya membutuhkan konsistensi kebijakan, kerjasama, serta kesungguhan untuk mencapainya. Dengan kemaritimannya yang sangat luas, Indonesia memiliki potensi yang sangat banyak seperti potensi perairan yang strategis, potensi sumber daya kelautan seperti penangkapan ikan, membudidayakan perikanan, juga perikanan tambak serta potensi pertambangan energi lepasantai. Hal ini merupakan modal besar bagi Indonesia untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia. Visi Poros Maritim Dunia pada dasarnya adalah bentuk dari kesadaran akan posisi strategis Indonesia yang merupakan bagian jalur perdagangan dunia (SLOT) yang secara umum perairan

Indonesia sudah sejak lama dijadikan jalur komunikasi dan perhubungan dunia (SLOC) (Supandi 2016). Dalam hal ini, Indonesia juga mendapatkan perhatian serius dari negara-negara pengguna laut karena memiliki tiga *choke point* yang terletak di tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok.

Namun, untuk mencapai visi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia tidaklah mudah karena adanya permasalahan dan hambatan yang terjadi di perairan laut Indonesia yaitu masalah pertama, penangkapan ikan secara ilegal yang dimana perairan Indonesia sering di datangi oleh kapal-kapal asing dari negara tetangga untuk mencuri ikan. Masalah kedua, teknologi yang dimana kelemahan nasional dalam menguasai dan mengembangkan teknologi dibidang maritim (Pardosi 2016). Masalah ketiga adalah ekonomi, pada saat ini kemaritiman Indonesia belum membawa pengaruh signifikan bagi perekonomian Indonesia, ini dikarenakan Indonesia masih belum bisa menguasai kemaritimannya dan lebih bergantung kepada wilayah daratannya.

Kesungguhan Indonesia dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia setidaknya dapat dilihat dari adanya keinginan kuat dari pemerintah untuk membangun tol laut (Deny 2015). Pembangunan tol laut adalah jalur pelayaran yang bebas hambatan. Jalur-jalur tersebut menghubungkan berbagai pelabuhan di Indonesia. Tujuannya, agar sistem distribusi berjalan lancar. Selain membangun tol laut, pemerintah juga melakukan pembangunan pelabuhan yang dimana ini masih menjadi bagian dari pembangunan tol laut yang akan menghubungkan antar pulau. Saat ini, sudah ada 5 pelabuhan yang diresmikan Presiden Jokowi sebagai wujud dari pembangunan tol laut. Lima pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Tobelo, Pelabuhan Galale, Pelabuhan Tutu Kembang, Pelabuhan Teor dan Pelabuhan Wonrell (Yulika 2016). Lalu, promosi jargon Indonesia sebagai poros maritim dunia dilakukan dalam berbagai pertemuan dan perhelatan baik secara bilateral, regional maupun multilateral (Rustam 2016). Selain itu, ada wacana mengenai penambahan dan peningkatan armada angkatan laut untuk menyeimbangkan keamanan laut dari berbagai ancaman keamanan laut di berbagai daerah seluruh Indonesia.

Pada kenyataannya, Indonesia sudah lebih unggul dilihat dari bidang maritim nya yang tidak dimiliki negara lain karena terdapat Sumber Daya Alam (SDA) yang baik. Hal ini bisa dijadikan untuk kekuatan Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Oleh karena itu, pengelolaan teritorial wilayah laut sekarang menjadi fokus pemerintah Indonesia agar visi Poros Maritim Dunia bisa tercapai. Dalam mewujudkan Poros Maritim dibutuhkan strategi-strategi yang baik karena pencapaiannya sangat tidak mudah. Salah satunya dengan kerjasama Indonesia dengan Organisasi Regional di Samudera Hindia yaitu *Indian Ocean Rim Association* (IORA).

Indian Ocean Rim Association atau disebut dengan IORA merupakan satu-satunya organisasi regional di Samudera Hindia. Samudera Hindia merupakan laut terbesar ketiga di dunia. Samudera Hindia ini berperan strategis terutama untuk perekonomian

dunia karena merupakan jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Asia dan Eropa. *Indian Ocean Rim Association* (IORA) didirikan secara resmi pada tanggal 6-7 Maret 1997 (Kemlu 2016). Saat ini IORA beranggotakan 21 negara yaitu: Afrika Selatan, Australia, Bangladesh, Komoros, India, Indonesia, Iran, Kenya, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambuk, Oman, Persatuan Emirat Arab, Seychelles, Singapura, Somalia, Sri lanka, Tanzania, Thailand dan Yaman (IORA 2016). IORA juga melibatkan 7 negara mitra dialog yaitu: Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis dan Tiongkok. Dan terdapat juga 2 organisasi yang peninjau IORA yaitu: *Indian Ocean Tourism Organization* (IOTO) dan *Indian Ocean Research Group* (IORG).

Dalam hal ini, wilayah yang terdiri dari negara-negara yang terletak disekitar Samudera Hindia. Wilayah ini merupakan rumah bagi sekitar dua miliar orang. Wilayah ini memiliki keragaman budaya dan kekayaan-dalam bahasa, agama, tradisi, seni dan masakan. Negara-negara Samudera Hindia Rim juga bervariasi dalam hal daerah mereka, populasi dan tingkat pembangunan ekonomi. Mereka juga dapat dibagi menjadi beberapa sub-daerah (Australia, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat dan Timur & Afrika Selatan), masing-masing dengan kelompok regional mereka sendiri (seperti ASEAN, SAARC, GCC dan SADC, untuk nama beberapa) (IORA 2016). Namun, organisasi-organisasi regional tersebut mempunyai fokus yang beragam dan tidak menempatkan isu keamanan maritime sebagai fokus utama. Dengan demikian IORA merupakan satu-satunya organisasi regional di kawasan Benua Hindia yang mengakomodasi keamanan maritim sebagai fokus utama. IORA dapat dikatakan merupakan organisasi maritim yang dapat menjadi simbol integrasi institusi pengamanan maritim regional di kawasan Samudra Hindia.

Keselamatan dan keamanan maritim merupakan wilayah penting bagi IORA. Keamanan Samudera Hindia merupakan kunci yang sangat penting untuk meningkatkan pergerakan barang dan orang di antara negara-negara anggotanya termasuk Indonesia yang merupakan anggota IORA telah melakukan kerjasama diberbagai bidang terutama bidang kemaritiman di Samudera Hindia ini. Sesuai dengan UU No 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025, ditegaskan dalam Misi ke-7 untuk Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional (Murniningtyas 2016).

Maka dari itu, sesuai dengan pilar Poros Maritim disampaikan pada KTT Asia Timur bulan November 2014 lalu, yang berisi bahwa Indonesia akan menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun pangan laut melalui pengembangan industri perikanan yaitu Indonesia akan melakukan pengembangan konektivitas maritim, termasuk pengembangan pariwisata yang Indonesia akan mendorong kerjasama dalam menghilangkan sumber-sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, wilayah sengketa, perampokan dan pencemaran laut dan Indonesia juga akan mempertahankan kemaritiman untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritime (Till

2013). Walaupun demikian, keamanan dan keselamatan maritim di wilayah Samudera Hindia menghadapi berbagai persoalan dan tantangan, yaitu berupa kejahatan tradisional maupun non-tradisional, antara lain perompakan, pencurian ikan, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, perdagangan senjata, dan perubahan iklim. Hal ini, menjadi tujuan IORA untuk mengamankan kawasan maritim baik di Indonesia maupun di Samudera Hindia.

Dengan Visi Poros Maritimnya, Pemerintahan Jokowi berupaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berpengaruh di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dengan cara mengintegrasikan dua samudera tersebut sebagai lingkungan strategis politik luar negeri. Indonesia dapat memperoleh manfaat dan mempengaruhi arah perkembangan kawasan di Samudera Hindia jika mampu mengikuti kegiatan IORA yang berdasarkan enam prioritas utamanya dengan pilar Poros Maritim yang disusun Presiden Jokowi. Keketuaan IORA yang dipegang Indonesia harus dapat di manfaatkan untuk tujuan ini. Indonesia dapat memanfaatkan strategi *Enmeshment* (mengumpulkan) kekuatan-kekuatan eksternal (*Eksternal power*) untuk mensinergikan agenda IORA dalam hal pengamanan maritim bersama di kawasan Samudra Hindia.

Tinjauan Pustaka

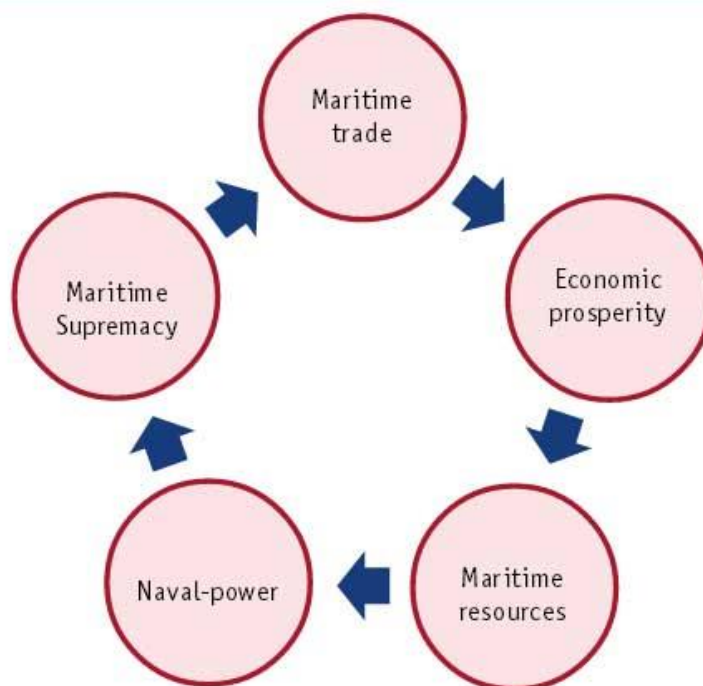
Penguatan Institusi Maritim Samudra Pasifik

Menurut Geoffrey Till didalam bukunya, *Seapower*, kekuatan maritim ada kalanya dimaksudkan hanya berhubungan dengan angkatan laut, kadang-kadang juga diartikan sebagai angkatan laut dalam hubungannya dengan kekuatan darat dan udara (Till 2013). Kekuatan maritim juga diartikan sebagai angkatan laut yang dalam kaitannya dengan semua kegiatan yang berhubungan dengan komersil dan penggunaan nonmiliter terhadap laut. Bahkan, istilah maritim diartikan sebagai meliputi tiga aspek diatas. Selain itu, menurut Geoffrey Till, istilah *Seapower* dapat dilihat dari dua aspek berikut; Input dan Output (Kok Giok 2016). Dari aspek input bisa dilihat bahwa *Seapower* adalah angkatan laut, penjaga pantai, laut dan industri maritim nonmiliter yang secara luas dan sepanjang ada relevansinya, dan juga meliputi kekuatan darat dan laut. *Seapower* dilihat dari aspek output merupakan *Seapower* yang bukan hanya tentang apa yang diperlukan untuk menggunakan dan mengendalikan laut, tetapi juga merupakan kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau sesuatu yang dikerjakan orang di laut atau dari laut (Gill Mitra 2018). Istilah ini mendefinisikan *Seapower* dalam terminologi hasil, sebagian keluaran atau output, bukan sebagai faktor yang dibutuhkan atau di input, atau jelasnya bukan cara tetapi tujuan.

Dilihat dari gambar berikut, “(*Maritime trade*) atau Perdagangan Maritim dan Angkatan laut (*Naval power*) merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan sebab perdagangan maritim merupakan perdagangan yang dilakukan dijalur laut dengan menggunakan kapal-kapal laut dengan negara-negara yang juga melakukan

perdagangan maritim. Sedangkan Angkatan Laut ialah angkatan bersenjata suatu negara yang digunakan untuk mengamankan perairan laut. Teori Mahan menyatakan bahwa kekuatan angkatan laut dan perdagangan maritim serta pengiriman yang damai dapat menuju kemakmuran ekonomi (Kok Giok 2016). Dengan adanya perdagangan maritim yang lancar dan baik akan mencapai kemakmuran ekonomi disuatu negara, kemudian menghasilkan sumber daya yang dimanfaatkan untuk memperkuat kekuatan angkatan laut yang mengarah ke supremasi maritim, yang selanjutnya memastikan perdagangan maritim aman.”

Gambar 1. Sea Power dan kaitannya terhadap kemakmuran



Sumber: Khoo Kok Giok, 2016, *Sea Power As A Strategic Domain*, Singapura: Ministry of Defense online

Laksamana Muda Alfred Thayer Mahan, Seorang ahli strategi angkatan laut dan geopolitik menyatakan “*Control of the sea by maritime commerce and naval supremacy means predominant influence in the world ... (and) is the chief among the merely material elements in the power and prosperity of nations*” (Kok Giok 2016). Menurut Mahan, penguasaan atas jalur perdagangan dan supremasi kekuatan angkatan laut merupakan cara untuk meraih dominasi pengaruh di dunia sekaligus merupakan elemen penting bagi kekuatan dan kemakmuran suatu bangsa dan bahwa negara-negara mengabaikan kekuatan laut pada resiko mereka sendiri.

Selain itu, menurut Sir Julian Corbett, makna sesungguhnya dari *seapower* bukanlah apa yang terjadi di laut, tetapi bagaimana ia mempengaruhi jalannya peristiwa di darat

(Till 2013). Karena manusia hidup di darat tidak hanya di laut, namun dengan seiring berjalannya waktu laut menjadi bagian penting mengingat banyaknya sumber daya yang harus di kontrol dan dimanfaatkan dengan baik. Angkatan laut berfokus untuk mengontrol keamanan laut agar tidak adanya akses bagi musuh terhadap kawasan laut.

Berdasarkan uraian diatas, Indonesia yang memiliki perairan laut yang sangat luas harus memanfaatkan perairannya agar dapat mencapai keberhasilan diberbagai sektor. Kekuatan laut (*Seapower*) yang dijadikan sebagai bagian dari politik internasional, dimana siapa untuk mendapatkan apa, kapan dan bagaimana (*who gets what, when, and how*). Manhan juga menyatakan, bahwa kekuatan laut (*sea power*) adalah kunci kekuatan dunia yang dibutuhkan kemampuan untuk menjaga akses maritim atau kontrol laut (*one's own maritime access sea control*) dan mencegah akses oleh musuh (*sea denial*) (Gompert, 2013). Indonesia yang ingin mewujudkan negaranya menjadi negara Poros Maritim Dunia harus bisa memanfaatkan lautnya untuk kejayaan negaranya, dengan cara memperkuat *seapower* atau kekuatan maritimnya agar wilayah maritimnya tetap aman. Selain itu juga Indonesia bisa memanfaatkan maritimnya untuk bekerjasama dengan negara lain atau dengan organisasi Internasional seperti *Indian Ocean Rim Association* (IORA) yang merupakan organisasi regional di Samudera Hindia. Dengan Indonesia bekerjasama dengan *Indian Ocean Rim Association* (IORA) secara tidak langsung Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain yang merupakan anggota dari *Indian Ocean Rim Association* (IORA), hal ini juga dapat memberikan keuntungan yang besar bagi negara anggota termasuk Indonesia karna fokus utamanya sama untuk memanfaatkan maritim mereka di Samudera Hindia untuk mencapai tujuan dan kepentingan negara anggotanya masing-masing.

Seperti yang Mahan sampaikan diatas, bahwa untuk mencapai kemakmuran suatu negara atau bangsa perlu adanya kekuatan laut yang sangat kuat karena itu menjadi kunci utama yang sangat penting. Dengan adanya perdagangan dijalur maritim seperti di Samudera Hindia ini, pasti dapat membawa keuntungan dari perdagangan maritim yang bisa memberikan kemakmuran ekonomi negaranya. *Seapower* adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku atau peristiwa masyarakat dengan apa yang kita lakukan pada atau dari laut, dalam mendukung kepentingan nasional (Koh Giok 2016). Dari ketiga pemikir diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa menurut

Manhan dari *Seapower* yaitu adanya keterkaitan kekuatan laut dengan politik internasional untuk mencapai kemakmuran ekonomi. Menurut dari pemikiran Corbett yaitu pemikirannya terkait dengan kontrol laut, dimana perlu adanya kontrol laut untuk menjaga keamanan laut. Terakhir menurut Till yaitu *Seapower* sebagai instrumen nasional dan berhubungan dengan angkatan laut.

Dalam upaya mewujudkan *Seapower* yang kuat di suatu negara perlu adanya dilakukan kerjasama dengan negara lain atau dengan organisasi internasional. Kerjasama ini sangat penting untuk dilakukan mengingat dengan terjalannya kerjasama

dengan negara lain atau organisasi internasional bisa mendorong tercapainya kepentingan nasional termasuk di bidang maritim. Kerjasama internasional pada dasarnya muncul karena adanya kebutuhan suatu negara untuk memenuhi dan mencapai kepentingan nasionalnya, namun kemampuan dan potensi yang ada tidak cukup sehingga negara tersebut membutuhkan negara lain untuk mencapai kepentingannya, sehingga kemudian muncul kerjasama antara negara satu dengan negara yang lainnya.

Dr. Budiono membagi kerjasama internasional kedalam empat bentuk yaitu Kerjasama Global, Kerjasama Regional, Kerjasama Fungsional dan Kerjasama Ideologis (Kusumohamidjojo 1987). Dimana kerjasama regional (*Regional Cooperation*) merupakan kegiatan yang dilakukan antar dua negara atau lebih yang berada didalam suatu kawasan atau berdekatan secara geografis dengan membuat perjanjian-perjanjian yang telah disepakati demi terciptanya suatu tujuan bersama atau mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dibandingkan upaya yang di ambil masing-masing negara. Kerjasama regional ini meliputi kerjasama dibidang ekonomi, sosial-budaya, keamanan dan juga maritim. Indonesia menekankan kerjasama dengan negara-negara di dunia internasional yang dalam lingkaran konsentris (*concentric circles*) yang dibagi menjadi tiga yaitu pada lingkaran pertama adalah Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang merupakan pilar utama untuk Indonesia menjalankan politik luar negerinya. Lingkaran kedua adalah ASEAN + (Jepang, China, Korea selatan) diluar hal tersebut Indonesia juga melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang merupakan partner utama ekonomi Indonesia. Dan terakhir, lingkaran ketiga adalah Indonesia mengakui pentingnya menggalang kerjasama dengan like-minded developing countries (Kemlu 2016). Dengan forum-forum tersebut, Indonesia dapat menerapkan diplomasinya untuk memperkuat kerjasama regionalnya dalam rangka menjembatani antara negara berkembang dengan negara maju.

Berdasarkan penjelasan diatas, IORA merupakan bentuk kerjasama regional yang proses pengambilan keputusannya dilakukan bersama oleh anggota negara IORA. Kerjasama regional ini dilakukan bertujuan untuk membangun rasa aman baik secara politis maupun ekonomis, meningkatkan kapasitas pembangunan, mengelola friksi perdagangan, serta menjaga keamanan dan stabilitas maritim di Samudera Hindia. Indonesia bisa memanfaatkan kerjasama regional dengan IORA untuk mencapai kepentingannya terutama menjadikan Indonesia sebagai negara Poros Maritim Dunia. Dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia, dibutuhkan strategi-strategi yang baik karena pencapaiannya sangat tidak mudah. Salah satu strategi yang mungkin dilakukan oleh Indonesia adalah mengedepankan strategi diplomasi *enmeshment*. Strategi diplomasi yang memanfaatkan institusi-institusi internasional dalam hal ini adalah IORA sejalan dengan paradigma “masyarakat internasional”. Tulisan berikut ini hendak menjabarkan pentingnya strategi diplomasi *enmeshment* bagi Indonesia pada

forum IORA untuk mencapai visi Poros Maritim Dunia. Analisa dilakukan dengan mempertimbangkan modalitas Indonesia. Pada akhirnya, tulisan ini menjelaskan kesempatan yang mungkin dilakukan oleh Indonesia dengan memanfaatkan forum-forum kerjasama yang ada demi pencapaian Poros Maritim Dunia.

Hasil dan Pembahasan

Strategi Enmeshment Diplomacy Indonesia di IORA

Secara konseptual, paradigma “masyarakat internasional” berpandangan bahwa melalui organisasi dan institusi, aktor-aktor yang berperan di dalamnya dapat saling terlibat dalam hubungan yang konstruktif demi mencapai kepentingannya masing-masing (Bull 1995). Paradigma “masyarakat internasional” yang disampaikan oleh Hedley Bull, Martin Wight, dan Shaun Narine, menyakini bahwa ketertiban dunia dapat dicapai bila disandarkan pada keseimbangan norma-norma universal, terutama budaya dan kepentingan. Walaupun hal tersebut tidak mutlak dan tidak dapat dengan sendirinya menjamin harmoni dan kerjasama internasional (Narine 2004). Paradigma “masyarakat internasional” ini akan dapat diterapkan dengan baik pada negara-negara yang menganut ide-ide demokrasi di dalam sebuah institusi. Dalam sistem pemerintahan negara-negara tersebut, nilai-nilai dan norma-norma yang dianut akan menciptakan rasa saling ketergantungan yang besar di kawasan, sehingga mereka memiliki kepentingan bersama yang tidak saling eksklusif.

Bagi para pemimpin politik nasional negara-negara yang menganut nilai-nilai dan norma-norma yang saling mengikat, keunggulan dalam bidang ekonomi dapat menjadi lebih penting dibandingkan agenda untuk menaklukkan dan mengimbangi negara lain dengan menggunakan kekuatan militer. Mereka menganggap bahwa dengan melakukan kerjasama yang baik di kawasan tidak akan mengganggu *status quo* negara lain, dibandingkan dengan melakukan pengimbangan kekuatan militer - yang biayanya bisa lebih mahal daripada melakukan keterlibatan secara konstruktif dalam sebuah institusi (Acharya 2014).

Dalam paradigma ini, keterlibatan secara konstruktif pada institusi di kawasan akan dapat dijalin dengan strategi diplomasi. Strategi diplomasi tersebut diwujudkan dengan upaya *engagement* dan *enmeshment*. Strategi *engagement* berusaha mengembangkan ikatan politik dan ekonomi dengan sebuah negara dan membawanya pada masyarakat internasional, sehingga mengubah preferensi dan aksi para pemimpin pada kecenderungan yang lebih damai. Sedangkan strategi *engagement* dapat dipahami sebagai sebuah *constructive hedge* yang menentang agresivitas dominasi potensial sebuah negara. Strategi ini dilakukan dengan harapan kekuatan-kekuatan besar yang berpotensi sebagai negara yang mempunyai agresivitas tinggi sehingga dapat dipengaruhi atau disosialisasikan untuk mematuhi peraturan dan norma-norma internasional (Kelly 2003).

Strategi *engagement* dapat berjalan dengan baik setelah negara-negara yang ingin melakukan keterlibatan konstruktif melakukan strategi *enmeshment*. *Enmeshing a number of regional powers*, dimaknai dengan sebuah kebijakan umum akan mengumpulkan (*enmeshing*) kekuatan besar di regional dalam rangka mendirikan sebuah stabilitas tatanan regional (Goh 2005). Perilaku *enmeshment* dari sejumlah kekuatan utama di kawasan yang bertujuan untuk mendorong sebuah struktur hierarkis keamanan yang dapat meningkatkan stabilitas regional (Reeves 2012). Kebijakan *enmeshment* dapat terlihat dalam dua level. Pertama adalah *Enmeshment* skala kecil, dalam level ini fokus kerjasama lebih diarahkan pada segi “*security intraregional*” di mana satu negara melakukan kerjasama strategis dengan beberapa “*major power*”. Kedua adalah *Enmeshment* skala berkembang. Dalam skala ini, pengambil kebijakan mencoba untuk merubah realitas geopolitik yang dimiliki oleh kekuatan besar untuk kepentingan mereka sendiri. Artinya negara-negara tersebut memperluas relasi hubungan bilateral untuk mengatur stabilitas regional. Tujuan dan objek *enmeshment* berbeda-beda di tiap negara, salah satunya adalah keinginan untuk meningkatkan regional leadership, dan ambisi untuk mengubah *great power behavior*. *Enmeshment* berfungsi dalam 3 cara melalui pencantuman legitimasi, yang kedua adalah hubungan institusionalisasi, yang ketiga adalah kerjasama keamanan (Black 2017).

Saat ini IORA beranggotakan 21 negara yaitu: Afrika Selatan, Australia, Bangladesh, Komoros, India, Indonesia, Iran, Kenya, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambique, Oman, Persatuan Emirat Arab, Seychelles, Singapura, Somalia, Sri Lanka, Tanzania, Thailand dan Yaman. (Kementerian Luar Negeri, Indian Ocean Rim Association, 2017) IORA juga melibatkan 7 negara mitra dialog yaitu: Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis dan Tiongkok. Terdapat juga 2 organisasi yang peninjau IORA yaitu: *Indian Ocean Tourism Organization* (IOTO) dan *Indian Ocean Research Group* (IORG). Dalam hal ini, wilayah yang terdiri dari negara-negara yang terletak disekitar Samudera Hindia. Negara-negara Samudera Hindia Rim juga bervariasi dalam hal daerah mereka, populasi dan tingkat pembangunan ekonomi. Mereka juga dapat dibagi menjadi beberapa sub-daerah (Australia, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat dan Timur & Afrika Selatan), masing-masing dengan kelompok regional mereka sendiri (seperti ASEAN, SAARC, GCC dan SADC, untuk nama beberapa). (Kementerian Luar Negeri, Indian Ocean Rim Association, 2017) Dengan keanggotaan yang demikian, Indonesia dapat memanfaatkan IORA untuk strategi *enmeshing* dan *engaging* terhadap negara-negara di Samudera Hindia yang tidak tercakup dalam institusi keamanan lainnya.

Indonesia melalui diplomasi *engagement-enmeshment* dapat menjadikan Samudera Hindia sebagai perekat antara Afrika dan Pasifik dan menjadikan IORA sebagai arsitektur kawasan yang mengisi “kekosongan” (*hollowness*) di Samudera Hindia, demi menjaga urat nadi perekonomian, keamanan dan stabilitas global (Laksamana 2016). Pada tahun pertama Indonesia menjadi Ketua sekaligus Tuan Rumah pada

IORA periode 2015-2017 (Fajar 2015), Indonesia memilih KTT IORA diadakan di Kota Padang, Sumatera Barat yang telah berlangsung pada tanggal 20-23 Oktober 2015. Pada masa keketuaannya, Indonesia berfokus pada upaya penguatan kerjasama antara negara-negara anggota IORA dan mitra dialog pada isu-isu prioritas, penguatan regionalisme di kawasan dan mendorong peningkatan visibilitas IORA. Gagasan dan prakarsa strategis Indonesia pada masa keketuaannya yang telah disetujui: (i) membentuk IORA Concord sebagai outcome strategis 20 tahun IORA; dan (ii) penyelenggaraan KTT IORA (*one-off*) pada Maret 2017 (APEC 2016).

Untuk memajukan regionalisme di kawasan Samudera Hindia, maka IORA pun memiliki IORA Concord dimulai sejak dibentuknya *Adhoc Committee on The IORA Concord* pada saat IORA *Ministerial Meeting* pada tanggal 23 Oktober 2015 di Padang, Indonesia (Thamrin 2015). IORA Concord adalah memberikan kontribusi yang nyata dalam menjaga stabilitas keamanan, untuk memperkuat regionalisme, dan juga untuk membangun kerjasama serta mewujudkan kesejahteraan bagi negara-negara yang berada di Samudera Hindia dalam jangka panjang (Indonesian Embassy 2016). Hal ini menjadi penting karena IORA masih perlu harus mengatasi berbagai tantangan seperti isu keamanan maritim, peredaran narkoba, pencurian ikan, penyelundupan manusia, pembajakan, perkembangan ekonomi dan perubahan iklim.

Selama menjadi ketua di IORA sejak tahun 2015, Indonesia telah/akan menyelenggarakan sejumlah program/kegiatan bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga RI terkait, antara lain: *3rd Indian Ocean Dialogue (IOD)*; *International Symposium "IORA 20th Anniversary: Learning from Past and Charting the Future"*; *IORA Guide for Investment*; *The 2nd IORA Ministerial Blue Economy Conference*; *IORAG Workshop "Intersection of Culture in Indian Ocean Region"*; *IORA Website Trade Repository*; dan *IORA-RCSTT Medicinal Focal Points Meeting*. Kepemimpinan Indonesia di IORA menjadi keuntungan tersendiri. Indonesia dapat memperlihatkan kekuataannya serta bisa berpengaruh dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia karena peran aktifnya di Samudera Hindia.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diselenggarakan pada tanggal 05-07 Maret 2017 di Jakarta Convention Center (JCC) merupakan KTT pertama yang dilakukan sebagai perayaan 20 tahun IORA dibawah kepemimpinan Indonesia periode 2015-2017, sebelumnya hanya ada Pertemuan Tingkat Menteri dan Pertemuan Tingkat Pejabat Senior. Pada KTT ini membahas isu-isu prioritas antara lain: masalah keamanan dan keselamatan maritim, fasilitas perdagangan investasi, manajemen perikanan, manajemen resiko bencana, kerjasama akademis, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kerjasama pariwisata dan pertukaran budaya. Isu-isu tersebut termasuk kedalam 6 komitmen Jakarta Concord yang merupakan hasil dari KTT yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pidato penutupan KTT.

IORA merupakan wadah yang baik dalam mengumpulkan (*enmeshing*) dan melakukan kerjasama yang erat (*engaging*) antara Indonesia dan negara-negara

external serta kekuatan regional. Kedua institusi ini dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dengan memasukkan agenda yang dapat mengakomodir kepentingan maritimnya. Pada setiap pertemuan IORA, Indonesia dapat melaksanakan diplomasi *enmeshment* antara lain dalam pembahasan isu-isu mengenai ketidakstabilan tatanan di kawasan yang disebabkan oleh konflik di wilayah maritim, penjagaan tol laut, serta pemanfaatan kerjasama sumberdaya kelautan. Dengan nilai-nilai dan norma-norma yang konstruktif yang sudah dipandang baik di dunia internasional, Indonesia dapat mudah diterima oleh negara-negara superpower yang ingin melibatkan diri.

Dalam konteks integrasi institusi pengamanan maritim regional di Kawasan Samudra Hindia yang sedang diupayakan oleh Indonesia, strategi ini memungkinkan untuk dilakukan mengingat elemen-elemen yang terdapat dalam konseptualisasi tersebut sebagian besar telah terpenuhi. Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara dimana norma-norma dan nilai-nilai demokratis dijalankan dengan baik. Ini akan memudahkan untuk mengumpulkan kekuatan-kekuatan ekstraregional agar terlibat secara konstruktif di kawasan. Dengan keterlibatan konstruktif ini, Indonesia dapat memanfaatkan keadaan dengan melibatkan negara-negara di kawasan maupun kekuatan ekstraregional agar dapat mendukung pencapaian Visi Poros Maritim Dunia. Strategi *enmeshment* ini dapat diwujudkan dengan penguatan strategi diplomasi yang baik oleh Indonesia di institusi internasional. Sesuai dengan paradigma “masyarakat internasional”, pendekatan Indonesia melalui diplomasi ini akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan pengimbangan kekuatan militer untuk penjagaan stabilitas keamanan di kawasan. Namun, demikian penguatan strategi diplomasi harus diimbangi dengan adanya modalitas yang baik. Modalitas ini akan menjadi salah satu elemen utama untuk meningkatkan posisi tawar suatu negara dalam melakukan praktik diplomasi.

Penutup

Dalam politik internasional kontemporer, Indonesia masih menjadi negara dengan nilai geostrategi yang tinggi. Didukung dengan kekayaan sumber daya alam, jumlah penduduk, serta wilayah maritim yang luas, maka Indonesia juga memiliki potensi menjadi kekuatan maritim yang kuat. Untuk menjadi Poros Maritim Dunia yang telah dicanangkan sejak tahun 2014, Indonesia harus mampu menyelenggarakan tata tertib di laut atau menciptakan keamanan maritim. Mengingat kappabilitas militernya yang kurang memadai sebagai kekuatan maritim, Indonesia perlu strategi lain untuk menutupi kekurangannya tersebut. Salah satunya adalah dengan melaksanakan strategi diplomasi *engagement-enmeshment* seperti yang telah dibahas dalam tulisan ini. Strategi ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan pengimbangan kekuatan militer dalam konteks penjagaan stabilitas keamanan di kawasan. IORA menjadi pilar bagi Indonesia untuk mendekati negara-negara di sekitar Samudera Hindia. Posisi strategis Indonesia sebagai ketua IORA sejak tahun 2015 akan memudahkan Indonesia untuk merekatkan hubungan antara Afrika dan Pasifik. Apabila ini dapat dimanfaatkan

dengan baik, peran aktif Indonesia dalam menjaga kestabilan kawasan akan mendukung pencapaian Visi Poros Maritim Dunia.

Bibliografi

- Acharya, A. 2014. Global International Relations (IR) and Regional Worlds A New Agenda for International Studies. *International studies quarterly*, 58(4), 647-659.
- Anthony Septian Pardosi. 2016. Potensi dan Prospek Indonesia menuju Poros Maritim. hal. 18
- Bappenas. 2016. *Nawacita dalam dimensi Pembangunan*. Rencana Kerja Pemerintah | Kondisi Umum, Bab 2. Hal. 2-1
- Black, L. 2017. The Politics of Power Balancing Vs. Enmeshment Theory An Analysis of Indonesia's Response to Regional Power Competition in the Asia-Pacific Region (Master's thesis).
- Bull, H. 1995. Society and Anarchy in International Relations (1966). In *International Theory* (pp. 75-93). Palgrave Macmillan, London.
- Center of Strategic & International Studies, 2014, *Jokowi Spells Out Vision for Indonesia's "Global Maritime Nexus"*, Southeast Asia from Scott Circle Volume V Issue 24.
- David C. Gompert, 2013, *Sea Power and American Interests in the Western Pacific*, kota: rand Corporation hal 2
- Direktorat Perundingan APEC dan Organisasi Internasional. 2016. *Brief mengenai Indian Ocean Rim Association (IORA)*. Dipetik dari Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional: <http://ditjenppi.kemendag.go.id/id/brief-mengenai-indian-ocean-rim-association-iora/>
- Dr. Budiono Kusumohamidjojo, 1987, *Hubungan Internasional Kerangka Studi Analitis*, Binacipta.
- Embassy of Indonesia, (18 Maret 2016), *IORA Concord's drafting process began since March 17: Indonesian FM*, <http://www.indonesia-dhaka.org/iora-concords-drafting-process-began-since-march-17-indonesian-fm/>
- Endah, Muminingtyas. (Januari 2016). Prakarsa Strategis Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Kelautan Menuju Terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim. h.1.
- Fajar Nugraha, "Indonesia Resmi Menerima Kepemimpinan IORA", *metrotv news*, 23 Oktober 2015. <http://internasional.metrotvnews.com/read/2015/10/23/183433/indonesia-resmi-menerima-kepemimpinan-iora>
- Gill, J.S. and Mitra, R., 2018. India's growing maritime opportunities with Indonesia: Room for development in diplomacy and capability building. *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India*, 14(2), pp.38-48.
- Goh, E. 2005. Great powers and Southeast Asian regional security strategies: omni-enmeshment, balancing and hierarchical order.
- Indian Ocean Rim Association, *IORA Background*, <http://www.iora.net/about-us/background.aspx>
- Ismah Rustam. 2016. Tantangan ALKI dalam Mewujudkan Cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. *Indonesian Perspective*, 1(1), hal. 2.
- Kelly, C. R. 2003. Realist Theory and Real Constraints. *Va. J. Int'l L.*, 44, 545.
- Kementerian Luar Negeri RI, *Kerjasama Regional*, <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/default.aspx>
- Kementerian Luar Negeri, *Indian Ocean Rim Association*, <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/IORA.aspx>
- Khoo Kok Giok, 2016, *Sea Power As A Strategic Domain*, Singapura: Ministry of Defense online https://www.mindef.gov.sg/content/dam/imindef_media_library/graphics/pointer/PDF/2015/Vol.41%20No.3/Sea%20Power%20As%20A%20Strategic%20Domain.pdf
- Komisi Pemilihan Umum. (Mei 2014). *Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Kepribadian*. Visi Misi dan Program Aksi Jokowi-JK. Hal 6

Laksmana, E. A. 2016. Pragmatic equidistance: How Indonesia manages its great power relations. China, the United States, and the Future of Southeast Asia, ed. David Denoon (New York University Press, 2017), 113-135.

Narine, S. 2004. State sovereignty, political legitimacy and regional institutionalism in the Asia-Pacific. *The Pacific Review*, 17(3), 423-450.

Nila Chrisna Yulika. (06 April 2016). *Ini 5 Pelabuhan yang Diresmikan Jokowi untuk Tol Laut*, <http://news.liputan6.com/read/2476674/ini-5-pelabuhan-yang-diresmikan-jokowi-untuk-tol-laut>

Reeves, J. 2012. Mongolia's evolving security strategy: omni-enmeshment and balance of influence. *The Pacific Review*, 25(5), 589-612.

Rochwulaningsih, Y., Sulistiyono, S.T., Masruroh, N.N. and Maulany, N.N., 2019. Marine policy basis of Indonesia as a maritime state: The importance of integrated economy. *Marine Policy*, 108, p.103602.

Septian Deny. (14 Agustus 2015). *Ambisi Jokowi Kembalikan Kejayaan Maritim Nusantara*, <http://bisnis.liputan6.com/read/2293616/ambisi-jokowi-kembalikan-kejayaan-maritim-nusantara> Supandi, A. (2016). *Pembangunan Kekuatan TNI AL dalam Rangka Mendukung Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Keamanan Maritim*, 1(1).

Till, G. 2013. *Seapower: a guide for the twenty-first century*. Routledge.

Yuri O. Thamrin, (30 Juni 2015), *Visi IORA Concord*, <http://iora.kemlu.go.id/news/view/12>

Sistem Senjata Otonom dan Problem Legalitas

Sugeng Riyanto¹

¹Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Corresponding e-mail: riyanto_sugeng@yahoo.com

Abstract



The autonomous weapons system (AWS) is a prototype of weaponry system that no longer involves human in its operation. The weapon moves independently, looks for its target, identifies, and executes the target. AWS is controlled by a robotic system equipped with artificial intelligence. AWS is more advanced than drone technology (Unmanned Combat Aerial Vehicle), which is still controlled by humans even from very distant range. Some parties believe that these weapons have more advantages compared to conventional weapons that are still controlled by human. AWS can reduce mistakes that are often done by human. The traits, quicker in scanning and making a decision, and free from situational human psychology (e.g., stress, et cetera.). In the other hand, this weapon creates a new problem; who will take responsible since it is driven by robot, not human. This paper intends to explore the legal implication due to the absent of human role in this autonomous weapon system especially before international humanitarian law.

Keywords

Artificial intelligence, autonomous weapon system, legal implication, international humanitarian law.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi telah mempengaruhi ragam peradaban manusia, bahkan perkembangan teknologi telah mampu mengikis peran norma dan etika di dalam masyarakat. Perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi menjadikan bumi ini planet yang sangat kecil yang dapat dijelajahi manusia secara langsung atau tidak langsung melalui berbagai media. Sementara itu, teknologi komunikasi menjadikan transaksi antar manusia di planet bumi ini kian cepat sekian ribu kali pada masa sebelumnya. Transaksi lintas negara menjadi semakin intens dan tak terbendung sehingga batas-batas geografis negara tinggalah sebuah catatan administrasi saja. Sayangnya, perkembangan teknologi ini juga merambah ke dalam dunia militer, tepatnya adalah dalam teknologi persenjataan.

Sebenarnya dalam dunia kemiliteran, teknologi persenjataan sangat menikmati perkembangan teknologi sebab teknologi persenjataan senantiasa didukung oleh teknologi yang paling mutakhir. Perang Dunia Kedua misalnya menghasilkan sebuah teknologi penggunaan nuklir sebagai salah satu sumber energi yang diubah menjadi

bom atom. Perang Dingin menghasilkan teknologi peluru kendali yang mampu menjangkau jarak 5000 km dengan mengangkut ratusan kilogram bahan peledak. Senjata berupa peluru kendali tentu saja sangat efektif untuk menggantikan pengiriman pasukan yang banyak. Pasca Perang Dingin, dalam teknologi militer menciptakan teknologi baru berupa penggunaan pesawat tanpa awak (drone) yang mampu meminimalisir jatuhnya korban di pihak sendiri. Drone ini dikendalikan oleh pilot dari jarak yang jauh dan dilengkapi dengan bom (*Unmanned Combat Aerial Vehicle*, UCAV)

Salah satu perkembangan terkini dalam teknologi militer adalah ditemukannya teknologi persenjataan yang memadukan antara bahan peledak, kendaraan tanpa awak dan dengan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Senjata yang dapat diproduksi dengan ukuran kecil yang mampu mencapai jarak tertentu tanpa menggunakan pilot atau awak (seperti drone) dan mampu mengenali target secara otomatis. Dengan kata lain, senjata ini mampu terbang sendiri, mencari target sendiri dan mengeksekusi target tanpa lagi dikendalikan oleh manusia. Salah seorang pejabat Departemen pertahanan Amerika Serikat, Asthon B. Carter mendefinisikan senjata otonom ini sebagai senjata yang *“once activated, can select and engage targets without further intervention by a human operator”* (Saxon: 2014). Jika demikian, patut dipertanyakan tentang siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan senjata ini?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang oleh Umar S. Bakri didefinisikan sebagai metode penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak bisa dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik. Metode kualitatif adalah penelitian yang bersifat intuitif dan sistematis untuk membantu seorang peneliti menghasilkan pengetahuan dengan cara yang efisien dan koheren dan bertujuan meningkatkan pemahaman atau *undersanding* (Bakri: 2016)

Penelitian kualitatif dilakukan dengan melalui studi mendalam atas suatu fenomena sehingga mendapatkan gambaran yang mendalam. Dalam studi ini penelitian dilakukan dengan mengkaji secara mendalam berbagai perpektif, fenomena lapangan dan teori yang tersaji dalam berbagai literatur maupun data data sekunder yang lain.

Revolusi Teknologi Persenjataan

Perang, meskipun ditolak, adalah salah satu instrumen untuk menyelesaikan konflik antar negara. Kemenangan perang ditentukan oleh salah satunya adalah kemampuan system persenjataan yang digunakan. System persenjataan ini, selain untuk memenangkan perang, juga digunakan sebagai sarana menggetarkan lawan (*deterrence*), mendukung diplomasi, sebagai sarana membangun kebanggaan bangsa dan sebagai jembatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika kita menilik pada posisi Amerika Serikat sebagai negara super power sekarang ini, maka

sebenarnya salah satu alat ukurnya adalah kemampuan system persenjataan yang mendukung sistem pertahanan.

Oleh karena itu pengembangan sistem persenjataan memerlukan biaya besar dalam rangka pengembangan teknologi yang bertumpu pada industri militer. Keunggulan Amerika Serikat atas negara lain juga dipengaruhi oleh anggaran pertahanannya yang sangat besar yang mencapai US\$ 648, 798 million pada tahun 2018 yang berarti hampir separo anggaran pertahanan dunia. (<https://www.sipri.org/databases/milex>)

Perkembangan teknologi dalam sektor industri militer, selalu berjalan mendahului industri teknologi di bidang yang lain. Sebagai contoh, sebelum teknologi *handphone* beredar di masyarakat luas, sektor militer telah menggunakan teknologi ini. Hal ini berelasi kuat dengan besarnya anggaran untuk riset dan pengembangan (R&D) yang memungkinkan pengembangan teknologi secara maksimal.

Revolusi militer dan implikasinya seperti yang dinyatakan oleh Hoffman (Hoffman: 2017) menegaskan bahwa Perang Dunia I dan II diidentifikasi pada revolusi keempat yang menghasilkan kombinasi senjata, *blitzkrieg* lapis baja, kapal induk, bomber, dan jet. Pada revolusi kelima, revolusi nuklir dan rudal telah dihasilkan selama perang dingin. Revolusi teknologi pada rudal dan nuklir, yang dapat mencapai jarak antarbenua diprediksi akan munculnya sistem persenjataan tak berawak atau *Drone*. Hingga revolusi keenam mengenai informasi dinamis, aliran menciptakan perintah dan kontrol, konektivitas, dan jangkauan global agar dapat diakses. Teknologi terbaru tentang industri militer, yang merupakan revolusi otonom, produksi senjata otonom, kendaraan robot, sistem pertahanan yang mengatur diri sendiri, senjata otomatis, analisis data besar, dan program pembelajaran mendalam. Kombinasi antara penggunaan komputer dan mesin sampai tingkat yang telah dihasilkan dari revolusi industri dan era informasi dapat mengubah perspektif dan kode etik perang dan dampaknya pada medan perang.

Kemampuan sistem persenjataan dapat dilihat dari 4 faktor yakni kemampuan daya rusak, mobilitas, proteksi dan komunikasi. Sebagai contoh, untuk kemampuan daya rusak, telah dikembangkan senjata pemusnah masal (WMD), dimana meskipun volume dan berat dari senjata ini sangat kecil, namun daya rusaknya sangat dahsyat. Untuk mobilitas, teknologi pesawat tempur dan kapal induk adalah temuan terbesar abad 20 dimana senjata tersebut dapat secara mudah menjangkau lokasi yang sangat jauh dengan waktu tempuh yang tidak lama. Kecepatan pesawat tempur rata rata adalah di atas 1 Mach atau di atas kecepatan suara, yang mengindikasikan bahwa senjata tersebut sangat *mobile*. Untuk *protection*, yakni upaya menghancurkan lawan tanpa harus mengorbankan pasukan sendiri. Terakhir adalah kemampuan komunikasi dimana senjata tersebut dapat diarahkan kemanapun, termasuk dibelokkan arahnya saat sudah diluncurkan. Kemampuan ini dimiliki oleh senjata dengan teknologi peluru kendali. Peluru kendali adalah system persenjataan dengan teknologi yang cukup lengkap, mobilitas dan daya jelajah, komunikasi, proteksi dan dapat dipadu dengan

bom atom atau senjata pemusnah masal. Sistem peluru kendali ini dinilai sangat efektif sehingga banyak negara menerapkan strategi pertahanan balistik (BMD) yang bertumpu pada kemampuan sistem peluru kendali (Sessions: 2008)

Meskipun Perang Dingin telah usai dan sistem internasional ditandai oleh menurunnya intensitas pertempuran antar negara, Teknologi tetap terus dikembangkan. Pasca Perang Teluk II yang banyak menggunakan pesawat tempur generasi ke 4, Amerika Serikat dan Rusia memperkenalkan teknologi baru dalam sektor pesawat tempur (aircraft fighter) yaitu teknologi pengacau radar atau *stealth*. Pesawat generasi ke lima (F-22 Raptor, T 50 PAKFA) telah dilengkapi dengan kemampuan menghindar oleh deteksi radar dari pihak lawan. Dengan sistem ini pesawat akan memiliki proteksi terhadap dirinya sangat tinggi dan sulit ditembak oleh lawan. (Lambeth: 2005)

Perkembangan yang lebih maju adalah ketika dikenalkan pesawat tanpa awak (UAV/*Unmanned Aerial Vehicle*), dimana sebuah pesawat yang dirancang untuk dikendalikan dari jarak jauh menggunakan remote control. Semula pesawat ini digunakan sebagai sarana mengetahui situasi lawan (intelijen), namun belakangan pesawat ini juga dilengkapi dengan senjata atau bom atauUCAV (*Unmanned Combat Aerial Vehicle*) (Blazakis: 2006).

AWS adalah salah satu senjata paling efektif yang pernah dibuat oleh manusia untuk memusnahkan musuh. Senjata ini dilengkapi dengan *Artificial Intelligence* (AI) yang menawarkan teknologi robot dalam sistem persenjataan. Sistem ini dirancang untuk mengurangi keterlibatan manusia dalam operasinya sampai pada titik terendah. Teknologi AWS diibaratkan sebagai senjata yang memiliki kekuatan berlipat ganda sebagai akibat dari penggunaan teknologi yang canggih.

Ketika dewasa ini sistem persenjataan canggih mulai dioperasikan, AWS menjadi sistem persenjataan yang paling unggul dibandingkan dengan sistem lain misalnya adalah peluru kendali. Sebuah laporan dari *Defense Science Board* (2012), dari Kantor Wakil Menteri Pertahanan untuk Akuisisi, Teknologi, dan Logistik mengidentifikasi enam aspek utama yang menentukan kemampuan senjata otonom, yaitu: persepsi, perencanaan, pembelajaran, interaksi robot-manusia, pemahaman bahasa alami, dan koordinasi multi-agen.

Teknologi Sistem Senjata Otonom

AWS telah berkembang selangkah lebih maju dari pada penggunaan drone dan mempunyai beberapa keunggulan dalam pertempuran. Pertama adalah efektifitas energy yang dipakai yang hanya menggunakan tenaga baterai. Kedua adalah teknologi ini dapat menggantikan peran tentara yang mungkin mengalami kesalah target akibat kelelahan, depresi dan stress. Dalam medan pertempuran sering sekali terdapat salah tembak yang menimbulkan korban dari penduduk sipil atas *non military target* (*non*

combatant). Dengan menggunakan kecerdasan buatan, maka salah target dapat dihindarkan dengan asumsi kinerja senjata ini tidak mengenal lelah, stress atau depresi.

Bahkan sejumlah keunggulan dari AWS diungkapkan oleh Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Right sebagai berikut: AWS akan dengan cepat menerima dan memproses informasi; senjata ini mempunyai tingkat fleksibilitas tinggi, mempunyai kecepatan luar biasa, tingkat presisi pada target, pengambilan keputusan dan penentuan. Dengan mengganti manusia dengan teknologi robot akan memungkinkan berkurangnya jumlah korban yang tidak perlu atau unnecessary. Korban yang tidak perlu ini sangat mungkin terjadi dalam teknologi non AWS sebab manusia masih memiliki rasa bosan, stress, emosional, takut, balas dendam dan lain lain. (Weizmann, 2014, p. 4).

Sebenarnya, kemandirian sistem persenjataan ini dari kontrol manusia, AWS tidak sepenuhnya menghilangkan kontrol manusia khususnya dalam mata rantai pemrograman hingga proses produksinya. Meskipun diberi sebutan system otonom, masih terdapat keterlibatan manusia yang dikategorikan menjadi tiga macam yakni "*man-in-the-loop*," "*man-on-the-loop*," "*man-out-the-loop*" (Saxon, 2014, p. 103).

Persoalan paling sulit di dalam situasi perang (*armed conflict*) yang dihadapi oleh manusia atau robot adalah upaya mengenali dan menentukan situasi dalam perang. Oleh karenanya, keterlibatan manusia tetap dibutuhkan. Dalam kategori ini, maka konsep *man in the loop* berlaku. Dengan kata lain, manusia menjadi manajer, atau direktur dalam menentukan, menyeleksi dan menyerang lawan. Dengan kata lain, keterlibatan manusia masih sangat diperlukan. (Amitai & Oren, 2017)

Sistem "*man-on-the-loop*" yang menunjukkan cairnya dan lingkungan yang kompleks membutuhkan penilaian manusia yang terus berubah (Saxon, 2014, p. 104). Keterlibatan manusia juga ditunjukkan ketika mekanisme robot dalam menargetkan dan mengerahkan serangan di bawah pengawasan operator. Misalnya, SGR-A1 yang dikembangkan oleh Samsung, robot penjaga digunakan di Zona Demiliterisasi Korea. Robot ini menggunakan kamera yang kurang cahaya dan program pengenalan pola untuk mendeteksi penyusup. Jika penyusup tidak menyerah, robot yang dilengkapi dengan senapan mesin dapat ditembakkan dari kejauhan oleh operator, atau dengan sendirinya yang ditetapkan menjadi mode otomatis penuh. (Prigg, 2014).

Sistem "*man-out-of-the-loop*" adalah robot yang dapat memilih target dan menggunakan serangan tanpa gangguan dari interaksi manusia atau input manusia (Amitai & Oren: 2017). Sebaliknya, Schmitt dan Thurnher (2013) berpendapat bahwa tidak ada senjata otonom, manusia tidak akan mencapai "*out-of-the-loop*" karena manusia pada akhirnya akan memutuskan kapan dan di mana untuk menggunakan sistem persenjataan ini dan parameter apa yang tertanam di dalamnya.

Menurut Martin Lack (2017), terdapat empat keunggulan dari AWS yang membedakan dengan operasi senjata yang berbasis pada manusia. Diantaranya adalah,

pertama, AWS tidak mempunyai rasa takut. Dalam upaya untuk melakukan identifikasi terhadap target, AWS akan mampu untuk mendekatkan jarak sedekat mungkin dengan target sehingga presisi target dapat dicapai. Ia juga tidak mengenal rasa takut apabila dirinya menjadi korban dalam sebuah perang. Kedua, AWS tidak mempunyai emosi. Dalam mengeksekusi target, AWS tidak dipengaruhi oleh rasa takut, histeria, rasa marah, dendam, dan lain-lain yang masih sering menyelimuti para serdadu dalam mengeksekusi korban.

Ketiga, dalam melakukan identifikasi dan observasi terhadap lingkungan, AWS mampu melakukannya secara cepat. Melalui teknologi penggunaan sensor optik, kemampuan AWS jauh mengungguli kemampuan manusia. Ia mampu untuk menembus penghalang radar dan dinding sekalipun. Dan keempat, AWS tidak mengenal kata kelelahan yang mampu mendorong rasa frustrasi dan stres bagi para serdadu.

Sistem Senjata Otonom dan persoalan hukum

Sistem senjata otonom ini ternyata mengakibatkan munculnya pertanyaan mendasar tentang hakekat perang dan pihak yang bertanggung jawab dalam perang. Seperti dikemukakan di depan, sesungguhnya perang diperbolehkan, tetapi berbagai prinsip harus tetap ditaati. Prinsip tersebut misalnya tertuang dalam hukum humaniter internasional yang mengacu pada prinsip *necessity*, *distinction* dan *proportionality*. Demikian pula dalam hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang menekankan pada dimensi kemanusiaan, dimana perang mestilah merupakan keputusan dari manusia. (Saxon: 2014)

Dengan asumsi ini, maka penggunaan senjata otonom tentu saja bertentangan dengan prinsip tersebut. Secanggih apapun sistem robotik yang digunakan, tetap tidak mempunyai unsur perasaan dan moralitas. Terdapat situasional dalam perang yang akan melibatkan perasaan dan emosi untuk melakukan eksekusi yang tak mampu dijangkau oleh robot cerdas sekalipun. Misalnya adalah ketika terdapat tentara yang menunjukkan sikap akan menyerah, atau tentara yang ingin menolong *non combatan* (tentara terluka, penduduk sipil dll).

Ketiga, ada dimensi hukum yang sulit diterapkan yakni tentang subyek hukum dalam sistem ini. Dalam sebuah pertempuran yang dapat menyebabkan luka atau meninggalnya seseorang, maka perlu ada pihak yang bertanggung jawab. Penggunaan mesin yang lepas dari pengendalian manusia, tentu saja akan menimbulkan pertanyaan serius: siapa yang bertanggung jawab atas suatu serangan atau dalam situasi perang, *jus in Bello*. Tiga kemungkinan pihak dalam hal ini yakni programmer, komandan, dan mesin itu. (Sparrow: 2007)

Pertama adalah programmer. Programmer adalah orang yang bertanggung jawab atas kinerja mesin atau robot yang cerdas tersebut. Kemampuan dan kehandalan robot adalah tanggung jawab programmer, termasuk menentukan kemampuan robot untuk

mencar, memilih, mengidentifikasi dan mengeksekusi target. Meskipun demikian, programmer dapat juga lepas dari tanggung jawab ini, mengingat ia tidak bertanggung jawab atas kapan atau dalam situasi apa senjata tersebut dilepaskan oleh komandan perang. Ini adalah celah bagi programmer untuk keluar dari jeratan hukum apabila senjata mengalami mal fungsi.

Kedua, adalah komandan perang. Dalam berbagai situasi perang konvensional, pihak yang paling bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap hukum perang adalah komandan perang. Di tangannyalah penentuan target dan eksekusi akan target tersebut berada. Namun ketika sistem persenjataan telah menggunakan sistem otonom yang berarti lepas dari keterlibatan manusia, maka pada saat tersebut komandan dapat pula menghindar dari tanggung jawab dengan alasan bahwa senjata sendirilah yang telah memilih targetnya.

Ketiga, mesin atau robot tersebut. Alasannya adalah mesin lah yang memilih dan mengeksekusi target. Namun tentu saja hukum tidak akan mampu menjangkau peran mesin sebagai subyek hukum. Subyek hukum adalah manusia.

Pernyataan Komite Internasional Palang Merah dalam pertemuan ahli tentang *Lethal Autonomous Weapons System* (LAWS), Konvensi Senjata Konvensional Tertentu 2016 menyimpulkan alasan apa pun apakah itu pada aspek hukum, etika, atau operasi militer, ada kesepakatan luas dan pengakuan akan perlunya kontrol manusia atas penggunaan senjata dan kekuatan. Meskipun demikian, ini masih menjadi perdebatan apakah kontrol manusia terhadap tingkat pengembangan dan penyebaran AWS cukup untuk menangani operasi AWS - ketika sedang dilengkapi dengan kecerdasan buatan yang secara independen memilih dan menyerang target.

Salah satu dari ancaman tersebut adalah hilangnya dimensi humanistik dari penggunaan robot. Nilai kehidupan kemanusiaan menjadi dipertanyakan apabila untuk membunuh nyawa seseorang justru ditentukan oleh sebuah mesin (Heyns, 2014). Hal yang demikian tentu saja jauh dari prinsip kemanusiaan dan rasa belas kasihan.

Setiap senjata akan menghasilkan proliferasi dan penyalahgunaan terhadap senjata tersebut yang dapat digunakan secara masif (Sassòli, p. 310). Proliferasi dan persebaran senjata menjadi masalah utama. Sebagai misal, penggunaan senjata AK 47 kini tak selamanya berada dipihak yang bertanggung jawab, melainkan telah juga berada di tangan penduduk sipil yang dapat disalahgunakan. Penggunaan bom nuklir yang tak terkendali persebarannya justru menciptakan ketakutan luar biasa dalam kehidupan manusia.

Selain itu teknologi dapat mengalami kegagalan yang justru berakhir pada bencana kemanusiaan. Secanggih apapun teknologi dikembangkan, celah kegagalan tetap ada. Dalam industri otomotif misalnya, kecanggih teknologi motor ditunjukkan dalam pagelaran Granprix MotoGP maupun balap mobil formula 1. Namun, masih juga terdapat kegagalan diantaranya adalah mesin yang stall mendadak atau ban mengalami

pecah. Demikian juga dengan AWS, suatu ketika akan mengalami kegagalan yang disebabkan oleh kerusakan pada *software* atau *hardware*nya.

Kesimpulan

Senjata canggih yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AWS), secara militer mampu memberikan keuntungan tertentu, diantaranya adalah tingkat presisi yang lebih tinggi, biaya operasional lebih murah dan penghindaran terhadap jumlah korban. Dengan kata lain, senjata yang berbasis pada teknologi robot telah menjadi alternatif pilihan bagi peperangan di masa mendatang. Perkembangan system senjata model ini akan sangat cepat mengingat dukungan dari kemampuan industri dan pasar akan semakin meningkat.

Senjata ini otonom ini sebenarnya juga mempunyai celah bahayanya. Diantaranya adalah bahwa senjata berbasis teknologi pada suatu ketika akan terjadi kerusakan, secanggih apapun teknologi dalam senjata tersebut. Selanjutnya, penggunaan senjata pada akhirnya akan mengalami proliferasi atau persebaran yang sulit dikendalikan, apabila senjata tersebut berukuran kecil dan mudah diselundupkan dan jatuh ke tangan pihak yang tidak otoritatif untuk menggunakannya. Kerentanan senjata ini diperburuk oleh kemungkinan penyalahgunaan sebagai akibat dari kesempatan penggunaanya untuk terhindar dari jeratan hukum. Terdapat dimensi hukum atau legalitas dalam penggunaan senjata ini sehingga memunculkan kesulitan dalam penanganan khususnya tentang siapa yang bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasiannya.

Subyek hukum pada penggunaan AWS ini menjadi kabur oleh sebab munculnya alternative pengoperasionalannya yang bukan pada manusia. Mungkin saja tanggung jawab diberikan kepada *programmer* dari senjata ini karena ditamngan programmerlah kemampuan senjata ini dibuat. Namun Programmer bisa lepas dari jeratan hukum sebab dia tidak bertanggung jawab atas kapan dan dimana senjata tersebut akan dilepaskan. Sementara itu, Komandan perang juga bisa berkelit dari jeratan hukum lantaran bukan dirinya yang memilih, mengidentifikasi dan mengeksekui target, melainkan pada mesin yang mempunyai kecerdasan dan otoritas melakukan eksekusi. Jika kemudian pertanggungjawaban atas suatu tindakan diberikan kepada mesin, tentulah hal ini tidak dibenarkan secara hukum karena mesin bukan subyek hukum.

Bibliografi

- Amitai, E., & Oren, E. (2017). Pros and Cons of Autonomous Weapon Systems. *Military Review*, 72-81.
- Blazakis, Jason. (Fall 2006). Border Security and Unmanned Aerial. *Connections*, 5(2), Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institute, 154-159

- Defense Science Board. (2012). *Task Force Report The Roe of Autonomy in DoD Systems*. Washington, DC: Office of the Under Secretary of Defense for Acquisition, Technology, and Logistics.
- Heyns, C. (2014). *Ethical questions raised by military applications of robotics*. CCW Informal Meeting of Experts Lethal Autonomous Weapon System (LAWS).
- Hoffman, F. G. (2017). Will War's Nature CHange in the Seventh Military Revolution? *Parameters*, 4(47), 19-31.
<https://www.sipri.org/databases/milex>
- Lambeth, Benjamin S. (2005). The Changing Face of American Carrier Air Power. *American Carrier Air Power at the Dawn of a New Century*. RAND Corporation. Retrieved from: <https://www.jstor.org/stable/10.7249/mg404navy.13>
- Lark, Martin, 2017. The Future of Killing: Ethical and Legal Implications of Fully Autonomous Weapon System, *Salus Journal*, Volume 5, Number 1.
- Prigg, M. (2014, September 15). *Who goes there? Samsung unveils robot sentry that can kill from two miles away*. Retrieved from Daily Mail: <https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2756847/Who-goes-Samsung-reveals-robot-sentry-set-eye-North-Korea.html>
- Sassòli. (n.d.). *Autonomous Weapons and International Human Law*.
- Saxon, D. (2014). A Human Touch Autonomous Weapons, Directive 3000.09, and the "Appropriate Levels of Human Judgement over the Use of Force". *Georgetown Journal of International Affairs*, 15(2), 100-109.
- Sessions, Jeff. (Summer 2008). Ballistic Missile Defense: A National Priority Author. *Strategic Studies Quarterly*, 2(2), Air University Press, 22-30
- Sparrow, Robert, 2007, "Killer Robots", *Jornal of Applied Philosophy*, Vol. 24., No. 1.
- Weizmann, N. (2014). *Autonomous Weapon Systems under International Law*. Geneva: Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights.

Kegagalan Pendekatan *Hybrid Peace* dalam Misi Reformasi Sektor Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Leste Tahun 1999-2006

Sugito¹

¹Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Corresponding e-mail : sugito@umy.ac.id

Abstrak



Pergeseran pendekatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam melakukan reformasi sektor keamanan dari *state centre* menjadi *hybrid peace* telah menarik perhatian para penstudi keamanan. Pergeseran ini mengindikasikan adanya pengakuan akan pentingnya aktor masyarakat lokal dalam menyukseskan PBB dalam membangun institusi keamanan yang efektif. Namun demikian, terjadi gap antara teori dengan praktek di dalam kasus reformasi sektor keamanan di Timor Leste sejak 1999-2006. PBB ternyata mengalami kegagalan dalam membangun institusi keamanan yang efektif di Timor Leste. Institusi militer (F-FDTL) dan kepolisian (PNTL) yang dibentuk oleh PBB justru menjadi sumber ketidakamanan negara pada tahun 2006-2008. Berdasarkan pada pendekatan *hybrid peace* dan metode kualitatif dengan menggunakan data primer hasil wawancara maupun data-data dari dokumen resmi PBB serta pustaka lainnya, ditemukan bahwa sebenarnya PBB gagal melibatkan para pemilik lokal (*local ownership*) dalam mendukung misi mereka. Kegagalan ini disebabkan oleh bentuk organisasi UNTAET yang elitis, minimnya pengetahuan staff akan budaya dan politik masyarakat Timor Leste, serta rendahnya kualitas pendidikan para pemilik lokal yaitu personel keamanan negara Timor Leste.

Kata kunci

Reformasi sektor keamanan, *hybrid peace*, pemilik lokal (*local ownership*), Timor Leste, Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pendahuluan

Terbentuknya negara Timor Leste tidak terlepas dari bantuan PBB. Pertama kali PBB terlibat pada tahun 1999 dalam operasi persiapan referendum yang menjadi mekanisme damai dalam menentukan nasib Timor Timur untuk menjadi negara merdeka. Selepas referendum, misi berlanjut dengan upaya pemulihan keamanan yang dijalankan dalam misi gabungan internasional INTERFET. Misi secara komprehensif dalam bingkai *state building* untuk menyiapkan negara Timor Leste yang mandiri berlanjut dalam operasi UNTAET hingga misi terakhir UNMIT tahun 2012.

Misi PBB ke Timor Leste dapat kita kategorikan dalam upaya *peace keeping* dan *state building*. *Peace keeping* berujuan untuk mengakhiri kekerasan dan menangani dampak-dampak buruk dari kekerasan. Untuk itulah, misi PBB selalu menyertakan polisi dan militer untuk menjalankan peran keamanan. Sedangkan misi *state building* PBB ditujukan untuk membangun institusi negara Timor Leste yang baru saja dibentuk. Untuk menjalankan fungsi sementara negara yang belum terbentuk itulah, maka PBB mendirikan pemerintahan sementara berupa UNTAET.

Misi *peace keeping* UNTAET nampak berhasil untuk meredakan kerusuhan tahun 1999. Keberhasilan lainnya adalah pada aspek bantuan kemanusiaan terutama pada masa-masa pasca konflik tahun 1999. UNTAET berhasil bertindak sebagai koordinator untuk memulangkan lebih dari 168.000 orang pengungsi, mendistribusikan 35.000 metrik ton suplai makanan, membuka kembali hampir 750 Sekolah Dasar di 13 distrik, membuka lebih dari 50 fasilitas layanan kesehatan dan 52 mobil klinik di seluruh wilayah Timor Timur, dan mendistribusikan lebih dari 16.000 peralatan pengungsian (UNTAET, 2000).

Misi *state building* UNTAET terlihat begitu berat. UNTAET harus dapat menyelesaikan beberapa permasalahan yang menyangkut isu keamanan, humanitarian, administrasi sipil, demokratisasi, dan restrukturisasi ekonomi (Dobbins et al., 2002). Isu keamanan meliputi milisi-milisi yang terorganisasi dan didukung Indonesia, kelompok sayap militer Falintil yang dapat melakukan perlawanan terhadap milisi pro Jakarta sehingga dapat menimbulkan spiral kekerasan, dan membentuk institusi polisi dan peradilan. Kekerasan yang terjadi di Timor Timur juga telah mengakibatkan permasalahan humanitarian berupa pengungsi, sanitasi, dan kesehatan. Akibat dari kekerasan pada bulan September itu pula, kantor-kantor pelayanan sipil lumpuh karena gedung yang rusak dan perginya 8000 pegawai negeri sipil ke Indonesia. Permasalahan demokrasi juga muncul akibat dari belum berpengalamannya rakyat Timor Timur dalam berdemokrasi akibat dari penjajahan yang panjang. Sementara itu tantangan ekonomi bersumber dari rusaknya 70% infrastruktur, angka GDP yang turun 30 % pada tahun 1999, inflasi, dan rusaknya sistem fiskal dan finansial pemerintah.

UNTAET telah mempersiapkan negara Timor Leste selama kurang lebih 2 tahun misinya. UNTAET telah menghasilkan berbagai institusi pemerintahan, peradilan, memfasilitasi berdirinya Partai Politik, pembentukan institusi kepolisian, institusi tentara, dan institusi-institusi lainnya. Tidak hanya itu, berbagai produk peraturan dan perundang-undangan juga banyak dihasilkan dalam rangka menjamin pelaksanaan pemerintahan yang efektif. Misi penting *state building* UNTAET di Timor Leste salah satunya adalah melakukan reformasi sektor keamanan (*Security Sector Reform/SSR*). SSR diyakini menjadi langkah penting dalam *state building* untuk dapat menjadi pondasi bagi perdamaian yang langgeng (Schroeder & Chappuis, 2014). SSR ini bertujuan untuk memperkuat struktur dan institusi keamanan negara agar dapat menjamin keamanan negara dan masyarakat.

Upaya SSR dimulai oleh INTERFET yang kemudian diambil alih oleh UNTAET pada tahun 2000 dengan membangun institusi kepolisian (PNTL) dan berlanjut dengan angkatan bersenjata nasional (F-FDTL). Pembangunan PNTL dilanjutkan oleh UNOTIL pada tahun 2006 dengan lebih memperhatikan pada peningkatan kapasitas profesionalisme polisi. Selain itu, UNOTIL juga lebih serius untuk membangun sinergi antara PNTL dengan institusi pemerintahan lainnya dalam mendukung penegakan hukum dan tata pemerintahan (Amstrong, Chura-Beaver, dan Kfir, 2012).

Institusi keamanan militer juga tidak lepas dari misi SSR PBB. PBB dengan bantuan Angkatan Bersenjata Australia, Selandia Baru, dan Portugal berhasil membentuk tentara nasional (F-FDTL) pada tahun 2000 dengan jumlah 1500 tentara reguler dan 1500 pasukan cadangan (Amstrong, Chura-Beaver, dan Kfir, 2012). Angkatan bersenjata ini terdiri atas eks gerilyawan FALINTIL yang merupakan sayap militer FRETELIN.

Keberhasilan UNTAET dalam membentuk pemerintahan, parlemen, kepolisian, tentara, dan sistem peradilan di Timor Leste ternyata tidak serta merta memandirikan negara baru ini dan membuat kondisi keamanan yang baik. Permasalahan-permasalahan mendasar bagi masyarakat Timor Leste masih belum terselesaikan. Pada sektor ekonomi, Timor Timur masih menjadi negara paling miskin di dunia dengan GDP sebesar 250 dollar AS per kepala pada tahun 2001 yang berarti turun dari 350 dollar AS pada tahun 1999. Kebanyakan pelayanan jasa dan infrastruktur masih diperbaiki dan hanya 3 rumah sakit yang ada dan 300 sekolah yang layak pakai dari 820 bangunan (Gaglioti and Head, 2006). Perkiraan pengangguran berkisar antara 70 sampai dengan 80 persen. Dengan batas garis kemiskinan resmi ditetapkan senilai US\$0.50 sen per hari, suatu penelitian PBB tahun 2001 menemukan bahwa 60 persen dari masyarakat di perdalaman hidup dalam kemiskinan (Ward dan Symonds, 2006). Keadaan Timor Timur akan semakin makin parah, mengingat dua persen pertumbuhan ekonomi tidak bergeser dari minus dua persen dalam dua tahun terakhir (2003/2004). Bahkan, tahun 2005 diperkirakan masih minus satu persen. Sementara jumlah pertumbuhan penduduk Timtim sejak tahun 2001 sangat pesat, 17,5 persen. Artinya, dalam tahun ini saja bertambah 15.000 tenaga kerja baru. Padahal, angka pengangguran sudah mencapai 70-80 persen dari total angkatan kerja (Tobing, 2007).

Kondisi ekonomi yang buruk berakibat pada kesengsaraan yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat. Kesengsaraan itu memicu berbagai demonstrasi anti-pemerintahan. Pada tanggal 28 Nopember 2002, selagi pejabat pemerintah melaksanakan acara peringatan perayaan percobaan pertama deklarasi kemerdekaan Timor Timur ditahun 1975, sekitar 3000 orang berkumpul untuk menentang Alkatiri dan kebijaksanaan pemerintahannya. Pada acara resminya, Gusmao merasa perlu mengaku pada massa bahwa “kita lebih tergantung dari sebelumnya, untuk hidup dari kekuatan dan kemampuan orang-orang lain (Ward dan Symonds, 2006).

Protes anti pemerintahan memuncak pada saat Falintil Day (20 Agustus 2002) dan Hari Kemerdekaan (28 November 2002) dengan aksi massa yang besar dan lama. Sejak bulan Mei hingga Desember 2002, Polisi seringkali bentrok dengan kelompok-kelompok veteran Fretilin, dan juga dengan FDTL. Akibatnya, tidak sedikit korban tewas, beberapa luka, dan juga beberapa tertangkap. Peristiwa tersebut memperlihatkan kelemahan polisi dan ketidakmampuan UNTAET (Rees, 2006).

Pada bulan Desember 2002, setidaknya dua orang terbunuh dan lebih dari 20 terluka dalam bentrokan dengan polisi dan tentara selama dua hari demonstrasi dan penjarahan oleh pelajar dan pemuda pengangguran di Ibukota Timor Timur, Dili. Keadaan tetap mencekam setelah pemerintah menetapkan jam malam dan memanggil pasukan PBB untuk membantu polisi mengamankan gedung-gedung vital dan melakukan patroli jalan-jalan kota itu. Demonstrasi oleh 500 pelajar dan unsur masyarakat lainnya meledak setelah polisi memasuki sebuah sekolah menengah umum untuk menangkap seorang pelajar yang dituduh terlibat dalam kekerasan gang (Rees, 2006).

Oleh pemerintah, CDP-RDTL (Komite Pertahanan Sipil—Republik Demokrasi Timor Timur) dituduh berada di balik kerusuhan di bulan Desember 2002 tersebut. Organisasi ini, yang menentang kehadiran PBB dan menyerukan kemerdekaan menyeluruh untuk Timor Timur, telah mengorganisir beberapa demonstrasi anti-pemerintah. Para pemuda sangat marah karena kecilnya kesempatan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan. Sementara para penduduk asli hanya berpenghasilan rata-rata US\$ 6 per minggu, sebaliknya pasukan PBB dan pejabatnya dibayar tunjangan hidup sebesar 100 dollar AS per hari. Kesenjangan inilah yang memicu kemarahan para pemuda.

Kehidupan politik Timor Timur juga tidak berada kondisi yang baik. Hasil Pemilu 2001, ternyata menyisakan beberapa ketidaksenangan partai-partai yang kalah dan tidak mendapatkan bagian kekuasaan yang sebagaimana besar didominasi oleh orang-orang Fretilin. Meskipun Sergio De Mello (UNTAET) dengan Xanana Gusmao meminta agar semua partai politik untuk menandatangani National Unity Pact, untuk menekan perbedaan politik, tetap saja terjadi persaingan antara berbagai kelompok yang di dalam Constituent Assembly (Majelis Perwakilan Rakyat), seperti yang dilakukan oleh presiden the Social Democratic Party (PSD), Mario Carrascalao yang mengancam memboikot Majelis karena didominasi oleh Fretilin. Dominasi tersebut nampak pada blok koalisi Fretilin, the Timorese Social Democratic Association (ASDT), dan Christian Democratic Party (PDC), di mana ketiganya melakukan sharing kekuasaan Majelis. Presiden Fretilin, Francisco Guterres, dipilih sebagai Ketua Majelis, dengan wakilnya dari presiden ASDT, Francisco Xavier do Amaral, dan sekretaris jenderal PDC, Arlindo Marcal. Secara de-facto, koalisi tersebut adalah suatu cara untuk mengamankan proses penyusunan konstitusi yang mensyaratkan dua pertiga mayoritas anggota Majelis (Gaglioti, 2006).

Perseteruan di tingkat Majelis berlanjut di kehidupan masyarakat. Resistencia Nacional Estudantil de Timor Timur (RENETIL), sebagai kelompok pergerakan Mahasiswa

yang berafiliasi dengan *Democratic Party* (PD), mengeluarkan pernyataan “*A popular challenge to UNTAET’s achievements*” yang meminta De Mello keluar dari Timor Timur karena UNTAET dianggap gagal melakukan pelayanan social bagi seluruh rakyat Timor Timur. Rencana henggangnya PBB dari Timor Leste pada tahun 2006 tidak serta merta membuat kondisi keamanan Timor Leste membaik. Justru di tahun 2006 terjadi kembali konflik komunal yang sangat hebat. Pada tahun tersebut terjadi krisis politik dan militer yang cukup dalam. Sekelompok tentara menuliskan petisi kepada Presiden untuk melakukan investigasi terhadap kebijakan diskriminasi yang menghalangi orang-orang dari wilayah Timor Timur Leste menjadi anggota F-FDTL.

Konflik yang berkepanjangan pada tahun 2006 telah mengalami eskalasi hingga tahun 2008. Tercatat 38 orang melakukan bunuh diri termasuk didalamnya penembakan 8 orang PNTL yang tidak bersenjata oleh tantara F-FDTL dan juga perusakan infrastuktur. Kekerasan meluas hingga menyebabkan 150.000 ribu orang terusir dari tempat tinggalnya dan harus hidup di pengungsian hingga dua tahunan. Kerusakan semakin meluas dengan melibatkan perkelahian antarpemuda dari kelompok Loro Sae dan Lor Monu terus terjadi. Kedua kelompok pemuda didukung sejumlah masyarakat terus mengobarkan kerusakan melalui berbagai aksi brutal yang sulit dikendalikan aparat keamanan sehingga menyebabkan Bandara Comoro, di Dili ditutup sementara. Kerusakan tersebut berujung pada tuntutan untuk pengunduran diri Mari Alkatiri dari jabatan Perdana Menteri dan digantikan oleh Ramos Horta.

Pada tanggal 8 Februari 2008, Major Alfredo Reinado dan deputinya Lt. Gastao Salsinha beserta beberapa pendukungnya melakukan penyerangan terhadap presiden dan perdana menteri. Dalam peristiwa itu Reinado tewas sedangkan Presiden Ramos Horta terluka. Peristiwa ini berdampak pada dikeluarkannya jam malam dari pukul 8 malam hingga 6 pagi untuk melarang penduduk berkumpul dan berdemonstrasi. Pemerintah juga membentuk Komando Gabungan yang terdiri F-FDTL dan PNTL untuk kemudian menggelar Operasum Halibur untuk menumpas pemberontakan Reinado. Hasil dari operasi ini adalah menyerahnya puluhan pengikut Reinado dan kembalinya para orang-orang yang terusir dari wilayahnya akibat krisis politik dan keamanan yang terjadi (The Centre for International Governance Innovation, 2009).

Berdasarkan pada latar belakang seperti di atas, nampak bahwa upaya PBB dalam membangun institusi keamanan negara tidak mencapai tujuannya. Institusi keamanan di Timor Leste tidak mampu menyediakan keamanan bagi negara dan rakyatnya. Bahkan dalam konflik tahun 2006-2008, tentara dan polisi terlibat dalam kekerasan yang mengakibatkan ketidakamanan nasional. Pertanyaannya adalah mengapa PBB gagal membentuk institusi keamanan yang efektif di Timor Leste ?

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegagalan PBB dalam menjadalkan reformasi sektor keamanan di Timor Leste pada kurun waktu 1999-2006. Untuk

mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor penyebab kegagalan PBB, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Jenis data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan partisipan yang berada di Dili, Timor Leste dan juga dari dokumen-dokumen resmi yang relevan, seperti dokumen atau resolusi PBB, laporan-laporan, dan evaluasi-evaluasi dari PBB. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya yang diperoleh melalui jurnal maupun laporan penelitian.

Security Sector Reform dan Pergeseran Berpusat pada Negara ke Hibridasi

Perserikatan Bangsa-Bangsa mempercayai pendekatan liberal untuk membangun negara-negara pasca konflik. Pendekatan liberal yang diilhami pemikiran Immanuel Kant (1991) tentang *perpetual peace* telah berkembang dalam beberapa varian dimana salah satunya adalah *democratic peace*. Democratic peace meyakini bahwa pembangunan institusi negara (*state building*) menjadi instrumen penting untuk menciptakan keamanan dan perdamaian di negara pasca konflik. Pembangunan struktur perdamaian ini diawali dari memperkuat institusi negara khususnya institusi keamanan. Institusi keamanan negara yang efektif dapat memberi suasana aman dan stabil bagi masyarakat sehingga pembangunan di sektor lain dapat berjalan baik.

Security sector reform atau reformasi sektor keamanan telah diyakini oleh PBB maupun aktor internasional lainnya menjadi kunci keberhasilan program-program *state building*. Sektor keamanan adalah semua organisasi yang memiliki otoritas untuk menggunakan (atau perintah penggunaan) kekuatan atau ancama untuk melindungi negara dan masyarakat, demikian juga struktur-struktur sipil yang bertanggungjawab bagi manajemen keamanan masyarakat (Chalmers, 2000; Jackson, 2011). Dengan demikian, SSR adalah suatu proses reformasi yang ditujukan kepada militer, intelijen, polisi, sistem pemasyarakatan dan peradilan. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sektor keamanan dan juga untuk meningkatkan akuntabilitas, pengawasan dan *security governance* oleh otoritas sipil (Aboagye and Rupiya 2005; Hanggi 2004; Onoma, 2014). The GFNSSR memberikan definisi yang lebih jelas tentang SSR sebagai proses untuk menciptakan lingkungan yang aman sehingga kondusif untuk pembangunan, pengurangan kemiskinan, dan good governance, dan pertumbuhan institusi dan negara demokrasi berdasarkan pada aturan hukum (Gillespie, 2009 : 16).

Para donor dunia berargumentasi bahwa SSR menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan dalam mengurangi kemiskinan (Garrasi, S Kuttner & Wam, 2009; Jackson, 2011). World Bank (2009) dalam surveynya berkesimpulan bahwa ketidakamanan dan akses keadilan menjadi permasalahan penting di negara-negara rapuh. Strategi senada dilakukan oleh UK Department for International Development yang mengadopsi penurunan kemiskinan melalui SSR yang berarti mencegah

kekerasan, meningkatkan kapasitas negara untuk mengelola ancaman kekerasan, dan mencegah konflik kekerasan yang berkepanjangan (Jackson, 2011).

Pada awalnya, *state building* dimana di dalamnya ada SSR, lebih menekankan pada makna yang sangat sempit yaitu penguatan kapasitas institusi formal seperti pemerintah, kepolisian, angkatan bersenjata, peradilan, dan lembaga-lembaga ekonomi politik lainnya untuk dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat dan negara. Namun, seiring dengan adanya pengakuan bahwa negara tidak dapat diisolir dari interaksinya dengan rakyat, maka proses *state building* lebih dimaknai meluas dengan memunculkan isu representasi dan inklusifitas aktor dan institusi lokal dalam *state building*.

Bank Dunia memberikan definisi terhadap *state building* sebagai upaya untuk membangun kapasitas dan akuntabilitas negara termasuk di dalamnya sistem administrasi dan pelayanan serta menyeimbangkan upaya membangun negara dengan dukungan sektor swasta dan masyarakat (World Bank, 2015; Grotenhuis, 2016). Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan *statebuilding* sebagai proses endogin untuk meningkatkan kapasitas, institusi, dan legitimasi negara yang dikendalikan oleh hubungan negara-rakyat (OECD, 2008; Ingram, 2010). OECD (2007) telah mempublikasikan “*Principles for Good International Engagement in Fragile States and Situation*”. *Statebuilding* menjadi tujuan utama dalam membangun masyarakat yang rapuh pasca konflik. Prinsip-prinsip tersebut menekankan bahwa keterlibatan internasional harus mampu membangun hubungan antara negara dengan masyarakat, yang terkonsentrasi dalam dua area utama yaitu pertama, mendukung legitimasi dan akuntabilitas negara, dan kedua, memperkuat kapasitas negara untuk memenuhi fungsi-fungsi utamanya World Bank dan UNDP.

Misi perdamaian PBB sebagai transfers norma liberal ke dalam suatu negara juga dilontarkan oleh Thomas Risse, Stephen C. Ropp, and Kathryn Sikkink (1999). Mereka memperkenalkan model spiral penyebaran norma (“a spiral model of norm”) di mana jejaring penggiat hak asasi manusia di tingkat domestic dan internasional memaksa rejim represif kedalam konsesi taktis dan diikuti dengan pelembagaan perilaku-perilaku yang taat kepada aturan. Operasi perdamaian dapat mentransfer norma-norma mereka melalui pengaruh-pengaruh langsung dalam pembentukan sistem politik dan memaksa aktor-aktor domestic untuk melembagakan norma-norma baru. Situasi seperti ini akan memunculkan resiko konflik antara norma yang ada dalam institusi formal negara dengan norma-norma yang ada dalam diri pribadi aktor lokal. Wiener (2004) menyebutnya sebagai kontestasi norma yang berfokus pada konflik interpretasi norma dari para aktor (Ottendörfer, 2013). Dalam konteks ini, maka aktor lokal akan berusaha untuk melakukan “*norms localization*” agar mereka selaras dengan norma-norma baru yang digunakan oleh negara (Ottendörfer, 2013)

Kesenjangan antara pendekatan formalistik (*top down*) dengan inklusifitas aktor local dalam misi PBB menginspirasi (Richmond 2010; Mac Ginty 2010a; Mac Ginty and Richmond 2015, Simangan 2017) untuk berbicara tentang suatu konsep *Hibryd Peace*. *Hybrid peace* sebagai hasil dari proses akomodasi, kerjasama, kompromi, dan pertemuan diantara agen, jaringan, dan struktur dari perdamaian dan para pembuat perdamaian (Simangan, 2017). Dengan adanya kerjasama antara aktor internasional dengan aktor lokal, maka kesenjangan antara realitas dengan ekspektasi para pembuat perdamaian dapat diatasi. Kekuatan *hybrid peace* adalah pada “berakar pada lokalitas, kebutuhan sehari-hari, perilaku, dan aspirasi” dari masyarakat pasca konflik sebagai bagian penting dari asesmen dalam membangun perdamaian (Simangan, 2017). Kaitannya dengan konsepsi Galtung tentang konflik, maka sebenarnya *hybrid peace* berorientasi pada menyelesaikan konflik pada level struktural atau kontradiksi sehingga konflik tidak akan lagi terulang. Richmond dan Mac Ginty (2010) memberikan catatan bahwa tidak semua *hybrid peace* akan dengan serta merta memberikan perdamaian yang inklusif dan langgeng. Ada dua jenis *hybrid peace* yaitu positif dan negatif. *Positive hybrid peace* jika keterlibatan masyarakat lokal dapat memberikan kontribusi positif bagi terselesaikannya permasalahan-permasalahan struktural di masyarakat sehingga konflik tidak muncul lagi. Namun bisa jadi keterlibatan masyarakat lokal dalam misi perdamaian PBB tidak membawa pengaruh dalam penciptaan perdamaian atau justru mempermosikan konflik baru. Inilah yang disebut sebagai *negative hybrid peace* (Simangan, 2017).

Dalam penelitian lainnya yang dilakukan Eleanor Gordon (2014) mencoba mencari kontribusi *local ownership* (kepemilikan lokal) dalam SSR. Dia juga menemukan bahwa kegagalan SSR disebabkan oleh gap yang muncul antara teori dengan implementasi dilapangan terkait dengan keterlibatan aktor local. Keterlibatan local ini tidak semata-mata formalitas saja, namun lebih penting lagi adalah substansi dan inklusifitas “pemilik local” dalam program. Ketika keterlibatan ini tidak substantif dan inklusif, maka institusi keamanan dan keadilan negara akan tidak akuntabel atau responsif dalam memenuhi kebutuhan rakyat dan akan kehilangan kepercayaan publik. Hubungan negara dengan rakyat akan menjadi lemah dan masyarakat akan merasa disingkirkan dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan keamanan mereka (Gordon, 2014).

Pada prakteknya, keterlibatan pemilik lokal sering tidak muncul dalam SSR. Hal ini dapat kita lihat pada aspek pendonor dan elit lokal. Pada sisi pendonor, mereka memiliki keterbatasan institusional, waktu, dana, dan sumber daya manusia (Hanggi, 2009, Sedra, 2010; Gordon, 2014). Waktu yang sangat singkat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat pasca konflik yang serba genting harus diselesaikan dengan cepat. Hal ini berakibat pada diputuskannya suatu program tanpa harus mendengarkan dan memperhatikan banyak pihak. Oleh karenanya institusi SSR sering kali bersifat otoriter.

Faktor Penghambat Keterlibatan Pemilik Lokal dalam Reformasi Sektor Keamanan PBB di Timor Leste

Secara garis besar, ada dua faktor penghambat keterlibatan masyarakat Timor Leste dalam misi sektor keamanan PBB, yaitu internal PBB dan karakteristik masyarakat Timor Leste. Secara internal PBB memiliki permasalahan pada struktur organisasi yang otoritarian sehingga menyulitkan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. UNTAET identik dengan sentralisasi kekuasaan yang menempatkan dirinya sebagai “monarki pre-konstitusional di suatu kerajaan yang berdaulat” (Chopra, 2000). Hal ini didasari oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1272 yang memberikan kekuasaan eksekutif dan legislative ditangan Sergio Vieira de Mello sebagai *the Special Representative of Secretary General and Transitional Administration* sekaligus sebagai ketua dari *the UN's office for the Coordination of Humanitarian Affairs*. Dengan kekuasaan yang besar ini, maka tidak ubahnya UNTAET di Timor Timur adalah pemerintahan yang otoritarian. Konsekuensi dari sistem ini adalah minimnya partisipasi rakyat dalam proses pembuatan kebijakan dan semakin menonjolnya pendekatan kekuasaan dan pemaksaan pemimpin atas rakyat dalam hal ini masyarakat Timor Timur.

Elitisme dalam proses pembuatan program UNTAET ditunjukkan dengan disain misi yang dilakukan di markas PBB di New York. Dalam proses disain itu, rakyat Timor Timur tidak diundang untuk berpartisipasi dan PBB berasumsi bahwa kondisi Timor Timur sama dengan Negara-negara pasca konflik lainnya dimana PBB pernah terlibat didalamnya (King College, 2003). Dampak dari elitisme dan kurangnya pengalaman serta pengetahuan staf UNTAET ini adalah terabaikannya karakteristik masyarakat Timor Timur baik secara social, budaya, maupun politiknya dalam perumusan dan implementasi program sehingga tingkat partisipasi rakyat menjadi rendah.

Ketidakmauan UNTAET menggunakan struktur lokal secara proporsional berakibat pada kurangnya legitimasi secara reel UNTAET di mata rakyat. Rakyat Timor Timur lebih mengakui CNRT, yang memiliki jaringan nasional hingga ke pelosok-pelosok daerah, dari pada UNTAET. Dengan kondisi seperti ini, maka UNTAET kemudian secara pragmatis mendekati CNRT dan mengabaikan unsur-unsur kekuatan politik dan social lainnya. Akibatnya aspirasi dan partisipasi rakyat hanya terbatas pada unsur CNRT dan Falintil (terutama yang loyal terhadap Xanana Gusmao), sedangkan kelompok lainnya terabaikan. Seorang ketua adat menyampaikan bahwa “ tidak ada bantuan atau program apa pun dari PBB untuk uma lisan. Bantuan justru datang dari Pemerintah Timor Leste untuk mendirikan beberapa uma lisan yang dulu dirusan oleh TNI” (FBP, 26/11/2018).

Tidak terakomodasinya semua elemen eks pejuang dalam CNRT menyebabkan beberapa kelompok yang kecewa melakukan penolakan terhadap pemerintah dan UNTAET. Kelompok-kelompok paramiliter ini sering melakukan agitasi terhadap masyarakat untuk memunculkan sentimen permusuhan terhadap polisi khususnya dan

pemerintahan pada umumnya. Pada aksi-aksi protes yang digelar oleh mereka sejak Mei hingga Desember 2002 dan memuncak pada saat Falintil Day (20 Agustus 2002) dan Hari Kemerdekaan (28 November 2002), Polisi seringkali bentrok dengan kelompok-kelompok veteran Fretilin, dan juga dengan FDTL. Akibatnya, tidak sedikit korban tewas, beberapa luka, dan juga beberapa tertangkap. Peristiwa tersebut memperlihatkan kelemahan polisi dan ketidakmampuan UNTAET (Rees, 2006).

Pemerintah Timor Leste menuduh CDP-RDTL (Komite Pertahanan Sipil—Republik Demokrasi Timor Timur) berada di balik kerusuhan di bulan Desember 2002 tersebut. Organisasi ini, yang menentang kehadiran PBB dan menyerukan kemerdekaan menyeluruh untuk Timor Timur, telah mengorganisir beberapa demonstrasi anti-pemerintah. Para pemuda sangat marah karena kecilnya kesempatan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan. Sementara para penduduk asli hanya berpenghasilan rata-rata 6 dollar AS per minggu, sebaliknya pasukan PBB dan para pejabatnya dibayar tunjangan hidup sebesar 100 dollar AS per hari. Kesenjangan inilah yang memicu kemarahan para pemuda.

Ketidakpuasaan dari beberapa veteran juga muncul pasca krisis 2006-2008. Lito Rambo (yang merupakan pelaku penembakan terhadap polisi) membentuk kelompok baru Forsa Reservistas Falintil no Juventude Clandestina (Reserve Force of FALINTIL and Clandestine Youth). Rambo berargumentasi bahwa hanya sebagian kecil orang saja yang ditetapkan sebagai tersangka pasca krisis politik tahun 2006-2008. Dia mengklaim memiliki 500 pejuang dengan ratusan orang yang siap berjuang jika diprovokasi. Kelompok ini memiliki 1000 pendukung setia ketika pertama kali melakukan konferensi pers. Tahun 2010 juga masih diwarnai oleh konflik antara veteran dengan PNTL setelah adanya penangkapan terhadap Cornelio Gama, seorang pemimpin Sagrada Familia dan anggota parlemen dari partai UNDERTIM. Selain itu veteran dan juga anggota parlemen dari partai UNDERTIM, Faustino 'Renan Selak' dos Santos, mengejar petugas polisi dengan golok di distrik Lautem (*Timor News Online*, 2010).

Elitisme di UNTAET berlanjut pada misi UNMIT dan diperparah dengan ketidakhadiran staff yang memiliki skill memadai dan pengetahuan akan sistem sosial dan budaya masyarakat Timor Leste. Pasca kerusuhan tahun 2006, UNMIT hadir dengan program yang juga tidak menyelesaikan akar masalah. Secara sepihak UNMIT mendirikan Security Sector Support Unit (SSSU) untuk dapat mempercepat proses rekrutmen staff mereka yang dapat menjadi penghubung dengan orang-orang Timor Leste. Namun justru program-program SSSU tidak terintegrasi dengan program-program UNIPOL yang berujuan untuk mereformasi, merestrukturisasi, dan membangun kembali PNTL. Akibatnya, reformasi sektor keamanan menjadi lambat berjalan (Wilson, 2012).

Minimnya pemahaman ini menyebabkan kurang tepatnya analisa mereka tentang kebutuhan masyarakat Timor Leste. Akibatnya, program-program UNTAET dan

UNMIT tidak dapat berjalan secara optimal dan efektif mencapai tujuan. Nara sumber yang pernah menjadi instruktur bahasa dan budaya bagi pasukan Australia yang akan diterjunkan di Timor Leste dan juga sebagai penerjemah Peter Cosgrove, menyatakan:

“Staf internasional, sering kali berada di Timor Timur untuk kontrak dengan jangka waktu yang pendek dan hanya memiliki pemahaman atau pengalaman yang sedikit tentang sejarah dan budaya Timor Timur. Apalagi ada masalah dengan penguasaan bahasa oleh Staf internasional yang kurang terhadap bahasa Timor Timur. Mereka juga lebih loyal terhadap PBB dan misinya, dari pada terhadap rakyat Timor Timur sebagai konstituennya. Hal ini tentu saja menghalangi kemampuan untuk memetakan kondisi social, ekonomi, dan politik rakyat Timor Timur” (NB, 27/11/2018).

Hal serupa dinyatakan oleh nara sumber yang menjadi instruktur dalam program-program PBB untuk PNTL. PBB datang tanpa adanya pemahaman karakter masyarakat Timor Leste. Mereka abai terhadap kondisi lokal yang sebenarnya dapat menjadi peluang bagi keberhasilan program dan juga bisa jadi penghambat. Kondisi lokal yang diabaikan oleh PBB justru menjadi penghambat program.

“PBB datang dengan konsep yang sudah ada dan global. PBB datang terdiri dari beberapa negara yang memiliki budaya yang berbeda politik berbeda dan keamanan yang berbeda. Krisis keamanan pada tahun 2006 bisa menjadi *lessen learn* bagi PBB karena mereka datang dengan konsep dan budaya yang terlalu tinggi tanpa melihat budaya local. PBB memang berhasil mendirikan PNTL dan F-FDTL, masalahnya bagaimana mentransformasikan budaya mereka ke dalam institusi. Bagaimana mentransformasi konsep-konsep global ke Local. PBB jangan hanya menjalankan misinya berdasarkan pada target-target proyek yang berorientasi hanya pada aktivitas tetapi tidak mepedulikan output bahkan outcome dari programnya” (AA, 26/11/2018).

Keterbatasan pemahaman akan kondisi sosial budaya masyarakat Timor Leste nampak dari bagaimana PBB tidak memperhatikan adanya fakta sejarah bahwa perjuangan kemerdekaan telah mendikotomi masyarakat Timor Leste menjadi masyarakat yang ikut berjuang dan yang pro ortonomi. Isu pejuang dan bukan pejuang menjadi sangat sensitive bagi kalangan elit yang sedang berebut kekuasaan. PBB tanpa memperhatikan serius isu tersebut dan tanpa berkonsultasi dengan elit dan masyarakat Timor Leste mendirikan PNTL pada tahun 2000 dan tidak berencana mendirikan militer. Proses rekrutmen anggota PNTL yang semuanya berasal dari Eks Polisi Indonesia (Polri) yang sebelumnya adalah Civil Police (Civpol) telah memunculkan konflik dengan para bekas pejuang. Pada perjalannya, PNTL kemudian terpolarisasi dalam PNTL nasionalis (yang terdiri atas veteran dan clandestine) dan PNTL eks Polri. (AA, 26/11/2018).

Keterbatasan pemahaman staff akan masyarakat Timor Leste dan keterbatasan lamanya waktu misi UNTAET dan UNMIT, menjadikan setiap program yang tujuan sebenarnya adalah untuk merubah budaya dan meningkatkan profesionalitas akhirnya hanya berujung pada logika proyek. Rencana yang telah disusun oleh PBB diterapkan

begitu saja dalam bentuk-bentuk program pelatihan yang sering kali tidak sesuai dengan budaya dan tingkat pendidikan anggota PNTL. Akibatnya, program-program yang dijalankan tidak dapat semua terserap oleh peserta dan tidak dapat dijalankan di dalam prakteknya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh nara sumber kami :

“Sebetulnya PBB tidak 100% berhasil atau 100% gagal. PBB Berhasil mendirikan institusi PNTL dan mereka sembat mendirikan unit-unit untuk melakukan pelayanan masyarakat. Cuman kelemahannya, susah bagi anggota PNTL untuk bisa menjalankan semua teori-teori yang diberikan PBB. (Hal ini) Karena pertama waktunya terbatas sehingga PBB hanya menjalankan program berdasar proyek. Mereka ingin membangun mentalitas tapi dengan waktu terbatas, itu sangat susah” (AA, 26/11/2018).

UNTAET dan UNMIT juga menghadapi permasalahan tingkat pendidikan yang masih rendah di masyarakat Timor Leste dan khususnya personel PNTL, F-FDTL dan pengadilan. Mayoritas personel PNTL dan F-FDTL adalah maksimal lulusan sekolah menengah atas dan bahkan ada yang tidak memiliki ijazah sekolah. Kondisi ini mempersulit PBB dalam melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan merubah budaya mereka dengan memperkenalkan budaya HAM dan liberal lainnya. Seorang nara sumber yang terlibat sebagai instruktur pelatihan HAM bagi PNTL menyatakan :

“Banyak kalangan meragukan keberhasilan PNTL. Mayoritas personil PNTL SMU bahkan tidak lulus. Artinya tingkat Pendidikan jadi masalah. Tingkat pemahaman pun juga masalah. Budaya orang timor leste yang tidak gemar membaca dan mereka hanya suka budaya dengar juga menjadi factor penghalang dalam transfer pengetahuan. Kesulitan ini diperparah dengan keberadaan semua personel PBB yang expert namun tidak memahami bahasa dan budaya kami.” (AA, 26/11/2018)

Kesimpulan

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berupaya secara berkesinambungan membangun negara Timor Leste dari tahun 1999 hingga berakhirnya misi di tahun 2012. Namun demikian, upaya reformasi sektor keamanan yang bertujuan untuk membangun institusi keamanan negara yang efektif ini, ternyata tidak menuai hasil yang diinginkan. Institusi keamanan negara bahkan menjadi sumber ketidakamanan negara pada tahun 2006-2008. Kegagalan ini bersumber dari dua hal yaitu kelembagaan organisasi yang misi PBB di Timor Leste dan permasalahan di tingkat masyarakat Timor Leste. Secara kelembagaan, UNTAET menjadi organisasi yang elitis sehingga menghalangi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan misinya. Staff UNTAET juga tidak memiliki kemampuan teknis dan pemahaman yang baik tentang budaya dan politik masyarakat Timor Leste. Kelemahan organisasi dan staff PBB ini dipersulit dengan masih rendahnya tingkat pendidikan personil tentara maupun polisi Timor Leste yang menjadi sasaran reformasi.

Bibliografi

- Armstrong, N. J., Chura-beaver, J., & Kfir, I. (2012). *Security Sector Reform in Timor-Leste : Missed Opportunities and Hard Lessons in Empowering the Host-Nation*.
- Bevir, M. & Rhodes, R. A. W. (Eds.). (2015), *The Routledge Handbook of Interpretive Political Science*, London: Routledge.
- Blanco, R. (2015). The UN peacebuilding process: an analysis of its shortcomings in Timor-Leste. *Revista Brasileira de Política Internacional*, 58(1), 42–62. <https://doi.org/10.1590/0034-7329201500103>
- Braithwaite, J. (2013). Evaluating the timor-leste peace operation. *Peace Operation Success: A Comparative Analysis*, 16, 85–110. https://doi.org/10.1163/9789004245082_006
- Chopra, J. (2000). The UN 's Kingdom of East Timor. *Survival*, 42(3), 27–39.
- Chopra, J. (2002). Building State Failure in East Timor Jarat Chopra. *Development and Change*, 33(5), 979–1000.
- Dobbins et al. (2005). *The UN's Role in Nation-Building : from the Congo to Iraq*, Santa Monica : Rand Corporation
- Gaglioti, Frank and Head, Mike. (2006). “UN imposes tight control over East Timor elections”, <http://www.wsws.org/articles/2001/jul2001/timo-j18.shtml>
- Gillespie, M. (2009). *The United Nations and Security Sector Reform : Lessons from the Field* University of York, (September).
- Grotenhuis, René.(2016). “Nation-building and state-building and the challenge of fragility” dalam *Nation-Building as Necessary Effort in Fragile States*, Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Hood, Ludovic. (2006). “Security sector reform in East Timor, 1999–2004”, *International Peacekeeping*, London : Routledge, 2006.
- Jackson, P., & Wilén, N. (2015). Security sector reform and liberal *state building*. *Handbook of International Security and Development*, (December), 181–193. <https://doi.org/10.4337/9781781955536.00019>
- Kocak, Deniz. (2016). “Security Sector Reconstruction in Post-Conflict: The Lessons from Timor-Leste”, *PRISM: The Journal of Complex Operations*, May 2016, Complex Operations and National Defense University
- Kohl, Christoph. (2014). “The Reform of Guinea- Bissau’s Security Sector Between demand and Practice”, *PRIF Report No. 126*, Frankfurt: Peace Research Institute Frankfurt (PRIF).
- Mac Ginty, R. (2008). Indigenous peace-making versus the *liberal peace*. *Cooperation and Conflict*, 43(2), 139–163. <https://doi.org/10.1177/0010836708089080>
- Miall, Huges., (2004), *Conflict Transformation: a Multi Dimensional Task*, Berlin: the Berghof Handbook.
- Onoma, A. K. (2014). WIDER Working Paper 2014 / 012 Transition regimes and

- security sector reforms in Sierra Leone and Liberia Ato Kwamena Onoma *, (January).
- Ottendörfer, E. (2013). Contesting international norms of transitional justice: The case of Timor Leste. *International Journal of Conflict and Violence*, 7(1), 23–35.
- Rees, Edward. (2006). “UN's failure to integrate Falintil veterans may cause East Timor to fail”, <http://www.etan.org/et2003/november/23-30/00un.htm>
- Schroeder, U. C., Chappuis, F., & Kocak, D. (2014). Security Sector Reform and the Emergence of Hybrid Security Governance. *International Peacekeeping*, 21(2), 214–230. <https://doi.org/10.1080/13533312.2014.910405>
- Simangan, Dahlia. (2017). “A Detour in the Local Turn: Roadblocks in Timor-Leste’s Post- Conflict Peacebuilding”, *Asian Journal of Peacebuilding* Vol. 5 No. 2 (2017): 195-221
- Stojanovic, S. (2009). An Approach to Mapping and Measuring Security Sector Reform.
- Tansey, Oisin. (2014). “Evaluating the Legacies of State-Building: Success, Failure, and the Role of Responsibility”, *Journal of International Studies Quarterly*, Volume 58, Issue 1 March 2014, Pages 174–186.
- The Centre for International Governance Innovation, *Security Sector Reform Monitor: Timor Leste, December, 2009, No.1.*, Canada, 2009
- Tobing, Maruli. (2007). “Timor Timur, Bencana Suatu Kemerdekaan”, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/08/sorotan/1603790.htm>
- Uesugi, Yuji.(2014). “Security Sektor Reform (SSR) in Timor-Leste: The Challenges of Respecting Lokal Ownership”, *Asia Peacebuilding Inisiatives*
- UNTAET. (2000). Humanitarian Assistance and Emergency Rehabilitation Pilla: “Briefing Notes on the Humanitarian Programme in East Timor”.
- Ursula C. Schroeder & Fairlie Chappuis (2014) New Perspectives on Security Sector Reform: The Role of Local Agency and Domestic Politics, *International Peacekeeping*, 21:2, 133-148, DOI: 10.1080/13533312.2014.910401
- Ward, John dan Symonds, Peter. (2006). “Keresahan sosial meluap dalam demonstrasi di Timor Timur”, <http://www.wsws.org/id/2002/des2002/indo-d11.shtml>
- Wassel, B. T. (2014). Timor -Leste : Links Between Peacebuilding , Conflict Prevention And Durable Solutions.
- William, Paul D. (2008). *Security Studies: An Introduction*, London: Routledge
- Wilson, B. V. E. (2012). To 2012 and Beyond: International Assistance to Police and Security Sector Development in Timor-Leste. *Asian Politics and Policy*, 4(1), 73–88. <https://doi.org/10.1111/j.1943-0787.2011.01320>.

Ancaman Keamanan Non Tradisional di Wilayah Perbatasan: Sebuah Tinjauan Terhadap Riau dan Malaka

Rendi Prayuda¹

¹*International Relations Department, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Islam Riau*

Corresponding Email: rendiprayuda@soc.uir.ac.id

Abstrak



The rise of globalization and technology has resulted in increasingly high state dependence in the world which also has an impact on vulnerability to the national security of the country through the movement of people, free trade and the flow of information technology. Changes in security issues in international politics and the emergence of non-state actors and conflict interstate that occurred after the cold war has changed the focus of international security issues from traditional security (state-centric) towards non-traditional security (human security). This non-traditional security threat is more dangerous because it directly impacts for human security and threatens the stability of the national stability security. Forms of non-traditional security threats in Malacca Strait are the activities of economic illegal, like narcotics smuggling, environmental issues, infectious diseases, cybercrimes and organized transnational crime network activities. Non-traditional security threats in Riau and Malacca occur due to an increase in the activity of non-state actors with economic illegal activities, the emergence of intra-state conflicts, and the weakness of patrols in the border regions of countries in Southeast Asia.

Keywords

non-traditional, security, threats and border.

Pendahuluan

Dinamika konstelasi politik internasional pasca perang dingin sekitar tahun 2000an telah mengubah polarisasi hubungan antar negara dalam arena politik internasional baik dari sisi isu dan aktor politik internasional. Jika pada perang dingin negara-negara di dunia lebih mengutamakan pada isu keamanan negara atau yang lebih dikenal dengan keamanan tradisional, maka pasca perang dingin isu tersebut mulai beranjak ke arah keamanan warga negara (manusia) yang dikenal dengan keamanan non tradisional. Salah satu negara yang tidak luput dari ancaman keamanan kemanusiaan tersebut adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terletak di Kawasan regional Asia Tenggara dan memiliki wilayah perairan yang luas dibandingkan wilayah daratannya. Beberapa Provinsi di Indonesia seperti Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Papua dan Nusa Tenggara

adalah Provinsi yang berbatasan langsung baik secara daratan ataupun perairan dengan negara tetangga Malaysia, Singapura, Filipina, Papua dan Timor Leste. Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia di wilayah perairan Selat Malaka.

Secara geografis, batas wilayah menandai luas wilayah suatu negara yang meliputi daratan, lautan dan udara yang ada di atasnya. Secara hukum, batas wilayah negara menentukan ruang lingkup berlakunya hukum nasional suatu negara, sedangkan secara politik batas wilayah negara merupakan akhir dari jangkauan kekuasaan tertinggi suatu negara atas wilayah dan segala sesuatu yang ada di dalam wilayah tersebut (Margareta Hanita: 2006). Wilayah suatu negara dipisahkan oleh batas wilayah negara lainnya dan berfungsi sebagai pembatas daerah kedaulatan suatu negara. Pengenalan dan pemahaman batas wilayah erat hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan, kesejahteraan dan pertahanan keamanan negara. Sebagai “teras depan” suatu negara, wilayah perbatasan Indonesia menyimpan beberapa masalah kompleks baik dari aspek keamanan (illegal smuggling, illegal logging, terorisme) maupun aspek sosioekonomi, yang mana dapat berpotensi mengancam kedaulatan Negara Indonesia. Permasalahan ini semakin rumit karena letak geografis wilayah perbatasan secara langsung bersentuhan dengan negara lain. Dalam hal ini perlu adanya tinjauan mengenai pengelolaan wilayah perbatasan yang efektif dalam menyelesaikan problematika terkait dengan wilayah perbatasan.

Wilayah pesisir perbatasan Riau seperti Penipahan Bagan Siapi-Api, Pulau Rupat, Dumai, Selat Panjang dan Tembilahan merupakan pintu gerbang akses masuk jalur perdagangan transnasional antara Indonesia dan Malaysia. Akan tetapi tidak jarang sekali wilayah pesisir perbatasan Riau ini sering dijadikan sebagai pintu masuknya aktivitas ekonomi ilegal berupa penyelundupan barang baik dari Indonesia ataupun menuju Indonesia. Aktivitas penyelundupan barang tersebut terdiri atas jaringan kejahatan transnasional penyelundupan narkoba, minuman alkohol bermerk, pakaian bekas, bawang merah dan putih illegal, penyeludupan ikan, kejahatan perdagangan manusia serta pergerakan jaringan radikalisme dan terorisme. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dianalisis berupa bentuk – bentuk ancaman keamanan non tradisional di wilayah pesisir perbatasan Provinsi Riau serta faktor – faktor yang mendorong peningkatan aktivitas penyelundupan barang ilegal tersebut. Dengan adanya pemetaan terhadap ancaman keamanan non tradisional di wilayah pesisir perbatasan Riau ini maka dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait bahaya dari ancaman keamanan non tradisional ini terhadap jiwa masyarakat serta selanjutnya hasil kajian penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak terkait seperti Kepolisian Daerah Riau, BNN, TNI, BINDA, Pemerintah Kabupaten, Kota dan Provinsi Riau serta Pemerintah Pusat untuk informasi awal yang dapat dianalisis sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan terutama dalam percepatan

pembangunan di wilayah terdepan guna mendukung konsep Pembangunan Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Review Literatur

Kajian penelitian terhadap keamanan negara di wilayah perbatasan sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, terutama terkait kajian mengenai pola pembangunan sosial masyarakat dan wilayah perbatasan, keamanan wilayah perbatasan serta pertahanan maritim di wilayah perbatasan. Penelitian tentang ancaman keamanan tradisional dan non tradisional di sudah ada dilakukan oleh peneliti lain akan tetapi kajian tersebut masih fokus pada ancaman keamanan non tradisional secara umum dan masih terfokus pada regionalisme Asia. Penelitian mengenai ancaman keamanan non tradisional di wilayah perbatasan terutama di perbatasan pesisir Provinsi Riau dan Malaysia belum ada dilakukan oleh peneliti lainnya, sehingga hal ini mendorong peneliti untuk tertarik meneliti mengenai bentuk ancaman keamanan non tradisional dan faktor-faktor yang mendorong meningkatnya ancaman keamanan non tradisional di wilayah pesisir perbatasan Provinsi Riau dan Malaka.

(Othman et al. 2013), Pergeseran paradigma politik internasional dari isu keamanan tradisional menuju keamanan non tradisional saat ini menjadi ancaman keamanan yang nyata terhadap keamanan pada tingkat domestik, regional, dan global. Elaborasi terkait isu-isu perubahan iklim, bencana alam, migrasi, dan persoalan lintas batas yang melibatkan aktor non-negara saat ini berdampak pada keamanan negara dan masyarakat. Tulisan ini berargumentasi bahwa dari segi topografi, wilayah geografis yang bersifat terbuka, dan posisinya yang strategis menjadikan wilayah ini rentan terhadap ancaman. Konflik pada tingkat domestik yang terjadi di Kamboja, Vietnam, Filipina (Mindanao), Indonesia (Aceh) dan Thailand (Pattani) telah memberi ruang gerak bagi tindak kejahatan lintas batas ini. Maka dengan kondisi geografis yang terbuka oleh wilayah daratan dan perairan internasional akan mengakibatkan kawasan regional Asia Tenggara akan menjadi tempat berlangsungnya aktivitas keamanan non tradisional secara massif sehingga diperlukan upaya kerjasama koordinasi antar negara dalam mengantisipasi ancaman tersebut.

Studi terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain tentang ancaman keamanan non negara pada artikel (Swanström 2010) menjelaskan bahwa diperlukan analisis mendalam terhadap perbedaan antara ancaman yang bersifat keras (fisik) dan lunak (non fisik) serta permasalahan keamanan di negara Asia bersifat multi dikarenakan lemahnya negara dan struktur pemerintah. Selanjutnya, (Srikanth 2014) hanya menjelaskan penyebab munculnya ancaman keamanan non tradisional di Abad 21 seperti perkembangan aktor non negara, kerusakan lingkungan, akibat konflik domestik dan perang dunia maya (cyber). Dan pada artikel berikutnya, (Dabova 2013), menganalisis mengenai ancaman keamanan non tradisional di wilayah perbatasan dijelaskan bahwa salah satu ancaman terbesar pemerintah negara di

Kawasan Asia Tenggara adalah kelompok kejahatan transnasional terorganisir aktor yang menguasai jalur komunikasi, membahayakan akses ke sumber daya strategis negara, menguasai pertahanan militer negara dan merusak lingkungan serta teori stabilitas hegemoni rezim memiliki "batas" dan tidak mampu menggambarkan mengenai ancaman non-tradisional. Sehingga menurutnya kelemahan pemerintah dan organisasi regional dalam mengawasi wilayah perairan teritorial dan internasional mengakibatkan perkembangan kelompok terorisme, pembajakan, degradasi lingkungan, dan kejahatan transnasional lainnya. Serta (Indrawan 2017) ancaman non militer di wilayah Papua adalah keinginan disintegrasi Masyarakat Papua yang didasarkan pada kebijakan pemerataan ekonomi.

Selanjutnya, (As and Praditya 2015) menjelaskan bahwa kebijakan peningkatan kapasitas kekuatan pertahanan maritime harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebagai alat *bargaining positions* terhadap perubahan lingkungan politik internasional dan mencapai negara poros maritime dunia. (Maqbool Tehmina 2014) menjelaskan bahwa ancaman keamanan non tradisional berbeda dengan ancaman keamanan tradisional yang menggunakan senjata dan politik akan tetapi ancaman keamanan non tradisional ini mempengaruhi keberlanjutan umat manusia seperti ancaman yang disebabkan oleh narkoba mulai dari mata rantai produksi, pengolahan sampai pada perdagangan narkoba yang mengakibatkan banyak populasi manusia meninggal dunia sebagaimana yang terjadi di Pakistan. Oleh karena itu, berdasarkan studi terdahulu diatas, maka beberapa penelitian tersebut hanya menganalisis mengenai dinamika aktor pelaku kejahatan transnasional dan perkembangannya, serta hanya menjelaskan upaya meningkatkan kekuatan pertahanan negara di wilayah maritim akan tetapi tidak menjelaskan mengenai bentuk – bentuk ancaman non tradisional terlebih dahulu terutama ancaman non tradisional seperti apa yang paling berbahaya di wilayah perbatasan terutama perbatasan Indonesia dan Malaysia di wilayah Riau serta faktor-faktor yang mengakibatkan meningkatnya bentuk ancaman keamanan non tradisional tersebut.

Berdasarkan dari hasil kajian pustaka terhadap beberapa studi terdahulu, maka penulis mengajukan usulan proposal penelitian yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya yaitu mengenai bentuk ancaman keamanan non tradisional di wilayah pesisir perbatasan Provinsi Riau (Indonesia) dan Malaka (Malaysia) serta faktor-faktor yang mendorong peningkatan terhadap ancaman keamanan non tradisional tersebut. Hasil penelitian ini sangat penting bagi masyarakat dan pemerintah terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir perbatasan provinsi Riau, hal ini dikarenakan menyangkut keamanan nyawa masyarakat serta bagi Pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait pengamanan negara di wilayah perbatasan dari ancaman keamanan non tradisional.

Metode Penelitian

Penelitian mengenai ancaman keamanan non tradisional di wilayah pesisir perbatasan Provinsi Riau ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Kegiatan penelitian ini dilakukan di beberapa wilayah pesisir perbatasan Provinsi Riau, yaitu di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dalam pelaksanaan penelitian melalui kegiatan observasi lapangan, kegiatan FGD serta wawancara mendalam dengan informan penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang diperoleh atau yang berkaitan dengan peningkatan ancaman keamanan non tradisional di wilayah pesisir perbatasan Riau yang terdiri atas; laporan tahunan dan hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, artikel dan yang berhubungan dengan masalah penelitian dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian mengenai ancaman keamanan non tradisional di wilayah pesisir perbatasan Provinsi Riau ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui kegiatan observasi oleh tim peneliti melalui kegiatan pengamatan keadaan yang sesungguhnya di lapangan serta mengamati gejala-gejala yang ada dan timbul untuk dijadikan bahan penelitian. Selanjutnya tim peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan penelitian seperti Lanal Dumai, Direktorat Narkoba Polda Riau, Kepala BNN Provinsi Riau, Camat Rupat Utara dan masyarakat di Pulau Rupat dan Kota Dumai, selain itu tim juga melaksanakan kegiatan FGD bersama masyarakat di wilayah pesisir dan perangkat Desa untuk mendapatkan informasi yang akurat. Dan kegiatan pengumpulan dokumentasi penelitian berupa foto, laporan kegiatan tangkapan aparat penegak hukum (TNI AL, Kepolisian dan BNN) serta publikasi jurnal ilmiah yang terkait masalah penelitian.

Kegiatan analisis data penelitian ini dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengamatan dan pengumpulan data. Jadi selama proses penelitian berlangsung data yang diperoleh dapat langsung dianalisis. Sesuai dengan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari lapangan, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Melalui teknik ini, akan digambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai dalam penelitian mengenai bentuk ancaman keamanan non tradisional di wilayah pesisir perbatasan Provinsi Riau. Adapun proses dan tahapan pelaksanaan penelitian yang diusulkan ini adalah sebagai berikut:

Hasil dan Temuan Penelitian

Perbatasan negara merupakan sebuah ruang geografis yang sejak semula merupakan wilayah perebutan kekuasaan antarnegara, yang terutama ditandai oleh adanya

pertarungan untuk memperluas batas-batas antarnegara. Sebagai bagian dari sejarah dan eksistensi negara, riwayat daerah perbatasan tidak mungkin dilepaskan dari sejarah kelahiran dan berakhirnya berbagai negara (Riwanto: 2002). Kawasan perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Kawasan perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumberdaya alam, serta keamanan dan keutuhan wilayah. Masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks. Terdapat sejumlah faktor krusial yang terkait di dalamnya seperti yurisdiksi dan kedaulatan negara, politik, sosial ekonomi, dan pertahanan keamanan.

Salah satu bentuk ancaman nyata yang terjadi di wilayah perbatasan antar negara adalah bentuk aktivitas ancaman non tradisional atau ancaman kemanusiaan. Ancaman non-tradisional pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.(Jerry: 2015). Ancaman non-militer dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum. Oleh karena itu diperlukan penanganan yang serius oleh pemerintah dalam mengantisipasi ancaman non tradisional, hal ini dikarenakan dalam keamanan non tradisional maka pelaku dari kejahatan tersebut adalah aktor non negara. Berdasarkan observasi peneliti dilapangan maka didapatkan temuan penelitian bahwa bentuk ancaman non tradisional di wilayah perbatasan Riau dan Malaka adalah bentuk aktivitas ekonomi illegal seperti penyelundupan barang sembako impor (bawang merah dan bawang putih dari Malaysia, penyelundupan narkotika, penyelundupan pakaian bekas serta perdagangan manusia. Dalam tulisan ini penulis akan membatasi hasil temuan penelitian pada bentuk aktivitas ekonomi illegal berupa penyelundupan narkotika, penyelundupan pakaian bekas dan perdagangan manusia di wilayah perbatasan Riau dan Malaka.

Penyelundupan Narkotika di Wilayah Perbatasan Selat Malaka

Secara geografis, Provinsi Riau terletak diantara 1°15 lintang selatan dan 2°25 lintang utara. Sebelum pemekaran, Provinsi ini terdiri dari daerah daratan dan lautan/perairan, dengan luas lebih kurang 329.867,61 Km². Adapun posisi wilayah merentang dari pantai timur tengah Sumatera sampai pesisir barat Kalimantan. Luas daratan 235.306 Km² atau sekitar 71,33 persen dan daerah lautan Riau sekitar 94.561,61 Km² atau 28,67 persen. Secara geografis Provinsi Riau memiliki posisi yang sangat strategis, yaitu berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura dan Thailand; berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan jalur perlintasan perdagangan dunia. Ditambah lagi dikawasan regional Sumatera Provinsi Riau berada di bagian tengah Pulau Sumatera pada lintasan pergerakan antar wilayah yang memberikan peluang untuk membangun akses yang tinggi bagi lalu-lintas barang, orang, informasi dan modal. Provinsi Riau secara geografis berbatasan langsung dengan beberapa wilayah, yaitu:

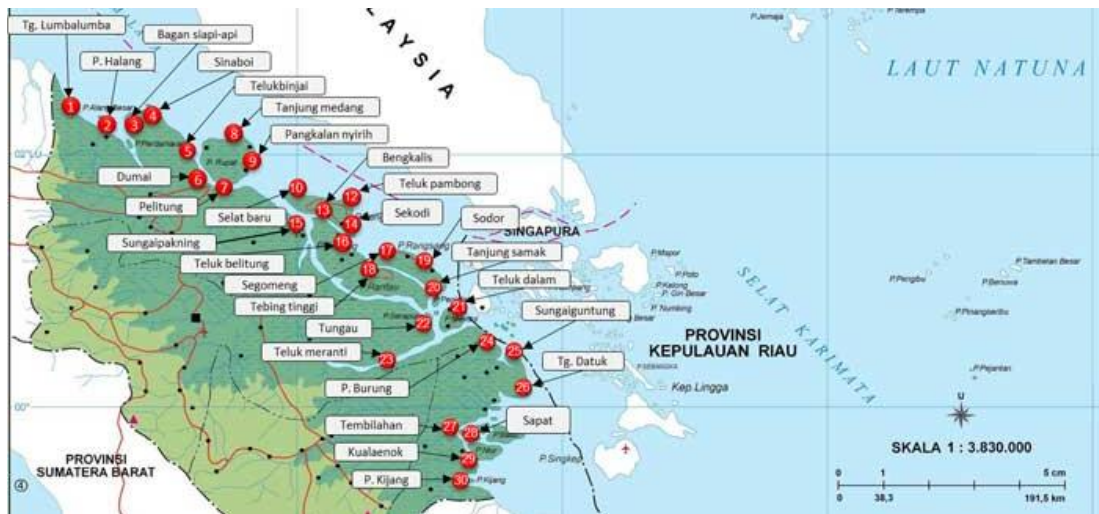
- Sebelah Utara : Selat Malaka (Berbatasan Malaysia)
- Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Sumatera Barat
- Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau
- Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Riau memiliki panjang garis pantai yang membentang dari wilayah Panipahan Kabupaten Rokan Hilir sampai ke wilayah Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir sekitar sepanjang 370 Mil atau setara dengan 685,24 km dengan jumlah pulau di Provinsi Riau sebanyak 139 Pulau dengan rincian terdapat Pulau bernama 73 pulau dan pulau tanpa nama 66 pulau. Selain itu Provinsi Riau juga memiliki beberapa wilayah atau Pulau dengan status pulau terdepan, yaitu:

1. Pulau Jemur berjarak dengan wilayah Batu Kuching sekitar 45 mil (83,34 km) Malaysia
2. Pulau Tokong berbatasan dengan Batu Kuching Malaysia
3. Pulau Sinaboi berbatasan dengan Port Dickson Malaysia
4. Tanjung Medang berbatasan dengan Tanjung Rachado Malaysia
5. Tanjung Parit berbatasan dengan Tanjung Tohor Malaysia
6. Tanjung Kedabu berbatasan dengan Pulau Pisang

Dengan posisi tersebut, maka Provinsi Riau merupakan salah satu gerbang perdagangan internasional terutama dari Malaysia dan Singapura. Beberapa wilayah Provinsi Riau yang merupakan gerbang masuk barang-barang dari Malaysia adalah Pelabuhan Tanjung Buton, Pelabuhan Selat Panjang, Pelabuhan Pulau Rupert Bengkalis, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Sinaboy Rokan Hilir dan Pelabuhan Bagan Siapi-api. Pesatnya hubungan perdagangan antara Indonesia terutama Provinsi Riau dengan Malaysia satu sisi memberikan keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat. Akan tetapi disisi lain hubungan perdagangan kedua wilayah ini kerap juga disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan kegiatan transaksi penyeludupan narkotika dari wilayah Malaysia ke wilayah Indonesia melalui Provinsi Riau sebagai jalur transit dari penyeludupan narkotika tersebut. Berikut ini merupakan jalur pintu masuk narkoba dari Malaysia melalui pelabuhan di sepanjang pesisir pantai di wilayah Provinsi Riau, yaitu:

Gambar 1.4 Peta Jalur Masuk Wilayah Provinsi Riau



Sumber: Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Provinsi Riau. Tahun 2016.

Berdasarkan jalur masuk wilayah Provinsi Riau diatas, maka terdapat beberapa lima Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang berada di wilayah pesisir Provinsi Riau seperti Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Indragiri Hilir. Penyeludupan narkotika dari kawasan Asia Tenggara melalui jalur laut diindikasikan masuk ke Indonesia melalui jalur pelabuhan laut disepanjang pesisir wilayah Provinsi Riau. Disamping itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 57 Tahun 1983 Provinsi Riau memiliki wilayah zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 379.000 Km². Berikut ini merupakan gambaran umum tentang wilayah peta Provinsi Riau, yaitu:

Gambar 1.5 Peta Wilayah Provinsi Riau



Berdasarkan peta tersebut maka dapat dijelaskan bahwa Provinsi Riau berbatasan langsung dibagian utara dengan Selat Malaka dan hanya berjarak 83 KM dari Batu

Kching Malaysia. Di daerah perairan terdapat 3.214 pulau besar dan kecil yang tersebar secara strategis. Karena sebahagian berada di Selat malaka dan laut Cina selatan yang merupakan salah satu jalur lintas laut/pelayaran utama dalam dunia perdagangan global. Wilayah geografis Riau ini berbatasan langsung dengan negara-negara Asia Tenggara yaitu Malaysia – Singapura – Thailand – Kamboja, Myanmar dan Vietnam. Secara geografis Provinsi Riau memiliki posisi yang sangat strategis, yaitu berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura dan Thailand; berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan jalur perlintasan perdagangan dunia. Ditambah lagi dikawasan regional Sumatera Provinsi Riau berada di bagian tengah Pulau Sumatera pada lintasan pergerakan antar wilayah yang memberi peluang untuk membangun akses yang tinggi bagi lalu-lintas barang, orang, informasi dan modal.

Dengan posisi yang strategis tersebut, menjadikan Provinsi Riau merupakan salah satu gerbang perdagangan internasional, antara lain melalui pelabuhan Dumai, Buatan, Tanjung Buton, Sungai Pakning, Perawang, Pekanbaru, Selat Panjang dan Kuala Enok. Akan tetapi letak wilayah yang strategis ini juga memiliki ancaman dari sisi keamanan negara terutama dalam konsep keamanan manusia (*human security*). Salah satu ancaman nyata adalah kejahatan transnasional berupa penyeludupan narkotika di wilayah Asia Tenggara. Peredaran dan perdagangan narkotika (*drugs trafficking*) merupakan isu kejahatan transnasional yang berkembang di kawasan Asia Tenggara, faktor lemahnya penegakan hukum dan pengawalan kelembagaan pemerintah menjadi faktor mengapa bisnis perdagangan obat-obatan di kawasan Asia Tenggara sangat mudah berkembang (Bambang Cipto, 2007. Hlm 223). Beberapa faktor pendorong berkembangnya bisnis narkotika di Asia Tenggara terutama Indonesia, yaitu:

1. Perbedaan harga jual yang sangat signifikan diantara negara-negara kawasan Asia Tenggara
2. Angka pengangguran yang sangat tinggi di beberapa negara Asia Tenggara terutama Indonesia
3. Kondisi kemiskinan di beberapa negara Asia Tenggara menyebabkan proses untuk merekrut dan biaya perekrutan kurir cukup murah
4. Jumlah pemakai narkoba saat ini terutama di Indonesia sudah melebihi dari 5 juta orang (Hasil wawancara bersama Direktur Narkoba Polda Riau pada tanggal 21 Maret 2018).

Faktor-faktor tersebut tentu saja berdampak pada meningkatnya peredaran narkotika di wilayah Indonesia. Berdasarkan observasi penulis dilapangan maka ditemukan fakta bahwa peredaran atau penyeludupan modus operandi narkotika dari negara Malaysia ke Indonesia terutama wilayah Provinsi Riau menurut Direktur Reserse Narkoba Polda Riau bahwa masuknya narkotika melalui masuk di Pelabuhan resmi dengan menyamarkan isi muatan, masuk melalui Pelabuhan kecil atau pelabuhan ilegal dengan menggunakan kapal laut. Selain itu modus operandi lainnya adalah dengan narkotika tersebut ditelan didalam perut atau dimasukkan kedalam anus, disamarkan

dalam Koper/Travel Bag dan dalam kemasan makanan, selanjutnya menggunakan perusahaan jasa pengiriman paket serta melalui pelayaran kapal *Ship To Ship*.

Sebagian besar narkotika yang masuk ke wilayah Provinsi Riau masuk melalui jalur laut. Narkotika yang masuk ke Provinsi Riau berasal dari Malaysia merupakan narkotika yang transit dan dikirim oleh agen dari China. Beberapa pelabuhan di Malaysia yang disinyalir sebagai wilayah transit narkotika sebelum sampai di Provinsi Riau adalah Pelabuhan Port Klang, Port Dickson, Pelabuhan Malaka, Pelabuhan Muar dan Pelabuhan Batu Pahat. Sedangkan pelabuhan tujuan narkotika tersebut berada di beberapa wilayah pelabuhan yaitu Bagan Siapi-API, Pulau Rupa, Selat Panjang, Dumai dan Tembilahan.

Penyelundupan Baju Bekas di Wilayah Perbatasan Selat Malaka

Perdagangan pakaian bekas telah berkembang sangat baik dalam lingkup global sejak tahun 1990. Hampir semua negara yang terlibat di dalam perdagangan pakaian bekas, baik sebagai eksportir ataupun importir. Amerika tercatat sebagai negara eksportir pakaian bekas terbesar di dunia, misalnya 385.000 ton diekspor pada tahun 2003 hampir 40 % dari pasar. Eksportir besar lainnya termasuk Jerman, Britania Raya, Belanda dan Jepang. Sedangkan Negara-negara sasarannya adalah negara dunia ketiga (Zimbabwe, Ghana, Rwanda, Tunisia, Kenya, Zambia, Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk di negara kita Indonesia) (Salli Baden: 2005). Impor pakaian bekas ini sangat bermanfaat bagi konsumen miskin, terutama di negara-negara yang rendah daya beli. Sebagai contoh, di Afrika hampir semua kelompok sosial-ekonomi memilih untuk membeli pakaian bekas (*secondhand clothing*). Kenaikan penyelundupan pakaian bekas dipengaruhi oleh penurunan industri dalam negeri. Penurunan produksi tekstil juga tampak jelas di Nigeria, masyarakatnya lebih memilih untuk membeli pakaian bekas dengan harga yang relatif murah.

Selama ini, negara Singapura, Taiwan, Malaysia, China, Hongkong, Korea dan Jepang ditenggarai sebagai negara penyuplai pakaian bekas ke Indonesia. Pakaian bekas impor mulai marak masuk Indonesia sekitar tahun 2000 yang diselundupkan melalui pelabuhan-pelabuhan tradisional. Bahkan Janto Dearmando Saragih Ketua Asosiasi Pedagang Pakaian Bekas Impor menuturkan, bisnis baju bekas impor sudah berlangsung sejak 1976 (<http://www.republika.com>.Awal mula perdagangan pakaian bekas.htm, diakses pada tanggal 9 Mei 2011). Permasalahan penyelundupan ditentukan pula oleh faktor transportasi. Daerah-daerah tertentu di Indonesia dalam mendatangkan barang-barang kebutuhan pokok sering mengalami keterlambatan, hal ini disebabkan belum lancarnya hubungan satu pulau ke pulau lainnya. Transportasi di Riau masih menggunakan jalur darat dan laut pada umumnya. Kelancaran transportasi sangat bergantung pada keadaan alam (cuaca). Masuknya barang-barang pakaian bekas dari Singapura ke Pekanbaru dapat menggunakan kapal melalui jalur laut, dimana jalur dari provinsi tetangga, provinsi Kepulauan Riau sangat efektif sehingga barang selundupan tersebut dapat dengan mudah masuk melalui kabupaten Meranti

dan Siak, dan pada akhirnya pakaian bekas tersebut dapat dibawa melalui jalur darat ke Pekanbaru dengan mulus tanpa adanya pemeriksaan oleh petugas yang berwenang. Masuknya pakaian bekas asal Singapura ke Pekanbaru setelah ditelusuri secara langsung berawal dari pelabuhan Jurong Ish Singapura menuju pelabuhan Puakang di Tanjung Balai Karimun, setelah itu barulah pakaian-pakaian bekas tersebut di bawa ke Pekanbaru melalui pelabuhan Siak. Jadi berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pakaian bekas dari Singapura masuk ke Indonesia melalui pelabuhan Tg Balai Karimun di Provinsi Kepulauan Riau dan setelah itu barulah masuk ke Pekanbaru. Akibatnya masyarakat terutama yang tinggal di daerah terpencil sering memasukkan barang-barang kebutuhan pokoknya dengan cara tidak sah (kadang-kadang dibawa oleh kapal besar asing). Ditambah lagi letak daerah-daerah tertentu di Indonesia yang berdekatan dengan Negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan sebagainya. merupakan peluang yang bagus bagi para penyeludup untuk melakukan aksinya.

Luasnya wilayah serta banyaknya pulau-pulau di Indonesia yang belum lancar sarana transportasinya jelas membuka peluang bagi para penyeludup untuk terus-menerus melakukan aksi liarnya, hal ini ditambah lagi dengan letak pulau-pulau tersebut yang letaknya berdekatan dengan Negara-negara tetangga yang industrinya terlebih dahulu mengalami kemajuan. Seperti halnya barang-barang ekspor-impor berupa barang-barang bekas sering diantarpulaukan, sehingga kecurigaan terhadap muatan kapal antar pulau tersebut diabaikan. Lebih-lebih jika mereka melindungi barang-barang yang diangkutnya itu dengan faktur-faktur pembelian palsu yang mereka dapat dari importer, maka akan sangat sulit bagi para petugas penyidik yang mencurigai muatan kapal antar pulau tersebut. Dan yang terlebih lagi bila adanya keterlibatan aparat yang bersangkutan seperti, Bea Cukai, KP3, Polisi dan AL (Angkatan Laut) yang memperlancar kegiatan penyelundupan tersebut. Dengan cara, aparat yang telah bekerja sama dengan para importer / pengusaha tersebut membebaskan barang-barang tersebut apabila masuk ke perairan Indonesia karena sudah mendapat bagiannya dari importer / pengusaha tersebut.

Pakaian bekas yang didatangkan ke Indonesia seluruhnya disalurkan ke kepulauan Indonesia bukan hanya satu kepulauan saja, misalnya pulau Riau dengan jalur-jalur: Singapura – Tembilahan, Singapura – Batam – Tanjung Pinang – Pekanbaru – Singapura – Balaikarimun - Pekanbaru, Malaka/Malaysia – Bengkalis, Singapura – Selat Panjang – Pekanbaru serta Singapura Kuala Enok, Pulau Ketam – Malaysia – Bagan Siapi-api. Para pemilik barang adalah para pedagang induk yang nantinya akan menjual dan mengirimkan barang tersebut ke daerah-daerah para pemesan. Jadi dapat diartikan bahwa seberapa banyak permintaan jumlah bal yang masuk ke gudang. Karena pada umumnya para agen terlebih dahulu menerima pesanan sebelum ia sendiri memesan barang tersebut dari relasi mereka di Singapura.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas maka kesimpulan dari artikel ini bahwa ancaman keamanan di wilayah perbatasan saat ini telah mengalami transformasi dari keamanan terhadap negara secara militer dan perang menuju keamanan non tradisional atau keamanan manusia disebuah negara. Wilayah perbatasan kawasan Asia Tenggara terutama di wilayah Selat Malaka adalah bentuk aktivitas ekonomi illegal yang dilakukan oleh aktor non negara atau pelaku kejahatan transnasional yang terorganisir. Kejahatan transnasional di wilayah Riau dan Malaka terjadi dalam bentuk aktivitas ekonomi illegal berupa kegiatan penyelundupan narkoba dan penyelundupan pakaian bekas. Kejahatan penyelundupan narkoba dan pakaian bekas ini dilakukan dengan memanfaatkan jalur wilayah perairan perbatasan Riau dan Malaka yang berada di wilayah terdepan Riau dan melalui pintu pulau terdepan tersebut baru masuk menuju jalur darat ke daerah Indonesia. Oleh karena itu ancaman keamanan non tradisional di wilayah perbatasan ini merupakan ancaman yang dilakukan oleh aktor non negara dan berdampak terhadap keamanan kemanusiaan disebuah negara itu sendiri.

Bibliografi

- As, Muhammad, and Yosua Praditya. 2015. "Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Transnasional: Berdasarkan Analisis Model Element of National Power: (Political, Military, Economic, Social, Infrastructure, and Information / PMESII) Globalisation And The Mapping Of Strategi." *Pertahanan* 5: 53–70.
- Dabova, E. L. 2013. "Non-Traditional Security Threats in the Border Areas: Terrorism, Piracy, Environmental Degradation in Southeast Asian Maritime Domain." In *International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives*, International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, 51–56.
- Jerry Indrawan. 2015. *Studi Strategis dan Keamanan*. Jakarta: Nadi Pustaka. Hal. 69.
- <http://www.republika.com>.Awal mula perdagangan pakaian bekas.htm, diakses pada tanggal 9 mei 2011
- Maqbool, Tahmina. 2014. Drug Trafficking: A Non-Traditional Security Threat to National Security of Pakistan. ISSRA Papers.*
- Margaretha Hanita. 2006. "Strategi Pertahanan di Wilayah Perbatasan, Studi di Tiga Wilayah Perbatasan: Papua, Timor dan Kalimantan". *Jurnal Aplikasi Kajian Strategik*, 1 (1): 77-94.
- Indrawan, Jerry. 2017. "Ancaman Non-Militer Terhadap Keamanan Nasional Di Papua." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 12(2): 159.
- Othman, Zarina et al. 2013. "Zarina Othman, et.al Non-Traditional Security Issues and the Stability of Southeast Asia 1." *Jurnal Kajian Wilayah* 4(2): 150–64.
- Riwanto Tirtosudarmo. 2002. "Tentang Perbatasan dan Studi Perbatasan: Suatu Pengantar". *Jurnal Antropologi Indonesia* 67 (XXVI): iv-vi.

- Srikanth, Divya. 2014. "Non-Traditional Security Threats in the 21st Century: A Review." *International Journal of Development and Conflict* 4(1): 60–68.
- Swanström, Niklas. 2010. "Traditional and Non-Traditional Security Threats in Central Asia: Connecting the New and the Old." 8(2): 35–51.
- Sally Baden and Catherine Barber, The impact of the secondhand clothing trade of developing countries, September 2005.

Komunitas Epistemik dalam Isu Perbatasan Indonesia Malaysia: Camar Bulan dan Tanjung Datu

Iva Rachmawati¹

¹Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, UPN 'Veteran' Yogyakarta

Corresponding e-mail: iva.rachma@gmail.com

Abstrak



Perbatasan negara merupakan kawasan yang sarat dengan pergesekan dan tidak jarang menimbulkan konflik antar negara. Konflik yang terjadi tidak saja diakibatkan karena klaim tumpang tindih atas batas negara, tetapi juga disebabkan oleh sejumlah persoalan ekonomi dan sosial di kawasan perbatasan. Artikel ini hendak menyoal peran komunitas epistemik baik yang dibentuk oleh negara maupun aktor non negara dalam memengaruhi kebijakan negara atas kawasan perbatasan khususnya di Camar Bulan dan Tanjung Datu serta persepsi publik melalui informasi akademis. Melalui metode wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan pada kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, riset ini menemukan bahwa peran komunitas epistemik masih sangat rendah dalam memengaruhi kebijakan negara dan memperkaya pengetahuan publik atas isu terkait. Rendahnya intensitas relasi pembuat kebijakan dan komunitas epistemik menyebabkan lahirnya pro border policy berjalan lambat. Sementara rendahnya komunikasi intersubjektif terkait isu perbatasan pada kawasan tersebut justru menyebabkan kesimpangsiuran informasi mengenai konflik Tanjung Datu dan Camar Bulan.

Kata Kunci

Komunitas Epistemik, Perbatasan, Relasi Bilateral.

Pendahuluan

Konflik yang terjadi antara Indonesia Malaysia terkait dengan perbatasan yang terjadi secara berulang menunjukkan bahwa isu perbatasan masih menjadi isu yang sensitif di antara kedua negara, khususnya Indonesia. Sensitifitas terhadap isu seringkali lebih dipicu oleh ketidakpahaman atas persoalan yang terjadi dan juga kesimpangsiuran informasi yang diperoleh oleh publik domestik. Situasi ini pun memengaruhi hubungan bilateral Indonesia Malaysia selama beberapa tahun meski telah diupayakan didirikannya sebuah institusi guna mengelola kawasan perbatasan melalui KK Sosek Malindo sejak tahun 1983.

Isu perbatasan Indonesia Malaysia yang mempengaruhi hubungan bilateral antara lain isu Sipadan Ligitan, Ambalat, Camar Bulan dan Tanjung Datu. Selain itu masih

terdapat 9 OBP (Outsanding Border Disputes) yang lain yang berpotensi menyebabkan konflik perbatasan kedua negara. Sejak tahun 2016, isu perbatasan mulai nampak di wilayah Kabupaten Nunukan karena ketidakjelasan titik perbatasan di Sungai Sinapad, Sungai Simantipal, B2700 – B3100, Pulau Sebatik; dan C500 –C600. Ketergantungan ekonomi Indonesia kepada Malaysia semakin mendorong keyakinan atas lepasnya sejumlah desa dari Indonesia pada kawasan tersebut (Hidayat, 2016).

Keempat isu perbatasan tersebut sempat menjadi isu yang sangat panas di antara kedua negara. Bahkan, isu Ambalat pernah membawa kedua negara dalam sebuah netwar (Madu, 2008). KK Sosek Malindo yang dibentuk untuk mengelola persoalan perbatasan seakan tidak memiliki kemampuan untuk turut serta memberikan kontribusi positif terhadap hubungan bilateral Indonesia Malaysia terkait isu perbatasan. Hal ini dipengaruhi oleh bidangnya yang hanya bergerak pada isu sosial dan ekonomi, keterbatasan struktur (Rachmawati, 2012) serta sifatnya yang cenderung tertutup (Saidi, 2019). Sementara itu, media bergerak jauh lebih cepat dan provokatif dalam menyebarkan berita (yang beberapa di antaranya tidak benar) dan publik lebih memercayai media yang dianggapnya selalu sahih dalam menyampaikan berita tanpa melakukan konfirmasi ulang atas berita yang diterima.

Isu perbatasan yang terjadi di Camar Bulan dan Tanjung Datu menyisakan persoalan yang tidak jauh berbeda. Keterbatasan pemahaman atas persoalan dan kesimpangsiuran informasi mengenai hal tersebut, mengakibatkan publik mudah mengambil sikap yang serampangan dan justru menyebabkan hubungan kedua negara memburuk (Anon, "Camar Bulan dan Tanjung Datu Harus Dipertahankan", 2011). Informasi mengenai Camar Bulan yang diisukan dicaplok oleh Malaysia bahkan pertama kali dihembuskan oleh seorang anggota DPR (Gultom, 2011) dan Gubernur Kalimantan Barat pada waktu itu (Anon, "Dikabarkan Dicaplok Malaysia, Aktivitas TNI di Camar Bulan Meningkat", 2011). Hal ini mengakibatkan hubungan bilateral kedua negara memburuk. Sentimen negatif publik semakin meningkat ketika militer mulai dikerahkan untuk menyelesaikan persoalan Tanjung Datu.

Merunut isu yang muncul pada kedua isu yaitu Camar Bulan dan Tanjung Datu nampak bahwa elit politik dan media memberikan pengaruh utama dalam isu perbatasan tersebut. Elit politik yang memberikan pernyataan mengenai kedua isu tersebut lebih mengedepankan nasionalisme tanpa mempertimbangkan akibat dari pernyataan terhadap hubungan bilateral negara. Sementara media tidak memiliki orientasi atas pemahaman publik yang lebih baik mengenai konflik perbatasan yang ada. Media hanya sekedar memuat berita perkembangan konflik terkait bahkan seringkali tanpa informasi yang akurat. Media cenderung menjadi duri dalam daging dengan cara membuat sensasi dari isu yang terjadi dan menimbulkan prasangka buruk dan semakin memperburuk hubungan Indonesia Malaysia (Maidin, 2007) Bayuni, Pemred *The Jakarta Post*, mengkritisi media telah menjadi bagian dari proses politik yang kontra produktif (Bayuni, 2009). Sunarti juga menengarai adanya peran media di

Indonesia yang begitu reaktif terhadap isu-isu yang berkembang antara Indonesia Malaysia (Sunarti, 2013). Bahkan secara spesifik, Maksun dan Bustami menilai ada 3 media yang terlihat sangat provokatif (isu budaya), yaitu The Jakarta Post, Tempo dan Republika (Maksun, 2014).

Lemahnya elit dalam menyajikan isu antar negara secara bijak dan kuatnya media memberikan pengaruh pada publik menimbulkan sebuah pertanyaan atas ‘kehadiran’ komunitas epistemik’ dalam isu perbatasan negara. *Selain Eminent Person Group* yang pernah didirikan pada masa pemerintahan SBY, artikel ini hendak menyoal ‘kehadiran’ komunitas tersebut pada isu Tanjung Datu dan Camar Bulan di Desa Temajuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan hasil riset yang dilakukan di kawasan perbatasan Indonesia Malaysia, di Desa Temajuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Riset yang diarahkan untuk mengenali pengaruh komunitas epistemik pada isu perbatasan di Desa Temajuk yang terletak di Camar Bulan dan Tanjung Datu ini mempergunakan metode studi dokumentasi dan wawancara . Melalui kedua metode tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana komunitas epistemik bekerja dan sejauh mana mereka mampu memengaruhi pembuatan kebijakan mengenai Camar Bulan dan Tanjung Datu. Komunitas epistemik dalam hal ini merujuk pada komunitas yang sengaja dibentuk melalui wadah tertentu dan mereka para pakar yang melakukan riset atas isu perbatasan terkait.

Review Literatur/Tinjauan Pustaka

Studi mengenai komunitas epistemic pertama kali diperkenalkan oleh Peter M Haas melalui bukunya *Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination* pada tahun 1992. Haas merumuskan masyarakat epistemik sebagai sarana untuk mengeksplorasi pengaruh para pakar berbasis pengetahuan dalam pembuatan kebijakan internasional. Selain memiliki latar belakang kepakaran tertentu mereka juga memiliki (1) satu set keyakinan bersama yang normatif dan memiliki prinsip tertentu. Hal inilah yang memberikan kepada mereka sejumlah nilai sebagai landasan bagi aksi sosial sebagai anggota masyarakat; (2) berbagi keyakinan, yang berasal dari analisis mereka mengenai sebuah fenomena sosial dan memberikan kontribusi untuk satu permasalahan dalam domain mereka. Hal ini juga kemudian menjadi dasar untuk menjelaskan dengan beberapa hubungan antara tindakan kebijakan dan hasil yang diinginkan; (3) memiliki pengertian validitas bersama yaitu, intersubjektif, kriteria internal yang ditetapkan untuk menimbang dan memvalidasi pengetahuan dalam domain keahlian mereka; dan (4) praktek umum dalam kebijakan yang terkait dengan serangkaian masalah yang kompetensi profesional mereka yang

diarahkan dari keyakinan bahwa kesejahteraan manusia akan ditingkatkan berdasarkan kebijakan tersebut (Haas, 1992).

Melalui kepakaran dan kemampuan mereka untuk dapat berbagi nilai/ pengetahuan melalui tindakan intersubjektif memungkinkan komunitas epistemik untuk mengartikulasikan hubungan sebab dan akibat dan membingkai isu-isu untuk debat kolektif dan mengeksplor proyek kebijakan mereka secara global (Dunlop, 2011, p. 1). Penjelasan atas bagaimana mereka dapat berbagi nilai yang sama dan atau memperoleh kesepakatan terdapat dalam pandangan Habermas mengenai tindakan komunikatif. Habermas meyakini tindakan komunikatif dapat dilakukan karena lawan bicara memiliki *lifeworld* berupa asumsi dasar yang sama, suatu cakrawala berupa kepercayaan bersama dan tidak dipermasalahkan, dalam konteks solidaritas sosial. Melalui tindakan komunikatif ini maka intersubjektifitas dapat mencapai kesepakatan tanpa paksaan. Peserta sepakat mengenai validitas yang diklaim bagi ucapan mereka atau sepakat mengidentifikasi poin-poin ketidaksepakatan, yang mereka bersama-sama pertimbangkan dalam perjalanan untuk interaksi lebih lanjut. Setiap tindakan ucapan melibatkan pengajuan klaim-klaim validitas yang bisa dikritik yang ditujukan untuk pengakuan/pengenalan intersubjektif (Crawford, 2010, p. 210: 249).

Richard Devetak pun menekankan pentingnya masing-masing pihak yang terlibat dalam tindakan komunikatif untuk bersikap terbuka dan bersedia menjadi bagian dari penelitian bersama yang akan menghasilkan prinsip-prinsip dan tatanan-tatanan baru dan institusi-institusi bagi hubungan sosial dan politik.

Communicating subject (need) to rationalize or account for their beliefs and actions in terms which are intelligible to others and which they can then accept or contest. Similarly, social norms and institutions must also be submitted to scrutiny and argumentation if they are to maintain legitimacy. At such moments when a principle, social norms or institution loses legitimacy or when consensus breaks down, discourse ethics enters the fray as a means of consensually deciding upon new principles or institutional arrangements ... newly arrived at political principles, norms or institutional arrangements can only be said to be valid if they can meet with the approval of all those who would be affected by them (Rengger N. , 2000, p. 155).

Habermas memandang pentingnya komunikasi dan dialog terbuka semacam ini karena melalui hal inilah manusia mampu mengkritisi kondisi sosial politik dan ekonomi mereka sendiri, dan membangun wacana baru yang relevan bagi kehidupan bersama. Dialog terbuka dan kesejajaran kesempatan yang ditawarkan oleh iklim demokratis merupakan kunci terbentuknya *good society*, dimana keadilan menjadi pondasinya. Dengan demikian, upaya ilmuwan kritis untuk menentang pemikiran-pemikiran dominan disebut sebagai proyek emansipatoris karena melibatkan seluruh individu, kelompok dan bahkan kelompok transnasional. Devetak menggarisbawahi bahwa etika wacana ini mesti diletakkan di atas 3 basis, yaitu bersifat universal, demokratis

dan bentuk penerapan moralitas praktis yang tidak berdasarkan perhitungan kaum utilitarian tetapi lebih berdasarkan keadilan (Rengger, 2000, p. 155).

Dengan demikian, komunitas epistemik merujuk pada status profesional dan sosial mereka dimana keberhasilan mereka diukur dari selain sumber daya epistemik mereka tetapi juga ketajaman politik mereka. Mereka harus memiliki kemampuan untuk memengaruhi pembuat keputusan dan berhasil mengarahkan mesin navigasi pemerintahan dengan mendekati diri mereka kepada para birokrat jika pengetahuan konsensual mereka adalah untuk menginformasikan kebijakan mereka (Dunlop, 2011, p. 3). Studi empiris menunjukkan setidaknya dua yang berbeda tipe-tipe komunitas epistemik - masing-masing dibedakan oleh sejauh mana pembuat keputusan mengerahkan kontrol atas keberadaan mereka (Dunlop, 2011). Komunitas epistemik pada awalnya dipahami sebagai entitas yang mengatur diri sendiri dan merupakan sejumlah ahli yang ada di dunia akademik. Penelitian mereka mulai memasuki arena politik karena menanggapi permintaan pembuat keputusan yang meminta masukan terkait isu tertentu (Haas, 1992). Dalam skenario 'tipikal ideal' seperti itu, komunitas epistemik menawarkan sebuah kebijakan melalui sebuah proposal yang bersifat substantif. Pada tipe kedua, komunitas epistemik adalah mereka yang dengan sengaja dipilih oleh pemerintah atau pembuat keputusan untuk membenarkan keputusan kebijakan yang telah ditentukan.

Pada perkembangan selanjutnya, komunitas ini semakin memiliki pengaruh yang kuat dalam memengaruhi arah kebijakan negara. Maia berpendapat bahwa, pertama, semakin pentingnya jenis aktor ini dalam dunia yang semakin mengglobal (Mai'a, 2013). Mereka tidak hanya mempengaruhi pemerintah, tetapi juga aktor non-negara lainnya dengan kekuatan pengambilan keputusan. Komunitas epistemik berada di garis depan yang diakui dan merekalah pedoman menuju pemerintahan transnasional. Mereka juga merupakan sarana utama yang digunakan pengetahuan menjadi kekuatan. Kedua, guna memahami kekuatan dan kelemahannya maka harus memperhatikan dinamika internal dalam komunitas epistemik tersebut. Komunitas epistemik tidak hanya ada atau tidak ada, tetapi memiliki berbagai tingkat pengaruh; dan untuk membangun ini, lebih lanjut penelitian komparatif diperlukan. Maia meyakini bahwa komunitas epistemik yang lebih kohesif di dalam masyarakat akan memberikan pengaruh yang lebih besar kepada kebijakan (Mai'a, 2013). Ketiga, untuk memahami bagaimana pengaruh komunitas epistemik terhadap pembuatan kebijakan maka perlu dipahami bagaimana kondisi dan ruang lingkup komunitas epistemik serta bagaimana hubungan antara pemerintah dan komunitas epistemik.

Sayangnya, untuk mengidentifikasi komunitas epistemik tidaklah mudah (Wright, 1997). Hambatan yang bersifat praktis, seperti mengidentifikasi, menemukan dan mendapatkan akses ke mereka yang diyakini sebagai anggota komunitas epistemik, mungkin dapat menggagalkan upaya untuk terlibat dengan pendekatan sebagai alat analitis. Namun, perpaduan antara keyakinan dan keahlian khusus mereka

membedakan komunitas epistemik dari kelompok kepentingan dan jaringan kebijakan (Haas, 1992, p. 22), memungkinkan mereka untuk membuat klaim yang sah sebagai produsen utama pengetahuan di bidang terkait.

Dalam isu perbatasan Indonesia Malaysia, pengaruh positif komunitas epistemik sebagai katalisator pembangunan perbatasan sekaligus katalisator bagi hubungan bilateral yang positif menjadi sebuah kebutuhan. Selain itu, pada situasi di mana elit dan media yang berlomba untuk memperoleh perhatian publik, maka kehadiran komunitas epistemik tidak hanya menjadi *tink tank* utama pemerintah dalam membuat kebijakan tetapi juga menjadi arena dimana publik dapat belajar dan dapat memperoleh informasi yang jauh lebih sahih. Pada isu perbatasan Indonesia Malaysia, komunitas epistemik dapat ditengarai dalam dua bentuk, mereka yang tergabung secara formal dalam institusi tertentu dan mereka yang melakukan komunikasi intersubjektif melalui tulisan / riset secara individual. Melalui dua hal tersebut maka pengaruh mereka sedikit banyak dapat dilihat terhadap pembuatan kebijakan terkait dengan perbatasan (Camar Bulan dan Tanjung Datu) serta dampak hasil kajian mereka terhadap pemahaman publik mengenai isu perbatasan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Hubungan Komunitas Epistemik dan Pembuat Kebijakan dalam Isu Perbatasan

Sebuah komunitas epistemik untuk mengelola hubungan Indonesia-Malaysia pernah dibentuk oleh negara pada masa Susilo Bambang Yudhoyono. Eminent Person Group atau EPG dibentuk untuk menemukenali persoalan Indonesia Malaysia dan memberikan solusi atas persoalan tersebut. Pada pertemuan ke 5 Indonesia-Malaysia Annual Consultation di Putrajaya 11 Januari 2008, Indonesia dan Malaysia bersepakat untuk menggali pendekatan yang baru dalam hubungan kedua negara dan membangun kerjasama strategis demi kepentingan bersama. EPG yang dibentuk pada tanggal 7 Juli 2008 di Kuala Lumpur ditujukan sebagai sebuah lembaga penasehat informal. EPG terdiri atas orang-orang yang memiliki latar belakang profesional dalam bidangnya dan berada di luar jaring kekuasaan negara. Mereka terdiri atas orang-orang yang memiliki latar belakang bidang pendidikan dan budaya serta pengalaman sebagai praktisi dalam hubungan antar negara. Dalam konsepsi etika wacana Habermas, institusi ini adalah wadah dimana setiap aktor dapat melakukan dialog terbuka untuk mengusulkan sebuah analisis atas sebuah fenomena, mengusulkan norma atau pertimbangan-pertimbangan lain secara terbuka dan sejajar (Richard, 1996, p. 171).

Tugas utama dari EPG ini adalah menghasilkan rekomendasi guna memperkuat hubungan bilateral kedua negara serta mengidentifikasi isu-isu yang mungkin dapat menjadi potensi masalah bagi kedua negara. Dengan kata lain, EPG merupakan “*early warning system*” yang memberikan masukan kepada pemerintah kedua negara mengenai persoalan yang seringkali muncul di antara keduanya. Selain mengidentifikasi isu-isu penting, EPG juga harus dapat mengajukan mekanisme

bagi upaya untuk menyingkirkan persoalan yang ada melalui niat baik dan saling kesepahaman serta kolaborasi antar dua negara. EPG ini menghasilkan beberapa rekomendasi penting dalam menanggapi hubungan Indonesia Malaysia yang dinilai memburuk pada tahun 2002. Ada 9 sektor yang ditengarai dapat memberikan kontribusi penting dalam perbaikan hubungan kedua negara. Dalam Report of Eminent Person Group yang dikutip oleh DR. Musni Umar 9 rekomendasi tersebut meliputi: (a) Memperkuat *people to people contact* dan komunikasi, melalui: Pertukaran kunjungan dan *study tour*, seminar dan dialog, menggiatkan sektor swasta dalam berbagai kegiatan konser budaya dan permainan dan mempublikasikan aturan melalui booklet dan pamphlet serta media. (b) Media, melalui *talks show* dan workshop mengenai isu yang sedang berkembang untuk meningkatkan saling pemahaman, interaksi regular melalui media lokal, intermedia dialog dan diskusi bersama antar pemerintah dan media serta pertukaran jurnalis, berita dan artikel (c) Isu imigrasi, melalui penyelenggaraan pertemuan regular untuk bertukar informasi mengenai masalah imigrasi dan pemecahannya, penyelenggaraan pertemuan regular antara petugas terkait untuk mengkoordinasikan informasi dan pelanggaran perbatasan yang terjadi, penyelenggaraan pertemuan regular antara institusi terkait dst. (d) Kerjasama bidang ekonomi, melalui expo dan *joint trade mission* ke negara ketiga, Halal Trade Center, mengharmonisasikan hukum keuangan Islam, konsultasi regular antara institusi keuangan Islam dan pertukaran pengalaman dan manajemen tabungan haji, pelatihan bersama dalam SME dan mengorganisasikan bersama expo SME dan bekerjasama dalam program CSR dan program pendanaan untuk bisnis. (e) Kerjasama bidang kebudayaan, melalui publikasi bersama, diskusi regular, konser *Muhibbah* dan kompetisi music bagi pemuda serta program *homestay* bagi pemuda., dialog “Membangkitkan Memori Kolektif Kesejarahan Antar Bangsa”, pertukaran guru dan mendirikan Pusat Riset Budaya Indonesia-Malaysia, workshop manajemen budaya warisan bersama dan workshop mengenai penyerapan nilai-nilai warisan budaya di kalangan kaum muda dan bekerjasama dalam promosi budaya dan produksi film dan dokumentasi budaya. (f) Pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia, melalui penyediaan beasiswa bagi peajar, guru dan peneliti dari Indonesia dan Malaysia, kerjasama dalam bidang kurikulum dan pertukaran guru/dosen, pendirian Pusat Riset Indonesia-Malaysia serta kerjasama dalam riset budaya dan sejarah serta pertukaran program dan kunjungan ahli budaya. (g) Kerjasama bidang pariwisata, melalui *ecotourism*, *culturetourism* dan *pilgrimage tourism*, festival budaya, bazaar dan pameran pariwisata untuk meningkatkan industry pariwisata, pertukaran ahli pariwisata, tour agent, dan travel guide dalam rangka meningkatkan kemampuan institusi pariwisata dst. (h) Kerjasama bidang olahraga. Serta (i) Pembangunan yang berkelanjutan dan konservasi biodiversity (Umar, 2011)

Sayangnya, EPG tidak secara spesifik menyoal perbatasan dan pengelolaan relasi terkait dengan isu perbatasan. Dan EPG tidak berumur panjang, ia bubar setelah Susilo Bambang Yudhoyono tidak lagi menjabat sebagai presiden. Selain, komunitas

epistemik ini bekerja sangat singkat, ia tidak memberikan pengaruh / perubahan yang cukup berarti pada hubungan Indonesia Malaysia.

Jauh sebelum EPG terbentuk, sesungguhnya negara telah membentuk institusi khusus mengenai isu sosial dan ekonomi perbatasan yaitu KK Sosek Malindo yang sudah berdiri semenjak tahun 1983. Meski tidak semuanya merupakan pakar khusus mengenai perbatasan negara, KK Sosek Malindo setidaknya berisi mengenai orang-orang yang mengelola perbatasan secara langsung yaitu aktor subnasional yang berada di level propinsi. Semenjak berdiri dari tahun 1983, kelompok ini bekerja untuk betukar pikiran dan menghasilkan sejumlah kesepakatan mengenai kerjasama di sektor sosial dan ekonomi perbatasan. Tujuannya adalah tidak lagi terjadi persoalan di perbatasan seperti penyelundupan dan perdagangan illegal, pelanggaran perbatasan negara dan terjalannya hubungan bilateral yang lebih baik pada level subnasional.

Sayangnya kinerja langsung institusi ini juga belum dapat dirasakan secara langsung bagi pembangunan kawasan perbatasan, khususnya Indonesia. Apa yang terjadi justru semakin tergantungnya masyarakat perbatasan di Indonesia terhadap Malaysia. Hal ini juga terjadi pada masyarakat Temajuk, baik di Camar Bulan, Maludin dan Sempadan. Sebagian besar kebutuhan pokok mereka diperoleh dari Malaysia. Selain harga yang lebih murah, kondisi alam yang sulit membuat mereka lebih memilih mendapatkan barang kebutuhan pokok dari Malaysia (Ibrahim, 2019; Harun, 2019; Herlin, 2019).

Demikian pula dengan pembangunan perbatasan sebagai bagian dari tujuan didirikannya KK Sosek Malindo ini tidak nampak terjadi di kawasan perbatasan Desa Temajuk. Tugas dan tanggung jawab KK Sosek Malindo antara lain, 1. Menentukan proyek pembangunan sosial dan ekonomi sesuai dengan kriteria berikut: a) Proyek-proyek yang akan membawa keseimbangan pembangunan di wilayah perbatasan bersama. b) Proyek yang akan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak dan mereka dapat menggunakannya bersama. c) Proyek bisnis bersama. 2. Merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan. 3. Merumuskan pertukaran informasi dengan negara tetangga (Malaysia-Sarawak) tentang proyek pembangunan sosial-ekonomi di setiap wilayah perbatasan bersama. 4. Menyampaikan laporan kepada gubernur Kalimantan Barat dan KK Sosek Malindo di tingkat menengah tentang administrasi pembangunan sosial-ekonomi wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Tujuan kerja sama KK Sosek Malindo adalah untuk mengembangkan wilayah perbatasan dan menjaga hubungan antara kedua negara. Melalui kerja sama tersebut, masalah perbatasan dapat diselesaikan dengan cara yang baik, serta masalah perbatasan yang sering mengganggu hubungan mereka.

Sayangnya, kinerja KK Malindo belum menyentuh level terendah, yaitu desa. Anggota KK Sosek Malindo adalah aktor pada level justru mereka yang paling memahami persoalan perbatasan dan memiliki hubungan personal yang jauh lebih dekat dengan kolega mereka di Malaysia. Selain itu, kerja sama tersebut masih belum dapat

menyelesaikan masalah ekonomi, sosial, dan pembangunan di wilayah perbatasan. Rachmawati dan Fauzan (Rachmawati, 2012) mengidentifikasi bahwa ini bisa terjadi karena dua hal. Pertama, dari segi teknis, adanya rencana koordinasi yang tidak dapat mewujudkan rencana menjadi tindakan karena KK Sosek Malindo Indonesia berada di bawah Kementerian Pertahanan. Kedua, di sisi substantif, GBC masih menggunakan pendekatan keamanan, bukan pendekatan kesejahteraan. Ini memiliki sifat KK Sosek Malindo yang belum dibuka, yang menantang untuk mendapatkan hasil pertemuan KK Malindo (Wawancara Mendalam, Manto Saidi, Bekas kantor pusat BPPD, di Pontianak April 2019). Hal itu menyebabkan tidak ada kontrol dan evaluasi terhadap hasil implementasi KK Sosek Malindo. Sementara itu, Wirawan menyatakan bahwa salah satu penyebab lambatnya KK Sosek Malindo adalah perbedaan interpretasi terhadap pembangunan di wilayah perbatasan antar instansi. Misalnya, tiga kabupaten di Kalimantan Barat (Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu) mengusulkan akses untuk dapat membeli listrik dari Malaysia karena pasokan listrik dari Perusahaan Listrik Negara terbatas. Namun, proposal ini ditolak oleh Pasukan Militer Indonesia karena mereka pikir itu bisa membuat Indonesia bergantung pada Malaysia. Dari riset Wirawan justru aktor elit secara personal memiliki kontribusi yang signifikan atas pembangunan di kawasan perbatasan dan hubungan bilateral (Wirawan, 2019).

Sejumlah wawancara yang dilakukan juga menunjukkan bahwa relasi bilateral justru dikelola oleh mereka aktor subnasional pada level kecamatan atau bahkan desa melalui apa yang mereka sebut sebagai muhibah. Selain untuk memelihara relasi, muhibah juga berguna untuk menyelesaikan persoalan yang muncul di Kawasan Temajuk.

“Maka saya untuk menghilangkan konflik-konflik ini saya muhibah dengan tumenggungnya, imigresennya, termasuk TNI nya pokoknya muhibahlah. Untuk Tanjung Datu ini saya muhibah dengan dia di Melano saya kesana dengan rombongan. Ndak masalahlah saya muhibah kesana. Kalo di Sajingan memang saya lakukan muhibah dengan rombongan dari kabupaten makanya agak aman.... Kalo jaman saya aman saja karena saya buka muhibah saling komunikasi, ndak usah tegang. Supaya terlihat segala sesua itu aman tenang, Ni kalo apa apa pake mengerahkan pasukan keamanan masyarakat kita ni takut. Kalo takut, mulailah menganggap daerah itu ndak aman. Kaya daerah Aceh Papua. Ndak ada kenyamanan masyarakat.” (Usman, 2019).

Peran aktor subnasional ini justru sangat penting guna meredam konflik dan membuat konflik tidak meluas apalagi menjadi konflik nasional. Pada sebuah wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat daerah disebutkan bahwa ada beberapa hal yang memang cukup diselesaikan pada level bawah, karena jika diselesaikan di tingkat nasional justru akan menjadi rumit karena sudah melibatkan ego kebangsaan. Hubungan personal antara kepala kampung / kepala desa baik di Indonesia dan Malaysia menjadi sarana untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antar negara.

“ ..dan itu bisa diselesaikan oleh diplomasi social tidak lewat diplomasi resmi, diplomasi akar rumputlah. Artinya ada hubungan personality

antara kepala kampung. Di sana ada kepala kampung di sini ada kepala kampung, di sini ada kepala desa di sana ada kepala desa kita bangun hubungan yang baik ada komunikasi yang baik sehingga masalah-masalah dalam tanda kutip tindak pidana ringan ... yaaa walaupun hal tersebut sudah masuk dalam tindak pidana berat sebenarnya ya dan sudah melanggar hukum internasional, tetapi bisa diselesaikan. Tanpa harus lewat jalur resmi atau lewat jalur hukum. Karena kalau sudah masuk jalur hukum jalur formal ini akan gengsi-gengsian kan?" (Willy, 2019).

Selain EPG dan KK Sosek Malindo (jika aktor subnasional yang terakhir dapat disebut pakar), terdapat sebuah komunitas epistemic yang dengan sengaja dibentuk sebagai tink tank utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP yaitu MRC atau Malindo Research Center. Sayangnya, belum lagi sempat terbentuk secara resmi institusi ini tidak dapat sepenuhnya hadir guna menjembatani negara dan masyarakat perbatasan dalam mengambil kebijakan perbatasan dan relasi perbatasan. MRC yang sedianya merupakan konsorsium yang terdiri dari sejumlah universitas yang diinisiasi oleh Universitas Gadjah Mada tersebut harus menyerah pada kerumitan birokrasi terkait pendanaan dan atau struktur pengelolaan kerjasama antara MRC dan BNPP

Kerjasama antara UGM UUM dan BNPP dimulai dengan adanya lokakarya bersama. .. Lalu kita cari apa yang bisa kita kerjamakan melalui diskusi internal. Ditemukanlah isu perbatasan karena pada saat yang bersamaan BPNPP mengusulkan agar UGM masuk ke dalam konsorsium 10. Tetapi konsorsium itu tidak jalan (Universitas mitra BNPP) Persoalannya BNPP menghendaki ada yang menjadi koordinator diantara 10 universitas tersebut tetapi UGM tidak siap karena pada waktu itu bagi UGM perbatasan itu tidak terlalu penting sehingga delegasi yang dikirim bukan delegasi yang cukup kompeten dalam bidang perbatasan .. selanjtnya kerjasam itu diperluas bukan hanya dengan UGM UUM dan BNPP tetapi ada konsorsium univertitas di Malaysia ,ada konsorisum universitas di Indonesia ada lembaga riset bersama, dan lembaga riset itu nanti akan menjadi tink tanknya KK Sosek Malindo ... Semuanya sudah siap tinggal pendanaan dan penyelenggaraan. Konsep itu tinggal sedikit saja (Haryono, 2017)

MRC tidak lagi bergaung, namun MoU antara UGM dan BNPP sejak tahun 2011 tersebut masih dilanjutkan oleh Pusat Kajian Pemukiman, Transmigrasi dan Daerah Perbatasan, Fakultas Geografi. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM. Dengan demikian komunitas epistemic pada isu perbatasan masih memiliki akses dalam memengaruhi kebijakan pemerintah dalam hal perbatasan salah satunya adalah pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia Malaysia. Meski hanya menyoal pembangunan kawasan perbatasan dan garis batas, setidaknya komunitas tersebut memberikan landasan berpijak yang lebih baik bagi BNPP untuk mengelola kawasan perbatasan Indonesia. Hal ini juga nantinya menjadi pondasi bagi pembangunan relasi / diplomasi bilateral yang lebih baik bagi Indonesia dan Malaysia.

Komunitas epistemik lain terwadahi melalui Malindo Nusantara Research Center yang didirikan oleh Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2015 tersebut bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pembangunan nasional dan masyarakat melalui penelitian, publikasi dan konsultasi. Ia juga diproyeksikan untuk meningkatkan hubungan bilateral dua negara Indonesia dan Malaysia dalam konteks hubungan antar pemerintah dan people to people. Namun, dalam proyek yang dikerjakannya nampak belum menyoal isu perbatasan Indonesia Malaysia (Lihat *Malindo Nusantara Research Center*. <http://malindo.umy.ac.id/current-projects/>).

Merujuk pada aktifitas tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa intensitas relasi antarakomunitas epistemi dan pembuat kebijakan masih rendah. Hal ini juga dapat dilihat pada minimnya pro border policy yang dihasilkan pada kawasa perbatasan, khususnya di Desa Temajuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dari wawancara yang dilakukan oleh terhadap sejumlah penduduk dan perangkat desa, pembangunan jalan baru dilakukan pada tahun 2011 hingga saat ini belum selesai. Jalan selebar 8 meter tersebut masih kering dan berdebu di musim kemarau dan becek di musim penghujan. Meski demikian, setidaknya jalan ini dapat menghubungkan masyarakat Desa Temajuk dengan Kecamatan Paloh yang sebelumnya hanya bisa diakses melalui pantai yang ketika air pasang mereka tidak dapat melewati jalan tersebut. Pasokan listrikpun hanya diperoleh pada pukul 6 sore hingga 6 pagi sementara tidak ada satu operator telepon Indonesia yang dapat diakses. Dengan demikian, ketergantungan tidak hanya pada bahan pokok tetapi akses juga pada kases komunikasi.

Gambar 1 Akses Jalan ke Temajuk



Sumber: Dokumen Pribadi, 2019

Lemahnya Komunikasi Intersubjektif

Komunikasi intersubjektif menjadi salah satu ujung tombak komunitas epistemik dalam memengaruhi pemerintah tetapi juga aktor non negara dan atau publik. Melalui tulisan dan diskusi ilmiah, isu perbatasan dan solusi terkait isu tersebut dapat dicapai. Diseminasi ilmiah melalui media massa, *new media* dan jurnal menjadi jembatan bagi setiap aktor yang terlibat didalamnya untuk mengakses informasi dan belajar seriat berkomitmen atas pendekatan dan arah pengelolaan perbatasan negara. Sayangnya, dari studi dokumentasi yang dilakukan terhadap sejumlah tulisan mengenai Camar Bulan terdapat kesimpangsiuran informasi atau ketidakjelasan informasi mengenai letak dan situasi Camar Bulan serta persoalan Camar Bulan itu sendiri.

Pada sejumlah riset dan juga jurnal nama Tanjung Datu seringkali dipergunakan untuk menyebut kawasan sengketa seluas 1.499 ha. Penggunaan nama ini seringkali membingungkan di lapangan karena sesungguhnya kawasan yang berada pada perbatasan Indonesia Malaysia di wilayah Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat tersebut berada pada Dusun Camar Bulan. Pada faktanya Tanjung Datu merupakan kawasan perbatasan Indonesia pada lokasi paling ujung yang berbatasan dengan laut. Tanjung Datu berupa pegunungan dan hutan dan tidak berpenghuni karena konturnya yang sulit untuk dilalui bahkan ditinggali. Kawasan yang disebut sebagai Tanjung Datu itu sendiri sesungguhnya merujuk sebuah enclave yang menjorok ke arah area teritorial Indonesia. Sementara bagi masyarakat dan pemerintah di Kecamatan Paloh sendiri menyebut kawasan tersebut sebagai Camar Bulan (karena berada berbatasan dengan Dusun Camar Bulan, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas).

Sangat mengherankan bagi mereka mereka yang tinggal di Desa Temajuk jika sejumlah literatur bahkan menyebutkan bahwa pada kawasan Tanjung Datu terdapat penduduk seperti pada tulisan Purwo Mursito pada Jurnal Kearsipan tahun 2012. Dalam jurnal tersebut Mursito menyebutkan bahwa “ ... Penduduk yang berada di OBP Tanjung Datu tersebut adalah penduduk Desa Temajuk sebanyak 493 KK dan luas lebih kurang 4.750 Km² (jumlah penduduk kurang lebih 1.883 jiwa)” (Mursito, 2012). Hal yang sama juga disampaikan oleh Juru bicara Kemhan RI Hartind Asrin yang menyebutkan bahwa “Penduduk yang berada di OBP Tanjung Datu tersebut adalah penduduk Desa Temajuk sebanyak 493 KK dan luas lebih kurang 4.750 Km² (jumlah penduduk kurang lebih 1.883 jiwa) terdiri dari dua Dusun yaitu Dusun Camar Wulan dan Dusun Maludin (Anon, "Pemerintah Bahas Perbatasan RI - Malaysia", 2011).

Mengacu pada dokumen Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional yang kemudian dirujuk oleh M. Fatmasari dan dimuat dalam repository Universitas Hasanudin menunjukkan sebuah peta dengan judul “Masalah Tanjung Datu” seperti yang terlihat pada Gambar 2 (Fatmasari, 2018). Peta tersebut menunjukkan enclave yang menjorok ke arah Indonesia dari sejumlah titik batas. Peta agak terlihat kabur namun judul pada peta menunjukkan bahwa persoalan yang dimaksudkan sebagai

Tanjung Datu bukanlah persoalan yang ada titik paling ujung dari perbatasan Indonesia Malaysia melainkan enclave yang berbatasan dengan Malaysia pada Dusun Camar Bulan.

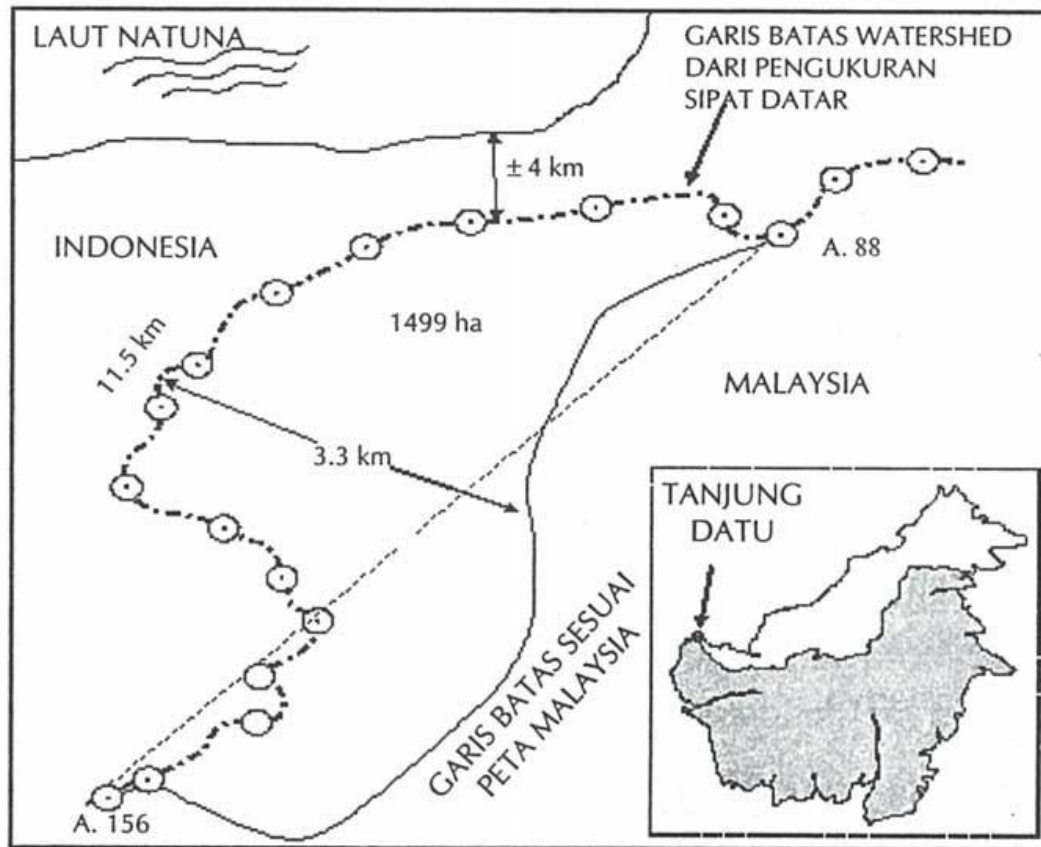
Gambar 2 Tanjung Datu versi Fatmasari



Sumber: M. Fatmasari (2018) <http://repository.unpas.ac.id/33730/7/BAB%20VI.pdf>

Peta yang nampak lebih jelas dan merujuk pada enclave yang sama ditemukan pada buku Suryo Sakti Hadiwijoyo yang berjudul *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional* terbitan Graha Ilmu. Pada peta yang dimuat dalam buku tersebut juga menunjukkan area yang bernama Tanjung Datu pada enclave yang lebih dikenal sebagai Camar Bulan oleh warga dan pemerintah lokal (Lihat Gambar 3). Pada peta yang dipakai oleh Hadiwijoyo dalam bukunya tersebut juga merujuk pada enclave yang sama yaitu enclave yang berada pada titik A.88 hingga A.156. Sementara panah pada peta di kanan bawah menyebutkan kawasan tersebut bernama Tanjung Datu (Hadiwijoyo, 2011).

Gambar 3. Tanjung Datu versi Hadiwijoyo



Sumber: Suryo Sakti Hadiwijoyo (2011.)

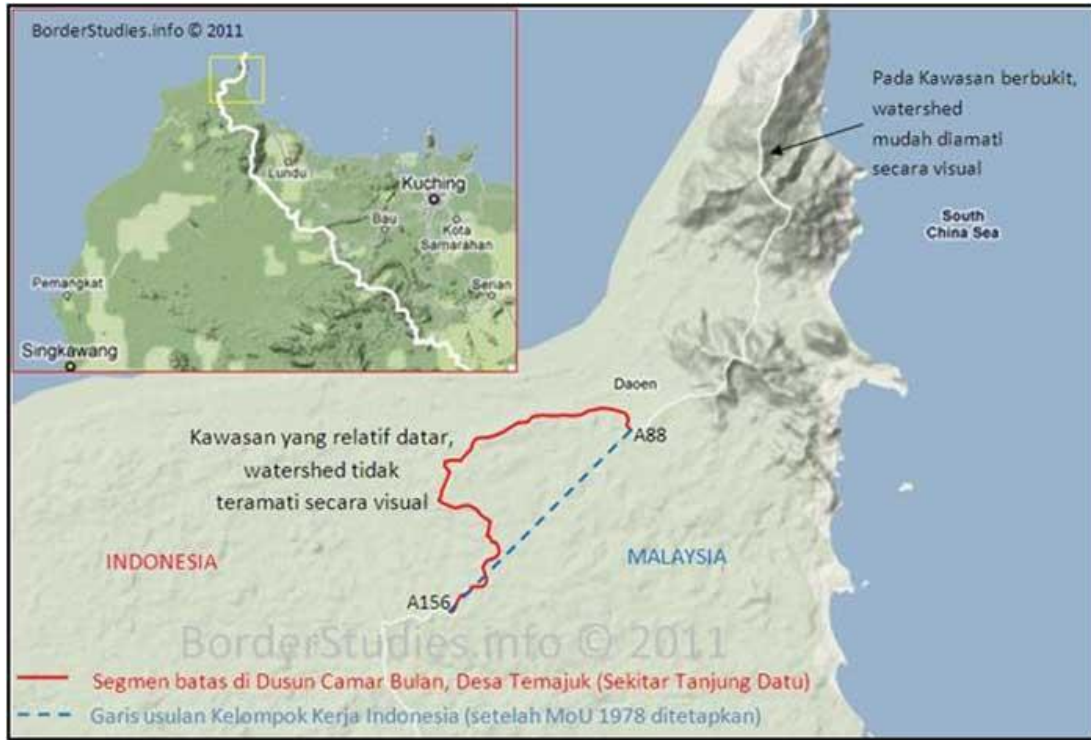
Sejumlah artikel pada jurnal pun memuat nama Tanjung Datu pada enclave terkait, Salah satunya adalah artikel hasil riset Istiqamah pada Jurnal Pertahanan dan Bela Negara yang menyebutkan,

“Aktor dan upaya pengangkatan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia pada pertemuan JIM tahun 2001 dan *Special Meeting* tahun 2002 bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional negara Indonesia yakni kedaulatan wilayah NKRI. Pengajuan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia oleh pihak Indonesia pada saat itu didasari landasan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih wilayah sebesar 1499 ha karena hasil penulisan yang memperlihatkan bahwa segmen Tanjung Datu datar dan terjadi kesalahan metode pengukuran yang dilakukan pada tahun 1975-1978. Akan tetapi, Indonesia harus menerima kenyataan kalau pihak Malaysia tidak memiliki keinginan untuk merundingkan segmen Tanjung Datu kembali karena Indonesia dan Malaysia telah sepakat terhadap hasil pengukuran dan menandatangani MOU Tahun 1978 (Istiqamah, 2017).

Sementara artikel Mursito menunjukkan pada penamaan yang lebih jelas dengan membedakan Tanjung Datu dan Camar Bulan. Dalam artikel tersebut, Mursito menunjukkan ada dua wilayah berbeda yang disengketakan yaitu Camar Bulan seluas 1.449 ha dan Tanjung Datu seluas 8.000 m³ di Provinsi Kalimantan Barat. Mursito

pun mempergunakan peta yang lebih jelas dengan membedakan keduanya meski tidak memberi petunjuk yang jelas pada peta tersebut mana area Camar Bulan dan mana area Tanjung Datu (Mursito, 2012). Meski demikian, pada bagian bawah peta diberikan keterangan sebagai Dusun Camar Bulan, Desa Temajuk (Lihat Gambar 4).

Gambar. 4. Tanjung Datu versi Mursito



Sumber: Mursito (2012)

Merujuk pada Mursito (2012) bahwa patok yang menentukan kawasan sengketa Camar Bulan adalah patok nomor A.88. hingga A.156 dan hal tersebut merujuk pada enclave yang disebut sebagai Tanjung Datu oleh sejumlah penulis dan bahkan dokumen milik Kementerian Luar Negeri. Selanjutnya dalam laporan penelitian ini kawasan sengketa yang dimaksudkan adalah enclave yang menjorok ke arah Indonesia tersebut sebagai Camar Bulan. Sementara Tanjung Datu merujuk pada kawasan paling ujung di bagian utara Desa Temajuk yang berupa gunung. Kawasan ini menjadi sengketa ketika Malaysia membangun mercusuar yang diyakini berada di kawasan Indonesia. Titik pangkal di darat pada kawasan ini menjadi sangat penting untuk menentukan batas laut Indonesia Malaysia yang hingga saat ini masih belum disepakati akibat Gosong Niger / Niger Banks tidak lagi terlihat sebagai titik terluar dari daratan Indonesia. Meski demikian, pada laporan penelitian ini masih dipakai penyebutan Tanjung Datu sebagai sebutan umum yang seringkali dipakai untuk merujuk kawasan sengketa Camar Bulan. Dari beberapa artikel tersebut merujuk pada dua tempat yang berbeda yaitu kawasan Tanjung Datu yang berada di ujung utara berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan dan sebagian kawasan Camar Bulan

berupa enclave seluas 1.449 ha. Kedua kawasan ini juga memiliki topografi yang berbeda, jika Tanjung Datu berupa pegunungan sementara Camar Bulan merupakan dataran rendah. Di kedua kawasan tersebut tidak ditemukan penduduk seperti yang disebutkan oleh Mursito (2012). Penduduk tidak tinggal di Tanjung Datu karena Tanjung Datu merupakan pegunungan yang tidak memiliki akses jalan kecuali lewat laut. Sementara enclave Camar Bulan merupakan hutan yang bagi Malaysia kawasan tersebut merupakan bagian dari hutan lindung. Jikapun ada sebagian warga Indonesia yang berada di enclave tersebut hayalah untuk berladang saja.

Sedikit berbeda pada artikel Simela Victor Muhamad pada Jurnal P3DI yang menyebutkan bahwa persoalan Tanjung Datu adalah persoalan yang merujuk pada perjanjian Inggris dan Belanda pada tahun 1891 dimana di dalam OBP Tanjung Datu terdapat Dusun yang bernama Camar Bulan.

Isu pertama menyangkut penentuan titik perbatasan. Meski telah mengadopsi dan mengakui perjanjian perbatasan Inggris dan Belanda di Borneo pada 1891, di sejumlah titik Indonesia-Malaysia masih saling klaim (OBP). Ada 10 titik OBP di perbatasan Kalimantan, salah satunya disebut sebagai OBP Tanjung Datu. Di sanalah lokasi Dusun Camar Bulan berada (Muhamad, 2011).

Penyebutan Tanjung Datu pada area Camar Bulan saat ini mungkin juga tidak terlalu keliru jika merujuk pada Konvensi yang menjadi dasar dari upaya untuk menarik garis batas antara Indonesia Malaysia saat ini. Pada dokumen yang disebut sebagai Traktat London 1891 tersebut menyebutkan bahwa perbatasan antara Inggris dan Belanda di Kalimantan Barat didasarkan atas watershed yang ditarik dari Pulau Sebatik dan berakhir di kawasan Tanjung Datu. Pada bagian utara watershed berada di bawah yurisdiksi Inggris dan kawasan yang berada di sebelah selatan watershed berada di bawah yurisdiksi Belanda.

“the boundary-line shall follow the watershed of the rivers running to the south-west and west coasts, north of Tanjung Datoe, and of those running to the west coast south of Tanjung Datoe, the south coast, and the east coast south of 4 ' 10o north latitude” (Rizki, 2018, p. 410).

Dari International Boundary Study (1965) Traktat London tersebut diterjemahkan merujuk pada apa yang telah diaplikasikan di lapangan. Studi ini juga tidak mempergunakan ‘Camar Bulan’ melainkan Tanjung Datu (The Geographer, 1965). Ia menyebutkan bahwa penerapan traktat tidak mudah di lapangan karena persoalan interpretasi dan kondisi lapangan yang tidak selalu sejalan dengan watershed sehingga tidak jarang batas ditarik berdasarkan watershed dan atau garis tengah tangan sungai.

The boundary starts on the east coast at latitude 4° 10' N. After the island of Sebatik is divided, the boundary crosses the waters between the island and the mainland in a sinuous line following the median of the Tamboe and Sikapal channels to the Sikapal range which forms the water divide between the Serudong and Simengaris rivers. The water divide is followed generally westward to 116° 49.9' E. where the Seboeda River is crossed. Mounting the

minor water divides, the boundary continues westward to $116^{\circ} 42.3' E$. where the Agisan River, a tributary of the Seboekoe, is also intersected. In like manner, the boundary meanders westward to $116^{\circ} 26.2' E$. where the Pantjiangan River, an upper course of the Sembakoeng, is also crossed. The intersections of these three rivers with the boundary are marked with pillars. Continuing westward, the boundary intersects the Sesai River at approximately $116^{\circ} 09' E$. All four of these intersections take place along the parallel of latitude $4^{\circ} 20'$ as specified in the original Anglo-Dutch treaty. From the last-named river crossing, the boundary mounts the ridgeline which constitutes the major water divide, and this feature serves as the border for approximately 800 miles. In places, knowledge of the precise location of the divide is rather scanty. Southwest of Kuching, the water divide is abandoned between the peaks of Api and Raja. Over a straight line distance of 13.6 miles between the peaks, the boundary follows a complicated course utilizing straight lines, foot paths, streams, water divides, and a crest line. The boundary, where it follows a stream, has been defined as the right bank of the specific stream. Pillars, either of wood or concrete, mark the major turning points. The stretch along the boundary measures approximately 19.75 miles. On the peak of Api mountain, the boundary returns to the water divide for an additional 78 miles northwestward and then northward to the South Cina Sea at Tandjung Datu (The Geographer, 1965, pp. 7-8)

Batas dimulai di pantai timur pada garis lintang $4^{\circ} 10' N$ yang membagi Pulau Sebatik menjadi dua. Garis Batas berlanjut melintasi perairan antara pulau dan daratan secara berliku dengan mengikuti garis tengah/median alur Tamboe dan Sikapal ke bentang Sikapal yang membentuk pembagian air antara sungai Serudong dan Simengaris. Pembagian air berlanjut ke barat hingga ke $116^{\circ} 49,9' E$. di mana Sungai Seboeda dilintasi. Batas negara dilanjutkan hingga ke $116^{\circ} 42,3' E$. di mana Sungai Agisan, anak Sungai Seboekoe berpotongan. Dengan cara pembagian yang sama, batas berliku ke barat ke $116^{\circ} 26,2' E$. di mana Sungai Pantjiangan, bagian atas Dari Sungai Sembakoeng, juga dilintasi. Melanjutkan ke barat, batas memotong Sungai Sesai pada sekitar $116^{\circ} 09' E$. Keempat persimpangan ini berlangsung sepanjang paralel lintang $4^{\circ} 20'$ sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Inggris-Belanda asli. Dari penyeberangan sungai yang disebut terakhir, batas tersebut naik punggung bukit yang merupakan pembagian air utama, dan fitur ini berfungsi sebagai perbatasan untuk sekitar 800 mil. Di barat daya Kuching, pembagian air diabaikan hingga puncak Api dan Raja. Jarak 13,6 mil antara kedua puncak ditarik garis rumit dengan memanfaatkan garis lurus, jalur kaki, aliran, membagi air, dan puncak. Sebagian ditandai dengan pilar apakah dari kayu atau beton sepanjang 19,75 mil. Setelah puncak Api, batas kembali mempergunakan pembagian air sepanjang 78 mil barat laut dan kemudian ke utara ke Laut Cina Selatan di Tanjung Datu (The Geographer, 1965, pp. 7-8).

Meski demikian, penyebutan tersebut harus diperjelas mengingat perkembangan penyelesaian antara Indonesia dan Malaysia masih terus berlangsung dengan lebih mendetail pada kawasan-kawasan tertentu. Traktat ini masih meninggalkan 10 OB

bagi Indonesia (masalah Camar Bulan yang sementara diterima pada tahun 2011 atau belum diratifikasi) dan 9 OBP bagi Malaysia (karena menganggap bahwa isu enclave Camar Bulan telah selesai). Ketidakjelasan semacam ini seringkali mengakibatkan kekeliruan dan informasi yang tidak tepat bagi masyarakat umum yang tidak memahami persoalan perbatasan secara mendalam dan mengakibatkan sentiment negatif yang tidak perlu yang berdampak pada hubungan bilateral Indonesia Malaysia.

Isu Tanjung Datu sendiri nampaknya lebih merujuk pada persoalan Gosong Niger yang juga nampaknya belum nampak diketahui oleh publik. Gosong yang tidak dapat dipakai sebagai titik penarikan garis batas tersebut seringkali masih dipahami dapat dipakai sebagai titik penarikan garis perbatasan laut jika Gosong tersebut tidak terkena abrasi (Gosong masih dipahami sebagai pulau) (Saidi, 2019). Meski I Made Arsana dalam beberapa tulisannya telah menyinggung garis batas negara di Gosong Niger, kerumitan isu ini menjadikannya tidak menarik bagi publik untuk mau memahami dan lalu mengerti situasi konflik perbatasan yang ada.

Penutup

Komunitas epistemik merupakan faktor penting dalam pengelolaan kawasan perbatasan dan konflik perbatasan yang tidak mudah dipahami oleh publik. Komunitas epistemik juga merupakan faktor pendukung bagi katalisator pembangunan kawasan perbatasan dan pengelolaan konflik perbatasan. Dengan kata lain ia juga menjadi *tink tank* utama pemerintah dalam relasi antar negara.

Dalam isu perbatasan Indonesia Malaysia, pengaruh komunitas epistemik tersebut belum cukup signifikan baik dan dalam pemebntukan arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan maupun pengelolaan konflik perbatasan. Melalui dua bentuk komunitas epistemik yaitu yang terlembagakan dan bersifat individu terdapat dua poin penting yang belum dapat dipenuhi yaitu intensitas relasi antara komunitas epistemik dengan pembuat kebijakan dan rendahnya komunikasi intersubjektif yang terjadi diantara pakar perbatasan melalui tulisan. Akibatnya tidak saja *pro border policy* yang lambat berjalan, namun juga kesimpangsiuran informasi semakin memperburuk situasi pengelolaan relasi antara negara dalam isu perbatasan negara.

Nampaknya, komunitas epistemik harus semakin diperkuat baik melalui kelembagaan maupun komunikasi intersubjektif baik melalui tulisan dan diskusi ilmiah. Intensitas hubungan antara komunitas epistemik dan negara sudah saatnya ditingkatnya melalui kerjasama riset dan penyusunan roadmap pembangunan kawasan perbatasan. Kehadiran mereka di tengah publik yang awam mengenai isu perbatasan namun cepat ‘panas’ dalam menghadapi isu perbatasan sangat diperlukan guna menghidupkan proses belajar. Dengan demikian, komunitas epistemik mampu menjadi katalisator yang sempurna bagi pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan negara.

Bibliografi

- Anon. (2011, October 14). "*Camar Bulan dan Tanjung Datu Harus Dipertahankan*". Retrieved October 12, 2019, from Berita Satu.Com: <https://www.beritasatu.com/nasional/13543/camar-bulan-dan-tanjung-datu-harus-dipertahankan>
- Anon. (2011, Oktober 11). "*Dikabarkan Dicaplok Malaysia, Aktivitas TNI di Camar Bulan Meningkat*". Retrieved Oktober 12, 2019, from Berita Satu.Com: <https://sp.beritasatu.com/home/dikabarkan-dicaplok-malaysia-aktivitas-tni-di-camar-bulan-meningkat/12277>
- Anon. (2011, Oktober 10). "*Pemerintah Bahas Perbatasan RI - Malaysia*". Retrieved Oktober 12, 2019, from Merdeka.Com: <https://www.merdeka.com/politik/pemerintah-bahas-perbatasan-ri-malaysia.html>
- Bayuni, E. (2009, Oktober). "*Media Telah Menjadi Bagian Dari Suatu Proses Politik Yang Kontra Produktif*". Retrieved Oktober 12, 2019, from Jurnal Diplomasi: <http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf/2009/DIPLOMASI%20Oktober%202009.pdf>
- Crawford, N. C. (2010). "Jurgen Habermas". In J. E. Williams, *Teori-Teori Kritis Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Baca.
- Dunlop, C. A. (2011). "Epistemic Communities". In E. A. (ed), *Routledge Handbook of Public Policy*. University of Exeter, UK.
- Fatmasari. (2018). "Memorandum Of Understanding Of Demarcation Survey Of International Boundary Between The Government Of Indonesia And The Governmnet Of Malaysia 1976 Dalam Survei Dan Demarkasi Antara Indonesia Dan Malaysia" . Retrieved Oktober 12, 2019, from Repository Universitas Pasundan: <http://repository.unpas.ac.id/33730/4/BAB%20I.pdf>
- Gultom, A. (2011, Oktober 9). "*TB Hasanuddin: Klaim Malaysia di Camar Bulan dan Tanjung Datu Tidak Sesuai Peta Tua*". Retrieved Oktober 12, 2019, from Kantor Berita Politik RMOL.ID: <https://rmol.id/dpr/read/2011/10/09/41852/>
- Haas, P. M. (1992). "Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination". *International Organization, Vol. 46, No. 1, Knowledge, Power, and International Policy*, 1-35.
- Hadiwijoyo, S. S. (2011). *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional* . Yogyakarta.: Graha Ilmu.
- Harun. (2019, Maret 30). Perangkat Dusun Camar Bulan. (I. Rachmawati, Interviewer)
- Haryono, D. E. (2017). Salah Satu Penggagas MRC. (I. Rachmawati, Interviewer)
- Herlin. (2019, Maret 30). Perangkat Dusun Camar Bulan. (I. Rachmawati, Interviewer)
- Hidayat, F. (2016, July 20). "*28 Desa di Nunukan Terancam dikuasai Malaysia?*". Retrieved October 12, 2019, from Tempo.Co:

<https://nasional.tempo.co/read/789127/28-desa-di-nunukan-terancam-dikuasai-malaysia>

- Ibrahim. (2019, Maret 30). Perangkat Dusun Maludin. (I. Rachmawati, Interviewer)
- Istiqamah. (2017). "Indonesia Defence Diplomacy To Make Tanjung Datu Segment As Outstanding Boundary Problem Of Indonesia-Malaysia". *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*. Vol 7, No 3 .
- Madu, L. (2008). "Ambalat Netwar antara Indonesia-Malaysia, 2005: Refleksi Teoritis Mengenai Hubungan Internasional di Era Internet". *Global & Strategis, Th. II, No. 1, Januari - Juni 2008*, 1-22.
- Mai'a, K. D. (2013). "Re-thinking Epistemic Communities Twenty Years Later" . Forthcoming Review of International Studies, Volume 39 / Issue 01 / January 2013.
- Maidin, D. S. (2007). Rangkaian Seminar dan Diskusi Panel Refleksi 50 Tahun Hubungan Diplomatik RI-Malaysia di UNPAD. Bandung: UNPAD.
- Maksum, A. d. (2014). "Ketengangan Hubungan Indonesia –Malaysia dalam Isu Tarian Pendet". *Kajian Malaysia, Vol. 32, No. 2, 2014*, 41-72.
- Muhamad, S. V. (2011, Oktober). "Masalah Perbatasan Indonesia Malaysia. *Info Singkat Hubungan Internasional*Vol. III, No. 20/II/P3DI/Oktober/2011.
- Mursito, P. (2012). "Peran Arsip Dalam Mendukung Upaya Diplomasi Guna Penyelesaian Sengketa Perbatasan Camar Bulan Dan Tanjung Datu". . *Jurnal Kearsipan. VOL 7/ANRI/12/2012*.
- Rachmawati, I. d. (2012). "Problem Diplomasi Perbatasan dalam Tata Kelola Perbatasan Indonesia-Malaysia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 16 . No.2*.
- Rengger, N. (2000). *International Relations, Political Theory and the Problem of Order, Beyond International Relation Theory*. New York: Routledge Publication.
- Rengger, N. (2000). *International Relations, Political Theory and the Problem of Order, Beyond International Relation Theory*. New York: Routledge Publication.
- Richard, D. (1996). "Critical Theory". In S. B. Linklate, *Theories of International Relations*. London: Macmillan Press LTD.
- Rizki, M. d. (2018). "The Significance of Boundary Construction at Land Border between Indonesia-Malaysia in Temajuk Village, Sambas Regency as Manifestations of Indonesia's Sovereignty". *The 1st International Conference on South East Asia Studies, 2016, KnE Social Sciences*, (p. 410).
- Saidi, M. (2019, Maret 29). Mantan kepala BPPD Sambas. (I. Rachmawati, Interviewer)
- Sunarti, L. (2013). "Menelusuri Akar Konflik Warisan Budaya antara Indonesia dengan Malaysia". *Sosiohumanika: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*,6(1) Mei 2013.

- The Geographer, O. o. (1965, Maret 15). *Indonesia – Malaysia Boundary*. Retrieved Oktober 12, 2019, from <https://fall.fsulawrc.com/collection/LimitsinSeas/IBS045.pdf>
- Umar, Musni. Dr. (2011). *Soft Power Approach Indonesia Malaysia*. Jakarta: Institute for Social Empowerment and Democracy (INSED).
- Usman. (2019, Maret 30). Mantan Camat Paloh. (I. Rachmawati, Interviewer)
- Willy, U. (2019, Maret 29). Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Pemda Kabupaten Sambas. (I. Rachmawati, Interviewer)
- Wirawan, M. R. (2019). " Peran Paradiplomasi dalam Kerjasama Antar Negara: Studi Kasus Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Mengelola Kawasan Perbatasan di Sambas". Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Yogyakarta (unpublished).
- Wright, K. (1997). ‘Knowledge and expertise in European Conventional Arms Control Negotiations: an Epistemic Community?’. *The European Policy Process Occasional Papers* , No. 41.

Saudi's Opening Policy for Women Rights : Considerations and Prospects

Sidik Jatmika¹

¹Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Corresponding email: dr.sidikjatismika@gmail.com

Abstract



Kingdom of Saudi Arabia has been well known as one of most conservative regime in the world, especially on women rights policy. Among the factors that define rights for women in Saudi Arabia are government laws, the Hanbali and Wahhabi interpretation of Sunni Islam, and traditional customs of the Arabian Peninsula. Women campaigned for their rights with the women to drive movement and the anti-male-guardianship campaign, with the result that some improvements to their status occurred during the second decade of the twenty-first century. For example, in 2018 King Salman issued a decree allowing women to drive, lifting the world's only ban on women drivers. This research finds that opening policy practise of Saudi's policy is understandably highly influenced by three factors : domestic politics; economics capabilities and international contexts. All conderations of opening policy for women rights refers to assumption that Saudi's regime as political system, to preserve its existency, should has characteristics such as wholistic; flexible and mixing to old and new value systems.

Keywords

opening policy, women rights, considerations, prospect

Introduction

In the past decade much research has focused on Arab -Saudi'uthoritarianism (Jatmika, 1998, p. 1-10). Kingdom of Saudi Arabia has been well known as one of most conservative regime in the world, especialy on women rights policy. During the late 20th and early 21st centuries, women's rights in Saudi Arabia were limited in comparison to the rights of women in many of its neighbor countries due to the strict sharia law in place in Saudi Arabia. The World Economic Forum's 2016 Global Gender Gap Report ranked Saudi Arabia 141 out of 144 countries for gender parity. Among the factors that define rights for women in Saudi Arabia are government laws, the Hanbali and Wahhabi interpretation of Sunni Islam, and traditional customs of the Arabian Peninsula.

Women campaigned for their rights with the women to drive movement and the anti male-guardianship campaign, with the result that some improvements to their status

occurred during the second decade of the twenty-first century. Women were previously forbidden from voting in all elections or being elected to any political office, but in 2011 King Abdullah let women vote in the 2015 local elections and be appointed to the Consultative Assembly. In 2011, there were more female university graduates in Saudi Arabia than male, and female literacy was estimated to be 91%, which while still lower than male literacy, was far higher than 40 years earlier. In 2013, the average age at first marriage among Saudi females was 25 years. In 2017, King Salman ordered that women be allowed access to government services such as education and healthcare without the need of consent from a guardian and enter to stadium. In 2018, King Salman issued a decree allowing women to drive, lifting the world's only ban on women drivers (Jerry Feierstein (2018 : 1-5)). The purpose of this study was to ask why does Saudi conduct political openness in early of 21'st centuries? How does it's prospect?

Literature Review

There are such previous researchs which study such of similiar case with this seminar paper, ie :

1. Larry Diamond & Marc F. Plattner, e.ds (2015: 1-25) mentioned that the uprisings that swept the Arab World beginning in 2010 toppled four entrenched rulers and seemed to create a political opening in a region long impervious to democratization. In *Democratization and Authoritarianism in the Arab World*, leading scholars address the questions posed by this period of historic change in the Middle East and North Africa. This volume examining theme the legacy of authoritarian ruling arrangements, the strengths and vulnerabilities of remaining autocracies, and the lessons learned from transitions to democracy in other parts of the world. It also features chapters analyzing the political development of individual countries: Algeria, Bahrain, Egypt, Jordan, Libya, Morocco, Saudi Arabia, Syria, Tunisia, Yemen, and the monarchies of the Gulf. This seminar paper only focus on Saudi's case, especially the legacy of authoritarian ruling arrangements, the strengths and vulnerabilities of remaining autocracies.

2. Michele Dunne (2015 : 75 – 79), “After the Arab Spring: Caught in History's Crosswinds” , argued that we are still struggling to understand the mostly bitter harvest of the Arab Spring, but there are a few lessons that can be drawn. The handful of political openings that occurred in Arab countries after the 2011 uprisings have yielded a bitter harvest that Arabs and non-Arabs alike are struggling to comprehend. The essays that follow go a long way toward demolishing certain early analyses of what went awry following the “Arab Spring.” Arab publics never really wanted democracy in the first place, one argument goes; they wanted economic betterment and gave up on the idea of democratic governance as soon as insecurity loomed and material benefits failed to appear. Another argument is that the Arab uprisings were all just so much hype, a soap bubble of social- and broadcast-media enthusiasm that quickly

collapsed. In this seminar paper we will search such lesson from Saudi's political openness case.

3. Michael Robbins (2015: 80-89), "After the Arab Spring: People Still Want Democracy", mentioned that data from the Arab Barometer suggest that Arabs have not rejected democracy. In fact, they still by and large believe in it and want it. The Arab uprisings dramatically changed the political landscape, but what was their effect on support for democracy? The results of public opinion surveys conducted as part of the Arab Barometer suggest relatively little changed. Democracy remains the most preferred political system in the region, but few citizens say they live under a democracy. Yet, what changes the Arab uprisings did bring about in public opinion are not uniform, especially in the countries most affected by these events. Tunisians have become much more concerned about negative effects of democracy while Egyptians attribute poor political outcomes to the Muslim Brotherhood instead of democracy. This seminar paper will search what kind political effect of Saudi's political openness?

4. Tarek Masoud (2015: 74-87), "Has the Door Closed on Arab Democracy?", argued that in the aftermath of the Arab Spring, democracy in the Arab world seems farther away today than at any point in the last 25 years. If it is to ever arrive, it will likely be through a more evolutionary and elite-driven process. In the aftermath of the Arab Spring, democracy in the Arab world seems farther away today than at any point in the last 25 years, leaving one to conclude that the answer to the question posed in this special anniversary issue of the *Journal*—"Is Democracy in Decline?"—is, at least in the case of the Arab world, a resounding, even deafening, yes. If democracy is to ever arrive in the region, it will likely be through an evolutionary and elite-driven process. Is it also happen in Saudi ?

5. Andrew Reynolds, Jason Brownlee & Tarek Masoud (2013: 210-221), "Tracking the "Arab Spring": Why the Modest Harvest?", mentioned that popular uprisings have occurred only in some Arab states and in even fewer have authoritarian rulers been overthrown. What factors allow us to predict whether an authoritarian regime will be vulnerable? What happens in Saudi case ?

6. Daniel Brumberg (2013 : 88 -133), "Transforming the Arab World's Protection-Racket Politics", mentioned that The Arab world's old autocracies survived by manipulating the sharp identity conflicts in their societies. The division and distrust that this style of rule generated is now making it especially difficult to carry out the kind of pact-making often crucial to successful democratic transitions. In the Arab world, pact-making has proven painful and sometimes politically (if not literally) fatal. There are many reasons for this. Two particularly worth mentioning are the persistence of sharp identity conflicts in Arab societies, and the skill with which the Arab world's "protection-racket" autocracies have played upon these tensions for so long. Where they have fallen, these autocracies have left behind a tricky dilemma: Groups that they

once shielded remain significant but cannot win elections, while their rivals (who can win elections) wonder why they should make concessions to sure losers. Is this phenomena also happen in Saudi ?

Theoretical Approach

This research conduct Theory of Political System (Gabriel Almond, 1960) which explain that political decision, is influenced by in put (domestic and external factor). Also, every political system has such of characteristics, ie. : holistic, adaptive, combination of old and new aspects. This research finds that opening policy practise of Saudi's policy is understandably highly influenced by three factors : domestic politics; economics capabilities and international contexts. All conderations of opening policy for women rights refers to assumption that Saudi's regime as political system, to preserve its existency, should has characteristics such as wholistic; flexible and mixing to old and new value systems.

Alfred Stepan Juan J. Linz (2013 : 15 – 30), Democratization Theory and the “Arab Spring”; mentioned that in light of the “Arab Spring,” how should students of democratic transition rethink the relation between religion and democracy; the nature of regimes that mix democratic and authoritarian features; and the impact of “sultanism” on prospects for democracy?

What does the “Arab Spring” imply for democratization theory? In this article, we first re-examine the relationship between democracy and the “twin tolerations” in the world’s Muslim-majority countries that are democracies—Indonesia, Turkey, Senegal and Tunisia, as well as in Muslim-minority India. Second, we characterize the emergence of what we call an “authoritarian-democratic hybrid” form of regime and explore why a regime of this type has emerged in Egypt but not in Tunisia. Third, we examine Max Weber’s “sultanism” and its implications for the “military as institution,” democracy and “stateness” along a continuum of intensity from most to least sultanistic in Libya, Syria, Egypt to Tunisia. In this seminar paper, we will focuse on such of Kingdom of Saudi Arabian political openness.

The politics of Saudi Arabia takes place in the context of a totalitarian absolute monarchy with some Islamic lines, where the King is both the head of state and government. Decisions are, to a large extent, made on the basis of consultation among the senior princes of the royal family and the religious establishment. The Qur'an is declared to be the constitution of the country, which is governed on the basis of Islamic law (Shari'a). The Allegiance Council is responsible to determine the new King and the new Crown Prince. All citizens of full age have a right to attend, meet, and petition the king directly through the traditional tribal meeting known as the majlis.

Government is dominated by the vast royal family, the Al Saud, which has often been divided by internal disputes and into factions. The members of the family are the

principal political actors allowed by the government. Political participation outside the royal family is limited. As for now the Saudi Arabia is on it's way for changing their political system, from the conservative one to the modern one through using 'Vision 2030'.

The decision making process of Saudi Arabia are divided into three aspects, there are input, decision process, and output. The input of the decision process in Saudi Arabia is the criticism by the two groups of Saudi Arabia, that is Sunni and Syah, for the decision process, the criticism being processed by the government through using data that have been gathered, and for the output of it was the result of the decisions process which became the true decisions, such as the creation of 'Vision 2030'.

Methodology

Process of data collection and techniques data analysis . The data used for this study were collected by literature review with materials used such as newspaper, thesis, book, and also some articles related to this discussion. Procedures performed by providing analysis and review on the sources obtained.

Results

Beginning in December 2010, a series of uprisings swept the Arab World, toppling four longtime leaders and creating an apparent political opening in a region long impervious to the "third wave" of democratization. Despite the initial euphoria, the legacies of authoritarianism—polarized societies, politicized militaries, state-centric economies, and pervasive clientelism—have proven stubborn obstacles to the fashioning of new political and social contracts.

Saudi conduct political openness in early of 21'st centuries, because this regime face such of political crisis, i.e:

Political Crisis of Saudi. As one of the biggest monarchy country in the middle east region, Saudi Arabia that led by King Salman Bin Abdul-Aziz al-Saud having so much influence towards the other neighbor in the country. Oil and gas reserves as a based of economic that make Saudi Arabia becoming superpower and growing up as the wealthy country. Beside that, Saudi Arabia well known as a country that having a sharia law and it famous as a religion place for the Muslim since there is a holly place of Islam that located inside the country. However, in Saudi Arabia there is a crisis of power and loyalty that will creating an instability whether in a long term or short term and it will endangered the sustainability of the country. Thing that we will have a concern is on how the politics that going on in Saudi Arabia and about how and why the crisis of power and loyalty that happened in Saudi Arabia affecting the whole countries with the political system studies and also including decision making process to create a resolution.

In Saudi Arabia that using an absolute monarchy as a political system, that led by the king as a head of the governance and also using Syariah as basic of running the governance system and creating policy is having a problem since there is few factors that challenge the governance system as an opposition and it will become instable when the government side is no longer capable to maintain their power. And the instability causes created by some crisis that happened against the government . Those are :

Crisis of Authority, is about the recognition towards the country to have a power and have control towards certain area whether by the local citizen or the other country. and the crisis of authority mostly begin by the rebellion, separatism, coup d'etat, revolution and whatsoever that threaten the sovereignty of a country and against the authority of a country. As an example that Iran which have the different point of view in the politics, religion and anything that makes Iran is no longer recognizing power of the Saudi Arabia.

Crisis of Loyalty. One of the factor that creating crisis in the Saudi Arabia is the crisis of the loyalty. It happened when the society is no longer loyal or believe to the government that caused by some domestic reason that occurred in the domestic area. It also well known as societies are become trustless to the ruler. Mostly it caused by some reasons. Such as Ashabiyah, is a feeling of fanatic or a high sense of belonging towards certain group or certain family that seems like superior and it becoming the model to be a way of thinking for certain people. In Saudi Arabia, certain group that mostly becoming the role model is Bani Saud, Bani Hasyim etc. and also the group of religion is become the matter of the group that possibly to create a chaos such as Sunni-Syiah that always having different opinion, especially in the politics.

Crisis of equality, it happened when the government no longer can give the justice or same treatment towards the society and ensure that each group that exist in society get the equal treatment. And what happened in Saudi Arabia is that there are few groups that trying to get the equal position with the majority and also the group by the economic position such as the elite such as the kingdom family, the rich and the other until the poor and kind of abandoned such as the kurd, syiah. And the problem is as an example that Syiah Group that trying to get an equality with the sunni as the majority using a conflict. And also the gap that still high between the poor and the rich in the Saudi Arabia is becoming one of the problem that possible to create a crisis.

Crisis of continuity, is about the fragility of the government's power to lead the country because of the threat whether from domestic people like rebellion or the intervention from the outside actors that trying to break the power of the government. It can be from the value that coming to Saudi Arabia that is not inline with the government's policy and also from the foreign policy of the other countries that challenge the power of the government of the Saudi Arabia. As an example that United States of America with its democracy value trying to influence the societies mindset

to be like what democracy is. And also the other thing is that mostly the value from the western countries that get into the local people that possible to create a chaos in the future.

Arab Spring and its impacts to Saudi

Term and early Arab Spring. In the early 21st century, the region of the Middle East was marked by protest movements of the citizens sued their national leadership. This revolution was known by Arab Spring or Revival Arab.⁽¹ The rebellion started in Tunisia on the spring season, December 2010. As for another view that the Arab Spring is the wave of the revolution in rallies and protests that took place in the Arab world. The movers of the Arab Spring are the educated youth in each zone of the revolution. In the process, they muster support through a variety of media, especially social media. Nevertheless, the emergence of this revolution (Spring) not without the support of other parties, thus a lot of opinions that assumed that this revolution is not separated from the interference of foreign countries, such as the European Union, the United States and its allies, as well as the Eastern socialist countries that have an interest towards the Middle East.

This revolution started from the first protest took place in Tunisia on 18 Dec 2010 tragically, a young man named Mohamed Bouazizi protest over police corruption and health coverage in the form of suicide. The action of a roadside fruit seller's life was not helped sparked a large protest folk Tunisia finally made President Zine El Abidine Ben Ali to retreat from power he held for 23 years². The unwavering power for decades fell just 10 days since Bouazizi died.

Activists in other countries in the region were inspired by the regime change in Tunisia. The country's first democratic parliamentary elections were held in October 2011 and began to protest similar authoritarian governments in their own nations. The participants in these grassroots movements sought increased social freedoms and greater participation in the political process. Notably, this includes the Tahrir Square uprisings in Cairo, Egypt and similar protests in Bahrain. However, in some cases, these protests morphed into full-scale civil wars, as evidenced in countries such as Libya, Syria and Yemen.

This tragedy was influence other countries that have also situation the economic and political crisis of that time. The first outbreak affected is Egypt. President Husni Mubarak resigned on 11 February 2011 and handover of power in the military Council

¹ Indonesia Membaca, "Arab Spring; Badai Revolusi Timur Tengah yang Berdarah", <http://indomembaca.blogspot.com/2016/03/arab-spring-badai-revolusi-timur-tengah.html>, access on 1 August 2018.

² Elba Damhuri, "Arab Spring: Musim Semi atau Musim Gugur?", <https://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/17/12/09/p0o3gn440-arab-spring-musim-semi-atau-musim-gugur>, access on 1 August 2018.

that appoints Prime Minister Ahmed Shafik to lead. But on March, Egypt revolatile, the Prime Minister who was given the mandate was retreat.

In mid-February start to spread the protests in Libya and triggered a civil war among party loyalists and insurgency based in Benghazi. The conflict ended after the death of President Muammar Khadafi on 20 October 2011. While in June 2010, President of Yemen Ali Abdullah Saleh was injured after the escape from the assassination attempt. The continued rise of the various pressures, forcing the President to surrender then Vice President Abd Rabbuh al-Hadi in early 2012. Meanwhile, former President of Egypt Mubarak convicted guilty and sentenced for life, June 2012, as former President Ben Ali Tunisia was also jailed. In Egypt a new character appears, President-elect Mohammad Mursi, of the Group Muslim Ikhwanul Muslim movement.

If seen from another conflict in the form of dropping the regime, if compared with the revolution Egypt, Tunisia or Libya, Syria can say Revolution slowly. In fact, the Revolution Egypt was able to overthrow the regime of Husni Mubarak in only 18 days. One of the main factors is the involvement of Russia and Iran that is diplomatic and militaristic defended the regime of Bashar al-Assad. Russia strongly favors to Syria because Russia has geostrategis interests in the area. Syria is now the last bastion of Russia, after Libya tumbles. In Syria, Russia has a naval base at Tartus, even since the time of the Soviet Union, and the more enlarged in recent years. So, in the geostrategis if Syria had lost, then Russia have no diplomatic presence and influence in the Mediterranean.³

The Reaction of Saudi Arab towards Arab Spring

Al-Saud dynasty, descendants of the late King Abdullah, gave the name to the Arabian Gulf monarchy ruled Saudi Arabia, son of its founder Abdul Aziz bin Saud. Descendants of Al-Saud traces their origins from the year 1700, when Saud bin Mohammad appointed sheikh (local leaders) in the middle of the Arabian peninsula, is the birthplace of two centuries later, the only thing a country in the world named after a family.⁴

In this regard, Saudi Arabia has concentrated all its own with a wave of the spring happening in Arabic, in which the Government of Saudi Arabia felt threatened the sovereignty of his monarchy led political system with a variety of events that occur. So Saudi Arabia is trying to protect the powers of the monarchy. Saudi Arabia

³ Iqbal Kholidi, "Arab Spring dan Enam Tahun Revolusi Suriah", <https://geotimes.co.id/kolom/internasional/arab-spring-dan-enam-tahun-revolusi-suriah/>, access on 1 August 2018.

⁴ BHarian Online, "Nama Arab Saudi Berasal dari Dynasti Al-Saud", <https://www.bharian.com.my/node/31058>, access on 2 August

impressed cunning in taking the role. On one side would like to attempt to overthrow the regime of absolute that is in Syria by supplying weapons.

The Impact of Arab Spring to Saudi Arabia. Saudi Arabia becoming the first interesting to imagine it can immunise itself from the political change that has toppled three dictators is folly, but this is what it is trying to do. The 87-year-old King Abdullah made two moves this week to present a more liberal face. He revoked a sentence to lash a woman 10 times for driving her car, and decreed that women could take part in council elections in 2015. Neither will make more than surface ripples. Only half of the council seats are up for election, and the councils themselves have no real powers. All the important posts in the provinces are chaired by members of the royal family. As for free speech in a country where the government already controls the print and television media.

In countering the uprisings, Saudi Arabia is doing no more and no less than what it has traditionally done when a major state threatens to upset the apple cart. That includes Nasser's Egypt, Saddam's Iraq, revolutionary Iran. Its leading challenger in this enterprise is the rising influence of Turkey. But the vulnerability of the Saudi kingdom remains a domestic one. Saudis, whether they be women drivers or anyone else yearning for more freedom, are part of the region and watch what is going on around them. The worm is turning in Saudi Arabia as decisively as it is elsewhere in the region.

The Arab Spring also gives some bad impact to the some countries in Arab World. Inflation is not the only factor that pushed the Arab Spring, but the number of cases of corruption that make people living poor and difficult in terms of economy and survive life. On the other hand, the authorities are losing the Office and luxury as well as the emergence of the power harness tripolar in the region of the Middle East; Saudi Arabia, Iran, and Egypt. Saudi Arabia's decision to end a ban on watching at the cinema is part of a broader change in all walks of life.

In the 20th century, Saudi Arabia the Al Saud Dynasty ruled relies on two sources of power. Such as rich oil wealth and an informal agreement with the conservative clerics. But now the country must adjust to the 21st century, when oil wealth will no longer be enough to finance government spending and create jobs. The role of the ulama has also not like it used to be, their influence is decreasingly with new leaders at the Royal family.

Analysis of Foreign Policy of Saudi Arabia Regime towards Saudi Spring

At this time, not just the Arab Spring which has a great impact in the Arab world, but also a focus on decision making by Saudi Arabian spring is heading. Each country must have the aim to satisfy the interests of his respective country. There are bunch of transition to a democratic regime, some even include liberalization or democratization. In this regard, Saudi Arabia has its own focus in this threat he was. Saudi Arabia argues that this could threaten the sovereignty of his country has long been the country with

the political system of monarchy. Therefore, Saudi Arabia is trying to protect his monarch led power. Saudi Arabia looks very sly, on one side wanted to maintain his monarch led regime but on the other hand trying to overthrow the regime of absolute Government.

Saudi Arabia created the crisis in the Middle East was discussed the actions that are not rational. Saudi Arabia sought to create new conditions in the Middle East and encourage the foreign country involved so that it can strengthen its position, such as the United States. Trump wants to form a dent against Iran to NATO and to maintain the system of monarchy in Arab countries at the expense of their people's freedom. Some analysts say that the foreign policy of Saudi Arabia was the source of the violence.

Domestic Aspirations and Movements Criticize Saudi Political Conservatism.

Saudi Arabia have been known as the country with its strong Conservatism. Then, what is conservatism? Conservatism is a political and social philosophy promoting traditional social institutions of culture and civilization. Conservatism that happening in Saudi Arabia Political affairs are mostly about the difference on the religion cultural, lead by two groups or movement in Saudi Arabia. (Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World's Muslim Population, 2009)

The condition of conservatism in Saudi Arabia is become worse day by day, as how the King of Saudi Arabia, King Salman created 'Vision 2030' and give peace for the women in Saudi Arabia for driving car and also giving them permisson to enter the Sport Stadium, but some group on the Saudia Arabia are more to their Traditionalism and rejected the peace being given to the Saudi Arabia peoples. Some of the group in Saudia Arabia are being considered as a hindrance for the Big Project of Saudi Arabia ' Vision 2030'.

Therefore In order to make sure you get the knowledges over this part, we are trying to explain point by points on how the conservatism happened on the Saudia Arabia. Starting form the various groups in Saudia Arabia, what groups that still stand on their traditionalism over modernity on the modern era, then continued with the various forms of ciriticism of the groups or movements in Saudia Arabia, which will explain what kind of criticism that being brought by those groups or movement, then continued with the various results of the domestic criticism, as how it will explaining on what kind of impact that being obtained from the criticism by the Saudi Arabia peoples. Then will be continued by the Reviewing the Political Systems of Saudi Arabia and how the Decision Making Process works in the Saudia Arabia.

Through those points, you will be able to learn on how the consevatism in Saudi Arabia works. The kind of conservatism that happen in the Saudi Arabia, the things that make

Saudi Arabia being seen as the conservatism country. Various groups within Saudi Arabia are doing the criticism movement.

The First factor is the various groups within Saudi Arabia are doing the criticism movement. Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah or Ahlus-Sunnah wal Jama'ah or more often abbreviated Ahlul-Sunnah, Aswaja or Sunni are the largest Muslim groups called with Ahlus-Sunnah wal Jama'ah or groups that carry out the sunnah (Rasulullah SAW) with an emphasis on the imitation of the fair life of the Prophet Muhammad SAW About 90% of the world's Muslims are Sunni. Sunnis criticize conservatism using the muamalah system. where this system has the understanding that Muamalat is all Shari'a law concerned with world affairs, by looking at the activities of one's life such as buying and selling, exchanging, borrowing and so on. Muamalat is also a procedure or regulation in the human relations of fellow human beings to fulfill their respective needs based on the Shari'a of Allah s.w.t which involves the economic and social fields of Islam. Muamalat which is meant is in the economic field which is the foundation of all people to get the pleasure of living in the world and happiness in the hereafter. All the treasures that are in this world are on earth, on the sea or on the basis of God's property, absolutely. Humans are told to have the property provided by Allah s.w.t through the knowledge and skills that are given to him. Those who own wealth in the world are the holders of Allah's trust and are responsible for these assets. (Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World's Muslim Population, 2009). Shia is a branch of Islam which holds that the Islamic prophet Muhammad designated Ali ibn Abi Talib as his successor. Shia criticizes conservatism in a rather crude manner, as how shia is not really care about human rights. The case of terrorism are usually connected to the shia act. They criticize anything through violence, such as bombing, using act of terrorism to finish any affairs that occur. (Council on Foreign Relations, 2018)

Various results of domestic criticism. The results of domestic criticism on Saudi Arabia gave a big chance for the woman on the country. Saudi Arabia granted the permission for the woman in the Saudi Arabia for the rights to drive, attend events in sports stadiums. Not only this, the other result of domestic criticism is the creation of 'Vision 30'. (Goals | Saudi Vision 2030, 2018).

Saudi Arabia's mega development project 'Vision 2030' has now entered its third year. Launched in April 2016, Vision 2030 aims at fundamentally reforming the Saudi economy and society. It is primarily an economic blueprint that seeks to transform the Kingdom from a petro-state to an industrial manufacturing-based productive economy. Its overarching goals are to achieve a private sector-led self-sustaining economy, an open and vibrant society, and an ambitious nation. In short, Vision 2030, announced by the young and ambitious Saudi Crown Prince Mohammad bin Salman, is a bold initiative to change the image of historically oil-dependent and traditionally conservative Kingdom of Saudi Arabia. Lofty goals notwithstanding, 'Vision 2030' is

a hard sale, both domestically and internationally. There are big question marks about its potential to succeed, with some critics predicting its slow demise and others cautiously projecting its future. Viewed realistically, 'Vision 2030' looks more hanging in the balance. Its potential to succeed is seriously undermined by a series of domestic and regional obstacles, most notably portrayed in problems to reform the Saudi social contract, lack of openness and transparency, absence of a domestic scientific and technological base to drive economic modernization on a sustained basis, and a regional environment unfavorable to a business boom in Saudi Arabia. Whether it succeeds or fails, 'Vision 2030' may prove to be a double-edged sword: its failure may unleash domestic chaos and instability with regional spillover effects; its success may further embolden ambitious Mohammad bin Salman to promote Saudi nationalist narratives to strongly push for a regional preeminent position breeding more conflicts and violence in the Middle East. (Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World's Muslim Population, 2009).

Foreign aspirations and movements criticize Saudi conservatism.

The Saudis in deciding to modernize their country certainly get a lot of pressure, such as intense pressure due to the decline in economic capacity and the collapse of the state budget in recent years. In response, the Saudi Government seeks to get out of its dependence on oil with Saudi 2030's vision. Besides that, the contents of 2030 are also about giving freedom to the community itself in carrying out the activities they want, especially women who often get different treatment from men who in Saudi.

In addition to diversifying investment and selling part of ARAMCO's shares, the Saudis also seek to build a positive and "open" climate in the Saudi Arabian community. Thus, this is where the open door policy is intensified including encouraging religious understanding to be more moderate and tolerant

Among the policies that are so broadly echoed are the acquisition of women driving their own cars that are valid in the middle of this year. Another policy is the reform of the role of the Amar Ma'ruf Nahi Munkar Institute, the vanguard of religious institutions in controlling Saudi society so far to conform to the conservative religious ideals adopted by the Kingdom. This is what shows that the Saudis are very concerned about their society and are trying to meet the needs of the community itself.

Another unexpected step is the development of recreational and artistic facilities for the community such as cinemas, music concert halls, and the construction of beach tourism facilities. No less great is the construction of the Neom supermetropolis city project which stretches to parts of the Jordanian and Egyptian borders⁵. This is also

⁵Ibnu Burdah "isukudetadisaudidanakhirsejarahwahabisme" retrieved from <https://geotimes.co.id> on 03 august 2018

because the Saudis realize that natural wealth, like oil, can no longer be expected to improve the country's economy.

This was also encouraged by the Egyptian state which after the fall of Mubarak from his government. This also proves that Muslims have power. The Saudis who are also the majority are Egyptians, of course, have the ability to provide input or change existing policies in order to carry out and fulfill the interests of the community itself.

A 2014 survey showed that two-thirds of internet users in Saudi Arabia watch movies online every week. Nine out of 10 Saudis also have smart phones. People buy cheap flight tickets to Bahrain or Dubai to be able to watch in various theaters there. When oil wealth declines and the country is looking for new economic sectors to develop, there are clear economic arguments for opening the entertainment sector - and bringing the money back to the country to create jobs.⁶

Groups outside the Arabian nation

The criticism that came from Iran and of course this was inseparable from the 1979 Iranian revolution. At that time, Imam Khoemaii forced Prime Minister Bakhtiar to resign from his position and he appointed Mehdi Bazargan as Prime Minister to organize government administration and economic stability. Khoemaii then formed the Islamic Republic Party (IRP) to maintain the ideology of the Islamic Revolution. The party has the support of scholars, urban communities and rural communities. In March 1979, a national referendum was held to approve the change from monarchy to the Islamic Republic.⁷

Having a pretty good background, Iran has a foundation and also a reason to criticize Saudi Arabia, which at this time still adheres to the conservative movement when there are still many needs of the community must be given such as individual freedom or the so-called human right. This revolution itself proves that the country is able to meet the domestic needs of its country and has its own way of upholding justice in the midst of a society that proves an independent state.

Although there are often differences of opinion or political policies between Iran and other Middle Eastern countries. Iran, which is the majority of the people is Shi'ites, often experiences differences in political views with the Egyptian or Saudi countries, even though it has more Sunni society. This difference which sometimes leads to conflict between countries in the Middle East, competes for power in the Middle East. This is also one of the comments or movements from outside the Arab nation that gave aspirations to Saudi conservatism.

⁶Jane Kinninmont "mengapa arab saudi tiba-tiba memutuskan untuk membuka bioskop" retrieved from www.bbc.com on 3 august 2018

⁷Khamami Zada "Gelombang revolusi dan transisi politik di Timur Tengah dan Afrika utara" retrieved form <https://www.academia.edu/15117155> on 3 august 2018

Iran and Saudi Arabia did not fight directly but they were involved in various 'proxy wars' throughout the region. Syria is a temporary example in Yemen, Saudi Arabia accuses Iran of supplying ballistic missiles fired at Saudi territory by the Houthi Shiite rebel movement - an incident that has intensified the war of words between the two countries.⁸

The position of the United States towards the reform movement in Saudi.

In general, the strategic context of US-Saudi Arabia relations in the first seventy years is far clearer than now. During the Cold War, the United States viewed Saudi Arabia as a partner in US efforts to examine Soviet influence in the Middle East and in countries such as Afghanistan. Whereas Saudi Arabia saw the United States as a reliable country during a period when Arab nationalism gave rise to tension, and regional competition for monarchies such as Saudi Arabia.

Decades of relations between the United States (US) and Saudi Arabia have faced major challenges since the start of the Middle East uprising in 2011. The 2011 uprising in the Arab world has opened the door to a new phase of competition for influence among countries - countries in the region, influence the role of America, and how that role is seen.⁹

In this discussion, we note that America itself supports the reform movement and also about Saudi modernization itself. It is said that there are several aspects that are felt necessary to be renewed and reviewed. For the sake of implementing democratic values and also guaranteeing the rights of each community itself.

Prospects of Saudi's political openness.

Analysis on Supporting and Resisting Factors of Saudi Arabia's Political Transparency Process and Its Future Prospects. If we use the study of the political system, we can analyze that the policies adopted by the Saudis in responding to their society about the conservatism that still survive, it is necessary to change the political direction that is more open and has an open nature that eliminates gender discrimination. The coming of a lot of input and also pressure from the interest group was able to urge the Saudis to renew their policies with the vision of 2030.

The input we can pay attention to comes from the Arabs in the form of criticism from Egypt or other neighboring countries. Those who are more open and democratic towards their society require that the Saudis also guarantee the rights of every society so that the creation of comfort in their country. Criticism also came from Iran, although most of the conflict happened to control the Middle East. Modernization is also

⁸ Jonathan Marcus "apa yang melatar belakangi perselisihan arab saudi dan iran" retrieved from www.bbc.com on 3 august 2018

⁹ Brian Katulis "hubunganamerikaarabsaudidiujungditimurtengah" retrieved from <https://www.matamatapolitik.com> on 03 august 2018

supported by the United States, which has long been in a relationship with the Saudis even though at first it came from the oil trade.

All these inputs will later be considered by the Saudis, also by paying attention to many factors. The output that can be seen at this time is with the vision of 2030 which will guarantee the benefit of the community and also become the economic foundation for the future so that the Saudis no longer depend on oil which is the current economic supporter, but also must consider other factors such as necessary to pay attention to the tourism sector, entertainment for the community and of course this can be to support the Saudi economy.

Followed a month after the ban of women driver ended, Prince Mohammed bin Salman released another project named as *anti-corruption drive* by detaining officials that are alleged into doing corruption. However, some analysts argued that this was Prince Mohammed bin Salman's way in order to protect his position and to remain controlling the kingdom. As the result, there were eleven princes, four ministers, and influential businessmen were detained. Despite the criticism, Prince Mohammed bin Salman also decided to allow Saudi Arabian women to attend the football match for the first time in history and also opened the opportunity for women to join the Saudi Arabian military.¹⁰

Despite having a good reputation in developing Saudi Arabia into a *moderate Islam*, the new reformation still left questions hanging as its people of Saudi Arabia began to ask for a more transparent politics in family-ruled Saudi Arabia kingdom. As prince Mohammed bin Salman has promised to bring a more liberal and open Saudi Arabia, we will be trying to analyze on the possibilities of Saudi Arabia having a political transparency in the future and its political systems.

King Salman Bin Abdulaziz kingdom seeks for a rapid major political changes with means of rebuilding Saudi Arabia's political systems through leaving the old teachings where Saudi Arabia's political system has been guided for a long time since. Soon after entering the Throne, King Salman promoted Crown prince Mohammad bin Salman in leading several most part the officials. The initiation is to promise crown Prince Mohammad bin Salman to have a stable position in ruling government. To grant his intention, Prince Mohammad bin Salman was placed as the center of power, by making him as the defence minister. Besides, some princes were removed from their positions as ministers and leader of institutions inside the Kingdom. The removal was due to the policy of vanishing corruptions held by crown Prince Mohammad bin Salman. Seeing all of this we can conclude, as what I mentioned above, that crown Prince Mohammad bin Salman was given the authority by King Salman as ruling the

¹⁰ BBC News. Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, power behind the throne. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-40354415> (Accessed August 03, 2018)

government thus he can maintain his position and able to rule the government in stable positions.¹¹

In the other hand on economic matter, more than 200 princes and businessmen was alleged to corruption where more than \$100 billion of wealth were seized. Besides, they also arrest some media outlets owners, includes *Al Arabiya* and *Rotana* television channel, making the crown Prince Mohammad bin Salman to control the economic and media power of Saudi Arabia once again. Whilst a lot of people and influential sheikhs were also arrested, Saudi Arabia seemed to face a major changes in cultural term, to mention one of it is the legalization of women driver.¹²

However, in responding to actions taken by the crown Prince and King Salman seemed to be pressing the rights for Saudi Arabian people to participate in policy making since the power is centralized to the focus of government ruling, crown Prince Mohammad bin Salman. If centralizing the power means no rights for the media to talk nor for society to take actions, then in my opinion, Saudi Arabia will remain as closed as possible — in term of its politics transparency — and will result to a zero reformation.

Before going further on the analysis, we have to figure out the meaning of political participation and also reformation. In general, political participation means that the society or individuals are actively participate in political activities. According to Samuel P. Huntington and Joan M. Nelson, political participation is the condition where a citizen is involved in a political activities in order to influence the policy making by government. This could be individually or collectively, organized or spontaneous, legal or illegal, and effective or not.¹³

Looking back to the history of previous Kings, it was true that Saudi Arabia Kingdom has tried their best into reforming their closed political system into a more open and transparent one. These reformations done by the previous Kings up to King Abdullah back then has proved that it was the voice of satisfaction and disappointments by the people since they demanded for the government to stop the corruption that was suspected to run within the kingdom and bureaucracy of government as well. There were also several demands which was asked towards the government and their political system, mostly voiced out by sheikhs or theologian in the Kingdom. However, overall the reformation trial tested by the previous Kings are all focused on increasing the participation of society in policy making, actualize the reformation as written

¹¹Alaa Bayoumi. "Challenges of the political change in Saudi Arabia". Middle East Monitor (MEMO). <https://www.middleeastmonitor.com/20171115-challenges-of-the-political-change-in-saudi-arabia/> (Accessed August 03, 2018)

¹² Ibid

¹³Ahmad Efendi Siregar, (2015) *Partisipasi Politik Anggota Dewan Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Study Kasus Aktivitas Anggota DPRD Wanita Propinsi Riau Periode 2009-2014)*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

constitution, and to fight corruption. In King Abdullah's administration, the government held a *National Dialogue* aimed to connect the people with Saudi Arabia government as a tool in developing a harmony between two of it. Another reformation done by King Abdullah in his administration was general election in 2005, eventhough it was aimed for the city council only, still it was considered as an important actions taken by King Abdullah's administration for a more open and transparent political system the Saudi Arabian people are craving for.¹⁴

Saudi Arabia has always been the politically closed country and it seems to be hard to do a reformation. As mentioned by Alaa Bayoumi, the crown Prince Mohammad bin Salman has cut off the limited pluralism and diversity existed in Saudi's political system when he becomes the center of ruling government by controlling institutions. Thus, the opportunity of free expression in Saudi Arabia is threatened and it could reduce the diversity in policy making. Besides, by overthrowing ministers and leaders would make Saudi Arabia lacks of institutions that can secure the speed of rapid changes. As the power is centralized, the responsibility laid on the crown Prince Mohammad bin Salman also increased as the Prince will have to take care of everything that happens in the Kingdom.¹⁵

The Saudis who are still surviving with a conservative government system in which government and policy are also influenced by conservative scholars and are very closed with reform. Although on the other hand, the kingdom also tried to meet the needs and desires of the community itself. There are many factors and also pressure on the Saudis themselves, whether from within the Arab nation or from outside the Arab nation. Also the position of the United States, which has done a lot of cooperation and also relations with the Saudis to support modernization and also develop other aspects to improve the economy.

Vision 2030 is the basis for developing the economy, so that it is no longer dependent on oil which is currently an economic supporting factor. With this vision will also modernize Saudi and eliminate gender discrimination that often occurs.

Discussion

The findings of this study clearly show that Saudi as an authoritarian regime in fact is vulnerable by such crisis : authority, legitimacy, equality and continuity, but in fact until now still strong enough to be overthrown. This fact show that Saudi case different with what **Andrew Reynolds, Jason Brownlee & Tarek Masoud** (2013: 210-221) arguments that popular uprisings have occurred only in some Arab states and in even

¹⁴Arie Permadi, (2014) *Reformasi Politik Arab Saudi Masa Pemerintahan Raja Abdullah*. Skripsi thesis, Universitas Gadjah Mada

¹⁵ See Alaa Bayoumi. "Challenges of the political change in Saudi Arabia" <https://www.middleeastmonitor.com/20171115-challenges-of-the-political-change-in-saudi-arabia/> for further informations.

fewer have authoritarian rulers been overthrown. It's also different with argument of **Larry Diamond & Marc F. Plattner**, e.ds (2015: 1-25) argument that the uprisings that swept the Arab World beginning in 2010 toppled four entrenched rulers and seemed to create a political opening in a region long impervious to democratization.

Such of fact of Saudi' case also different with argument of **Daniel Brumberg** (2013:88-133), that The Arab world's old autocracies survived by manipulating the sharp identity conflicts in their societies. The division and distrust that this style of rule generated is now making it especially difficult to carry out the kind of pact-making often crucial to successful democratic transitions. In the Arab world, pact-making has proven painful and sometimes politically (if not literally) fatal. There are many reasons for this. Two particularly worth mentioning are the persistence of sharp identity conflicts in Arab societies, and the skill with which the Arab world's "protection-racket" autocracies have played upon these tensions for so long. Where they have fallen, these autocracies have left behind a tricky dilemma: Groups that they once shielded remain significant but cannot win elections, while their rivals (who can win elections) wonder why they should make concessions to sure losers. Those phenomena do not happen in Saudi because Saudi regime controll all political aspects very strickly.

This study also clearly show that Saudi political openness is through a more evolutionary and elite-driven process. It's important to answer **Tarek Masoud** (2015: 74-87) question: "Has the Door Closed on Arab Democracy?". The answer is The door still open on Arab Democracy. People of Saudi, in fact also want to gain economic betterment but in same time also want to more democratic governance. This fact also answer to **Michael Robbins** (2015: 80-89), argument who mentioned that data from the Arab Barometer suggest that Arabs have not rejected democracy. In fact, they still by and large believe in it and want it. The Arab uprisings dramatically changed the political landscape, but what was their effect on support for democracy? The results of public opinion surveys conducted as part of the Arab Barometer suggest relatively little changed. Democracy remains the most preferred political system in the region, but few citizens say they live under a democracy.

Conclusion

Kingdom of Saudi Arabia has been well known as one of most conservative regime in the world, especialy on women rights policy. During the late 20th and early 21st centuries, women's rights in Saudi Arabia were limited in comparison to the rights of women in many of its neighbor countries due to the strict sharia law in place in Saudi Arabia. The World Economic Forum's 2016 Global Gender Gap Report ranked Saudi Arabia 141 out of 144 countries for gender parity. Among the factors that define rights for women in Saudi Arabia are government laws, the Hanbali and Wahhabi interpretation of Sunni Islam, and traditional customs of the Arabian Peninsula.

Women campaigned for their rights with the women to drive movement and the anti male-guardianship campaign, with the result that some improvements to their status occurred during the second decade of the twenty-first century.

Women were previously forbidden from voting in all elections or being elected to any political office, but in 2011 King Abdullah let women vote in the 2015 local elections and be appointed to the Consultative Assembly. In 2011, there were more female university graduates in Saudi Arabia than male, and female literacy was estimated to be 91%, which while still lower than male literacy, was far higher than 40 years earlier. In 2013, the average age at first marriage among Saudi females was 25 years. In 2017, King Salman ordered that women be allowed access to government services such as education and healthcare without the need of consent from a guardian and enter to stadium. In 2018, King Salman issued a decree allowing women to drive, lifting the world's only ban on women drivers.

This research conduct Theory of Political System (Gabriel Almond) which explain that political decision, is influenced by in put (domestic and external factor). Also, every political system has such of characteristics, ie. : holistic, adaptive, combination of old and new aspects. This research finds that opening policy practise of Saudi's policy is understandably highly influenced by three factors : domestic politics; economics capabilities and international contexts. All conderations of opening policy for women rights refers to assumption that Saudi's regime as political system, to preserve its existency, should has characteristics such as wholistic; flexible and mixing to old and new value systems.

Limitations & recommendations). This studi was limited by time because in 2019, - Saudi' political openness still on beginning since 2018. So it is still very premature to take such fact and data that show answers that those efforts are already succes or fail.

References

- Alfred Stepan Juan J. Linz (2013). Democratization Theory and the "Arab Spring". in *Journal of Democracy, Subject Arab Spring*; April 2013, Volume 24, Issue 2, Johns Hopkins University Press, USA
- Almond, Gabriel (1960) in Mohtar Mas'oeed & Collin Mc Andrews (1991), *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Andrew Reynolds, Jason Brownlee & Tarek Masoud (2013). "Tracking the "Arab Spring": Why the Modest Harvest?" *Journal of Democracy, Subject Arab Spring*. , Volume 24, Issue 4, Johns Hopkins University Press, USA
- Brumberg, Daniel (2013). "Transforming the Arab World's Protection-Racket Politics", in *Journal of Democracy, Subject Arab Spring* July 2013, Volume 24, Issue 3, Johns Hopkins University Press,

- Dunne, Michele (2015) “After the Arab Spring: Caught in History’s Crosswinds” , in *Journal of Democracy, Subject Arab Spring*; October 2015, Volume 26, Issue 4, Johns Hopkins University Press, USA,
- Feierstein, Jerry (2018). *The Foreign Service Journal*, May, 2018, “Saudi Arabia : Liberalization, not Democratization”
- Jatmika, Sidik (1998). *America as an Obstacle of Democracy : Case Study of US Foreign Policy toward Saudi Arabia*, Bigraf Publishing, Yogyakarta
- Larry Diamond & Marc F. Plattner e.ds (2015), “Democratization and Authoritarianism in the Arab World”, *Journal of Democracy, Subject Arab Spring*; Johns Hopkins University Press, USA,
- Masoud, Tarek (2015), “Has the Door Closed on Arab Democracy?”, January 2015, Volume 26, Issue 1 . *Journal of Democracy, Subject Arab Spring*; Johns Hopkins University Press, USA,
- Masri, Safwan M. (2017) *Journal of Democracy, Subject Arab Spring, October 2018*, Volume 29, Issue 4; “Tunisia: An Arab Anomaly”. New York: Columbia University Press, 2017 .
- Robbins, Michael (2015) . “After the Arab Spring: People Still Want Democracy”, in *Journal of Democracy, Subject Arab Spring*; October 2015, Volume 26, Issue 4 Johns Hopkins University Press, USA
- Yom, Sean (2017), “Jordan and Morocco: The Palace Gambit” in *Journal of Democracy, Subject Arab Spring*; April 2017, Volume 28, Issue 2, Johns Hopkins University Press, USA

Peranan Pemerintah Kota Makassar dan Jayapura sebagai *Sub-state Actors* Dalam Diplomasi

Ishaq Rahman¹, Claudia Conchita Renyoet²

¹Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin, Makassar

²Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Cenderawasih, Jayapura

Corresponding e-mail: ishaq@unhas.ac.id

Abstrak



Peranan kota dalam diplomasi dewasa ini semakin signifikan, baik dalam rangka promosi potensi, maupun sebagai pendukung pencapaian kepentingan nasional. Namun demikian, setiap kota memiliki karakteristik khas, sehingga derajat keterlibatan dan pengaruhnya dalam diplomasi berbeda antara kota satu dengan lainnya. Penelitian ini menelaah peranan pemerintah kota Makassar dan Jayapura sebagai sub state actors dalam menjalankan peran diplomasi. Dengan menggunakan pendekatan Diplomasi Kota (city diplomacy), penulis menganalisis variabel pemerintah kota dalam interaksi internasional. Metode pengumpulan data dilaksanakan melalui telaah dokumen, wawancara, dan pengamatan langsung. Penelitian ini menemukan bahwa variabel internasional, nasional, dan lokal memiliki pengaruh berbeda di Kota Makassar dan Kota Jayapura. Dengan temuan ini, penulis mengajukan argumentasi bahwa kebijakan nasional dalam rangka mendorong derajat keterlibatan pemerintah kota sebagai aktor diplomasi membutuhkan pendekatan yang spesifik, dengan memperhatikan karakter sosial, ekonomi, politik, dan sosial budaya dari masing-masing kota.

Kata kunci:

Diplomasi Kota, Makassar, Jayapura, sub state actors

Pendahuluan

Peranan kota akan semakin signifikan pada masa mendatang, bahkan jauh melebihi apa yang selama ini dibayangkan oleh para analis, praktisi, dan pengambil kebijakan. Bahkan, abad ke-21 sesungguhnya tidak akan didominasi oleh Amerika atau China, Brasil atau India, tetapi oleh kota (Khanna 2010). Pandangan ini didasarkan pada fakta bahwa kota-kota dewasa ini telah menjadi sentra dari tata kelola pemerintahan dimana masa depan dunia akan terbentuk. Perkembangan teknologi dan perubahan pola distribusi penduduk telah memberi kontribusi besar pada masa depan ini.

Dalam kajian hubungan internasional tradisional, interaksi antarbangsa lebih banyak didominasi oleh negara sebagai aktor utama. Pada level tertentu, peranan ini tidak tergantikan. Negara memiliki atribut yang merepresentasikan kepentingan seluruh

bangsa, yaitu kepentingan nasional. Hal ini tergambar dari berbagai teori tentang diplomasi yang cenderung menempatkan negara sebagai sentra. Sir Peter Marshall mengemukakan bahwa paling tidak ada 6 (enam) pengertian diplomasi, yaitu: (1) sebagai isi dari politik luar negeri secara keseluruhan, (2) sebagai aktivitas politik luar negeri, (3) negosiasi dalam hubungan internasional, (4) pengorganisasian dalam pelayanan diplomasi oleh perwakilan di luar negeri, (5) tata perilaku (manner) dari para diplomat, (6) skil atau kemampuan dari seorang diplomat profesional (McKrecher et al. 2012).

Peranan aktor non negara telah mengalami peningkatan signifikan, yang didorong oleh setidaknya dua faktor, yaitu: kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi dan meluasnya demokrasi. Kemunculan *The Third Wave of Democratization* (Huntington 1991) pada dekade 1970-an telah mendorong perluasan peran aktor non negara dan aktor-aktor sub-nasional dalam hubungan internasional. Aktor sub-nasional memiliki karakteristik unik, dimana pada satu sisi menjadi representasi negara, namun juga pada saat bersamaan merepresentasikan entitas masyarakat.

Di Indonesia, keterlibatan unit-unit sub nasional meningkat pesat dalam dua puluh tahun terakhir, terutama sejak Indonesia memasuki era reformasi. Pada tahun 1999, Indonesia mengimplementasikan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan, yang mengakhiri era sentralistik. Sejak era ini, kewenangan pemerintah daerah semakin luas, terutama untuk urusan-urusan yang secara langsung berkaitan dengan pelayanan publik dan pembangunan ekonomi di tingkat lokal, termasuk juga dalam hubungan luar negeri.

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang menyebutkan bahwa “hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia”.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pasal 5 ayat (1) dalam aturan ini menyebutkan bahwa: “Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri”.

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, isu yang berkaitan dengan pelibatan daerah dalam hubungan luar negeri juga dicantumkan, yang secara spesifik mengatur tentang kerja sama luar negeri. Secara garis besar, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan kerja sama internasional, namun terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Menurut data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, hingga tahun 2014 terdapat 542 daerah otonomi di Indonesia, yang terdiri dari 34 propinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota (tidak termasuk 5 kota administratif di wilayah DKI Jakarta). Ini menunjukkan bahwa secara aktual Indonesia memiliki jumlah aktor potensial yang merepresentasikan kepentingan nasional dalam hubungan luar negeri yang relatif besar dibandingkan dengan negara-negara lain, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana satuan pemerintahan daerah yang disebut “kota” berperan dalam hubungan internasional. Pemilihan satuan administrasi “kota” (dan bukannya “kabupaten” yang secara struktural memiliki level yang sama), didasarkan pada pertimbangan bahwa terdapat perbedaan karakteristik yang nyata antara kota dan kabupaten dalam hal sosial, ekonomi, dan budaya. Masyarakat kota yang lebih urban memiliki kebutuhan terhadap interaksi sosial yang lebih dinamis, memiliki karakter perekonomian yang lebih berbasis sektor sekunder, dan memiliki karakter budaya yang lebih pluralistik dibandingkan masyarakat kabupaten.

Dengan mengamati situasi yang terjadi di dua wilayah, yaitu Kota Makassar dan Kota Jayapura, penulis mengelaborasi bagaimana potensi sebagai aktor tersebut dipersepsi dan terimplementasi dalam kebijakan dan aktivitas, baik oleh pemerintah sebagai sub state actors, maupun oleh masyarakat dan entitas non negara lainnya.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode deskriptif eksplanatif. Pengumpulan data difokuskan pada dokumen sekunder dan informasi terbuka yang disajikan melalui media massa dan sumber informasi dari lembaga publik yang terverifikasi.

Pada tahap awal, penulis menggali informasi yang berkaitan dengan aktivitas melintasi batas negara yang dilaksanakan oleh pemerintah kota, sebagai implementasi peran sebagai aktor hubungan internasional. Penulis menganalisis dokumen regulasi dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota, untuk menggambarkan komitmen dan konsistensi peran sebagai aktor hubungan internasional. Selanjutnya, penulis menganalisis praktek dan aktivitas pemerintah kota, dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintahan yang merupakan perwujudan dari visi pembangunan.

Telaah literatur: konsep paradiplomasi dan diplomasi kota

Diplomasi kota umumnya dipahami sebagai bentuk diplomasi oleh aktor sub nasional, perpaduan antara “diplomasi dan praktek perkotaan” yang ingin mempengaruhi lingkungan internasional untuk keperluan keselamatan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memajukan kepentingan global dan identitasnya. Sebagai salah satu aktor sub nasional, kota juga dapat membantu mempromosikan kepentingan nasional dan citra nasional di dunia internasional (Wang and Amiri 2019).

Penggunaan istilah aktor “sub-state” seringkali dipertukarkan dengan “sub-nasional”. Sistem pemerintah pada setiap negara mempengaruhi istilah yang diadopsi. Keterlibatan aktor pada level ini dikenal sebagai *paradiplomacy*, yang oleh Carnago (2010) didefinisikan secara sederhana sebagai keterlibatan pemerintah sub nasional melalui pembentukan ikatan dengan entitas publik atau swasta luar negeri, yang bersifat formal atau informal, permanen atau sementara (*ad hoc*), dengan tujuan untuk mempromosikan dimensi-dimensi pembangunan sosial, ekonomi, budaya atau politik (Milani and Ribeiro 2011).

Salah satu variasi (bahkan dapat dikatakan sebagai turunan) istilah *paradiplomasi* adalah *diplomasi kota*. Sejak dekade 2000-an, muncul pendekatan dalam hubungan internasional dan studi pemerintahan daerah yang melihat peranan kota secara lebih spesifik. Pada tahun 2006, berlangsung konferensi kerja oleh Komite City Diplomacy di Perugia, Italia. Pertemuan yang dikenal dengan nama Perugia Meeting ini menjadi forum saling berbagi diantara 40 peserta yang merupakan otoritas lokal dari berbagai negara, tentang bagaimana pemerintah lokal dapat berperan dalam isu global seperti pencegahan konflik, resolusi konflik dan rekonstruksi paska konflik.

Pada tahun 2008, The 1st World Conference of *city diplomacy*, dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Den Haag, Belanda. Disinilah pertama kali dihasilkan naskah akademik tentang *city diplomacy* yang lebih komprehensif, baik dari definisi maupun uraian tentang batasan peran yang dapat dijalankan oleh otoritas lokal. Namun demikian, dari nara sumber yang hadir maupun dokumen yang dihasilkan, konferensi pertama tentang City Diplomacy ini lebih memfokuskan diri pada pendekatan untuk mengatasi konflik. Asumsi-asumsi yang dibangun adalah banyak konflik yang bersifat lintas negara terjadi di level lokal, atau secara geografis menjadikan kota sebagai daerah terjadinya.

Sementara itu, dalam kajian akademik tampak terdapat argumentasi lebih luas, dimana otoritas lokal dapat menjalankan peranan lebih luas, terutama melalui kolaborasi dengan aktor global, atau sesama aktor lokal di negara lain yang telah memiliki reputasi atau jangkauan global. Terminologi ini menghasilkan pandangan bahwa *diplomasi kota* dicapai melalui keterlibatan kota dengan aktor “glocal” lainnya dan menyelenggarakan berbagai aktivitas bersama yang luas, misalnya “memfasilitasi komunikasi, merundingkan perjanjian, mengumpulkan informasi, mencegah konflik, dan mengambil bagian dalam masyarakat internasional” (Wang and Amiri 2019).

Berdasarkan perspektif ini, praktek keterlibatan kota dalam hubungan internasional sebenarnya bukan hal yang baru sama sekali. Apa yang baru adalah sifat dan cakupan *diplomasi kota* yang telah berkembang semakin dalam dan semakin luas (Wang and Amiri 2019). Keluasan itu terkait dengan isu-isu yang menjadi area keterlibatan kota dan kedalaman berkaitan dengan sampai sejauh mana batas kewenangan yang dimiliki oleh otoritas kota, sesuai mandat yang diberikan oleh pemerintah pusat masing-masing.

Dari pemaparan tersebut, adalah penting untuk memahami bahwa upaya melahirkan teori mengalami tumpang tindih antara kota dan diplomasi. Studi internasional telah lama membatasi peran kota, berdasarkan asumsi yang berkaitan dengan “keterpisahan, diskontinuitas, dan eksklusifitas”, yang menempatkan kota sebagai bagian dari otoritas nasional (Acuto 2013). Pandangan demikian telah menjadi faktor yang membatasi ruang gerak kota ketika akan menjalankan peran sebagai aktor diplomasi, sehingga terdapat perbedaan dalam memahami aktivitas diplomasi berbasis kota (*city-based diplomacy*) dan politik luar negeri tradisional (Curtis and Acuto 2018).

Analisis Peran Kota Dalam Diplomasi

Indonesia memiliki seperangkat regulasi yang memberi ruang pada kota dan pemerintah untuk menjadi aktor diplomasi. Pada tingkat makro, terdapat beberapa Undang-Undang sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Operasionalisasi dari regulasi makro tersebut terlihat dari beberapa aturan teknik yang diterbitkan oleh level kementerian, misalnya Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pedoman Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Peraturan teknis ini menegaskan bidang-bidang kerja sama yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan entitas luar negeri.

Kedua regulasi turunan ini memberikan arah yang jelas mengenai pentingnya peranan pemerintah daerah dalam hubungan luar negeri. Kebutuhan ini menjadi lebih besar lagi, jika dikaitkan dengan konstruksi geografis dan geopolitik negara Republik Indonesia yang terdiri dari belasan ribu kepulauan. Indonesia memiliki perbatasan darat dengan tiga negara (Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste), dan membagi perbatasan laut dengan tujuh negara (Thailand, Vietnam, India, Singapura, Filipina, Australia, dan Republik Palau). Posisi ini menjadikan peranan daerah-daerah, khususnya kawasan yang berbatasan langsung dengan wilayah perbatasan, menjadi lebih strategis dalam implementasi kepentingan nasional. Secara aktual, entitas yang berada pada garda terdepan dari perbatasan Indonesia adalah pemerintah daerah.

Selain faktor geografis dan geopolitik tersebut, dinamika regional di kawasan Asia Tenggara juga dipengaruhi oleh mekanisme regional seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Masyarakat ASEAN (ASEAN Community). Dinamika ini telah menjadi faktor yang mempengaruhi kontribusi dan peranan daerah otonom di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, Kementerian Luar Negeri menekankan perlunya daerah-daerah di Indonesia, khususnya kawasan perkotaan membenahi berbagai aspek untuk menghadapi dinamika regional yang penuh peluang-peluang baru dan tantangan tersebut.

Kota Makassar dan Kota Jayapura yang menjadi obyek penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda, meskipun sama-sama merupakan daerah otonom yang

berstatus ibukota provinsi. Dilihat dari aspek geografis, luas wilayah Kota Makassar adalah 199,3 km², sementara Kota Jayapura adalah 940 km². Sementara dari aspek demografi, jumlah penduduk Kota Makassar mencapai hampir 1,5 juta jiwa, sementara jumlah penduduk Kota Jayapura hanya hampir 300 ribu jiwa. Hal ini menunjukkan Kota Makassar memiliki tingkat kepadatan hampir 7 ribu jiwa per kilometer persegi, jauh lebih tinggi dibandingkan Kota Jayapura yang hanya 312 jiwa per kilometer persegi (BPS Kota Jayapura 2019; BPS Kota Makassar 2019).

Kota Makassar memiliki jumlah penduduk miskin yang jauh lebih besar (68.190 jiwa) dibandingkan Kota Jayapura (33.510 jiwa). Namun, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka rasio penduduk miskin di Kota Makassar jauh lebih kecil (4,58%) dibandingkan rasio penduduk miskin di Kota Jayapura (11,41%). Sementara dalam aspek kesenjangan ekonomi, Kota Makassar menunjukkan angka yang lebih tinggi (0.39) dibandingkan Kota Jayapura (0.30), yang menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat (BPS Kota Jayapura 2019; BPS Kota Makassar 2019).

Menurut standar hubungan bilateral, perwakilan negara asing umumnya terdapat di ibukota negara. Negara sahabat akan membuka perwakilan di kota selain ibukota dengan beberapa pertimbangan, tergantung bagaimana negara tersebut mendefinisikan kepentingan nasionalnya di negara tuan rumah. Namun demikian, kota-kota dapat terlibat dalam berbagai aktivitas internasional, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota maupun oleh entitas lain yang berada di dalam kota tersebut.

Salah satu indikator pentingnya suatu kota dalam hubungan internasional adalah jumlah perwakilan negara asing, organisasi internasional, maupun perusahaan asing di kota tersebut. Di lihat dari aspek ini, Kota Makassar nampaknya memiliki makna yang relatif lebih menjadi perhatian, dimana terdapat dua perwakilan negara asing (Konsulat Jenderal Australia dan Kantor Perwakilan Jepang. Sementara di Kota Jayapura, tidak terdapat satupun Kantor Perwakilan negara asing.

Kota Makassar berlokasi di bagian tengah Indonesia, dan menjadi daerah penghubung transportasi laut dan udara antara kawasan Barat dan Timur Indonesia. Pada tahun 2018, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar merupakan bandara dengan tingkat kepadatan tertinggi nomor empat di Indonesia (Tiket.Com n.d.), setelah Bandara Sukarno Hatta (Jakarta), Bandara Ngurah Rai (Denpasar), Bandara Juanda (Surabaya). Bandara ini juga melayani penerbangan langsung internasional ke Malaysia dan Singapura, serta penerbangan internasional tidak langsung yang transit melalui bandara-bandara utama (Jakarta dan Denpasar).

Sementara Kota Jayapura terletak di wilayah paling timur Indonesia, menjadi salah satu daerah dengan dinamika politik yang tinggi. Bandara Sentani di Jayapura tidak melayani penerbangan langsung internasional. Kondisi sosial politik di Papua yang masih sering diwarnai dengan isu gerakan separatis membuat pemerintah Indonesia

cenderung lebih membatasi akses warga negara asing ke Papua, khususnya Jayapura, dibandingkan daerah lainnya di Indonesia.

Lokasi Kota Jayapura relatif dekat dengan perbatasan darat Indonesia dan Papua Nugini. Jarak ke Pos Perbatasan Skouw sekitar 60 km, yang dapat ditempuh dengan perjalanan darat menggunakan mobil selama kurang lebih 1 jam 30 menit. Lokasi yang dekat ini menjadikan Kota Jayapura terimbas pula isu perbatasan, sebagaimana yang lazim ditemui pada kota utama di daerah perbatasan lainnya.

Penelitian ini menemukan setidaknya empat faktor yang mempengaruhi karakter diplomasi kota yang dapat dijelaskan dengan melihat realitas sosial antara Makassar dan Jayapura, yaitu: kedewasaan masyarakat (*societal maturity*), persepsi terhadap kemajuan teknologi informasi, akses untuk terlibat dalam isu-isu global, dan aktivitas yang berskala internasional.

Masyarakat Makassar dan Jayapura memiliki akses yang tinggi terhadap isu-isu global. Hal ini cukup mempengaruhi bagaimana masyarakat merefleksikan global values tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di Makassar, gerakan sosial untuk merespon isu-isu global (sampah plastik, kelestarian lingkungan, hak asasi manusia, kesetaraan dan perlindungan minoritas, diskriminasi, green living, dan sebagainya) semakin meningkat. Terdapat banyak organisasi berbasis komunitas yang tumbuh dan berkembang. Dalam Pesta Komunitas Makassar 2019, sebanyak 365 komunitas berpartisipasi (SmartCityMakassar.Com 2019; Terkini.Com 2019).

Meskipun tidak sebesar di Makassar, namun organisasi yang berbasis komunitas cukup berkembang di Jayapura (Cendrawasih Pos Online 2018). Sebagian dari organisasi ini mengangkat isu mengenai hak asasi manusia sebagai basis dari gerakan sosial, yang seringkali dikaitkan dengan isu-isu pembangunan seperti kemiskinan, akses terhadap pelayanan publik, eksploitasi maupun masalah lingkungan hidup. Pemerintah Kota Jayapura mencoba memberdayakan komunitas ini dengan memberi muatan ideologi nasionalisme pada setiap isu yang diangkat, termasuk juga dengan memberikan nilai ideologi melalui jenjang pendidikan formal sebagai unsur ekstra kurikuler (KabarPapua.Co 2017).

Dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi informasi, meskipun masyarakat kini memiliki peluang untuk mengakses informasi dari sumber global, ada kecenderungan dimana masyarakat Makassar lebih cenderung mengakses informasi domestik. Bahkan, dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informasi yang bersekolah di luar negeri, mereka lebih banyak mengakses berita daerah asalnya dibandingkan berita dari negara tempatnya belajar atau berita internasional. Secara umum, pemerintah tidak pernah memberlakukan restriksi penggunaan dan akses terhadap media informasi dan komunikasi.

Sementara dalam kasus di Kota Jayapura, pemerintah memiliki pertimbangan berbeda dalam memberikan ruang untuk akses informasi dan komunikasi. Ketika terjadi

kerusuhan sosial pada bulan Agustus 2019, pemerintah mengambil keputusan untuk membatasi penyebaran informasi dengan cara memblokir jaringan internet dan saluran telepon (DetikNews.Com 2019). Maksud pemerintah untuk mencegah meluasnya informasi yang dapat memicu sentimen dan membangkit situasi konflik di daerah lain di Indonesia. Namun oleh sebagian kalangan, hal itu justru menguatkan argumen yang selama ini berkembang bahwa pemerintah pusat masih memiliki sikap diskriminasi dan represif terhadap Papua.

Isu hak asasi manusia merupakan isu nasional yang sebenarnya merupakan isu global, yang secara sederhana dapat didefinisikan sebagai harapan dan standar yang dibagikan dan diterima bersama oleh organisasi internasional, aktor-aktor negara, dan aktor non negara dalam berbagai bentuknya (Khagram, Riker, and Sikkink 2002). Dalam hal ini, isu hak asasi manusia yang terjadi di tingkat lokal umumnya akan cepat mengalami eskalasi menjadi isu internasional, sebab menjadi bagian dari kepedulian global.

Masyarakat di Kota Makassar dan Kota Jayapura memiliki karakter berbeda dalam keterlibatan pada isu-isu global. Beberapa isu global seperti masalah hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, kemiskinan, kesetaraan gender, kemiskinan dan kesenjangan, terorisme, konflik, atau keadilan sosial (Milani and Ribeiro 2011) merupakan area yang dapat melibatkan pemerintah kota, namun dalam level yang berbeda.

Level interaksi yang tinggi juga ditunjukkan dengan aktivitas internasional yang terjadi atau berlangsung pada suatu kota. Kota Makassar dan Kota Jayapura memiliki universitas yang seringkali melaksanakan kegiatan berskala internasional. Yang paling populer adalah konferensi akademik, yang menghadirkan para nara sumber dan peserta dari berbagai negara. Universitas Hasanuddin merupakan perguruan tinggi terbesar di luar pulau Jawa yang berlokasi di Kota Makassar. Selain itu, terdapat juga belasan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di kota ini. Sementara di Kota Jayapura, terdapat Universitas Cenderawasih, yang juga secara reguler menjadi tuan rumah bagi berbagai kegiatan skala internasional.

Pada tahun 2019, terdapat lebih dari 50 kegiatan berskala internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin, baik konferensi, seminar, workshop, maupun pertemuan tertentu yang dilaksanakan bekerja sama dengan negara lain. Meskipun dalam kuantitas yang lebih kecil, namun di Kota Jayapura juga terdapat pola aktivitas yang sama, baik yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, maupun pemerintah daerah.

Penutup

Pemeran pemerintah daerah dalam diplomasi merupakan wacana yang relatif baru dalam praktek dan literatur hubungan internasional. Secara aktual, seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, yang mendorong lahirnya model

interaksi berbasis internet (*Internet of Things* atau IoT) telah menyebabkan disrupsi berbagai tatanan lama. Termasuk di dalamnya ada kecenderungan meluruhnya peran pemerintah pusat dan negara dalam diplomasi.

Pendekatan diplomasi kota, yang merupakan variasi baru dari ide paradiplomasi yang diperkenalkan di Amerika Latin, semakin mendapatkan tempat, setidaknya dalam area praktek. Sehingga, beberapa negara membutuhkan penyesuaian dalam hal regulasi. Dalam konteks Indonesia, keberadaan regulasi ini relatif terlambat merespon dinamika yang terjadi dalam kenyataan.

Praktek diplomasi kota sebagaimana yang dapat dilihat pada fenomena di Kota Makassar dan Kota Jayapura melahirkan pembelajaran bahwa secara umum terdapat peningkatan kapasitas pada level masyarakat untuk mendorong agar kota-kota makin berperan dalam diplomasi. Namun terdapat setidaknya dua isu utama yang perlu memperoleh elaborasi lebih lanjut, yaitu bagaimana dimensi kepentingan nasional dapat diidentifikasi dengan cara pandang baru, dan bagaimana kapasitas birokrasi pada level lokal menyesuaikan diri dengan realitas baru tersebut.

Dalam konteks Indonesia, belajar dari fenomena yang terjadi Kota Makassar dan Kota Jayapura, penulis mengajukan setidaknya usulan untuk menjadi perhatian pada masa mendatang, yaitu: penguatan masyarakat sipil yang menjadi basis interaksi terdekat dengan birokrasi pemerintah daerah (khususnya kota), pembenahan (bahkan perlu hingga tingkatan pembaharuan) regulasi di tingkat nasional dan daerah, dan perlunya menciptakan lingkungan (*enabling environment*) yang dapat mendorong peran serta kota-kota di Indonesia untuk menjadi bagian dalam interaksi internasional yang tetap mengusung kepentingan nasional.

Bibliografi

- Acuto, Michele. 2013. "World Politics by Other Means? London, City Diplomacy and the Olympics." *The Hague Journal of Diplomacy* 8(3-4): 287-311.
- BPS Kota Jayapura. 2019. *Kota Jayapura Dalam Angka 2018*. Jayapura: BPS Kota Jayapura.
- BPS Kota Makassar. 2019. *Kota Makassar Dalam Angka 2018*. Makassar: BPS Kota Makassar.
- Cendrawasih Pos Online. 2018. "Kaget Komunitas Jayapura Ternyata Ramai Dan Keren -." <https://www.ceposonline.com/2018/06/08/kaget-komunitas-jayapura-ternyata-ramai-dan-keren/> (September 16, 2019).
- Curtis, Simon, and Michele Acuto. 2018. "The Foreign Policy of Cities." *RUSI Journal* 163(6): 8-17.
- DetikNews.Com. 2019. "Hingga Pagi Ini Komunikasi Via Telepon-Internet Di Jayapura Masih Terputus." <https://news.detik.com/berita/d-4686379/hingga-pagi-ini-komunikasi-via-telepon-internet-di-jayapura-masih-terputus> (October 16, 2019).

- Huntington, Samuel P. 1991. "Democracy's Third Wave." *Journal of Democracy* 2(2): 12–34.
- KabarPapua.Co. 2017. "Cara Pemerintah Kota Jayapura Membentuk Nasionalisme." <https://kabarpapua.co/cara-pemerintah-kota-jayapura-membentuk-nasionalisme/> (September 18, 2019).
- Khagram, Sanjeev, James V. Riker, and Kathryn Sikkink. 2002. *Restructuring World Politics: Transnational Social Movements, Networks, and Norms*. Minneapolis and London: University of Minnesota Press. <http://www.amazon.com/Restructuring-World-Politics-Transnational-Contention/dp/0816639078>.
- Khanna, Parag. 2010. "Beyond City Limits: The Age of Nations Is over, The New Urban Era Has Begun." *Foreign Policy* 9(9): 18–36. <https://foreignpolicy.com/2010/08/06/beyond-city-limits/> (October 6, 2019).
- McKrecher, B.J.C. et al. 2012. 11 Political Studies Review *Routledge Handbook of Diplomacy and Statecraft*. ed. B. J. C. McKercher. London and New York: Routledge.
- Milani, Carlos R.S., and Maria Clotilde Meirelles Ribeiro. 2011. "International Relations and the Paradiplomacy of Brazilian Cities: Crafting the Concept of Local International Management." *BAR - Brazilian Administration Review* 8(1): 21–36.
- SmartCityMakassar.Com. 2019. "Dimeriahkan 365 Komunitas, Pesta Komunitas Makassar Digelar Di Benteng Rotterdam – Smart City Makassar." <https://smartcitymakassar.com/2019/08/25/dimeriahkan-365-komunitas-pesta-komunitas-makassar-digelar-di-benteng-rotterdam/> (September 16, 2019).
- Terkini.Com. 2019. "Pesta Komunitas Makassar 2019 Kembali Digelar, Catat Tanggalnya! - Makassar Terkini." <https://makassar.terkini.id/pesta-komunitas-makassar-2019-kembali-digelar-catat-tanggalnya/> (September 16, 2019).
- Tiket.Com. "Ini Dia 5 Bandara Tersibuk Di Indonesia Yang Wajib Kamu Kunjungi." <https://blog.tiket.com/menengok-5-bandara-tersibuk-di-indonesia/> (March 5, 2020).
- Wang, Jay, and Sohaela Amiri. 2019. "Building a Capacity Framework for U.S. City Diplomacy." *The RAND Blog*. <https://www.rand.org/blog/2019/03/building-a-capacity-framework-for-us-city-diplomacy.html> (July 10, 2019).

Politik Luar Negeri Indonesia Era Joko Widodo Dalam Isu Lingkungan Global

Afrizal¹

¹Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Riau

Corresponding e-mail: afrizalhiunri@gmail.com

Abstrak



Penelitian ini menjelaskan tentang politik luar negeri Indonesia dalam isu lingkungan global. Permasalahan lingkungan global yang terjadi hari ini memberi dampak lingkungan global pula terhadap negara-negara. Dampak tersebut akibat dari aktivitas yang dilakukan oleh banyak negara yang dapat memberi efek buruk bagi seluruh kehidupan dunia. Oleh sebab itu, perlunya peran keterlibatan suatu negara dalam isu lingkungan global tidak terkecuali keterlibatan Indonesia.

Metodologi yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan dasar konseptual dimana politik luar negeri Indonesia dalam isu lingkungan global menjadi hal yang penting. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori politik luar negeri.

Politik luar negeri Indonesia dalam isu lingkungan global dibuktikan melalui keikutsertaan Indonesia menyepakati perjanjian isu lingkungan global atau bahkan tergabung dalam kesepakatan internasional seperti *protocol kyoto* dan pada era Joko Widodo yaitu ikut dalam Konvensi perubahan iklim *Paris Agreement* di Paris tahun 2015.

Kata Kunci

Politik luar negeri, isu lingkungan global, *Paris Agreement*

Pendahuluan

Isu Lingkungan hidup merupakan isu yang dewasa ini menarik perhatian masyarakat global dan menjadi agenda penting di dalam hubungan antar negara, dimana sejarah pembahasan mengenai isu lingkungan itu dimulai sejak tahun 1972. permasalahan penting lingkungan hidup dan menjadi hirauan atau masalah dunia saat ini adalah permasalahann yang terkait dengan persoalan dampak pemanasan *global warming* dan perubahan iklim *climate change*. Perhatian yang besar atas persoalan tersebut didorong oleh pemahaman bahwa pemanasan global secara substantif sangat berpengaruh bagi terjadinya perubahan iklim, sedangkan perubahan iklim akan berpengaruh terhadap banyak hal salah satunya kenaikan permukaan laut. Bila pemanasan global ini tidak dikendalikan maka salah satunya akan berakibat pada semakin banyak pulau kecil yang tenggelam. Di kawasan lautan Pasifik misalnya sebagian pulau di Nauru Vanuatu, Kiribati dan Kepulauan Marshall saat ini dalam

kondisi tenggelam bila air pasang akibat kenaikan permukaan air laut. Selain itu peningkatan suhu bumi juga berimplikasi pada naiknya suhu rata-rata udara yang cenderung berubah menjadi ekstrem.

Lingkungan hidup dapat dipahami sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Definisi ini sesuai dengan Pasal 1 undang undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui definisi ini dapat dipahami bahwa lingkungan hidup memiliki makna sangat luas karena menyangkut keseluruhan interaksi kehidupan alam semesta yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lain yang ada di planet bumi atau dengan alam secara keseluruhan. Dalam konteks interaksi ini manusia di bumi memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar. Perilaku manusia dalam berhubungan dengan makhluk hidup dan alam dapat menentukan kualitas lingkungan hidup (A Sonny Keraf: 2002).

Realitas kualitas lingkungan hidup yang baik dapat terwujud bila manusia memperlakukan alam secara arif. Sebaliknya kecerobohan dan ketidak arifan manusia di bumi dalam merencanakan dan memanfaatkan lingkungan hidup dapat menjadi ancaman bagi keamanan. Ancaman terhadap keamanan tidak lagi identik dengan keamanan negara (*national security*), tetapi juga keamanan manusia (*human security*) termasuk didalamnya keamanan lingkungan (*environmental security*).

Terlepas dari perdebatan tersebut, pada intinya persoalan keamanan lingkungan terjadi dikarenakan adanya degradasi lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Degradasi lingkungan yang terjadi disebabkan karena meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat baik karena dorongan industrialisasi maupun pertumbuhan penduduk yang dapat menyebabkan bencana alam. Sementara kelangkaan sumber daya alam diakibatkan karena adanya ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand* yang akan menyebabkan kompetisi dan konflik sumber daya alam di masyarakat.

Pada intinya kedua persoalan lingkungan di atas terjadi dikarenakan eksploitasi yang berlebihan terhadap lingkungan dan sumber daya. Isu lingkungan hidup berkaitan erat dengan persoalan aksi kolektif (*collective actions problems*) yaitu persoalan yang disebabkan oleh tindakan kolektif dan solusi terhadap persoalan tersebut juga menuntut tindakan bersama. Persoalan ini dapat dijelaskan dengan konsep *the tragedy of the commons* yang diperkenalkan oleh Garrett Hardin pada tahun 1968. Hardin berargumen bahwa tindakan individu yang dengan rasionalitasnya mengeksploitasi suatu sumber daya bersama *global commonresources* secara berlebihan akan menimbulkan *irrational collective practice* dengan kata lain ketika setiap individu berupaya untuk mengambil keuntungan secara maksimal dalam mengeksploitasi sumber daya alam maka bencana akan menimpa semua (Garrett Hardin. 1968).

Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan dasar konseptual dimana politik luar negeri Indonesia dalam isu lingkungan global menjadi hal yang penting. Isu lingkungan global dan terinstitusionalisasi hingga saat ini, menuntut pemerintah untuk meresponnya dalam agenda politik luar negeri. Kebijakan dan perilaku negara dalam politik luar negeri tentu saja akan dipengaruhi oleh banyak faktor atau *variable*. Khususnya dalam isu lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut diatas analisis politik luar negeri dalam isu lingkungan hidup ini tidak cukup hanya dengan menggunakan salah satu level baik di tingkat individu negara maupun sistem internasional. Untuk memperoleh analisis yang komprehensif pada penelitian ini, maka penulis akan menggunakan jenis analisis politik luar negeri dua “*Level Two Level Game*”. Pendekatan yang pertama kali dikenalkan oleh Robert Putnam ini menekankan pada pengintegrasian analisis dilevel negara faktor domestik dan level sistem faktor internasional dalam mengkaji politik luar negeri. Analisis di level negara mencakup kebijakan pemerintah dengan berbagai perangkat birokrasinya dan aktor domestik lainnya dalam politik luar negeri (Robert D Putnam. 1988).

Negara tidak boleh dianggap sebagai *Black Box* atau suatu yang *unitary*. Sementara itu analisis level internasional menyoroti dinamika konstelasi politik internasional baik dalam organisasi internasional maupun pemerintah negara lain yang memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Pendekatan konseptual ini membantu kita untuk memahami bagaimana diplomasi dan politik domestik saling berinteraksi dan terkait satu sama lain. Jenis pendekatan ini juga relevan untuk menganalisis kebijakan implementasi dan strategi diplomasi dari kebijakan luar negeri Indonesia dalam persoalan lingkungan hidup yang didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Konsep tentang keamanan lingkungan merupakan konsep yang masih terus dan hangat diperdebatkan dikalangan ilmuwan hubungan internasional dewasa ini. Terry Terriff misalnya mencatat bahwa sebagian ilmuwan berupaya memperluas konsepsi keamanan sehingga keamanan lingkungan dapat termasuk kedalamnya. Namun sebagian yang lain melakukan definisi ulang atas konsep keamanan negara untuk menjadikan persoalan lingkungan sebagai isu keamanan. Sementara itu, Lorraine Elliot membagi konsep keamanan lingkungan kedalam konsepsi persoalan lingkungan sebagai ancaman baru bagi keamanan nasional dan mengamankan atau memiliterisasikan persoalan lingkungan (Lorraine Elliott. 2004).

Menurut Paul G Harris bahwa variabel-variabel yang membentuk politik luar negeri suatu negara lebih complex dari pada isu politik luar negeri lainnya, misalnya masalah persoalan lingkungan. Kompleksitas persoalan lingkungan hidup tidak hanya ditandai oleh sifatnya yang tidak pasti *uncertainty* terkait satu sama lain dengan *interconnectedness* dan lintas batas *transboundary* tetapi juga adanya hubungan yang

erat *interlinkage* antara politik domestik dan internasional. Maksudnya adalah implikasi perubahan iklim tidak hanya menyebabkan timbulnya persoalan yang berskala nasional tetapi juga disebabkan oleh aktivitas *local* masyarakat. Oleh karena itu, mengkaji keterkaitan isu lingkungan hidup dan politik luar negeri harus juga melihat interaksi antara politik domestik dan internasional.

Hasil dan Pembahasan

Permasalahan lingkungan yang terjadi di dalam suatu negara terkadang memberi dampak pada negara lain atau aktivitas yang dilakukan oleh banyak negara dapat memberikan efek buruk bagi seluruh kehidupan dunia. Oleh karena itu, perlu adanya peran dan keterlibatan suatu negara dalam isu lingkungan melalui keikutsertaan negara tersebut dalam upaya penanggulangan kerusakan alam. Selain itu, negara dapat menyepakati perjanjian isu lingkungan internasional atau bahkan tergabung dalam organisasi atau kesepakatan internasional.

Politik Luar Negeri Indonesia Era Joko Widodo Dalam Isu Lingkungan Global

Indonesia pada saat ini merupakan salah satu negara yang memiliki hutan tropis yang cukup luas dan memiliki peranan dalam menanggulangi permasalahan lingkungan internasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterlibatan Indonesia secara aktif dalam berbagai kesepakatan dan organisasi lingkungan internasional. Keterlibatan Indonesia dalam isu lingkungan internasional misalnya dalam *Protocol kyoto*, *Paris Agreement*, dan lain-lain.

Faktor Eksternal dan internal Indonesia dalam isu lingkungan global

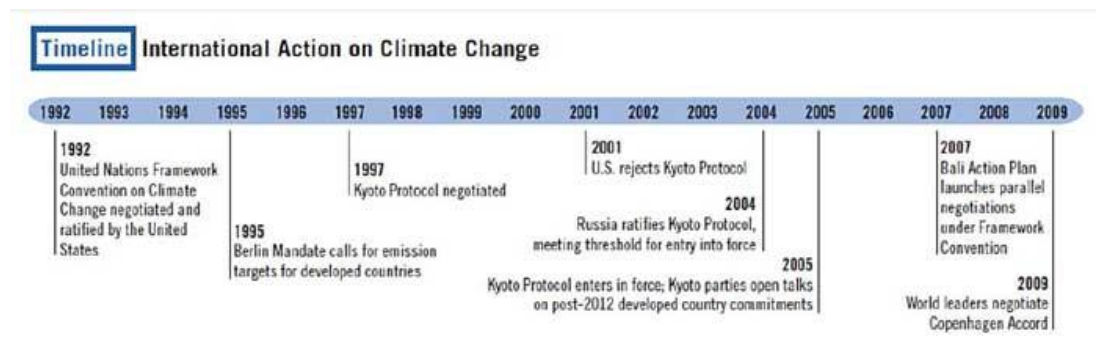
Konvensi Perubahan Iklim PBB (*United Nations Framework Convention on Climate Change*, UNFCCC) dihasilkan di New York, Amerika Serikat tanggal 9 Mei 1992 dan ditandatangani di Rio De Janerio, 4 Juni 1992 pada *Earth Summit* atau Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (KTT Bumi). Dua tahun kemudian yaitu pada tanggal 21 Maret 1994, UNFCCC atau Konvensi Perubahan Iklim mulai diberlakukan. Dengan berlakunya Konvensi Perubahan Iklim maka dimulailah Pertemuan Para Pihak atau *Conferences of the Parties (COP)* yang berfungsi untuk mempertemukan pihak-pihak yang menyepakati berbagai komitmen dan tindak lanjut UNFCCC. *Conference of the Parties (COP)* pertama diadakan di Berlin, Jerman pada tahun 1995 yang menghasilkan Mandat Berlin (*Berlin Mandate*) (Andreas, 2016).

Pada COP ke-3 UNFCCC di Kyoto disepakati *The Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change* atau Protokol Kyoto tahun 1997 sebagai operasionalisasi UNFCCC tahun 1992, yang ditandatangani di Kyoto, Jepang tanggal 11 Desember 1997 dan telah diberlakukan sejak 16 Februari 2005. Selama ini pelaksanaan Kyoto Protokol 1997 dilakukan melalui 3 mekanisme yaitu *Emmission Trading (ET)*, *Joint Implementation (JI)* dan *Clean Development Mechanism (CDM)* dan Para Pihak terbagi kewajibannya yang tercantum di dalam *Annex*.

COP ke-11 tahun 2005, yang diadakan di Montreal Kanada membentuk kelompok kerja bersifat *ad-hoc* mengenai *Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol (AWG-KP)*, yang mengatur pelaksanaan Kyoto Protokol pasca 2012. AWG-KP bertugas untuk membahas pelaksanaan Protokol Kyoto 1997 Pasca Periode Komitmen I (2008-2012). AWG-KP juga memutuskan bahwa Protokol Kyoto 1997 pada periode Komitmen II (2013-2018) harus diperpanjang hingga 2020.

Komitmen dalam menangani perubahan iklim semakin tidak jelas dan menjadi kenyataan dalam COP ke-15 UNFCCC tahun 2009 di Copenhagen, Denmark. Harapan perlunya penurunan emisi yang lebih dalam (*deep cut*), progresif dan ambisius agar dampak perubahan iklim dapat dikurangi melalui kesepakatan mengikat (*legally binding*) di antara negara maju dan negara berkembang yang lebih progresif terutama untuk mengganti Protokol Kyoto di tahun 2020, gagal disepakati pada COP ke-15 di Copenhagen, Denmark. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui *International Action In Climate Change* dibawah:

Gambar 1 : International Action On Climate Change 1992-2009



Sumber: *Isu-Isu Lingkungan Global STIH ITB 2013*

Gambar di atas merupakan perjalanan sejarah awal terbentuknya perjanjian mengenai perubahan iklim dari tahun 1992 hingga 2009. Selanjutnya pada COP ke-12 UNFCCC di Nairobi, Kenya, disepakati kerangka untuk proses adaptasi dan pada COP ke-13 UNFCCC di Denpasar, Bali, Indonesia disepakati *Bali Action Plan* yang mengarahkan pada visi jangka panjang dalam menangani perubahan iklim. COP ke-16 UNFCCC tahun 2010 di Cancun, Meksiko telah disepakati *Cancun Agreements* yang menegaskan bahwa para pihak akan bertindak bersama dalam kerangka kerja sama jangka panjang untuk mencapai tujuan UNFCCC seperti tercantum dalam Pasal 2 melalui pencapaian tujuan global (*global goal*) dengan dasar kebersamaan, yang sesuai dengan *common but differentiated responsibilities and respective capabilities*.

Pada COP ke-17 UNFCCC di Durban, Afrika Selatan, para pihak kemudian sepakat untuk membentuk *Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action* dengan mandat untuk menyelesaikan negosiasi pada tahun 2015 dalam rangka mengembangkan protokol, instrumen hukum lain atau sebuah kesepakatan bersama

yang memiliki kekuatan dan keterikatan secara hukum di bawah sebuah skema UNFCCC yang berlaku untuk semua pihak.

COP ke-18 UNFCCC di Doha, Qatar, disepakati *Doha Gateway* dan *Doha Amendment* yang selanjutnya memperjelas status Periode Komitmen ke-II yang akan diakhiri pada tanggal 31 Desember 2020. Dengan demikian tidak ada jeda setelah berakhirnya Periode Komitmen ke-II Protokol Kyoto 1997. COP ke-18 UNFCCC juga telah mengumumkan dimulainya periode Komitmen ke-II UNFCCC yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan akan berakhir pada 31 Desember 2020.

Pada COP ke-19 UNFCCC di Warsawa, Polandia, juga disepakati suatu mekanisme penting dalam persoalan ganti rugi yang disebut *Warsawa International Mechanism Loss and Damage Associated with Climate* yang akan diintegrasikan ke dalam perjanjian internasional yang baru. Pada COP ke-19, UNFCCC juga memutuskan untuk mendorong *Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action (AWDP)* untuk semakin cepat menyelesaikan target pembentukan Rancangan perjanjian internasional yang baru. COP ke-20 UNFCCC di Lima, Peru, disepakati *Lima Call for Climate Action* yang salah satunya menegaskan bahwa kesepakatan internasional yang baru akan mengikat secara hukum dan akan diterapkan oleh semua pihak konvensi (*convention applicable to all Parties*).

Pada tahun 2015 dilaksanakan COP-21 di Paris, COP-21 mengadopsi Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) yang bertujuan untuk menjaga kenaikan suhu rata-rata tidak mencapai 2°C di atas suhu sebelum masa Revolusi Industri dan mengupayakan lebih lanjut hingga tidak lebih dari 1,5°C. Kesepakatan Paris juga merupakan basis legal implementasi sehingga pengendalian perubahan iklim di tingkat internasional menjadi universal dan harus dilaksanakan oleh serta mengikat secara legal semua negara pihak.

Gambar 2 : Paris COP-21 2015



Sumber: Indonesia Dalam Paris Agreement

COP-21 di Paris menekankan pentingnya peran semua pemangku kepentingan untuk menjamin tercapainya tujuan mulia tersebut. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengajak peran serta *non state actors*, yaitu pemerintah daerah, pelaku bisnis, Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi dan peneliti, semaksimal mungkin.

Kepentingan Indonesia dalam Isu Lingkungan Global

Bagi Indonesia, sebagai negara yang dikarunia keindahan dan kekayaan alam dan sumber daya yang luas dan melimpah, serta ditunjang dengan faktor lingkungan hidup yang sangat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang. Seperti, hutan tropis di Indonesia dianggap menjadi “paru-paru dunia” yang keberadaannya sama penting seperti hutan Amazon di Amerika Latin dan hutan Congo di belahan Afrika Tengah. Indonesia diakui sebagai salah satu pemilik keanekaragaman hayati besar di dunia (*mega diverse countries*). Kekayaan sumber daya alam baik di darat maupun laut juga mempengaruhi Indonesia dalam mengambil berbagai inisiatif pada tingkat regional maupun internasional baik dengan maksud melindungi, mengkonservasi maupun dalam penggunaannya yang berkelanjutan (*sustainable use*). Inisiatif seperti “Coral Triangle Initiative” dan “World Ocean Conference”, *promotor Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries* (REDD), pemrakarsa “Forest-11” adalah diantara berbagai usaha yang telah dibangun melalui diplomasi Indonesia yang dengan sendirinya membawa citra positif Indonesia di tingkat internasional (<http://www.kemlu.go.id>)

Peranan Indonesia sebagai *bridge builder* baik dalam isu *climate change*, IEG, forum UNFCCC maupun UNEP. Ada hal utama yang perlu diperhatikan dalam membangun jembatan tersebut. Jembatan yang dibangun tidak hanya untuk kehebatan dan pencitraan (*glory*) semata tetapi harus adanya tujuan yang benar-benar dapat diperoleh (*gold*) segenap bangsa dan negara Indonesia. Kekayaan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) pada hutan tropis yang dimiliki Indonesia misalnya dapat menjadi *political leverage* yang dapat dimanfaatkan dalam diplomasi dan politik politik luar negeri. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup telah mengesahkan:

1. *Kyoto Protocol to the United Nation Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto terkait Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim melalui Undang-undang Nomor 17 tahun 2004).
2. *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004.

Selain itu Kementerian Lingkungan Hidup juga merencanakan untuk segera mengesahkan:

1. Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan yang Diinformasikan Dini untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional (*Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for certain Hazardous Chemicals and Pesticides in the International Trade*).
2. Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten (*Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants*).

Indonesia dalam Paris Agreement

Paris Agreement atau Kesepakatan Paris yang diadopsi di *Conference of Party (COP)* 21 diselenggarakan di Paris pada 12 Desember 2015, dinilai sebagai keberhasilan diplomasi perubahan iklim global. *Paris Agreement* merupakan angin segar bagi diplomasi multilateral perubahan iklim setelah kegagalan COP 15 di Copenhagen tahun 2009 dalam menyepakati rezim iklim global. *Paris Agreement* yang bertujuan untuk membatasi kenaikan temperatur global dibawah 2°C dan disepakati oleh 196 negara, diibaratkan oleh Christiana Figueres, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif UNFCCC, sebagai “*huge flame of hope*”. *Paris Agreement* menjadi model kontrak sosial dunia yang baru dalam mengatasi persoalan-persoalan global.

Lima poin penting dalam *Paris Agreement* yaitu:

1. Perlu dilakukan upaya mitigasi dengan mengurangi emisi karbon dengan cepat, untuk menjaga ambang batas kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat celcius.
2. Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi harus dilakukan secara transparan.
3. Upaya adaptasi harus dilakukan dengan memperkuat kemampuan negara-negara di dunia untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
4. Memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim, dari kerusakan.
5. Bantuan, termasuk pendanaan US\$ 100 Milyar bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Kesepakatan Paris yang mengadopsi prinsip *applicable to all Parties* (berlaku untuk seluruh pihak), memberikan pekerjaan rumah yang cukup besar untuk negara berkembang. Negara-negara berkembang, yang dalam konvensi disebut sebagai negara *non-Annex*, harus ikut serta dalam upaya global untuk memitigasi emisi gas rumah kaca (GRK) dan pada saat yang bersamaan harus beradaptasi menghadapi dampak perubahan iklim. Untuk itu negara-negara tersebut harus bertransformasi dengan cepat, menuju pembangunan rendah karbon dan berdaya lenting terhadap dampak perubahan iklim.

Paris Agreement menyatakan di dalam Artikel 21, bahwa begitu ketentuan untuk *entry into force* telah tercapai, maka pada hari yang ketiga puluh paska ketentuan tersebut terjadi, *Paris Agreement* akan *entry into force*. Hal yang akan dilakukan kemudian

adalah memulai Konferensi Para Pihak untuk *Paris Agreement* (CMA), dimana anggotanya terdiri atas negara-negara yang telah meratifikasi kesepakatan tersebut. Jika tidak meratifikasinya, maka Indonesia tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan apa pun yang terkait dengan implementasi *Paris Agreement*. CMA ini seperti CMP untuk Kyoto Protokol, atau COP untuk Konvensi Perubahan Iklim.

Paris Agreement sendiri masih memerlukan begitu banyak modalitas untuk mendukung implementasi dari *Paris Agreement* saat *entry into force*. Itu sebabnya, dalam rangka penyusunan modalitas tersebut, dibentuklah *Ad hoc Working Group on Paris Agreement* (APA), yang memulai sesinya tanggal 16-26 Mei 2016 di Bonn. APA akan terus berlangsung, sampai mandatnya terpenuhi sesuai yang tercantum di dalam *Decision COP 21*.

Itu sebabnya, penting agar Indonesia bukan hanya menandatangani *Paris Agreement*, namun juga untuk meratifikasinya, agar di dalam pengambilan keputusan untuk implementasi *Paris Agreement*, Indonesia juga terlibat dan memiliki hak untuk menentukan arah dari implementasi *Paris Agreement* itu sendiri. Meratifikasi Kesepakatan tersebut sesungguhnya dapat membantu Indonesia untuk memastikan agar aksi mitigasi dan aksi adaptasi perubahan iklim dapat dilakukan secara sungguh-sungguh dan terencana secara baik ke dalam rencana pembangunan nasional.

Pada *High-level Segment* tanggal 7-8 Desember 2015, Indonesia menyampaikan pernyataan bahwa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki salah satu hutan tropis terbesar. Indonesia menyadari peran hutan selaku penyerap karbon dan manfaat lainnya yang juga dinikmati oleh negara-negara lain. Indonesia menyerukan perlunya peningkatan kerjasama internasional.

Gambar 3 : Presiden Indonesia Ir. Joko Widodo Menghadiri COP21



Sumber: <http://www.kemlu.go.id>

Pada *Leaders Event* pembukaan COP 21 UNFCCC, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan dukungannya terhadap kesuksesan kesepakatan Paris. Selain itu, Presiden juga menyampaikan kerentanan Indonesia di bidang perubahan iklim dan komitmen Indonesia untuk menjadi solusi perubahan iklim.

Mengacu pada perencanaan penurunan gas emisi hingga 29% dengan langkah-langkah yang dibuat, Indonesia dapat memastikan bahwa aksi-aksi perubahan iklim di sektor-sektor terkait dapat diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan dan dilaksanakan dengan dukungan pendanaan yang memadai. Dalam jangka menengah, dokumen-dokumen perencanaan sektoral ini pun dapat juga diselaraskan dengan perkembangan negosiasi perubahan iklim global. Kondisi ini menuntut perencanaan sektoral yang lebih fleksibel tapi berorientasi pada penurunan emisi GRK dan peningkatan daya.

Penutup

Masalah lingkungan yang terjadi di suatu negara akan memberikan dampak juga pada negara lain, maka perlu upaya suatu negara untuk meresponnya atau yang disebut sebagai politik luar negeri demi menjaga kepentingan ekonomi politik nasionalnya. Politik luar negeri Indonesia khusus dalam isu lingkungan global dapat dilihat dari adanya peran atau keterlibatan Indonesia dalam isu lingkungan global sebagai respon untuk penanggulangan permasalahan lingkungan global.

Keterlibatan Indonesia itu misalnya ikut dalam berbagai kesepakatan permasalahan lingkungan dan ikut bergabung dalam organisasi lingkungan internasional serta meratifikasinya. Keterlibatan konkrit Indonesia dalam isu lingkungan global adalah dalam *Protocol kyoto* dan khusus pada era Joko Widodo yaitu ikut dan aktif dalam pertemuan *Conference of the Parties* ke 21 / COP-21. Proses negosiasi di COP-21 menarik bagi Indonesia dan 195 negara anggota lainnya untuk mencapai kesepakatan yang disebut dengan perjanjian Paris.

Indonesia berperan dalam menandatangani *Paris Agreement* dan meratifikasinya. Diharapkan dengan meratifikasi *Paris Agreement*, maka dapat membantu Indonesia untuk memastikan agar aksi mitigasi dan aksi adaptasi perubahan iklim dapat dilakukan secara baik dan terencana demi kepentingan nasional.

Bibliografi

- Andreas pramudianto. "Dari Protocol Kyoto 1997 Hingga Paris Agreement: Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global Dan ASEAN Menuju 2020". Global Vol.18 No. 1. Mei 2016
- Elliott, Lorraine. 2004. Environmental Security dalam The Global Politics of the Environment. 2nd Edition, New York: Palgrave Macmillan.
- Hardin, Garrett. 1968. The Tragedy of the Commons Science. vol. 162 No. 3859 13 Desember 1968

Keraf, Sonny A. 2002. Etika Lingkungan. Jakarta: Buku Kompas.

Pramudianto, Andreas. 2016. Dari Protocol Kyoto 1997 Hingga Paris Agreement: Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global dan ASEAN Menuju 2020. Global Vol.18 No. 1 Mei 2016.

Putnam, Robert D. 1988. Diplomacy and Domestic Politics the Logic of Two Level Games International Organization. Summer Vol. 42 No. 3.

<https://www.kemlu.go.id> diakses pada tanggal 18 maret 2018 pukul 10:15 wib

<http://www.menlh.go.id> diakses pada tanggal 18 maret 2018 pukul 10:24 wib

The Vulnerability of Muslim States: First Acquaintance

Ali Musa Harahap¹, Fadhlhan Nur Hakiem², Akbar Kurniadi³

^{1,2,3}Department of International Relations, University of Darussalam Gontor, Ponorogo.

Corresponding e-mail: alimusa@unida.gontor.ac.id; fadhlanhakiem@unida.gontor.ac.id;
akbarkurniadi66@gmail.com

Abstract



This paper argues that vulnerability within the Muslim states is an observable fact that has appeared in variety of contexts, both to describe what are perceived as facts of former colonies and sometimes as position of weakened states. This paper aims to evaluate some of possible situations dominating how the Muslim states' vulnerability is resistant to progression. The next segment of the paper examines the basis of vulnerability within the Muslim states. The paper also addresses the question of Islamic stand point of view onto phenomena given the influence of globalization, massive use of technology, violence, capitalism, and consumerism in the affairs of Muslim states. Within this context, this paper analyses the causal relationship between the vulnerability of Muslim states and underpinning factors using a qualitative approach. In the end, this paper concludes that the series of issues within the Muslim states added to make it possible to criticize what is adopted now by redefining objectives and its visions.

Keywords

Vulnerability, Muslim States

Introduction

This paper argues that vulnerability within the Muslim states is an observable fact that has appeared in variety of contexts, both to describe what are perceived as facts of former colonies and sometimes as position of weakened states. This paper aims to evaluate some of possible situations dominating how the Muslim states' vulnerability is resistant to progression. The next segment of the paper examines the basis of vulnerability within the Muslim states. The paper also addresses the question of Islamic stand point of view onto phenomena given the influence of globalization, massive use of technology, violence, capitalism, and consumerism in the affairs of Muslim states. Furthermore, it uses the concept of the *Ummah* to analyze how those Muslim states interact one another in establishing an economic, social cultural, politic, and security cooperation. Within this context, this paper analyses the causal relationship between the vulnerability of Muslim states and underpinning factors using a qualitative approach. In the end, this paper concludes that the series of issues within

the Muslim states added to make it possible to criticize what is adopted now by redefining objectives and its visions.

Results and Discussion

Vulnerability: Problem continues

International relations is a self-directed field of scholarship to view how particular state interact with another. It is assumed that what defined by international relations are relations between state governments which according to the modern ideal of the nation-state are supposedly representative of their constitutions (Mandaville 2006). The interaction within the Muslim states is a term widely used by scholars and policy-makers to describe the exchange of technology, resources, and knowledge between Muslim countries.

However, due to capitalism from the first industrial revolution to the expansion of Western states' hegemony, Muslim states have responded to engage in both nationalist movements as well as actor of globalization at the same time for extensive decades. For instance, the recent situation of human security happened in Middle East, Africa, and part of Asia indicates that this tragedy is worsening rapidly every day. Particularly children, they are seriously affected by this unfortunate situation. Research conducted by the UN Refugee Agency at the end of 2015 estimated that there are about 65 million people around the world have left their home country. Among them about 20 million are under the age of 18.

Another is a discussion of globalized issues which evaluated by the aspect of ethnicities, identities, and financial instabilities within the Muslim states that are currently requiring strong cooperation. The cooperation arguably remains politically and economically unstable with its own notable problems. The Muslim states in an age of nation-states now are referred to problematic and conflicted nations. A basic view to explain the issues of Muslim states are the new kind of medieval model of international relations, where the states are governed by authorities, transfer some of its capacities to international institutions to facilitate economic issues and to address local politics in a three level of governance such as state, sub-state and transnational authorities (Bayliss and Smith 2004). Yet, the concern here is some segments may generate domination and exclusion of another segments in the states.

Globalization within the Muslim states itself becomes a process of state transformation in its classical function together with transnational actors as a global partnership (Bayliss and Smith 2006). The question remains; whether Muslim states in contemporary world are able to deal with such a situation. Understanding this situation is very crucial before stepping into promising solutions. The fact that the Northern states' hegemony in technology and Muslim states' consumerism lifestyle continue to rise, it requires a vital answer to respond. It is because the dominant realists in

international relations such as Kenneth Waltz, Hans Morgenthau, Rousseau, Machiavelli, Hugo Grotius, and Thucydides have consistently viewed that power politics is an essential unit of analysis in the community of nations (Bayliss and Smith 2004). Therefore, power politics remains as the dominant policy paradigm for Muslim states' foreign policies by adopting cooperation, regimes and institution to facilitate their capacity interdependence.

Vulnerability: Realpolitik

The vulnerability of Muslim states also cannot be separated from the real political situation experienced by Muslim states. Muslim states will be trapped in the Realpolitik situation as described by Thucydides. Realpolitik is a Thucydides argument set forth in a manuscript called Melian Dialogue. Realpolitik stated how Athenian emphasized the overriding importance of power in such a world as quoted: "The strong (Athens) do what they have to the power to do and the weak (Melos) accept what they have to accept (Viotti and Kauppi 2010).

Viewed in a Realpolitik or power politics situation, the conditions and situation of Muslim countries are vulnerable. The majority of Muslim countries are not in a position to decide (what do they will). The majority of Muslim countries are in position to do what they must. Indicators that illustrate this vulnerability are seen through two aspects, namely the military and the economy. Both of these can be seen through the military capabilities and GDP of Muslim countries. These two things can be used as a reference to see the vulnerability of Muslim countries. The following is an illustration of GDP per capita and military capability of Muslim countries (2019 Military Strength Ranking n.d.):

Table 1. Military Strength Ranking in 2019 and GDP per capita

No	States	Military Strength Ranking	GDP per capita
1	Indonesia	16 th	4.12 thousand
2	Pakistan	15 th	1.36 thousand
3	Bangladesh	45 th	1.89 thousand
4	Nigeria	44 th	2.23 thousand
5	Egypt	12 th	3.02 thousand
6	Iran	14 th	5.82 thousand
7	Turkey	9 th	8.51 thousand
8	Algeria	27 th	4.23 thousand
9	Sudan	69 th	728.06
10	Iraq	53 rd	5.76 thousand
11	Morocco	61 st	3.41 thousand
12	Afghanistan	74 th	547.51

No	States	Military Strength Ranking	GDP per capita
13	Saudi Arabia	25 th	22.51 thousand
14	Yemen	73 rd	918.8
15	Uzbekistan	48 th	1.48 thousand
16	Niger	116 th	487.68
17	Mali	99 th	933.88
18	Syria	50 th	-
19	Malaysia	41 st	11.39 thousand
20	Senegal	-	1.51 thousand
21	Uni Emirate Arab	62 nd	39.81 thousand
22	Qatar	106 th	70.29 thousand
23	Jordanian	76 th	4.39 thousand
24	Tunisia	80 th	3.07 thousand
25	Turkmenistan	75 th	8.43 thousand
26	Oman	82 nd	18.08 thousand
27	Kuwait	84 th	29.13 thousand
28	Bahrain	98 th	25.78 thousand
29	Kazakhstan	54 th	8.76 thousand
30	Azerbaijan	52 nd	4.5 thousand

Source: adapted from various sources

Some Muslim countries have good military capabilities but are not accompanied by economic capabilities. Vice versa, there are some countries that have good economic capabilities but do not have good military capabilities. This condition will cause Muslim countries to be trapped in a Realpolitic situation and political vulnerability.

Parag Khanna explains this phenomena:

“The state is not a universally representative. Already, billions of people live in imperial conglomerates such as the European Union, the Greater Chinese Co-Prosperty Sphere, and the emerging North American Union, where state capitalism has become the norm. Even during global financial crisis, multinational corporations heavily populate the list of the world's largest economic entities; the corporations has turned north-south relations widened the gap. An individual can now be a nation himself. Bill Gates, Anil Ambani, George Soros, and Richard Branson are able to run corporate cities and undermine the regimes (Khanna n.d.).”

As mentioned earlier in this paper, the current situation of the Muslim states leads to discussion of globalized issues such as ethnicities, identities, and financial instabilities

that are now interdependent. The overall situation needs to be critically examined as a great discrepancy between Muslim states often occurs.

Economic Interdependence

Due to constant level of the Muslim states with regard to dependency and consumerism to multinational corporations (MNCs) goods and services which predominantly associated by the Northern states, these phenomena also lead to MNCs influence in Muslim state economic decision making. According to the UNCTAD, there are over 10,000 MNCs worldwide with an extensive amount of subsidiaries located at the Muslim states (UNCTAD 2018). Due to internet, radical revolution occurred in information. Internet had truly made every state connected to other states. The Muslim states in particular are widely affected from this new phenomenon. The technology has become cheaper who have access to and it has made the states borderless. The MNCs now enjoys a massive and fast mobilization of customers through commercial avenues such as Whatsapp, Facebook, Twitter and video sharing of YouTube. The MNCs in the industry as a result of this massive digitization and online transaction are able to manipulate, create, control, and influence state actors without reservation. Indonesia itself is obtaining a significant rise of employment of MNCs. A light data is described in the table as below:

Table 2. MNCs in Indonesian Sectoral Composition of Primary and Manufacturing Employment (in percent)

Sector	2000	2014
Agriculture	58.61	54.08
Forestry	6.63	3.70
Fishing	7.38	12.19
Mining	1.44	1.87
Food manufacture	5.70	3.49
Textile manufacture	3.67	5.21
Wood	3.25	3.41
Paper	0.76	1.03
Printing	0.03	0.04
Petroleum	0.19	0.36
Chemicals	0.28	0.46
Pharmaceuticals	0.10	0.17
Rubber	1.84	2.66
Nonmetallic minerals	1.26	2.22

Sector	2000	2014
Basic metals	1.12	2.02
Fabricated metal	1.09	1.99
Computing	0.18	0.19
Electrical equipment	0.14	0.15
Machinery and equipment	0.35	0.18
Motor vehicles	0.50	0.74
Other transport	0.03	0.04
Furniture and other	1.52	1.12

Source: ADB and Bappenas, 2019.

The table of Indonesian Sectoral Composition of Primary and Manufacturing Employment above shows that although there are some units reduces its dependency yet, almost all units are incapable to obtain a self-sufficient period in producing goods and services.

Conceptual Framework

The purpose of this paper is to correlate the factors influencing cooperation among Muslim states. Inspired from Emre Torus framework on refugee issues, this paper frames the relationship between Muslim states' cooperation with four major factors. They are formation, legal, value-based, and impact-related.

Formation: It refers to membership structure, diversity and funding. As the number of Muslim states increase in helping others, it is likely that these states will develop diverse purposes and agendas in the society. For instance, how large the states in terms of membership, institutions, and networks; what is the level of concentration and which resources do they command?

Legal: It refers to operational environment, threats and opportunities, political context, and international dimension. There is a need for clear and coherent regulations, which support states and do not create obstacles to their freedom of operations. The laws must exercise freedoms through legal entities. For instance, what is the legal space within the regulatory environment in which states operate; and what laws enable or constrain its development?

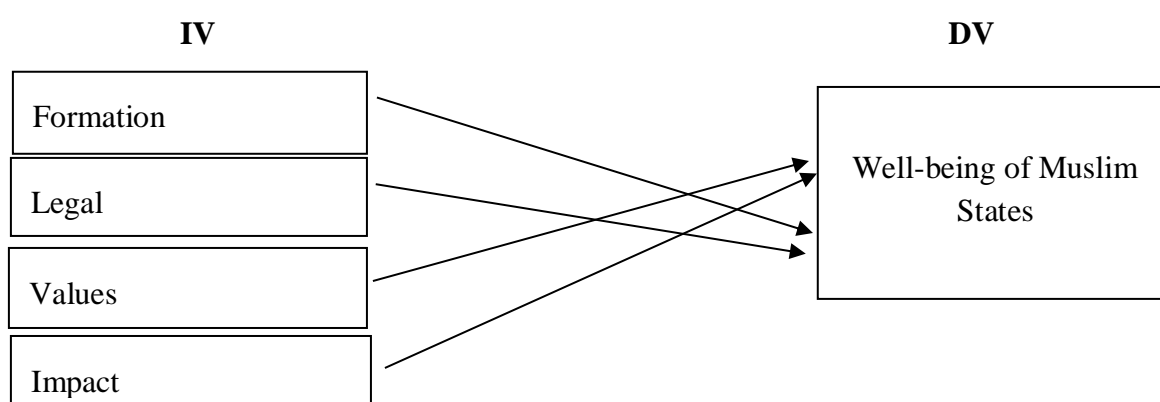
Value: It refers to inclusiveness. As a part of activity, help of states indicates sympathy to the others and raises consciousness about Islamic system. The more often that states have the opportunity to develop the capacity to advance their goals, protect their interests, and preserve their values, the more secure their commitment will be to that

environment. For instance, which values inspire the states; what sort of norms and practices does it represent and transmit; how inclusive are they?

Impact: It refers to effect, responding social interests and empowering states. Through vocalizing the problems and needs, states can produce warnings for the majors and highlight the problems related to shortages. Hence, by sensing these gaps and trying to require changes, state can contribute its capacities to maximum level of distribution. For instance, what is the contribution of states to specific Yemen's problems?

The independent variables or the determinants presented in figure below serve an important role in influencing the well-being of Muslim states.

Figure 1. Determinants of Muslim States' Well-Being



Source: Adapted from Emre Torus Framework of Refugee Learning Centers

Cooperation among Muslim Nations through Concept of the Ummah

This paper also examines how those Muslim states interact one another in establishing an economic, social cultural, politic, and security cooperation through concept of the *Ummah*. Ejaz Akram, Islamic Research Institute (IRI) Researcher, International Islamic University, Islamabad, proposed efforts to build cooperation among Muslim world community through the concept of the “*Ummah*” (Akram 2007). The concept of the *Ummah* will established well if it is supported by cohesion and socio-cultural ties within the Islamic community itself which in Ibn Khaldun's concept is called “*ashabiyah*.”

‘*Ashabiyah* will have a positive meaning as a form of social solidarity in the Islamic community in conducting cooperation, prioritizing collective interests over personal interests (self interest), and being aware of rights and obligations. This positive spirit will sustain the unity and sustainability of a country's existence and build domestic economic prosperity. This effort is rarely implemented by government or regimes in the Muslim world, especially in the Middle East region which has become the world's attention because of various humanitarian issues that have not been resolved until now. On the contrary, ‘*ashabiyah* actually has a negative impact if it is manifested in blind

fanaticism that creates segregation between nations, strengthens solidarity mechanic in groups, widens social distance and deepens differences with other groups outside their group.

So, efforts to carry out internal development within the country through the concept of *'ashabiyah* become important to come to the economic, social, political and security cooperation between Muslim countries as a manifestation of the *Islamic Ummatic Spirit* that Muslims are a single *Ummah* (Qur'an verse 21:92).

The Qur'an is both a guideline and a way of life, so the Qur'an becomes the highest spirit in realizing unity and cooperation between Muslim countries. The Qur'an mentions at least sixty-two times the word "*Ummah*" (referring to Islam). This shows that unity and cooperation between Muslim countries is very important. In a Western perspective, Muslims are considered to have and teach radical doctrines as adhered to *jihadis* and terrorism groups who call themselves Muslims. In fact, Islam teaches its people (*ummat*) to be a moderate group (*ummatan wasatan*) as stated in the Qur'an verse 2:143. This is a feature of Islamic teachings that "*khairul umuri ausathuha*" which means the "middle path" to avoid understanding and actions of extremism (Akram 2007).

Cooperation in the Islamic economic system that supports the *Ummah* concept, for example, Iraj Toutouchian, a Tehran University Economics Professor said that Islamic economics has three pillars called the "Trinity Criteria" as follows: 1) social justice is the highest goal in Islamic economics; 2) demand cooperation of all individuals; 3) when there is a conflict between two interests, personal and social interests, then social interests must take precedence over self interest (Toutouchian n.d.). Unlike the Islamic economic system, the capitalist economic system puts individual interests above all else and economic activity is only seen as an attempt to increase individual profit as much as possible (zero sum game).

Conclusion: An Islamic Perspective

Burhanuddin Helmy, a Malayan Islamic scholar during the colonial times has proposed an idea that the State should correspond to the Divine in dealing its statehood affairs; internal and external. In addition, human dignity is widely discussed in the Islamic texts; Qur'an and *Sunnah*. Prophet Muhammad was also a weak; by force he had to leave Mecca and migrated to Medina as a result of tyrannical rule at that time. People of Medina welcomed the Prophet and his people with a high hospitality.

Burhanuddin added that, Islam is sent by God for the complete guidance of one's life and to maintain peaceful relationship among human beings with God at its centre. Politics and laws in Islam should be directed to achieve justice, to differentiate between the right and wrong, to lead new civilisation, to strengthen the good relationship among all nations, and to ensure equal rights. Although these alarming issues have been

known for long, numbers of crucial initiatives have not been realized. This may due to barriers of Muslim states in their foreign policies, financial means, and people attitude toward this very unfortunate situation. A state not only has a right, but also is responsible to maintain public institutions and processes which it benefits from (Rudini 1994, 1997). A state is assumed to be aware of going-ons in its surrounding. It promotes the spirit of empowering individuals who are less fortunate. The Muslim states cooperation is practiced in different times and places yet seemingly possess an almost immediate and consistent likeliness, this paper argues. On one level, the states are brought together providing communication and common identity but on another level, emphasize its own internal interests and produce conflicts to their cooperation. Another, state agencies such as large companies are seen primarily as groups who influence and change a critical decision of public sphere of Muslim states. They remain weak and marginalized. Normatively, the central principle of Islam in governing the states cooperation lies but not limited to, responds in the form of protecting people as supported in the *dharuriyat of Maqasid*. Cooperation has to be pure, sincere, and accommodate the large affairs of public in beautiful manner.

In dealing with other Muslim states, state interest has to conform with another unit of analysis such as way of dealing, conditions, and other form of cooperation rather than exclusively material needs. As a matter of fact, Islam has described consistently for any cooperation has to reach beyond materialism. A strong solidarity with other states irrespective of nations has to prevail. Cooperation is richly mirrored in the verse of the Qur'an. A value and benefit are enjoined upon cooperation as the Qur'an states:

Mankind! We created you from a single (pair) of a male and a female, And made you into Nations and tribes, that ye may know each other. Verily the most honoured of you in the sight of Allah is the most righteous of you...

Al-Hujurat: 13

And:

To each is a goal to which Allah turns him...

Al-Baqarah: 148

And:

Verily, this Ummah of yours is a single ummah.

Al-Anbiya: 92

And: ...to each among you have we prescribed a Law and an open way. If Allah had so willed, he would have made you a single people...

Al-Maidah: 48

In driving states to carry out this responsibility, the Maqasid reveals its direction. The importance of preserving Maqasid has been described clearly in the Quran as a custodian of human welfare by creating benefits to them and avoiding harms as stated in Surah al-Baqarah, verse 185, meaning: “(With this decree), Allah desires your wellbeing, not your discomfort.”

For Muslim states, however, the cooperation union is arguably still a long process and the process of good cooperation will be gradual, this paper believes. Therefore, this conclusion has several implications for the Muslim states to respond. First of all, the Muslim states have to facilitate consolidation in the soonest possible way such as formulating the best roadmap in both politic and economic needs. This is to ensure all mechanisms are applied with a just and considerable manner. Second, the Muslim states have to expand level of coordination and responsible to the outcome of their capacities; and finally, some of major powers within the Muslim states have to unite and enjoin their capacities to help the minors.

Bibliografi

- “2019 Military Strength Ranking.” <https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp> (September 25, 2019).
- Akram, Ejaz. 2007. “Muslim Ummah and Its Link with Transnational Muslim Politics.” *Islamic studies*.
- Bayliss, John, and Steve Smith. 2004. *The Globalisation of World Politics: An Introduction to International Relations*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press.
- . 2006. *The Globalisation of World Politics: An Introduction to International Relations*. 4th ed. Oxford: Oxford University Press.
- Khanna, Parag. “The Next Big Thing: Neomedievalism.” <https://foreignpolicy.com/2009/09/17/the-next-big-thing-neomedievalism/> (September 27, 2019).
- Kusuma, Dimas Bagus Wiranata., Ashif, Syed Mohammed Abud., Harahap, Ali Musa., Omarsyah, Muhammad Alam. 2013. “The Role of Asean Exchange Rate Unit (AERU) for Asean-5 Monetary Integration: An Optimum Currency Area Criteria.” *Bulletin of Monetary Economics and Banking*. Vol. 15(3).
- Mandaville, Peter. 2006. *Global Political Islam*. London: Routledge.
- Rudini. 1994. “Gerakan Massa 1990-an Sehatkan Demokrasi.” *Kompas*: 1.
- . 1997. “Gerakan Moral Efektif Dalam Pengaruhi Pendapat Umum.” *Kompas*: 14.
- Surah Al-Anbiya, verse 92.
- Surah Al-Baqarah, verse 148.
- Surah Al-Baqarah, verse 185.

Surah Al-Hujurat, verse 13.

Surah Al-Maidah, verse 48.

Toutouchian, Iraj. "Society and Cooperation in Islam: Incentives and Consequences." <https://islamicmarkets.com/education/society-and-cooperation-in-islam-incentives-and-consequences> (September 29, 2019).

UNCTAD. 2018. *World Investment Report 2018; Investment and New Industrial Policies*. Geneva: United Nations Publication.

Viotti, Paul R., and Mark V. Kauppi. 2010. *International Relations Theories*. 4th ed. Pearson.

Pandangan Islam Terhadap Liberalisasi Budaya: Titik Tengah Diskursus Kemajemukan dan Persatuan

Siti Muslikhati¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Corresponding e-mail: sitimuslikhati@gmail.com

Abstract



Globalization makes the world without borders, so that interactions and influences among nations are very easy. In the era of globalization, there are two cultural phenomena that seem contradictory. On one hand, the ease of communicating and accessing information has led to the emergence of uniform cultural patterns between nations (global culture). But on the other hand, technological advances in the fields of communication, transportation and information actually strengthen awareness of cultural diversity. Each nation is required to show the uniqueness and distinctiveness of each culture (local culture) so that it becomes an attraction for tourist flows. Discourse continues to be related to whether world citizens will merge in the flow of global culture or maintain their local culture. This paper will emphasize that these two extreme poles actually belong to a liberal culture. This paper will also evaluate the consequences of adopting a liberal culture for the Muslim world, as well as offering an Islamic perspective on managing cultural diversity within a unified framework.

Keywords

Local Culture, Global Culture, Cultural Liberalization, Islamic Perspective

Pendahuluan

Manusia dengan kekuatan akalanya, selalu berusaha menciptakan kehidupan yang lebih baik, aman, sejahtera, harmonis dan adil. Akan tetapi, ketika manusia menyandarkan kekuatan berpikirnya hanya pada realita, seringkali perdebatan manusia terjebak pada kutub ekstrim yang tidak berkesudahan. Karena realita kehidupan dan alam semesta adalah realita berpasang-pasangan, yang kadang dilihat sebagai kutub dikotomik. Realita ada hidup dan mati, ada sakit dan sehat, ada siang dan malam, ada gunung dan laut, ada laki-laki dan perempuan, ada individu dan masyarakat, ada kehidupan sendiri dan bersama, ada global dan lokal, dan lain-lain. Peradaban Barat, yang fondasi kehidupannya adalah pemikiran sekulerisme, (Husaini, 2005) sesungguhnya merupakan contoh peradaban yang tiada henti terjebak dalam perdebatan panjang tentang standar kehidupan yang baik serta proses untuk mewujudkannya.

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan perdebatan yang terjadi saat bicara tentang bagaimana menciptakan kehidupan yang lebih baik, aman, damai, sejahtera, adil dan maju. Salah satu perdebatan yang muncul adalah : betulkah untuk menciptakan masyarakat yang baik, kita perlu mempertahankan kemajemukan budaya lokal dan memberi kebebasan manusia untuk mengembangkan apapun kreasi dan budaya lokalnya? Atau memodernkan masyarakat harus dengan jalan menyatukan / mengintegrasikan budaya lokal dengan mengikuti arus globalisasi budaya Barat? Apakah hanya ada dua pilihan pandangan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik? Tulisan ini akan mengupas dan mengevaluasi dua kutub ekstrim (kutub budaya lokal dan budaya global) dalam mewujudkan masyarakat yang lebih baik, sekaligus menawarkan model perubahan masyarakat yang digali dari khasanah pemikiran Islam.

Diskursus Budaya Lokal dan Budaya Global

Yogyakarta menyanggah gelar sebagai kota budaya dan pariwisata, di samping sebagai kota pendidikan. Bicara tentang budaya, biasanya bicara tentang realita kemajemukan dan dinamika adat istiadat, pola-pola perilaku dan benda yang dipakai sekelompok manusia dalam menjalani kehidupannya. Meskipun secara universal, manusia mempunyai jenis-jenis kebutuhan hidup yang sama, berupa kebutuhan fisik dan naluriah, namun terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup tersebut, manusia memiliki keberagaman dalam menjawab pertanyaan “dengan apa” memenuhi kebutuhan hidup serta “bagaimana cara” memenuhinya. Jawaban pertanyaan “dengan apa” melahirkan variasi dalam benda-benda budaya, dan jawaban pertanyaan “bagaimana cara” melahirkan variasi dalam tindakan budaya. Kemajemukan ini bisa dipahami karena budaya adalah hasil olah akal manusia (ideas). Hasil pemikiran manusia dipengaruhi oleh realita yang terindra dan informasi yang masuk ke dalam dirinya. Secara alamiah, manusia hidup dalam lingkungan alam maupun manusia yang berbeda-beda, sehingga produk pemikirannya pun berbeda-beda. Produk pemikiran yang berbeda akan mempengaruhi berbedanya bentuk-bentuk tindakan dan benda budaya tiap masyarakat. (Koentjaraningrat, 1986, pp. 179-225)

Dalam kehidupan tradisional, ketika wilayah yang bisa terindra oleh manusia sangat terbatas, maka mereka terbatas juga menyadari adanya keragaman budaya. Kesadaran itu baru didapatkan seiring dengan kebutuhan untuk pertukaran barang dan jasa dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Di era globalisasi dan modernisasi, pesatnya perkembangan teknologi transportasi, komunikasi dan informasi, menyebabkan wilayah pengindraan manusia semakin meluas, dan peluang terjadinya akulturasi dan asimilasi kebudayaan pun terbuka lebar. Sebenarnya dalam kaitan dengan mudahnya terjadi interaksi dan saling tergantung antara masyarakat satu dengan masyarakat lain, maka kita sulit mengidentifikasi mana budaya lokal dan mana budaya global. Kita juga sebenarnya kesulitan untuk memastikan mana budaya yang tepat dan benar dan mana budaya yang tidak. Di sinilah perdebatan itu terjadi. Sebagai contoh, ketika orang Yogyakarta mengklaim ada wujud budaya murni Jawa, atau budaya lokal Jawa,

sesungguhnya klaim itu sulit dibenarkan. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa Budaya Jawa adalah hasil akulturasi, asimilasi dan pengaruh budaya luar yang masuk ke Jawa, atau pengaruh dari orang Jawa yang bepergian ke luar, kemudian pulang membawa informasi baru. Budaya luar ini bisa berupa budaya Hindu Budha dari India, atau Budaya Islam dari Dunia Islam, atau budaya liberal dari Barat. (Suryana, 2017)

Dengan demikian perdebatan budaya lokal-global akan berlangsung terus. Jika kita khawatir dengan dampak buruk budaya Barat bagi masyarakat Yogya, yang masuk seiring dengan globalisasi, maka kita berusaha untuk mempertahankan budaya lokal Yogya. Pertanyaannya adalah budaya local yang mana yang akan kita pertahankan? Cara berpikir ini tidak akan membawa kepada kehidupan yang damai, harmoni, adil serta menentramkan. Karena tidak ada beda antara budaya lokal dan budaya global dalam hal rujukan budaya itu hanya semata-mata akal dan proses berpikir manusia. Proses berpikir manusia, ketika rujukannya semata informasi dari manusia lain, akan selalu bersifat relatif dan tidak pernah bisa menemukan standar-standar kebenaran yang bisa diterima secara universal. Fondasi pemikiran seperti ini yang disebut dengan sekulerisme, yaitu memisahkan realita yang terindra dengan kekuatan di atas realita (Tuhan Yang Menciptakan Alam Semesta). Jadi sekulerisme itu ada yang sempit (lokal) dan ada yang global. Semuanya menuntut untuk diberikannya kebebasan pada tiap individu dan masyarakat berekspresi, bertingkah laku dan menggunakan benda apapun sebagai wujud kebudayaan khas. (MUI, 2005)

Padahal ketika manusia menyadari bahwa ada persamaan karakteristik manusia di mana pun mereka berada, berupa manusia punya kebutuhan hidup dan akal yang sama, pasti akan muncul kebutuhan untuk memikirkan standar-standar kehidupan yang menyeluruh. Dan standar yang menyeluruh, manusiawi dan adil ini ternyata tidak pernah didapatkan dari proses berpikir sekuler yang rujukannya berasal dari semata fenomena yang terindra.

Paradoks Budaya di Balik Penjajahan Barat Atas Dunia Islam

Gelombang imperialisme Klasik Eropa ke Negara-negara Asia – Afrika, yang sebagian besarnya adalah Dunia Islam, terjadi seiring dengan berkembangnya kapitalisme industrial abad ke-18. Lenin melakukan analisa bahwa kapitalisme hanya akan bisa bertahan dan selamat dengan mencapai tahap imperialisme. Dalam rangka mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya (*the highest rate of return*), mau tidak mau kapitalisme harus melakukan ekspansi di seluruh dunia. Ekspansi ini dalam rangka untuk mendapatkan kesempatan menanamkan modal, mencari pasar, menguasai bahan mentah dan mendapatkan buruh yang murah. (Jones, 1991, pp. 10-11) Pada abad-abad ini, imperialisme dilakukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi Eropa (Korporasi), dengan cara langsung mendatangi wilayah-wilayah jajahannya dan sepenuhnya ditopang secara politik dan militer oleh pemerintah negaranya. Untuk mempertahankan imperialisme dan kolonialismenya, negara-negara Barat

memerlukan komponen penopang yang berupa perbankan, dukungan kaum intelektual, media massa dan dukungan elit nasional bangsa yang dijajah. (Rais, 2008, pp. 5-9) Dari sini kita bisa memahami bahwa Ideologi Kapitalisme menggunakan pendekatan ekonomi politik dalam melihat korelasi antara ekonomi dan politik. Artinya Kapitalisme menjadikan kekuatan korporasi sebagai panglima, yang memimpin sekaligus mengendalikan kekuatan politik yang ada di tengah-tengah masyarakat. (Deliarnov, 2006, pp. 11-16)

Namun penjajahan Barat atas Dunia Islam tidaklah sekedar perpindahan aset ekonomi berupa modal, sumber daya alam dan tenaga manusia. Selalu di dalam perpindahan manusia terjadi interaksi budaya, karena budaya selalu melekat pada manusia. Yang menarik dalam interaksi budaya ini adalah adanya paradoks nilai-nilai budaya yang dibawa oleh Barat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Barat berhasil melakukan Revolusi Industri (Kapitalisasi) setelah mereka berhasil melakukan Revolusi Pemikiran (Sekularisme), yaitu mendobrak model pemikiran teosentris (berorientasi pada Tuhan) dan menggantikannya dengan model pemikiran antroposentris (berorientasi pada manusia). Paradoks pertama, Barat mengusung slogan *Liberty* (kebebasan dan kedaulatan manusia), *Egality* (persamaan antar manusia, pengakuan pluralisme) dan *Fraternity* (persaudaraan antar manusia dalam ikatan nasionalisme). (Geoffrey Roberts & Jill Lovecy, 1984, pp. 7-8) Barat menggaungkan ketiga prinsip tersebut, tetapi mereka melakukan penjajahan yang hakikatnya adalah melanggar prinsip-prinsip itu sendiri. Paradoks kedua, untuk kesuksesan penjajahan, Barat menggaungkan cara berpikir inklusiv (terbuka) ketika berusaha untuk memaksa Dunia Islam menerima kehadiran budaya Barat, sementara Barat akan menonjolkan eksklusivisme (kekhasan) budaya tiap daerah ketika sedang berusaha untuk memecahbelah dan kemudian menguasai. Pola inklusivisme menyebabkan negara-negara Dunia Islam, sesudah merdeka, mengadopsi sistem kehidupan Barat (politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan peradilan). Jadilah budaya Barat menggloabal. Sementara pola eksklusivisme mengantarkan kepada fenomena separatisme yang makin massif di Dunia Islam.

Perlu kesadaran penuh dari masyarakat Dunia Islam, bahwa itulah karakteristik Peradaban Barat yang sekuler. Peradaban ini selalu menimbulkan ketidakpastian standar nilai benar salah, baik buruk, terpuji tercela. Masyarakat akan selalu terjebak pada perdebatan tiada henti. Bagaimana menciptakan kehidupan bersama yang harmonis, aman, adil dan manusiawi jika yang disebarkan di tengah masyarakat adalah ketidakpastian. Penjajahan dan eksploitasi yang kuat atas yang lemah akan berlangsung terus jika peradaban sekuler yang diadopsi.

Pandangan Islam Terhadap Kemajemukan Budaya dan Kebutuhan Persatuan

Kemajemukan (pluralitas) dan keseragaman (persatuan) adalah dua sisi mata uang bagi kehidupan manusia. Kodrat manusia yang secara individual berbeda-beda, serta

adanya naluri *baqo'* (mempertahankan diri) pada tiap manusia akan cenderung melahirkan keberagaman sekaligus kebutuhan untuk diakuinya eksistensi tiap individu. Sementara kodrat manusia yang secara kolektif sama, serta adanya naluri *nau'* (kebutuhan untuk keberlangsungan eksistensi umat manusia) cenderung menghasilkan kebersamaan dan persatuan. Tiap masyarakat berbeda satu sama lain karena *diqodlo* (ditetapkan) oleh Allah dengan kondisi lingkungan yang berbeda, baik lingkungan alam maupun lingkungan manusia. Mereka tidak bisa dipaksa untuk memiliki pola-pola kehidupan (budaya) yang sama. Sementara pada kondisi lingkungan yang berbeda sesungguhnya juga ada kebutuhan untuk saling melengkapi, saling membantu dengan jalan saling bertukar barang, jasa dan pemikiran. (Abdurrahman, 2014)

Yang dibutuhkan oleh manusia sesungguhnya adalah standar-standar yang baku tentang mana saja wilayah kehidupan yang manusia boleh berbeda-beda, boleh memilih antara melakukan atau tidak suatu perbuatan dan menggunakan atau tidak suatu benda untuk kehidupannya. Manusia juga butuh kepastian apa saja perbuatan yang harus dilakukan dan harus ditinggalkan dan perbuatan yang sebaiknya dilakukan dan sebaiknya ditinggalkan. Kebutuhan akan standar baku ini, ternyata tidak pernah didapat dalam kehidupan masyarakat yang sekuler yang semata-mata menyandarkan standar-standar kehidupan dari rekayasa akal manusia. Peradaban Barat adalah contoh kehidupan manusia yang senantiasa terjebak dalam relativitas standar serta kutub dikotomik yang ekstrim dalam memandang kebutuhan akan individualis-kemajemukan dan kolektif-penyatuan. Kutub ekstrim pertama adalah model Liberalisme Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Pandangan ini menerima pluralitas secara bulat dan menganggapnya sebagai bentuk kebebasan individu yang tidak perlu ada keseragaman sedikit pun. Pandangan ini tidak mengakui dan mengingkari adanya faktor pemersatu. Sementara kutub ekstrim kedua adalah model totaliterisme Barat yang dulu diwakili oleh Uni Soviet. Pandangan ini menolak pluralitas mentah-mentah dan menganggap pluralitas sebagai petaka bagi kehidupan bersama. Pluralitas harus dihilangkan karena membawa perpecahan dan keseragaman dan penyatuan mutlak harus dibangun. (Imarah, 1999)

Pandangan Islam terhadap kehidupan manusia adalah pandangan pertengahan (*wasathan*) yang tidak akan terjebak pada titik ekstrim, karena dasar pandangan Islam adalah Aqidah Islam. Aqidah Islam tidak hanya berbeda, tetapi sekaligus bertolak belakang dengan sekulerisme. Islam hanya mengakui “ketunggalan/keesaan” (yang tidak mempunyai sisi parsial dan plural) semata bagi Dzat Allah SWT dan tidak bagi makhluk. Prinsip ini membawa kepada pengakuan bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta, Allah lah mengatur berjalannya kehidupan manusia, sekaligus Allah lah yang patut disembah dan ditaati. Tidak ada peradaban tanpa kesatuan. Jika unsur peradaban tidak bersatu, tidak terintegrasi dan selaras satu dengan lainnya, maka unsur-unsur itu hakikatnya adalah himpunan campur aduk dan tidak akan membentuk

peradaban yang agung. Peradaban Islam adalah peradaban yang manusiawi karena menjadikan tauhid (wahyu) sebagai prinsip utama dan sekaligus standard dan pembimbingnya dalam membangun pola-pola budaya masyarakat. Ketika berhadapan dengan agama dan peradaban lain, Islam akan menerima dan mengintegrasikan fakta dan situasi yang sejalan dengan prinsip ini dan yang tidak sejalan akan ditolak. Wahyu adalah satu-satunya pemersatu umat manusia secara keseluruhannya. (Al-Faruqi I. R., 2001, pp. 109-130)

Allah Maha Tahu di balik dilekatkannya naluri baqo' dan naluri nau' pada kehidupan manusia. Realita kehidupan manusia adalah adanya perbedaan dan kemajemukan dan sekaligus adanya persamaan dan kebutuhan untuk persatuan. Allah SWT menciptakan alam semesta di atas sunnah keberagaman dalam sebuah kerangka kesatuan. Dalam kerangka penyatuan manusia, Allah menciptakan berbagai macam suku bangsa. Dalam kerangka kesatuan bahasa, Allah mempersilakan munculnya berbagai macam dialek. Dalam kerangka kesatuan syariat, Allah membolehkan lahir berbagai macam madzab. Sisi pertengahan (keadilan) dan keseimbangan (harmoni, proporsional) dengan standar wahyu itulah yang mampu memelihara hubungan antara "kemajemukan-perbedaan-individualis" dengan "faktor persatuan-kesamaan-kebersamaan". (Imarah, 1999)

Metode Mengelola Kemajemukan Budaya dalam Bingkai Persatuan di Era Nabi dan Khalafaur Rasyidin

Manusia membutuhkan wahyu untuk menyelesaikan keseluruhan masalah di dalam kehidupannya. Keseluruhan hukum yang diturunkan oleh Allah berfungsi untuk memberikan pengaturan bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, Allah SWT mewajibkan kaum muslimin untuk menerapkan Islam secara total dalam seluruh aspek kehidupan. Sesuai dengan konsepsi Tauhidnya, Islam telah membatasi bentuk kekuasaannya, yaitu pemerintahan yang menjalankan hukum sesuai dengan apa yang telah diturunkan Allah SWT, yaitu Al Qur'an dan As Sunnah. Sekaligus Islam melarang berhukum pada hawa nafsu (akal dan perasaan-perasaan manusia semata). Hal ini bisa dipahami dari Qur'an surat Al Maidah ayat 48 dan 49. Inilah yang merupakan makna dari kedaulatan (*as siyadah*) adalah milik Allah, bukan milik rakyat. (Nabhani, Nidzomul Hukmi fil Islam, 2002, p. 40) Setiap kekuasaan yang menjalankan pemerintahan sesuai dengan hukum yang diturunkan Allah atau yang menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan As-Sunah, berarti pemerintahan tersebut merupakan Pemerintahan yang Islami dan *Syar'i*.

Di masa Rosul, Umat Islam berhasil menerapkan keseluruhan Hukum Allah secara praktis setelah hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad menjadi pemimpin politik (kepala negara dan pemerintah) setelah dibai'at oleh umat Islam yang berasal dari Madinah, yaitu Bai'at Aqobah I dan II. Ini adalah Negara Islam pertama, dengan Rosul sebagai kepala negara. (Nabhani, Ad Daulah Al Islamiyyah, 2002, p. 48) Bai'at adalah aqad

penyerahan kekuasaan oleh umat kepada seseorang yang dipilih dengan keridloannya. Maka penguasa hakikatnya adalah wakil umat di dalam menerapkan dan menjalankan Hukum-hukum Allah secara kaffah di tengah masyarakat.

Di masa Khalafaur Rosyidin, kepemimpinan politik Umat Islam digantikan oleh para Khalifah atau Imam. Para Khalifah adalah pengganti kepemimpinan politik Nabi Muhammad, dan mereka adalah Abu Bakar, Umar bin Khathab, Utsman bin 'Affan dan Ali bin Abi Thalib. Keempatnya menjadi khalifah di tengah-tengah umat setelah mendapatkan bai'at dari Umat Islam. Khalifah memiliki kekuasaan karena dibai'at adalah jelas dan tegas berdasarkan hadits-hadits *at tha'at* (keharusan taat kepada Imam / Khalifah). Ketaatan Umat wajib diberikan kepada orang yang mereka bai'at, yaitu khalifah. (Abdurrahman, 2014) Keberadaan Khalifah inilah yang mengantarkan setiap muslim bisa menunaikan kewajibannya untuk taat kepada Allah, Rosul-Nya dan ulil amri (QS 4:59), sekaligus menciptakan keadaan aman di dalam menjalani kehidupan (QS 24:55). Sedangkan Khalifah itu harus satu orang didasarkan pada hadits tentang haramnya kaum muslimin memiliki Khalifah lebih dari 2 orang. Hanya Khalifah yang berhak melakukan tabanni (adopsi) terhadap hukum-hukum syara'. Asas ini ditetapkan berdasarkan dalil Ijma' Shahabat. Ijma' Shahabat telah menetapkan bahwa hanya Khalifah yang berhak mengadopsi hukum-hukum syara', sehingga hukum syara' itu menjadi Undang-Undang yang bersifat mengikat seluruh warga negara.

Membangun Kembali Peradaban Islam

Merdeka atau berdaulat adalah kondisi di mana seseorang mampu untuk mengendalikan diri, mengatur diri tanpa terikat dengan belenggu-belenggu di luar dirinya. Kondisi sebaliknya adalah kondisi terjajah atau tergantung. Antony Anghie mengatakan bahwa konsep kedaulatan selalu muncul sebagai kounter terhadap diskriminasi rasial, subordinasi kultural dan eksploitasi ekonomi oleh pihak lain. Konfrontasi terhadap penjajahan adalah sentral bagi pembentukan hukum dan kedaulatan internasional. (Anghie, 2004, p. 3)

Kemerdekaan sesungguhnya tidak akan melekat pada sesuatu yang memiliki keterbatasan. Karena keterbatasan akan menyebabkan sesuatu tergantung pada yang lain. Dunia beserta seluruh isinya, termasuk manusia, adalah makhluk semata. Ciri makhluk adalah mereka diciptakan oleh sesuatu di luar dirinya, sehingga dia terbatas dalam keberadaannya. Dalam kondisi seperti ini, manusia memang tidak mungkin menggantungkan kedaulatan pada akal manusia. Karena kita paham, meskipun nilai keadilan, keharmonisan, kesejahteraan, keselamatan adalah nilai yang diimpikan oleh semua umat manusia, namun terealisasinya nilai-nilai tersebut secara adil untuk semua manusia pasti membutuhkan ukuran-ukuran / standar-standar yang berasal dari kekuatan yang memiliki kesempurnaan pengetahuan tentang hakikat alam semesta ini. Tentunya manusia, sebagai makhluk, sangatlah terbatas kemampuannya untuk

membuat ukuran bagi nilai-nilai tadi. Ukuran yang dibuat manusia selalu akan terbatas oleh kemampuan akalnya, dan terbatas juga oleh lingkup ruang dan waktu.

Disinilah kita menyaksikan bahwa Ideologi Kapitalisme tidak mampu merealisasikan seperangkat nilai-nilai kehidupan berupa keadilan, keharmonisan, kesejahteraan dan keselamatan untuk seluruh manusia, karena memang ideologi itu dibangun di atas kedaulatan akal manusia. Sehingga diberlakukannya ideologi ini, baik oleh individu, kelompok individu, negara bangsa, maupun organisasi internasional, hanya akan memberi keuntungan pada segelintir orang dan mengorbankan sebagian besar yang lain. Keuntungan itu pun sesungguhnya sebatas keuntungan materi yang difatnya sangat temporer / sesaat. Karena di akhirat, manusia tidak akan dimintai pertanggungjawaban berdasar seberapa banyak materi yang didapat. Kemerdekaan dan kedaulatan yang dibangun oleh Ideologi Kapitalisme hanyalah semu belaka.

Lantas bagaimana kita bisa mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatan yang hakiki ? Sesungguhnya manusia adalah makhluk dari Al Kholiqnya, yaitu Allah SWT. Allah menciptakan manusia dan membekali kehidupan manusia dengan potensi kehidupan berupa serangkaian kebutuhan hidup. Problem kehidupan manusia adalah bagaimana memenuhi keseluruhan kebutuhan hidup dengan efisien (mudah) dan efektif (benar). Untuk bisa memenuhi serangkaian kebutuhan hidup manusia dengan lengkap dan benar, Allah menciptakan alam semesta (ayat-ayat kauniyah) dan sekaligus wahyu, yaitu Al Quran (ayat-ayat qauliyah) untuk manusia. Kemudian Allah melengkapi kesempurnaan pengelolaan kehidupan dengan mengutus Nabi dan Rosulnya.

Manusia dibedakan dengan makhluk lainnya dengan adanya akal. Sekaligus dengan kekuatan akal itulah manusia dijadikan sebagai "*Khalifatullah fil Ardh*". Akal punya kekuatan untuk mengelola alam semesta. Hanya saja karena akal pun tetap terbatas, di mana akal hanya bisa memikirkan sesuatu yang terindra, sementara yang terindra oleh manusia selalu dibatasi oleh ruang dan waktu, maka pastilah akal tidak akan mampu membuat standar-standar kualitas kehidupan sekaligus aturan main kehidupan bersama yang manusiawi dan adil dan bisa berlaku universal. Tindakan rasional yang bisa ditempuh manusia untuk mendapatkan keadilan dan kebahagiaan sejati adalah dengan tunduk dan patuh kepada kekuatan di atas dirinya, yaitu Allah SWT. Di sinilah kita bisa memahami, bahwa sesungguhnya Islam diturunkan di muka bumi ini untuk mengarahkan penghambaan makhluk (manusia) kepada Al Kholiqnya dan menggantikan berbagai penghambaan makhluk (manusia) kepada sesama makhluk. Yang hendak diganti tidak sekedar penghambaan manusia kepada makhluk selain manusia, semisal matahari, gunung, patung, pohon beringin, dll, tetapi juga penghambaan manusia kepada sesama manusia. (Hawari 3-12)

Menempatkan kedaulatan di tangan Hukum Syara' artinya manusia menjadikan Allah dan Rosul-Nya sebagai sumber hukum dan pengaturan di dalam kehidupan mereka. Allah mengamanahkan pengaturan kehidupan di tangan para Nabi dan Rosul-Nya. Ketika era kenabian berakhir (Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir), maka estafet

pengaturan kehidupan diserahkan kepada para pengganti Nabi, yaitu para Khalifah. Era Kepemimpinan sesudah Nabi disebut dengan istilah Khalafaur Rasyidin. Allah melalui Rosul-Nya menyampaikan bahwa *"Al Imaamu Ro'in, fahuwa mas'ulun 'an ro'iyatihi"* (Seorang Imam / Penguasa adalah pengatur, pengelola kehidupan, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terkait pengelolaannya). (Abdurrahman, 2014, pp. 44-63)

Menggantungkan diri (tunduk dan patuh) kepada sesama makhluk adalah kesia-siaan. Kapitalisme esensinya adalah penghambaan manusia kepada sesama manusia. Sehingga Islam menawarkan mekanisme untuk menciptakan keadilan, keharmonisan, kesejahteraan, keselamatan bagi seluruh manusia, bahkan pada seluruh alam, dengan menjadikan tauhid sebagai dasar pandangannya terhadap dunia. (Al-Faruqi, 2001, pp. 109-111) Kemerdekaan hakiki tidak akan tercipta pada kehidupan manusia, kecuali manusia mau menghambakan dirinya kepada Penciptanya, yaitu Allah SWT. Kemerdekaan hakiki perlu dimaknai sebagai menjadikan Allah sumber kedaulatan, rujukan dalam pembuatan aturan main yang akan diberlakukan di muka bumi ini. Tentunya keberadaan kedaulatan Allah ini tidak hanya berlaku dalam skala individu, tetapi lebih-lebih dalam skala negara dan juga organisasi dunia. Kekuatan Kapitalisme, yang sudah diimplementasikan dalam skala individu, negara dan sistem dunia, juga hanya bisa dihadapi oleh kekuatan ideologi lain yaitu Islam, yang juga harus diimplementasikan dalam skala individu, negara dan sistem dunia. Inilah perubahan kehidupan yang sesungguhnya.

Perubahan sosial merupakan aktifitas yang sarat dengan subyektifitas. ('Athoyat, 1996, p. 21) Berpikir tentang perubahan selalu diawali dengan munculnya kesadaran akan masalah, yaitu tidak sesuai antara realitas dengan persepsi idealnya tentang realitas tersebut. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah ungkapan "Kezholiman bukanlah faktor pendorong berlangsungnya revolusi, akan tetapi persepsi tentang kezholiman itulah yang akan mendorong terjadinya revolusi". Karena itulah persepsi tentang fakta adalah syarat asasi untuk aktivitas berpikir tentang perubahan. Tahap berikutnya adalah kesadaran terhadap fakta pengganti dari fakta kerusakan tersebut. Dan itulah sebabnya bahwa aktivitas perubahan itu harus menuju kepada tujuan tertentu dan tidak semata-mata beraktivitas dengan tanpa tujuan atau sia-sia.

Nabi Muhammad SAW memberikan teladan kepada umatnya dalam hal melakukan perubahan masyarakat. Umat Islam juga harus merujuk kepada Rosul di dalam melakukan perubahan sosial. Untuk perubahan sosial yang syar'i dewasa ini, kita harus memahami realita sistem sosial di mana Umat Islam hidup. Sejak Khilafah Utsmaniyyah runtuh di awal abad ke-20, Umat Islam kehilangan pelindungnya di dalam menerapkan Hukum-hukum Islam. Umat Islam tidak punya independensi di dalam menerapkan Hukum Islam secara kaffah karena Umat Islam hidup dalam Sistem Pemerintahan Kufur. Kondisi Umat Islam hari ini mirip dengan kondisi Umat Islam dalam periode Dakwah Mekah. Maka perubahan masyarakat yang dibutuhkan hari ini

adalah perubahan menuju bisa diterapkannya kembali Syariat Islam secara Kaffah dalam wadah Khilafah Islamiyyah. Proses seperti ini mengharuskan Umat Islam menggali proses dakwah periode Mekah.

Yang harus dicontoh dari perjalanan dakwah Rosul adalah karakteristik Dakwah Islam yang dilakukan oleh Rosul dan para shahabat nya dalam periode Mekah. Pertama, Rosul melakukan dakwah secara berjamaah, dengan Rosul sebagai pemimpin dan Umat Islam sebagai anggotanya. Yang kedua, Rosul melakukan aktifitas penting berupa aktifitas pemikiran (*fikriyah*), yaitu menyebarkan pemikiran Islam berupa Aqidah dan Hukum Islam sebagai kounter terhadap pemikiran-pemikiran kufur jahiliyyah yang tidak bersumber pada wahyu. Ketiga, Rosul melakukan aktifitas politik (*siasiyah*), berupa mengkritisi tatanan politik masyarakat Quraisy yang berdiri di atas fondasi pemikiran kufur jahiliyyah tersebut. Aktifitas politik inilah yang menyebabkan dakwah Rosul dan para sahabatnya dihadang oleh kekuatan penguasa Quraisy (Abu Lahab, Abu Jahal dan kelompoknya).

Aktor perubahan masyarakat yang berupa jamaah dengan aktifitas pentingnya berupa aktifitas fikriyyah dan siasiyah inilah yang dewasa ini disebut dengan partai politik (parpol). Keberadaan Parpol Islam pertama yang meniti jalan untuk mewujudkan penerapan Hukum Islam secara menyeluruh, bisa dilihat pada perjalanan dakwah Rosul di Masa Mekah. Masa Mekah adalah masa di mana kaum muslimin hidup dalam Sistem yang tidak Islam. Begitu Muhammad SAW diangkat menjadi Rosul, maka Beliau langsung membentuk jamaah dari kalangan orang-orang yang mau menerima dakwahnya. Mereka adalah para shahabat. Dalam periode dakwah Mekah ini, Rosul adalah pemimpin parpol Islam dengan anggotanya adalah para shahabat. Dibawah kepemimpinan Rosul, parpol Islam ini menjalankan aktifitas utamanya yaitu aktifitas politik, berupa mengoreksi standarisasi ma'ruf munkar yang diberlakukan oleh penguasa Kafir Quraisy. Melekat dalam aktifitas politik ini adalah aktifitas merombak pemikiran-pemikiran batil yang melandasi diberlakukannya tatanan kehidupan yang tidak shahih.

Pada periode Mekah, yaitu masa ketika parpol Islam hidup dalam Sistem Kehidupan Kufur, target utama aktifitas Parpol Islam adalah mengganti sistem kehidupan Kufur menjadi sistem Islam (*yad'una ila al khoir*, yaitu mengajak umat untuk mengganti kekufuran dengan menerapkan Islam). Aktifitas Parpol pada periode ini meliputi beberapa tahapan : pertama, Pembinaan dan Pengkaderan, yang lebih banyak dilakukan secara sirriyah (rahasia) dan *face to face*. Tahap ini merupakan tahap membentuk motor penggerak bagi perjalanan dakwah Islam. Kedua, Interaksi terbuka dengan Masyarakat, yang di dalamnya terjadi benturan pemikiran yang hebat dan pergolakan politik yang berat, sampai pemikiran Islam bisa diterima oleh masyarakat. Ketiga, Pelaksanaan Sistem Islam, yang dimulai dengan penyerahan kekuasaan oleh rakyat kepada kekuatan Islam (Baiat Aqobah II).

Penutup

Islam memandang kemajemukan budaya sebagai sunnatullah dan mendorong kreatifitas untuk mengembangkan bentuk-bentuk kehidupan yang bervariasi dan efisien. Pandangan ini sesuai dengan karakter manusia sebagai makhluk yang berakal dan memiliki naluri baqo' (naluri mempertahankan dirinya sebagai individu). Hanya saja manusia membutuhkan standar baku dalam mengembangkan kreatifitasnya, supaya kehidupannya aman dan benar sekaligus efisien . Pada wilayah mubah dan teknis, sesungguhnya Allah membiarkan manusia untuk memilih melakukan atau tidak suatu perbuatan dan bebas memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan alat-alat kehidupan. Pilihan bebas ini pasti akan mengantarkan berbeda-bedanya pola kehidupan satu masyarakat Muslim dengan masyarakat Muslim lainnya, peluang terjadinya keberagaman. Namun Allah juga menetapkan bahwa ada jenis-jenis perbuatan yang wajib, sunnah, makruh dan haram. Manusia tidak punya pilihan kecuali tunduk kepada aturan Allah. Di sinilah peluang terjadinya keseragaman pola-pola kehidupan masyarakat Muslim.

Penerapan standar baku yang aman dan benar membutuhkan manusia menerapkan Hukum-Hukum yang berasal dari Allah SWT. Penerapan Hukum Syara' secara praktis di tengah-tengah masyarakat mengharuskan adanya wadah yang otoritatif, yaitu Negara Islam (Khilafah Islamiyyah). Tanpa Negara Islam, tidak akan bisa diterapkan Hukum Syara' yang kaffah. Karena Umat Islam hari ini belum bisa memberlangsungkan kehidupan Islam, berupa penerapan Islam Kaffah oleh Khilafah Islamiyah, maka perlu ada proses perubahan masyarakat. Proses ini harus mengikuti metode yang dicontohkan oleh Rosul.

Wallaahu A'lam

Bibliografi

- 'Athoyat, A. (1996). *At Thoriq* . Beirut: Daarul Bayariq.
- Abdurrahman, H. (2014). *Diskursus Islam Politik & Spiritual*. Bogor: Al Azhar Press.
- Al-Faruqi, I. R. (2001). *Atlas Budaya Islam ; Menjelajah Khasanah Peradaban Gemilang*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Anghie, A. (2004). *Imperialism, Sovereignty and The Making of International Law*. New York: Cambridge University Press.
- Deliarnov. (2006). *Ekonomi Politik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Geoffrey Roberts & Jill Lovecy. (1984). *West European Politics Today*. New Hampshire: Manchester University Press.
- Hawari, M. (2011). *ReIdeologi Islam*. Bogor: Al Azhar Press.
- Husaini, A. (2005). *Wajah Peradaban Barat : Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Imarah, M. (1999). *Islam dan Pluralitas : Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Jones, W. S. (1991). *The Logic of International Relations*. New York: HarperCollins Publishers Inc.
- Koentjaraningrat. (1986). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- MUI, M. U. (2005, Juli 28). Retrieved Februari 12, 2017, from [mui.or.id: https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/12.-Pluralisme-Liberalisme-dan-Sekularisme-Agama.pdf](https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/12.-Pluralisme-Liberalisme-dan-Sekularisme-Agama.pdf)
- Nabhani, T. A. (2002). *Ad Daulah Al Islamiyyah*. Beirut: Darul Ummah.
- Nabhani, T. A. (2002). *Nidzomul Hukmi fil Islam*. Beirut: Darul Ummah.
- Rais, M. A. (2008). *Agenda Mendesak Bangsa : Selamatkan Indonesia*. Yogyakarta: PPSK Press.
- Suryana, Y. (2017). Akulturasi Kebudayaan (Hindu-Budha-Islam) Dalam Buku Teks Pelajaran Sejarah Nasional Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Volume 26, Nomor 1*.

Sovereignty and the Right of Citizenship: The Case Study of the Rohingya Ethnic in Myanmar

Nuriyeni K. Bintarsari¹

¹*Department of International Relations,, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto*

Corresponding e-mail: nuriyeni.bintarsari@unsoed.ac.id

Abstract



Citizenship is part of human rights, and states as formal institutions in international systems are the only political actor able to provide that right. To grant, to withdraw or to deny citizenship is part of a state's sovereignty. The Rohingya case in Myanmar is one example of how this right is prone to be abused by the state in order to discriminate certain ethnicities, religions or communities within their state boundaries. The Human Rights Watch Report and the annual report of Myanmar by the UNHCR showed that the Rohingya people who fled the country are facing greater problems of inhumane living conditions, lack of sufficient food, lack of education, unemployment and countless legal problems. The majority of Rohingya refugees are concentrated at Cox's Bazar, at the south part of Bangladesh. They are in great need of humanitarian assistance, as shown in the UNHCR report 2019 and the Human Rights Watch Report. This paper will seek to analyze the human rights abuse suffered by the Rohingya people, and to offer some solution to alleviate their condition.

Keywords

Myanmar, Rohingya, Citizenship Rights, Sovereign

Introduction

The Rohingya Ethnic have been living in dire conditions for as long as they have resided in Myanmar (then Burma). Rohingya ethnics originally came from Bangladesh during the British colonization in Myanmar in the 18th to 20th century and they were not considered as part of Myanmar's citizenry ever since the independence year of Myanmar in 1948. There are two ethnics Muslims in Myanmar: Rohingya and Kaman, which mostly reside in the Arakan state in Myanmar. While Rohingya is descended from Bangladesh nations, the Kaman are Muslims from Burma's ethnic population and therefore they are considered as citizens by the Myanmar government. The Arakan state is located in the upper south of Myanmar and host the largest number of Rohingya ethnics because geographically it is located on the border between Myanmar and Bangladesh.

During May 2012-April 2013, several civilian conflicts erupted between Arakanese and Rohingya. Violence attacks took place in nine townships of the Arakan state, and on October 21-24 resulted in the deaths of “at least 70 Muslims massacred in Mrauk-U, including 28 children (Human Rights Watch Report 2013).” Approximately a hundred thousand people were displaced from their homes; this included 75,000 Muslims (Human Rights Watch Report 2013). The trigger for those violent attacks was the rape and murder of a Buddhist woman by three Muslim men. The Human Rights Watch reports stated that on “May 28, 2012: Three Muslim men raped and murdered Thida Htwe, a 28-year-old Arakanese Buddhist woman in Kyaw Ne Maw village, Ramri Township. Police arrest them and later report that one of the men committed suicide in police custody. The remaining two are brought to court, found guilty, and sentenced to death (Human Rights Watch Report 2013).” What started as a regular criminal act eventually became an ongoing ethnic religious conflict between Buddhist Arakanese and Muslim Rohingya communities.

Myanmar government has a significant role in this conflict; the police forces that were supposed to protect the Rohingya people during conflict acted as passive bystanders. The Human Rights Watch reported, “The October [2012] attacks were against Rohingya and Kaman Muslim communities and were organized, incited, and committed by local Arakanese political party operatives, the Buddhist monkhood, and ordinary Arakanese, at times directly supported by state security forces (Human Rights Watch Report 2013).” This fact led to the conclusion that the May 2013-April 2013 violent attacks on the Rohingya and Kaman Muslims were resulted from the state-induced discriminatory policies toward Muslim minorities in Myanmar.

The 1982 Citizenship Law discriminately excludes Rohingya ethnics from gaining citizenship based on ancestry and the Rohingya lack proof of their legal residencies in Myanmar. Norms and ethics of the state’s right to define citizenship are in question in this case. Is it ethical for states to deliberately deny citizenship for particular groups based on something that group could not choose such as a genealogical reason? Is it ethical for the state to neglect the protection of human rights for the non-citizen groups inside their borders? What norms should sovereign states consider in formulating their citizenship law, in order to be ethical?

Finnemore and Sikkink have been asking about norms in international relations; they formulated their questions as: “How do we know a norm when we see one? How do we know norms make a difference in politics? Where do norms come from? How do they change? We are particularly interested in the role norms play in political change (Finnemore, Sikkink 1998).” This essay is not concerned with answering all of those questions; instead it will try to merge the question on “how do we know norms make a difference in politics” into the question of the state’s rights in defining citizenship. To acquire a citizenship is one of the norms to be a legal citizen in a state, without citizenship there will be obstacles, limitations and other hindrances for people to fully

receive their rights inside a state's border. In the international system, international law dictated that only sovereign states are able provide citizenship as it concerns with state's interests and security.

The Realist perspective strongly supports the state sovereignty right in citizenship's endowment to whoever fits their rules. On the other hand, the Cosmopolitan perspective criticizes this right as discriminatory and incompatible with global justice values. The Realist perspective represents the pragmatic views of world politics while the Cosmopolitan perspective represents the Idealist one. Terry Nardin assesses that "thinking about international affairs has oscillated between Idealism and Realism throughout the modern period. Moralists continue to search for a way to combine what is reasonable in each in an ethically defensible middle between those extremes (Nardin 2011)." The Cosmopolitan perspective has some notable proponents such as Immanuel Kant, Hans Kung and Fred Dallmayr. On the other hand, the Realist perspective also has numerous proponents such as Hans J. Morgenthau, Kenneth Waltz, John J. Mearsheimer, and many others.

Based on the explanation above, this essay will focus on answering the question "**How the sovereignty rights of a state to define citizenship impact minorities?**" In answering that question, I will examine the Rohingya ethnic and violence in Myanmar in the next section. This section will be followed by the Realist and Cosmopolitan perspectives on state sovereignties and the last section will be a conclusion. In the conclusion, I will assess previous sections in which I explain about the Rohingya ethnic and violence in Myanmar, the Realist and Cosmopolitan perspectives and some suggestions in the case of Rohingya ethnic in Myanmar.

Research Method

This research was a descriptive qualitative research. The primary tool to extract data was by using a library study, in which data from online sources such as Human Rights Watch websites, online journal articles, and non-online sources such as books were utilized to analyze the conflict between Rohingya ethnic and the government of Myanmar.

Literature Review

The Realist and Cosmopolitan Perspectives on State Sovereignties

State sovereignty and non-intervention toward other sovereignty are perceived as one of the ways to maintain peace and stability in the international politics. There are two perspectives in the International Relations Theory that have opposing view on state sovereignty and state exclusive rights on citizenship, they are the Realist and the Cosmopolitan perspectives. Citizenship is an absolute right of a sovereign states from the Realist perspective. States are the only political actor in the world that can grant this right to people. This core belief of Realism has driven many states and other

international political actors to put great emphasize in attaining power and securing their own interests in the modern world. For example, during World War I, World II, The Cold War, and in intrastate conflict as in the case of violent attacks toward the Rohingya and Kaman Muslims in Myanmar. In *Politics Among Nations*, Morgenthau also discusses sovereignty in the modern-day nation states. He defines sovereignty as:

“Sovereignty points to a political fact. The fact is the existence of a person or group of persons who, within the limits of a given territory, are more powerful than any competing person or group of persons and whose power, institutionalized as it must be in order to last, manifest itself as the supreme authority to enact and enforce legal rules within that territory (Morgenthau 1972).”

Sovereignty enable state to formulate its own norms, law, rules and procedures that will be enforce within its border. This includes sole right in defining citizenship. In the case of Myanmar, the Human Rights Watch as an international organization that concern on human rights issues can only provide recommendations and could not enforce Myanmar government to abide by those recommendations. Neighboring states and the UNHCR as part of the UN could not force Myanmar to abide those recommendations either, however there is always a possibility that Myanmar government will comply with that recommendations in fear of risking supports and credibility from international community. In the Realist perspective, states are rational political actors that will calculate their actions to maximize benefit. The Realist perspective will defend the right of Myanmar government to decide whether the Rohingya ethnic is eligible or not eligible to procure citizenship based on Myanmar’s interest. However, there is a middle ground of political realism in order to be ethical. Nardin explore about middle ground political realism in the discussion of just war theory and the English School, in which Nardin (2011) argue “the ‘middle’ here is not a compromise between morality and interest but a morally acceptable way of recognizing the claims of law even when they clash with those of morality.” The middle way seeks to balance Realist and Cosmopolitan tenets in achieving social justice. The Cosmopolitan perspective is now questioning the extent of sovereignty that states can exert in order to stay legitimate and not threaten the values of human rights and social justice. One of the main notions of the Cosmopolitan perspective is:

“Challenges the idea that state membership and political boundaries are of any significant normative standing. From a cosmopolitan perspective, prioritizing national interests in foreign policy would contradict the moral principle of impartiality and equal concern for all relevant subjects...on the other hand sovereignty constitutes the political expression of the state’s moral standing and leads to the philosophical defence of its self-sufficiency in external decision-making (Ypi 2008).”

Although Ypi talks in the context of European Union case studies, but the notion above can also be applied to the case of Myanmar. The government of Myanmar should

consider ethics of social justice in their treatment toward minority groups inside their border to prevent the bloodshed caused by civilian conflict between different ethnic religious groups. Ypi (2008) also discusses cosmopolitan tenets as “derived from the Stoic paradigm that promised to maintain universal secularism and subjective autonomy, earthly solidarity and everyday tolerance, was broadly acknowledged by the Enlightenment *philosophes*.” Cosmopolitan would argue that one of the most important thing states should perform is the attainment of global justice, because global justice will ensure that the objectives of the Cosmopolitan tenets are achieved. The Cosmopolitan perspective understands that legitimacy of states might hinder attainment of those objectives, so it discusses legitimacy in relation to people’s rights. According to Walzer (in Beitz 2009), “a legitimate state is a people governed in accordance with its own traditions.” Walzer’s notion further empathize by Charles Beitz, who formulate five reasons on juxtaposing the people’s rights and states legitimacy as seen below:

1. A state’s people have individual rights to participate in a collective process of determining the character of their political and social lives. The idea of a social contract is a metaphor for this process. The presumption of legitimacy is necessary to protect people in the exercise of these rights.
2. Well-functioning states offer the best prospect of protecting the rights to life and liberty of their individual members. But states are most likely to become and remain well functioning when their own people are left free to exercise the responsibility for the development and reform of their institutions.
3. Insiders have an epistemic privilege not shared by outsiders, who usually do not know enough about a society’s history and traditions to judge how effectively its government represents or embodies the political values of the community.
4. We know from historical experience that self-interested states not subject to any effective form of supranational accountability may be tempted to rationalize measures taken to serve their own interests in humanitarian terms. Allowing any exception for intervention is dangerous. The presumption of legitimacy is a way of imposing a high burden of proof.
5. Like individuals, different communities left to develop in their own ways produce a diversity of cultural and political values; this is the inevitable result of the free exercise of human creativity (2009).

As in the case of Rohingya and the roles of the Human Rights Watch in mediating the conflict between Myanmar’s government and Rohingya ethnics, it also questioned Myanmar legitimacy while it remains silent and act as a passive bystander in conflict. The Human Rights Watch is an international Non-Governmental Organization (NGOs) and it is importance because of the consequences of globalization, when the national boundaries have become more profound and diminished at the same time. The

idea of global governance cannot be separated from Cosmopolitanism that embodies the quest for global ethics. Fred Dallmayr (2011) examines that “among all philosophical orientations, modern Western philosophy is most strongly universalist in outlook.” Dallmayr also ventured into the history of the global meeting between different religious entities to form “a Parliament of the World’s Religions” that generated a widely discussed “declaration toward a global ethics, a document meant to supplement and provide moral underpinnings for the Universal Declaration of Human Rights of 1948. The document was initially drafted by the German theologian Hans Kung (Dallmayr 2011).” Hans Kung (in Dallmayr 2011) once said “No survival without a world ethic. No world peace without peace between the religions. No peace between the religions without dialogue between the religions.” Dallmayr strongly supports the idea of moral globalism; he believes that “moral globalism...surely has important merits. In a world torn asunder by multiple forms of strife, nothing seems more timely than to be reminded of our shared humanity and of the Universalist aspirations present in religious teachings and prominent philosophical traditions (2011).” This notion underlies what the Cosmopolitans strive for in the international politics.

In relation to the state’s legitimacy and ethics, Jack Donnely (2013) argues,

“A set of human rights thus can be seen as a standard of political legitimacy. The Universal Declaration of Human Rights, for example, presents itself as a standard of achievement for all peoples and all nations. To the extent that governments protect human rights, they are legitimate.”

This is the essential point of Cosmopolitan tenet; protection of human rights is the focal point in the legitimacy of states. There are different views on how one state perceive the needs to grant minority groups inside its border as deserve to be protected and grant citizenship. Citizenship right is a part of human rights fulfillment but states have exclusive rights to provide it. Cosmopolitan would argue that citizenship is not a compulsory precondition in which states may neglect its responsibility to protect human lives and implement social justice in the absence of that right. How does one define human rights based on the notion of social justice? Donnely (2013) examines that human rights are:

- a) The minimum set of goods, services, opportunities, and protections that are widely recognized today as essential prerequisites for a life of dignity, and
- b) A particular set of practices to realize those goods, services, opportunities, and protections. No more. But no less.

In the case of civilian conflict in Myanmar, one can learn from reports delivered by the Human Rights Watch and the UNHCR that “the minimum set of goods, services, opportunities, and protections that are widely recognized today as essential prerequisites for a life of dignity (Donnely 2013),” has been neglected by Myanmar government. Myanmar authorities deliberately imposed discriminatory policies

toward Rohingya and Kaman Muslims, although the latter is indeed a legal citizen group.

Results

There is general acknowledgement that one of the sources of communal conflict in the Arakan state is over the citizenship status of the Rohingya ethnic. A denial of citizenship for this group was based on the 1982 Citizenship Law, which effectively prohibits the Rohingya ethnic from acquiring Myanmar citizenship because of their ethnic origins, and in some part, also because of their religion, which is not compatible with the Buddhist majority population of Myanmar. The violence attacks on the Rohingya and Kaman Muslims communities have drawn the Human Rights Watch to visit the location, interviewed some eye witnesses, made a series of documentation and published a report out of the conflict zones in 2013. In its 2013 report, The Human Rights Watch advised the Myanmar government to adopt several procedures on citizenship rights for the Rohingya ethnic community. The procedures are:

- Urgently amend the 1982 Citizenship Law to eliminate provisions that are discriminatory or have a discriminatory impact on determining citizenship for reasons of ethnicity, race, religion or other protected status. Ensure that the amended law is enforced to provide citizenship without discrimination.
- Revise the Citizenship Act in accordance with article 7 of the Convention on the Rights of the Child to ensure that Rohingya children have the right to acquire a nationality where otherwise they would be stateless.
- Cease including ethnic and religious biographical details on national identity cards, as a matter of anti-discrimination practice and policy.

There are also two additional recommendations for the government to implement regarding this discriminatory national census on the Rohingya ethnic, they are:

1. Ensure that the national census currently underway, directed by the Ministry of Immigration and Population and supported by the UN Population Fund, fully complies with international standards, is non-discriminatory, and covers all populations in Burma, including Rohingya.
2. Ensure that Rohingya are employed to conduct the census in Rohingya areas and communities in Arakan state (Human Rights Watch Report 2013).

Neighboring states such as Thailand, Malaysia, Indonesia and Bangladesh, which are also impacted by the influx of refugees, have refused to accept the refugees. In the case when there are already Rohingya camps inside their borders, those countries are deemed negligent in not providing enough protection and livelihood for the Rohingya people to survive and build back their lives in humane conditions. The Human Rights Watch offers nine recommendations to Thailand, Malaysia and Bangladesh in dealing with Rohingya's refugee. One of the recommendations urge those affected states to:

“Press the Burmese government to end human rights violations and discriminatory policies, including with respect to citizenship, against the Rohingya and other vulnerable minorities, making clear that such actions will harm Burma’s bilateral relationship and international standing (Human Rights Watch Report 2013).”

The above recommendation comes from the general understanding that the influx of Rohingya refugees and the problem of Rohingya ethnics as Internally Displaced Persons (IDPs) inside the Myanmar’s borders happened as a result of state’s discriminatory policies. Rohingya ethnic as minority group in Myanmar should be granted protection by state’s apparatus such as police and army forces during civil conflict, an obligation that failed to be fulfilled by Myanmar government in May 2012 conflict. The Jakarta Post reported that on early May 2015, “Boats carrying around 500 members of Myanmar’s long-persecuted Rohingya Muslim community washed to shore in western Indonesia on Sunday, with some in need of medical attention, a migration official and human rights advocate said (Mason 2019).”

The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) is also involved in this problem, in its country report on Myanmar in 2015, the UNHCR stated that:

“The main groups of people of concern to UNHCR in Myanmar in 2015 include people without citizenship, IDPs, refugees, returnees and host communities. In 2012, violence in Rakhine state forced around 140,000 people to flee their homes. The majority live in government-designated IDP camps near the state capital, Sittwe, and in surrounding township. In Kachin State and northern Shan state, more than 100,000 IDPs are displaced and in need of continued humanitarian assistance. They are living in camps in both government-controlled areas, and those under the control of non-state actors. UNHCR also assists the more than 810,000 people without citizenship in Myanmar. In south-eastern Myanmar, UNHCR supports communities hosting the estimated 230,000 IDPs living where the organization is operational (UNHCR 2015).”

From the data shown by the UNHCR above, it is clear that in the case of state’s failure to protect certain groups or communities inside their borders, it will create subsequent problems for neighboring states and even for the international community. In the name of sovereignty, states are bound to protect or commonly known as state responsibility to protect (RtoP). Otherwise, it will pose greater problems for other nation states and create instability within surrounding region.

Ethical conducts dictated that with rights come responsibilities. This default also applied in the discussion of states’ rights to be sovereign, which bear the consequences for states to have responsibility to protect. Coicaud and Wheeler (2008) examine that “in this perspective, based on the internationalization of the democratic idea of human rights, solidarity has a universalist character. The idea being that, whilst human beings live in a plurality of cultures, which exhibits a range of particular moral practices, all

have basic needs and rights that have to be respected.” This idea shares similar notions with the Cosmopolitan perspective, which I will analyze more in the next section. Another scholar, Jeremy Moses, has elaborates the presumption that “in relation to the RtoP, debate has revolved almost exclusively around the de jure understanding of sovereignty, and indeed sovereignty as a normative principle is explicitly rendered as the key conceptual feature of the RtoP (Moses 2014).” The definition of de jure sovereignty is:

“Points squarely toward principles that have been constructed through a process of social interaction that generates standards of legitimacy and processes of recognition among states...de jure theorists of sovereignty is a focus upon how the norms, laws, rules and standards that govern the system allow or encourage states to behave in certain ways (Moses 2014).”

Recognition among states as stated in the definition above leads to solidarity among sovereign states. This essay has no purpose to discuss the de jure definition of sovereignty in details, but it will utilize the above definition to help analyze on how Myanmar’s government discriminatory citizenship law impact the well-being of Rohingya ethnic.

Conclusion

Citizenship is part of human rights, and states as formal institutions in international systems are the only political actor able to provide that right. To grant, to withdraw or to deny citizenship is part of a state’s sovereignty and other international actors such as the United Nations or other states cannot interfere without the state’s consent. The Rohingya case in Myanmar is one example of how this right is prone to be abused by the state in order to discriminate against certain ethnicities, religions or communities within their state boundaries. The Human Rights Watch Report and the 2015 report of Myanmar by the UNHCR showed that the Rohingya and Kaman Muslims that fled the country are facing greater problems of inhumane living conditions, lack of sufficient food, lack of education, unemployment and countless legal problems. There are hundreds of thousands Rohingya people as internally displaced persons in Myanmar and thousands more are becoming illegal migrants in neighboring countries, such as in Indonesia, Thailand, Myanmar and Bangladesh. Numerous incidents of sinking ships, deaths on boats, and refusal of entry in certain ports had become headlines in major international media nowadays. The majority of Rohingya refugees are children, women and elderly people; they are in great need of humanitarian assistance, as shown in the UNHCR report 2015. The Myanmar government as primary actor to provide solution for this issue has been given several recommendations by the Human Rights Watches. One of the initial steps is to end the discrimination in 1982 Citizenship Law. The Rohingya ethnics should be granted citizenship rights and fully assimilated into Myanmar nation. By gaining citizenship, the Rohingya ethnics will be able to go to

public schools and seek decent employment; in short they will be able to seek means to life in dignity.

In analyzing this issue, I argue that there are two perspectives needed to analyze this matter; one is the Realist perspective and on the other is the Cosmopolitan perspective. The Realist perspective supports the sovereignty right of a state in providing citizenship to whoever qualify and says that states have the sole right to decide criteria and requirements of citizenship. Hans J. Morgenthau and Terry Nardin are the proponents of this stand, and they formulate the Realist tenet which emphasize on sovereignty, power and security of states. On the other hand, Cosmopolitan challenges this notion by insisting that in the international system, the attainment of global justice is the main goal. States legitimacies and sovereignties are only legal whenever social justice and protection of human rights present inside states borders. I cited some scholars that work on the Cosmopolitan perspectives, such as: Fred Dallmayr, Lea Ypi, Hans Kung, Jack Donnely, and Charles Beitz. The Realist and the Cosmopolitan perspectives are always present in the international politics. Terry Nardin examines that the middle way of exercising Realist and Cosmopolitan tenets are what states struggle to do in order to attain their interests in ethical ways.

Bibliographies

- Beitz, Charles R. Winter 2009. "The Moral Standing of States Revisited". *Ethics & International Affairs* 23(4): 325-347.
- Bellamy, Alex J. 2006. "Whither the Responsibility to Protect? Humanitarian Intervention and the 2005 World Summit." *Ethics & International Affairs* 22(4): 143-169.
- Coicaud, Jean-Marc, and Nicholas J. Wheeler. 2008. *National Interest and International Solidarity: Particular and Universal Ethics in International Life*. United Nations University Press
- Dallmayr, Fred. 2003. "Cosmopolitanism: Moral and Political." *Political Theory* 31: 421-442
- Donnelly, Jack. 2013. *Universal Human Rights: In Theory and Practice*. 3rd Edition. Cornell University Press.
- Finnemore, Martha, and Kathryn Sikkink. Autumn 1998. "International Norm Dynamics and Political Change." *International Organization* 52(4): 887-917.
- Morgenthau, Hans J. 1972. *Politics Among Nations; The Struggle for Power and Peace*. Knopf
- Moses, Jeremy. 2014. *Sovereignty and Responsibility: Power, Norms and Intervention in International Relations*. Palgrave Macmillan
- Nardin, Terry. March 2011. "Middle-Ground Ethics: Can One Be Politically Realistic Without Being a Political Realist?." *Ethics & International Affairs* 25(01): 7-16.

Ypi, Lea. 2008. "Sovereignty, Cosmopolitanism and the Ethics of European Foreign Policy." *European Journal of Political Theory* 7: 349-364.

Internet Sources

015 UNHCR Country Operations Profile-Myanmar. Available at:
<http://www.unhcr.org/pages/49e4877d6.html>

Human Rights Watch Report. "All You Can Do is Pray" Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma's Arakan State. April 2013. Available at:
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0413_FullForWeb.pdf

Mason, Margie. "500 Rohingya Muslims from Myanmar wash to shore in Indonesia." The Jakarta Post.

Available at: <http://www.thejakartapost.com/news/2015/05/10/500-rohingya-muslims-myanmar-wash-shore-indonesia.html>



Diterbitkan oleh

**Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia
(AIHII)**

Bekerja sama dengan

**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Udayana, Denpasar, Bali**

(c)AIHII, 2019